BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4272);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
dan
BUPATI TAPANULI UTARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :
   1) Semula..... Rp. 1.413.624.731.729
   2) Bertambah/ (Berkurang)..... Rp. 28.770.082.392
   Jumlah Pendapatan setelah Perubahan.... Rp. 1.442.394.814.121

2. Belanja :
   1) Semula..... Rp. 1.459.049.211.258
   2) Bertambah/ (Berkurang)..... Rp. (13.982.170.741)
   Jumlah Belanja setelah Perubahan..... Rp.1.445.067.040.517
   (Defisit) setelah Perubahan..... Rp. (2.672.226.396)

3. Pembiayaan Daerah :
   a. Penerimaan Pembiayaan Daerah:
      1) Semula..... Rp. 67.330.479.529
      2) Bertambah/ (Berkurang)..... Rp. 7.751.096.425
      Jumlah Penerimaan setelah Perubahan..... Rp. 75.081.575.954

   b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah :
      1) Semula..... Rp. 21.906.000.000
      2) Bertambah/ (Berkurang)..... Rp. 50.503.349.558
      Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan.... Rp. 72.409.349.558
      Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan..... Rp. 2.672.226.396
      Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan..... Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah :

1) Semula.....	Rp.	163.280.256.947
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	17.894.031.832
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp.181.174.288.779

b. Pendapatan Transfer :

1) Semula.....	Rp.	1.219.725.532.100
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	13.426.722.060
Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan		Rp. 1.233.152.254.160

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :

1) Semula.....	Rp.	30.618.942.682
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	(2.550.671.500)
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan		Rp. 28.068.271.182

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah :

1) Semula.....	Rp.	30.209.843.179
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	2.050.000.000
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan		Rp. 32.259.843.179

b. Retribusi Daerah :

1) Semula.....	Rp.	8.614.100.000
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	870.557.000
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan		Rp. 9.484.657.000

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :

1) Semula.....	Rp.	10.150.000.000
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	(150.000.000)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 10.000.000.000

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah :

1) Semula.....	Rp.	114.306.313.768
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	15.123.474.832
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan		Rp.129.429.788.600

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Transfer Pemerintah Pusat:

1) Semula..... Rp. 1.168.844.693.000

2) Bertambah/ (Berkurang)..... Rp. 6.327.113.213

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan Rp. 1.175.171.806.213

b. Transfer Antar Daerah :

1) Semula..... Rp. 50.880.839.100

2) Bertambah/ (Berkurang)..... Rp. 7.099.608.847

Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan Rp. 57.980.447.947

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah :

1) Semula..... Rp. 16.745.942.682

2) Bertambah/ (Berkurang)..... Rp. 0

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 16.745.942.682

b. *Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan*

1) Semula..... Rp. 13.873.000.000

2) Bertambah/ (Berkurang)..... Rp. (2.550.671.500)

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan setelah Perubahan Rp. 11.322.328.500

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Operasi :

1) Semula..... Rp. 1.043.615.563.395

2) Bertambah/ (Berkurang)..... Rp. (44.898.353.907)

Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan Rp.998.717.209.488

b. Belanja Modal :

1) Semula..... Rp. 162.308.226.046

2) Bertambah/ (Berkurang)..... Rp. 11.198.751.983

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp.173.506.978.029

c. Belanja Tidak Terduga:

1) Semula..... Rp. 10.672.000.000

2) Bertambah/ (Berkurang)..... Rp. 2.444.614.000

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 13.116.614.000

d. Belanja Transfer:
   1) Semula..... Rp. 242.453.421.817
   2) Bertambah/ (Berkurang)..... Rp. 17.272.817.183
   Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan Rp. 259.726.239.000

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
   a. Belanja pegawai :
      1) Semula..... Rp. 641.221.750.293
      2) Bertambah/ (Berkurang)..... Rp. (25.622.057.999)
      Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp.615.599.692.294

   b. Belanja Barang dan Jasa :
      1) Semula..... Rp. 316.617.936.539
      2) Bertambah/ (Berkurang)..... Rp. 36.545.028.181
      Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp.353.162.964.720

   c. Belanja Hibah :
      1) Semula..... Rp. 79.493.398.563
      2) Bertambah/ (Berkurang)..... Rp. (55.556.324.089)
      Jumlah belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 23.937.074.474

   d. Belanja Bantuan Sosial
      1) Semula..... Rp. 2.132.000.000
      2) Bertambah/ (Berkurang)..... Rp. 735.000.000
      Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 2.867.000.000

   e. Belanja Bunga
      1) Semula..... Rp. 4.150.478.000
      2) Bertambah/ (Berkurang)..... Rp. (1.000.000.000)
      Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 3.150.478.000

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
   a. Belanja Modal Tanah :
      1) Semula..... Rp. 0
      2) Bertambah/ (Berkurang)..... Rp. 0
      Jumlah belanja Tanah setelah Perubahan Rp.0

   b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin :
      1) Semula..... Rp. 34.711.732.123
      2) Bertambah/ (Berkurang)..... Rp. 11.473.867.487
      Jumlah Peralatan dan Mesin setelah Perubahan Rp.46.185.599.610

c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung :
   1) Semula..... Rp. 32.790.717.280
   2) Bertambah/ (Berkurang)..... Rp. (662.600.589)
   Jumlah belanja Bangunan dan Gedung setelah Perubahan Rp.32.128.116.691

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan:
   1) Semula..... Rp. 94.334.176.643
   2) Bertambah/ (Berkurang)..... Rp. 794.085.085
   Jumlah Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan setelah Perubahan Rp.95.128.261.728

e. Belanja Aset Tetap Lainnya:
   1) Semula..... Rp. 471.600.000
   2) Bertambah/ (Berkurang)..... Rp. (406.600.000)
   Jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan Rp.65.000.000

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Tidak Terduga :
   1) Semula..... Rp. 10.672.000.000
   2) Bertambah/ (Berkurang)..... Rp. 2.444.614.000
   Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 13.116.614.000

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Bagi Hasil bagi Pemerintah Desa :
   1) Semula..... Rp. 3.563.856.017
   2) Bertambah/ (Berkurang)..... Rp. (3.563.856.017)
   Jumlah Belanja Bagi Hasil bagi Pemerintah Desa setelah Perubahan Rp. 0

b. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa:
   1) Semula..... Rp. 238.889.565.800
   2) Bertambah/ (Berkurang)..... Rp. 20.836.673.200
   Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan Rp. 259.726.239.000

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan Pembiayaan :
   1) Semula..... Rp. 67.330.479.529
   2) Bertambah/ (Berkurang)..... Rp. 7.751.096.425
   Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan Rp. 75.081.575.954

b. Pengeluaran Pembiayaan :

1) Semula.....	Rp.	21.906.000.000
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	50.503.349.558
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan		Rp. 72.409.349.558

(2) Penerimaaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya :

1) Semula.....	Rp.	67.330.479.529
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	(4.248.903.575)
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan		Rp. 63.081.575.954

b. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan:

1) Semula.....	Rp.	0
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	12.000.000.000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah Perubahan		Rp. 12.000.000.000

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah :

1) Semula.....	Rp.	6.500.000.000
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	(3.500.000.000)
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan		Rp. 3.000.000.000

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

1) Semula.....	Rp.	15.406.000.000
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	54.003.349.558
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah Perubahan		Rp. 69.409.349.558

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.	Lampiran VI	Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7.	Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8.	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9.	Lampiran IX	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10.	Lampiran X	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11.	Lampiran XI	Daftar piutang daerah
12.	Lampiran XII	Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah
13.	Lampiran XIII	Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain
14.	Lampiran XIV	Daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years)
15.	Lampiran XV	Daftar dana cadangan
16.	Lampiran XVI	Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
   b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
   c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
   d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.

(4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
   a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
   b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 02-10-2023

BUPATI TAPANULI UTARA,

NIKSON NABABAN

(4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
   a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
   b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 02-10-2023

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 02-10-2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2023 NOMOR 06

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 : (6-104/2023)

(4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
   a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
   b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal ๐๖-๑๐-๒๐๒๓

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal ๐๖-๑๐-๒๐๒๓

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2023 NOMOR 06

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 : (6-104/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19870704 201101 1 008

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR : 07 TAHUN 2023

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten,Kota, *juncto* Peraturan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2020 dijelaskan bahwa dalam Hal Hasil Evaluasi Menteri atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan oleh Kepala Daerah bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran;
b. bahwa berdasarkan hasil pembahasan antara Kepala Daerah dan DPRD dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 memenuhi maksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tentang Perubaan APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Angaran 2023;
11. Peraturan DPRD Tapanuli Utara Nomor 01 tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024.

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/845 /KPTS/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
2. Hasil Rapat Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tapanuli Utara bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 29 September 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023;

KEDUA : Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tentang Perubahan APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 sebagai tindaklanjut Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/ 845 /KPTS/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan hasilnya sebagai berikut :

1. PENDAPATAN SEBESAR	**Rp.**	**1.442.394.814.121,-**
- **PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**Rp.**	**181.174.288.779,-**
- **PENDAPATAN TRANSFER**	**Rp.**	**1.233.152.254.160,-**
- **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**Rp.**	**28.068.271.182,-**
2. BELANJA	**Rp.**	**1.445.067.040.517,-**
- **BELANJA OPERASI**	**Rp.**	**998.717.209.488,-**
- **BELANJA MODAL**	**Rp.**	**173.506.978.029,-**
- **BELANJA TIDAK TERDUGA**	**Rp.**	**13.116.614.000,-**
- **BELANJA TRANSFER**	**Rp.**	**259.726.239.000,-**
3. PEMBIAYAAN NETO		
- **PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**Rp.**	**75.081.575.954,-**
- **PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**Rp.**	**72.409.349.558,-**

KETIGA : Keputusan ini diterbitkan dan ditetapkan untuk dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tentang Perubahan APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara sebagai Tindaklanjut Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/ 845/KPTS/2023 tanggal 27 September 2023 atas Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
Pada tanggal 29 September 2023

WAKIL KETUA
DPRD KAB. TAPANULI UTARA,

REGUEL SIMANJUNTAK

Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Sdr. Bupati Tapanuli Utara di Tarutung
3. Badan Anggaran DPRD Kab. Tapanuli Utara di Tarutung.
4. Pertinggal.

DAFTAR ISI

LAMPIRAN	URAIAN	HALAMAN
LAMPIRAN I	RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN;	1
LAMPIRAN II	RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI ;	2
LAMPIRAN III	RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN :	
	1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	12
	2. DINAS KESEHATAN	19
	3. RSU DAERAH TARUTUNG	30
	4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	31
	5. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	38
	6. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	45
	7. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	49
	8. DINAS SOSIAL	54
	9. DINAS KETENAGAKERJAAN	59
	10. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	63
	11. DINAS LINGKUNGAN HIDUP	70
	12. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	76
	13. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	80
	14. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK;	84
	15. DINAS PERHUBUNGAN	91
	16. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	95
	17. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	100
	18. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	106
	19. DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	111
	20. DINAS PERPUSTAKAAN	116
	21. DINAS PARIWISATA	120
	22. DINAS PERTANIAN	125
	23. SEKRETARIAT DAERAH	131
	24. SEKRETARIAT DPRD	138
	25. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	144
	26. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	151
	27. BADAN PENDAPATAN DAERAH	158
	27. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	163
	28. INSPEKTORAT	168
	29. KANTOR KECAMATAN TARUTUNG	173
	30. KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA	177
	32. KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING	181
	33. KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON	185
	34. KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU	189
	35. KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE	193
	36. KANTOR KECAMATAN PURBATUA	197
	37. KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN	201
	38. KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR	205
	39. KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN	209
	40. KANTOR KECAMATAN GAROGA	213

LAMPIRAN	URAIAN	HALAMAN
	41. KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG	217
	42. KANTOR KECAMATAN PAGARAN	221
	43. KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN	225
	44. KANTOR KECAMATAN MUARA	229
	45. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	233
LAMPIRAN IV	REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN;	238
LAMPIRAN V	REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA;	361
LAMPIRAN VI	REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM;	362
LAMPIRAN VII	SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD;	368
LAMPIRAN VIII	SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TA. 2022;	376
LAMPIRAN IX	SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH;	491
LAMPIRAN X	DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN PER JABATAN	498
LAMPIRAN XI	DAFTAR PIUTANG DAERAH;	499
LAMPIRAN XII	DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA;	500
LAMPIRAN XIII	DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN;	501
LAMPIRAN IV	DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTY YEARS);	502
LAMPIRAN XVI	DAFTAR DANA CADANGAN; DAN	503
LAMPIRAN XVI	DAFTAR PINJAMAN DAERAH;	504

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	**PENDAPATAN DAERAH**				
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**163.280.256.947**	**181.174.288.779**	**17.894.031.832**	**11 %**
4.1.01	Pajak Daerah	30.209.843.179	32.259.843.179	2.050.000.000	7 %
4.1.02	Retribusi Daerah	8.614.100.000	9.484.657.000	870.557.000	10 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.150.000.000	10.000.000.000	(150.000.000)	1 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	114.306.313.768	129.429.788.600	15.123.474.832	13 %
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.219.725.532.100**	**1.233.152.254.160**	**13.426.722.060**	**1 %**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.168.844.693.000	1.175.171.806.213	6.327.113.213	1 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	50.880.839.100	57.980.447.947	7.099.608.847	14 %
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**30.618.942.682**	**28.068.271.182**	**(2.550.671.500)**	**8 %**
4.3.01	Pendapatan Hibah	16.745.942.682	16.745.942.682	0	0 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.873.000.000	11.322.328.500	(2.550.671.500)	18 %
	Jumlah Pendapatan	**1.413.624.731.729**	**1.442.394.814.121**	**28.770.082.392**	**2 %**
5	**BELANJA**				
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.043.615.563.395**	**998.717.209.488**	**(44.898.353.907)**	**4 %**
5.1.01	Belanja Pegawai	641.221.750.293	615.599.692.294	(25.622.057.999)	4 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.617.936.539	353.162.964.720	36.545.028.181	12 %
5.1.03	Belanja Bunga	4.150.478.000	3.150.478.000	(1.000.000.000)	24 %
5.1.05	Belanja Hibah	79.493.398.563	23.937.074.474	(55.556.324.089)	70 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.132.000.000	2.867.000.000	735.000.000	34 %
5.2	**BELANJA MODAL**	**162.308.226.046**	**173.506.978.029**	**11.198.751.983**	**7 %**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.711.732.123	46.185.599.610	11.473.867.487	33 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.790.717.280	32.128.116.691	(662.600.589)	2 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	94.334.176.643	95.128.261.728	794.085.085	1 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	471.600.000	65.000.000	(406.600.000)	86 %
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**10.672.000.000**	**13.116.614.000**	**2.444.614.000**	**23 %**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.672.000.000	13.116.614.000	2.444.614.000	23 %

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**242.453.421.817**	**259.726.239.000**	**17.272.817.183**	**7 %**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.563.856.017	0	(3.563.856.017)	100 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	238.889.565.800	259.726.239.000	20.836.673.200	9 %
	Jumlah Belanja	**1.459.049.211.258**	**1.445.067.040.517**	**(13.982.170.741)**	**1 %**
	Total Surplus/(Defisit)	**(45.424.479.529)**	**(2.672.226.396)**	**42.752.253.133**	**-94 %**
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**67.330.479.529**	**75.081.575.954**	**7.751.096.425**	**12 %**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	67.330.479.529	63.081.575.954	(4.248.903.575)	6 %
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	12.000.000.000	12.000.000.000	100 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**67.330.479.529**	**75.081.575.954**	**7.751.096.425**	**12 %**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**21.906.000.000**	**72.409.349.558**	**50.503.349.558**	**231 %**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.500.000.000	3.000.000.000	(3.500.000.000)	54 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	15.406.000.000	69.409.349.558	54.003.349.558	351 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**21.906.000.000**	**72.409.349.558**	**50.503.349.558**	**231 %**
	Pembiayaan Netto	**45.424.479.529**	**2.672.226.396**	**(42.752.253.133)**	**94 %**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**0**	**0**	**0**	**0 %**

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
				Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**89.298.394.577**	**756.611.782.511**	**133.170.818.888**	**0**	**0**	**889.782.601.399**	**100.545.723.077**	**714.479.317.885**	**147.814.403.737**	**0**	**0**	**862.293.721.622**
1	**01**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**0**	**440.110.071.292**	**10.559.892.168**	**0**	**0**	**450.669.963.460**	**0**	**393.962.046.907**	**24.559.233.416**	**0**	**0**	**418.521.280.323**
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	440.110.071.292	10.559.892.168	0	0	450.669.963.460	0	393.962.046.907	24.559.233.416	0	0	418.521.280.323
1	**02**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**88.768.394.577**	**259.442.753.954**	**26.869.459.556**	**0**	**0**	**286.312.213.510**	**100.115.723.077**	**261.451.001.731**	**27.006.424.660**	**0**	**0**	**288.457.426.391**
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	50.000.000	144.832.699.836	15.945.375.200	0	0	160.778.075.036	11.397.328.500	138.235.050.857	15.970.995.200	0	0	154.206.046.057
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	PUSKESMAS AEK RAJA	0	729.453.500	0	0	0	729.453.500	0	729.453.500	0	0	0	729.453.500
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	PUSKESMAS BUTAR	0	738.485.000	0	0	0	738.485.000	0	738.485.000	0	0	0	738.485.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	PUSKESMAS GAROGA	0	929.829.000	0	0	0	929.829.000	0	929.829.000	0	0	0	929.829.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	PUSKESMAS HUTABAGINDA	0	990.797.500	0	0	0	990.797.500	0	990.797.500	0	0	0	990.797.500
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	PUSKESMAS JANJI ANGKOLA	0	789.614.000	0	0	0	789.614.000	0	789.614.000	0	0	0	789.614.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	PUSKESMAS LUMBAN SINAGA	0	858.185.000	0	0	0	858.185.000	0	858.185.000	0	0	0	858.185.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	PUSKESMAS MUARA	0	884.694.000	0	0	0	884.694.000	0	884.694.000	0	0	0	884.694.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	PUSKESMAS ONAN HASANG	0	858.536.000	0	0	0	858.536.000	0	858.536.000	0	0	0	858.536.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	PUSKESMAS PANGARIBUAN	0	856.760.000	0	0	0	856.760.000	0	856.760.000	0	0	0	856.760.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	PUSKESMAS PANIARAN	0	730.581.500	0	0	0	730.581.500	0	730.581.500	0	0	0	730.581.500
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	PUSKESMAS PARMONANGAN	0	848.911.000	0	0	0	848.911.000	0	848.911.000	0	0	0	848.911.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	PUSKESMAS PARSINGKAMAN	0	883.886.500	0	0	0	883.886.500	0	883.886.500	0	0	0	883.886.500
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	PUSKESMAS SARULLA	0	850.304.500	0	0	0	850.304.500	0	850.304.500	0	0	0	850.304.500
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	PUSKESMAS SIATAS BARITA	0	827.508.500	0	0	0	827.508.500	0	827.508.500	0	0	0	827.508.500
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	PUSKESMAS SIBORONGBORONG	0	900.284.000	0	0	0	900.284.000	0	900.284.000	0	0	0	900.284.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	PUSKESMAS SILANGIT	0	730.631.500	0	0	0	730.631.500	0	730.631.500	0	0	0	730.631.500
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	PUSKESMAS SIMANGUMBAN	0	779.906.000	0	0	0	779.906.000	0	779.906.000	0	0	0	779.906.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	PUSKESMAS SIPAHUTAR	0	928.026.000	0	0	0	928.026.000	0	928.026.000	0	0	0	928.026.000

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
				Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	PUSKESMAS SIPULTAK	0	738.566.500	0	0	0	738.566.500	0	738.566.500	0	0	0	738.566.500
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	PUSKESMAS SITADATADA	0	747.488.000	0	0	0	747.488.000	0	747.488.000	0	0	0	747.488.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	PUSKESMAS SITUMEANG HABINSARAN	0	833.204.000	0	0	0	833.204.000	0	833.204.000	0	0	0	833.204.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSU DAERAH TARUTUNG	88.718.394.577	97.174.402.118	10.924.084.356	0	0	108.098.486.474	88.718.394.577	105.780.298.874	11.035.429.460	0	0	116.815.728.334
1	**03**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**500.000.000**	**23.784.079.137**	**92.856.371.464**	**0**	**0**	**116.640.450.601**	**400.000.000**	**24.378.370.807**	**92.630.823.361**	**0**	**0**	**117.009.194.168**
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	500.000.000	13.276.597.006	91.506.371.764	0	0	104.782.968.770	400.000.000	13.455.908.276	91.310.274.661	0	0	104.766.182.937
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	10.507.482.131	1.349.999.700	0	0	11.857.481.831	0	10.922.462.531	1.320.548.700	0	0	12.243.011.231
1	**04**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**30.000.000**	**15.092.722.605**	**2.671.661.000**	**0**	**0**	**17.764.383.605**	**30.000.000**	**15.194.659.275**	**3.438.642.100**	**0**	**0**	**18.633.301.375**
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	30.000.000	15.092.722.605	2.671.661.000	0	0	17.764.383.605	30.000.000	15.194.659.275	3.438.642.100	0	0	18.633.301.375
1	**05**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**0**	**13.618.969.203**	**160.591.500**	**0**	**0**	**13.779.560.703**	**0**	**14.831.954.780**	**123.437.000**	**0**	**0**	**14.955.391.780**
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	9.461.970.813	102.610.100	0	0	9.564.580.913	0	10.836.617.852	55.136.700	0	0	10.891.754.552
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	4.156.998.390	57.981.400	0	0	4.214.979.790	0	3.995.336.928	68.300.300	0	0	4.063.637.228
1	**06**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**0**	**4.563.186.320**	**52.843.200**	**0**	**0**	**4.616.029.520**	**0**	**4.661.284.385**	**55.843.200**	**0**	**0**	**4.717.127.585**
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	0	4.563.186.320	52.843.200	0	0	4.616.029.520	0	4.661.284.385	55.843.200	0	0	4.717.127.585
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**6.737.000.000**	**74.982.294.603**	**3.341.496.700**	**0**	**0**	**78.323.791.303**	**7.524.557.000**	**72.475.236.535**	**2.778.758.700**	**0**	**0**	**75.253.995.235**

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
				Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	**07**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**0**	**3.221.434.890**	**124.956.000**	**0**	**0**	**3.346.390.890**	**0**	**3.154.485.912**	**6.200.000**	**0**	**0**	**3.160.685.912**
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	DINAS KETENAGAKERJAAN	0	3.221.434.890	124.956.000	0	0	3.346.390.890	0	3.154.485.912	6.200.000	0	0	3.160.685.912
2	**08**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**0**	**380.000.000**	**0**	**0**	**0**	**380.000.000**	**0**	**395.000.000**	**0**	**0**	**0**	**395.000.000**
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	380.000.000	0	0	0	380.000.000	0	395.000.000	0	0	0	395.000.000
2	**09**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**60.000.000**	**5.423.801.148**	**39.974.000**	**0**	**0**	**5.463.775.148**	**60.000.000**	**5.120.439.209**	**39.974.000**	**0**	**0**	**5.160.413.209**
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	60.000.000	5.423.801.148	39.974.000	0	0	5.463.775.148	60.000.000	5.120.439.209	39.974.000	0	0	5.160.413.209
2	**10**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**0**	**307.775.200**	**5.100.000**	**0**	**0**	**312.875.200**	**0**	**176.897.400**	**0**	**0**	**0**	**176.897.400**
2	10	1.04.2.10.1.03.01.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	307.775.200	5.100.000	0	0	312.875.200	0	176.897.400	0	0	0	176.897.400
2	**11**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**230.000.000**	**8.494.931.493**	**712.329.600**	**0**	**0**	**9.207.261.093**	**280.000.000**	**8.569.168.227**	**712.329.600**	**0**	**0**	**9.281.497.827**
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	230.000.000	8.494.931.493	712.329.600	0	0	9.207.261.093	280.000.000	8.569.168.227	712.329.600	0	0	9.281.497.827
2	**12**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**0**	**3.825.528.708**	**735.286.000**	**0**	**0**	**4.560.814.708**	**0**	**3.598.905.720**	**618.883.600**	**0**	**0**	**4.217.789.320**
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	3.825.528.708	735.286.000	0	0	4.560.814.708	0	3.598.905.720	618.883.600	0	0	4.217.789.320
2	**13**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN**	**0**	**6.084.414.165**	**29.002.100**	**0**	**0**	**6.113.416.265**	**0**	**5.919.153.639**	**0**	**0**	**0**	**5.919.153.639**

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
				Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
			MASYARAKAT DAN DESA												
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	6.084.414.165	29.002.100	0	0	6.113.416.265	0	5.919.153.639	0	0	0	5.919.153.639
2	**14**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**0**	**13.094.076.311**	**769.536.400**	**0**	**0**	**13.863.612.711**	**0**	**12.576.318.604**	**741.000.000**	**0**	**0**	**13.317.318.604**
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	13.094.076.311	769.536.400	0	0	13.863.612.711	0	12.576.318.604	741.000.000	0	0	13.317.318.604
2	**15**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**400.000.000**	**5.421.437.908**	**384.054.300**	**0**	**0**	**5.805.492.208**	**462.557.000**	**5.006.219.683**	**314.805.900**	**0**	**0**	**5.321.025.583**
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	400.000.000	5.421.437.908	384.054.300	0	0	5.805.492.208	462.557.000	5.006.219.683	314.805.900	0	0	5.321.025.583
2	**16**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**600.000.000**	**5.827.993.730**	**23.000.000**	**0**	**0**	**5.850.993.730**	**660.000.000**	**6.017.918.391**	**14.200.000**	**0**	**0**	**6.032.118.391**
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	600.000.000	5.827.993.730	23.000.000	0	0	5.850.993.730	660.000.000	6.017.918.391	14.200.000	0	0	6.032.118.391
2	**17**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**1.345.000.000**	**9.275.982.905**	**48.098.700**	**0**	**0**	**9.324.081.605**	**1.960.000.000**	**8.852.914.456**	**0**	**0**	**0**	**8.852.914.456**
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.345.000.000	9.275.982.905	48.098.700	0	0	9.324.081.605	1.960.000.000	8.852.914.456	0	0	0	8.852.914.456
2	17	2.17.3.31.3.30.03.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
				Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	**18**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**4.050.000.000**	**3.995.993.272**	**20.000.000**	**0**	**0**	**4.015.993.272**	**4.050.000.000**	**3.575.908.787**	**0**	**0**	**0**	**3.575.908.787**
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.050.000.000	3.995.993.272	20.000.000	0	0	4.015.993.272	4.050.000.000	3.575.908.787	0	0	0	3.575.908.787
2	**19**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**52.000.000**	**5.854.951.901**	**428.359.600**	**0**	**0**	**6.283.311.501**	**52.000.000**	**5.718.970.256**	**232.423.600**	**0**	**0**	**5.951.393.856**
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	52.000.000	5.854.951.901	428.359.600	0	0	6.283.311.501	52.000.000	5.718.970.256	232.423.600	0	0	5.951.393.856
2	**20**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**0**	**128.543.000**	**0**	**0**	**0**	**128.543.000**	**0**	**128.543.000**	**0**	**0**	**0**	**128.543.000**
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	128.543.000	0	0	0	128.543.000	0	128.543.000	0	0	0	128.543.000
2	**21**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**0**	**57.359.800**	**0**	**0**	**0**	**57.359.800**	**0**	**5.985.000**	**0**	**0**	**0**	**5.985.000**
2	21	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	57.359.800	0	0	0	57.359.800	0	5.985.000	0	0	0	5.985.000
2	**22**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**0**	**270.320.300**	**0**	**0**	**0**	**270.320.300**	**0**	**608.709.190**	**0**	**0**	**0**	**608.709.190**
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	270.320.300	0	0	0	270.320.300	0	608.709.190	0	0	0	608.709.190
2	**23**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**0**	**3.257.749.872**	**21.800.000**	**0**	**0**	**3.279.549.872**	**0**	**2.989.699.061**	**98.942.000**	**0**	**0**	**3.088.641.061**
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN	0	3.257.749.872	21.800.000	0	0	3.279.549.872	0	2.989.699.061	98.942.000	0	0	3.088.641.061
2	**24**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**0**	**60.000.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000.000**	**0**	**60.000.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000.000**
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN	0	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	60.000.000
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**925.000.000**	**54.922.435.278**	**19.301.391.145**	**0**	**0**	**74.223.826.423**	**870.000.000**	**54.404.228.617**	**18.589.559.910**	**0**	**0**	**72.993.788.527**
3	**25**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**0**	**1.577.571.500**	**0**	**0**	**0**	**1.577.571.500**	**0**	**2.217.064.650**	**0**	**0**	**0**	**2.217.064.650**

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
				Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
3	25	2.09.3.25.3.27.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	0	1.577.571.500	0	0	0	1.577.571.500	0	2.217.064.650	0	0	0	2.217.064.650
3	**26**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**625.000.000**	**8.123.867.024**	**16.615.835.545**	**0**	**0**	**24.739.702.569**	**645.000.000**	**7.688.963.244**	**16.386.319.810**	**0**	**0**	**24.075.283.054**
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA	625.000.000	8.123.867.024	16.615.835.545	0	0	24.739.702.569	645.000.000	7.688.963.244	16.386.319.810	0	0	24.075.283.054
3	**27**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**300.000.000**	**40.318.235.054**	**2.676.670.200**	**0**	**0**	**42.994.905.254**	**225.000.000**	**39.780.198.730**	**2.142.626.800**	**0**	**0**	**41.922.825.530**
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	0	2.108.388.410	627.748.500	0	0	2.736.136.910	0	2.049.123.610	161.019.100	0	0	2.210.142.710
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN	300.000.000	38.209.846.644	2.048.921.700	0	0	40.258.768.344	225.000.000	37.731.075.120	1.981.607.700	0	0	39.712.682.820
3	**30**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**0**	**1.107.371.700**	**8.885.400**	**0**	**0**	**1.116.257.100**	**0**	**944.056.993**	**39.168.300**	**0**	**0**	**983.225.293**
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	1.107.371.700	8.885.400	0	0	1.116.257.100	0	944.056.993	39.168.300	0	0	983.225.293
3	30	2.17.3.31.3.30.03.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**31**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**0**	**3.795.390.000**	**0**	**0**	**0**	**3.795.390.000**	**0**	**3.773.945.000**	**21.445.000**	**0**	**0**	**3.795.390.000**
3	31	2.17.3.30.3.31.03.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	3.795.390.000	0	0	0	3.795.390.000	0	3.773.945.000	21.445.000	0	0	3.795.390.000
3	31	2.17.3.31.3.30.03.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**362.100.000**	**72.590.731.959**	**2.386.912.600**	**0**	**0**	**74.977.644.559**	**362.100.000**	**78.059.242.054**	**844.750.000**	**0**	**0**	**78.903.992.054**
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**	**362.100.000**	**35.817.659.722**	**1.024.093.500**	**0**	**0**	**36.841.753.222**	**362.100.000**	**40.623.330.238**	**731.050.000**	**0**	**0**	**41.354.380.238**
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	BAGIAN UMUM	0	14.777.783.789	1.024.093.500	0	0	15.801.877.289	0	16.803.969.190	731.050.000	0	0	17.535.019.190
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA	0	273.006.248	0	0	0	273.006.248	0	709.600.900	0	0	0	709.600.900

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
				Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	0	527.787.900	0	0	0	527.787.900	0	494.923.900	0	0	0	494.923.900
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	0	4.390.282.400	0	0	0	4.390.282.400	0	7.024.187.300	0	0	0	7.024.187.300
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	0	350.978.400	0	0	0	350.978.400	0	412.897.700	0	0	0	412.897.700
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	BAGIAN HUKUM	0	1.460.580.900	0	0	0	1.460.580.900	0	1.439.130.300	0	0	0	1.439.130.300
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	0	391.867.800	0	0	0	391.867.800	0	354.642.300	0	0	0	354.642.300
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	BAGIAN ORGANISASI	0	391.707.100	0	0	0	391.707.100	0	393.048.300	0	0	0	393.048.300
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	0	12.594.908.485	0	0	0	12.594.908.485	0	12.181.923.948	0	0	0	12.181.923.948
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	0	658.756.700	0	0	0	658.756.700	0	809.006.400	0	0	0	809.006.400
4	**02**		**SEKRETARIAT DPRD**	**0**	**36.773.072.237**	**1.362.819.100**	**0**	**0**	**38.135.891.337**	**0**	**37.435.911.816**	**113.700.000**	**0**	**0**	**37.549.611.816**
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	0	36.773.072.237	1.362.819.100	0	0	38.135.891.337	0	37.435.911.816	113.700.000	0	0	37.549.611.816
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**1.316.102.237.152**	**31.760.577.146**	**1.118.113.096**	**10.672.000.000**	**242.453.421.817**	**286.004.112.059**	**1.332.679.434.044**	**29.646.132.530**	**450.172.290**	**13.116.614.000**	**259.726.239.000**	**302.939.157.820**
5	**01**		**PERENCANAAN**	**0**	**5.828.331.753**	**564.457.400**	**0**	**0**	**6.392.789.153**	**0**	**5.813.264.560**	**65.957.400**	**0**	**0**	**5.879.221.960**
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0	5.828.331.753	564.457.400	0	0	6.392.789.153	0	5.813.264.560	65.957.400	0	0	5.879.221.960
5	**02**		**KEUANGAN**	**1.316.102.237.152**	**19.321.019.748**	**472.080.896**	**10.672.000.000**	**242.453.421.817**	**272.918.522.461**	**1.332.679.434.044**	**18.320.150.132**	**340.234.490**	**13.116.614.000**	**259.726.239.000**	**291.503.237.622**
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0	13.049.165.592	375.002.696	10.672.000.000	242.453.421.817	266.549.590.105	0	12.315.540.565	267.830.990	13.116.614.000	259.726.239.000	285.426.224.555
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.316.102.237.152	6.271.854.156	97.078.200	0	0	6.368.932.356	1.332.679.434.044	6.004.609.567	72.403.500	0	0	6.077.013.067
5	**03**		**KEPEGAWAIAN**	**0**	**5.434.625.645**	**78.174.800**	**0**	**0**	**5.512.800.445**	**0**	**4.436.215.838**	**40.580.400**	**0**	**0**	**4.476.796.238**
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	5.434.625.645	78.174.800	0	0	5.512.800.445	0	4.436.215.838	40.580.400	0	0	4.476.796.238
5	**04**		**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**0**	**700.000.000**	**0**	**0**	**0**	**700.000.000**	**0**	**611.902.000**	**0**	**0**	**0**	**611.902.000**
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN	0	700.000.000	0	0	0	700.000.000	0	611.902.000	0	0	0	611.902.000

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
				Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
			SUMBER DAYA MANUSIA												
5	**05**		**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**0**	**476.600.000**	**3.400.000**	**0**	**0**	**480.000.000**	**0**	**464.600.000**	**3.400.000**	**0**	**0**	**468.000.000**
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0	476.600.000	3.400.000	0	0	480.000.000	0	464.600.000	3.400.000	0	0	468.000.000
6			**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**0**	**11.569.515.657**	**1.536.075.000**	**0**	**0**	**13.105.590.657**	**0**	**9.800.406.919**	**1.563.000.000**	**0**	**0**	**11.363.406.919**
6	**01**		**INSPEKTORAT DAERAH**	**0**	**11.569.515.657**	**1.536.075.000**	**0**	**0**	**13.105.590.657**	**0**	**9.800.406.919**	**1.563.000.000**	**0**	**0**	**11.363.406.919**
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	0	11.569.515.657	1.536.075.000	0	0	13.105.590.657	0	9.800.406.919	1.563.000.000	0	0	11.363.406.919
7			**UNSUR KEWILAYAHAN**	**200.000.000**	**35.540.316.565**	**1.429.819.817**	**0**	**0**	**36.970.136.382**	**413.000.000**	**33.607.925.249**	**1.450.013.392**	**0**	**0**	**35.057.938.641**
7	**01**		**KECAMATAN**	**200.000.000**	**35.540.316.565**	**1.429.819.817**	**0**	**0**	**36.970.136.382**	**413.000.000**	**33.607.925.249**	**1.450.013.392**	**0**	**0**	**35.057.938.641**
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG	96.605.400	5.816.937.162	82.250.000	0	0	5.899.187.162	300.000.000	5.907.922.943	77.250.000	0	0	5.985.172.943
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0001	KELURAHAN HUTATORUAN V	0	106.485.500	93.514.200	0	0	199.999.700	0	106.485.500	93.514.200	0	0	199.999.700
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0002	KELURAHAN HUTATORUAN VI	0	100.145.600	99.890.800	0	0	200.036.400	0	146.181.635	53.158.100	0	0	199.339.735
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0003	KELURAHAN HUTATORUAN VII	0	106.485.900	93.514.200	0	0	200.000.100	0	106.485.900	93.514.200	0	0	200.000.100
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0004	KELURAHAN HUTATORUAN IX	0	139.806.300	60.064.400	0	0	199.870.700	0	139.806.300	60.064.400	0	0	199.870.700
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0005	KELURAHAN HUTATORUAN X	0	103.052.700	88.330.000	0	0	191.382.700	0	107.965.881	88.004.700	0	0	195.970.581
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0006	KELURAHAN HUTATORUAN XI	0	100.000.000	100.000.000	0	0	200.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	0	200.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0007	KELURAHAN PARTALI TORUAN	0	110.431.600	89.568.400	0	0	200.000.000	0	110.431.600	89.568.400	0	0	200.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA	0	2.010.622.010	28.030.000	0	0	2.038.652.010	0	1.893.813.027	28.030.000	0	0	1.921.843.027
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING	0	1.617.315.574	9.882.000	0	0	1.627.197.574	0	1.446.491.473	9.882.000	0	0	1.456.373.473
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON	0	2.403.208.552	13.167.600	0	0	2.416.376.152	0	2.173.448.481	13.167.600	0	0	2.186.616.081
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0001	KELURAHAN SITUMEANG HABINSARAN	0	199.999.820	0	0	0	199.999.820	0	120.376.520	79.623.300	0	0	199.999.820
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU	0	2.951.439.802	162.343.300	0	0	3.113.783.102	0	2.712.622.722	12.501.700	0	0	2.725.124.422
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0001	KELURAHAN ONAN HASANG	0	0	0	0	0	0	0	50.863.600	149.136.400	0	0	200.000.000

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
				Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE	1.593.600	2.053.191.162	33.720.000	0	0	2.086.911.162	1.610.753	2.013.141.182	26.220.000	0	0	2.039.361.182
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0001	KELURAHAN PASAR SARULLA	0	99.142.700	104.980.000	0	0	204.122.700	0	99.092.700	104.980.000	0	0	204.072.700
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	KANTOR KECAMATAN PURBATUA	0	1.669.063.645	4.000.000	0	0	1.673.063.645	0	1.360.186.315	19.600.000	0	0	1.379.786.315
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN	0	1.466.802.451	21.100.000	0	0	1.487.902.451	0	1.391.525.748	27.700.000	0	0	1.419.225.748
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR	2.938.500	2.386.073.397	36.000.000	0	0	2.422.073.397	2.674.560	1.964.667.388	36.000.000	0	0	2.000.667.388
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN	7.113.100	1.749.645.732	36.002.100	0	0	1.785.647.832	6.419.000	1.548.489.873	36.002.100	0	0	1.584.491.973
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	KANTOR KECAMATAN GAROGA	0	1.860.715.394	40.137.600	0	0	1.900.852.994	0	1.746.156.679	16.200.000	0	0	1.762.356.679
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG	86.214.900	3.437.605.829	40.686.500	0	0	3.478.292.329	90.295.687	3.426.628.254	35.046.200	0	0	3.461.674.454
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0001	KELURAHAN PASAR SIBORONGBORONG	0	56.075.382	143.924.617	0	0	199.999.999	0	56.075.382	143.924.617	0	0	199.999.999
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	KANTOR KECAMATAN PAGARAN	0	1.999.935.096	19.994.800	0	0	2.019.929.896	0	1.822.155.523	28.206.175	0	0	1.850.361.698
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN	0	1.214.378.915	25.719.300	0	0	1.240.098.215	0	1.280.788.285	25.719.300	0	0	1.306.507.585
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	KANTOR KECAMATAN MUARA	5.534.500	1.781.756.342	3.000.000	0	0	1.784.756.342	12.000.000	1.776.122.338	3.000.000	0	0	1.779.122.338
8			**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**0**	**5.637.909.676**	**23.598.800**	**0**	**0**	**5.661.508.476**	**0**	**6.244.719.699**	**16.320.000**	**0**	**0**	**6.261.039.699**
8	**01**		**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**0**	**5.637.909.676**	**23.598.800**	**0**	**0**	**5.661.508.476**	**0**	**6.244.719.699**	**16.320.000**	**0**	**0**	**6.261.039.699**
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	5.637.909.676	23.598.800	0	0	5.661.508.476	0	6.244.719.699	16.320.000	0	0	6.261.039.699
TOTAL				**1.413.624.731.729**	**1.043.615.563.395**	**162.308.226.046**	**10.672.000.000**	**242.453.421.817**	**1.459.049.211.258**	**1.442.394.814.121**	**998.717.209.488**	**173.506.978.029**	**13.116.614.000**	**250.726.239.000**	**1.445.067.040.517**

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	**0**	**0**	
0	**00**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**450.669.963.460**	**418.521.280.323**	**(32.148.683.137)**	
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**91.395.993.918**	**90.826.044.020**	**(569.949.898)**	
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**54.145.848.150**	**53.784.204.652**	**(361.643.498)**	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02				Penambahan Ruang Kelas Baru	0	153.480.000	153.480.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	2		BELANJA MODAL	0	153.480.000	153.480.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	153.480.000	153.480.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	424.200.000	579.982.000	155.782.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	0	1.932.000	1.932.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	1.932.000	1.932.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	2		BELANJA MODAL	424.200.000	578.050.000	153.850.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	424.200.000	578.050.000	153.850.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	05				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	890.500.000	931.898.500	41.398.500	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	0	41.398.500	41.398.500	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	41.398.500	41.398.500	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	2		BELANJA MODAL	890.500.000	890.500.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	890.500.000	890.500.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.961.500.000	3.133.430.500	171.930.500	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	0	171.695.500	171.695.500	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	1	01	Belanja Pegawai	0	13.040.000	13.040.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	158.655.500	158.655.500	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	2		BELANJA MODAL	2.961.500.000	2.961.735.000	235.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.961.500.000	2.961.735.000	235.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	350.000.000	516.524.600	166.524.600	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	2		BELANJA MODAL	350.000.000	516.524.600	166.524.600	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	350.000.000	516.524.600	166.524.600	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	12				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	50.000.000	50.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	12	5	2		BELANJA MODAL	0	50.000.000	50.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	12	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	50.000.000	50.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	22				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.250.000.000	1.297.507.000	47.507.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	22	5	1		BELANJA OPERASI	0	47.507.000	47.507.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	22	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	47.507.000	47.507.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	22	5	2		BELANJA MODAL	1.250.000.000	1.250.000.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	22	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.250.000.000	1.250.000.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	25				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	229.578.200	209.478.200	(20.100.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	25	5	1		BELANJA OPERASI	229.578.200	209.478.200	(20.100.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	25	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	229.578.200	209.478.200	(20.100.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	27				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5.580.575.350	4.261.262.350	(1.319.313.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	27	5	1		BELANJA OPERASI	5.580.575.350	4.261.262.350	(1.319.313.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	27	5	1	01	Belanja Pegawai	945.714.000	848.001.000	(97.713.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	27	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.634.861.350	3.413.261.350	(1.221.600.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	28				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	864.001.100	938.999.600	74.998.500	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	28	5	1		BELANJA OPERASI	864.001.100	938.999.600	74.998.500	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	28	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	814.001.100	813.999.600	(1.500)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	28	5	1	05	Belanja Hibah	50.000.000	125.000.000	75.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	29				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	41.595.493.500	41.711.641.902	116.148.402	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	29	5	1		BELANJA OPERASI	41.595.493.500	33.018.075.365	(8.577.418.135)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	29	5	1	01	Belanja Pegawai	0	10.621.366.540	10.621.366.540	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	29	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	124.594.000	16.627.210.923	16.502.616.923	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	29	5	1	05	Belanja Hibah	41.470.899.500	5.769.497.902	(35.701.401.598)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	29	5	2		BELANJA MODAL	0	8.693.566.537	8.693.566.537	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	29	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	8.693.566.537	8.693.566.537	
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**30.425.002.700**	**29.379.611.600**	**(1.045.391.100)**	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	01				Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	800.000.000	804.400.000	4.400.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	2		BELANJA MODAL	800.000.000	804.400.000	4.400.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	800.000.000	804.400.000	4.400.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	02				Penambahan Ruang Kelas Baru	180.000.000	179.692.400	(307.600)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	2		BELANJA MODAL	180.000.000	179.692.400	(307.600)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	180.000.000	179.692.400	(307.600)	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	12				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.961.400.000	2.053.013.800	91.613.800	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	12	5	1		BELANJA OPERASI	0	91.613.800	91.613.800	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	12	5	1	01	Belanja Pegawai	0	8.760.000	8.760.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	12	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	82.853.800	82.853.800	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	12	5	2		BELANJA MODAL	1.961.400.000	1.961.400.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	12	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.961.400.000	1.961.400.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	18				Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	639.000.000	676.297.100	37.297.100	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	18	5	1		BELANJA OPERASI	0	37.297.100	37.297.100	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	18	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	37.297.100	37.297.100	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	18	5	2		BELANJA MODAL	639.000.000	639.000.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	18	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	639.000.000	639.000.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	24				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	231.100.000	235.834.300	4.734.300	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	24	5	1		BELANJA OPERASI	0	5.091.200	5.091.200	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	24	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	5.091.200	5.091.200	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	24	5	2		BELANJA MODAL	231.100.000	230.743.100	(356.900)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	24	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	231.100.000	230.743.100	(356.900)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	25				Pengadaan Mebel Sekolah	150.000.000	150.281.300	281.300	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	25	5	2		BELANJA MODAL	150.000.000	150.281.300	281.300	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	25	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.000.000	150.281.300	281.300	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	36				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	26.194.250.000	25.113.080.000	(1.081.170.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	36	5	1		BELANJA OPERASI	26.194.250.000	20.406.464.889	(5.787.785.111)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	36	5	1	01	Belanja Pegawai	0	5.355.963.200	5.355.963.200	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	36	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	12.729.341.689	12.729.341.689	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	36	5	1	05	Belanja Hibah	26.194.250.000	2.321.160.000	(23.873.090.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	36	5	2		BELANJA MODAL	0	4.706.615.111	4.706.615.111	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	36	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	4.706.615.111	4.706.615.111	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	38				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	269.252.700	167.012.700	(102.240.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	38	5	1		BELANJA OPERASI	269.252.700	167.012.700	(102.240.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	38	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	269.252.700	167.012.700	(102.240.000)	
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**02**	**2.03**	**00**				**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**6.588.443.068**	**7.252.987.768**	**664.544.700**	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	09				Pengadaan Perlengkapan PAUD	190.532.268	190.532.268	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	09	5	2		BELANJA MODAL	190.532.268	190.532.268	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	09	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	190.532.268	190.532.268	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	10				Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	150.021.000	150.021.000	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	10	5	2		BELANJA MODAL	150.021.000	150.021.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.021.000	150.021.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	14				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	59.629.800	47.074.500	(12.555.300)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	14	5	1		BELANJA OPERASI	59.629.800	47.074.500	(12.555.300)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	14	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	59.629.800	47.074.500	(12.555.300)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	16				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.720.950.000	1.720.950.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	16	5	1		BELANJA OPERASI	1.720.950.000	1.720.950.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	16	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.720.950.000	1.720.950.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	17				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	100.000.000	100.000.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	17	5	1		BELANJA OPERASI	100.000.000	100.000.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	17	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	100.000.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	18				Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.367.310.000	5.044.410.000	677.100.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	18	5	1		BELANJA OPERASI	4.367.310.000	5.044.410.000	677.100.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	18	5	1	05	Belanja Hibah	4.367.310.000	5.044.410.000	677.100.000	
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**02**	**2.04**	**00**				**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**236.700.000**	**409.240.000**	**172.540.000**	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	17				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	236.700.000	409.240.000	172.540.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	17	5	1		BELANJA OPERASI	236.700.000	409.240.000	172.540.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	17	5	1	05	Belanja Hibah	236.700.000	409.240.000	172.540.000	
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**359.273.969.542**	**327.695.236.303**	**(31.578.733.239)**	
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**126.697.200**	**95.631.200**	**(31.066.000)**	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.247.300	23.247.300	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	23.247.300	23.247.300	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	23.247.300	23.247.300	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.999.900	4.999.900	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	4.999.900	4.999.900	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.900	4.999.900	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98.450.000	67.384.000	(31.066.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	98.450.000	67.384.000	(31.066.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	98.450.000	67.384.000	(31.066.000)	
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**356.665.726.682**	**324.926.622.243**	**(31.739.104.439)**	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	356.442.722.882	324.703.618.443	(31.739.104.439)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	356.442.722.882	324.703.618.443	(31.739.104.439)	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	356.442.722.882	324.703.618.443	(31.739.104.439)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	217.474.800	217.474.800	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	217.474.800	217.474.800	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	217.474.800	217.474.800	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.529.000	5.529.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	5.529.000	5.529.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.529.000	5.529.000	0	
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**01**	**2.03**	**00**				**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**149.977.300**	**149.977.300**	**0**	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.03	06				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	149.977.300	149.977.300	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.03	06	5	1		BELANJA OPERASI	149.977.300	149.977.300	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.03	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	149.977.300	149.977.300	0	
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**799.940.300**	**1.107.682.100**	**307.741.800**	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.821.500	34.821.500	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	34.821.500	34.821.500	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	34.821.500	34.821.500	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	222.709.400	222.709.400	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	222.709.400	222.709.400	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	222.709.400	222.709.400	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.187.800	25.187.800	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	25.187.800	25.187.800	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	25.187.800	25.187.800	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	112.948.400	112.948.400	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	112.948.400	112.948.400	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	112.948.400	112.948.400	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.956.200	19.956.200	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	19.956.200	19.956.200	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.956.200	19.956.200	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.007.000	194.015.000	145.008.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1		BELANJA OPERASI	49.007.000	194.015.000	145.008.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	49.007.000	194.015.000	145.008.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	335.310.000	498.043.800	162.733.800	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	335.310.000	498.043.800	162.733.800	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	335.310.000	498.043.800	162.733.800	
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**267.548.500**	**267.548.500**	**0**	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	267.548.500	267.548.500	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	267.548.500	267.548.500	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	267.548.500	267.548.500	0	
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**647.048.900**	**647.048.900**	**0**	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	4.500.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.500.000	4.500.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000	4.500.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.412.200	101.412.200	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	101.412.200	101.412.200	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	101.412.200	101.412.200	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.136.700	91.136.700	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1		BELANJA OPERASI	88.886.700	88.886.700	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	88.886.700	88.886.700	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	2		BELANJA MODAL	2.250.000	2.250.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.250.000	2.250.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	450.000.000	450.000.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	450.000.000	450.000.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000	450.000.000	0	
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**617.030.660**	**500.726.060**	**(116.304.600)**	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	337.039.660	325.726.060	(11.313.600)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	325.199.260	317.832.460	(7.366.800)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	325.199.260	317.832.460	(7.366.800)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	2		BELANJA MODAL	11.840.400	7.893.600	(3.946.800)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.840.400	7.893.600	(3.946.800)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	279.991.000	175.000.000	(104.991.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	179.991.000	0	(179.991.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	179.991.000	0	(179.991.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2		BELANJA MODAL	100.000.000	175.000.000	75.000.000	

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000	175.000.000	75.000.000	
2	**22**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**270.320.300**	**608.709.190**	**338.388.890**	
2	**22**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**270.320.300**	**608.709.190**	**338.388.890**	
2	**22**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**					**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**70.000.000**	**70.000.000**	**0**	
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	70.000.000	70.000.000	0	
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	70.000.000	70.000.000	0	
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	70.000.000	0	
2	**22**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**02**	**2.02**	**00**					**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**200.320.300**	**538.709.190**	**338.388.890**	
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	01					Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	100.320.300	123.709.190	23.388.890	
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	100.320.300	123.709.190	23.388.890	
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	100.320.300	123.709.190	23.388.890	
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	03					Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	100.000.000	415.000.000	315.000.000	
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1			BELANJA OPERASI	100.000.000	415.000.000	315.000.000	
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	05		Belanja Hibah	100.000.000	415.000.000	315.000.000	
										Jumlah Belanja	**450.940.283.760**	**419.129.989.513**	**(31.810.294.247)**	
										Total Surplus/(Defisit)	**(450.940.283.760)**	**(419.129.989.513)**	**31.810.294.247**	
0	**00**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**				**PEMBIAYAAN**				
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**				
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**50.000.000**	**75.000.000**	**25.000.000**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	50.000.000	75.000.000	25.000.000	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**3**		**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0**	**11.322.328.500**	**11.322.328.500**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	3	03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	11.322.328.500	11.322.328.500	
									Jumlah Pendapatan	**50.000.000**	**11.397.328.500**	**11.347.328.500**	
0	**00**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**178.213.727.036**	**171.641.698.057**	**(6.572.028.979)**	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**76.026.731.600**	**73.616.684.808**	**(2.410.046.792)**	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**22.110.362.000**	**21.577.939.000**	**(532.423.000)**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03				Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.690.000.000	1.672.920.000	(17.080.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	2		BELANJA MODAL	1.690.000.000	1.672.920.000	(17.080.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.690.000.000	1.672.920.000	(17.080.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14.102.085.000	14.063.265.000	(38.820.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	2		BELANJA MODAL	14.102.085.000	14.063.265.000	(38.820.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.102.085.000	14.063.265.000	(38.820.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	15				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	175.001.000	175.001.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	15	5	1		BELANJA OPERASI	175.001.000	175.001.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	15	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	175.001.000	175.001.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16				Pengadaan Obat, Vaksin	1.940.783.000	1.937.090.000	(3.693.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	5	1		BELANJA OPERASI	1.940.783.000	1.937.090.000	(3.693.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	5	1	01	Belanja Pegawai	3.680.000	0	(3.680.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.937.103.000	1.937.090.000	(13.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	17				Pengadaan Bahan Habis Pakai	4.062.070.000	3.589.240.000	(472.830.000)	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	17	5	1		BELANJA OPERASI	4.062.070.000	3.589.240.000	(472.830.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	17	5	1	01	Belanja Pegawai	6.140.000	0	(6.140.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	17	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.055.930.000	3.589.240.000	(466.690.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	21				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	140.423.000	140.423.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	21	5	1		BELANJA OPERASI	140.423.000	140.423.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	21	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	140.423.000	140.423.000	0	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**53.240.158.900**	**51.213.175.108**	**(2.026.983.792)**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.194.599.500	2.481.768.500	287.169.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.194.599.500	2.481.768.500	287.169.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.194.599.500	2.481.768.500	287.169.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	864.282.500	246.650.000	(617.632.500)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	864.282.500	246.650.000	(617.632.500)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	864.282.500	246.650.000	(617.632.500)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	501.661.500	161.461.500	(340.200.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	501.661.500	161.461.500	(340.200.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	501.661.500	161.461.500	(340.200.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.584.061.100	669.162.100	(914.899.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	1.584.061.100	669.162.100	(914.899.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.584.061.100	669.162.100	(914.899.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	402.713.400	268.800.000	(133.913.400)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	402.713.400	268.800.000	(133.913.400)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	402.713.400	268.800.000	(133.913.400)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	472.966.000	486.650.000	13.684.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	5	1		BELANJA OPERASI	472.966.000	486.650.000	13.684.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	472.966.000	486.650.000	13.684.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	664.100.600	787.727.600	123.627.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	664.100.600	787.727.600	123.627.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	664.100.600	787.727.600	123.627.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	317.614.000	179.814.000	(137.800.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	5	1		BELANJA OPERASI	317.614.000	179.814.000	(137.800.000)	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	317.614.000	179.814.000	(137.800.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	09				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	325.885.300	117.865.300	(208.020.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	09	5	1		BELANJA OPERASI	325.885.300	117.865.300	(208.020.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	325.885.300	117.865.300	(208.020.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	605.430.300	601.706.800	(3.723.500)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	5	1		BELANJA OPERASI	605.430.300	601.706.800	(3.723.500)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	605.430.300	601.706.800	(3.723.500)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	527.685.000	475.600.000	(52.085.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	5	1		BELANJA OPERASI	527.685.000	475.600.000	(52.085.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	527.685.000	475.600.000	(52.085.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	129.750.000	176.960.000	47.210.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	5	1		BELANJA OPERASI	129.750.000	176.960.000	47.210.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	129.750.000	176.960.000	47.210.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	13				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	176.200.000	0	(176.200.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	13	5	1		BELANJA OPERASI	176.200.000	0	(176.200.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	13	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	176.200.000	0	(176.200.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.586.145.200	5.638.648.700	2.052.503.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	5	1		BELANJA OPERASI	3.585.395.000	5.637.898.500	2.052.503.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.585.395.000	5.637.898.500	2.052.503.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	5	2		BELANJA MODAL	750.200	750.200	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	750.200	750.200	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	16				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	239.840.600	91.209.400	(148.631.200)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	16	5	1		BELANJA OPERASI	239.840.600	91.209.400	(148.631.200)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	16	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	239.840.600	91.209.400	(148.631.200)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.109.004.500	952.376.500	(156.628.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17	5	1		BELANJA OPERASI	1.109.004.500	952.376.500	(156.628.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.109.004.500	952.376.500	(156.628.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	18				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.415.061.900	1.659.730.400	244.668.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	18	5	1		BELANJA OPERASI	1.415.061.900	1.659.730.400	244.668.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	18	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.415.061.900	1.659.730.400	244.668.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	816.451.100	359.515.100	(456.936.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	20	5	1		BELANJA OPERASI	816.451.100	359.515.100	(456.936.000)	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	20	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	816.451.100	359.515.100	(456.936.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	22				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	37.600.000	37.600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	22	5	1		BELANJA OPERASI	0	37.600.000	37.600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	22	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	37.600.000	37.600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	23				Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	165.000.000	165.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	23	5	1		BELANJA OPERASI	165.000.000	165.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	23	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000	65.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	23	5	1	05	Belanja Hibah	100.000.000	100.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.663.944.200	2.467.085.100	803.140.900	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	5	1		BELANJA OPERASI	1.663.944.200	2.467.085.100	803.140.900	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.663.944.200	2.467.085.100	803.140.900	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	26				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	31.114.135.200	28.699.529.608	(2.414.605.592)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	26	5	1		BELANJA OPERASI	31.114.135.200	28.699.529.608	(2.414.605.592)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	26	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	31.114.135.200	28.699.529.608	(2.414.605.592)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	29				Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	45.608.000	82.048.000	36.440.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	29	5	1		BELANJA OPERASI	45.608.000	82.048.000	36.440.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	29	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	45.608.000	82.048.000	36.440.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	33				Operasional Pelayanan Puskesmas	3.872.574.000	3.667.111.500	(205.462.500)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	33	5	1		BELANJA OPERASI	3.872.574.000	3.667.111.500	(205.462.500)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	33	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.872.574.000	3.667.111.500	(205.462.500)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	34				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	50.000.000	50.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	34	5	1		BELANJA OPERASI	50.000.000	50.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	34	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	50.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	35				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	91.585.000	558.855.000	467.270.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	35	5	1		BELANJA OPERASI	91.585.000	558.855.000	467.270.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	35	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	91.585.000	558.855.000	467.270.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	36				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4.000.000	112.000.000	108.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	36	5	1		BELANJA OPERASI	4.000.000	112.000.000	108.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	36	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	112.000.000	108.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	37				Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	5.000.000	0	(5.000.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	37	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	0	(5.000.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	37	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	0	(5.000.000)	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	39				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	271.306.000	0	(271.306.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	39	5	1		BELANJA OPERASI	271.306.000	0	(271.306.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	39	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	271.306.000	0	(271.306.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	40				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	23.554.000	18.300.000	(5.254.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	40	5	1		BELANJA OPERASI	23.554.000	18.300.000	(5.254.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	40	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	23.554.000	18.300.000	(5.254.000)	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.03**	**00**				**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**138.260.700**	**287.620.700**	**149.360.000**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01				Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	74.785.300	74.785.300	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	74.785.300	74.785.300	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	74.785.300	74.785.300	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	63.475.400	212.835.400	149.360.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	63.475.400	63.835.400	360.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	63.475.400	63.835.400	360.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	2		BELANJA MODAL	0	149.000.000	149.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	149.000.000	149.000.000	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.04**	**00**				**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**537.950.000**	**537.950.000**	**0**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	309.950.000	309.950.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03	5	1		BELANJA OPERASI	307.410.000	307.410.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	307.410.000	307.410.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03	5	2		BELANJA MODAL	2.540.000	2.540.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.540.000	2.540.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	04				Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	228.000.000	228.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	04	5	1		BELANJA OPERASI	228.000.000	228.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	228.000.000	228.000.000	0	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**1.233.079.700**	**1.233.079.700**	**0**	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**103.000.000**	**103.000.000**	**0**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01				Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	50.000.000	50.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	50.000.000	50.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	50.000.000	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02				Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	53.000.000	53.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	53.000.000	53.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	53.000.000	53.000.000	0	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**2.02**	**00**				**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**135.000.000**	**135.000.000**	**0**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01				Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	60.000.000	60.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	60.000.000	60.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	60.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	35.000.000	35.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	35.000.000	35.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	35.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	40.000.000	40.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	40.000.000	40.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	40.000.000	0	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**2.03**	**00**				**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**995.079.700**	**995.079.700**	**0**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	995.079.700	995.079.700	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	995.079.700	995.079.700	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	995.079.700	995.079.700	0	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**564.994.000**	**556.815.200**	**(8.178.800)**	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**2.01**	**00**				**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**40.000.000**	**40.000.000**	**0**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02				Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	40.000.000	40.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	40.000.000	40.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	40.000.000	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**2.02**	**00**				**Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**	**85.000.000**	**85.000.000**	**0**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	01				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	40.000.000	40.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	40.000.000	40.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	40.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	02				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	45.000.000	45.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	45.000.000	45.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000	45.000.000	0	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**2.03**	**00**				**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**187.800.000**	**187.800.000**	**0**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	01				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	187.800.000	187.800.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	187.800.000	187.800.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	187.800.000	187.800.000	0	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**2.04**	**00**				**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**40.000.000**	**34.280.000**	**(5.720.000)**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	01				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	40.000.000	34.280.000	(5.720.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	01	5	1		BELANJA OPERASI	40.000.000	34.280.000	(5.720.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	34.280.000	(5.720.000)	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**2.05**	**00**				**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**30.000.000**	**27.541.200**	**(2.458.800)**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.05	01				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	30.000.000	27.541.200	(2.458.800)	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.05	01	5	1		BELANJA OPERASI	30.000.000	27.541.200	(2.458.800)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.05	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	27.541.200	(2.458.800)	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**2.06**	**00**				**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**182.194.000**	**182.194.000**	**0**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.06	01				Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	182.194.000	182.194.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	182.194.000	182.194.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	182.194.000	182.194.000	0	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**290.678.000**	**597.618.000**	**306.940.000**	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**90.000.000**	**90.000.000**	**0**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	90.000.000	90.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	90.000.000	90.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000	90.000.000	0	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**2.03**	**00**				**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**200.678.000**	**507.618.000**	**306.940.000**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.03	01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	200.678.000	507.618.000	306.940.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	200.678.000	507.618.000	306.940.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	200.678.000	507.618.000	306.940.000	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100.098.243.736**	**95.637.500.349**	**(4.460.743.387)**	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**323.640.000**	**298.840.000**	**(24.800.000)**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.800.000	57.800.000	(7.000.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	64.800.000	57.800.000	(7.000.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	64.800.000	57.800.000	(7.000.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	5.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	5.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	5.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000	5.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	233.840.000	216.040.000	(17.800.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	233.840.000	216.040.000	(17.800.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	233.840.000	216.040.000	(17.800.000)	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**92.649.776.354**	**89.246.735.824**	**(3.403.040.530)**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	92.320.259.954	88.824.479.424	(3.495.780.530)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	92.320.259.954	88.824.479.424	(3.495.780.530)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	92.320.259.954	88.824.479.424	(3.495.780.530)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	324.516.400	417.256.400	92.740.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	324.516.400	417.256.400	92.740.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	258.601.200	351.341.200	92.740.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	65.915.200	65.915.200	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.03**	**00**				**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**80.000.000**	**56.029.000**	**(23.971.000)**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	06				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	80.000.000	56.029.000	(23.971.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	06	5	1		BELANJA OPERASI	80.000.000	56.029.000	(23.971.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	56.029.000	(23.971.000)	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**396.986.200**	**566.448.600**	**169.462.400**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000	54.999.600	19.999.600	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	35.000.000	54.999.600	19.999.600	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	54.999.600	19.999.600	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.980.100	80.976.900	19.996.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	60.980.100	80.976.900	19.996.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	60.980.100	80.976.900	19.996.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.003.000	35.003.000	5.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	30.003.000	35.003.000	5.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.003.000	35.003.000	5.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	51.006.100	53.006.100	2.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	51.006.100	53.006.100	2.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	51.006.100	53.006.100	2.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	39.497.000	29.497.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	10.000.000	39.497.000	29.497.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	39.497.000	29.497.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.997.000	42.966.000	12.969.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1		BELANJA OPERASI	29.997.000	42.966.000	12.969.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.997.000	42.966.000	12.969.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.000.000	260.000.000	80.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	180.000.000	260.000.000	80.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000	260.000.000	80.000.000	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**150.000.000**	**82.520.000**	**(67.480.000)**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05				Pengadaan Mebel	100.000.000	36.260.000	(63.740.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	2		BELANJA MODAL	100.000.000	36.260.000	(63.740.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000	36.260.000	(63.740.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	46.260.000	(3.740.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	50.000.000	46.260.000	(3.740.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000	46.260.000	(3.740.000)	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.773.352.450**	**4.704.447.993**	**(1.068.904.457)**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	297.342.850	205.866.100	(91.476.750)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	297.342.850	205.866.100	(91.476.750)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	297.342.850	205.866.100	(91.476.750)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.476.009.600	4.498.581.893	(977.427.707)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	5.476.009.600	4.498.581.893	(977.427.707)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.476.009.600	4.498.581.893	(977.427.707)	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**624.488.732**	**582.478.932**	**(42.009.800)**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	474.997.832	411.997.832	(63.000.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	474.997.832	411.997.832	(63.000.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	474.997.832	411.997.832	(63.000.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000	90.000.000	15.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	75.000.000	90.000.000	15.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	90.000.000	15.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	74.490.900	80.481.100	5.990.200	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	1		BELANJA OPERASI	74.490.900	80.481.100	5.990.200	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	74.490.900	80.481.100	5.990.200	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.10**	**00**				**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**100.000.000**	**100.000.000**	**0**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.10	01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100.000.000	100.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.10	01	5	1		BELANJA OPERASI	100.000.000	100.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.10	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	100.000.000	0	
									Jumlah Belanja	**178.213.727.036**	**171.641.698.057**	**(6.572.028.979)**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(178.163.727.036)**	**(160.244.369.557)**	**17.919.357.479**	
0	**00**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	



Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 RSU DAERAH TARUTUNG

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4	**PENDAPATAN DAERAH**				
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**88.718.394.577**	**88.718.394.577**	**0**	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	88.718.394.577	88.718.394.577	0	
	Jumlah Pendapatan	**88.718.394.577**	**88.718.394.577**	**0**	
0 00 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 5	**BELANJA**				
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**108.098.486.474**	**116.815.728.334**	**8.717.241.860**	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 0.00 00	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**82.490.221.963**	**86.752.078.078**	**4.261.856.115**	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 00	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**5.424.090.000**	**5.424.090.000**	**0**	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.424.090.000	5.424.090.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 14 5 2	BELANJA MODAL	5.424.090.000	5.424.090.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 14 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.424.090.000	5.424.090.000	0	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 00	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**77.066.131.963**	**81.327.988.078**	**4.261.856.115**	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	77.066.131.963	81.327.988.078	4.261.856.115	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 32 5 1	BELANJA OPERASI	71.566.137.607	75.716.648.618	4.150.511.011	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 32 5 1 01	Belanja Pegawai	8.230.648.064	7.352.790.938	(877.857.126)	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 32 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	63.335.489.543	68.363.857.680	5.028.368.137	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 32 5 2	BELANJA MODAL	5.499.994.356	5.611.339.460	111.345.104	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 32 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.800.000.000	4.511.340.000	711.340.000	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 32 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.699.994.356	1.099.999.460	(599.994.896)	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 0.00 00	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**25.608.264.511**	**30.063.650.256**	**4.455.385.745**	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 00	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**25.608.264.511**	**30.063.650.256**	**4.455.385.745**	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.608.264.511	30.063.650.256	4.455.385.745	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	25.608.264.511	30.063.650.256	4.455.385.745	
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	25.608.264.511	30.063.650.256	4.455.385.745	
	Jumlah Belanja	**108.098.486.474**	**116.815.728.334**	**8.717.241.860**	
	Total Surplus/(Defisit)	**(19.380.091.897)**	**(28.097.333.757)**	**(8.717.241.860)**	
0 00 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**				
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**500.000.000**	**400.000.000**	**(100.000.000)**	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	500.000.000	400.000.000	(100.000.000)	
									Jumlah Pendapatan	**500.000.000**	**400.000.000**	**(100.000.000)**	
0	**00**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**104.782.968.770**	**104.766.182.937**	**(16.785.833)**	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**12.184.289.421**	**11.880.809.421**	**(303.480.000)**	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**75.000.000**	**75.000.000**	**0**	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46				Normalisasi/Restorasi Sungai	50.000.000	50.000.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	5	1		BELANJA OPERASI	50.000.000	50.000.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	50.000.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	63				Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	63	5	1		BELANJA OPERASI	25.000.000	25.000.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	63	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	25.000.000	0	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**12.109.289.421**	**11.805.809.421**	**(303.480.000)**	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	763.493.871	765.403.871	1.910.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	77.830.921	308.846.621	231.015.700	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	0	48.380.000	48.380.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	77.830.921	260.466.621	182.635.700	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	2		BELANJA MODAL	685.662.950	456.557.250	(229.105.700)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	685.662.950	456.557.250	(229.105.700)	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	14				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	10.987.677.050	10.784.417.050	(203.260.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	14	5	2		BELANJA MODAL	10.987.677.050	10.784.417.050	(203.260.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	14	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.987.677.050	10.784.417.050	(203.260.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	21				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	358.118.500	255.988.500	(102.130.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	21	5	1		BELANJA OPERASI	158.118.500	158.118.500	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	21	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	158.118.500	158.118.500	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	21	5	2		BELANJA MODAL	200.000.000	97.870.000	(102.130.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	21	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000	97.870.000	(102.130.000)	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**10**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**81.348.184.776**	**82.120.189.888**	**772.005.112**	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**10**	**2.01**	**00**				**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**81.348.184.776**	**82.120.189.888**	**772.005.112**	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	18				Rehabilitasi Jembatan	590.000.000	387.210.000	(202.790.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	18	5	2		BELANJA MODAL	590.000.000	387.210.000	(202.790.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	18	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	590.000.000	387.210.000	(202.790.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	21				Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	300.000.000	486.039.227	186.039.227	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	21	5	1		BELANJA OPERASI	300.000.000	486.039.227	186.039.227	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	21	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	486.039.227	186.039.227	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	24				Pembangunan Jalan Strategis Desa	480.000.000	408.960.000	(71.040.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	24	5	2		BELANJA MODAL	480.000.000	408.960.000	(71.040.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	24	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	480.000.000	408.960.000	(71.040.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	25				Rekonstruksi Jalan Strategis Desa	585.000.000	420.100.000	(164.900.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	25	5	2		BELANJA MODAL	585.000.000	420.100.000	(164.900.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	25	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	585.000.000	420.100.000	(164.900.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01				Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.544.327.000	1.664.197.000	119.870.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	0	211.840.000	211.840.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01	5	1	01	Belanja Pegawai	0	211.840.000	211.840.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01	5	2		BELANJA MODAL	1.544.327.000	1.452.357.000	(91.970.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.544.327.000	1.452.357.000	(91.970.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	04				Survey Kondisi Jalan/Jembatan	400.000.000	387.710.000	(12.290.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	04	5	2		BELANJA MODAL	400.000.000	387.710.000	(12.290.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	04	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	400.000.000	387.710.000	(12.290.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05				Pembangunan Jalan	6.094.585.000	5.956.685.459	(137.899.541)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	1.300.000.000	1.190.000.000	(110.000.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000.000	1.190.000.000	(110.000.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	5	2		BELANJA MODAL	4.794.585.000	4.766.685.459	(27.899.541)	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.794.585.000	4.766.685.459	(27.899.541)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	08				Rekonstruksi Jalan	52.032.795.000	53.435.472.078	1.402.677.078	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	08	5	2		BELANJA MODAL	52.032.795.000	53.435.472.078	1.402.677.078	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	08	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	52.032.795.000	53.435.472.078	1.402.677.078	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	09				Rehabilitasi Jalan	7.484.400.000	6.173.570.000	(1.310.830.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	09	5	2		BELANJA MODAL	7.484.400.000	6.173.570.000	(1.310.830.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	09	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.484.400.000	6.173.570.000	(1.310.830.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11				Pemeliharaan Rutin Jalan	1.320.000.000	1.801.450.000	481.450.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	5	1		BELANJA OPERASI	444.510.150	408.513.150	(35.997.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	444.510.150	408.513.150	(35.997.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	5	2		BELANJA MODAL	875.489.850	1.392.936.850	517.447.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	875.489.850	1.392.936.850	517.447.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	12				Pembangunan Jembatan	10.517.077.776	10.998.796.124	481.718.348	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	12	5	2		BELANJA MODAL	10.517.077.776	10.998.796.124	481.718.348	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	12	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.517.077.776	10.998.796.124	481.718.348	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**11**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**35.000.000**	**35.000.000**	**0**	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**11**	**2.01**	**00**				**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**35.000.000**	**35.000.000**	**0**	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	04				Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	35.000.000	35.000.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	35.000.000	35.000.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	35.000.000	0	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**12**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**384.999.580**	**329.869.500**	**(55.130.080)**	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**12**	**2.01**	**00**				**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**209.999.580**	**223.669.500**	**13.669.920**	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	02				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	34.999.900	124.599.900	89.600.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	34.999.900	124.599.900	89.600.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	34.999.900	124.599.900	89.600.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	04				Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	174.999.680	99.069.600	(75.930.080)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	126.999.680	51.069.600	(75.930.080)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	126.999.680	51.069.600	(75.930.080)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	04	5	2		BELANJA MODAL	48.000.000	48.000.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	04	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.000.000	48.000.000	0	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**12**	**2.04**	**00**				**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**175.000.000**	**106.200.000**	**(68.800.000)**	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	04				Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	175.000.000	106.200.000	(68.800.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	04	5	1		BELANJA OPERASI	175.000.000	106.200.000	(68.800.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000	106.200.000	(68.800.000)	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.830.494.993**	**10.400.314.128**	**(430.180.865)**	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**158.723.800**	**141.734.200**	**(16.989.600)**	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.044.300	54.494.700	(11.549.600)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	66.044.300	54.494.700	(11.549.600)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	66.044.300	54.494.700	(11.549.600)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.779.500	7.779.500	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	7.779.500	7.779.500	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.779.500	7.779.500	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.900.000	79.460.000	(5.440.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	84.900.000	79.460.000	(5.440.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	84.900.000	79.460.000	(5.440.000)	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.975.570.978**	**7.365.104.855**	**(610.466.123)**	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.887.663.178	7.277.197.055	(610.466.123)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	7.887.663.178	7.277.197.055	(610.466.123)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	7.887.663.178	7.277.197.055	(610.466.123)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	77.809.200	77.809.200	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	77.809.200	77.809.200	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	77.809.200	77.809.200	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.098.600	5.098.600	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	5.098.600	5.098.600	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.098.600	5.098.600	0	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.03**	**00**				**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**7.992.900**	**7.992.900**	**0**	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	06				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.992.900	7.992.900	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	06	5	1		BELANJA OPERASI	7.992.900	7.992.900	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.992.900	7.992.900	0	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.05**	**00**				**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**69.959.000**	**113.690.000**	**43.731.000**	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	69.959.000	113.690.000	43.731.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09	5	1		BELANJA OPERASI	69.959.000	113.690.000	43.731.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	69.959.000	113.690.000	43.731.000	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**675.382.100**	**824.782.100**	**149.400.000**	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.241.900	10.241.900	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	10.241.900	10.241.900	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.241.900	10.241.900	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.998.700	94.998.700	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	94.998.700	94.998.700	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	94.998.700	94.998.700	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.513.500	26.513.500	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	26.513.500	26.513.500	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	26.513.500	26.513.500	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.249.900	31.249.900	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	31.249.900	31.249.900	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	31.249.900	31.249.900	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	34.985.600	34.985.600	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	34.985.600	34.985.600	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	34.985.600	34.985.600	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.996.500	19.996.500	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1		BELANJA OPERASI	19.996.500	19.996.500	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.996.500	19.996.500	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	457.396.000	606.796.000	149.400.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	457.396.000	606.796.000	149.400.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	457.396.000	606.796.000	149.400.000	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**139.990.200**	**83.210.100**	**(56.780.100)**	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.795.900	83.210.100	(26.585.800)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1		BELANJA OPERASI	2.170.000	0	(2.170.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1	01	Belanja Pegawai	2.170.000	0	(2.170.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	107.625.900	83.210.100	(24.415.800)	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.625.900	83.210.100	(24.415.800)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	11				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.194.300	0	(30.194.300)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	11	5	2		BELANJA MODAL	30.194.300	0	(30.194.300)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	11	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.194.300	0	(30.194.300)	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**146.063.700**	**141.058.946**	**(5.004.754)**	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.240.000	5.240.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.240.000	5.240.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.240.000	5.240.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.995.700	44.990.946	(5.004.754)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	49.995.700	44.990.946	(5.004.754)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	49.995.700	44.990.946	(5.004.754)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.828.000	90.828.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	90.828.000	90.828.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	90.828.000	90.828.000	0	
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.656.812.315**	**1.722.741.027**	**65.928.712**	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	222.800.355	222.800.355	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	222.800.355	222.800.355	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	222.800.355	222.800.355	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	03				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1.246.250.772	1.452.250.772	206.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	03	5	1		BELANJA OPERASI	1.246.250.772	1.452.250.772	206.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.246.250.772	1.452.250.772	206.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.699.400	27.699.400	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	27.699.400	27.699.400	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.699.400	27.699.400	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	140.071.288	0	(140.071.288)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2		BELANJA MODAL	140.071.288	0	(140.071.288)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	140.071.288	0	(140.071.288)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.990.500	19.990.500	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	1		BELANJA OPERASI	16.524.850	3.567.750	(12.957.100)	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.524.850	3.567.750	(12.957.100)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	2		BELANJA MODAL	3.465.650	16.422.750	12.957.100	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	16.422.750	16.422.750	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.465.650	0	(3.465.650)	
									Jumlah Belanja	**104.782.968.770**	**104.766.182.937**	**(16.785.833)**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(104.282.968.770)**	**(104.366.182.937)**	**(83.214.167)**	
0	**00**	**1.03.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.1.03.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	**04**	**1.04.2.10.1.03.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**				
1	**04**	**1.04.2.10.1.03.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**30.000.000**	**30.000.000**	**0**	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	30.000.000	30.000.000	0	
									Jumlah Pendapatan	**30.000.000**	**30.000.000**	**0**	
0	**00**	**1.04.2.10.1.03.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
1	**03**	**1.04.2.10.1.03.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**11.857.481.831**	**12.243.011.231**	**385.529.400**	
1	**03**	**1.04.2.10.1.03.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**2.990.084.631**	**3.087.241.631**	**97.157.000**	
1	**03**	**1.04.2.10.1.03.01.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**2.990.084.631**	**3.087.241.631**	**97.157.000**	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.01	04				Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.078.085.133	1.213.736.133	135.651.000	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	1.078.085.133	1.213.736.133	135.651.000	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.01	04	5	1	01	Belanja Pegawai	2.810.000	0	(2.810.000)	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.075.275.133	1.213.736.133	138.461.000	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.01	06				Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.831.999.698	1.823.505.698	(8.494.000)	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	1.831.999.698	1.823.505.698	(8.494.000)	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.831.999.698	1.823.505.698	(8.494.000)	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.01	12				Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	79.999.800	49.999.800	(30.000.000)	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.01	12	5	1		BELANJA OPERASI	79.999.800	49.999.800	(30.000.000)	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.01	12	5	1	01	Belanja Pegawai	8.670.000	8.670.000	0	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.01	12	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	71.329.800	41.329.800	(30.000.000)	
1	**03**	**1.04.2.10.1.03.01.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**7.132.397.600**	**7.132.397.600**	**0**	
1	**03**	**1.04.2.10.1.03.01.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**7.132.397.600**	**7.132.397.600**	**0**	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01	01				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	129.080.600	129.080.600	0	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	129.080.600	129.080.600	0	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01	01	5	1	01	Belanja Pegawai	28.950.000	28.950.000	0	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.130.600	100.130.600	0	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01	06				Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	7.003.317.000	7.003.317.000	0	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	7.003.317.000	7.003.317.000	0	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.003.317.000	7.003.317.000	0	
1	**03**	**1.04.2.10.1.03.01.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**549.999.900**	**534.938.900**	**(15.061.000)**	
1	**03**	**1.04.2.10.1.03.01.0000**	**06**	**2.01**	**00**				**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**549.999.900**	**534.938.900**	**(15.061.000)**	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	06	2.01	12				Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	549.999.900	534.938.900	(15.061.000)	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	06	2.01	12	5	2		BELANJA MODAL	549.999.900	534.938.900	(15.061.000)	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	06	2.01	12	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	549.999.900	534.938.900	(15.061.000)	
1	**03**	**1.04.2.10.1.03.01.0000**	**08**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**1.184.999.700**	**1.488.433.100**	**303.433.400**	
1	**03**	**1.04.2.10.1.03.01.0000**	**08**	**2.01**	**00**				**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**1.184.999.700**	**1.488.433.100**	**303.433.400**	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	08	2.01	01				Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	160.000.000	116.400.000	(43.600.000)	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	08	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	160.000.000	116.400.000	(43.600.000)	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	08	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000	116.400.000	(43.600.000)	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	08	2.01	02				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1.024.999.700	1.372.033.100	347.033.400	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	08	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	224.999.900	586.423.300	361.423.400	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	08	2.01	02	5	1	01	Belanja Pegawai	2.810.000	0	(2.810.000)	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	08	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	222.189.900	586.423.300	364.233.400	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	08	2.01	02	5	2		BELANJA MODAL	799.999.800	785.609.800	(14.390.000)	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	08	2.01	02	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	799.999.800	785.609.800	(14.390.000)	
1	**04**	**1.04.2.10.1.03.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**17.764.383.605**	**18.633.301.375**	**868.917.770**	
1	**04**	**1.04.2.10.1.03.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**137.999.800**	**87.999.800**	**(50.000.000)**	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	**04**	**1.04.2.10.1.03.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**37.999.800**	**37.999.800**	**0**	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	02	2.01	04				Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	37.999.800	37.999.800	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	02	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	37.033.400	37.033.400	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	02	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	37.033.400	37.033.400	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	02	2.01	04	5	2		BELANJA MODAL	966.400	966.400	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	02	2.01	04	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	966.400	966.400	0	
1	**04**	**1.04.2.10.1.03.01.0000**	**02**	**2.03**	**00**				**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**100.000.000**	**50.000.000**	**(50.000.000)**	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	02	2.03	01				Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	100.000.000	50.000.000	(50.000.000)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	02	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	100.000.000	50.000.000	(50.000.000)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	02	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	50.000.000	(50.000.000)	
1	**04**	**1.04.2.10.1.03.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**554.999.800**	**536.999.800**	**(18.000.000)**	
1	**04**	**1.04.2.10.1.03.01.0000**	**03**	**2.02**	**00**				**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**100.000.000**	**98.000.000**	**(2.000.000)**	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.02	02				Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	100.000.000	98.000.000	(2.000.000)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	99.033.600	98.000.000	(1.033.600)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	2.170.000	2.170.000	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	96.863.600	95.830.000	(1.033.600)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.02	02	5	2		BELANJA MODAL	966.400	0	(966.400)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.02	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	966.400	0	(966.400)	
1	**04**	**1.04.2.10.1.03.01.0000**	**03**	**2.03**	**00**				**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**454.999.800**	**438.999.800**	**(16.000.000)**	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.03	02				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	29.999.800	27.999.800	(2.000.000)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	29.999.800	27.999.800	(2.000.000)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.999.800	27.999.800	(2.000.000)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.03	03				Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	425.000.000	411.000.000	(14.000.000)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	425.000.000	411.000.000	(14.000.000)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000	111.000.000	(14.000.000)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.03	03	5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	300.000.000	300.000.000	0	
1	**04**	**1.04.2.10.1.03.01.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**5.517.726.610**	**6.276.784.410**	**759.057.800**	
1	**04**	**1.04.2.10.1.03.01.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**5.517.726.610**	**6.276.784.410**	**759.057.800**	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01	02				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	4.615.236.110	5.480.533.910	865.297.800	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	2.208.523.010	2.290.873.310	82.350.300	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.208.523.010	2.290.873.310	82.350.300	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01	02	5	2		BELANJA MODAL	2.406.713.100	3.189.660.600	782.947.500	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.951.000	6.951.000	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01	02	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	449.999.800	441.225.800	(8.774.000)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01	02	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.949.762.300	2.741.483.800	791.721.500	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01	03				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	902.490.500	796.250.500	(106.240.000)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	902.490.500	796.250.500	(106.240.000)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	902.490.500	796.250.500	(106.240.000)	
1	**04**	**1.04.2.10.1.03.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**11.553.657.395**	**11.731.517.365**	**177.859.970**	
1	**04**	**1.04.2.10.1.03.01.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**129.334.700**	**71.224.700**	**(58.110.000)**	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	106.658.200	48.548.200	(58.110.000)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	106.658.200	48.548.200	(58.110.000)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	106.658.200	48.548.200	(58.110.000)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.678.500	7.678.500	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	7.678.500	7.678.500	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.678.500	7.678.500	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.998.000	14.998.000	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	14.998.000	14.998.000	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.998.000	14.998.000	0	
1	**04**	**1.04.2.10.1.03.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.111.885.595**	**3.206.236.197**	**94.350.602**	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.022.370.195	2.995.920.797	(26.449.398)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.022.370.195	2.995.920.797	(26.449.398)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	3.022.370.195	2.995.920.797	(26.449.398)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78.517.200	199.317.200	120.800.000	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	78.517.200	199.317.200	120.800.000	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	78.517.200	183.317.200	104.800.000	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	16.000.000	16.000.000	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.998.200	10.998.200	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	10.998.200	10.998.200	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.998.200	10.998.200	0	
1	**04**	**1.04.2.10.1.03.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**498.493.400**	**487.429.200**	**(11.064.200)**	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.996.500	14.996.500	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	14.996.500	14.996.500	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.996.500	14.996.500	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.768.100	39.768.100	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	39.768.100	39.768.100	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	39.768.100	39.768.100	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.616.500	22.616.500	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	22.616.500	22.616.500	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.616.500	22.616.500	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.605.900	31.605.900	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	31.605.900	31.605.900	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	31.605.900	31.605.900	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.676.400	10.677.200	(19.999.200)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	30.676.400	10.677.200	(19.999.200)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.676.400	10.677.200	(19.999.200)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.160.000	11.160.000	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	08	5	1		BELANJA OPERASI	11.160.000	11.160.000	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.160.000	11.160.000	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347.670.000	356.605.000	8.935.000	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	347.670.000	356.605.000	8.935.000	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	347.670.000	356.605.000	8.935.000	
1	**04**	**1.04.2.10.1.03.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**263.015.100**	**248.015.100**	**(15.000.000)**	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	263.015.100	248.015.100	(15.000.000)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	263.015.100	248.015.100	(15.000.000)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	263.015.100	248.015.100	(15.000.000)	
1	**04**	**1.04.2.10.1.03.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7.301.314.800**	**7.518.998.368**	**217.683.568**	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.950.000	4.950.000	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.950.000	4.950.000	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000	4.950.000	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.218.900.000	7.436.583.568	217.683.568	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	7.218.900.000	7.436.583.568	217.683.568	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.218.900.000	7.436.583.568	217.683.568	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	77.464.800	77.464.800	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	77.464.800	77.464.800	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	77.464.800	77.464.800	0	
1	**04**	**1.04.2.10.1.03.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**249.613.800**	**199.613.800**	**(50.000.000)**	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	175.177.600	125.177.600	(50.000.000)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	175.177.600	125.177.600	(50.000.000)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	175.177.600	125.177.600	(50.000.000)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	54.793.700	54.793.700	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	54.793.700	54.793.700	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	54.793.700	54.793.700	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.09	11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.642.500	19.642.500	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.09	11	5	1		BELANJA OPERASI	19.642.500	19.642.500	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.09	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.642.500	19.642.500	0	
2	**10**	**1.04.2.10.1.03.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**312.875.200**	**176.897.400**	**(135.977.800)**	
2	**10**	**1.04.2.10.1.03.01.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**74.977.300**	**0**	**(74.977.300)**	
2	**10**	**1.04.2.10.1.03.01.0000**	**06**	**2.01**	**00**				**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**74.977.300**	**0**	**(74.977.300)**	
2	10	1.04.2.10.1.03.01.0000	06	2.01	03				Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	74.977.300	0	(74.977.300)	
2	10	1.04.2.10.1.03.01.0000	06	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	74.977.300	0	(74.977.300)	
2	10	1.04.2.10.1.03.01.0000	06	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	74.977.300	0	(74.977.300)	
2	**10**	**1.04.2.10.1.03.01.0000**	**10**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**237.897.900**	**176.897.400**	**(61.000.500)**	
2	**10**	**1.04.2.10.1.03.01.0000**	**10**	**2.01**	**00**				**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**237.897.900**	**176.897.400**	**(61.000.500)**	

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	10	1.04.2.10.1.03.01.0000	10	2.01	01					Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	142.032.000	102.031.500	(40.000.500)	
2	10	1.04.2.10.1.03.01.0000	10	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	136.932.000	102.031.500	(34.900.500)	
2	10	1.04.2.10.1.03.01.0000	10	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	136.932.000	102.031.500	(34.900.500)	
2	10	1.04.2.10.1.03.01.0000	10	2.01	01	5	2			BELANJA MODAL	5.100.000	0	(5.100.000)	
2	10	1.04.2.10.1.03.01.0000	10	2.01	01	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.100.000	0	(5.100.000)	
2	10	1.04.2.10.1.03.01.0000	10	2.01	03					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	95.865.900	74.865.900	(21.000.000)	
2	10	1.04.2.10.1.03.01.0000	10	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	95.865.900	74.865.900	(21.000.000)	
2	10	1.04.2.10.1.03.01.0000	10	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	95.865.900	74.865.900	(21.000.000)	
Jumlah Belanja											**29.934.740.636**	**31.053.210.006**	**1.118.469.370**	
Total Surplus/(Defisit)											**(29.904.740.636)**	**(31.023.210.006)**	**(1.118.469.370)**	
0	**00**	**1.04.2.10.1.03.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**				**PEMBIAYAAN**				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											**0**	**0**	**0**	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											**0**	**0**	**0**	

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	**0**	**0**	
0	**00**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**9.564.580.913**	**10.891.754.552**	**1.327.173.639**	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**1.618.428.150**	**2.490.672.750**	**872.244.600**	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**1.265.281.350**	**1.989.275.050**	**723.993.700**	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.265.281.350	1.989.275.050	723.993.700	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.265.281.350	1.989.275.050	723.993.700	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.265.281.350	1.989.275.050	723.993.700	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**353.146.800**	**501.397.700**	**148.250.900**	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	0	98.250.800	98.250.800	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	0	98.250.800	98.250.800	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	98.250.800	98.250.800	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02				Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	214.199.900	264.200.000	50.000.100	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	214.199.900	264.200.000	50.000.100	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	214.199.900	264.200.000	50.000.100	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03				Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	138.946.900	138.946.900	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	138.946.900	138.946.900	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	138.946.900	138.946.900	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**168.300.000**	**368.249.900**	**199.949.900**	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**2.01**	**00**				**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**168.300.000**	**368.249.900**	**199.949.900**	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	159.900.000	209.850.000	49.950.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	159.900.000	209.850.000	49.950.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	159.900.000	209.850.000	49.950.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	8.400.000	158.399.900	149.999.900	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	0	149.999.900	149.999.900	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	5	1	01	Belanja Pegawai	0	1.210.000	1.210.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	148.789.900	148.789.900	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	5	2		BELANJA MODAL	8.400.000	8.400.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.400.000	8.400.000	0	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.777.852.763**	**8.032.831.902**	**254.979.139**	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**81.999.700**	**81.999.700**	**0**	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.900	4.999.900	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.999.900	4.999.900	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.900	4.999.900	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.999.900	4.999.900	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	4.999.900	4.999.900	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.900	4.999.900	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.999.900	4.999.900	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	4.999.900	4.999.900	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.900	4.999.900	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.000.000	62.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	62.000.000	62.000.000	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000	62.000.000	0	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.451.365.885**	**2.653.704.274**	**202.338.389**	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.396.126.685	2.598.465.074	202.338.389	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.396.126.685	2.598.465.074	202.338.389	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.396.126.685	2.598.465.074	202.338.389	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.239.200	50.239.200	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	50.239.200	50.239.200	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	50.239.200	50.239.200	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.05**	**00**				**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**399.932.200**	**0**	**(399.932.200)**	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	399.932.200	0	(399.932.200)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	5	1		BELANJA OPERASI	399.932.200	0	(399.932.200)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	399.932.200	0	(399.932.200)	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**211.279.100**	**271.304.100**	**60.025.000**	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.999.600	7.999.600	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	7.999.600	7.999.600	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.999.600	7.999.600	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.098.200	24.098.200	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	24.098.200	24.098.200	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.098.200	24.098.200	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.171.300	6.171.300	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	6.171.300	6.171.300	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.171.300	6.171.300	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.400.000	3.400.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	3.400.000	3.400.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000	3.400.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.610.000	229.635.000	60.025.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	169.610.000	229.635.000	60.025.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	169.610.000	229.635.000	60.025.000	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**94.210.100**	**46.736.700**	**(47.473.400)**	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94.210.100	46.736.700	(47.473.400)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	94.210.100	46.736.700	(47.473.400)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.210.100	46.736.700	(47.473.400)	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.232.895.728**	**4.548.695.328**	**315.799.600**	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.330.000	1.330.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.330.000	1.330.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.330.000	1.330.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.998.900	33.998.500	6.999.600	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	26.998.900	33.998.500	6.999.600	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	26.998.900	33.998.500	6.999.600	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.204.566.828	4.513.366.828	308.800.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	4.204.566.828	4.513.366.828	308.800.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.204.566.828	4.513.366.828	308.800.000	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**306.170.050**	**430.391.800**	**124.221.750**	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	298.797.250	423.019.000	124.221.750	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	298.797.250	423.019.000	124.221.750	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	298.797.250	423.019.000	124.221.750	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.372.800	7.372.800	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	7.372.800	7.372.800	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.372.800	7.372.800	0	
									Jumlah Belanja	**9.564.580.913**	**10.891.754.552**	**1.327.173.639**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(9.564.580.913)**	**(10.891.754.552)**	**(1.327.173.639)**	
0	**00**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	**0**	**0**	
0	**00**	**1.05.0.00.0.00.04.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.04.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**4.214.979.790**	**4.063.637.228**	**(151.342.562)**	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.04.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**1.001.997.400**	**880.970.770**	**(121.026.630)**	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.04.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**554.998.900**	**554.868.900**	**(130.000)**	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	01				Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	499.999.000	513.049.000	13.050.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	499.999.000	513.049.000	13.050.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	01	5	1	01	Belanja Pegawai	1.930.000	14.980.000	13.050.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	498.069.000	498.069.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	02				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	54.999.900	41.819.900	(13.180.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	7.949.900	7.943.900	(6.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.949.900	7.943.900	(6.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	02	5	2		BELANJA MODAL	47.050.000	33.876.000	(13.174.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.050.000	33.876.000	(13.174.000)	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.04.0000**	**03**	**2.02**	**00**				**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**311.998.500**	**227.932.670**	**(84.065.830)**	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	04				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	15.000.000	5.000.000	(10.000.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	15.000.000	5.000.000	(10.000.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	5.000.000	(10.000.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	06				Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	186.998.500	156.998.500	(30.000.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	06	5	1		BELANJA OPERASI	186.998.500	156.998.500	(30.000.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	186.998.500	156.998.500	(30.000.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	07				Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	100.000.000	62.934.170	(37.065.830)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	100.000.000	62.934.170	(37.065.830)	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	62.934.170	(37.065.830)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	08				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	10.000.000	3.000.000	(7.000.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	08	5	1		BELANJA OPERASI	10.000.000	3.000.000	(7.000.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	3.000.000	(7.000.000)	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.04.0000**	**03**	**2.03**	**00**				**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**130.000.000**	**95.169.200**	**(34.830.800)**	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	01				Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	5.000.000	5.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	02				Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	95.000.000	76.869.200	(18.130.800)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	95.000.000	76.869.200	(18.130.800)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000	76.869.200	(18.130.800)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	03				Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10.000.000	3.000.000	(7.000.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	10.000.000	3.000.000	(7.000.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	3.000.000	(7.000.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	04				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10.000.000	9.000.000	(1.000.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	04	5	1		BELANJA OPERASI	10.000.000	9.000.000	(1.000.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	9.000.000	(1.000.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	05				Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	10.000.000	1.300.000	(8.700.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	05	5	1		BELANJA OPERASI	10.000.000	1.300.000	(8.700.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	1.300.000	(8.700.000)	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.04.0000**	**03**	**2.04**	**00**				**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**5.000.000**	**3.000.000**	**(2.000.000)**	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.04	04				Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	5.000.000	3.000.000	(2.000.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.04	04	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	3.000.000	(2.000.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.04	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	3.000.000	(2.000.000)	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.04.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.212.982.390**	**3.182.666.458**	**(30.315.932)**	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.04.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**35.483.300**	**41.007.300**	**5.524.000**	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.772.200	4.772.200	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.772.200	4.772.200	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.772.200	4.772.200	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.246.600	4.246.600	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	4.246.600	4.246.600	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.246.600	4.246.600	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.464.500	31.988.500	5.524.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	26.464.500	31.988.500	5.524.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	26.464.500	31.988.500	5.524.000	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.04.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.462.094.390**	**2.368.334.378**	**(93.760.012)**	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.415.747.290	2.321.987.278	(93.760.012)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.415.747.290	2.321.987.278	(93.760.012)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.415.747.290	2.321.987.278	(93.760.012)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.347.200	41.347.200	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	41.347.200	41.347.200	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	41.347.200	41.347.200	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.999.900	4.999.900	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	4.999.900	4.999.900	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.900	4.999.900	0	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.04.0000**	**01**	**2.05**	**00**				**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**87.999.900**	**0**	**(87.999.900)**	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	02				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	87.999.900	0	(87.999.900)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	02	5	1		BELANJA OPERASI	87.999.900	0	(87.999.900)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	87.999.900	0	(87.999.900)	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.04.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**228.862.100**	**301.664.800**	**72.802.700**	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.601.900	10.186.100	584.200	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	9.601.900	10.186.100	584.200	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.601.900	10.186.100	584.200	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.477.600	20.477.600	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	20.477.600	20.477.600	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.477.600	20.477.600	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.986.900	10.081.900	4.095.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	5.986.900	8.206.400	2.219.500	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.986.900	8.206.400	2.219.500	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	03	5	2		BELANJA MODAL	0	1.875.500	1.875.500	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	1.875.500	1.875.500	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.899.300	22.015.800	1.116.500	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	20.899.300	22.015.800	1.116.500	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.899.300	22.015.800	1.116.500	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.996.400	19.996.400	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	19.996.400	19.996.400	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.996.400	19.996.400	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.900.000	218.907.000	67.007.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	151.900.000	218.907.000	67.007.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	151.900.000	218.907.000	67.007.000	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.04.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**9.701.400**	**37.908.800**	**28.207.400**	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	28.207.400	28.207.400	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	06	5	1		BELANJA OPERASI	0	7.000.000	7.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	7.000.000	7.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	0	21.207.400	21.207.400	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	21.207.400	21.207.400	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.701.400	9.701.400	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	10	5	2		BELANJA MODAL	9.701.400	9.701.400	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.701.400	9.701.400	0	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.04.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**251.346.300**	**252.146.300**	**800.000**	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	2.000.000	800.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.200.000	2.000.000	800.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000	2.000.000	800.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.159.100	32.159.100	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	32.159.100	32.159.100	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	32.159.100	32.159.100	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	217.987.200	217.987.200	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	217.987.200	217.987.200	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	217.987.200	217.987.200	0	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.04.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**137.495.000**	**181.604.880**	**44.109.880**	

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.042.500	97.964.900	16.922.400	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	81.042.500	97.964.900	16.922.400	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	81.042.500	97.964.900	16.922.400	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.230.800	47.650.380	21.419.580	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	26.230.800	47.650.380	21.419.580	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	26.230.800	47.650.380	21.419.580	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.058.100	6.058.100	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	6.058.100	6.058.100	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	6.058.100	6.058.100	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	11					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.163.600	29.931.500	5.767.900	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	11	5	1			BELANJA OPERASI	22.933.600	28.291.500	5.357.900	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	11	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	22.933.600	28.291.500	5.357.900	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	11	5	2			BELANJA MODAL	1.230.000	1.640.000	410.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	11	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.230.000	1.640.000	410.000	
Jumlah Belanja											**4.214.979.790**	**4.063.637.228**	**(151.342.562)**	
Total Surplus/(Defisit)											**(4.214.979.790)**	**(4.063.637.228)**	**151.342.562**	
0	**00**	**1.05.0.00.0.00.04.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**				**PEMBIAYAAN**				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											**0**	**0**	**0**	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											**0**	**0**	**0**	

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 DINAS SOSIAL

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
										Jumlah Pendapatan	**0**	**0**	**0**	
0	**00**	**1.06.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**				**BELANJA**				
1	**06**	**1.06.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**4.616.029.520**	**4.717.127.585**	**101.098.065**	
1	**06**	**1.06.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**750.516.300**	**752.916.200**	**2.399.900**	
1	**06**	**1.06.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.03**	**00**					**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**750.516.300**	**752.916.200**	**2.399.900**	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	750.516.300	752.916.200	2.399.900	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	5	1			BELANJA OPERASI	750.516.300	752.916.200	2.399.900	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	380.516.300	382.916.200	2.399.900	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	5	1	05		Belanja Hibah	370.000.000	370.000.000	0	
1	**06**	**1.06.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**0.00**	**00**					**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**279.543.700**	**290.473.500**	**10.929.800**	
1	**06**	**1.06.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**2.01**	**00**					**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**106.079.400**	**102.979.400**	**(3.100.000)**	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03					Penyediaan Alat Bantu	88.000.000	84.900.000	(3.100.000)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	88.000.000	84.900.000	(3.100.000)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	13.000.000	9.900.000	(3.100.000)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	5	1	06		Belanja Bantuan Sosial	75.000.000	75.000.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04					Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5.108.000	5.108.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	5.108.000	5.108.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	5.108.000	5.108.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	12.971.400	12.971.400	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	5	1			BELANJA OPERASI	12.971.400	12.971.400	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	12.971.400	12.971.400	0	
1	**06**	**1.06.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**2.02**	**00**					**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**173.464.300**	**187.494.100**	**14.029.800**	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	02				Pemberian Layanan Kedaruratan	7.000.000	7.000.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	7.000.000	7.000.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000	7.000.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	05				Penyediaan Alat Bantu	46.225.000	45.255.000	(970.000)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	46.225.000	45.255.000	(970.000)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.225.000	8.255.000	(970.000)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	05	5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	37.000.000	37.000.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	07				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	97.487.400	82.487.400	(15.000.000)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	97.487.400	82.487.400	(15.000.000)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	82.487.400	82.487.400	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	07	5	1	05	Belanja Hibah	15.000.000	0	(15.000.000)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	11				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	4.444.900	4.444.900	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	11	5	1		BELANJA OPERASI	4.444.900	4.444.900	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.444.900	4.444.900	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	12				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	9.900.000	39.899.800	29.999.800	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	12	5	1		BELANJA OPERASI	9.900.000	39.899.800	29.999.800	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	12	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000	39.899.800	29.999.800	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	13				Pemberian Layanan Rujukan	8.407.000	8.407.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	13	5	1		BELANJA OPERASI	8.407.000	8.407.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	13	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.407.000	8.407.000	0	
1	**06**	**1.06.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**470.000.000**	**426.999.900**	**(43.000.100)**	
1	**06**	**1.06.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**2.02**	**00**				**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**470.000.000**	**426.999.900**	**(43.000.100)**	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	02				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	170.000.000	196.999.900	26.999.900	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	170.000.000	196.999.900	26.999.900	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000	196.999.900	26.999.900	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	03				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	300.000.000	230.000.000	(70.000.000)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	300.000.000	230.000.000	(70.000.000)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	235.000.000	165.000.000	(70.000.000)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	03	5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	65.000.000	65.000.000	0	
1	**06**	**1.06.0.00.0.00.01.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**215.000.000**	**314.999.800**	**99.999.800**	
1	**06**	**1.06.0.00.0.00.01.0000**	**06**	**2.01**	**00**				**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**180.000.000**	**279.999.800**	**99.999.800**	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01				Penyediaan Makanan	180.000.000	279.999.800	99.999.800	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	180.000.000	279.999.800	99.999.800	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	39.999.800	14.999.800	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	155.000.000	240.000.000	85.000.000	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	**06**	**1.06.0.00.0.00.01.0000**	**06**	**2.02**	**00**				**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**35.000.000**	**35.000.000**	**0**	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.02	02				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	35.000.000	35.000.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	35.000.000	35.000.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	35.000.000	0	
1	**06**	**1.06.0.00.0.00.01.0000**	**07**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**204.999.900**	**82.906.900**	**(122.093.000)**	
1	**06**	**1.06.0.00.0.00.01.0000**	**07**	**2.01**	**00**				**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**204.999.900**	**82.906.900**	**(122.093.000)**	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01				Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	198.999.900	76.906.900	(122.093.000)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	198.999.900	76.906.900	(122.093.000)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	198.999.900	76.906.900	(122.093.000)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	6.000.000	6.000.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	6.000.000	6.000.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	6.000.000	0	
1	**06**	**1.06.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.695.969.620**	**2.848.831.285**	**152.861.665**	
1	**06**	**1.06.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**25.869.500**	**25.869.500**	**0**	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	4.000.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.000.000	4.000.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	4.000.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.869.500	16.869.500	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	16.869.500	16.869.500	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.869.500	16.869.500	0	
1	**06**	**1.06.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.193.126.560**	**2.180.335.225**	**(12.791.335)**	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.149.034.960	2.136.243.625	(12.791.335)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.149.034.960	2.136.243.625	(12.791.335)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.149.034.960	2.136.243.625	(12.791.335)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.591.600	39.591.600	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	39.591.600	39.591.600	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	39.591.600	39.591.600	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.500.000	4.500.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	4.500.000	4.500.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000	4.500.000	0	
1	**06**	**1.06.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**241.340.700**	**350.358.700**	**109.018.000**	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.599.700	9.599.700	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	9.599.700	9.599.700	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.599.700	9.599.700	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.000.000	44.457.000	(543.000)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	45.000.000	44.457.000	(543.000)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000	44.457.000	(543.000)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.998.700	32.998.700	3.000.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	29.998.700	32.998.700	3.000.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.998.700	32.998.700	3.000.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.412.600	27.412.600	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	27.412.600	27.412.600	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.412.600	27.412.600	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.058.700	7.050.700	992.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1		BELANJA OPERASI	6.058.700	7.050.700	992.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.058.700	7.050.700	992.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.271.000	228.840.000	105.569.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	123.271.000	228.840.000	105.569.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	123.271.000	228.840.000	105.569.000	
1	**06**	**1.06.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**52.843.200**	**55.843.200**	**3.000.000**	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.843.200	55.843.200	3.000.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2		BELANJA MODAL	52.843.200	55.843.200	3.000.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.843.200	55.843.200	3.000.000	
1	**06**	**1.06.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**125.927.800**	**172.245.200**	**46.317.400**	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.420.000	3.420.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.420.000	3.420.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.420.000	3.420.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.679.800	31.679.800	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	31.679.800	31.679.800	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	31.679.800	31.679.800	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.828.000	137.145.400	46.317.400	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	90.828.000	137.145.400	46.317.400	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	90.828.000	137.145.400	46.317.400	
1	**06**	**1.06.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**56.861.860**	**64.179.460**	**7.317.600**	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.852.260	40.169.860	7.317.600	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	32.852.260	40.169.860	7.317.600	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	32.852.260	40.169.860	7.317.600	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.093.900	7.093.900	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	7.093.900	7.093.900	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.093.900	7.093.900	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.535.700	8.535.700	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	8.535.700	8.535.700	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.535.700	8.535.700	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.380.000	8.380.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	8.380.000	8.380.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.380.000	8.380.000	0	
									Jumlah Belanja	**4.616.029.520**	**4.717.127.585**	**101.098.065**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(4.616.029.520)**	**(4.717.127.585)**	**(101.098.065)**	
0	**00**	**1.06.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01 DINAS KETENAGAKERJAAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	**0**	**0**	
0	**00**	**2.07.3.32.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
2	**07**	**2.07.3.32.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**3.346.390.890**	**3.160.685.912**	**(185.704.978)**	
2	**07**	**2.07.3.32.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**442.642.800**	**592.642.700**	**149.999.900**	
2	**07**	**2.07.3.32.0.00.01.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**409.278.600**	**559.278.500**	**149.999.900**	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	03	2.01	01				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	409.278.600	559.278.500	149.999.900	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	409.278.600	559.278.500	149.999.900	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	409.278.600	559.278.500	149.999.900	
2	**07**	**2.07.3.32.0.00.01.0000**	**03**	**2.02**	**00**				**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**33.364.200**	**33.364.200**	**0**	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	03	2.02	01				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	33.364.200	33.364.200	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	33.364.200	33.364.200	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	33.364.200	33.364.200	0	
2	**07**	**2.07.3.32.0.00.01.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**47.520.000**	**47.520.000**	**0**	
2	**07**	**2.07.3.32.0.00.01.0000**	**04**	**2.01**	**00**				**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**47.520.000**	**47.520.000**	**0**	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	04	2.01	02				Pelayanan antar Kerja	20.000.000	20.000.000	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	20.000.000	20.000.000	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	20.000.000	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	04	2.01	05				Perluasan Kesempatan Kerja	27.520.000	27.520.000	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	04	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	27.520.000	27.520.000	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	04	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.520.000	27.520.000	0	
2	**07**	**2.07.3.32.0.00.01.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**60.000.000**	**60.000.000**	**0**	
2	**07**	**2.07.3.32.0.00.01.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**40.000.000**	**40.000.000**	**0**	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	05	2.01	01				Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	40.000.000	40.000.000	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	05	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	40.000.000	40.000.000	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	05	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	40.000.000	0	
2	**07**	**2.07.3.32.0.00.01.0000**	**05**	**2.02**	**00**				**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**20.000.000**	**20.000.000**	**0**	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	05	2.02	01				Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	05	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	10.000.000	10.000.000	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	05	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	10.000.000	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	05	2.02	05				Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	10.000.000	10.000.000	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	05	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	10.000.000	10.000.000	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	05	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	10.000.000	0	
2	**07**	**2.07.3.32.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.796.228.090**	**2.460.523.212**	**(335.704.878)**	
2	**07**	**2.07.3.32.0.00.01.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**47.952.200**	**15.365.600**	**(32.586.600)**	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.215.600	12.158.000	(21.057.600)	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	33.215.600	12.158.000	(21.057.600)	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	33.215.600	12.158.000	(21.057.600)	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.999.900	3.207.600	(1.792.300)	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	4.999.900	3.207.600	(1.792.300)	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.900	3.207.600	(1.792.300)	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.736.700	0	(9.736.700)	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	9.736.700	0	(9.736.700)	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.736.700	0	(9.736.700)	
2	**07**	**2.07.3.32.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.176.232.470**	**1.983.341.992**	**(192.890.478)**	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.129.885.370	1.938.782.392	(191.102.978)	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.129.885.370	1.938.782.392	(191.102.978)	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.129.885.370	1.938.782.392	(191.102.978)	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.347.200	41.347.200	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	41.347.200	41.347.200	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	41.347.200	41.347.200	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.999.900	3.212.400	(1.787.500)	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	4.999.900	3.212.400	(1.787.500)	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.900	3.212.400	(1.787.500)	
2	**07**	**2.07.3.32.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**233.929.700**	**244.969.100**	**11.039.400**	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.593.000	5.656.900	(3.936.100)	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	9.593.000	5.656.900	(3.936.100)	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.593.000	5.656.900	(3.936.100)	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.672.400	20.972.600	(8.699.800)	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	29.672.400	20.972.600	(8.699.800)	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.672.400	20.972.600	(8.699.800)	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.997.800	6.634.800	(5.363.000)	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	11.997.800	6.634.800	(5.363.000)	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.997.800	6.634.800	(5.363.000)	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.281.900	14.669.200	(1.612.700)	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	16.281.900	14.669.200	(1.612.700)	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.281.900	14.669.200	(1.612.700)	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.394.600	6.394.600	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	6.394.600	6.394.600	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.394.600	6.394.600	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.990.000	190.641.000	30.651.000	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	159.990.000	190.641.000	30.651.000	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	159.990.000	190.641.000	30.651.000	
2	**07**	**2.07.3.32.0.00.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**51.478.000**	**6.200.000**	**(45.278.000)**	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.478.000	6.200.000	(45.278.000)	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	51.478.000	6.200.000	(45.278.000)	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.478.000	6.200.000	(45.278.000)	
2	**07**	**2.07.3.32.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**176.158.600**	**175.658.600**	**(500.000)**	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	500.000	(500.000)	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.000.000	500.000	(500.000)	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000	500.000	(500.000)	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.999.400	47.999.400	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	47.999.400	47.999.400	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	47.999.400	47.999.400	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.159.200	127.159.200	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	127.159.200	127.159.200	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	127.159.200	127.159.200	0	
2	**07**	**2.07.3.32.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**110.477.120**	**34.987.920**	**(75.489.200)**	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.999.120	34.987.920	(2.011.200)	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	36.999.120	34.987.920	(2.011.200)	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	36.999.120	34.987.920	(2.011.200)	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	73.478.000	0	(73.478.000)	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2		BELANJA MODAL	73.478.000	0	(73.478.000)	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	73.478.000	0	(73.478.000)	
									Jumlah Belanja	**3.346.390.890**	**3.160.685.912**	**(185.704.978)**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(3.346.390.890)**	**(3.160.685.912)**	**185.704.978**	
0	**00**	**2.07.3.32.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Organisasi : 2.09.3.25.3.27.01 DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	**09**	**2.09.3.25.3.27.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**				
2	**09**	**2.09.3.25.3.27.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**60.000.000**	**60.000.000**	**0**	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	60.000.000	60.000.000	0	
									Jumlah Pendapatan	**60.000.000**	**60.000.000**	**0**	
0	**00**	**2.09.3.25.3.27.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
2	**09**	**2.09.3.25.3.27.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**5.463.775.148**	**5.160.413.209**	**(303.361.939)**	
2	**09**	**2.09.3.25.3.27.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**439.999.920**	**439.999.920**	**0**	
2	**09**	**2.09.3.25.3.27.01.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**70.000.000**	**70.000.000**	**0**	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.01	01				Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	40.000.000	40.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	40.000.000	40.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	40.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.01	05				Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	30.000.000	30.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	30.000.000	30.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	30.000.000	0	
2	**09**	**2.09.3.25.3.27.01.0000**	**03**	**2.02**	**00**				**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**64.999.920**	**64.999.920**	**0**	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.02	03				Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	39.998.420	39.998.420	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	39.998.420	39.998.420	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	39.998.420	39.998.420	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.02	04				Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	25.001.500	25.001.500	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	25.001.500	25.001.500	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	25.001.500	25.001.500	0	
2	**09**	**2.09.3.25.3.27.01.0000**	**03**	**2.04**	**00**				**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**305.000.000**	**305.000.000**	**0**	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.04	02				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	225.000.000	225.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	225.000.000	225.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000	225.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.04	03				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	80.000.000	80.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.04	03	5	1		BELANJA OPERASI	80.000.000	80.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.04	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	80.000.000	0	
2	**09**	**2.09.3.25.3.27.01.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**265.000.000**	**200.000.000**	**(65.000.000)**	
2	**09**	**2.09.3.25.3.27.01.0000**	**04**	**2.02**	**00**				**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**265.000.000**	**200.000.000**	**(65.000.000)**	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.02	02				Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	265.000.000	200.000.000	(65.000.000)	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	265.000.000	200.000.000	(65.000.000)	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	265.000.000	200.000.000	(65.000.000)	
2	**09**	**2.09.3.25.3.27.01.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**25.000.000**	**25.000.000**	**0**	
2	**09**	**2.09.3.25.3.27.01.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**25.000.000**	**25.000.000**	**0**	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	05	2.01	02				Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	05	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	25.000.000	25.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	05	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	25.000.000	0	
2	**09**	**2.09.3.25.3.27.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.733.775.228**	**4.495.413.289**	**(238.361.939)**	
2	**09**	**2.09.3.25.3.27.01.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**90.000.000**	**70.000.000**	**(20.000.000)**	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	10.000.000	10.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	10.000.000	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.01	02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	10.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	10.000.000	10.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	10.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	10.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	10.000.000	10.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	10.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000	40.000.000	(20.000.000)	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	60.000.000	40.000.000	(20.000.000)	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	40.000.000	(20.000.000)	
2	**09**	**2.09.3.25.3.27.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.693.619.978**	**3.390.120.039**	**(303.499.939)**	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.634.269.978	3.314.090.039	(320.179.939)	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.634.269.978	3.314.090.039	(320.179.939)	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	3.634.269.978	3.314.090.039	(320.179.939)	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48.835.200	65.515.200	16.680.000	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	48.835.200	65.515.200	16.680.000	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	48.835.200	65.515.200	16.680.000	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.514.800	10.514.800	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	10.514.800	10.514.800	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.514.800	10.514.800	0	
2	**09**	**2.09.3.25.3.27.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**301.999.300**	**371.999.300**	**70.000.000**	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.000	9.999.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	9.999.000	9.999.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.000	9.999.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000	35.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	35.000.000	35.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	35.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	20.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	20.000.000	20.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	20.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.000.300	22.000.300	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	22.000.300	22.000.300	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.000.300	22.000.300	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	25.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	25.000.000	25.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	25.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.000.000	260.000.000	70.000.000	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	190.000.000	260.000.000	70.000.000	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000	260.000.000	70.000.000	
2	**09**	**2.09.3.25.3.27.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**56.474.000**	**56.474.000**	**0**	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.07	05				Pengadaan Mebel	4.374.000	4.374.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.07	05	5	2		BELANJA MODAL	4.374.000	4.374.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.07	05	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.374.000	4.374.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.100.000	52.100.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.07	06	5	1		BELANJA OPERASI	16.500.000	16.500.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.07	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000	16.500.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	35.600.000	35.600.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.600.000	35.600.000	0	
2	**09**	**2.09.3.25.3.27.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**459.268.900**	**474.406.900**	**15.138.000**	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.500.000	1.500.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000	1.500.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.160.100	35.160.100	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	35.160.100	35.160.100	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	35.160.100	35.160.100	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	422.608.800	437.746.800	15.138.000	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	422.608.800	437.746.800	15.138.000	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	422.608.800	437.746.800	15.138.000	
2	**09**	**2.09.3.25.3.27.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**132.413.050**	**132.413.050**	**0**	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	81.494.250	81.494.250	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	81.494.250	81.494.250	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	81.494.250	81.494.250	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.477.800	9.477.800	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	9.477.800	9.477.800	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.477.800	9.477.800	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.09	11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41.441.000	41.441.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.09	11	5	1		BELANJA OPERASI	41.441.000	41.441.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.09	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	41.441.000	41.441.000	0	
3	**25**	**2.09.3.25.3.27.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**1.577.571.500**	**2.217.064.650**	**639.493.150**	
3	**25**	**2.09.3.25.3.27.01.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**1.577.571.500**	**2.217.064.650**	**639.493.150**	
3	**25**	**2.09.3.25.3.27.01.0000**	**04**	**2.04**	**00**				**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**1.577.571.500**	**2.217.064.650**	**639.493.150**	
3	25	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.04	02				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	500.000.000	400.000.000	
3	25	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	100.000.000	500.000.000	400.000.000	
3	25	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	500.000.000	400.000.000	
3	25	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.04	03				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000	0	
3	25	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.04	03	5	1		BELANJA OPERASI	150.000.000	150.000.000	0	
3	25	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.04	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	150.000.000	0	
3	25	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.04	05				Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	550.000.000	740.320.000	190.320.000	
3	25	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.04	05	5	1		BELANJA OPERASI	550.000.000	740.320.000	190.320.000	
3	25	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.04	05	5	1	01	Belanja Pegawai	1.750.000	0	(1.750.000)	
3	25	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.04	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	548.250.000	740.320.000	192.070.000	
3	25	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.04	06				Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	777.571.500	826.744.650	49.173.150	
3	25	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.04	06	5	1		BELANJA OPERASI	777.571.500	826.744.650	49.173.150	
3	25	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.04	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	777.571.500	826.744.650	49.173.150	
3	**27**	**2.09.3.25.3.27.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**2.736.136.910**	**2.210.142.710**	**(525.994.200)**	
3	**27**	**2.09.3.25.3.27.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**1.298.494.820**	**683.030.720**	**(615.464.100)**	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	**27**	**2.09.3.25.3.27.01.0000**	**02**	**2.05**	**00**				**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**809.994.820**	**110.000.720**	**(699.994.100)**	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	02	2.05	01				Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	789.994.820	90.000.720	(699.994.100)	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	02	2.05	01	5	1		BELANJA OPERASI	318.394.820	90.000.720	(228.394.100)	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	02	2.05	01	5	1	01	Belanja Pegawai	1.360.000	0	(1.360.000)	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	02	2.05	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	317.034.820	90.000.720	(227.034.100)	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	02	2.05	01	5	2		BELANJA MODAL	471.600.000	0	(471.600.000)	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	02	2.05	01	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	471.600.000	0	(471.600.000)	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	02	2.05	05				Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	20.000.000	20.000.000	0	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	02	2.05	05	5	1		BELANJA OPERASI	20.000.000	20.000.000	0	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	02	2.05	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	20.000.000	0	
3	**27**	**2.09.3.25.3.27.01.0000**	**02**	**2.06**	**00**				**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**488.500.000**	**573.030.000**	**84.530.000**	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	02	2.06	01				Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	488.500.000	573.030.000	84.530.000	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	02	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	488.500.000	573.030.000	84.530.000	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	02	2.06	01	5	1	01	Belanja Pegawai	1.210.000	0	(1.210.000)	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	02	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	487.290.000	573.030.000	85.740.000	
3	**27**	**2.09.3.25.3.27.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**972.069.000**	**970.539.000**	**(1.530.000)**	
3	**27**	**2.09.3.25.3.27.01.0000**	**03**	**2.02**	**00**				**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**972.069.000**	**970.539.000**	**(1.530.000)**	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.02	09				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	972.069.000	970.539.000	(1.530.000)	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.02	09	5	1		BELANJA OPERASI	815.920.500	809.519.900	(6.400.600)	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.02	09	5	1	01	Belanja Pegawai	1.530.000	0	(1.530.000)	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.02	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	814.390.500	809.519.900	(4.870.600)	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.02	09	5	2		BELANJA MODAL	156.148.500	161.019.100	4.870.600	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.02	09	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	156.148.500	161.019.100	4.870.600	
3	**27**	**2.09.3.25.3.27.01.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**465.573.090**	**556.572.990**	**90.999.900**	
3	**27**	**2.09.3.25.3.27.01.0000**	**04**	**2.01**	**00**				**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**285.000.000**	**375.999.900**	**90.999.900**	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.01	01				Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	130.000.000	221.000.000	91.000.000	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	130.000.000	221.000.000	91.000.000	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.01	01	5	1	01	Belanja Pegawai	530.000	530.000	0	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	129.470.000	220.470.000	91.000.000	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.01	02				Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	155.000.000	154.999.900	(100)	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	155.000.000	154.999.900	(100)	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.01	02	5	1	01	Belanja Pegawai	530.000	530.000	0	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	154.470.000	154.469.900	(100)	
3	**27**	**2.09.3.25.3.27.01.0000**	**04**	**2.03**	**00**				**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**180.573.090**	**180.573.090**	**0**	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.03	02				Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	180.573.090	180.573.090	0	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	180.573.090	180.573.090	0	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	180.573.090	180.573.090	0	
									Jumlah Belanja	**9.777.483.558**	**9.587.620.569**	**(189.862.989)**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(9.717.483.558)**	**(9.527.620.569)**	**189.862.989**	
0	**00**	**2.09.3.25.3.27.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**				**PENDAPATAN DAERAH**				
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**			**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**230.000.000**	**280.000.000**	**50.000.000**	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	230.000.000	280.000.000	50.000.000	
										Jumlah Pendapatan	**230.000.000**	**280.000.000**	**50.000.000**	
0	**00**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**				**BELANJA**				
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**9.207.261.093**	**9.281.497.827**	**74.236.734**	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**335.000.000**	**334.998.900**	**(1.100)**	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.02**	**00**					**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**335.000.000**	**334.998.900**	**(1.100)**	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02					Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	335.000.000	334.998.900	(1.100)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	335.000.000	334.998.900	(1.100)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	335.000.000	334.998.900	(1.100)	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**204.297.650**	**204.297.650**	**0**	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**2.01**	**00**					**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**76.919.000**	**76.919.000**	**0**	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	33.838.800	33.838.800	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	33.838.800	33.838.800	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	33.838.800	33.838.800	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	21.639.200	21.639.200	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	21.639.200	21.639.200	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	21.639.200	21.639.200	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03					Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	21.441.000	21.441.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	21.441.000	21.441.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	21.441.000	21.441.000	0	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**2.02**	**00**					**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**52.430.000**	**52.430.000**	**0**	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	32.500.000	32.500.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	32.500.000	32.500.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000	32.500.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	19.930.000	19.930.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	19.930.000	19.930.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.930.000	19.930.000	0	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**2.03**	**00**				**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**74.948.650**	**74.948.650**	**0**	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01				Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	32.499.700	32.499.700	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	32.499.700	32.499.700	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	32.499.700	32.499.700	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	04				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	42.448.950	42.448.950	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	04	5	1		BELANJA OPERASI	42.448.950	42.448.950	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	42.448.950	42.448.950	0	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**41.761.400**	**41.761.400**	**0**	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Penyimpanan sementara Limbah B3**	**41.761.400**	**41.761.400**	**0**	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02				Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	41.761.400	41.761.400	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	41.761.400	41.761.400	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	41.761.400	41.761.400	0	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**90.000.000**	**90.000.000**	**0**	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**06**	**2.01**	**00**				**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**90.000.000**	**90.000.000**	**0**	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01				Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	40.000.000	40.000.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	40.000.000	40.000.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	40.000.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03				Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	50.000.000	50.000.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	50.000.000	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**07**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**59.999.800**	**349.999.800**	**290.000.000**	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**07**	**2.02**	**00**				**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	**59.999.800**	**349.999.800**	**290.000.000**	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	07	2.02	01				Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	59.999.800	349.999.800	290.000.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	07	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	59.999.800	349.999.800	290.000.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	07	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	59.999.800	349.999.800	290.000.000	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**08**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**47.082.200**	**47.082.200**	**0**	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**08**	**2.01**	**00**				**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**47.082.200**	**47.082.200**	**0**	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	03				Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	47.082.200	47.082.200	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	47.082.200	47.082.200	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	47.082.200	47.082.200	0	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**09**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**35.677.900**	**0**	**(35.677.900)**	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**09**	**2.01**	**00**				**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**35.677.900**	**0**	**(35.677.900)**	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	01				Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	35.677.900	0	(35.677.900)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	35.677.900	0	(35.677.900)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	35.677.900	0	(35.677.900)	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**10**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**40.000.000**	**40.000.000**	**0**	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**10**	**2.01**	**00**				**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**40.000.000**	**40.000.000**	**0**	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01				Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	40.000.000	40.000.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	40.000.000	40.000.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	40.000.000	0	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**11**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**744.999.900**	**794.999.900**	**50.000.000**	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**11**	**2.01**	**00**				**Pengelolaan Sampah**	**744.999.900**	**794.999.900**	**50.000.000**	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	03				Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	44.999.900	44.999.900	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	44.999.900	44.999.900	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	44.999.900	44.999.900	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	07				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	700.000.000	750.000.000	50.000.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	0	50.000.000	50.000.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	50.000.000	50.000.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	07	5	2		BELANJA MODAL	700.000.000	700.000.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	07	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	700.000.000	700.000.000	0	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.608.442.243**	**7.378.357.977**	**(230.084.266)**	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**45.854.800**	**45.854.800**	**0**	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.354.800	8.354.800	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	8.354.800	8.354.800	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.354.800	8.354.800	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.500.000	32.500.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	32.500.000	32.500.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000	32.500.000	0	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.905.523.453**	**2.528.445.687**	**(377.077.766)**	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.830.724.253	2.453.646.487	(377.077.766)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.830.724.253	2.453.646.487	(377.077.766)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.830.724.253	2.453.646.487	(377.077.766)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	69.799.200	69.799.200	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	69.799.200	69.799.200	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	69.799.200	69.799.200	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.05**	**00**				**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**60.747.500**	**60.747.500**	**0**	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60.747.500	60.747.500	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	5	1		BELANJA OPERASI	60.747.500	60.747.500	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	60.747.500	60.747.500	0	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**301.278.100**	**362.628.200**	**61.350.100**	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.990.800	4.990.800	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.990.800	4.990.800	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.990.800	4.990.800	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.796.600	64.800.900	5.004.300	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	59.796.600	64.800.900	5.004.300	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	59.796.600	64.800.900	5.004.300	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.869.900	38.095.700	7.225.800	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	30.869.900	38.095.700	7.225.800	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.869.900	38.095.700	7.225.800	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.999.800	24.999.800	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	24.999.800	24.999.800	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.999.800	24.999.800	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.621.000	229.741.000	49.120.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	180.621.000	229.741.000	49.120.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	180.621.000	229.741.000	49.120.000	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12.329.600**	**12.329.600**	**0**	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05				Pengadaan Mebel	7.500.000	7.500.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	2		BELANJA MODAL	7.500.000	7.500.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.500.000	7.500.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.829.600	4.829.600	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	4.829.600	4.829.600	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.829.600	4.829.600	0	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.063.411.400**	**3.067.408.100**	**3.996.700**	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.000.000	2.000.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	2.000.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.359.700	20.359.600	(6.000.100)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	26.359.700	20.359.600	(6.000.100)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	26.359.700	20.359.600	(6.000.100)	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.035.051.700	3.045.048.500	9.996.800	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	3.035.051.700	3.045.048.500	9.996.800	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.035.051.700	3.045.048.500	9.996.800	
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.219.297.390**	**1.300.944.090**	**81.646.700**	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.787.530	78.787.530	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	78.787.530	78.787.530	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	78.787.530	78.787.530	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.095.675.860	1.177.322.560	81.646.700	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.095.675.860	1.177.322.560	81.646.700	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.095.675.860	1.177.322.560	81.646.700	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	07				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	24.999.700	24.999.700	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	07	5	1		BELANJA OPERASI	24.999.700	24.999.700	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.999.700	24.999.700	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.964.400	9.964.400	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	9.964.400	9.964.400	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.964.400	9.964.400	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.869.900	9.869.900	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	9.869.900	9.869.900	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.869.900	9.869.900	0	
									Jumlah Belanja	**9.207.261.093**	**9.281.497.827**	**74.236.734**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(8.977.261.093)**	**(9.001.497.827)**	**(24.236.734)**	
0	**00**	**2.11.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	**0**	**0**	
0	**00**	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**4.560.814.708**	**4.217.789.320**	**(343.025.388)**	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**570.982.000**	**570.982.000**	**0**	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**570.982.000**	**570.982.000**	**0**	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04				Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	519.407.000	519.407.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	519.407.000	519.407.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1	01	Belanja Pegawai	1.360.000	1.360.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	518.047.000	518.047.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	51.575.000	51.575.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	51.575.000	51.575.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	51.575.000	51.575.000	0	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**34.544.000**	**35.426.000**	**882.000**	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**34.544.000**	**35.426.000**	**882.000**	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02				Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	34.544.000	35.426.000	882.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	34.544.000	35.426.000	882.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	34.544.000	35.426.000	882.000	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**8.999.800**	**3.999.900**	**(4.999.900)**	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**2.01**	**00**				**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**8.999.800**	**3.999.900**	**(4.999.900)**	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01				Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	3.999.900	3.999.900	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.999.900	3.999.900	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.999.900	3.999.900	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02				Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	4.999.900	0	(4.999.900)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	4.999.900	0	(4.999.900)	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.900	0	(4.999.900)	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**31.807.400**	**39.707.400**	**7.900.000**	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Penyusunan Profil Kependudukan**	**31.807.400**	**39.707.400**	**7.900.000**	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02				Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	31.807.400	39.707.400	7.900.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	31.807.400	39.707.400	7.900.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	31.807.400	39.707.400	7.900.000	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.914.481.508**	**3.567.674.020**	**(346.807.488)**	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**39.326.300**	**21.425.000**	**(17.901.300)**	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.178.700	3.178.700	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.178.700	3.178.700	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.178.700	3.178.700	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.959.900	2.686.300	(2.273.600)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	4.959.900	2.686.300	(2.273.600)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.959.900	2.686.300	(2.273.600)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.187.700	15.560.000	(15.627.700)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	31.187.700	15.560.000	(15.627.700)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	31.187.700	15.560.000	(15.627.700)	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.495.222.808**	**2.294.126.020**	**(201.096.788)**	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.441.717.608	2.241.955.820	(199.761.788)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.441.717.608	2.241.955.820	(199.761.788)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.441.717.608	2.241.955.820	(199.761.788)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48.505.200	48.505.200	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	48.505.200	48.505.200	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	48.505.200	48.505.200	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	3.665.000	(1.335.000)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	3.665.000	(1.335.000)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	3.665.000	(1.335.000)	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**288.991.500**	**327.998.200**	**39.006.700**	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.250.000	5.250.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.250.000	5.250.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000	5.250.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.309.400	63.935.600	(14.373.800)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	78.309.400	63.935.600	(14.373.800)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	78.309.400	63.935.600	(14.373.800)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	5.000.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.883.100	23.226.600	(3.656.500)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	26.883.100	23.226.600	(3.656.500)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	26.883.100	23.226.600	(3.656.500)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173.549.000	230.586.000	57.037.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	173.549.000	230.586.000	57.037.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	173.549.000	230.586.000	57.037.000	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**763.214.400**	**645.027.900**	**(118.186.500)**	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	763.214.400	645.027.900	(118.186.500)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1		BELANJA OPERASI	27.928.400	26.144.300	(1.784.100)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1	01	Belanja Pegawai	2.570.000	1.360.000	(1.210.000)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	25.358.400	24.784.300	(574.100)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	735.286.000	618.883.600	(116.402.400)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	735.286.000	618.883.600	(116.402.400)	
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**216.533.600**	**180.500.000**	**(36.033.600)**	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	500.000	500.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	500.000	500.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.033.600	0	(36.033.600)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	36.033.600	0	(36.033.600)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	36.033.600	0	(36.033.600)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.000.000	180.000.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	180.000.000	180.000.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000	180.000.000	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**111.192.900**	**98.596.900**	**(12.596.000)**	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.994.400	66.994.400	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	66.994.400	66.994.400	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	66.994.400	66.994.400	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.905.000	31.602.500	(2.302.500)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	33.905.000	31.602.500	(2.302.500)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	33.905.000	31.602.500	(2.302.500)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.993.500	0	(9.993.500)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	9.993.500	0	(9.993.500)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.993.500	0	(9.993.500)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000	0	(300.000)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	300.000	0	(300.000)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	300.000	0	(300.000)	
									Jumlah Belanja	**4.560.814.708**	**4.217.789.320**	**(343.025.388)**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(4.560.814.708)**	**(4.217.789.320)**	**343.025.388**	
0	**00**	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	



Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	**0**	**0**	
0	**00**	**2.13.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
2	**13**	**2.13.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**6.113.416.265**	**5.919.153.639**	**(194.262.626)**	
2	**13**	**2.13.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**300.000.000**	**414.917.100**	**114.917.100**	
2	**13**	**2.13.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**	**300.000.000**	**414.917.100**	**114.917.100**	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02				Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	300.000.000	414.917.100	114.917.100	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	300.000.000	414.917.100	114.917.100	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	414.917.100	114.917.100	
2	**13**	**2.13.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**1.779.337.700**	**1.772.923.800**	**(6.413.900)**	
2	**13**	**2.13.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**2.01**	**00**				**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**1.779.337.700**	**1.772.923.800**	**(6.413.900)**	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01				Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	80.000.000	56.788.000	(23.212.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	80.000.000	56.788.000	(23.212.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	56.788.000	(23.212.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	85.000.000	77.095.000	(7.905.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	85.000.000	77.095.000	(7.905.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000	77.095.000	(7.905.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	08				Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	70.000.100	70.000.100	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	70.000.100	70.000.100	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.100	70.000.100	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	09				Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1.512.000.000	1.556.210.000	44.210.000	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	09	5	1		BELANJA OPERASI	1.512.000.000	1.556.210.000	44.210.000	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.512.000.000	1.556.210.000	44.210.000	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	11				Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	7.337.600	7.337.600	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	11	5	1		BELANJA OPERASI	7.337.600	7.337.600	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.337.600	7.337.600	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	13				Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	15.000.000	588.100	(14.411.900)	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	13	5	1		BELANJA OPERASI	15.000.000	588.100	(14.411.900)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	13	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	588.100	(14.411.900)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	18				Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10.000.000	4.905.000	(5.095.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	18	5	1		BELANJA OPERASI	10.000.000	4.905.000	(5.095.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	18	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	4.905.000	(5.095.000)	
2	**13**	**2.13.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**657.334.800**	**710.512.309**	**53.177.509**	
2	**13**	**2.13.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**657.334.800**	**710.512.309**	**53.177.509**	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	200.000.000	166.527.509	(33.472.491)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	200.000.000	166.527.509	(33.472.491)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	5	1	05	Belanja Hibah	200.000.000	166.527.509	(33.472.491)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100.000.000	100.000.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	100.000.000	100.000.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	100.000.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	04				Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	327.337.600	327.337.600	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	327.337.600	327.337.600	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	327.337.600	327.337.600	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	05				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	29.997.200	116.647.200	86.650.000	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	29.997.200	116.647.200	86.650.000	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.997.200	116.647.200	86.650.000	
2	**13**	**2.13.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.376.743.765**	**3.020.800.430**	**(355.943.335)**	
2	**13**	**2.13.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**15.035.000**	**8.520.000**	**(6.515.000)**	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	3.000.000	(1.000.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	4.000.000	3.000.000	(1.000.000)	

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	3.000.000	(1.000.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.035.000	5.520.000	(5.515.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1			BELANJA OPERASI	11.035.000	5.520.000	(5.515.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	11.035.000	5.520.000	(5.515.000)	
2	**13**	**2.13.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.897.753.865**	**2.594.779.030**	**(302.974.835)**	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.841.440.665	2.539.805.730	(301.634.935)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	2.841.440.665	2.539.805.730	(301.634.935)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	2.841.440.665	2.539.805.730	(301.634.935)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.313.200	51.313.200	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1			BELANJA OPERASI	51.313.200	51.313.200	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	01		Belanja Pegawai	51.313.200	51.313.200	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	3.660.100	(1.339.900)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1			BELANJA OPERASI	5.000.000	3.660.100	(1.339.900)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	3.660.100	(1.339.900)	
2	**13**	**2.13.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**126.178.100**	**121.673.600**	**(4.504.500)**	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	2.500.000	(2.500.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1			BELANJA OPERASI	5.000.000	2.500.000	(2.500.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	2.500.000	(2.500.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.000.000	8.000.000	(6.000.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1			BELANJA OPERASI	14.000.000	8.000.000	(6.000.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	14.000.000	8.000.000	(6.000.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.500.000	4.500.000	(3.000.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1			BELANJA OPERASI	7.500.000	4.500.000	(3.000.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	7.500.000	4.500.000	(3.000.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.015.700	8.172.600	(5.843.100)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1			BELANJA OPERASI	14.015.700	8.172.600	(5.843.100)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	14.015.700	8.172.600	(5.843.100)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.997.400	0	(5.997.400)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1			BELANJA OPERASI	5.997.400	0	(5.997.400)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	5.997.400	0	(5.997.400)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.665.000	98.501.000	18.836.000	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1			BELANJA OPERASI	79.665.000	98.501.000	18.836.000	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	79.665.000	98.501.000	18.836.000	
2	**13**	**2.13.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**29.002.100**	**0**	**(29.002.100)**	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05				Pengadaan Mebel	9.000.000	0	(9.000.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	2		BELANJA MODAL	9.000.000	0	(9.000.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.000.000	0	(9.000.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.002.100	0	(20.002.100)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	20.002.100	0	(20.002.100)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.002.100	0	(20.002.100)	
2	**13**	**2.13.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**250.787.200**	**241.887.200**	**(8.900.000)**	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800.000	400.000	(400.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	800.000	400.000	(400.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	800.000	400.000	(400.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.000.000	23.500.000	(8.500.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	32.000.000	23.500.000	(8.500.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000	23.500.000	(8.500.000)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	217.987.200	217.987.200	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	217.987.200	217.987.200	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	217.987.200	217.987.200	0	
2	**13**	**2.13.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**57.987.500**	**53.940.600**	**(4.046.900)**	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.145.500	49.559.100	(1.586.400)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	51.145.500	49.559.100	(1.586.400)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	51.145.500	49.559.100	(1.586.400)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.842.000	4.381.500	(2.460.500)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	6.842.000	4.381.500	(2.460.500)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.842.000	4.381.500	(2.460.500)	
									Jumlah Belanja	**6.113.416.265**	**5.919.153.639**	**(194.262.626)**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(6.113.416.265)**	**(5.919.153.639)**	**194.262.626**	
0	**00**	**2.13.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	**0**	**0**	
0	**00**	**2.14.2.08.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
2	**08**	**2.14.2.08.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**380.000.000**	**395.000.000**	**15.000.000**	
2	**08**	**2.14.2.08.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**190.000.000**	**250.000.000**	**60.000.000**	
2	**08**	**2.14.2.08.0.00.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**40.000.000**	**50.000.000**	**10.000.000**	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	02	2.01	01				Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	20.000.000	0	(20.000.000)	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	20.000.000	0	(20.000.000)	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	0	(20.000.000)	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	02	2.01	02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	50.000.000	30.000.000	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	20.000.000	50.000.000	30.000.000	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	50.000.000	30.000.000	
2	**08**	**2.14.2.08.0.00.01.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**150.000.000**	**200.000.000**	**50.000.000**	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	02	2.02	01				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	50.000.000	100.000.000	50.000.000	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	50.000.000	100.000.000	50.000.000	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	05	Belanja Hibah	50.000.000	100.000.000	50.000.000	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	02	2.02	02				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100.000.000	100.000.000	0	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	100.000.000	100.000.000	0	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	05	Belanja Hibah	100.000.000	100.000.000	0	
2	**08**	**2.14.2.08.0.00.01.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**40.000.000**	**40.000.000**	**0**	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	**08**	**2.14.2.08.0.00.01.0000**	**06**	**2.01**	**00**				**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**40.000.000**	**40.000.000**	**0**	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	06	2.01	01				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	0	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	06	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	20.000.000	20.000.000	0	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	06	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	20.000.000	0	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	06	2.01	02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	0	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	06	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	20.000.000	20.000.000	0	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	06	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	20.000.000	0	
2	**08**	**2.14.2.08.0.00.01.0000**	**07**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**150.000.000**	**105.000.000**	**(45.000.000)**	
2	**08**	**2.14.2.08.0.00.01.0000**	**07**	**2.01**	**00**				**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**150.000.000**	**75.000.000**	**(75.000.000)**	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	07	2.01	01				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000	75.000.000	(75.000.000)	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	07	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	150.000.000	75.000.000	(75.000.000)	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	07	2.01	01	5	1	05	Belanja Hibah	150.000.000	75.000.000	(75.000.000)	
2	**08**	**2.14.2.08.0.00.01.0000**	**07**	**2.02**	**00**				**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0**	**30.000.000**	**30.000.000**	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	07	2.02	02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	0	30.000.000	30.000.000	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	07	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	0	30.000.000	30.000.000	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	07	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	30.000.000	30.000.000	
2	**14**	**2.14.2.08.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**13.863.612.711**	**13.317.318.604**	**(546.294.107)**	
2	**14**	**2.14.2.08.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**880.679.100**	**880.675.400**	**(3.700)**	
2	**14**	**2.14.2.08.0.00.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**808.679.100**	**808.675.400**	**(3.700)**	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	02	2.01	15				Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	808.679.100	808.675.400	(3.700)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	02	2.01	15	5	1		BELANJA OPERASI	808.679.100	808.675.400	(3.700)	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	02	2.01	15	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	808.679.100	808.675.400	(3.700)	
2	**14**	**2.14.2.08.0.00.01.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**72.000.000**	**72.000.000**	**0**	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	02	2.02	13				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	72.000.000	72.000.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	02	2.02	13	5	1		BELANJA OPERASI	72.000.000	72.000.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	02	2.02	13	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000	72.000.000	0	
2	**14**	**2.14.2.08.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**4.819.160.900**	**4.859.167.500**	**40.006.600**	
2	**14**	**2.14.2.08.0.00.01.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**1.230.962.900**	**1.230.962.900**	**0**	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.01	02				Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	50.000.000	50.000.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	50.000.000	50.000.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	50.000.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.01	03				Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	64.200.000	64.200.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	64.200.000	64.200.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	64.200.000	64.200.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.01	06				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	194.983.800	194.983.800	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	194.983.800	194.983.800	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	194.983.800	194.983.800	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.01	07				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	721.789.300	721.789.300	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	721.789.300	721.789.300	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	721.789.300	721.789.300	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.01	08				Pengendalian Program KKBPK	199.989.800	199.989.800	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	199.989.800	199.989.800	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	199.989.800	199.989.800	0	
2	**14**	**2.14.2.08.0.00.01.0000**	**03**	**2.02**	**00**				**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**1.818.667.000**	**1.818.667.000**	**0**	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.02	02				Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	705.467.000	705.467.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	25.467.000	25.467.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	7.470.000	15.070.000	7.600.000	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.997.000	10.397.000	(7.600.000)	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	2		BELANJA MODAL	680.000.000	680.000.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	680.000.000	680.000.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.02	04				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.113.200.000	1.113.200.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	1.113.200.000	1.113.200.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.113.200.000	1.113.200.000	0	
2	**14**	**2.14.2.08.0.00.01.0000**	**03**	**2.03**	**00**				**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**1.385.052.000**	**1.385.052.000**	**0**	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	01				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	22.500.000	22.500.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	22.500.000	22.500.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000	22.500.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	03				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	429.300.000	429.300.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	429.300.000	429.300.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	429.300.000	429.300.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	08				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	44.690.000	44.690.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	08	5	1		BELANJA OPERASI	44.690.000	44.690.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	44.690.000	44.690.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	11				Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	851.010.000	851.010.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	11	5	1		BELANJA OPERASI	851.010.000	851.010.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	851.010.000	851.010.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	13				Peningkatan Kesertaan KB Pria	37.552.000	37.552.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	13	5	1		BELANJA OPERASI	37.552.000	37.552.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	13	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	37.552.000	37.552.000	0	
2	**14**	**2.14.2.08.0.00.01.0000**	**03**	**2.04**	**00**				**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**384.479.000**	**424.485.600**	**40.006.600**	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.04	01				Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	50.000.000	90.006.600	40.006.600	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.04	01	5	1		BELANJA OPERASI	50.000.000	90.006.600	40.006.600	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.04	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	90.006.600	40.006.600	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.04	03				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	334.479.000	334.479.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.04	03	5	1		BELANJA OPERASI	334.479.000	334.479.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.04	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	334.479.000	334.479.000	0	
2	**14**	**2.14.2.08.0.00.01.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**2.921.598.000**	**2.965.537.000**	**43.939.000**	
2	**14**	**2.14.2.08.0.00.01.0000**	**04**	**2.01**	**00**				**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**2.921.598.000**	**2.965.537.000**	**43.939.000**	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	04	2.01	05				Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.136.600.000	2.136.600.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	04	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	2.136.600.000	2.136.600.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	04	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.136.600.000	2.136.600.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	04	2.01	07				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	50.000.000	93.939.500	43.939.500	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	04	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	50.000.000	93.939.500	43.939.500	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	04	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	93.939.500	43.939.500	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	04	2.01	14				Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	734.998.000	734.997.500	(500)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	04	2.01	14	5	1		BELANJA OPERASI	734.998.000	734.997.500	(500)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	04	2.01	14	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	734.998.000	734.997.500	(500)	
2	**14**	**2.14.2.08.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.242.174.711**	**4.611.938.704**	**(630.236.007)**	
2	**14**	**2.14.2.08.0.00.01.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**19.956.000**	**11.403.000**	**(8.553.000)**	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	0	(5.000.000)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	0	(5.000.000)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	0	(5.000.000)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.956.000	11.403.000	(3.553.000)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	14.956.000	11.403.000	(3.553.000)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.956.000	11.403.000	(3.553.000)	
2	**14**	**2.14.2.08.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.535.400.161**	**3.937.284.154**	**(598.116.007)**	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.469.004.561	3.871.913.554	(597.091.007)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.469.004.561	3.871.913.554	(597.091.007)	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	4.469.004.561	3.871.913.554	(597.091.007)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.395.600	61.395.600	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	61.395.600	61.395.600	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	61.395.600	61.395.600	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	3.975.000	(1.025.000)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	3.975.000	(1.025.000)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	3.975.000	(1.025.000)	
2	**14**	**2.14.2.08.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**193.977.100**	**221.256.400**	**27.279.300**	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.994.100	3.545.000	(2.449.100)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.994.100	3.545.000	(2.449.100)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.994.100	3.545.000	(2.449.100)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	17.316.100	(7.683.900)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	25.000.000	17.316.100	(7.683.900)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	17.316.100	(7.683.900)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.998.000	8.950.300	(3.047.700)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	11.998.000	8.950.300	(3.047.700)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.998.000	8.950.300	(3.047.700)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000	7.500.000	(7.500.000)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	15.000.000	7.500.000	(7.500.000)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	7.500.000	(7.500.000)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.993.000	5.993.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	5.993.000	5.993.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.993.000	5.993.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.992.000	177.952.000	47.960.000	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	129.992.000	177.952.000	47.960.000	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	129.992.000	177.952.000	47.960.000	
2	**14**	**2.14.2.08.0.00.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**89.536.400**	**61.000.000**	**(28.536.400)**	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.536.400	61.000.000	(28.536.400)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	89.536.400	61.000.000	(28.536.400)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.536.400	61.000.000	(28.536.400)	
2	**14**	**2.14.2.08.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**211.655.400**	**211.793.400**	**138.000**	

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1			BELANJA OPERASI	3.000.000	3.000.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	3.000.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.999.400	26.999.400	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	26.999.400	26.999.400	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	26.999.400	26.999.400	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.656.000	181.794.000	138.000	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	181.656.000	181.794.000	138.000	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	181.656.000	181.794.000	138.000	
2	**14**	**2.14.2.08.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**191.649.650**	**169.201.750**	**(22.447.900)**	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	116.649.750	94.201.850	(22.447.900)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	116.649.750	94.201.850	(22.447.900)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	116.649.750	94.201.850	(22.447.900)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000	60.000.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1			BELANJA OPERASI	60.000.000	60.000.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	60.000.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.999.900	14.999.900	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	14.999.900	14.999.900	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	14.999.900	14.999.900	0	
										Jumlah Belanja	**14.243.612.711**	**13.712.318.604**	**(531.294.107)**	
										Total Surplus/(Defisit)	**(14.243.612.711)**	**(13.712.318.604)**	**531.294.107**	
0	**00**	**2.14.2.08.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**				**PEMBIAYAAN**				
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**				**PENDAPATAN DAERAH**				
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**			**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**400.000.000**	**462.557.000**	**62.557.000**	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	400.000.000	462.557.000	62.557.000	
										Jumlah Pendapatan	**400.000.000**	**462.557.000**	**62.557.000**	
0	**00**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**				**BELANJA**				
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**5.805.492.208**	**5.321.025.583**	**(484.466.625)**	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**1.053.134.038**	**1.042.008.138**	**(11.125.900)**	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.02**	**00**					**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**331.054.300**	**176.056.300**	**(154.998.000)**	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	331.054.300	176.056.300	(154.998.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	40.000.000	5.437.200	(34.562.800)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	01		Belanja Pegawai	0	4.990.000	4.990.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	447.200	(39.552.800)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	2			BELANJA MODAL	291.054.300	170.619.100	(120.435.200)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.998.000	0	(114.998.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	2	04		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	176.056.300	170.619.100	(5.437.200)	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.03**	**00**					**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**26.889.600**	**73.500.100**	**46.610.500**	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03					Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	26.889.600	73.500.100	46.610.500	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	5	1			BELANJA OPERASI	26.889.600	22.313.300	(4.576.300)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	26.889.600	22.313.300	(4.576.300)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	5	2			BELANJA MODAL	0	51.186.800	51.186.800	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	5	2	04		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	51.186.800	51.186.800	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.05**	**00**					**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**95.070.238**	**95.070.238**	**0**	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	04					Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	59.083.200	59.083.200	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	04	5	1			BELANJA OPERASI	59.083.200	59.083.200	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	59.083.200	59.083.200	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	35.987.038	35.987.038	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	5	1		BELANJA OPERASI	35.987.038	35.987.038	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	35.987.038	35.987.038	0	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.06**	**00**				**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**570.119.900**	**697.381.500**	**127.261.600**	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	01				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	479.890.600	667.381.500	187.490.900	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	479.890.600	667.381.500	187.490.900	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	479.890.600	667.381.500	187.490.900	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	05				Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	90.229.300	30.000.000	(60.229.300)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	90.229.300	30.000.000	(60.229.300)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	90.229.300	30.000.000	(60.229.300)	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.14**	**00**				**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**30.000.000**	**0**	**(30.000.000)**	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.14	02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	0	(30.000.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.14	02	5	1		BELANJA OPERASI	30.000.000	0	(30.000.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.14	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	0	(30.000.000)	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**19.999.800**	**11.839.800**	**(8.160.000)**	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**2.13**	**00**				**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**19.999.800**	**11.839.800**	**(8.160.000)**	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	03				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	19.999.800	11.839.800	(8.160.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	03	5	1		BELANJA OPERASI	19.999.800	11.839.800	(8.160.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.800	11.839.800	(8.160.000)	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.732.358.370**	**4.267.177.645**	**(465.180.725)**	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**47.497.000**	**27.497.000**	**(20.000.000)**	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.499.000	7.499.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	7.499.000	7.499.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.499.000	7.499.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.999.000	4.999.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	4.999.000	4.999.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.000	4.999.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.999.000	14.999.000	(20.000.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	34.999.000	14.999.000	(20.000.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	34.999.000	14.999.000	(20.000.000)	

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.857.868.908**	**3.510.430.023**	**(347.438.885)**	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.802.113.708	3.454.674.823	(347.438.885)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	3.802.113.708	3.454.674.823	(347.438.885)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	3.802.113.708	3.454.674.823	(347.438.885)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.755.200	50.755.200	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1			BELANJA OPERASI	50.755.200	50.755.200	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	01		Belanja Pegawai	50.755.200	50.755.200	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1			BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**220.211.200**	**150.371.200**	**(69.840.000)**	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.995.200	6.995.200	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1			BELANJA OPERASI	6.995.200	6.995.200	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	6.995.200	6.995.200	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.706.100	23.706.100	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1			BELANJA OPERASI	23.706.100	23.706.100	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	23.706.100	23.706.100	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.996.200	4.996.200	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1			BELANJA OPERASI	4.996.200	4.996.200	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.996.200	4.996.200	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.097.200	14.097.200	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1			BELANJA OPERASI	14.097.200	14.097.200	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	14.097.200	14.097.200	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.458.500	10.458.500	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1			BELANJA OPERASI	10.458.500	10.458.500	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	10.458.500	10.458.500	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.958.000	90.118.000	(69.840.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1			BELANJA OPERASI	159.958.000	90.118.000	(69.840.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	159.958.000	90.118.000	(69.840.000)	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**93.000.000**	**93.000.000**	**0**	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	93.000.000	93.000.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2			BELANJA MODAL	93.000.000	93.000.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.000.000	93.000.000	0	

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**384.019.600**	**384.019.600**	**0**	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1			BELANJA OPERASI	1.000.000	1.000.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.000.000	1.000.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.714.000	48.714.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	48.714.000	48.714.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	48.714.000	48.714.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	334.305.600	334.305.600	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	334.305.600	334.305.600	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	334.305.600	334.305.600	0	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**129.761.662**	**101.859.822**	**(27.901.840)**	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124.999.662	97.097.822	(27.901.840)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1			BELANJA OPERASI	124.999.662	97.097.822	(27.901.840)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	124.999.662	97.097.822	(27.901.840)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.762.000	4.762.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	4.762.000	4.762.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.762.000	4.762.000	0	
										Jumlah Belanja	**5.805.492.208**	**5.321.025.583**	**(484.466.625)**	
										Total Surplus/(Defisit)	**(5.405.492.208)**	**(4.858.468.583)**	**547.023.625**	
0	**00**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**				**PEMBIAYAAN**				
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**				
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**600.000.000**	**660.000.000**	**60.000.000**	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	600.000.000	660.000.000	60.000.000	
									Jumlah Pendapatan	**600.000.000**	**660.000.000**	**60.000.000**	
0	**00**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**5.850.993.730**	**6.032.118.391**	**181.124.661**	
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**1.258.786.400**	**1.749.512.900**	**490.726.500**	
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**1.258.786.400**	**1.749.512.900**	**490.726.500**	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	04				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	90.000.000	340.726.500	250.726.500	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	85.000.000	335.726.500	250.726.500	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	04	5	1	01	Belanja Pegawai	0	1.130.000	1.130.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000	334.596.500	249.596.500	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	04	5	2		BELANJA MODAL	5.000.000	5.000.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	04	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000	5.000.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	05				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	600.000.000	900.000.000	300.000.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	600.000.000	900.000.000	300.000.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000	900.000.000	300.000.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	06				Pelayanan Informasi Publik	70.000.000	70.000.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	70.000.000	70.000.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	70.000.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	08				Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	498.786.400	438.786.400	(60.000.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	498.786.400	438.786.400	(60.000.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	298.786.400	238.786.400	(60.000.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	08	5	1	05	Belanja Hibah	200.000.000	200.000.000	0	
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**399.200.000**	**480.395.500**	**81.195.500**	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**36.000.000**	**26.200.000**	**(9.800.000)**	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.01	02				Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	36.000.000	26.200.000	(9.800.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	36.000.000	26.200.000	(9.800.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000	26.200.000	(9.800.000)	
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**03**	**2.02**	**00**				**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**363.200.000**	**454.195.500**	**90.995.500**	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	01				Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	63.200.000	54.400.000	(8.800.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	50.000.000	50.000.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	50.000.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	01	5	2		BELANJA MODAL	13.200.000	4.400.000	(8.800.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.200.000	4.400.000	(8.800.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	07				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	260.000.000	359.795.500	99.795.500	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	260.000.000	359.795.500	99.795.500	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	07	5	1	01	Belanja Pegawai	2.980.000	2.980.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	257.020.000	356.815.500	99.795.500	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	09				Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	40.000.000	40.000.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	09	5	1		BELANJA OPERASI	40.000.000	40.000.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	40.000.000	0	
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.193.007.330**	**3.802.209.991**	**(390.797.339)**	
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**56.000.000**	**56.000.000**	**0**	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.01	02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000	3.000.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	3.000.000	3.000.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	3.000.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.01	03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.000.000	3.000.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	3.000.000	3.000.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	3.000.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.01	04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000	3.000.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	3.000.000	3.000.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	3.000.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.01	05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.000.000	3.000.000	0	

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.01	05	5	1			BELANJA OPERASI	3.000.000	3.000.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.01	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	3.000.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.01	06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	4.000.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.01	06	5	1			BELANJA OPERASI	4.000.000	4.000.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.01	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	4.000.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.01	07					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	40.000.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.01	07	5	1			BELANJA OPERASI	40.000.000	40.000.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.01	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	40.000.000	0	
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.548.069.838**	**2.324.096.499**	**(223.973.339)**	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.491.387.438	2.270.134.099	(221.253.339)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	2.491.387.438	2.270.134.099	(221.253.339)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	2.491.387.438	2.270.134.099	(221.253.339)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.02	03					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.682.400	49.962.400	(2.720.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.02	03	5	1			BELANJA OPERASI	52.682.400	49.962.400	(2.720.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.02	03	5	1	01		Belanja Pegawai	52.682.400	49.962.400	(2.720.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.02	05					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000	4.000.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.02	05	5	1			BELANJA OPERASI	4.000.000	4.000.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.02	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	4.000.000	0	
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**01**	**2.04**	**00**					**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**83.099.200**	**83.099.200**	**0**	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.04	07					Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	83.099.200	83.099.200	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.04	07	5	1			BELANJA OPERASI	83.099.200	83.099.200	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.04	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	83.099.200	83.099.200	0	
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**371.486.500**	**455.645.500**	**84.159.000**	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.599.000	14.046.200	4.447.200	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	01	5	1			BELANJA OPERASI	9.599.000	14.046.200	4.447.200	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	9.599.000	14.046.200	4.447.200	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.228.200	35.228.200	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	02	5	1			BELANJA OPERASI	35.228.200	35.228.200	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	35.228.200	35.228.200	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.191.900	24.835.900	4.644.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	03	5	1			BELANJA OPERASI	20.191.900	24.835.900	4.644.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	20.191.900	24.835.900	4.644.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.796.900	27.259.700	1.462.800	

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	05	5	1			BELANJA OPERASI	25.796.900	27.259.700	1.462.800	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	25.796.900	27.259.700	1.462.800	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	46.081.500	46.081.500	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	06	5	1			BELANJA OPERASI	46.081.500	46.081.500	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	46.081.500	46.081.500	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	234.589.000	308.194.000	73.605.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	09	5	1			BELANJA OPERASI	234.589.000	308.194.000	73.605.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	234.589.000	308.194.000	73.605.000	
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**950.223.792**	**632.503.792**	**(317.720.000)**	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	01	5	1			BELANJA OPERASI	3.000.000	3.000.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	3.000.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	543.409.500	465.689.500	(77.720.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	538.609.500	460.889.500	(77.720.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	02	5	1	01		Belanja Pegawai	0	4.780.000	4.780.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	538.609.500	456.109.500	(82.500.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	02	5	2			BELANJA MODAL	4.800.000	4.800.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	02	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.800.000	4.800.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	403.814.292	163.814.292	(240.000.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	403.814.292	163.814.292	(240.000.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	403.814.292	163.814.292	(240.000.000)	
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**184.128.000**	**250.865.000**	**66.737.000**	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	94.358.800	94.358.800	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	94.358.800	94.358.800	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	94.358.800	94.358.800	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.498.200	69.182.200	3.684.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	65.498.200	69.182.200	3.684.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	65.498.200	69.182.200	3.684.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.271.000	87.324.000	63.053.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	24.271.000	87.324.000	63.053.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	24.271.000	87.324.000	63.053.000	
2	**20**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**128.543.000**	**128.543.000**	**0**	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	**20**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**128.543.000**	**128.543.000**	**0**	
2	**20**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**128.543.000**	**128.543.000**	**0**	
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	01				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	73.179.600	73.179.600	0	
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	73.179.600	73.179.600	0	
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	73.179.600	73.179.600	0	
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	02				Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	55.363.400	55.363.400	0	
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	55.363.400	55.363.400	0	
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	55.363.400	55.363.400	0	
2	**21**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**57.359.800**	**5.985.000**	**(51.374.800)**	
2	**21**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**57.359.800**	**5.985.000**	**(51.374.800)**	
2	**21**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**57.359.800**	**5.985.000**	**(51.374.800)**	
2	21	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	01				Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	57.359.800	5.985.000	(51.374.800)	
2	21	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	57.359.800	5.985.000	(51.374.800)	
2	21	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	57.359.800	5.985.000	(51.374.800)	
									Jumlah Belanja	**6.036.896.530**	**6.166.646.391**	**129.749.861**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(5.436.896.530)**	**(5.506.646.391)**	**(69.749.861)**	
0	**00**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : 2.17.3.30.3.31.03 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.03.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**				**PENDAPATAN DAERAH**				
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.03.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**			**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.345.000.000**	**1.960.000.000**	**615.000.000**	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	1.305.000.000	1.920.000.000	615.000.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	00	0.00	00	4	1	04		Lain-lain PAD yang Sah	40.000.000	40.000.000	0	
										Jumlah Pendapatan	**1.345.000.000**	**1.960.000.000**	**615.000.000**	
0	**00**	**2.17.3.30.3.31.03.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**				**BELANJA**				
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.03.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**9.324.081.605**	**8.852.914.456**	**(471.167.149)**	
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.03.0000**	**03**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**100.000.000**	**100.000.000**	**0**	
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.03.0000**	**03**	**2.01**	**00**					**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**100.000.000**	**100.000.000**	**0**	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	03	2.01	01					Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	03	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	100.000.000	100.000.000	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	03	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	100.000.000	0	
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.03.0000**	**05**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**327.305.200**	**327.305.200**	**0**	
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.03.0000**	**05**	**2.01**	**00**					**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**327.305.200**	**327.305.200**	**0**	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	05	2.01	01					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	327.305.200	327.305.200	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	05	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	327.305.200	327.305.200	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	05	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	327.305.200	327.305.200	0	
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.03.0000**	**07**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**231.000.000**	**231.000.000**	**0**	
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.03.0000**	**07**	**2.01**	**00**					**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**231.000.000**	**231.000.000**	**0**	

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	07	2.01	01					Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	50.000.000	50.000.000	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	07	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	50.000.000	50.000.000	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	07	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	50.000.000	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	07	2.01	03					Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	150.000.000	150.000.000	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	07	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	150.000.000	150.000.000	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	07	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	150.000.000	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	07	2.01	05					Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	31.000.000	31.000.000	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	07	2.01	05	5	1			BELANJA OPERASI	31.000.000	31.000.000	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	07	2.01	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	31.000.000	31.000.000	0	
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.03.0000**	**08**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**904.999.800**	**811.754.800**	**(93.245.000)**	
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.03.0000**	**08**	**2.01**	**00**					**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**904.999.800**	**811.754.800**	**(93.245.000)**	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	08	2.01	01					Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	904.999.800	811.754.800	(93.245.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	08	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	904.999.800	811.754.800	(93.245.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	08	2.01	01	5	1	01		Belanja Pegawai	2.720.000	3.800.000	1.080.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	08	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	852.279.800	757.954.800	(94.325.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	08	2.01	01	5	1	05		Belanja Hibah	50.000.000	50.000.000	0	
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.03.0000**	**01**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.760.776.605**	**7.382.854.456**	**(377.922.149)**	
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.03.0000**	**01**	**2.01**	**00**					**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**37.262.900**	**37.262.900**	**0**	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.01	01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.01	02					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.999.900	4.999.900	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	4.999.900	4.999.900	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.999.900	4.999.900	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.01	06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.01	06	5	1			BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.01	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.01	07					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.263.000	22.263.000	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.01	07	5	1			BELANJA OPERASI	22.263.000	22.263.000	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.01	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	22.263.000	22.263.000	0	
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.03.0000**	**01**	**2.02**	**00**					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.822.081.245**	**5.405.173.516**	**(416.907.729)**	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.765.262.945	5.341.355.216	(423.907.729)	

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	5.765.262.945	5.341.355.216	(423.907.729)	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	5.765.262.945	5.341.355.216	(423.907.729)	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.02	03					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.818.400	58.818.400	7.000.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.02	03	5	1			BELANJA OPERASI	51.818.400	58.818.400	7.000.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.02	03	5	1	01		Belanja Pegawai	51.818.400	58.818.400	7.000.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.02	05					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.999.900	4.999.900	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.02	05	5	1			BELANJA OPERASI	4.999.900	4.999.900	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.02	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.999.900	4.999.900	0	
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.03.0000**	**01**	**2.03**	**00**					**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**4.999.900**	**4.999.900**	**0**	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.03	05					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.999.900	4.999.900	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.03	05	5	1			BELANJA OPERASI	4.999.900	4.999.900	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.03	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.999.900	4.999.900	0	
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.03.0000**	**01**	**2.04**	**00**					**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.04	07					Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5.000.000	5.000.000	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.04	07	5	1			BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.04	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.03.0000**	**01**	**2.06**	**00**					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**321.042.500**	**371.861.500**	**50.819.000**	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.999.500	11.999.500	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.06	01	5	1			BELANJA OPERASI	11.999.500	11.999.500	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.06	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	11.999.500	11.999.500	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.055.000	49.534.000	13.479.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.06	02	5	1			BELANJA OPERASI	36.055.000	49.534.000	13.479.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.06	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	36.055.000	49.534.000	13.479.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.06	03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	11.522.000	1.522.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.06	03	5	1			BELANJA OPERASI	10.000.000	11.522.000	1.522.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.06	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	11.522.000	1.522.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.000.000	55.000.000	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.06	05	5	1			BELANJA OPERASI	55.000.000	55.000.000	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.06	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	55.000.000	55.000.000	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.06	06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000	1.500.000	(6.500.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.06	06	5	1			BELANJA OPERASI	8.000.000	1.500.000	(6.500.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.06	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	8.000.000	1.500.000	(6.500.000)	

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.988.000	242.306.000	42.318.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.06	09	5	1			BELANJA OPERASI	199.988.000	242.306.000	42.318.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	199.988.000	242.306.000	42.318.000	
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.03.0000**	**01**	**2.07**	**00**					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**49.668.700**	**0**	**(49.668.700)**	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.07	06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.668.700	0	(49.668.700)	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.07	06	5	1			BELANJA OPERASI	1.570.000	0	(1.570.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.07	06	5	1	01		Belanja Pegawai	1.570.000	0	(1.570.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.07	06	5	2			BELANJA MODAL	48.098.700	0	(48.098.700)	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.07	06	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.098.700	0	(48.098.700)	
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.03.0000**	**01**	**2.08**	**00**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.346.194.600**	**1.402.418.600**	**56.224.000**	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.08	01	5	1			BELANJA OPERASI	1.200.000	1.200.000	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.08	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.200.000	1.200.000	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.000.000	10.724.000	(6.276.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	17.000.000	10.724.000	(6.276.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	17.000.000	10.724.000	(6.276.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.327.994.600	1.390.494.600	62.500.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	1.327.994.600	1.390.494.600	62.500.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.327.994.600	1.390.494.600	62.500.000	
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.03.0000**	**01**	**2.09**	**00**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**174.526.760**	**156.138.040**	**(18.388.720)**	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.307.360	60.921.040	(18.386.320)	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.09	02	5	1			BELANJA OPERASI	79.307.360	60.921.040	(18.386.320)	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.09	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	79.307.360	60.921.040	(18.386.320)	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.074.500	50.074.500	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	50.074.500	50.074.500	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	50.074.500	50.074.500	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.144.900	45.142.500	(2.400)	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	45.144.900	45.142.500	(2.400)	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	45.144.900	45.142.500	(2.400)	
3	**30**	**2.17.3.30.3.31.03.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**1.116.257.100**	**983.225.293**	**(133.031.807)**	
3	**30**	**2.17.3.30.3.31.03.0000**	**03**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**352.359.200**	**386.521.200**	**34.162.000**	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	**30**	**2.17.3.30.3.31.03.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**352.359.200**	**386.521.200**	**34.162.000**	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	03	2.01	01				Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	186.175.300	186.175.300	0	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	186.175.300	166.392.400	(19.782.900)	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	186.175.300	166.392.400	(19.782.900)	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	03	2.01	01	5	2		BELANJA MODAL	0	19.782.900	19.782.900	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	03	2.01	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	19.782.900	19.782.900	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	03	2.01	02				Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	166.183.900	200.345.900	34.162.000	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	03	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	157.298.500	180.960.500	23.662.000	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	03	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	157.298.500	180.960.500	23.662.000	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	03	2.01	02	5	2		BELANJA MODAL	8.885.400	19.385.400	10.500.000	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	03	2.01	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.885.400	19.385.400	10.500.000	
3	**30**	**2.17.3.30.3.31.03.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**173.773.800**	**173.773.800**	**0**	
3	**30**	**2.17.3.30.3.31.03.0000**	**04**	**2.01**	**00**				**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**78.774.000**	**78.774.000**	**0**	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	04	2.01	01				Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	78.774.000	78.774.000	0	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	04	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	78.774.000	78.774.000	0	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	04	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	78.774.000	78.774.000	0	
3	**30**	**2.17.3.30.3.31.03.0000**	**04**	**2.02**	**00**				**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**49.999.900**	**49.999.900**	**0**	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	04	2.02	01				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	49.999.900	49.999.900	0	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	04	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	49.999.900	49.999.900	0	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	04	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	49.999.900	49.999.900	0	
3	**30**	**2.17.3.30.3.31.03.0000**	**04**	**2.03**	**00**				**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**44.999.900**	**44.999.900**	**0**	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	04	2.03	01				Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	14.999.900	14.999.900	0	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	04	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	14.999.900	14.999.900	0	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	04	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.999.900	14.999.900	0	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	04	2.03	03				Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	30.000.000	30.000.000	0	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	04	2.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	30.000.000	30.000.000	0	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	04	2.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	30.000.000	0	
3	**30**	**2.17.3.30.3.31.03.0000**	**07**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**518.799.900**	**422.930.293**	**(95.869.607)**	

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	**30**	**2.17.3.30.3.31.03.0000**	**07**	**2.01**	**00**					**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**518.799.900**	**422.930.293**	**(95.869.607)**	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	07	2.01	01					Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	518.799.900	422.930.293	(95.869.607)	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	07	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	518.799.900	422.930.293	(95.869.607)	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	07	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	518.799.900	422.930.293	(95.869.607)	
3	**30**	**2.17.3.30.3.31.03.0000**	**01**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**71.324.200**	**0**	**(71.324.200)**	
3	**30**	**2.17.3.30.3.31.03.0000**	**01**	**2.05**	**00**					**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**71.324.200**	**0**	**(71.324.200)**	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.05	10					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	71.324.200	0	(71.324.200)	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.05	10	5	1			BELANJA OPERASI	71.324.200	0	(71.324.200)	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.05	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	71.324.200	0	(71.324.200)	
3	**31**	**2.17.3.30.3.31.03.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**3.795.390.000**	**3.795.390.000**	**0**	
3	**31**	**2.17.3.30.3.31.03.0000**	**02**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**3.795.390.000**	**3.795.390.000**	**0**	
3	**31**	**2.17.3.30.3.31.03.0000**	**02**	**2.01**	**00**					**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**3.795.390.000**	**3.795.390.000**	**0**	
3	31	2.17.3.30.3.31.03.0000	02	2.01	05					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.795.390.000	3.795.390.000	0	
3	31	2.17.3.30.3.31.03.0000	02	2.01	05	5	1			BELANJA OPERASI	3.795.390.000	3.773.945.000	(21.445.000)	
3	31	2.17.3.30.3.31.03.0000	02	2.01	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.995.390.000	2.973.945.000	(21.445.000)	
3	31	2.17.3.30.3.31.03.0000	02	2.01	05	5	1	05		Belanja Hibah	800.000.000	800.000.000	0	
3	31	2.17.3.30.3.31.03.0000	02	2.01	05	5	2			BELANJA MODAL	0	21.445.000	21.445.000	
3	31	2.17.3.30.3.31.03.0000	02	2.01	05	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	21.445.000	21.445.000	
										Jumlah Belanja	**14.235.728.705**	**13.631.529.749**	**(604.198.956)**	
										Total Surplus/(Defisit)	**(12.890.728.705)**	**(11.671.529.749)**	**1.219.198.956**	
0	**00**	**2.17.3.30.3.31.03.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**				**PEMBIAYAAN**				
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**				
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**4.050.000.000**	**4.050.000.000**	**0**	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	4.050.000.000	4.050.000.000	0	
									Jumlah Pendapatan	**4.050.000.000**	**4.050.000.000**	**0**	
0	**00**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**4.015.993.272**	**3.575.908.787**	**(440.084.485)**	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**136.702.100**	**71.293.000**	**(65.409.100)**	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**119.963.100**	**56.201.000**	**(63.762.100)**	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01				Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	119.963.100	56.201.000	(63.762.100)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	119.963.100	56.201.000	(63.762.100)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	119.963.100	56.201.000	(63.762.100)	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**16.739.000**	**15.092.000**	**(1.647.000)**	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02				Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	16.739.000	15.092.000	(1.647.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	16.739.000	15.092.000	(1.647.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.739.000	15.092.000	(1.647.000)	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**225.470.700**	**81.402.900**	**(144.067.800)**	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**225.470.700**	**81.402.900**	**(144.067.800)**	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	87.400.300	26.384.900	(61.015.400)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	87.400.300	26.384.900	(61.015.400)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	87.400.300	26.384.900	(61.015.400)	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	138.070.400	55.018.000	(83.052.400)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	138.070.400	55.018.000	(83.052.400)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	138.070.400	55.018.000	(83.052.400)	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**122.595.800**	**99.796.000**	**(22.799.800)**	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**2.01**	**00**				**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**122.595.800**	**99.796.000**	**(22.799.800)**	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	80.000.000	84.200.000	4.200.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	80.000.000	84.200.000	4.200.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	84.200.000	4.200.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02				Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	18.636.300	11.636.500	(6.999.800)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	18.636.300	11.636.500	(6.999.800)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.636.300	11.636.500	(6.999.800)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	13.959.500	3.959.500	(10.000.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	13.959.500	3.959.500	(10.000.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.959.500	3.959.500	(10.000.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04				Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	10.000.000	0	(10.000.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	10.000.000	0	(10.000.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	0	(10.000.000)	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**541.612.800**	**548.632.800**	**7.020.000**	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**541.612.800**	**548.632.800**	**7.020.000**	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	32.829.000	39.849.000	7.020.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	32.829.000	39.849.000	7.020.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	32.829.000	39.849.000	7.020.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	456.386.800	456.386.800	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	456.386.800	456.386.800	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	456.386.800	456.386.800	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	52.397.000	52.397.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	52.397.000	52.397.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	52.397.000	52.397.000	0	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**84.720.500**	**74.008.200**	**(10.712.300)**	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**06**	**2.01**	**00**				**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**84.720.500**	**74.008.200**	**(10.712.300)**	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	84.720.500	74.008.200	(10.712.300)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	84.720.500	74.008.200	(10.712.300)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	84.720.500	74.008.200	(10.712.300)	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.904.891.372**	**2.700.775.887**	**(204.115.485)**	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**39.999.800**	**36.999.800**	**(3.000.000)**	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.900	4.999.900	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.999.900	4.999.900	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.900	4.999.900	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.999.900	26.999.900	(3.000.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	29.999.900	26.999.900	(3.000.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.999.900	26.999.900	(3.000.000)	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.269.286.172**	**2.104.924.887**	**(164.361.285)**	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.207.736.272	2.043.374.987	(164.361.285)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.207.736.272	2.043.374.987	(164.361.285)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.207.736.272	2.043.374.987	(164.361.285)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53.050.000	53.050.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	53.050.000	53.050.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	48.831.600	48.831.600	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.218.400	4.218.400	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.499.900	3.499.900	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	3.499.900	3.499.900	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.499.900	3.499.900	0	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**291.121.800**	**321.772.300**	**30.650.500**	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.999.900	4.943.900	(4.056.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	8.999.900	4.943.900	(4.056.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.999.900	4.943.900	(4.056.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.260.200	63.260.200	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	63.260.200	63.260.200	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	63.260.200	63.260.200	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.864.900	23.726.300	(5.138.600)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	28.864.900	23.726.300	(5.138.600)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	28.864.900	23.726.300	(5.138.600)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.999.800	24.154.900	(5.844.900)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	29.999.800	24.154.900	(5.844.900)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.999.800	24.154.900	(5.844.900)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.997.000	205.687.000	45.690.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	159.997.000	205.687.000	45.690.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	159.997.000	205.687.000	45.690.000	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**20.000.000**	**0**	**(20.000.000)**	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	0	(20.000.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	20.000.000	0	(20.000.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000	0	(20.000.000)	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**161.712.000**	**149.722.000**	**(11.990.000)**	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.000.000	1.000.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000	1.000.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.552.800	39.562.800	(11.990.000)	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	51.552.800	39.562.800	(11.990.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	51.552.800	39.562.800	(11.990.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109.159.200	109.159.200	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	109.159.200	109.159.200	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	109.159.200	109.159.200	0	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**122.771.600**	**87.356.900**	**(35.414.700)**	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.000.500	74.996.100	(4.004.400)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	79.000.500	74.996.100	(4.004.400)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	79.000.500	74.996.100	(4.004.400)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.959.900	9.188.600	3.228.700	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	5.959.900	9.188.600	3.228.700	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.959.900	9.188.600	3.228.700	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.998.000	0	(19.998.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	19.998.000	0	(19.998.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.998.000	0	(19.998.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.813.200	3.172.200	(14.641.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	1		BELANJA OPERASI	17.813.200	3.172.200	(14.641.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.813.200	3.172.200	(14.641.000)	
									Jumlah Belanja	**4.015.993.272**	**3.575.908.787**	**(440.084.485)**	
									Total Surplus/(Defisit)	**34.006.728**	**474.091.213**	**440.084.485**	
0	**00**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	**19**	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**				
2	**19**	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**52.000.000**	**52.000.000**	**0**	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	52.000.000	52.000.000	0	
									Jumlah Pendapatan	**52.000.000**	**52.000.000**	**0**	
0	**00**	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
2	**19**	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**6.283.311.501**	**5.951.393.856**	**(331.917.645)**	
2	**19**	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**507.953.100**	**437.449.600**	**(70.503.500)**	
2	**19**	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**222.953.100**	**167.449.600**	**(55.503.500)**	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	67.449.600	67.449.600	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	67.449.600	67.449.600	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	67.449.600	67.449.600	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	55.503.500	0	(55.503.500)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	55.503.500	0	(55.503.500)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	55.503.500	0	(55.503.500)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	100.000.000	100.000.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	100.000.000	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	**19**	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**285.000.000**	**270.000.000**	**(15.000.000)**	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	15.000.000	0	(15.000.000)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	15.000.000	0	(15.000.000)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	0	(15.000.000)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02				Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	270.000.000	270.000.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	270.000.000	270.000.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	05	Belanja Hibah	270.000.000	270.000.000	0	
2	**19**	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**2.741.576.700**	**2.778.269.000**	**36.692.300**	
2	**19**	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**711.576.700**	**648.269.000**	**(63.307.700)**	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	711.576.700	648.269.000	(63.307.700)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	324.597.900	457.226.200	132.628.300	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1	01	Belanja Pegawai	5.670.000	5.350.000	(320.000)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	318.927.900	451.876.200	132.948.300	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	2		BELANJA MODAL	386.978.800	191.042.800	(195.936.000)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	191.042.800	191.042.800	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	195.936.000	0	(195.936.000)	
2	**19**	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**2.03**	**00**				**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**330.000.000**	**330.000.000**	**0**	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01				Seleksi Atlet Daerah	80.000.000	80.000.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	80.000.000	80.000.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	80.000.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	04				Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	250.000.000	250.000.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	04	5	1		BELANJA OPERASI	250.000.000	250.000.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	250.000.000	0	
2	**19**	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**2.04**	**00**				**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**1.700.000.000**	**1.800.000.000**	**100.000.000**	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	02				Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1.700.000.000	1.800.000.000	100.000.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.700.000.000	1.800.000.000	100.000.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	02	5	1	05	Belanja Hibah	1.700.000.000	1.800.000.000	100.000.000	
2	**19**	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.033.781.701**	**2.735.675.256**	**(298.106.445)**	
2	**19**	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**36.476.000**	**36.476.000**	**0**	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.993.200	4.993.200	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.993.200	4.993.200	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.993.200	4.993.200	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000	2.500.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	2.500.000	2.500.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	2.500.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000	2.500.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	2.500.000	2.500.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	2.500.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.292.800	4.292.800	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	4.292.800	4.292.800	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.292.800	4.292.800	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.190.000	22.190.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	22.190.000	22.190.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.190.000	22.190.000	0	
2	**19**	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.481.467.781**	**2.140.429.336**	**(341.038.445)**	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.426.837.581	2.085.799.136	(341.038.445)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.426.837.581	2.085.799.136	(341.038.445)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.426.837.581	2.085.799.136	(341.038.445)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.587.200	50.587.200	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	50.587.200	50.587.200	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	50.587.200	50.587.200	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.043.000	4.043.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	4.043.000	4.043.000	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.043.000	4.043.000	0	
2	**19**	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**228.673.720**	**272.105.720**	**43.432.000**	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.137.000	12.201.000	(2.936.000)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	15.137.000	12.201.000	(2.936.000)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.137.000	12.201.000	(2.936.000)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.176.000	28.176.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	28.176.000	28.176.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	28.176.000	28.176.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.775.100	15.775.100	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	15.775.100	15.775.100	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.775.100	15.775.100	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.518.620	12.218.620	(2.300.000)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	14.518.620	12.218.620	(2.300.000)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.518.620	12.218.620	(2.300.000)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.104.000	13.850.000	(1.254.000)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	15.104.000	13.850.000	(1.254.000)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.104.000	13.850.000	(1.254.000)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	139.963.000	189.885.000	49.922.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	139.963.000	189.885.000	49.922.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	139.963.000	189.885.000	49.922.000	
2	**19**	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**41.380.800**	**41.380.800**	**0**	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.380.800	41.380.800	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	41.380.800	41.380.800	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.380.800	41.380.800	0	
2	**19**	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**186.052.800**	**185.552.800**	**(500.000)**	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	500.000	(500.000)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.000.000	500.000	(500.000)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000	500.000	(500.000)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.893.600	57.893.600	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	57.893.600	57.893.600	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	57.893.600	57.893.600	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.159.200	127.159.200	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	127.159.200	127.159.200	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	127.159.200	127.159.200	0	
2	**19**	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**59.730.600**	**59.730.600**	**0**	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.000.000	37.000.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	37.000.000	37.000.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000	37.000.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.736.000	7.736.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	7.736.000	7.736.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.736.000	7.736.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.994.600	14.994.600	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	14.994.600	14.994.600	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.994.600	14.994.600	0	
Jumlah Belanja										**6.283.311.501**	**5.951.393.856**	**(331.917.645)**	
Total Surplus/(Defisit)										**(6.231.311.501)**	**(5.899.393.856)**	**331.917.645**	
0	**00**	**2.19.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										**0**	**0**	**0**	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										**0**	**0**	**0**	

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 DINAS PERPUSTAKAAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	**0**	**0**	
0	**00**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
2	**23**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**3.279.549.872**	**3.088.641.061**	**(190.908.811)**	
2	**23**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**265.150.000**	**265.149.600**	**(400)**	
2	**23**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**197.259.000**	**265.149.600**	**67.890.600**	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	01				Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	1.500.000	68.190.000	66.690.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.500.000	3.190.000	1.690.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	01	Belanja Pegawai	0	1.690.000	1.690.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000	1.500.000	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	2		BELANJA MODAL	0	65.000.000	65.000.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	65.000.000	65.000.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	02				Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	185.469.000	186.699.300	1.230.300	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	181.669.000	168.707.300	(12.961.700)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	181.669.000	168.707.300	(12.961.700)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	2		BELANJA MODAL	3.800.000	17.992.000	14.192.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.800.000	17.992.000	14.192.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	09				Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	10.290.000	10.260.300	(29.700)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	1		BELANJA OPERASI	10.290.000	9.810.300	(479.700)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.290.000	9.810.300	(479.700)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	2		BELANJA MODAL	0	450.000	450.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	450.000	450.000	
2	**23**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**67.891.000**	**0**	**(67.891.000)**	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.02	01				Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	67.891.000	0	(67.891.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	67.891.000	0	(67.891.000)	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	67.891.000	0	(67.891.000)	
2	**23**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.014.399.872**	**2.823.491.461**	**(190.908.411)**	
2	**23**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**34.999.500**	**17.787.400**	**(17.212.100)**	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.997.800	2.890.300	(2.107.500)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.997.800	2.890.300	(2.107.500)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.997.800	2.890.300	(2.107.500)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.964.600	1.672.500	(292.100)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.964.600	1.672.500	(292.100)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.964.600	1.672.500	(292.100)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.965.900	0	(1.965.900)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	1.965.900	0	(1.965.900)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.965.900	0	(1.965.900)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.989.600	4.989.600	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	4.989.600	4.989.600	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.989.600	4.989.600	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.081.600	8.235.000	(12.846.600)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	21.081.600	8.235.000	(12.846.600)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.081.600	8.235.000	(12.846.600)	
2	**23**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.501.026.352**	**2.360.791.041**	**(140.235.311)**	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.463.238.052	2.325.321.741	(137.916.311)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.463.238.052	2.325.321.741	(137.916.311)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.463.238.052	2.325.321.741	(137.916.311)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.859.600	32.859.600	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	32.859.600	32.859.600	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	32.859.600	32.859.600	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.928.700	2.609.700	(2.319.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	4.928.700	2.609.700	(2.319.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.928.700	2.609.700	(2.319.000)	
2	**23**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**180.104.600**	**121.949.700**	**(58.154.900)**	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.404.400	1.063.200	(1.341.200)	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.404.400	1.063.200	(1.341.200)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.404.400	1.063.200	(1.341.200)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.001.100	29.637.100	(3.364.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	33.001.100	29.637.100	(3.364.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	33.001.100	29.637.100	(3.364.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.191.500	8.009.700	(4.181.800)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	12.191.500	8.009.700	(4.181.800)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.191.500	8.009.700	(4.181.800)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.059.100	14.096.200	(962.900)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	15.059.100	14.096.200	(962.900)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.059.100	14.096.200	(962.900)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.803.500	5.803.500	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	5.803.500	5.803.500	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.803.500	5.803.500	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.645.000	63.340.000	(48.305.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	111.645.000	63.340.000	(48.305.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	111.645.000	63.340.000	(48.305.000)	
2	**23**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**18.000.000**	**17.220.000**	**(780.000)**	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.000.000	17.220.000	(780.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1		BELANJA OPERASI	0	1.720.000	1.720.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1	01	Belanja Pegawai	0	1.720.000	1.720.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	18.000.000	15.500.000	(2.500.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.000.000	15.500.000	(2.500.000)	
2	**23**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**243.602.500**	**273.857.200**	**30.254.700**	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150.000	150.000	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	150.000	150.000	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	150.000	150.000	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.596.500	23.320.000	(13.276.500)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	36.596.500	23.320.000	(13.276.500)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	36.596.500	23.320.000	(13.276.500)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	206.856.000	250.387.200	43.531.200	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	206.856.000	250.387.200	43.531.200	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	206.856.000	250.387.200	43.531.200	
2	**23**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**36.666.920**	**31.886.120**	**(4.780.800)**	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.285.920	29.505.120	(4.780.800)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	34.285.920	29.505.120	(4.780.800)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	34.285.920	29.505.120	(4.780.800)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.381.000	2.381.000	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	2.381.000	2.381.000	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.381.000	2.381.000	0	
2	**24**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**60.000.000**	**60.000.000**	**0**	
2	**24**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**60.000.000**	**60.000.000**	**0**	
2	**24**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**60.000.000**	**60.000.000**	**0**	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	01				Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	48.000.000	48.000.000	0	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	48.000.000	48.000.000	0	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000	48.000.000	0	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	03				Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	12.000.000	12.000.000	0	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	12.000.000	12.000.000	0	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000	12.000.000	0	
									Jumlah Belanja	**3.339.549.872**	**3.148.641.061**	**(190.908.811)**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(3.339.549.872)**	**(3.148.641.061)**	**190.908.811**	
0	**00**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01 DINAS PARIWISATA

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	**26**	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**				
3	**26**	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**625.000.000**	**645.000.000**	**20.000.000**	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	625.000.000	645.000.000	20.000.000	
									Jumlah Pendapatan	**625.000.000**	**645.000.000**	**20.000.000**	
0	**00**	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
3	**26**	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**24.739.702.569**	**24.075.283.054**	**(664.419.515)**	
3	**26**	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**18.840.702.884**	**17.907.652.156**	**(933.050.728)**	
3	**26**	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**17.172.458.900**	**16.680.883.680**	**(491.575.220)**	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04				Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	17.072.459.000	16.630.883.980	(441.575.020)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	881.232.400	856.232.200	(25.000.200)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1	01	Belanja Pegawai	15.960.000	15.960.000	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	865.272.400	840.272.200	(25.000.200)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	2		BELANJA MODAL	16.191.226.600	15.774.651.780	(416.574.820)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	563.583.160	563.583.160	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.627.643.440	15.211.068.620	(416.574.820)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05				Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	99.999.900	49.999.700	(50.000.200)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	99.999.900	49.999.700	(50.000.200)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.900	49.999.700	(50.000.200)	
3	**26**	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.03**	**00**				**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**1.668.243.984**	**1.226.768.476**	**(441.475.508)**	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02				Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	290.979.984	290.979.984	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	209.205.985	209.205.985	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	209.205.985	209.205.985	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	2		BELANJA MODAL	81.773.999	81.773.999	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.773.999	81.773.999	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03				Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.377.264.000	935.788.492	(441.475.508)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	1.377.264.000	934.588.492	(442.675.508)	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.377.264.000	934.588.492	(442.675.508)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	5	2		BELANJA MODAL	0	1.200.000	1.200.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	1.200.000	1.200.000	
3	**26**	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**855.935.075**	**665.037.575**	**(190.897.500)**	
3	**26**	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**855.935.075**	**665.037.575**	**(190.897.500)**	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01				Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	600.000.000	464.183.500	(135.816.500)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	600.000.000	464.183.500	(135.816.500)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000	464.183.500	(135.816.500)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	183.364.900	128.283.900	(55.081.000)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	183.364.900	128.283.900	(55.081.000)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	183.364.900	128.283.900	(55.081.000)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	04				Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	72.570.175	72.570.175	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	72.570.175	72.570.175	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	72.570.175	72.570.175	0	
3	**26**	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**184.999.900**	**89.999.900**	**(95.000.000)**	
3	**26**	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**2.02**	**00**				**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**184.999.900**	**89.999.900**	**(95.000.000)**	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	02				Pengembangan Pendidikan	75.000.000	0	(75.000.000)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	75.000.000	0	(75.000.000)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	0	(75.000.000)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	07				Fasilitasi Kekayaan Intelektual	50.000.000	0	(50.000.000)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	50.000.000	0	(50.000.000)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	0	(50.000.000)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	09				Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	40.000.000	40.000.000	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	09	5	1		BELANJA OPERASI	40.000.000	40.000.000	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	40.000.000	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	10				Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	19.999.900	49.999.900	30.000.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	10	5	1		BELANJA OPERASI	19.999.900	49.999.900	30.000.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.900	49.999.900	30.000.000	
3	**26**	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**0**	**441.475.356**	**441.475.356**	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	**26**	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**0**	**441.475.356**	**441.475.356**	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01				Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	0	441.475.356	441.475.356	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	0	441.475.356	441.475.356	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	441.475.356	441.475.356	
3	**26**	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.858.064.710**	**4.971.118.067**	**113.053.357**	
3	**26**	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**50.027.626**	**50.027.626**	**0**	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.184.303	6.184.303	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	6.184.303	6.184.303	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.184.303	6.184.303	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.456.100	4.456.100	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	4.456.100	4.456.100	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.456.100	4.456.100	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.140.700	4.140.700	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	4.140.700	4.140.700	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.140.700	4.140.700	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.296.523	4.296.523	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	4.296.523	4.296.523	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.296.523	4.296.523	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.500.000	3.500.000	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	3.500.000	3.500.000	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000	3.500.000	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.450.000	22.450.000	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	22.450.000	22.450.000	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.450.000	22.450.000	0	
3	**26**	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.631.046.220**	**3.386.058.601**	**(244.987.619)**	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.561.046.220	3.316.058.601	(244.987.619)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.561.046.220	3.316.058.601	(244.987.619)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	3.561.046.220	3.316.058.601	(244.987.619)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	65.000.000	65.000.000	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	65.000.000	65.000.000	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	59.935.200	59.935.200	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.064.800	5.064.800	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
3	**26**	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**355.745.874**	**356.809.368**	**1.063.494**	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.928.700	39.929.800	11.001.100	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	28.928.700	39.929.800	11.001.100	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	28.928.700	39.929.800	11.001.100	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.820.000	20.127.500	(5.692.500)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	25.820.000	20.127.500	(5.692.500)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	25.820.000	20.127.500	(5.692.500)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.157.174	35.119.068	9.961.894	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	25.157.174	35.119.068	9.961.894	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	25.157.174	35.119.068	9.961.894	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	275.840.000	261.633.000	(14.207.000)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	275.840.000	261.633.000	(14.207.000)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	275.840.000	261.633.000	(14.207.000)	
3	**26**	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**179.780.000**	**215.780.000**	**36.000.000**	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	179.780.000	215.780.000	36.000.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	179.780.000	215.780.000	36.000.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	179.780.000	215.780.000	36.000.000	
3	**26**	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**412.798.147**	**563.810.241**	**151.012.094**	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000	900.000	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	900.000	900.000	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	900.000	900.000	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.899.997	74.499.997	27.600.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	46.899.997	74.499.997	27.600.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	46.899.997	74.499.997	27.600.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	364.998.150	488.410.244	123.412.094	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	364.998.150	488.410.244	123.412.094	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	364.998.150	488.410.244	123.412.094	

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	**26**	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**228.666.843**	**398.632.231**	**169.965.388**	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.829.997	28.824.600	(20.005.397)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	48.829.997	28.824.600	(20.005.397)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	48.829.997	28.824.600	(20.005.397)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.783.400	12.769.900	5.986.500	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	6.783.400	12.769.900	5.986.500	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	6.783.400	12.769.900	5.986.500	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	163.054.946	267.853.189	104.798.243	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	0	29.939.000	29.939.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	29.939.000	29.939.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2			BELANJA MODAL	163.054.946	237.914.189	74.859.243	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	163.054.946	237.914.189	74.859.243	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.998.500	89.184.542	79.186.042	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1			BELANJA OPERASI	9.998.500	14.184.700	4.186.200	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	9.998.500	14.184.700	4.186.200	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	2			BELANJA MODAL	0	74.999.842	74.999.842	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	74.999.842	74.999.842	
										Jumlah Belanja	**24.739.702.569**	**24.075.283.054**	**(664.419.515)**	
										Total Surplus/(Defisit)	**(24.114.702.569)**	**(23.430.283.054)**	**684.419.515**	
0	**00**	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**				**PEMBIAYAAN**				
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01 DINAS PERTANIAN

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**				**PENDAPATAN DAERAH**				
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**			**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**300.000.000**	**225.000.000**	**(75.000.000)**	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	150.000.000	75.000.000	(75.000.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	04		Lain-lain PAD yang Sah	150.000.000	150.000.000	0	
										Jumlah Pendapatan	**300.000.000**	**225.000.000**	**(75.000.000)**	
0	**00**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**				**BELANJA**				
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**40.258.768.344**	**39.712.682.820**	**(546.085.524)**	
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**6.560.391.620**	**7.010.954.430**	**450.562.810**	
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**					**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**4.970.272.700**	**5.581.116.510**	**610.843.810**	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01					Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4.645.272.800	5.376.116.560	730.843.760	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	4.645.272.800	5.376.116.560	730.843.760	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	01		Belanja Pegawai	9.870.000	1.210.000	(8.660.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.635.402.800	5.374.906.560	739.503.760	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02					Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	324.999.900	204.999.950	(119.999.950)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	324.999.900	204.999.950	(119.999.950)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	309.999.900	189.999.950	(119.999.950)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	05		Belanja Hibah	15.000.000	15.000.000	0	
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.02**	**00**					**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**1.590.118.920**	**1.429.837.920**	**(160.281.000)**	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01					Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	240.000.000	228.166.000	(11.834.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	240.000.000	228.166.000	(11.834.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	1.210.000	0	(1.210.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	238.790.000	228.166.000	(10.624.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03					Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1.350.118.920	1.201.671.920	(148.447.000)	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	1.350.118.920	1.201.671.920	(148.447.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	13.310.000	2.270.000	(11.040.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.336.808.920	1.199.401.920	(137.407.000)	
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**10.546.544.400**	**12.156.188.200**	**1.609.643.800**	
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**838.044.400**	**278.288.200**	**(559.756.200)**	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	375.000.000	0	(375.000.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	375.000.000	0	(375.000.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	375.000.000	0	(375.000.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02				Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	149.875.000	0	(149.875.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	149.875.000	0	(149.875.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	149.875.000	0	(149.875.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	263.169.600	239.498.200	(23.671.400)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	263.169.600	239.498.200	(23.671.400)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	263.169.600	239.498.200	(23.671.400)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	04				Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	49.999.800	38.790.000	(11.209.800)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	49.999.800	38.790.000	(11.209.800)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	04	5	1	01	Belanja Pegawai	1.210.000	0	(1.210.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	48.789.800	38.790.000	(9.999.800)	
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**2.02**	**00**				**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**9.708.500.000**	**11.877.900.000**	**2.169.400.000**	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2.480.000.000	2.672.030.000	192.030.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.480.000.000	2.672.030.000	192.030.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	32.970.000	0	(32.970.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.447.030.000	2.672.030.000	225.000.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	7.128.500.000	9.105.870.000	1.977.370.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	7.128.500.000	9.105.870.000	1.977.370.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	91.060.000	0	(91.060.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.037.440.000	9.105.870.000	2.068.430.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	09				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	100.000.000	100.000.000	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	09	5	1		BELANJA OPERASI	100.000.000	100.000.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	09	5	1	01	Belanja Pegawai	1.210.000	1.210.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	98.790.000	98.790.000	0	
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**396.690.200**	**396.690.200**	**0**	
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**396.690.200**	**396.690.200**	**0**	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01				Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	396.690.200	396.690.200	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	396.690.200	396.690.200	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	396.690.200	396.690.200	0	
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**70.000.000**	**59.999.900**	**(10.000.100)**	
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**06**	**2.01**	**00**				**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**70.000.000**	**59.999.900**	**(10.000.100)**	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03				Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	70.000.000	59.999.900	(10.000.100)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	70.000.000	59.999.900	(10.000.100)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	59.999.900	(10.000.100)	
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**07**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**3.843.099.770**	**3.818.490.169**	**(24.609.601)**	
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**07**	**2.01**	**00**				**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**3.843.099.770**	**3.818.490.169**	**(24.609.601)**	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	998.099.830	998.440.229	340.399	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	998.099.830	998.440.229	340.399	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	948.099.830	948.440.229	340.399	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	5	1	05	Belanja Hibah	50.000.000	50.000.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	789.999.940	789.249.940	(750.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	789.999.940	789.249.940	(750.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02	5	1	01	Belanja Pegawai	6.050.000	0	(6.050.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	753.949.940	759.249.940	5.300.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02	5	1	05	Belanja Hibah	30.000.000	30.000.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	03				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2.055.000.000	2.030.800.000	(24.200.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	131.250.000	107.050.000	(24.200.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	03	5	1	01	Belanja Pegawai	18.150.000	0	(18.150.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	113.100.000	107.050.000	(6.050.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	03	5	2		BELANJA MODAL	1.923.750.000	1.923.750.000	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	427.500.000	427.500.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	03	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.496.250.000	1.496.250.000	0	
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**18.842.042.354**	**16.270.359.921**	**(2.571.682.433)**	
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**44.525.600**	**44.735.100**	**209.500**	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.999.800	5.999.800	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	5.999.800	5.999.800	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.999.800	5.999.800	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.525.800	38.735.300	209.500	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	38.525.800	38.735.300	209.500	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	38.525.800	38.735.300	209.500	
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**15.840.508.114**	**13.632.612.881**	**(2.207.895.233)**	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.762.099.014	13.414.573.781	(2.347.525.233)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	15.762.099.014	13.414.573.781	(2.347.525.233)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	15.762.099.014	13.414.573.781	(2.347.525.233)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72.409.200	212.039.200	139.630.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	72.409.200	212.039.200	139.630.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	72.409.200	212.039.200	139.630.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.999.900	5.999.900	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	5.999.900	5.999.900	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.999.900	5.999.900	0	
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.03**	**00**				**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**10.000.000**	**10.000.000**	**0**	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	06				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	10.000.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	06	5	1		BELANJA OPERASI	10.000.000	10.000.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	10.000.000	0	
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**337.825.000**	**399.872.900**	**62.047.900**	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.772.400	5.772.400	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.772.400	5.772.400	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.772.400	5.772.400	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.475.500	63.475.500	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	63.475.500	63.475.500	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	63.475.500	63.475.500	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.999.900	4.999.900	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	4.999.900	4.999.900	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.900	4.999.900	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.581.000	35.733.900	4.152.900	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	31.581.000	35.733.900	4.152.900	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	31.581.000	35.733.900	4.152.900	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29.996.800	29.996.800	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	29.996.800	29.996.800	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.996.800	29.996.800	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.999.400	1.999.400	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1		BELANJA OPERASI	1.999.400	1.999.400	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.999.400	1.999.400	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	257.895.000	57.895.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	200.000.000	257.895.000	57.895.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	257.895.000	57.895.000	
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**241.029.400**	**57.857.700**	**(183.171.700)**	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.171.700	57.857.700	(67.314.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	125.171.700	57.857.700	(67.314.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.171.700	57.857.700	(67.314.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	08				Pengadaan Aset Tak Berwujud	115.857.700	0	(115.857.700)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	08	5	1		BELANJA OPERASI	115.857.700	0	(115.857.700)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	08	5	1	01	Belanja Pegawai	1.210.000	0	(1.210.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	114.647.700	0	(114.647.700)	
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.048.837.700**	**1.883.316.900**	**(165.520.800)**	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.705.700	35.556.700	(4.149.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	39.705.700	35.556.700	(4.149.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	39.705.700	35.556.700	(4.149.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.004.132.000	1.842.760.200	(161.371.800)	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	2.004.132.000	1.842.760.200	(161.371.800)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.004.132.000	1.842.760.200	(161.371.800)	
3	**27**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**319.316.540**	**241.964.440**	**(77.352.100)**	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	142.808.440	148.201.440	5.393.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	142.808.440	148.201.440	5.393.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	142.808.440	148.201.440	5.393.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.763.000	13.763.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	13.763.000	13.763.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.763.000	13.763.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	162.745.100	80.000.000	(82.745.100)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	162.745.100	80.000.000	(82.745.100)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	01	Belanja Pegawai	2.780.000	0	(2.780.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	159.965.100	80.000.000	(79.965.100)	
									Jumlah Belanja	**40.258.768.344**	**39.712.682.820**	**(546.085.524)**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(39.958.768.344)**	**(39.487.682.820)**	**471.085.524**	
0	**00**	**3.27.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**				
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**362.100.000**	**362.100.000**	**0**	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	362.100.000	362.100.000	0	
									Jumlah Pendapatan	**362.100.000**	**362.100.000**	**0**	
0	**00**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**SEKRETARIAT DAERAH**	**36.841.753.222**	**41.354.380.238**	**4.512.627.016**	
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**6.123.869.548**	**9.172.918.500**	**3.049.048.952**	
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Administrasi Tata Pemerintahan**	**245.153.300**	**678.120.700**	**432.967.400**	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01				Penataan Administrasi Pemerintahan	71.729.200	129.719.500	57.990.300	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	71.729.200	129.719.500	57.990.300	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	71.729.200	129.719.500	57.990.300	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	82.490.700	53.290.000	(29.200.700)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	82.490.700	53.290.000	(29.200.700)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	82.490.700	53.290.000	(29.200.700)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03				Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	90.933.400	495.111.200	404.177.800	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	90.933.400	495.111.200	404.177.800	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	90.933.400	495.111.200	404.177.800	
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**4.390.282.400**	**7.024.187.300**	**2.633.904.900**	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01				Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	778.646.800	936.470.200	157.823.400	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	778.646.800	936.470.200	157.823.400	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	778.646.800	936.470.200	157.823.400	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	3.455.000.000	5.905.000.000	2.450.000.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	3.455.000.000	5.905.000.000	2.450.000.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	05	Belanja Hibah	1.955.000.000	3.755.000.000	1.800.000.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	1.500.000.000	2.150.000.000	650.000.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	156.635.600	182.717.100	26.081.500	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	156.635.600	182.717.100	26.081.500	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	156.635.600	182.717.100	26.081.500	
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.03**	**00**				**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**1.460.580.900**	**1.439.130.300**	**(21.450.600)**	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	636.007.200	539.566.800	(96.440.400)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	636.007.200	539.566.800	(96.440.400)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	636.007.200	539.566.800	(96.440.400)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02				Fasilitasi Bantuan Hukum	723.976.300	826.831.100	102.854.800	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	723.976.300	826.831.100	102.854.800	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	723.976.300	826.831.100	102.854.800	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	100.597.400	72.732.400	(27.865.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	100.597.400	72.732.400	(27.865.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.597.400	72.732.400	(27.865.000)	
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.04**	**00**				**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**27.852.948**	**31.480.200**	**3.627.252**	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	01				Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	18.423.948	31.480.200	13.056.252	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	01	5	1		BELANJA OPERASI	18.423.948	31.480.200	13.056.252	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.423.948	31.480.200	13.056.252	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03				Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	9.429.000	0	(9.429.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03	5	1		BELANJA OPERASI	9.429.000	0	(9.429.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.429.000	0	(9.429.000)	
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**1.537.523.000**	**1.716.828.000**	**179.305.000**	
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**350.978.400**	**412.897.700**	**61.919.300**	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	48.809.200	85.966.600	37.157.400	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	48.809.200	85.966.600	37.157.400	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	48.809.200	85.966.600	37.157.400	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	281.931.000	326.931.100	45.000.100	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	281.931.000	326.931.100	45.000.100	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	281.931.000	326.931.100	45.000.100	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	20.238.200	0	(20.238.200)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	20.238.200	0	(20.238.200)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.238.200	0	(20.238.200)	
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**2.02**	**00**				**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**527.787.900**	**494.923.900**	**(32.864.000)**	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01				Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	198.632.500	150.227.100	(48.405.400)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	198.632.500	150.227.100	(48.405.400)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	18.000.000	18.000.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	180.632.500	132.227.100	(48.405.400)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02				Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	185.085.100	216.410.600	31.325.500	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	185.085.100	216.410.600	31.325.500	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	185.085.100	216.410.600	31.325.500	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03				Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	144.070.300	128.286.200	(15.784.100)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	144.070.300	128.286.200	(15.784.100)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	18.000.000	18.000.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	126.070.300	110.286.200	(15.784.100)	
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**2.03**	**00**				**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**658.756.700**	**809.006.400**	**150.249.700**	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	435.690.700	582.396.600	146.705.900	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	435.690.700	582.396.600	146.705.900	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	5	1	01	Belanja Pegawai	339.290.000	434.540.000	95.250.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	96.400.700	147.856.600	51.455.900	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	02				Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	178.690.000	198.533.800	19.843.800	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	178.690.000	198.533.800	19.843.800	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	178.690.000	198.533.800	19.843.800	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	03				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	44.376.000	28.076.000	(16.300.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	44.376.000	28.076.000	(16.300.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	44.376.000	28.076.000	(16.300.000)	
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**29.180.360.674**	**30.464.633.738**	**1.284.273.064**	
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**86.286.700**	**97.156.700**	**10.870.000**	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.428.400	8.428.400	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	8.428.400	8.428.400	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.428.400	8.428.400	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.999.800	4.999.800	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	4.999.800	4.999.800	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.800	4.999.800	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.999.800	4.999.800	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	4.999.800	4.999.800	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.800	4.999.800	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000	5.000.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.999.800	4.999.800	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	4.999.800	4.999.800	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.800	4.999.800	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.858.900	68.728.900	10.870.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	57.858.900	68.728.900	10.870.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	57.858.900	68.728.900	10.870.000	
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.702.008.672**	**11.269.864.135**	**(432.144.537)**	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.514.350.772	11.067.206.335	(447.144.437)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	11.514.350.772	11.067.206.335	(447.144.437)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	11.514.350.772	10.901.316.835	(613.033.937)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	165.889.500	165.889.500	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	176.604.000	176.604.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	176.604.000	176.604.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	176.604.000	176.604.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.053.900	6.053.900	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	6.053.900	6.053.900	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.053.900	6.053.900	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000	19.999.900	14.999.900	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	19.999.900	14.999.900	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	19.999.900	14.999.900	
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.03**	**00**				**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**29.104.000**	**37.394.000**	**8.290.000**	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	06				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	29.104.000	37.394.000	8.290.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	06	5	1		BELANJA OPERASI	29.104.000	37.394.000	8.290.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.104.000	37.394.000	8.290.000	
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4.279.955.800**	**5.784.373.726**	**1.504.417.926**	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80.111.400	80.111.400	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	80.111.400	80.111.400	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	80.111.400	80.111.400	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	420.721.000	617.898.150	197.177.150	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	420.721.000	596.348.150	175.627.150	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	420.721.000	596.348.150	175.627.150	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	2		BELANJA MODAL	0	21.550.000	21.550.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	21.550.000	21.550.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.002.400	80.334.400	(19.668.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	100.002.400	80.334.400	(19.668.000)	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.002.400	80.334.400	(19.668.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.322.237.000	3.077.296.976	755.059.976	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1		BELANJA OPERASI	2.322.237.000	3.077.296.976	755.059.976	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.322.237.000	3.077.296.976	755.059.976	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.356.884.000	1.928.732.800	571.848.800	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	1.356.884.000	1.928.732.800	571.848.800	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.356.884.000	1.928.732.800	571.848.800	
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**794.364.500**	**712.364.500**	**(82.000.000)**	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05				Pengadaan Mebel	212.000.000	200.000.000	(12.000.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	1		BELANJA OPERASI	0	8.000.000	8.000.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	8.000.000	8.000.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	2		BELANJA MODAL	212.000.000	192.000.000	(20.000.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	212.000.000	192.000.000	(20.000.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	582.364.500	512.364.500	(70.000.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1		BELANJA OPERASI	170.239.500	194.864.500	24.625.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	170.239.500	194.864.500	24.625.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	412.125.000	317.500.000	(94.625.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	412.125.000	317.500.000	(94.625.000)	
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.340.836.189**	**3.573.807.964**	**232.971.775**	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	152.500.000	52.500.000	(100.000.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	152.500.000	52.500.000	(100.000.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	152.500.000	52.500.000	(100.000.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	742.877.189	821.814.189	78.937.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	742.877.189	821.814.189	78.937.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	742.877.189	821.814.189	78.937.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	433.964.000	653.098.775	219.134.775	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1		BELANJA OPERASI	433.964.000	653.098.775	219.134.775	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	433.964.000	653.098.775	219.134.775	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.011.495.000	2.046.395.000	34.900.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	2.011.495.000	2.046.395.000	34.900.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.011.495.000	2.046.395.000	34.900.000	
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.967.040.800**	**1.538.262.100**	**(428.778.700)**	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	769.698.100	942.471.200	172.773.100	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	769.698.100	942.471.200	172.773.100	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	769.698.100	942.471.200	172.773.100	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	05				Pemeliharaan Mebel	22.000.000	0	(22.000.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	05	5	1		BELANJA OPERASI	22.000.000	0	(22.000.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000	0	(22.000.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	260.374.200	188.413.700	(71.960.500)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	260.374.200	188.413.700	(71.960.500)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	260.374.200	188.413.700	(71.960.500)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	715.000.000	407.377.200	(307.622.800)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	515.000.000	207.377.200	(307.622.800)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	515.000.000	207.377.200	(307.622.800)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2		BELANJA MODAL	200.000.000	200.000.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000	200.000.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.968.500	0	(199.968.500)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	2		BELANJA MODAL	199.968.500	0	(199.968.500)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.968.500	0	(199.968.500)	
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.11**	**00**				**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**777.509.113**	**777.509.113**	**0**	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.11	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	777.509.113	777.509.113	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.11	01	5	1		BELANJA OPERASI	777.509.113	777.509.113	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.11	01	5	1	01	Belanja Pegawai	777.509.113	777.509.113	0	
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.12**	**00**				**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**5.419.680.000**	**5.926.210.900**	**506.530.900**	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	01				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	3.241.980.000	3.399.390.400	157.410.400	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.241.980.000	3.399.390.400	157.410.400	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.241.980.000	3.399.390.400	157.410.400	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	02				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2.177.700.000	2.526.820.500	349.120.500	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	02	5	1		BELANJA OPERASI	2.177.700.000	2.526.820.500	349.120.500	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.177.700.000	2.526.820.500	349.120.500	
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.13**	**00**				**Penataan Organisasi**	**391.707.100**	**393.048.300**	**1.341.200**	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	01				Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	139.792.700	158.005.600	18.212.900	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	01	5	1		BELANJA OPERASI	139.792.700	158.005.600	18.212.900	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	139.792.700	158.005.600	18.212.900	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	02				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	122.402.200	147.575.500	25.173.300	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	02	5	1		BELANJA OPERASI	122.402.200	147.575.500	25.173.300	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	122.402.200	147.575.500	25.173.300	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	03				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	129.512.200	87.467.200	(42.045.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	03	5	1		BELANJA OPERASI	129.512.200	87.467.200	(42.045.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	129.512.200	87.467.200	(42.045.000)	
4	**01**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.14**	**00**				**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**391.867.800**	**354.642.300**	**(37.225.500)**	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	01				Fasilitasi Keprotokolan	195.517.000	228.353.600	32.836.600	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	01	5	1		BELANJA OPERASI	195.517.000	228.353.600	32.836.600	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	195.517.000	228.353.600	32.836.600	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	02				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	94.343.800	76.478.500	(17.865.300)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	02	5	1		BELANJA OPERASI	94.343.800	76.478.500	(17.865.300)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	94.343.800	76.478.500	(17.865.300)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	03				Pendokumentasian Tugas Pimpinan	102.007.000	49.810.200	(52.196.800)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	03	5	1		BELANJA OPERASI	102.007.000	49.810.200	(52.196.800)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	102.007.000	49.810.200	(52.196.800)	
									Jumlah Belanja	**36.841.753.222**	**41.354.380.238**	**4.512.627.016**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(36.479.653.222)**	**(40.992.280.238)**	**(4.512.627.016)**	
0	**00**	**4.01.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	**0**	**0**	
0	**00**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**SEKRETARIAT DPRD**	**38.135.891.337**	**37.549.611.816**	**(586.279.521)**	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**12.823.794.300**	**13.330.112.700**	**506.318.400**	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**632.034.200**	**457.624.000**	**(174.410.200)**	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	15.000.000	0	(15.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	15.000.000	0	(15.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	0	(15.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	457.624.000	457.624.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	457.624.000	457.624.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	457.624.000	457.624.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04				Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	159.410.200	0	(159.410.200)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	159.410.200	0	(159.410.200)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	159.410.200	0	(159.410.200)	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**470.000.000**	**470.000.000**	**0**	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01				Pembahasan KUA dan PPAS	20.000.000	20.000.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	20.000.000	20.000.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	20.000.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03				Pembahasan APBD	450.000.000	450.000.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	450.000.000	450.000.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000	450.000.000	0	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.03**	**00**				**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**127.860.800**	**127.860.800**	**0**	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	07				Pengawasan Penggunaan Anggaran	127.860.800	127.860.800	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	07	5	1		BELANJA OPERASI	127.860.800	127.860.800	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	127.860.800	127.860.800	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.04**	**00**				**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**1.789.903.400**	**1.291.940.600**	**(497.962.800)**	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02				Pendalaman Tugas DPRD	1.300.000.000	937.160.000	(362.840.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.300.000.000	937.160.000	(362.840.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000.000	937.160.000	(362.840.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03				Publikasi dan Dokumentasi Dewan	185.170.000	126.987.000	(58.183.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03	5	1		BELANJA OPERASI	185.170.000	126.987.000	(58.183.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	185.170.000	126.987.000	(58.183.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	04				Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	76.939.800	0	(76.939.800)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	04	5	1		BELANJA OPERASI	76.939.800	0	(76.939.800)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	76.939.800	0	(76.939.800)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	05				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	227.793.600	227.793.600	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	05	5	1		BELANJA OPERASI	227.793.600	227.793.600	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	227.793.600	227.793.600	0	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.05**	**00**				**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**3.854.895.200**	**3.765.515.200**	**(89.380.000)**	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01				Kunjungan Kerja dalam Daerah	150.000.000	95.000.000	(55.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	5	1		BELANJA OPERASI	150.000.000	95.000.000	(55.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	95.000.000	(55.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	03				Pelaksanaan Reses	3.704.895.200	3.670.515.200	(34.380.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	03	5	1		BELANJA OPERASI	3.704.895.200	3.670.515.200	(34.380.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.704.895.200	3.670.515.200	(34.380.000)	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.06**	**00**				**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**152.200.000**	**120.271.400**	**(31.928.600)**	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	02				Pengawasan Kode Etik DPRD	152.200.000	120.271.400	(31.928.600)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	152.200.000	120.271.400	(31.928.600)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	152.200.000	120.271.400	(31.928.600)	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.08**	**00**				**Fasilitasi Tugas DPRD**	**5.796.900.700**	**7.096.900.700**	**1.300.000.000**	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	01				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5.200.000.000	6.500.000.000	1.300.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.200.000.000	6.500.000.000	1.300.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000.000	6.500.000.000	1.300.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	03				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	450.000.000	450.000.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	03	5	1		BELANJA OPERASI	450.000.000	450.000.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000	450.000.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	04				Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	146.900.700	146.900.700	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	146.900.700	146.900.700	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	146.900.700	146.900.700	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**25.312.097.037**	**24.219.499.116**	**(1.092.597.921)**	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**195.024.400**	**235.252.400**	**40.228.000**	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	5.000.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.999.500	0	(4.999.500)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	4.999.500	0	(4.999.500)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.500	0	(4.999.500)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.999.900	4.999.900	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	4.999.900	4.999.900	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.900	4.999.900	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	175.025.000	220.252.500	45.227.500	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	175.025.000	220.252.500	45.227.500	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	175.025.000	220.252.500	45.227.500	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.815.752.736**	**2.630.445.315**	**(185.307.421)**	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.738.072.436	2.556.330.415	(181.742.021)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.738.072.436	2.556.330.415	(181.742.021)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.738.072.436	2.556.330.415	(181.742.021)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	67.684.900	69.114.900	1.430.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	67.684.900	69.114.900	1.430.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	66.886.800	68.316.800	1.430.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	798.100	798.100	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.995.400	0	(4.995.400)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	4.995.400	0	(4.995.400)	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.995.400	0	(4.995.400)	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.05**	**00**				**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**150.566.700**	**136.838.700**	**(13.728.000)**	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.566.700	136.838.700	(13.728.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11	5	1		BELANJA OPERASI	150.566.700	136.838.700	(13.728.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	150.566.700	136.838.700	(13.728.000)	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**953.203.900**	**903.853.900**	**(49.350.000)**	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.331.600	12.331.600	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	12.331.600	12.331.600	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.331.600	12.331.600	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.687.100	85.687.100	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	85.687.100	85.687.100	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	85.687.100	85.687.100	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.027.200	50.027.200	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	50.027.200	50.027.200	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.027.200	50.027.200	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	79.758.000	79.758.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	79.758.000	79.758.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	79.758.000	79.758.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	125.400.000	76.050.000	(49.350.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1		BELANJA OPERASI	125.400.000	76.050.000	(49.350.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	125.400.000	76.050.000	(49.350.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000	600.000.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	600.000.000	600.000.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000	600.000.000	0	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.487.619.100**	**95.000.000**	**(1.392.619.100)**	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	01				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.244.098.700	0	(1.244.098.700)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	01	5	2		BELANJA MODAL	1.244.098.700	0	(1.244.098.700)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.244.098.700	0	(1.244.098.700)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05				Pengadaan Mebel	73.720.400	95.000.000	21.279.600	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	2		BELANJA MODAL	73.720.400	95.000.000	21.279.600	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.720.400	95.000.000	21.279.600	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	169.800.000	0	(169.800.000)	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1		BELANJA OPERASI	124.800.000	0	(124.800.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	124.800.000	0	(124.800.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	45.000.000	0	(45.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.000.000	0	(45.000.000)	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**590.883.200**	**584.884.200**	**(5.999.000)**	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	6.000.000	(6.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	12.000.000	6.000.000	(6.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000	6.000.000	(6.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000	50.001.000	1.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	50.000.000	50.001.000	1.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	50.001.000	1.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	528.883.200	528.883.200	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	528.883.200	528.883.200	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	528.883.200	528.883.200	0	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**404.564.956**	**326.003.656**	**(78.561.300)**	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	324.571.156	274.571.156	(50.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	324.571.156	274.571.156	(50.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	324.571.156	274.571.156	(50.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.993.800	39.132.500	(10.861.300)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	49.993.800	39.132.500	(10.861.300)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	49.993.800	39.132.500	(10.861.300)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	12.300.000	(17.700.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	30.000.000	12.300.000	(17.700.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	12.300.000	(17.700.000)	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.15**	**00**				**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**14.271.414.845**	**14.227.064.845**	**(44.350.000)**	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	13.453.899.845	13.441.099.845	(12.800.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	5	1		BELANJA OPERASI	13.453.899.845	13.441.099.845	(12.800.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	5	1	01	Belanja Pegawai	13.453.899.845	13.441.099.845	(12.800.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	02				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	412.680.000	325.930.000	(86.750.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	02	5	1		BELANJA OPERASI	412.680.000	325.930.000	(86.750.000)	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	02	5	1	01	Belanja Pegawai	1.430.000	0	(1.430.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	411.250.000	325.930.000	(85.320.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	03				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	404.835.000	460.035.000	55.200.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	03	5	1		BELANJA OPERASI	404.835.000	460.035.000	55.200.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	404.835.000	460.035.000	55.200.000	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.16**	**00**				**Layanan Administrasi DPRD**	**4.443.067.200**	**5.080.156.100**	**637.088.900**	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	02				Fasilitasi Fraksi DPRD	6.654.200	6.654.200	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	02	5	1		BELANJA OPERASI	6.654.200	6.654.200	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.654.200	6.654.200	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	03				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	2.636.200.000	3.246.975.000	610.775.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	03	5	1		BELANJA OPERASI	2.636.200.000	3.246.975.000	610.775.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.636.200.000	3.246.975.000	610.775.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	04				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.800.213.000	1.826.526.900	26.313.900	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	04	5	1		BELANJA OPERASI	1.800.213.000	1.807.826.900	7.613.900	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.213.000	1.807.826.900	7.613.900	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	04	5	2		BELANJA MODAL	0	18.700.000	18.700.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	04	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	18.700.000	18.700.000	
									Jumlah Belanja	**38.135.891.337**	**37.549.611.816**	**(586.279.521)**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(38.135.891.337)**	**(37.549.611.816)**	**586.279.521**	
0	**00**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
										Jumlah Pendapatan	**0**	**0**	**0**	
0	**00**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**				**BELANJA**				
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**PERENCANAAN**	**6.392.789.153**	**5.879.221.960**	**(513.567.193)**	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**995.335.600**	**1.027.319.700**	**31.984.100**	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**					**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**706.335.600**	**726.319.700**	**19.984.100**	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	03					Pelaksanaan Konsultasi Publik	30.320.000	30.320.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	30.320.000	30.320.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	30.320.000	30.320.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	04					Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	42.528.900	42.513.000	(15.900)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	42.528.900	42.513.000	(15.900)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	42.528.900	42.513.000	(15.900)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	05					Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	235.986.700	235.986.700	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1			BELANJA OPERASI	235.986.700	235.986.700	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	235.986.700	235.986.700	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	07					Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	397.500.000	417.500.000	20.000.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	1			BELANJA OPERASI	397.500.000	417.500.000	20.000.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	397.500.000	417.500.000	20.000.000	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**02**	**2.03**	**00**					**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**265.000.000**	**265.000.000**	**0**	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	01					Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	125.000.000	125.000.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1			BELANJA OPERASI	125.000.000	125.000.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	125.000.000	125.000.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	03					Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	140.000.000	140.000.000	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	140.000.000	140.000.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000	140.000.000	0	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**02**	**2.04**	**00**				**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**24.000.000**	**36.000.000**	**12.000.000**	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	02				Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	24.000.000	36.000.000	12.000.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	24.000.000	36.000.000	12.000.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	02	5	1	01	Belanja Pegawai	24.000.000	36.000.000	12.000.000	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**510.985.700**	**570.985.700**	**60.000.000**	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**243.999.600**	**263.999.600**	**20.000.000**	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	01				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	30.647.400	30.647.400	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	30.647.400	30.647.400	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.647.400	30.647.400	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	02				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	13.058.400	13.058.400	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	13.058.400	13.058.400	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.058.400	13.058.400	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	03				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	12.699.000	16.316.000	3.617.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	12.699.000	16.316.000	3.617.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.699.000	16.316.000	3.617.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	05				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	87.512.000	100.751.000	13.239.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	87.512.000	100.751.000	13.239.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	87.512.000	100.751.000	13.239.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	06				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	75.812.100	75.812.100	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	75.812.100	75.812.100	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	75.812.100	75.812.100	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	07				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	24.270.700	27.414.700	3.144.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	24.270.700	27.414.700	3.144.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.270.700	27.414.700	3.144.000	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**03**	**2.02**	**00**				**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**156.986.100**	**176.986.100**	**20.000.000**	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	01				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	96.601.100	108.526.100	11.925.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	96.601.100	108.526.100	11.925.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	96.601.100	108.526.100	11.925.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	02				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	30.385.000	38.460.000	8.075.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	30.385.000	38.460.000	8.075.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.385.000	38.460.000	8.075.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	03				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	30.000.000	30.000.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	30.000.000	30.000.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	30.000.000	0	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**03**	**2.03**	**00**				**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**110.000.000**	**130.000.000**	**20.000.000**	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	01				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	31.000.000	31.000.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	31.000.000	31.000.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000	31.000.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	02				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	31.000.000	31.000.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	31.000.000	31.000.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000	31.000.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	03				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	9.000.000	9.000.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	9.000.000	9.000.000	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000	9.000.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	05				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15.000.000	15.000.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	05	5	1		BELANJA OPERASI	15.000.000	15.000.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	15.000.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	06				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	15.000.000	35.000.000	20.000.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	06	5	1		BELANJA OPERASI	15.000.000	35.000.000	20.000.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	35.000.000	20.000.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	07				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	9.000.000	9.000.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	07	5	1		BELANJA OPERASI	9.000.000	9.000.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000	9.000.000	0	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.886.467.853**	**4.280.916.560**	**(605.551.293)**	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**14.054.700**	**17.840.700**	**3.786.000**	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.040.000	3.040.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.040.000	3.040.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.040.000	3.040.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.004.700	2.004.700	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	2.004.700	2.004.700	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.004.700	2.004.700	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.010.000	12.796.000	3.786.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	9.010.000	12.796.000	3.786.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.010.000	12.796.000	3.786.000	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.770.397.153**	**3.594.168.960**	**(176.228.193)**	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.716.417.753	3.540.189.560	(176.228.193)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.716.417.753	3.540.189.560	(176.228.193)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	3.716.417.753	3.540.189.560	(176.228.193)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.979.200	51.979.200	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	51.979.200	51.979.200	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	51.979.200	51.979.200	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.200	2.000.200	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	2.000.200	2.000.200	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.200	2.000.200	0	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**353.604.900**	**393.525.800**	**39.920.900**	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.011.300	5.011.300	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.011.300	5.011.300	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.011.300	5.011.300	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.973.100	22.973.100	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	22.973.100	22.973.100	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.973.100	22.973.100	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.921.300	2.898.200	(23.100)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	2.921.300	2.898.200	(23.100)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.921.300	2.898.200	(23.100)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.917.700	20.201.700	(19.716.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	39.917.700	20.201.700	(19.716.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	39.917.700	20.201.700	(19.716.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	47.503.500	47.503.500	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	47.503.500	47.503.500	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	47.503.500	47.503.500	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	235.278.000	294.938.000	59.660.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	235.278.000	294.938.000	59.660.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	235.278.000	294.938.000	59.660.000	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**565.725.100**	**67.225.100**	**(498.500.000)**	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	565.725.100	67.225.100	(498.500.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1		BELANJA OPERASI	1.267.700	1.267.700	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.267.700	1.267.700	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	564.457.400	65.957.400	(498.500.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	564.457.400	65.957.400	(498.500.000)	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**124.350.500**	**128.320.500**	**3.970.000**	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.088.000	2.638.000	550.000	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.088.000	2.638.000	550.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.088.000	2.638.000	550.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.184.800	53.604.800	3.420.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	50.184.800	53.604.800	3.420.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.184.800	53.604.800	3.420.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.077.700	72.077.700	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	72.077.700	72.077.700	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	72.077.700	72.077.700	0	
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**58.335.500**	**79.835.500**	**21.500.000**	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.290.100	52.290.100	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	52.290.100	52.290.100	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	52.290.100	52.290.100	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.045.400	21.045.400	15.000.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	6.045.400	21.045.400	15.000.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.045.400	21.045.400	15.000.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	6.500.000	6.500.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	0	6.500.000	6.500.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	6.500.000	6.500.000	
5	**05**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**480.000.000**	**468.000.000**	**(12.000.000)**	
5	**05**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**480.000.000**	**468.000.000**	**(12.000.000)**	
5	**05**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**160.000.000**	**160.000.000**	**0**	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	12				Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	160.000.000	160.000.000	0	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	12	5	1		BELANJA OPERASI	160.000.000	160.000.000	0	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	12	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000	160.000.000	0	
5	**05**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**140.000.000**	**140.000.000**	**0**	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.02	10				Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	140.000.000	140.000.000	0	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.02	10	5	1		BELANJA OPERASI	140.000.000	140.000.000	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.02	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000	140.000.000	0	
5	**05**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**02**	**2.03**	**00**				**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**70.000.000**	**58.000.000**	**(12.000.000)**	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	01				Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	70.000.000	58.000.000	(12.000.000)	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	70.000.000	58.000.000	(12.000.000)	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	58.000.000	(12.000.000)	
5	**05**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**02**	**2.04**	**00**				**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**110.000.000**	**110.000.000**	**0**	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	03				Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	110.000.000	110.000.000	0	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	03	5	1		BELANJA OPERASI	106.600.000	106.600.000	0	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	106.600.000	106.600.000	0	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	03	5	2		BELANJA MODAL	3.400.000	3.400.000	0	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.400.000	3.400.000	0	
									Jumlah Belanja	**6.872.789.153**	**6.347.221.960**	**(525.567.193)**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(6.872.789.153)**	**(6.347.221.960)**	**525.567.193**	
0	**00**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	**0**	**0**	
0	**00**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**KEUANGAN**	**266.549.590.105**	**285.426.224.555**	**18.876.634.450**	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**259.998.442.817**	**279.021.268.575**	**19.022.825.758**	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**1.693.782.700**	**1.790.571.900**	**96.789.200**	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	220.488.000	220.806.000	318.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	220.488.000	220.806.000	318.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	220.488.000	220.806.000	318.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	02				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	214.865.800	159.400.300	(55.465.500)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	214.865.800	159.400.300	(55.465.500)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	214.865.800	159.400.300	(55.465.500)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	60.882.400	59.382.400	(1.500.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	60.882.400	59.382.400	(1.500.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	60.882.400	59.382.400	(1.500.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	04				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	58.298.700	54.528.400	(3.770.300)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	58.298.700	54.528.400	(3.770.300)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	58.298.700	54.528.400	(3.770.300)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	07				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	340.353.000	419.794.000	79.441.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	340.353.000	419.794.000	79.441.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	340.353.000	419.794.000	79.441.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	08				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	422.674.700	475.261.700	52.587.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	422.674.700	475.261.700	52.587.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	422.674.700	475.261.700	52.587.000	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	09				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	160.695.000	155.902.800	(4.792.200)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	09	5	1		BELANJA OPERASI	160.695.000	155.902.800	(4.792.200)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	160.695.000	155.902.800	(4.792.200)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	11				Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	50.008.000	79.979.200	29.971.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	11	5	1		BELANJA OPERASI	50.008.000	79.979.200	29.971.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.008.000	79.979.200	29.971.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	13				Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	165.517.100	165.517.100	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	13	5	1		BELANJA OPERASI	165.517.100	165.517.100	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	13	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	165.517.100	165.517.100	0	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**394.472.000**	**544.037.350**	**149.565.350**	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	01				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	75.727.900	75.803.600	75.700	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	75.727.900	75.803.600	75.700	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	75.727.900	75.803.600	75.700	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	03				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	25.000.000	25.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	25.000.000	25.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	25.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	06				Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	78.750.000	128.750.550	50.000.550	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	06	5	1		BELANJA OPERASI	78.750.000	128.750.550	50.000.550	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	78.750.000	128.750.550	50.000.550	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	09				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	29.994.000	29.935.100	(58.900)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	09	5	1		BELANJA OPERASI	29.994.000	29.935.100	(58.900)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.994.000	29.935.100	(58.900)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	10				Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	60.000.000	109.548.000	49.548.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	10	5	1		BELANJA OPERASI	60.000.000	109.548.000	49.548.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	109.548.000	49.548.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	11				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	125.000.100	175.000.100	50.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	11	5	1		BELANJA OPERASI	125.000.100	175.000.100	50.000.000	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.100	175.000.100	50.000.000	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**02**	**2.03**	**00**				**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**496.408.100**	**549.096.825**	**52.688.725**	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	02				Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	54.408.600	54.408.600	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	54.408.600	54.408.600	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	54.408.600	54.408.600	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	03				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	57.499.800	57.499.800	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	57.499.800	57.499.800	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	57.499.800	57.499.800	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	04				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	149.999.900	266.188.625	116.188.725	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	04	5	1		BELANJA OPERASI	149.999.900	266.188.625	116.188.725	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	149.999.900	266.188.625	116.188.725	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	05				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	170.999.800	170.999.800	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	05	5	1		BELANJA OPERASI	170.999.800	170.999.800	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	170.999.800	170.999.800	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	10				Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	63.500.000	0	(63.500.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	10	5	1		BELANJA OPERASI	63.500.000	0	(63.500.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	63.500.000	0	(63.500.000)	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**02**	**2.04**	**00**				**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**257.275.899.817**	**275.993.331.000**	**18.717.431.183**	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.04	04				Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	4.150.478.000	3.150.478.000	(1.000.000.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.04	04	5	1		BELANJA OPERASI	4.150.478.000	3.150.478.000	(1.000.000.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.04	04	5	1	03	Belanja Bunga	4.150.478.000	3.150.478.000	(1.000.000.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.04	08				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	238.889.565.800	259.726.239.000	20.836.673.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.04	08	5	4		BELANJA TRANSFER	238.889.565.800	259.726.239.000	20.836.673.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.04	08	5	4	02	Belanja Bantuan Keuangan	238.889.565.800	259.726.239.000	20.836.673.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.04	09				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10.672.000.000	13.116.614.000	2.444.614.000	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.04	09	5	3		BELANJA TIDAK TERDUGA	10.672.000.000	13.116.614.000	2.444.614.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.04	09	5	3	01	Belanja Tidak Terduga	10.672.000.000	13.116.614.000	2.444.614.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.04	10				Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	3.563.856.017	0	(3.563.856.017)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.04	10	5	4		BELANJA TRANSFER	3.563.856.017	0	(3.563.856.017)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.04	10	5	4	01	Belanja Bagi Hasil	3.563.856.017	0	(3.563.856.017)	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**02**	**2.05**	**00**				**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**137.880.200**	**144.231.500**	**6.351.300**	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.05	02				Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	137.880.200	144.231.500	6.351.300	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.05	02	5	1		BELANJA OPERASI	100.000.000	144.231.500	44.231.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.05	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	144.231.500	44.231.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.05	02	5	2		BELANJA MODAL	37.880.200	0	(37.880.200)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.05	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.880.200	0	(37.880.200)	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**911.052.900**	**779.960.300**	**(131.092.600)**	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**911.052.900**	**779.960.300**	**(131.092.600)**	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	05				Penatausahaan Barang Milik Daerah	173.074.400	113.754.400	(59.320.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	170.474.400	111.154.400	(59.320.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	170.474.400	111.154.400	(59.320.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	05	5	2		BELANJA MODAL	2.600.000	2.600.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	05	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.600.000	2.600.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	07				Pengamanan Barang Milik Daerah	402.459.400	263.617.400	(138.842.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	284.055.400	263.617.400	(20.438.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	284.055.400	263.617.400	(20.438.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	07	5	2		BELANJA MODAL	118.404.000	0	(118.404.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	07	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.404.000	0	(118.404.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	09				Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	72.646.400	72.366.400	(280.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	09	5	1		BELANJA OPERASI	72.646.400	72.366.400	(280.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	72.646.400	72.366.400	(280.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	10				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	98.685.200	136.605.100	37.919.900	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	10	5	1		BELANJA OPERASI	98.685.200	136.605.100	37.919.900	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	98.685.200	136.605.100	37.919.900	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	12				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	113.151.600	105.781.100	(7.370.500)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	12	5	1		BELANJA OPERASI	113.151.600	105.781.100	(7.370.500)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	12	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	113.151.600	105.781.100	(7.370.500)	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	13				Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	51.035.900	87.835.900	36.800.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	13	5	1		BELANJA OPERASI	51.035.900	87.835.900	36.800.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	13	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	51.035.900	87.835.900	36.800.000	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.640.094.388**	**5.624.995.680**	**(15.098.708)**	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**334.933.200**	**357.183.100**	**22.249.900**	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	329.933.200	352.183.100	22.249.900	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	329.933.200	352.183.100	22.249.900	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	329.933.200	352.183.100	22.249.900	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.898.047.832**	**3.529.170.218**	**(368.877.614)**	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.413.467.032	3.044.589.418	(368.877.614)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.413.467.032	3.044.589.418	(368.877.614)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	3.413.467.032	3.044.589.418	(368.877.614)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	425.497.200	425.497.200	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	425.497.200	425.497.200	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	425.497.200	425.497.200	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	04				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	54.083.600	54.083.600	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	54.083.600	54.083.600	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	54.083.600	54.083.600	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**403.753.900**	**565.312.700**	**161.558.800**	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.997.200	31.911.700	19.914.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	11.997.200	31.911.700	19.914.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.997.200	31.911.700	19.914.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000	80.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	80.000.000	80.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	80.000.000	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.996.000	42.864.300	17.868.300	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	24.996.000	42.864.300	17.868.300	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.996.000	42.864.300	17.868.300	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53.206.900	68.502.900	15.296.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	53.206.900	68.502.900	15.296.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	53.206.900	68.502.900	15.296.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	33.586.800	33.586.800	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	33.586.800	33.586.800	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	33.586.800	33.586.800	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.967.000	308.447.000	108.480.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	199.967.000	308.447.000	108.480.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	199.967.000	308.447.000	108.480.000	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**216.118.496**	**309.112.910**	**92.994.414**	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	216.118.496	309.112.910	92.994.414	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	5	1		BELANJA OPERASI	0	65.765.600	65.765.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	5	1	01	Belanja Pegawai	0	11.340.000	11.340.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	54.425.600	54.425.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	216.118.496	243.347.310	27.228.814	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	216.118.496	243.347.310	27.228.814	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**412.928.660**	**424.251.872**	**11.323.212**	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.904.300	44.126.700	(777.600)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	44.904.300	44.126.700	(777.600)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	44.904.300	44.126.700	(777.600)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	363.024.360	375.125.172	12.100.812	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	363.024.360	375.125.172	12.100.812	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	363.024.360	375.125.172	12.100.812	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**374.312.300**	**439.964.880**	**65.652.580**	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.134.100	160.077.300	51.943.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	108.134.100	160.077.300	51.943.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	108.134.100	160.077.300	51.943.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	246.178.200	181.151.196	(65.027.004)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	246.178.200	159.267.516	(86.910.684)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	246.178.200	159.267.516	(86.910.684)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	2		BELANJA MODAL	0	21.883.680	21.883.680	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	21.883.680	21.883.680	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	98.736.384	78.736.384	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	20.000.000	98.736.384	78.736.384	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	98.736.384	78.736.384	
									Jumlah Belanja	**266.549.590.105**	**285.426.224.555**	**18.876.634.450**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(266.549.590.105)**	**(285.426.224.555)**	**(18.876.634.450)**	
0	**00**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**	**1**		**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**67.330.479.529**	**75.081.575.954**	**7.751.096.425**	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6	1	01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	67.330.479.529	63.081.575.954	(4.248.903.575)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6	1	06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	12.000.000.000	12.000.000.000	
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**67.330.479.529**	**75.081.575.954**	**7.751.096.425**	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**	**2**		**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**21.906.000.000**	**72.409.349.558**	**50.503.349.558**	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6	2	02	Penyertaan Modal Daerah	6.500.000.000	3.000.000.000	(3.500.000.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6	2	03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	15.406.000.000	69.409.349.558	54.003.349.558	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**21.906.000.000**	**72.409.349.558**	**50.503.349.558**	

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.03.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**				
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.03.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**65.757.762.370**	**82.781.237.202**	**17.023.474.832**	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	1	01	Pajak Daerah	30.209.843.179	32.259.843.179	2.050.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	1	03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.150.000.000	10.000.000.000	(150.000.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	25.397.919.191	40.521.394.023	15.123.474.832	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.03.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**2**		**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.219.725.532.100**	**1.233.152.254.160**	**13.426.722.060**	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	2	01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.168.844.693.000	1.175.171.806.213	6.327.113.213	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	2	02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	50.880.839.100	57.980.447.947	7.099.608.847	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.03.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**3**		**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**30.618.942.682**	**16.745.942.682**	**(13.873.000.000)**	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	3	01	Pendapatan Hibah	16.745.942.682	16.745.942.682	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	3	03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.873.000.000	0	(13.873.000.000)	
									Jumlah Pendapatan	**1.316.102.237.152**	**1.332.679.434.044**	**16.577.196.892**	
0	**00**	**5.02.0.00.0.00.03.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.03.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**KEUANGAN**	**6.368.932.356**	**6.077.013.067**	**(291.919.289)**	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.03.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**1.338.117.100**	**1.021.134.100**	**(316.983.000)**	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.03.0000**	**04**	**2.01**	**00**				**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**1.338.117.100**	**1.021.134.100**	**(316.983.000)**	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	01				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	51.500.000	61.460.000	9.960.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	51.500.000	61.460.000	9.960.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	51.500.000	61.460.000	9.960.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	02				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	106.280.000	115.045.600	8.765.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	106.280.000	115.045.600	8.765.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	106.280.000	115.045.600	8.765.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	03				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	43.775.000	28.775.000	(15.000.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	43.775.000	28.775.000	(15.000.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	43.775.000	28.775.000	(15.000.000)	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	04				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	91.999.900	77.160.600	(14.839.300)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	91.999.900	77.160.600	(14.839.300)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	91.999.900	77.160.600	(14.839.300)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	05				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	108.000.000	99.999.800	(8.000.200)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	108.000.000	99.999.800	(8.000.200)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	108.000.000	99.999.800	(8.000.200)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	06				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	19.999.800	19.599.800	(400.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	19.999.800	19.599.800	(400.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.800	19.599.800	(400.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	07				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	80.000.000	69.990.000	(10.010.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	80.000.000	69.990.000	(10.010.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	69.990.000	(10.010.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	08				Penetapan Wajib Pajak Daerah	210.000.000	199.999.900	(10.000.100)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	210.000.000	199.999.900	(10.000.100)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000	199.999.900	(10.000.100)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	09				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	53.000.200	47.071.200	(5.929.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	09	5	1		BELANJA OPERASI	53.000.200	47.071.200	(5.929.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	53.000.200	47.071.200	(5.929.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	10				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	49.619.300	46.046.400	(3.572.900)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	10	5	1		BELANJA OPERASI	49.619.300	46.046.400	(3.572.900)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	49.619.300	46.046.400	(3.572.900)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	11				Penagihan Pajak Daerah	123.000.100	104.975.100	(18.025.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	11	5	1		BELANJA OPERASI	123.000.100	104.975.100	(18.025.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	123.000.100	104.975.100	(18.025.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	12				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	35.000.000	0	(35.000.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	12	5	1		BELANJA OPERASI	35.000.000	0	(35.000.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	12	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	0	(35.000.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	13				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	298.148.400	74.182.800	(223.965.600)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	13	5	1		BELANJA OPERASI	298.148.400	74.182.800	(223.965.600)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	13	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	298.148.400	74.182.800	(223.965.600)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	14				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	67.794.400	76.827.900	9.033.500	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	14	5	1		BELANJA OPERASI	67.794.400	76.827.900	9.033.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	14	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	67.794.400	76.827.900	9.033.500	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.03.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.030.815.256**	**5.055.878.967**	**25.063.711**	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.03.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**53.484.000**	**40.565.300**	**(12.918.700)**	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.984.000	0	(4.984.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.984.000	0	(4.984.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.984.000	0	(4.984.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	0	(2.000.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	2.000.000	0	(2.000.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	0	(2.000.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000	2.500.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	2.500.000	2.500.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	2.500.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.000.000	38.065.300	(5.934.700)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	44.000.000	38.065.300	(5.934.700)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000	38.065.300	(5.934.700)	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.03.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.179.095.920**	**4.241.767.567**	**62.671.647**	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.037.174.320	4.104.956.367	67.782.047	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.037.174.320	4.104.956.367	67.782.047	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	4.037.174.320	4.104.956.367	67.782.047	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	141.921.600	136.811.200	(5.110.400)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	141.921.600	136.811.200	(5.110.400)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	141.921.600	136.811.200	(5.110.400)	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.03.0000**	**01**	**2.04**	**00**				**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**30.475.000**	**16.134.900**	**(14.340.100)**	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.04	06				Penetapan Wajib Retribusi Daerah	30.475.000	16.134.900	(14.340.100)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.04	06	5	1		BELANJA OPERASI	30.475.000	16.134.900	(14.340.100)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.04	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.475.000	16.134.900	(14.340.100)	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.03.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**188.140.100**	**221.656.900**	**33.516.800**	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.336.000	21.313.100	(22.900)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	21.336.000	21.313.100	(22.900)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.336.000	21.313.100	(22.900)	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.931.600	53.193.700	(4.737.900)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	57.931.600	53.193.700	(4.737.900)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	57.931.600	53.193.700	(4.737.900)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.000.000	11.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	11.000.000	11.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000	11.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.560.500	18.237.100	(13.323.400)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	31.560.500	18.237.100	(13.323.400)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	31.560.500	18.237.100	(13.323.400)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.700.000	0	(6.700.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	6.700.000	0	(6.700.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000	0	(6.700.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.612.000	117.913.000	58.301.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	59.612.000	117.913.000	58.301.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	59.612.000	117.913.000	58.301.000	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.03.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**121.287.100**	**94.532.400**	**(26.754.700)**	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.394.200	69.803.500	(7.590.700)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	06	5	1		BELANJA OPERASI	3.016.000	0	(3.016.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.016.000	0	(3.016.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	74.378.200	69.803.500	(4.574.700)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.378.200	69.803.500	(4.574.700)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.892.900	24.728.900	(19.164.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	10	5	1		BELANJA OPERASI	24.792.900	22.128.900	(2.664.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.792.900	22.128.900	(2.664.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	10	5	2		BELANJA MODAL	19.100.000	2.600.000	(16.500.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.100.000	2.600.000	(16.500.000)	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.03.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**362.322.736**	**359.500.000**	**(2.822.736)**	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000	5.500.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.500.000	5.500.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000	5.500.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	18.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	18.000.000	18.000.000	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000	18.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	338.822.736	336.000.000	(2.822.736)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	338.822.736	336.000.000	(2.822.736)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	338.822.736	336.000.000	(2.822.736)	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.03.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**96.010.400**	**81.721.900**	**(14.288.500)**	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.495.100	38.550.700	6.055.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	32.495.100	38.550.700	6.055.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	32.495.100	38.550.700	6.055.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.447.900	0	(9.447.900)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	9.447.900	0	(9.447.900)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.447.900	0	(9.447.900)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.067.400	43.171.200	(10.896.200)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	50.467.400	43.171.200	(7.296.200)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.467.400	43.171.200	(7.296.200)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	10	5	2		BELANJA MODAL	3.600.000	0	(3.600.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.600.000	0	(3.600.000)	
									Jumlah Belanja	**6.368.932.356**	**6.077.013.067**	**(291.919.289)**	
									Total Surplus/(Defisit)	**1.309.733.304.796**	**1.326.602.420.977**	**16.869.116.181**	
0	**00**	**5.02.0.00.0.00.03.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	**0**	**0**	
0	**00**	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**KEPEGAWAIAN**	**5.512.800.445**	**4.476.796.238**	**(1.036.004.207)**	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**2.400.482.800**	**1.696.188.300**	**(704.294.500)**	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**401.011.400**	**444.608.900**	**43.597.500**	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	02				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	24.999.900	14.999.700	(10.000.200)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	24.999.900	14.999.700	(10.000.200)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.999.900	14.999.700	(10.000.200)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	03				Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	150.000.000	351.579.700	201.579.700	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	150.000.000	351.579.700	201.579.700	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	351.579.700	201.579.700	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	06				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	34.999.800	34.999.800	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	34.999.800	34.999.800	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	34.999.800	34.999.800	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	08				Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	118.000.000	0	(118.000.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	118.000.000	0	(118.000.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	1	05	Belanja Hibah	118.000.000	0	(118.000.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	10				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	20.089.900	20.089.900	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	10	5	1		BELANJA OPERASI	20.089.900	20.089.900	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.089.900	20.089.900	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	11				Pengelolaan Data Kepegawaian	52.921.800	22.939.800	(29.982.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	11	5	1		BELANJA OPERASI	52.921.800	22.939.800	(29.982.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	52.921.800	22.939.800	(29.982.000)	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Mutasi dan Promosi ASN**	**107.244.900**	**72.224.900**	**(35.020.000)**	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	01				Pengelolaan Mutasi ASN	25.000.000	25.000.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	25.000.000	25.000.000	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	25.000.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	02				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	57.244.900	47.224.900	(10.020.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	57.244.900	47.224.900	(10.020.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	57.244.900	47.224.900	(10.020.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	03				Pengelolaan Promosi ASN	25.000.000	0	(25.000.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	25.000.000	0	(25.000.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	0	(25.000.000)	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**02**	**2.03**	**00**				**Pengembangan Kompetensi ASN**	**1.733.736.700**	**1.020.864.700**	**(712.872.000)**	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	01				Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	1.005.148.500	646.468.900	(358.679.600)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.005.148.500	646.468.900	(358.679.600)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.005.148.500	646.468.900	(358.679.600)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	04				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	430.000.000	200.000.000	(230.000.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	04	5	1		BELANJA OPERASI	430.000.000	200.000.000	(230.000.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	430.000.000	200.000.000	(230.000.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	06				Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	298.588.200	174.395.800	(124.192.400)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	06	5	1		BELANJA OPERASI	298.588.200	174.395.800	(124.192.400)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	298.588.200	174.395.800	(124.192.400)	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**02**	**2.04**	**00**				**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**158.489.800**	**158.489.800**	**0**	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	02				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	99.999.900	99.999.900	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	99.999.900	99.999.900	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.900	99.999.900	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	05				Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	18.240.100	18.240.100	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	05	5	1		BELANJA OPERASI	18.240.100	18.240.100	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.240.100	18.240.100	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	08				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	40.249.800	40.249.800	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	08	5	1		BELANJA OPERASI	40.249.800	40.249.800	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	40.249.800	40.249.800	0	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.112.317.645**	**2.780.607.938**	**(331.709.707)**	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**18.590.800**	**18.590.800**	**0**	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.145.400	5.145.400	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.145.400	5.145.400	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.145.400	5.145.400	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.445.400	8.445.400	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	8.445.400	8.445.400	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.445.400	8.445.400	0	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.565.420.745**	**2.300.444.239**	**(264.976.506)**	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.515.665.545	2.250.689.039	(264.976.506)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.515.665.545	2.250.689.039	(264.976.506)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.515.665.545	2.250.689.039	(264.976.506)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.755.200	44.755.200	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	44.755.200	44.755.200	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	44.755.200	44.755.200	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**01**	**2.03**	**00**				**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**3.499.900**	**3.499.900**	**0**	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.03	06				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.499.900	3.499.900	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.03	06	5	1		BELANJA OPERASI	3.499.900	3.499.900	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.03	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.499.900	3.499.900	0	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**275.541.400**	**254.442.100**	**(21.099.300)**	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.541.500	7.541.500	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	7.541.500	7.541.500	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.541.500	7.541.500	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	40.001.500	(9.998.500)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	50.000.000	40.001.500	(9.998.500)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	40.001.500	(9.998.500)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.999.000	9.999.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	9.999.000	9.999.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.000	9.999.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.000.000	26.036.200	(963.800)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	27.000.000	26.036.200	(963.800)	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000	26.036.200	(963.800)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.997.400	15.997.400	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	15.997.400	15.997.400	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.997.400	15.997.400	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.997.500	4.997.500	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1		BELANJA OPERASI	4.997.500	4.997.500	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.997.500	4.997.500	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.006.000	149.869.000	(10.137.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	160.006.000	149.869.000	(10.137.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	160.006.000	149.869.000	(10.137.000)	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**26.000.000**	**0**	**(26.000.000)**	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.07	01				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.000.000	0	(26.000.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.07	01	5	2		BELANJA MODAL	26.000.000	0	(26.000.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.07	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.000.000	0	(26.000.000)	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**78.039.600**	**85.039.599**	**6.999.999**	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	500.000	500.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	500.000	500.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.042.800	30.042.799	6.999.999	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	23.042.800	30.042.799	6.999.999	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	23.042.800	30.042.799	6.999.999	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	54.496.800	54.496.800	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	54.496.800	54.496.800	0	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**145.225.200**	**118.591.300**	**(26.633.900)**	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.423.400	63.417.600	(10.005.800)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	73.423.400	63.417.600	(10.005.800)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	73.423.400	63.417.600	(10.005.800)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	05				Pemeliharaan Mebel	2.550.000	2.550.000	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	05	5	1		BELANJA OPERASI	2.550.000	2.550.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000	2.550.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.077.000	12.043.300	(5.033.700)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	17.077.000	12.043.300	(5.033.700)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.077.000	12.043.300	(5.033.700)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	52.174.800	40.580.400	(11.594.400)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2		BELANJA MODAL	52.174.800	40.580.400	(11.594.400)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.174.800	40.580.400	(11.594.400)	
5	**04**	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**700.000.000**	**611.902.000**	**(88.098.000)**	
5	**04**	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**700.000.000**	**611.902.000**	**(88.098.000)**	
5	**04**	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**700.000.000**	**611.902.000**	**(88.098.000)**	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	07				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	700.000.000	611.902.000	(88.098.000)	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	700.000.000	611.902.000	(88.098.000)	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000	611.902.000	(88.098.000)	
									Jumlah Belanja	**6.212.800.445**	**5.088.698.238**	**(1.124.102.207)**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(6.212.800.445)**	**(5.088.698.238)**	**1.124.102.207**	
0	**00**	**5.03.5.04.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	



Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
										Jumlah Pendapatan	**0**	**0**	**0**	
0	**00**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**				**BELANJA**				
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**INSPEKTORAT DAERAH**	**13.105.590.657**	**11.363.406.919**	**(1.742.183.738)**	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**2.680.000.000**	**1.891.130.000**	**(788.870.000)**	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**					**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**1.680.000.000**	**471.130.000**	**(1.208.870.000)**	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01					Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	300.000.000	85.280.000	(214.720.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	300.000.000	85.280.000	(214.720.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	85.280.000	(214.720.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02					Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	300.000.000	5.220.000	(294.780.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	300.000.000	5.220.000	(294.780.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	5.220.000	(294.780.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03					Reviu Laporan Kinerja	15.000.000	0	(15.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	15.000.000	0	(15.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	0	(15.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04					Reviu Laporan Keuangan	15.000.000	0	(15.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	15.000.000	0	(15.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	0	(15.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05					Pengawasan Desa	500.000.000	142.200.000	(357.800.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1			BELANJA OPERASI	500.000.000	142.200.000	(357.800.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	500.000.000	142.200.000	(357.800.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06					Kerja Sama Pengawasan Internal	50.000.000	0	(50.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	1			BELANJA OPERASI	50.000.000	0	(50.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	0	(50.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07					Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	500.000.000	238.430.000	(261.570.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	1			BELANJA OPERASI	500.000.000	238.430.000	(261.570.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	500.000.000	238.430.000	(261.570.000)	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**1.000.000.000**	**1.420.000.000**	**420.000.000**	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	100.000.000	0	(100.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	100.000.000	0	(100.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	0	(100.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02				Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	900.000.000	1.420.000.000	520.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	900.000.000	1.420.000.000	520.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	900.000.000	1.420.000.000	520.000.000	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**800.000.000**	**380.000.000**	**(420.000.000)**	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**200.000.000**	**0**	**(200.000.000)**	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	100.000.000	0	(100.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	100.000.000	0	(100.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	0	(100.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	100.000.000	0	(100.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	100.000.000	0	(100.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	0	(100.000.000)	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**2.02**	**00**				**Pendampingan dan Asistensi**	**600.000.000**	**380.000.000**	**(220.000.000)**	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000	0	(100.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	100.000.000	0	(100.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	0	(100.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	100.000.000	50.000.000	(50.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	100.000.000	50.000.000	(50.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	50.000.000	(50.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	100.000.000	50.000.000	(50.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	100.000.000	50.000.000	(50.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	50.000.000	(50.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	04				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	300.000.000	280.000.000	(20.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	300.000.000	280.000.000	(20.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	280.000.000	(20.000.000)	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**9.625.590.657**	**9.092.276.919**	**(533.313.738)**	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**14.000.000**	**0**	**(14.000.000)**	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000	0	(8.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	8.000.000	0	(8.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000	0	(8.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	0	(4.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	4.000.000	0	(4.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	0	(4.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	0	(2.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	2.000.000	0	(2.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	0	(2.000.000)	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.620.826.397**	**5.495.024.459**	**(125.801.938)**	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.569.342.797	5.446.540.859	(122.801.938)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.569.342.797	5.446.540.859	(122.801.938)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	5.569.342.797	5.446.540.859	(122.801.938)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48.483.600	48.483.600	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	48.483.600	48.483.600	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	48.483.600	48.483.600	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	0	(3.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	3.000.000	0	(3.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	0	(3.000.000)	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.05**	**00**				**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**500.000.000**	**460.000.000**	**(40.000.000)**	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	500.000.000	460.000.000	(40.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09	5	1		BELANJA OPERASI	500.000.000	460.000.000	(40.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000	460.000.000	(40.000.000)	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**864.004.700**	**1.018.691.700**	**154.687.000**	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	10.005.000	(4.995.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	15.000.000	10.005.000	(4.995.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	10.005.000	(4.995.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	125.800.000	25.800.000	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	100.000.000	125.800.000	25.800.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	125.800.000	25.800.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000	12.500.000	(12.500.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	25.000.000	12.500.000	(12.500.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	12.500.000	(12.500.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	56.896.700	58.452.700	1.556.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	56.896.700	58.452.700	1.556.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	56.896.700	58.452.700	1.556.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.108.000	17.108.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	17.108.000	17.108.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.108.000	17.108.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	650.000.000	794.826.000	144.826.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	650.000.000	794.826.000	144.826.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	650.000.000	794.826.000	144.826.000	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.646.034.800**	**1.373.210.000**	**(272.824.800)**	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.646.034.800	1.373.210.000	(272.824.800)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1		BELANJA OPERASI	109.959.800	8.210.000	(101.749.800)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1	01	Belanja Pegawai	14.990.000	8.210.000	(6.780.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	94.969.800	0	(94.969.800)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	1.536.075.000	1.365.000.000	(171.075.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.536.075.000	1.365.000.000	(171.075.000)	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**133.996.800**	**133.696.800**	**(300.000)**	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	6.000.000	6.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	6.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.500.000	73.200.000	(300.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	73.500.000	73.200.000	(300.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	73.500.000	73.200.000	(300.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	54.496.800	54.496.800	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	54.496.800	54.496.800	0	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**846.727.960**	**611.653.960**	**(235.074.000)**	

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	138.807.620	138.807.620	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	138.807.620	138.807.620	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	138.807.620	138.807.620	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	485.074.340	246.690.340	(238.384.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1			BELANJA OPERASI	485.074.340	246.690.340	(238.384.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	485.074.340	246.690.340	(238.384.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	198.000.000	211.870.000	13.870.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	198.000.000	13.870.000	(184.130.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	01		Belanja Pegawai	0	1.890.000	1.890.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	198.000.000	11.980.000	(186.020.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2			BELANJA MODAL	0	198.000.000	198.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	198.000.000	198.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.846.000	14.286.000	(10.560.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1			BELANJA OPERASI	24.846.000	14.286.000	(10.560.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	24.846.000	14.286.000	(10.560.000)	
Jumlah Belanja											**13.105.590.657**	**11.363.406.919**	**(1.742.183.738)**	
Total Surplus/(Defisit)											**(13.105.590.657)**	**(11.363.406.919)**	**1.742.183.738**	
0	**00**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**				**PEMBIAYAAN**				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											**0**	**0**	**0**	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											**0**	**0**	**0**	

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 KANTOR KECAMATAN TARUTUNG

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**				**PENDAPATAN DAERAH**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**			**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**96.605.400**	**300.000.000**	**203.394.600**	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	96.605.400	300.000.000	203.394.600	
										Jumlah Pendapatan	**96.605.400**	**300.000.000**	**203.394.600**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**				**BELANJA**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**KECAMATAN**	**7.290.476.762**	**7.380.353.759**	**89.876.997**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**10.000.000**	**10.000.000**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**2.01**	**00**					**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**10.000.000**	**10.000.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.000.000	10.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	10.000.000	10.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	10.000.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**1.413.991.500**	**1.410.582.716**	**(3.408.784)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**2.01**	**00**					**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**22.701.900**	**15.401.900**	**(7.300.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22.701.900	15.401.900	(7.300.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	22.701.900	15.401.900	(7.300.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	22.701.900	15.401.900	(7.300.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**2.02**	**00**					**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**1.391.289.600**	**1.395.180.816**	**3.891.216**	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	34.998.300	33.938.300	(1.060.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	34.998.300	33.938.300	(1.060.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	34.998.300	33.938.300	(1.060.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	651.356.700	649.186.716	(2.169.984)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	26.821.500	71.362.716	44.541.216	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1	01		Belanja Pegawai	11.400.000	10.800.000	(600.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	15.421.500	60.562.716	45.141.216	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	2		BELANJA MODAL	624.535.200	577.824.000	(46.711.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	187.874.000	53.158.100	(134.715.900)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	436.661.200	524.665.900	88.004.700	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	704.934.600	712.055.800	7.121.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	704.587.800	712.055.800	7.468.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	75.072.000	80.140.000	5.068.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	629.515.800	631.915.800	2.400.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	2		BELANJA MODAL	346.800	0	(346.800)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	346.800	0	(346.800)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**26.599.800**	**26.599.800**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**26.599.800**	**26.599.800**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4.999.800	4.999.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	4.999.800	4.999.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.800	4.999.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	08				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	21.600.000	21.600.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	21.600.000	21.600.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000	21.600.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**4.999.600**	**4.999.600**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**06**	**2.01**	**00**				**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**4.999.600**	**4.999.600**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.999.600	4.999.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	4.999.600	4.999.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.600	4.999.600	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.834.885.862**	**5.928.171.643**	**93.285.781**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**19.114.400**	**26.414.400**	**7.300.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.374.400	2.374.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	2.374.400	2.374.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.374.400	2.374.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.740.000	24.040.000	7.300.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	16.740.000	24.040.000	7.300.000	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.740.000	24.040.000	7.300.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.434.443.542**	**5.520.429.423**	**85.985.881**	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.390.483.342	5.476.469.223	85.985.881	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.390.483.342	5.476.469.223	85.985.881	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	5.390.483.342	5.476.469.223	85.985.881	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.775.600	41.775.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	41.775.600	41.775.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	41.775.600	41.775.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.184.600	2.184.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	2.184.600	2.184.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.184.600	2.184.600	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**121.059.200**	**126.059.100**	**4.999.900**	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.605.000	8.605.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	8.605.000	8.605.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.605.000	8.605.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.389.500	39.389.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	39.389.500	39.389.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	39.389.500	39.389.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.724.600	6.724.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	6.724.600	6.724.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.724.600	6.724.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.450.100	27.125.000	10.674.900	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	16.450.100	27.125.000	10.674.900	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.450.100	27.125.000	10.674.900	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.890.000	44.215.000	(5.675.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	49.890.000	44.215.000	(5.675.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	49.890.000	44.215.000	(5.675.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**93.850.000**	**88.850.000**	**(5.000.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05				Pengadaan Mebel	63.350.000	63.350.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	1		BELANJA OPERASI	11.600.000	11.600.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000	11.600.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	2		BELANJA MODAL	51.750.000	51.750.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.750.000	51.750.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.500.000	25.500.000	(5.000.000)	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	30.500.000	25.500.000	(5.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.500.000	25.500.000	(5.000.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**109.434.700**	**109.434.700**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	860.000	860.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	860.000	860.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	860.000	860.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.912.300	35.912.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	35.912.300	35.912.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	35.912.300	35.912.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.662.400	72.662.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	72.662.400	72.662.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	72.662.400	72.662.400	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**56.984.020**	**56.984.020**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.987.720	36.987.720	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	36.987.720	36.987.720	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	36.987.720	36.987.720	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.996.300	19.996.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	19.996.300	19.996.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.996.300	19.996.300	0	
									Jumlah Belanja	**7.290.476.762**	**7.380.353.759**	**89.876.997**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(7.193.871.362)**	**(7.080.353.759)**	**113.517.603**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	**0**	**0**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**KECAMATAN**	**2.038.652.010**	**1.921.843.027**	**(116.808.983)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**49.970.700**	**8.970.700**	**(41.000.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**49.970.700**	**8.970.700**	**(41.000.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	23.950.700	4.880.700	(19.070.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	23.950.700	4.880.700	(19.070.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	23.950.700	4.880.700	(19.070.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	26.020.000	4.090.000	(21.930.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	26.020.000	4.090.000	(21.930.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	26.020.000	4.090.000	(21.930.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**23.836.700**	**24.166.700**	**330.000**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**23.836.700**	**24.166.700**	**330.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23.836.700	24.166.700	330.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	23.836.700	24.166.700	330.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	23.836.700	24.166.700	330.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**13.409.700**	**5.464.700**	**(7.945.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**04**	**7.03**	**00**				**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**13.409.700**	**5.464.700**	**(7.945.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	04	7.03	01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13.409.700	5.464.700	(7.945.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	04	7.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	13.409.700	5.464.700	(7.945.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	04	7.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.409.700	5.464.700	(7.945.000)	

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**05**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**25.000.000**	**25.000.000**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**05**	**2.01**	**00**					**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**25.000.000**	**25.000.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	08					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	25.000.000	25.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	08	5	1			BELANJA OPERASI	25.000.000	25.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	08	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	25.000.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**06**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**55.930.900**	**24.950.900**	**(30.980.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**06**	**2.01**	**00**					**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**55.930.900**	**24.950.900**	**(30.980.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	02					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.091.800	3.091.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	3.091.800	3.091.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.091.800	3.091.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	06					Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4.855.000	6.210.000	1.355.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	06	5	1			BELANJA OPERASI	4.855.000	6.210.000	1.355.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.855.000	6.210.000	1.355.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	11					Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.000.000	2.650.000	(7.350.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	11	5	1			BELANJA OPERASI	10.000.000	2.650.000	(7.350.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	11	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	2.650.000	(7.350.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	16					Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	37.984.100	12.999.100	(24.985.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	16	5	1			BELANJA OPERASI	37.984.100	12.999.100	(24.985.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	16	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	37.984.100	12.999.100	(24.985.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.870.504.010**	**1.833.290.027**	**(37.213.983)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**2.01**	**00**					**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**30.045.800**	**30.045.800**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	02					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.647.500	2.647.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	2.647.500	2.647.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.647.500	2.647.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	04					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.738.300	2.738.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	2.738.300	2.738.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.738.300	2.738.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.160.000	2.160.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	06	5	1			BELANJA OPERASI	2.160.000	2.160.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.160.000	2.160.000	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.500.000	22.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	22.500.000	22.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000	22.500.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.595.296.710**	**1.566.260.427**	**(29.036.283)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.556.809.110	1.525.001.627	(31.807.483)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.556.809.110	1.525.001.627	(31.807.483)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	1.556.809.110	1.525.001.627	(31.807.483)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.087.600	38.858.800	2.771.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	36.087.600	38.858.800	2.771.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	36.087.600	38.858.800	2.771.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.400.000	2.400.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	2.400.000	2.400.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000	2.400.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**85.607.700**	**85.705.200**	**97.500**	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.200.000	1.200.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.200.000	1.200.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000	1.200.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.423.700	30.423.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	30.423.700	30.423.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.423.700	30.423.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.134.000	4.134.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	4.134.000	4.134.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.134.000	4.134.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.650.000	7.957.500	(8.692.500)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	16.650.000	7.957.500	(8.692.500)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.650.000	7.957.500	(8.692.500)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.200.000	41.990.000	8.790.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	33.200.000	41.990.000	8.790.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	33.200.000	41.990.000	8.790.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**28.030.000**	**28.030.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.030.000	28.030.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	28.030.000	28.030.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.030.000	28.030.000	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**85.496.800**	**74.590.400**	**(10.906.400)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.000.000	1.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000	1.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	19.093.600	(10.906.400)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	30.000.000	19.093.600	(10.906.400)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	19.093.600	(10.906.400)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	54.496.800	54.496.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	54.496.800	54.496.800	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**46.027.000**	**48.658.200**	**2.631.200**	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.063.800	40.695.000	2.631.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	38.063.800	40.695.000	2.631.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	38.063.800	40.695.000	2.631.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.201.200	1.201.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	1.201.200	1.201.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.201.200	1.201.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.762.000	6.762.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	6.762.000	6.762.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.762.000	6.762.000	0	
									Jumlah Belanja	**2.038.652.010**	**1.921.843.027**	**(116.808.983)**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(2.038.652.010)**	**(1.921.843.027)**	**116.808.983**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	**0**	**0**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**KECAMATAN**	**1.627.197.574**	**1.456.373.473**	**(170.824.101)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**33.512.700**	**33.512.700**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**33.512.700**	**33.512.700**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	33.512.700	33.512.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	33.512.700	33.512.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	33.512.700	33.512.700	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**19.999.900**	**19.999.900**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**19.999.900**	**19.999.900**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.999.900	19.999.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	19.999.900	19.999.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.900	19.999.900	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**20.000.000**	**20.000.000**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**04**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**20.000.000**	**20.000.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.000.000	20.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	20.000.000	20.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	20.000.000	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**21.600.000**	**21.600.000**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**21.600.000**	**21.600.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	08				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	21.600.000	21.600.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	21.600.000	21.600.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000	21.600.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**8.750.000**	**8.750.000**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**06**	**2.01**	**00**				**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**8.750.000**	**8.750.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	06	2.01	05				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.750.000	8.750.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	06	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	8.750.000	8.750.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	06	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.750.000	8.750.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.523.334.974**	**1.352.510.873**	**(170.824.101)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**71.570.000**	**71.570.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.820.000	22.820.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	22.820.000	22.820.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.820.000	22.820.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000	2.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	2.500.000	2.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	2.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.250.000	46.250.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	46.250.000	46.250.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	46.250.000	46.250.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.286.723.984**	**1.115.899.883**	**(170.824.101)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.255.761.684	1.084.937.583	(170.824.101)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.255.761.684	1.084.937.583	(170.824.101)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	1.255.761.684	1.084.937.583	(170.824.101)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.500.400	27.500.400	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	27.500.400	27.500.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	27.500.400	27.500.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.461.900	3.461.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	3.461.900	3.461.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.461.900	3.461.900	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**49.667.000**	**49.667.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.600	4.999.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.999.600	4.999.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.600	4.999.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.301.800	18.301.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	18.301.800	18.301.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.301.800	18.301.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.356.200	19.356.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	19.356.200	19.356.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.356.200	19.356.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.009.400	7.009.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	7.009.400	7.009.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.009.400	7.009.400	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**9.882.000**	**9.882.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	05				Pengadaan Mebel	9.882.000	9.882.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	05	5	2		BELANJA MODAL	9.882.000	9.882.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	05	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.882.000	9.882.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**78.495.900**	**78.495.900**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000	700.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	700.000	700.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	700.000	700.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.299.100	23.299.100	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	23.299.100	23.299.100	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	23.299.100	23.299.100	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	54.496.800	54.496.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	54.496.800	54.496.800	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**26.996.090**	**26.996.090**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.996.090	26.996.090	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	26.996.090	26.996.090	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	26.996.090	26.996.090	0	
									Jumlah Belanja	**1.627.197.574**	**1.456.373.473**	**(170.824.101)**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(1.627.197.574)**	**(1.456.373.473)**	**170.824.101**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.03.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	**0**	**0**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**KECAMATAN**	**2.616.375.972**	**2.386.615.901**	**(229.760.071)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**60.000.000**	**60.000.000**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**60.000.000**	**60.000.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.01	01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	60.000.000	60.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	60.000.000	60.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	60.000.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**199.999.820**	**199.999.820**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**03**	**2.02**	**00**				**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**199.999.820**	**199.999.820**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	90.402.820	90.402.800	(20)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	90.402.820	10.779.500	(79.623.320)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	17.160.000	1.890.000	(15.270.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	73.242.820	8.889.500	(64.353.320)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	02	5	2		BELANJA MODAL	0	79.623.300	79.623.300	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	02	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	79.623.300	79.623.300	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	03				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	109.597.000	109.597.020	20	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	109.597.000	109.597.020	20	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	0	10.548.000	10.548.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	109.597.000	99.049.020	(10.547.980)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.356.376.152**	**2.126.616.081**	**(229.760.071)**	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**6.745.000**	**6.745.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.097.400	3.097.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.097.400	3.097.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.097.400	3.097.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.674.700	1.674.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	1.674.700	1.674.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.674.700	1.674.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.972.900	1.972.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	1.972.900	1.972.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.972.900	1.972.900	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.075.018.032**	**1.845.257.961**	**(229.760.071)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.031.056.832	1.801.296.761	(229.760.071)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.031.056.832	1.801.296.761	(229.760.071)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.031.056.832	1.801.296.761	(229.760.071)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.201.200	41.201.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	41.201.200	41.201.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	33.379.200	33.379.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.822.000	7.822.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.176.000	1.176.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	1.176.000	1.176.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.176.000	1.176.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.584.000	1.584.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	1.584.000	1.584.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.584.000	1.584.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**01**	**2.03**	**00**				**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**2.270.800**	**2.270.800**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.03	06				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.270.800	2.270.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.03	06	5	1		BELANJA OPERASI	2.270.800	2.270.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.03	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.270.800	2.270.800	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**123.055.600**	**123.055.600**	**0**	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.817.300	4.817.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.817.300	4.817.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.817.300	4.817.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.633.600	17.633.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	17.633.600	17.633.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.633.600	17.633.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.325.700	8.325.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	7.950.700	7.950.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.950.700	7.950.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	03	5	2		BELANJA MODAL	375.000	375.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	375.000	375.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	30.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	30.000.000	30.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	30.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.171.000	6.171.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	6.171.000	6.171.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.171.000	6.171.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.498.000	3.498.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	3.498.000	3.498.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.498.000	3.498.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.610.000	52.610.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	52.610.000	52.610.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	52.610.000	52.610.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12.792.600**	**12.792.600**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.792.600	12.792.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	12.792.600	12.792.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.792.600	12.792.600	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**82.193.400**	**82.193.400**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.000.000	1.000.000	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000	1.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.696.600	26.696.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	26.696.600	26.696.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	26.696.600	26.696.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	54.496.800	54.496.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	54.496.800	54.496.800	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**54.300.720**	**54.300.720**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.302.420	32.302.420	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	32.302.420	32.302.420	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	32.302.420	32.302.420	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.998.300	21.998.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	21.998.300	21.998.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.998.300	21.998.300	0	
									Jumlah Belanja	**2.616.375.972**	**2.386.615.901**	**(229.760.071)**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(2.616.375.972)**	**(2.386.615.901)**	**229.760.071**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.04.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
										Jumlah Pendapatan	**0**	**0**	**0**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**				**BELANJA**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**KECAMATAN**	**3.113.783.102**	**2.925.124.422**	**(188.658.680)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**02**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**28.463.500**	**28.463.500**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**02**	**2.01**	**00**					**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**28.463.500**	**28.463.500**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	01					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	28.463.500	28.463.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	28.463.500	28.463.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	28.463.500	28.463.500	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**03**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**221.542.400**	**221.542.400**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**03**	**2.01**	**00**					**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**21.542.400**	**21.542.400**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.01	01					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21.542.400	21.542.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	21.542.400	21.542.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	21.542.400	21.542.400	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**03**	**2.02**	**00**					**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**200.000.000**	**200.000.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	02					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	149.841.600	149.136.400	(705.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	02	5	2			BELANJA MODAL	149.841.600	149.136.400	(705.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	02	5	2	04		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	149.841.600	149.136.400	(705.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.158.400	50.863.600	705.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	03	5	1			BELANJA OPERASI	50.158.400	50.863.600	705.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	03	5	1	01		Belanja Pegawai	10.548.000	10.548.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	39.610.400	40.315.600	705.200	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**04**	**0.00**	**00**					**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**20.000.000**	**20.000.000**	**0**	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**04**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**20.000.000**	**20.000.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.000.000	20.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	20.000.000	20.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	20.000.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**61.580.000**	**61.580.000**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**61.580.000**	**61.580.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	02				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	39.980.000	39.980.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	39.980.000	39.980.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	39.980.000	39.980.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	08				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	21.600.000	21.600.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	21.600.000	21.600.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000	21.600.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**20.000.000**	**20.000.000**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**06**	**2.01**	**00**				**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**20.000.000**	**20.000.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	06	2.01	05				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.000.000	20.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	06	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	20.000.000	20.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	06	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	20.000.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.762.197.202**	**2.573.538.522**	**(188.658.680)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.569.104.502**	**2.380.445.822**	**(188.658.680)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.537.999.002	2.349.340.322	(188.658.680)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.537.999.002	2.349.340.322	(188.658.680)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.537.999.002	2.349.340.322	(188.658.680)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.955.200	27.955.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	27.955.200	27.955.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	27.955.200	27.955.200	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.150.300	3.150.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	3.150.300	3.150.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.150.300	3.150.300	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**01**	**2.05**	**00**				**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**15.400.000**	**15.400.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.05	05				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	15.400.000	15.400.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.05	05	5	1		BELANJA OPERASI	15.400.000	15.400.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.05	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.400.000	15.400.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**45.425.900**	**45.425.900**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.997.400	1.997.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.997.400	1.997.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.997.400	1.997.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.141.500	16.141.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	16.141.500	16.141.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.141.500	16.141.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.492.000	1.492.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	1.492.000	1.492.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.492.000	1.492.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.795.000	25.795.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	25.795.000	25.795.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	25.795.000	25.795.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**14.691.700**	**14.691.700**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.691.700	14.691.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.07	06	5	1		BELANJA OPERASI	2.190.000	2.190.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.07	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.190.000	2.190.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	12.501.700	12.501.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.501.700	12.501.700	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**77.096.300**	**77.096.300**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	600.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	600.000	600.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	600.000	600.000	0	

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.999.500	21.999.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	21.999.500	21.999.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	21.999.500	21.999.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	54.496.800	54.496.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	54.496.800	54.496.800	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**01**	**2.09**	**00**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**40.478.800**	**40.478.800**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.999.200	36.999.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	36.999.200	36.999.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	36.999.200	36.999.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.981.500	1.981.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	1.981.500	1.981.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.981.500	1.981.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.498.100	1.498.100	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	1.498.100	1.498.100	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.498.100	1.498.100	0	
										Jumlah Belanja	**3.113.783.102**	**2.925.124.422**	**(188.658.680)**	
										Total Surplus/(Defisit)	**(3.113.783.102)**	**(2.925.124.422)**	**188.658.680**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.05.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**				**PEMBIAYAAN**				
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.593.600**	**1.610.753**	**17.153**	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	1.593.600	1.610.753	17.153	
									Jumlah Pendapatan	**1.593.600**	**1.610.753**	**17.153**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**KECAMATAN**	**2.291.033.862**	**2.243.433.882**	**(47.599.980)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**47.821.600**	**67.741.500**	**19.919.900**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**47.821.600**	**67.741.500**	**19.919.900**	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	2.01	01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	47.821.600	67.741.500	19.919.900	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	47.821.600	67.741.500	19.919.900	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	47.821.600	67.741.500	19.919.900	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**204.122.700**	**204.072.700**	**(50.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**3.151.700**	**3.151.700**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.01	01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.151.700	3.151.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.151.700	3.151.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.151.700	3.151.700	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**03**	**2.02**	**00**				**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**200.971.000**	**200.921.000**	**(50.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.02	02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	150.961.300	150.911.300	(50.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	45.981.300	45.931.300	(50.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	18.550.000	17.330.000	(1.220.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.431.300	28.601.300	1.170.000	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.02	02	5	2		BELANJA MODAL	104.980.000	104.980.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.02	02	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	104.980.000	104.980.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.02	03				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.009.700	50.009.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	50.009.700	50.009.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.009.700	50.009.700	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**14.092.000**	**7.722.000**	**(6.370.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**06**	**2.01**	**00**				**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**14.092.000**	**7.722.000**	**(6.370.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	06	2.01	05				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.300.000	0	(1.300.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	06	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	1.300.000	0	(1.300.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	06	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000	0	(1.300.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	06	2.01	11				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.792.000	7.722.000	(5.070.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	06	2.01	11	5	1		BELANJA OPERASI	12.792.000	7.722.000	(5.070.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	06	2.01	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.792.000	7.722.000	(5.070.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.024.997.562**	**1.963.897.682**	**(61.099.880)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.759.579.362**	**1.711.979.482**	**(47.599.880)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.716.406.362	1.668.806.482	(47.599.880)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.716.406.362	1.668.806.482	(47.599.880)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	1.716.406.362	1.668.806.482	(47.599.880)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	38.673.100	38.673.100	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	38.673.100	38.673.100	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	38.571.600	38.571.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	101.500	101.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.499.900	4.499.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	4.499.900	4.499.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.499.900	4.499.900	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**87.508.200**	**87.508.200**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.332.700	3.332.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.332.700	3.332.700	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.332.700	3.332.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.495.500	12.495.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	12.495.500	12.495.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.495.500	12.495.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.670.000	29.908.000	(8.762.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	38.670.000	29.908.000	(8.762.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	38.670.000	29.908.000	(8.762.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.010.000	41.772.000	8.762.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	33.010.000	41.772.000	8.762.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	33.010.000	41.772.000	8.762.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**33.720.000**	**26.220.000**	**(7.500.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.720.000	26.220.000	(7.500.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	33.720.000	26.220.000	(7.500.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.720.000	26.220.000	(7.500.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**76.011.300**	**70.011.300**	**(6.000.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.000.000	1.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000	1.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.420.000	14.420.000	(6.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	20.420.000	14.420.000	(6.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.420.000	14.420.000	(6.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.591.300	54.591.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	54.591.300	54.591.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	54.591.300	54.591.300	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**68.178.700**	**68.178.700**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.184.600	48.184.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	48.184.600	48.184.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	48.184.600	48.184.600	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.994.100	19.994.100	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	19.994.100	19.994.100	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.994.100	19.994.100	0	
									Jumlah Belanja	**2.291.033.862**	**2.243.433.882**	**(47.599.980)**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(2.289.440.262)**	**(2.241.823.129)**	**47.617.133**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.06.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 KANTOR KECAMATAN PURBATUA

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	**0**	**0**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**KECAMATAN**	**1.673.063.645**	**1.379.786.315**	**(293.277.330)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**63.435.000**	**63.355.000**	**(80.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**63.435.000**	**63.355.000**	**(80.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	02	2.01	01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	63.435.000	63.355.000	(80.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	63.435.000	63.355.000	(80.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	63.435.000	63.355.000	(80.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**19.833.000**	**16.109.000**	**(3.724.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**19.833.000**	**16.109.000**	**(3.724.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	03	2.01	01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19.833.000	16.109.000	(3.724.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	19.833.000	16.109.000	(3.724.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.833.000	16.109.000	(3.724.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**21.600.000**	**21.600.000**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**21.600.000**	**21.600.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	05	2.01	08				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	21.600.000	21.600.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	05	2.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	21.600.000	21.600.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	05	2.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000	21.600.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.568.195.645**	**1.278.722.315**	**(289.473.330)**	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**619.600**	**619.600**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	619.600	619.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	619.600	619.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	619.600	619.600	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.336.872.945**	**1.043.595.615**	**(293.277.330)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.294.365.845	1.001.088.515	(293.277.330)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.294.365.845	1.001.088.515	(293.277.330)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	1.294.365.845	1.001.088.515	(293.277.330)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.548.300	40.548.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	40.548.300	40.548.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	39.087.600	39.087.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.460.700	1.460.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.958.800	1.958.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	1.958.800	1.958.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.958.800	1.958.800	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**49.977.500**	**53.337.500**	**3.360.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.569.900	2.569.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.569.900	2.569.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.569.900	2.569.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.975.800	4.975.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	4.975.800	4.975.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.975.800	4.975.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.156.500	18.516.500	3.360.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	15.156.500	18.516.500	3.360.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.156.500	18.516.500	3.360.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.542.600	11.542.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	11.542.600	11.542.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.542.600	11.542.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	07				Penyediaan Bahan/Material	15.732.700	15.732.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	07	5	1		BELANJA OPERASI	15.732.700	15.732.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.732.700	15.732.700	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4.750.000**	**20.350.000**	**15.600.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.750.000	20.350.000	15.600.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.07	06	5	1		BELANJA OPERASI	750.000	750.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.07	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	750.000	750.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	4.000.000	19.600.000	15.600.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.000.000	19.600.000	15.600.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**78.628.400**	**66.628.400**	**(12.000.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000	700.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	700.000	700.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	700.000	700.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.431.600	11.431.600	(12.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	23.431.600	11.431.600	(12.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	23.431.600	11.431.600	(12.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	54.496.800	54.496.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	54.496.800	54.496.800	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**97.347.200**	**94.191.200**	**(3.156.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.041.400	68.045.400	4.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	68.041.400	68.045.400	4.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	68.041.400	68.045.400	4.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.468.200	2.468.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	2.468.200	2.468.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.468.200	2.468.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.197.600	14.197.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	14.197.600	14.197.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.197.600	14.197.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.640.000	9.480.000	(3.160.000)	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	11	5	1		BELANJA OPERASI	12.640.000	9.480.000	(3.160.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.640.000	9.480.000	(3.160.000)	
									Jumlah Belanja	**1.673.063.645**	**1.379.786.315**	**(293.277.330)**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(1.673.063.645)**	**(1.379.786.315)**	**293.277.330**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.07.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	**0**	**0**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**KECAMATAN**	**1.487.902.451**	**1.419.225.748**	**(68.676.703)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**42.530.000**	**41.830.000**	**(700.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**42.530.000**	**41.830.000**	**(700.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	02	2.01	01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	42.530.000	41.830.000	(700.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	42.530.000	41.830.000	(700.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	42.530.000	41.830.000	(700.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**19.500.000**	**16.500.000**	**(3.000.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**19.500.000**	**16.500.000**	**(3.000.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19.500.000	16.500.000	(3.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	19.500.000	16.500.000	(3.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000	16.500.000	(3.000.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**12.000.000**	**7.000.000**	**(5.000.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**04**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**12.000.000**	**7.000.000**	**(5.000.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	04	2.01	01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.000.000	7.000.000	(5.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	04	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	12.000.000	7.000.000	(5.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	04	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000	7.000.000	(5.000.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**42.600.000**	**33.600.000**	**(9.000.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**42.600.000**	**33.600.000**	**(9.000.000)**	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	08				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	42.600.000	33.600.000	(9.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	42.600.000	33.600.000	(9.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	42.600.000	33.600.000	(9.000.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**15.091.000**	**11.241.000**	**(3.850.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**06**	**2.01**	**00**				**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**15.091.000**	**11.241.000**	**(3.850.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	05				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.091.000	11.241.000	(3.850.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	15.091.000	11.241.000	(3.850.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.091.000	11.241.000	(3.850.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.356.181.451**	**1.309.054.748**	**(47.126.703)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**20.905.300**	**20.905.300**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.216.300	2.216.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	2.216.300	2.216.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.216.300	2.216.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.689.000	18.689.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	18.689.000	18.689.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.689.000	18.689.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.138.509.951**	**1.067.413.568**	**(71.096.383)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.101.396.751	1.032.720.368	(68.676.383)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.101.396.751	1.032.720.368	(68.676.383)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	1.101.396.751	1.032.720.368	(68.676.383)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.907.600	32.907.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	32.907.600	32.907.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	32.907.600	32.907.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.205.600	1.785.600	(2.420.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	4.205.600	1.785.600	(2.420.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.205.600	1.785.600	(2.420.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**56.198.000**	**59.381.000**	**3.183.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.045.500	4.435.900	2.390.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.045.500	4.435.900	2.390.400	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.045.500	4.435.900	2.390.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.377.900	14.377.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	14.377.900	14.377.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.377.900	14.377.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.222.100	14.641.700	2.419.600	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	12.222.100	14.641.700	2.419.600	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.222.100	14.641.700	2.419.600	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.352.500	4.355.500	3.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	4.352.500	4.355.500	3.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.352.500	4.355.500	3.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.200.000	21.570.000	(1.630.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	23.200.000	21.570.000	(1.630.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	23.200.000	21.570.000	(1.630.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**21.100.000**	**27.700.000**	**6.600.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.100.000	27.700.000	6.600.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	21.100.000	27.700.000	6.600.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.100.000	27.700.000	6.600.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**79.598.000**	**72.598.000**	**(7.000.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.000.000	1.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000	1.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.101.200	17.101.200	(7.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	24.101.200	17.101.200	(7.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.101.200	17.101.200	(7.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	54.496.800	54.496.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	54.496.800	54.496.800	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**39.870.200**	**61.056.880**	**21.186.680**	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.187.000	42.851.280	10.664.280	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	32.187.000	42.851.280	10.664.280	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	32.187.000	42.851.280	10.664.280	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.191.700	4.278.400	1.086.700	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	3.191.700	4.278.400	1.086.700	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.191.700	4.278.400	1.086.700	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.491.500	13.927.200	9.435.700	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	4.491.500	13.927.200	9.435.700	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.491.500	13.927.200	9.435.700	
Jumlah Belanja										**1.487.902.451**	**1.419.225.748**	**(68.676.703)**	
Total Surplus/(Defisit)										**(1.487.902.451)**	**(1.419.225.748)**	**68.676.703**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.08.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										**0**	**0**	**0**	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										**0**	**0**	**0**	

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.09.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.09.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**2.938.500**	**2.674.560**	**(263.940)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	2.938.500	2.674.560	(263.940)	
									Jumlah Pendapatan	**2.938.500**	**2.674.560**	**(263.940)**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.09.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.09.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**KECAMATAN**	**2.422.073.397**	**2.000.667.388**	**(421.406.009)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.09.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**5.500.000**	**5.500.000**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.09.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**5.500.000**	**5.500.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	02	2.01	01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.500.000	5.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.500.000	5.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000	5.500.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.09.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**34.200.000**	**34.200.000**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.09.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**34.200.000**	**34.200.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	03	2.01	01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21.900.000	21.900.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	21.900.000	21.900.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.900.000	21.900.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	03	2.01	03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.300.000	12.300.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	03	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	12.300.000	12.300.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.300.000	12.300.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.09.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**8.097.500**	**8.097.500**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.09.0000**	**04**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**8.097.500**	**8.097.500**	**0**	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	04	2.01	01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8.097.500	8.097.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	04	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	8.097.500	8.097.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	04	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.097.500	8.097.500	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.09.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**42.853.000**	**42.853.000**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.09.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**42.853.000**	**42.853.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	05	2.01	08				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	42.853.000	42.853.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	05	2.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	42.853.000	42.853.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	05	2.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	42.853.000	42.853.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.09.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**22.100.400**	**22.100.400**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.09.0000**	**06**	**2.01**	**00**				**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**22.100.400**	**22.100.400**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	06	2.01	05				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.455.000	10.455.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	06	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	10.455.000	10.455.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	06	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.455.000	10.455.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	06	2.01	06				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	11.645.400	11.645.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	06	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	11.645.400	11.645.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	06	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.645.400	11.645.400	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.09.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.309.322.497**	**1.887.916.488**	**(421.406.009)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.09.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**36.810.000**	**36.810.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000	1.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	1.500.000	1.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000	1.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.310.000	35.310.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	35.310.000	35.310.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	35.310.000	35.310.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.09.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.064.386.597**	**1.646.161.188**	**(418.225.409)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.037.251.397	1.615.845.988	(421.405.409)	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.037.251.397	1.615.845.988	(421.405.409)	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.037.251.397	1.615.845.988	(421.405.409)	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.627.200	28.807.200	3.180.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	25.627.200	28.807.200	3.180.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	25.627.200	28.807.200	3.180.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.508.000	1.508.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	1.508.000	1.508.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.508.000	1.508.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.09.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**53.910.300**	**53.910.300**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.650.000	1.650.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.650.000	1.650.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000	1.650.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.524.100	25.524.100	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	25.524.100	25.524.100	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	25.524.100	25.524.100	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.634.400	7.634.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	7.634.400	7.634.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.634.400	7.634.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.770.000	3.770.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	3.770.000	3.770.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.770.000	3.770.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.926.800	1.926.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	1.926.800	1.926.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.926.800	1.926.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.405.000	13.405.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	13.405.000	13.405.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.405.000	13.405.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.09.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**36.000.000**	**36.000.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.000.000	36.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	36.000.000	36.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.000.000	36.000.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.09.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**85.195.100**	**82.014.500**	**(3.180.600)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.000.000	1.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000	1.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.698.300	26.517.700	(3.180.600)	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	29.698.300	26.517.700	(3.180.600)	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.698.300	26.517.700	(3.180.600)	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	54.496.800	54.496.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	54.496.800	54.496.800	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.09.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**33.020.500**	**33.020.500**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.093.600	28.093.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	28.093.600	28.093.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	28.093.600	28.093.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.926.900	4.926.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	4.926.900	4.926.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.926.900	4.926.900	0	
									Jumlah Belanja	**2.422.073.397**	**2.000.667.388**	**(421.406.009)**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(2.419.134.897)**	**(1.997.992.828)**	**421.142.069**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.09.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.10.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.10.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**7.113.100**	**6.419.000**	**(694.100)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	7.113.100	6.419.000	(694.100)	
									Jumlah Pendapatan	**7.113.100**	**6.419.000**	**(694.100)**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.10.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.10.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**KECAMATAN**	**1.785.647.832**	**1.584.491.973**	**(201.155.859)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.10.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**70.600.000**	**70.600.000**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.10.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**70.600.000**	**70.600.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	02	2.01	01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	70.600.000	70.600.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	70.600.000	70.600.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	70.600.000	70.600.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.10.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**10.638.300**	**10.638.300**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.10.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**10.638.300**	**10.638.300**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	03	2.01	02				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5.640.000	5.640.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	03	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	5.640.000	5.640.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	03	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.640.000	5.640.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	03	2.01	03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.998.300	4.998.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	03	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	4.998.300	4.998.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.998.300	4.998.300	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.10.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.10.0000**	**04**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	04	2.01	02				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.000.000	5.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	04	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	04	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.10.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**11.500.000**	**11.500.000**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.10.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**11.500.000**	**11.500.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	05	2.01	08				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	11.500.000	11.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	05	2.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	11.500.000	11.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	05	2.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000	11.500.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.10.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**7.500.000**	**7.500.000**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.10.0000**	**06**	**2.01**	**00**				**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**7.500.000**	**7.500.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	06	2.01	17				Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5.000.000	5.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	06	2.01	17	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	06	2.01	17	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	06	2.01	18				Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2.500.000	2.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	06	2.01	18	5	1		BELANJA OPERASI	2.500.000	2.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	06	2.01	18	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	2.500.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.10.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.680.409.532**	**1.479.253.673**	**(201.155.859)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.10.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**28.189.800**	**28.189.800**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.800	4.999.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.999.800	4.999.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.800	4.999.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	2.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	2.000.000	2.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	2.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.190.000	21.190.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	21.190.000	21.190.000	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.190.000	21.190.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.10.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.432.151.132**	**1.230.995.273**	**(201.155.859)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.402.650.732	1.201.494.873	(201.155.859)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.402.650.732	1.201.494.873	(201.155.859)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	1.402.650.732	1.201.494.873	(201.155.859)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.500.400	27.500.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	27.500.400	27.500.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	27.500.400	27.500.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	2.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	2.000.000	2.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	2.000.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.10.0000**	**01**	**2.03**	**00**				**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.03	06				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000	2.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.03	06	5	1		BELANJA OPERASI	2.000.000	2.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.03	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	2.000.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.10.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**65.717.200**	**65.717.200**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.996.000	2.996.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.996.000	2.996.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.996.000	2.996.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.241.500	7.241.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	7.241.500	7.241.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.241.500	7.241.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.087.900	4.087.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	4.087.900	4.087.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.087.900	4.087.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.391.800	4.391.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	4.391.800	4.391.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.391.800	4.391.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	2.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	2.000.000	2.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	2.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000	45.000.000	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	45.000.000	45.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000	45.000.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.10.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**36.002.100**	**36.002.100**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.002.100	36.002.100	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	36.002.100	36.002.100	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.002.100	36.002.100	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.10.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**81.416.800**	**81.416.800**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.000.000	1.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000	1.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.920.000	25.920.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	25.920.000	25.920.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	25.920.000	25.920.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	54.496.800	54.496.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	54.496.800	54.496.800	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.10.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**34.932.500**	**34.932.500**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.932.500	34.932.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	34.932.500	34.932.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	34.932.500	34.932.500	0	
									Jumlah Belanja	**1.785.647.832**	**1.584.491.973**	**(201.155.859)**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(1.778.534.732)**	**(1.578.072.973)**	**200.461.759**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.10.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 KANTOR KECAMATAN GAROGA

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	**0**	**0**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.11.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.11.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**KECAMATAN**	**1.900.852.994**	**1.762.356.679**	**(138.496.315)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.11.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**44.998.000**	**44.998.000**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.11.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**44.998.000**	**44.998.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	02	2.01	01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	44.998.000	44.998.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	44.998.000	44.998.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	44.998.000	44.998.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.11.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**19.993.000**	**19.993.000**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.11.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**19.993.000**	**19.993.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	03	2.01	01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.000.000	10.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	10.000.000	10.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	10.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	03	2.01	03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.993.000	9.993.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	03	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	9.993.000	9.993.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.993.000	9.993.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.11.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**15.399.000**	**15.399.000**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.11.0000**	**04**	**2.02**	**00**				**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**15.399.000**	**15.399.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	04	2.02	01				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	15.399.000	15.399.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	04	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	15.399.000	15.399.000	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	04	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.399.000	15.399.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.11.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**35.221.000**	**35.221.000**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.11.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**35.221.000**	**35.221.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	05	2.01	08				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	35.221.000	35.221.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	05	2.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	35.221.000	35.221.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	05	2.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	35.221.000	35.221.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.11.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**14.540.000**	**14.540.000**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.11.0000**	**06**	**2.01**	**00**				**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**14.540.000**	**14.540.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	11				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.440.000	7.440.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	11	5	1		BELANJA OPERASI	7.440.000	7.440.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.440.000	7.440.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	16				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	7.100.000	7.100.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	16	5	1		BELANJA OPERASI	7.100.000	7.100.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	16	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000	7.100.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.11.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.770.701.994**	**1.632.205.679**	**(138.496.315)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.11.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**19.310.000**	**19.310.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.910.000	2.910.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	2.910.000	2.910.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.910.000	2.910.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.400.000	16.400.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	16.400.000	16.400.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.400.000	16.400.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.11.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.552.171.994**	**1.413.655.679**	**(138.516.315)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.513.064.394	1.374.608.079	(138.456.315)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.513.064.394	1.374.608.079	(138.456.315)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	1.513.064.394	1.374.608.079	(138.456.315)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.087.600	36.087.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	36.087.600	36.087.600	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	36.087.600	36.087.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.020.000	2.960.000	(60.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	3.020.000	2.960.000	(60.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.020.000	2.960.000	(60.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.11.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**50.975.400**	**51.779.000**	**803.600**	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.504.500	3.504.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.504.500	3.504.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.504.500	3.504.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.425.600	5.210.600	(5.215.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	10.425.600	5.210.600	(5.215.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.425.600	5.210.600	(5.215.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.143.900	6.143.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	6.143.900	6.143.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.143.900	6.143.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.301.400	3.350.000	48.600	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	3.301.400	3.350.000	48.600	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.301.400	3.350.000	48.600	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.600.000	33.570.000	5.970.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	27.600.000	33.570.000	5.970.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000	33.570.000	5.970.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.11.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**40.137.600**	**16.200.000**	**(23.937.600)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.07	05				Pengadaan Mebel	32.244.000	16.200.000	(16.044.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.07	05	5	2		BELANJA MODAL	32.244.000	16.200.000	(16.044.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.07	05	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.244.000	16.200.000	(16.044.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.893.600	0	(7.893.600)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	7.893.600	0	(7.893.600)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.893.600	0	(7.893.600)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.11.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**79.138.100**	**74.278.100**	**(4.860.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.410.000	2.410.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.410.000	2.410.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.410.000	2.410.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.231.300	17.371.300	(4.860.000)	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	22.231.300	17.371.300	(4.860.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.231.300	17.371.300	(4.860.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	54.496.800	54.496.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	54.496.800	54.496.800	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.11.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**28.968.900**	**56.982.900**	**28.014.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.904.800	45.982.000	28.077.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	17.904.800	45.982.000	28.077.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.904.800	45.982.000	28.077.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.064.100	11.000.900	(63.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	11.064.100	11.000.900	(63.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.064.100	11.000.900	(63.200)	
									Jumlah Belanja	**1.900.852.994**	**1.762.356.679**	**(138.496.315)**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(1.900.852.994)**	**(1.762.356.679)**	**138.496.315**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.11.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.12.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**				**PENDAPATAN DAERAH**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.12.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**			**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**86.214.900**	**90.295.687**	**4.080.787**	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	86.214.900	90.295.687	4.080.787	
										Jumlah Pendapatan	**86.214.900**	**90.295.687**	**4.080.787**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.12.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**				**BELANJA**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.12.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**KECAMATAN**	**3.678.292.328**	**3.661.674.453**	**(16.617.875)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.12.0000**	**02**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**34.500.000**	**46.980.000**	**12.480.000**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.12.0000**	**02**	**2.01**	**00**					**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**34.500.000**	**46.980.000**	**12.480.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	02	2.01	01					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	34.500.000	46.980.000	12.480.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	02	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	34.500.000	46.980.000	12.480.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	02	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	34.500.000	46.980.000	12.480.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.12.0000**	**03**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**220.345.699**	**220.345.699**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.12.0000**	**03**	**2.01**	**00**					**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**20.345.700**	**20.345.700**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	03	2.01	01					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.345.700	20.345.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	03	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	20.345.700	20.345.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	03	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	20.345.700	20.345.700	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.12.0000**	**03**	**2.02**	**00**					**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**199.999.999**	**199.999.999**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	03	2.02	02					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	150.000.000	150.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	03	2.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	6.075.383	6.075.383	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	03	2.02	02	5	1	01		Belanja Pegawai	2.850.000	1.210.000	(1.640.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	03	2.02	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.225.383	4.865.383	1.640.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	03	2.02	02	5	2			BELANJA MODAL	143.924.617	143.924.617	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	03	2.02	02	5	2	04		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	143.924.617	143.924.617	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	03	2.02	03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	49.999.999	49.999.999	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	03	2.02	03	5	1			BELANJA OPERASI	49.999.999	49.999.999	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	03	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	10.548.000	10.548.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	03	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	39.451.999	39.451.999	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.12.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**33.800.000**	**9.500.000**	**(24.300.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.12.0000**	**04**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**33.800.000**	**9.500.000**	**(24.300.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	04	2.01	01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	33.800.000	9.500.000	(24.300.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	04	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	33.800.000	9.500.000	(24.300.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	04	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	33.800.000	9.500.000	(24.300.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.12.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**28.800.000**	**28.800.000**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.12.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**28.800.000**	**28.800.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	05	2.01	08				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	28.800.000	28.800.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	05	2.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	28.800.000	28.800.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	05	2.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000	28.800.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.12.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**8.300.000**	**2.240.000**	**(6.060.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.12.0000**	**06**	**2.01**	**00**				**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**8.300.000**	**2.240.000**	**(6.060.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	06	2.01	05				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.300.000	2.240.000	(6.060.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	06	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	8.300.000	2.240.000	(6.060.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	06	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000	2.240.000	(6.060.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.12.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.352.546.629**	**3.353.808.754**	**1.262.125**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.12.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**30.827.200**	**26.774.200**	**(4.053.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.371.200	1.371.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	1.371.200	1.371.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.371.200	1.371.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.456.000	25.403.000	(4.053.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	29.456.000	25.403.000	(4.053.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.456.000	25.403.000	(4.053.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.12.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.008.211.029**	**2.991.593.154**	**(16.617.875)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.967.889.929	2.951.272.054	(16.617.875)	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.967.889.929	2.951.272.054	(16.617.875)	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.967.889.929	2.951.272.054	(16.617.875)	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	38.695.200	38.695.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	38.695.200	38.695.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	38.695.200	38.695.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.625.900	1.625.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	1.625.900	1.625.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.625.900	1.625.900	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.12.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**114.805.800**	**143.643.850**	**28.838.050**	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.990.600	1.714.800	(1.275.800)	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.990.600	1.714.800	(1.275.800)	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.990.600	1.714.800	(1.275.800)	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.046.800	23.355.650	5.308.850	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	18.046.800	23.355.650	5.308.850	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.046.800	23.355.650	5.308.850	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.563.400	8.563.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	8.563.400	8.563.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.563.400	8.563.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.750.000	4.750.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	4.750.000	4.750.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000	4.750.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.200.000	3.640.000	(1.560.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	5.200.000	3.640.000	(1.560.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000	3.640.000	(1.560.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.255.000	101.620.000	26.365.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	75.255.000	101.620.000	26.365.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	75.255.000	101.620.000	26.365.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.12.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**45.686.500**	**42.096.200**	**(3.590.300)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.686.500	42.096.200	(3.590.300)	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.07	06	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	7.050.000	2.050.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.07	06	5	1	01	Belanja Pegawai	0	2.050.000	2.050.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.07	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	40.686.500	35.046.200	(5.640.300)	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.686.500	35.046.200	(5.640.300)	

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.12.0000**	**01**	**2.08**	**00**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**88.194.000**	**85.194.000**	**(3.000.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000	700.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	01	5	1			BELANJA OPERASI	700.000	700.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	700.000	700.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.997.200	29.997.200	(3.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	32.997.200	29.997.200	(3.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	32.997.200	29.997.200	(3.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	54.496.800	54.496.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	54.496.800	54.496.800	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.12.0000**	**01**	**2.09**	**00**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**64.822.100**	**64.507.350**	**(314.750)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.052.100	52.696.250	4.644.150	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	48.052.100	52.696.250	4.644.150	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	48.052.100	52.696.250	4.644.150	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.775.500	4.210.000	(2.565.500)	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	6.775.500	4.210.000	(2.565.500)	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	6.775.500	4.210.000	(2.565.500)	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.994.500	7.601.100	(2.393.400)	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	9.994.500	7.601.100	(2.393.400)	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	9.994.500	7.601.100	(2.393.400)	
										Jumlah Belanja	**3.678.292.328**	**3.661.674.453**	**(16.617.875)**	
										Total Surplus/(Defisit)	**(3.592.077.428)**	**(3.571.378.766)**	**20.698.662**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.12.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**				**PEMBIAYAAN**				
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 KANTOR KECAMATAN PAGARAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	**0**	**0**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.13.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.13.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**KECAMATAN**	**2.019.929.896**	**1.850.361.698**	**(169.568.198)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.13.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**12.564.000**	**23.784.000**	**11.220.000**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.13.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**12.564.000**	**23.784.000**	**11.220.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	02	2.01	01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12.564.000	23.784.000	11.220.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	12.564.000	23.784.000	11.220.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.564.000	23.784.000	11.220.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.13.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**22.929.000**	**32.929.000**	**10.000.000**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.13.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**22.929.000**	**32.929.000**	**10.000.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	03	2.01	01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22.929.000	32.929.000	10.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	22.929.000	32.929.000	10.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.929.000	32.929.000	10.000.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.13.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**20.000.500**	**4.061.000**	**(15.939.500)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.13.0000**	**04**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**20.000.500**	**4.061.000**	**(15.939.500)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	04	2.01	01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.000.500	4.061.000	(15.939.500)	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	04	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	20.000.500	4.061.000	(15.939.500)	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	04	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.500	4.061.000	(15.939.500)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.13.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**61.600.000**	**29.431.000**	**(32.169.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.13.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**61.600.000**	**29.431.000**	**(32.169.000)**	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	05	2.01	02				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40.000.000	7.831.000	(32.169.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	05	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	40.000.000	7.831.000	(32.169.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	05	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	7.831.000	(32.169.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	05	2.01	08				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	21.600.000	21.600.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	05	2.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	21.600.000	21.600.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	05	2.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000	21.600.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.13.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**20.000.000**	**6.400.000**	**(13.600.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.13.0000**	**06**	**2.01**	**00**				**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**20.000.000**	**6.400.000**	**(13.600.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	06	2.01	11				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.000.000	6.400.000	(13.600.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	06	2.01	11	5	1		BELANJA OPERASI	20.000.000	6.400.000	(13.600.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	06	2.01	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	6.400.000	(13.600.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.13.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.882.836.396**	**1.753.756.698**	**(129.079.698)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.13.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10.114.500**	**16.462.500**	**6.348.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.114.500	16.462.500	6.348.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	10.114.500	16.462.500	6.348.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.114.500	16.462.500	6.348.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.13.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.669.954.376**	**1.500.473.903**	**(169.480.473)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.639.453.876	1.469.973.403	(169.480.473)	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.639.453.876	1.469.973.403	(169.480.473)	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	1.639.453.876	1.469.973.403	(169.480.473)	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.667.200	27.667.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	27.667.200	27.667.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	27.667.200	27.667.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.833.300	2.833.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	2.833.300	2.833.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.833.300	2.833.300	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.13.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**45.277.100**	**82.020.000**	**36.742.900**	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.742.000	5.410.800	2.668.800	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.742.000	5.410.800	2.668.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.742.000	5.410.800	2.668.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.069.600	12.069.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	12.069.600	12.069.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.069.600	12.069.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.535.500	5.479.600	944.100	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	4.535.500	5.479.600	944.100	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.535.500	5.479.600	944.100	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.930.000	59.060.000	33.130.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	25.930.000	59.060.000	33.130.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	25.930.000	59.060.000	33.130.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.13.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**28.976.620**	**37.187.995**	**8.211.375**	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.07	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.976.620	37.187.995	8.211.375	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.07	10	5	1		BELANJA OPERASI	8.981.820	8.981.820	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.07	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.981.820	8.981.820	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.07	10	5	2		BELANJA MODAL	19.994.800	28.206.175	8.211.375	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.994.800	28.206.175	8.211.375	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.13.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**78.509.200**	**64.607.700**	**(13.901.500)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000	700.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	700.000	700.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	700.000	700.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.312.400	9.410.900	(13.901.500)	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	23.312.400	9.410.900	(13.901.500)	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	23.312.400	9.410.900	(13.901.500)	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	54.496.800	54.496.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	54.496.800	54.496.800	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.13.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**50.004.600**	**53.004.600**	**3.000.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.549.000	30.549.000	3.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	27.549.000	30.549.000	3.000.000	

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	27.549.000	30.549.000	3.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.862.400	18.862.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	18.862.400	18.862.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	18.862.400	18.862.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.09	11					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.593.200	3.593.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.09	11	5	1			BELANJA OPERASI	3.593.200	3.593.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.09	11	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.593.200	3.593.200	0	
Jumlah Belanja											**2.019.929.896**	**1.850.361.698**	**(169.568.198)**	
Total Surplus/(Defisit)											**(2.019.929.896)**	**(1.850.361.698)**	**169.568.198**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.13.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**				**PEMBIAYAAN**				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											**0**	**0**	**0**	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											**0**	**0**	**0**	

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	**0**	**0**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.14.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.14.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**KECAMATAN**	**1.240.098.215**	**1.306.507.585**	**66.409.370**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.14.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**41.547.600**	**32.864.000**	**(8.683.600)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.14.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**40.047.600**	**32.864.000**	**(7.183.600)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	02	2.01	01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	40.047.600	32.864.000	(7.183.600)	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	40.047.600	32.864.000	(7.183.600)	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	40.047.600	32.864.000	(7.183.600)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.14.0000**	**02**	**2.02**	**00**				**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**1.500.000**	**0**	**(1.500.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	01				Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.500.000	0	(1.500.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.500.000	0	(1.500.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000	0	(1.500.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.14.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**66.045.000**	**50.385.000**	**(15.660.000)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.14.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**66.045.000**	**50.385.000**	**(15.660.000)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	03	2.01	03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	66.045.000	50.385.000	(15.660.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	03	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	66.045.000	50.385.000	(15.660.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	66.045.000	50.385.000	(15.660.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.14.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**21.600.000**	**21.600.000**	**0**	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.14.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**21.600.000**	**21.600.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	05	2.01	08				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	21.600.000	21.600.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	05	2.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	21.600.000	21.600.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	05	2.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000	21.600.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.14.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.110.905.615**	**1.201.658.585**	**90.752.970**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.14.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3.600.000**	**13.200.000**	**9.600.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.800.000	1.800.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	1.800.000	1.800.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000	1.800.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.800.000	11.400.000	9.600.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	1.800.000	11.400.000	9.600.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000	11.400.000	9.600.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.14.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**888.315.535**	**954.744.505**	**66.428.970**	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	865.915.135	932.344.105	66.428.970	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	865.915.135	932.344.105	66.428.970	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	865.915.135	932.344.105	66.428.970	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22.400.400	22.400.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	22.400.400	22.400.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	22.400.400	22.400.400	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.14.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**72.703.600**	**87.427.600**	**14.724.000**	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.292.400	4.292.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.292.400	4.292.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.292.400	4.292.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.677.200	43.677.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	27.835.600	27.835.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.835.600	27.835.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.06	03	5	2		BELANJA MODAL	15.841.600	15.841.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.06	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.841.600	15.841.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.358.000	3.858.000	1.500.000	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	2.358.000	3.858.000	1.500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.358.000	3.858.000	1.500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.376.000	35.600.000	13.224.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	22.376.000	35.600.000	13.224.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.376.000	35.600.000	13.224.000	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.14.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**98.816.100**	**98.816.100**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	550.000	550.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	550.000	550.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	550.000	550.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.979.100	4.979.100	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	4.979.100	4.979.100	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.979.100	4.979.100	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.08	03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.287.000	39.287.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.08	03	5	1		BELANJA OPERASI	29.409.300	29.409.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.08	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.409.300	29.409.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.08	03	5	2		BELANJA MODAL	9.877.700	9.877.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.08	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.877.700	9.877.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.000.000	54.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	54.000.000	54.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000	54.000.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.14.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**47.470.380**	**47.470.380**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.738.280	30.738.280	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	30.738.280	30.738.280	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.738.280	30.738.280	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.228.100	11.228.100	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	11.228.100	11.228.100	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.228.100	11.228.100	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.504.000	5.504.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	5.504.000	5.504.000	0	

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	5.504.000	5.504.000	0	
										Jumlah Belanja	**1.240.098.215**	**1.306.507.585**	**66.409.370**	
										Total Surplus/(Defisit)	**(1.240.098.215)**	**(1.306.507.585)**	**(66.409.370)**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.14.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**				**PEMBIAYAAN**				
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KANTOR KECAMATAN MUARA

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.15.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.15.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**5.534.500**	**12.000.000**	**6.465.500**	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	5.534.500	12.000.000	6.465.500	
									Jumlah Pendapatan	**5.534.500**	**12.000.000**	**6.465.500**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.15.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.15.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**KECAMATAN**	**1.784.756.342**	**1.779.122.338**	**(5.634.004)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.15.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**71.875.600**	**71.875.600**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.15.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**71.875.600**	**71.875.600**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	02	2.01	01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	71.875.600	71.875.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	71.875.600	71.875.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	71.875.600	71.875.600	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.15.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**12.710.300**	**12.710.300**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.15.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**12.710.300**	**12.710.300**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	03	2.01	01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.710.300	12.710.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	12.710.300	12.710.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.710.300	12.710.300	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.15.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**5.600.000**	**5.600.000**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.15.0000**	**04**	**2.01**	**00**				**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**5.600.000**	**5.600.000**	**0**	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	04	2.01	01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.600.000	5.600.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	04	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.600.000	5.600.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	04	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000	5.600.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.15.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**21.600.000**	**21.600.000**	**0**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.15.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**21.600.000**	**21.600.000**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	05	2.01	08				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	21.600.000	21.600.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	05	2.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	21.600.000	21.600.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	05	2.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000	21.600.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.15.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.672.970.442**	**1.667.336.438**	**(5.634.004)**	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.15.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**16.771.900**	**16.771.900**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.666.900	3.666.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	3.666.900	3.666.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.666.900	3.666.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.105.000	13.105.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	13.105.000	13.105.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.105.000	13.105.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.15.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.414.345.992**	**1.408.716.988**	**(5.629.004)**	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.378.366.292	1.372.737.288	(5.629.004)	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.378.366.292	1.372.737.288	(5.629.004)	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	1.378.366.292	1.372.737.288	(5.629.004)	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.727.200	30.727.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	30.727.200	30.727.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	30.727.200	30.727.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.252.500	5.252.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	5.252.500	5.252.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.252.500	5.252.500	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.15.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**61.610.400**	**61.605.400**	**(5.000)**	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.669.200	5.669.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.669.200	5.669.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.669.200	5.669.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.964.000	6.964.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	6.964.000	6.964.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.964.000	6.964.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.267.600	4.267.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	4.267.600	4.267.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.267.600	4.267.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.318.400	2.318.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	2.318.400	2.318.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.318.400	2.318.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.891.200	1.891.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	1.891.200	1.891.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.891.200	1.891.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.500.000	40.495.000	(5.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	40.500.000	40.495.000	(5.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	40.500.000	40.495.000	(5.000)	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.15.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**78.102.900**	**78.102.900**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.07	11				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	78.102.900	78.102.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.07	11	5	1		BELANJA OPERASI	75.102.900	75.102.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.07	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	75.102.900	75.102.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.07	11	5	2		BELANJA MODAL	3.000.000	3.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.07	11	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000	3.000.000	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.15.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**79.052.200**	**79.052.200**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.000.000	1.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000	1.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.555.400	23.555.400	0	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	23.555.400	23.555.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	23.555.400	23.555.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	54.496.800	54.496.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	54.496.800	54.496.800	0	
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.15.0000**	**01**	**2.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**23.087.050**	**23.087.050**	**0**	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.087.050	23.087.050	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	23.087.050	23.087.050	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	23.087.050	23.087.050	0	
									Jumlah Belanja	**1.784.756.342**	**1.779.122.338**	**(5.634.004)**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(1.779.221.842)**	**(1.767.122.338)**	**12.099.504**	
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.15.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**				
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	**0**	**0**	
0	**00**	**8.01.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**				
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**5.661.508.476**	**6.261.039.699**	**599.531.223**	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.02.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**877.741.500**	**917.372.900**	**39.631.400**	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.02.0000**	**02**	**2.01**	**00**				**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**877.741.500**	**917.372.900**	**39.631.400**	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	02				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	30.000.000	100.000.000	70.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	30.000.000	100.000.000	70.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	02	5	1	05	Belanja Hibah	30.000.000	100.000.000	70.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	597.975.700	597.975.700	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	597.975.700	597.975.700	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	597.975.700	597.975.700	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	04				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	249.765.800	219.397.200	(30.368.600)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	249.765.800	219.397.200	(30.368.600)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	249.765.800	219.397.200	(30.368.600)	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.02.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**907.367.663**	**1.871.239.063**	**963.871.400**	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.02.0000**	**03**	**2.01**	**00**				**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**907.367.663**	**1.871.239.063**	**963.871.400**	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	02				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	871.239.063	1.871.239.063	1.000.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	871.239.063	1.871.239.063	1.000.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	02	5	1	05	Belanja Hibah	871.239.063	1.871.239.063	1.000.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	04				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	36.128.600	0	(36.128.600)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	36.128.600	0	(36.128.600)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	36.128.600	0	(36.128.600)	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.02.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**31.539.200**	**31.539.200**	**0**	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.02.0000**	**04**	**2.01**	**00**				**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**31.539.200**	**31.539.200**	**0**	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	05				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	31.539.200	31.539.200	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	31.539.200	31.539.200	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	31.539.200	31.539.200	0	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.02.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**60.000.000**	**0**	**(60.000.000)**	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.02.0000**	**05**	**2.01**	**00**				**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**60.000.000**	**0**	**(60.000.000)**	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	03				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	60.000.000	0	(60.000.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	60.000.000	0	(60.000.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	0	(60.000.000)	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.02.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**602.210.700**	**465.303.500**	**(136.907.200)**	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.02.0000**	**06**	**2.01**	**00**				**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**602.210.700**	**465.303.500**	**(136.907.200)**	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	04				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150.000.000	119.050.000	(30.950.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	150.000.000	119.050.000	(30.950.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	119.050.000	(30.950.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	05				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	97.372.900	66.479.800	(30.893.100)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	97.372.900	66.479.800	(30.893.100)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	97.372.900	66.479.800	(30.893.100)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	06				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	354.837.800	279.773.700	(75.064.100)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	354.837.800	279.773.700	(75.064.100)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	354.837.800	279.773.700	(75.064.100)	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.182.649.413**	**2.975.585.036**	**(207.064.377)**	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**2.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**29.050.000**	**29.050.000**	**0**	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000	2.500.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	2.500.000	2.500.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	2.500.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000	2.500.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	2.500.000	2.500.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	2.500.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	4.000.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	4.000.000	4.000.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	4.000.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.050.000	20.050.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	20.050.000	20.050.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.050.000	20.050.000	0	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**2.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.761.504.213**	**2.587.226.936**	**(174.277.277)**	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.712.749.013	2.538.471.736	(174.277.277)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.712.749.013	2.538.471.736	(174.277.277)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.712.749.013	2.538.471.736	(174.277.277)	

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.755.200	44.755.200	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	44.755.200	44.755.200	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	44.755.200	44.755.200	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000	4.000.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	4.000.000	4.000.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	4.000.000	0	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**2.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**219.653.900**	**211.558.000**	**(8.095.900)**	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.783.400	5.769.600	(3.013.800)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	8.783.400	5.769.600	(3.013.800)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.783.400	5.769.600	(3.013.800)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.818.000	17.818.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	17.818.000	17.818.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.818.000	17.818.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.132.700	8.126.200	(2.006.500)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	10.132.700	8.126.200	(2.006.500)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.132.700	8.126.200	(2.006.500)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.176.800	12.171.200	(3.005.600)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	15.176.800	12.171.200	(3.005.600)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.176.800	12.171.200	(3.005.600)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.748.000	7.748.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	7.748.000	7.748.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.748.000	7.748.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.995.000	159.925.000	(70.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	159.995.000	159.925.000	(70.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	159.995.000	159.925.000	(70.000)	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**2.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**31.458.800**	**16.320.000**	**(15.138.800)**	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.458.800	16.320.000	(15.138.800)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	5	1		BELANJA OPERASI	7.860.000	0	(7.860.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.860.000	0	(7.860.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	23.598.800	16.320.000	(7.278.800)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.598.800	16.320.000	(7.278.800)	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**2.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**90.988.200**	**86.555.000**	**(4.433.200)**	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.200.000	4.200.000	0	

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	01	5	1			BELANJA OPERASI	4.200.000	4.200.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.200.000	4.200.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.291.400	27.858.200	(4.433.200)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	32.291.400	27.858.200	(4.433.200)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	32.291.400	27.858.200	(4.433.200)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	54.496.800	54.496.800	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	54.496.800	54.496.800	0	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**2.09**	**00**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**49.994.300**	**44.875.100**	**(5.119.200)**	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.262.800	28.262.800	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	28.262.800	28.262.800	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	28.262.800	28.262.800	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.741.900	9.110.700	(2.631.200)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	11.741.900	9.110.700	(2.631.200)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	11.741.900	9.110.700	(2.631.200)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.989.600	7.501.600	(2.488.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	9.989.600	7.501.600	(2.488.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	9.989.600	7.501.600	(2.488.000)	
										Jumlah Belanja	**5.661.508.476**	**6.261.039.699**	**599.531.223**	
										Total Surplus/(Defisit)	**(5.661.508.476)**	**(6.261.039.699)**	**(599.531.223)**	
0	**00**	**8.01.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**				**PEMBIAYAAN**				
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**	
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**	

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**756.611.782.511**	**133.170.818.888**	**0**	**0**	**889.782.601.399**	**714.479.317.885**	**147.814.403.737**	**0**	**0**	**862.293.721.622**	**(27.488.879.777)**
1	**01**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**440.110.071.292**	**10.559.892.168**	**0**	**0**	**450.669.963.460**	**393.962.046.907**	**24.559.233.416**	**0**	**0**	**418.521.280.323**	**(32.148.683.137)**
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	440.110.071.292	10.559.892.168	0	0	450.669.963.460	393.962.046.907	24.559.233.416	0	0	418.521.280.323	(32.148.683.137)
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	358.892.330.642	381.638.900	0	0	359.273.969.542	327.242.544.203	452.692.100	0	0	327.695.236.303	(31.578.733.239)
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.697.200	0	0	0	126.697.200	95.631.200	0	0	0	95.631.200	(31.066.000)
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.247.300	0	0	0	23.247.300	23.247.300	0	0	0	23.247.300	0
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.999.900	0	0	0	4.999.900	4.999.900	0	0	0	4.999.900	0
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98.450.000	0	0	0	98.450.000	67.384.000	0	0	0	67.384.000	(31.066.000)
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	356.665.726.682	0	0	0	356.665.726.682	324.926.622.243	0	0	0	324.926.622.243	(31.739.104.439)
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	356.442.722.882	0	0	0	356.442.722.882	324.703.618.443	0	0	0	324.703.618.443	(31.739.104.439)
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	217.474.800	0	0	0	217.474.800	217.474.800	0	0	0	217.474.800	0
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.529.000	0	0	0	5.529.000	5.529.000	0	0	0	5.529.000	0
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	149.977.300	0	0	0	149.977.300	149.977.300	0	0	0	149.977.300	0
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	149.977.300	0	0	0	149.977.300	149.977.300	0	0	0	149.977.300	0
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	799.940.300	0	0	0	799.940.300	1.107.682.100	0	0	0	1.107.682.100	307.741.800
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.821.500	0	0	0	34.821.500	34.821.500	0	0	0	34.821.500	0
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	222.709.400	0	0	0	222.709.400	222.709.400	0	0	0	222.709.400	0
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.187.800	0	0	0	25.187.800	25.187.800	0	0	0	25.187.800	0
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	112.948.400	0	0	0	112.948.400	112.948.400	0	0	0	112.948.400	0
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.956.200	0	0	0	19.956.200	19.956.200	0	0	0	19.956.200	0
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.007.000	0	0	0	49.007.000	194.015.000	0	0	0	194.015.000	145.008.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	335.310.000	0	0	0	335.310.000	498.043.800	0	0	0	498.043.800	162.733.800
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	267.548.500	0	0	267.548.500	0	267.548.500	0	0	267.548.500	0
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	267.548.500	0	0	267.548.500	0	267.548.500	0	0	267.548.500	0
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	644.798.900	2.250.000	0	0	647.048.900	644.798.900	2.250.000	0	0	647.048.900	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	0	0	0	4.500.000	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.412.200	0	0	0	101.412.200	101.412.200	0	0	0	101.412.200	0
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.886.700	2.250.000	0	0	91.136.700	88.886.700	2.250.000	0	0	91.136.700	0
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	450.000.000	0	0	0	450.000.000	450.000.000	0	0	0	450.000.000	0
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	505.190.260	111.840.400	0	0	617.030.660	317.832.460	182.893.600	0	0	500.726.060	(116.304.600)
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	325.199.260	11.840.400	0	0	337.039.660	317.832.460	7.893.600	0	0	325.726.060	(11.313.600)
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	179.991.000	100.000.000	0	0	279.991.000	0	175.000.000	0	0	175.000.000	(104.991.000)
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	81.217.740.650	10.178.253.268	0	0	91.395.993.918	66.719.502.704	24.106.541.316	0	0	90.826.044.020	(569.949.898)
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	48.269.648.150	5.876.200.000	0	0	54.145.848.150	38.690.348.515	15.093.856.137	0	0	53.784.204.652	(361.643.498)
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	0	0	0	0	0	0	153.480.000	0	0	153.480.000	153.480.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	424.200.000	0	0	424.200.000	1.932.000	578.050.000	0	0	579.982.000	155.782.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0	890.500.000	0	0	890.500.000	41.398.500	890.500.000	0	0	931.898.500	41.398.500
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	2.961.500.000	0	0	2.961.500.000	171.695.500	2.961.735.000	0	0	3.133.430.500	171.930.500
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	0	350.000.000	0	0	350.000.000	0	516.524.600	0	0	516.524.600	166.524.600
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0	1.250.000.000	0	0	1.250.000.000	47.507.000	1.250.000.000	0	0	1.297.507.000	47.507.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	229.578.200	0	0	0	229.578.200	209.478.200	0	0	0	209.478.200	(20.100.000)
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5.580.575.350	0	0	0	5.580.575.350	4.261.262.350	0	0	0	4.261.262.350	(1.319.313.000)
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	864.001.100	0	0	0	864.001.100	938.999.600	0	0	0	938.999.600	74.998.500
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	41.595.493.500	0	0	0	41.595.493.500	33.018.075.365	8.693.566.537	0	0	41.711.641.902	116.148.402
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	26.463.502.700	3.961.500.000	0	0	30.425.002.700	20.707.479.689	8.672.131.911	0	0	29.379.611.600	(1.045.391.100)
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0	800.000.000	0	0	800.000.000	0	804.400.000	0	0	804.400.000	4.400.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	0	180.000.000	0	0	180.000.000	0	179.692.400	0	0	179.692.400	(307.600)
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	1.961.400.000	0	0	1.961.400.000	91.613.800	1.961.400.000	0	0	2.053.013.800	91.613.800
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	0	639.000.000	0	0	639.000.000	37.297.100	639.000.000	0	0	676.297.100	37.297.100
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	231.100.000	0	0	231.100.000	5.091.200	230.743.100	0	0	235.834.300	4.734.300
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	0	150.000.000	0	0	150.000.000	0	150.281.300	0	0	150.281.300	281.300
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	26.194.250.000	0	0	0	26.194.250.000	20.406.464.889	4.706.615.111	0	0	25.113.080.000	(1.081.170.000)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	269.252.700	0	0	0	269.252.700	167.012.700	0	0	0	167.012.700	(102.240.000)
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6.247.889.800	340.553.268	0	0	6.588.443.068	6.912.434.500	340.553.268	0	0	7.252.987.768	664.544.700
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	0	190.532.268	0	0	190.532.268	0	190.532.268	0	0	190.532.268	0
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	0	150.021.000	0	0	150.021.000	0	150.021.000	0	0	150.021.000	0
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	59.629.800	0	0	0	59.629.800	47.074.500	0	0	0	47.074.500	(12.555.300)
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.720.950.000	0	0	0	1.720.950.000	1.720.950.000	0	0	0	1.720.950.000	0
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.367.310.000	0	0	0	4.367.310.000	5.044.410.000	0	0	0	5.044.410.000	677.100.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	236.700.000	0	0	0	236.700.000	409.240.000	0	0	0	409.240.000	172.540.000
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	236.700.000	0	0	0	236.700.000	409.240.000	0	0	0	409.240.000	172.540.000
1	**02**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**259.442.753.954**	**26.869.459.556**	**0**	**0**	**286.312.213.510**	**261.451.001.731**	**27.006.424.660**	**0**	**0**	**288.457.426.391**	**2.145.212.881**
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000				DINAS KESEHATAN	144.832.699.836	15.945.375.200	0	0	160.778.075.036	138.235.050.857	15.970.995.200	0	0	154.206.046.057	(6.572.028.979)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	99.948.243.736	150.000.000	0	0	100.098.243.736	95.554.980.349	82.520.000	0	0	95.637.500.349	(4.460.743.387)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	323.640.000	0	0	0	323.640.000	298.840.000	0	0	0	298.840.000	(24.800.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.800.000	0	0	0	64.800.000	57.800.000	0	0	0	57.800.000	(7.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	233.840.000	0	0	0	233.840.000	216.040.000	0	0	0	216.040.000	(17.800.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	92.649.776.354	0	0	0	92.649.776.354	89.246.735.824	0	0	0	89.246.735.824	(3.403.040.530)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	92.320.259.954	0	0	0	92.320.259.954	88.824.479.424	0	0	0	88.824.479.424	(3.495.780.530)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	324.516.400	0	0	0	324.516.400	417.256.400	0	0	0	417.256.400	92.740.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	80.000.000	0	0	0	80.000.000	56.029.000	0	0	0	56.029.000	(23.971.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	80.000.000	0	0	0	80.000.000	56.029.000	0	0	0	56.029.000	(23.971.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	396.986.200	0	0	0	396.986.200	566.448.600	0	0	0	566.448.600	169.462.400

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000	0	0	0	35.000.000	54.999.600	0	0	0	54.999.600	19.999.600
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.980.100	0	0	0	60.980.100	80.976.900	0	0	0	80.976.900	19.996.800
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.003.000	0	0	0	30.003.000	35.003.000	0	0	0	35.003.000	5.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	51.006.100	0	0	0	51.006.100	53.006.100	0	0	0	53.006.100	2.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	0	0	0	10.000.000	39.497.000	0	0	0	39.497.000	29.497.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.997.000	0	0	0	29.997.000	42.966.000	0	0	0	42.966.000	12.969.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.000.000	0	0	0	180.000.000	260.000.000	0	0	0	260.000.000	80.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	150.000.000	0	0	150.000.000	0	82.520.000	0	0	82.520.000	(67.480.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	100.000.000	0	0	100.000.000	0	36.260.000	0	0	36.260.000	(63.740.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0	46.260.000	0	0	46.260.000	(3.740.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.773.352.450	0	0	0	5.773.352.450	4.704.447.993	0	0	0	4.704.447.993	(1.068.904.457)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	297.342.850	0	0	0	297.342.850	205.866.100	0	0	0	205.866.100	(91.476.750)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.476.009.600	0	0	0	5.476.009.600	4.498.581.893	0	0	0	4.498.581.893	(977.427.707)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	624.488.732	0	0	0	624.488.732	582.478.932	0	0	0	582.478.932	(42.009.800)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	474.997.832	0	0	0	474.997.832	411.997.832	0	0	0	411.997.832	(63.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000	0	0	0	75.000.000	90.000.000	0	0	0	90.000.000	15.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	74.490.900	0	0	0	74.490.900	80.481.100	0	0	0	80.481.100	5.990.200
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	42.996.382.400	15.795.375.200	0	0	58.791.757.600	40.800.175.608	15.888.475.200	0	0	56.688.650.808	(2.103.106.792)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6.143.276.000	15.792.085.000	0	0	21.935.361.000	5.666.753.000	15.736.185.000	0	0	21.402.938.000	(532.423.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	1.690.000.000	0	0	1.690.000.000	0	1.672.920.000	0	0	1.672.920.000	(17.080.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	14.102.085.000	0	0	14.102.085.000	0	14.063.265.000	0	0	14.063.265.000	(38.820.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	1.940.783.000	0	0	0	1.940.783.000	1.937.090.000	0	0	0	1.937.090.000	(3.693.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	4.062.070.000	0	0	0	4.062.070.000	3.589.240.000	0	0	0	3.589.240.000	(472.830.000)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	140.423.000	0	0	0	140.423.000	140.423.000	0	0	0	140.423.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36.179.435.700	750.200	0	0	36.180.185.900	34.459.391.908	750.200	0	0	34.460.142.108	(1.720.043.792)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	289.123.500	0	0	0	289.123.500	289.123.500	0	0	0	289.123.500	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	246.650.000	0	0	0	246.650.000	246.650.000	0	0	0	246.650.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	161.461.500	0	0	0	161.461.500	161.461.500	0	0	0	161.461.500	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100.520.000	0	0	0	100.520.000	100.520.000	0	0	0	100.520.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	271.000.000	0	0	0	271.000.000	271.000.000	0	0	0	271.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	321.753.600	0	0	0	321.753.600	540.866.600	0	0	0	540.866.600	219.113.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	179.814.000	0	0	0	179.814.000	179.814.000	0	0	0	179.814.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	117.865.300	0	0	0	117.865.300	117.865.300	0	0	0	117.865.300	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	402.306.800	0	0	0	402.306.800	402.306.800	0	0	0	402.306.800	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	52.000.000	0	0	0	52.000.000	52.000.000	0	0	0	52.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	466.290.000	750.200	0	0	467.040.200	466.290.000	750.200	0	0	467.040.200	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	88.990.600	0	0	0	88.990.600	69.809.400	0	0	0	69.809.400	(19.181.200)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	801.116.500	0	0	0	801.116.500	792.036.500	0	0	0	792.036.500	(9.080.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	439.632.700	0	0	0	439.632.700	439.632.700	0	0	0	439.632.700	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	143.431.100	0	0	0	143.431.100	143.431.100	0	0	0	143.431.100	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	165.000.000	0	0	0	165.000.000	165.000.000	0	0	0	165.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	581.151.900	0	0	0	581.151.900	581.151.900	0	0	0	581.151.900	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	31.114.135.200	0	0	0	31.114.135.200	28.699.529.608	0	0	0	28.699.529.608	(2.414.605.592)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	45.608.000	0	0	0	45.608.000	82.048.000	0	0	0	82.048.000	36.440.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	91.585.000	0	0	0	91.585.000	558.855.000	0	0	0	558.855.000	467.270.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	138.260.700	0	0	0	138.260.700	138.620.700	149.000.000	0	0	287.620.700	149.360.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	74.785.300	0	0	0	74.785.300	74.785.300	0	0	0	74.785.300	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	63.475.400	0	0	0	63.475.400	63.835.400	149.000.000	0	0	212.835.400	149.360.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	535.410.000	2.540.000	0	0	537.950.000	535.410.000	2.540.000	0	0	537.950.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	307.410.000	2.540.000	0	0	309.950.000	307.410.000	2.540.000	0	0	309.950.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	228.000.000	0	0	0	228.000.000	228.000.000	0	0	0	228.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.233.079.700	0	0	0	1.233.079.700	1.233.079.700	0	0	0	1.233.079.700	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	103.000.000	0	0	0	103.000.000	103.000.000	0	0	0	103.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	53.000.000	0	0	0	53.000.000	53.000.000	0	0	0	53.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	135.000.000	0	0	0	135.000.000	135.000.000	0	0	0	135.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	60.000.000	0	0	0	60.000.000	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	35.000.000	0	0	0	35.000.000	35.000.000	0	0	0	35.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	40.000.000	0	0	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	995.079.700	0	0	0	995.079.700	995.079.700	0	0	0	995.079.700	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	995.079.700	0	0	0	995.079.700	995.079.700	0	0	0	995.079.700	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	564.994.000	0	0	0	564.994.000	556.815.200	0	0	0	556.815.200	(8.178.800)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	40.000.000	0	0	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	40.000.000	0	0	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	85.000.000	0	0	0	85.000.000	85.000.000	0	0	0	85.000.000	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	40.000.000	0	0	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	45.000.000	0	0	0	45.000.000	45.000.000	0	0	0	45.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	187.800.000	0	0	0	187.800.000	187.800.000	0	0	0	187.800.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	187.800.000	0	0	0	187.800.000	187.800.000	0	0	0	187.800.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	40.000.000	0	0	0	40.000.000	34.280.000	0	0	0	34.280.000	(5.720.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	40.000.000	0	0	0	40.000.000	34.280.000	0	0	0	34.280.000	(5.720.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	30.000.000	0	0	0	30.000.000	27.541.200	0	0	0	27.541.200	(2.458.800)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	30.000.000	0	0	0	30.000.000	27.541.200	0	0	0	27.541.200	(2.458.800)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	182.194.000	0	0	0	182.194.000	182.194.000	0	0	0	182.194.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	182.194.000	0	0	0	182.194.000	182.194.000	0	0	0	182.194.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	90.000.000	0	0	0	90.000.000	90.000.000	0	0	0	90.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000	0	0	0	90.000.000	90.000.000	0	0	0	90.000.000	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	90.000.000	0	0	0	90.000.000	90.000.000	0	0	0	90.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001				PUSKESMAS AEK RAJA	729.453.500	0	0	0	729.453.500	729.453.500	0	0	0	729.453.500	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	681.903.500	0	0	0	681.903.500	709.493.500	0	0	0	709.493.500	27.590.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.272.000	0	0	0	7.272.000	7.272.000	0	0	0	7.272.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	7.272.000	0	0	0	7.272.000	7.272.000	0	0	0	7.272.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	674.631.500	0	0	0	674.631.500	702.221.500	0	0	0	702.221.500	27.590.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	53.430.000	0	0	0	53.430.000	80.750.000	0	0	0	80.750.000	27.320.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	29.250.000	0	0	0	29.250.000	0	0	0	0	0	(29.250.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	28.700.000	0	0	0	28.700.000	0	0	0	0	0	(28.700.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	15.000.000	0	0	0	15.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	(12.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.300.000	0	0	0	13.300.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	(7.300.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	17.300.000	0	0	0	17.300.000	6.525.000	0	0	0	6.525.000	(10.775.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	(10.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	(5.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.400.000	0	0	0	8.400.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	(2.400.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.900.000	0	0	0	12.900.000	12.900.000	0	0	0	12.900.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	8.400.000	0	0	0	8.400.000	8.300.000	0	0	0	8.300.000	(100.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	171.630.000	0	0	0	171.630.000	245.080.000	0	0	0	245.080.000	73.450.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	25.300.000	0	0	0	25.300.000	5.300.000	0	0	0	5.300.000	(20.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	30.300.000	0	0	0	30.300.000	84.010.000	0	0	0	84.010.000	53.710.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	28.550.000	0	0	0	28.550.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	(22.550.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	0	0	0	0	3.200.000	0	0	0	3.200.000	3.200.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	22.350.000	0	0	0	22.350.000	69.500.000	0	0	0	69.500.000	47.150.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	169.821.500	0	0	0	169.821.500	148.656.500	0	0	0	148.656.500	(21.165.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	(10.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	47.550.000	0	0	0	47.550.000	19.960.000	0	0	0	19.960.000	(27.590.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47.550.000	0	0	0	47.550.000	19.960.000	0	0	0	19.960.000	(27.590.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	47.550.000	0	0	0	47.550.000	19.960.000	0	0	0	19.960.000	(27.590.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002				PUSKESMAS BUTAR	738.485.000	0	0	0	738.485.000	738.485.000	0	0	0	738.485.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	738.485.000	0	0	0	738.485.000	715.385.000	0	0	0	715.385.000	(23.100.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.368.000	0	0	0	7.368.000	7.368.000	0	0	0	7.368.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	7.368.000	0	0	0	7.368.000	7.368.000	0	0	0	7.368.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	731.117.000	0	0	0	731.117.000	708.017.000	0	0	0	708.017.000	(23.100.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	35.200.000	0	0	0	35.200.000	57.080.000	0	0	0	57.080.000	21.880.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	50.500.000	0	0	0	50.500.000	0	0	0	0	0	(50.500.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	16.200.000	0	0	0	16.200.000	0	0	0	0	0	(16.200.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	72.400.000	0	0	0	72.400.000	4.100.000	0	0	0	4.100.000	(68.300.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18.700.000	0	0	0	18.700.000	8.400.000	0	0	0	8.400.000	(10.300.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	0	0	0	0	2.400.000	0	0	0	2.400.000	2.400.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	8.400.000	0	0	0	8.400.000	48.000.000	0	0	0	48.000.000	39.600.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	21.800.000	0	0	0	21.800.000	0	0	0	0	0	(21.800.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	40.240.000	0	0	0	40.240.000	0	0	0	0	0	(40.240.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.000.000	0	0	0	10.000.000	3.600.000	0	0	0	3.600.000	(6.400.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.600.000	0	0	0	15.600.000	8.400.000	0	0	0	8.400.000	(7.200.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.300.000	0	0	0	6.300.000	1.850.000	0	0	0	1.850.000	(4.450.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	4.600.000	0	0	0	4.600.000	0	0	0	0	0	(4.600.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	188.987.000	0	0	0	188.987.000	288.817.500	0	0	0	288.817.500	99.830.500
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4.990.000	0	0	0	4.990.000	94.819.500	0	0	0	94.819.500	89.829.500
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	38.580.000	0	0	0	38.580.000	3.100.000	0	0	0	3.100.000	(35.480.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	200.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	43.290.000	0	0	0	43.290.000	29.920.000	0	0	0	29.920.000	(13.370.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	150.330.000	0	0	0	150.330.000	150.330.000	0	0	0	150.330.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	0	0	0	0	23.100.000	0	0	0	23.100.000	23.100.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	23.100.000	0	0	0	23.100.000	23.100.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	0	0	0	0	23.100.000	0	0	0	23.100.000	23.100.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003				PUSKESMAS GAROGA	929.829.000	0	0	0	929.829.000	929.829.000	0	0	0	929.829.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	819.591.000	0	0	0	819.591.000	819.591.000	0	0	0	819.591.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9.312.000	0	0	0	9.312.000	9.312.000	0	0	0	9.312.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	9.312.000	0	0	0	9.312.000	9.312.000	0	0	0	9.312.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	810.279.000	0	0	0	810.279.000	810.279.000	0	0	0	810.279.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	196.850.000	0	0	0	196.850.000	196.850.000	0	0	0	196.850.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	(10.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	(10.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	93.695.000	0	0	0	93.695.000	93.695.000	0	0	0	93.695.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	(5.000.000)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	28.840.000	0	0	0	28.840.000	28.840.000	0	0	0	28.840.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	56.500.000	0	0	0	56.500.000	96.500.000	0	0	0	96.500.000	40.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	294.394.000	0	0	0	294.394.000	294.394.000	0	0	0	294.394.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	(20.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	110.238.000	0	0	0	110.238.000	110.238.000	0	0	0	110.238.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	110.238.000	0	0	0	110.238.000	110.238.000	0	0	0	110.238.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	110.238.000	0	0	0	110.238.000	110.238.000	0	0	0	110.238.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004				PUSKESMAS HUTABAGINDA	990.797.500	0	0	0	990.797.500	990.797.500	0	0	0	990.797.500	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	990.797.500	0	0	0	990.797.500	970.837.500	0	0	0	970.837.500	(19.960.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.312.000	0	0	0	10.312.000	10.312.000	0	0	0	10.312.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	10.312.000	0	0	0	10.312.000	10.312.000	0	0	0	10.312.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	980.485.500	0	0	0	980.485.500	960.525.500	0	0	0	960.525.500	(19.960.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	69.000.000	0	0	0	69.000.000	146.000.000	0	0	0	146.000.000	77.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	88.550.000	0	0	0	88.550.000	0	0	0	0	0	(88.550.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	134.100.000	0	0	0	134.100.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	(129.100.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	42.600.000	0	0	0	42.600.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	(32.600.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	18.950.000	0	0	0	18.950.000	12.000.000	0	0	0	12.000.000	(6.950.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	12.450.000	0	0	0	12.450.000	12.450.000	0	0	0	12.450.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	13.500.000	0	0	0	13.500.000	14.500.000	0	0	0	14.500.000	1.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	26.590.000	0	0	0	26.590.000	21.600.000	0	0	0	21.600.000	(4.990.000)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	0	0	0	0	7.600.000	0	0	0	7.600.000	7.600.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	(9.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	224.497.000	0	0	0	224.497.000	356.961.000	0	0	0	356.961.000	132.464.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	48.000.000	0	0	0	48.000.000	0	0	0	0	0	(48.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.090.000	0	0	0	12.090.000	7.100.000	0	0	0	7.100.000	(4.990.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	0	0	0	0	65.436.000	0	0	0	65.436.000	65.436.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	55.480.000	0	0	0	55.480.000	86.100.000	0	0	0	86.100.000	30.620.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	201.778.500	0	0	0	201.778.500	201.778.500	0	0	0	201.778.500	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	19.900.000	0	0	0	19.900.000	0	0	0	0	0	(19.900.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	0	0	0	0	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	0	0	0	0	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005				PUSKESMAS JANJI ANGKOLA	789.614.000	0	0	0	789.614.000	789.614.000	0	0	0	789.614.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	789.614.000	0	0	0	789.614.000	769.654.000	0	0	0	769.654.000	(19.960.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.888.000	0	0	0	7.888.000	7.888.000	0	0	0	7.888.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	7.888.000	0	0	0	7.888.000	7.888.000	0	0	0	7.888.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	781.726.000	0	0	0	781.726.000	761.766.000	0	0	0	761.766.000	(19.960.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	124.850.000	0	0	0	124.850.000	98.900.000	0	0	0	98.900.000	(25.950.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	44.000.000	0	0	0	44.000.000	0	0	0	0	0	(44.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	21.100.000	0	0	0	21.100.000	0	0	0	0	0	(21.100.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	6.500.000	0	0	0	6.500.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	(3.500.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000	12.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	9.130.000	0	0	0	9.130.000	9.130.000	0	0	0	9.130.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	11.900.000	0	0	0	11.900.000	9.900.000	0	0	0	9.900.000	(2.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	19.800.000	0	0	0	19.800.000	19.800.000	0	0	0	19.800.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	0	0	0	0	6.600.000	0	0	0	6.600.000	6.600.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	18.300.000	0	0	0	18.300.000	0	0	0	0	0	(18.300.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	168.051.000	0	0	0	168.051.000	265.601.000	0	0	0	265.601.000	97.550.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	82.779.000	0	0	0	82.779.000	46.819.000	0	0	0	46.819.000	(35.960.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	26.500.000	0	0	0	26.500.000	11.000.000	0	0	0	11.000.000	(15.500.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	73.100.000	0	0	0	73.100.000	97.300.000	0	0	0	97.300.000	24.200.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	160.716.000	0	0	0	160.716.000	160.716.000	0	0	0	160.716.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	0	0	0	0	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	0	0	0	0	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006				PUSKESMAS LUMBAN SINAGA	858.185.000	0	0	0	858.185.000	858.185.000	0	0	0	858.185.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	858.185.000	0	0	0	858.185.000	838.225.000	0	0	0	838.225.000	(19.960.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9.215.000	0	0	0	9.215.000	9.215.000	0	0	0	9.215.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	9.215.000	0	0	0	9.215.000	9.215.000	0	0	0	9.215.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	848.970.000	0	0	0	848.970.000	829.010.000	0	0	0	829.010.000	(19.960.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	97.660.000	0	0	0	97.660.000	123.100.000	0	0	0	123.100.000	25.440.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	(5.000.000)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	(3.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	14.000.000	0	0	0	14.000.000	97.306.600	0	0	0	97.306.600	83.306.600
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	15.200.000	0	0	0	15.200.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	(5.200.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	7.000.000	0	0	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	60.007.000	0	0	0	60.007.000	13.720.000	0	0	0	13.720.000	(46.287.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	(10.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	(6.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12.623.500	0	0	0	12.623.500	14.000.000	0	0	0	14.000.000	1.376.500
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.010.000	0	0	0	5.010.000	10.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.800.000	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	(1.800.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	22.437.000	0	0	0	22.437.000	197.204.000	0	0	0	197.204.000	174.767.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19.154.000	0	0	0	19.154.000	7.100.000	0	0	0	7.100.000	(12.054.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	77.654.000	0	0	0	77.654.000	66.487.200	0	0	0	66.487.200	(11.166.800)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	28.900.000	0	0	0	28.900.000	23.084.000	0	0	0	23.084.000	(5.816.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10.927.000	0	0	0	10.927.000	67.613.200	0	0	0	67.613.200	56.686.200
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	373.953.500	0	0	0	373.953.500	174.585.000	0	0	0	174.585.000	(199.368.500)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	55.100.000	0	0	0	55.100.000	0	0	0	0	0	(55.100.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	23.554.000	0	0	0	23.554.000	18.300.000	0	0	0	18.300.000	(5.254.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	0	0	0	0	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	0	0	0	0	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007				PUSKESMAS MUARA	884.694.000	0	0	0	884.694.000	884.694.000	0	0	0	884.694.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	864.564.000	0	0	0	864.564.000	864.734.000	0	0	0	864.734.000	170.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8.820.000	0	0	0	8.820.000	8.820.000	0	0	0	8.820.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	8.820.000	0	0	0	8.820.000	8.820.000	0	0	0	8.820.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	855.744.000	0	0	0	855.744.000	855.914.000	0	0	0	855.914.000	170.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	120.720.000	0	0	0	120.720.000	204.465.000	0	0	0	204.465.000	83.745.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	25.252.500	0	0	0	25.252.500	0	0	0	0	0	(25.252.500)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	(10.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	120.375.600	0	0	0	120.375.600	204.290.000	0	0	0	204.290.000	83.914.400
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	33.613.400	0	0	0	33.613.400	10.000.000	0	0	0	10.000.000	(23.613.400)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	40.266.000	0	0	0	40.266.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	(34.266.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	31.000.000	0	0	0	31.000.000	12.450.000	0	0	0	12.450.000	(18.550.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	21.180.000	0	0	0	21.180.000	0	0	0	0	0	(21.180.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	(5.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.000.000	0	0	0	8.000.000	13.500.000	0	0	0	13.500.000	5.500.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	21.700.000	0	0	0	21.700.000	22.050.000	0	0	0	22.050.000	350.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	7.850.000	0	0	0	7.850.000	7.100.000	0	0	0	7.100.000	(750.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	63.784.000	0	0	0	63.784.000	30.300.000	0	0	0	30.300.000	(33.484.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	(5.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	46.839.000	0	0	0	46.839.000	11.000.000	0	0	0	11.000.000	(35.839.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	63.537.500	0	0	0	63.537.500	38.958.000	0	0	0	38.958.000	(24.579.500)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.500.000	0	0	0	7.500.000	7.000.000	0	0	0	7.000.000	(500.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000	1.400.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13.500.000	0	0	0	13.500.000	70.000.000	0	0	0	70.000.000	56.500.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	180.326.000	0	0	0	180.326.000	190.401.000	0	0	0	190.401.000	10.075.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	0	0	0	0	27.000.000	0	0	0	27.000.000	27.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	(5.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	25.300.000	0	0	0	25.300.000	0	0	0	0	0	(25.300.000)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	20.130.000	0	0	0	20.130.000	19.960.000	0	0	0	19.960.000	(170.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.130.000	0	0	0	20.130.000	19.960.000	0	0	0	19.960.000	(170.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	20.130.000	0	0	0	20.130.000	19.960.000	0	0	0	19.960.000	(170.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008				PUSKESMAS ONAN HASANG	858.536.000	0	0	0	858.536.000	858.536.000	0	0	0	858.536.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	858.536.000	0	0	0	858.536.000	843.536.000	0	0	0	843.536.000	(15.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8.586.000	0	0	0	8.586.000	8.586.000	0	0	0	8.586.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	8.586.000	0	0	0	8.586.000	8.586.000	0	0	0	8.586.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	849.950.000	0	0	0	849.950.000	834.950.000	0	0	0	834.950.000	(15.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	25.000.000	0	0	0	25.000.000	55.000.000	0	0	0	55.000.000	30.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	(15.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	(15.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	60.250.500	0	0	0	60.250.500	60.250.500	0	0	0	60.250.500	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.400.000	0	0	0	25.400.000	55.400.000	0	0	0	55.400.000	30.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	16.500.000	0	0	0	16.500.000	16.500.000	0	0	0	16.500.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16.500.000	0	0	0	16.500.000	16.500.000	0	0	0	16.500.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	(10.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	202.838.000	0	0	0	202.838.000	222.838.000	0	0	0	222.838.000	20.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.100.000	0	0	0	7.100.000	7.100.000	0	0	0	7.100.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	60.500.000	0	0	0	60.500.000	60.500.000	0	0	0	60.500.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	120.000.000	0	0	0	120.000.000	120.000.000	0	0	0	120.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	174.861.500	0	0	0	174.861.500	174.861.500	0	0	0	174.861.500	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	91.000.000	0	0	0	91.000.000	0	0	0	0	0	(91.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009				PUSKESMAS PANGARIBUAN	856.760.000	0	0	0	856.760.000	856.760.000	0	0	0	856.760.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	856.760.000	0	0	0	856.760.000	836.800.000	0	0	0	836.800.000	(19.960.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8.568.000	0	0	0	8.568.000	8.568.000	0	0	0	8.568.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	8.568.000	0	0	0	8.568.000	8.568.000	0	0	0	8.568.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	848.192.000	0	0	0	848.192.000	828.232.000	0	0	0	828.232.000	(19.960.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	65.800.000	0	0	0	65.800.000	103.300.000	0	0	0	103.300.000	37.500.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	43.500.000	0	0	0	43.500.000	0	0	0	0	0	(43.500.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	9.100.000	0	0	0	9.100.000	0	0	0	0	0	(9.100.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100.600.000	0	0	0	100.600.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	(95.600.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	16.600.000	0	0	0	16.600.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	(6.600.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	8.000.000	0	0	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	9.960.000	0	0	0	9.960.000	9.960.000	0	0	0	9.960.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	24.400.000	0	0	0	24.400.000	0	0	0	0	0	(24.400.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	11.800.000	0	0	0	11.800.000	10.800.000	0	0	0	10.800.000	(1.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	35.790.000	0	0	0	35.790.000	30.800.000	0	0	0	30.800.000	(4.990.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.600.000	0	0	0	6.600.000	6.600.000	0	0	0	6.600.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	(10.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	184.738.000	0	0	0	184.738.000	294.438.000	0	0	0	294.438.000	109.700.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.100.000	0	0	0	7.100.000	7.100.000	0	0	0	7.100.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	21.369.000	0	0	0	21.369.000	40.779.000	0	0	0	40.779.000	19.410.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	76.900.000	0	0	0	76.900.000	11.000.000	0	0	0	11.000.000	(65.900.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	41.380.000	0	0	0	41.380.000	108.900.000	0	0	0	108.900.000	67.520.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	174.555.000	0	0	0	174.555.000	174.555.000	0	0	0	174.555.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	0	0	0	0	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	0	0	0	0	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010				PUSKESMAS PANIARAN	730.581.500	0	0	0	730.581.500	730.581.500	0	0	0	730.581.500	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	730.581.500	0	0	0	730.581.500	710.621.500	0	0	0	710.621.500	(19.960.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.244.000	0	0	0	7.244.000	7.244.000	0	0	0	7.244.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	7.244.000	0	0	0	7.244.000	7.244.000	0	0	0	7.244.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	723.337.500	0	0	0	723.337.500	703.377.500	0	0	0	703.377.500	(19.960.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100.285.000	0	0	0	100.285.000	70.900.000	0	0	0	70.900.000	(29.385.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	24.580.000	0	0	0	24.580.000	0	0	0	0	0	(24.580.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	24.000.000	0	0	0	24.000.000	0	0	0	0	0	(24.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	17.000.000	0	0	0	17.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	(12.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.000.000	0	0	0	14.000.000	14.000.000	0	0	0	14.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	12.150.000	0	0	0	12.150.000	12.150.000	0	0	0	12.150.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	0	0	0	0	22.076.000	0	0	0	22.076.000	22.076.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.400.000	0	0	0	5.400.000	5.400.000	0	0	0	5.400.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	36.280.000	0	0	0	36.280.000	26.300.000	0	0	0	26.300.000	(9.980.000)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	0	0	0	0	6.600.000	0	0	0	6.600.000	6.600.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	55.000.000	0	0	0	55.000.000	0	0	0	0	0	(55.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	149.151.000	0	0	0	149.151.000	216.151.000	0	0	0	216.151.000	67.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.090.000	0	0	0	12.090.000	7.100.000	0	0	0	7.100.000	(4.990.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	18.950.000	0	0	0	18.950.000	53.555.000	0	0	0	53.555.000	34.605.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.300.000	0	0	0	9.300.000	11.000.000	0	0	0	11.000.000	1.700.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	0	0	0	0	3.200.000	0	0	0	3.200.000	3.200.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	58.190.000	0	0	0	58.190.000	94.900.000	0	0	0	94.900.000	36.710.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	149.045.500	0	0	0	149.045.500	149.045.500	0	0	0	149.045.500	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	37.916.000	0	0	0	37.916.000	0	0	0	0	0	(37.916.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	0	0	0	0	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	0	0	0	0	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011				PUSKESMAS PARMONANGAN	848.911.000	0	0	0	848.911.000	848.911.000	0	0	0	848.911.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	848.911.000	0	0	0	848.911.000	828.951.000	0	0	0	828.951.000	(19.960.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8.496.000	0	0	0	8.496.000	8.496.000	0	0	0	8.496.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	8.496.000	0	0	0	8.496.000	8.496.000	0	0	0	8.496.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	840.415.000	0	0	0	840.415.000	820.455.000	0	0	0	820.455.000	(19.960.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	76.050.000	0	0	0	76.050.000	91.100.000	0	0	0	91.100.000	15.050.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	(20.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	21.000.000	0	0	0	21.000.000	0	0	0	0	0	(21.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	76.200.000	0	0	0	76.200.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	(70.200.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	24.000.000	0	0	0	24.000.000	12.000.000	0	0	0	12.000.000	(12.000.000)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	19.000.000	0	0	0	19.000.000	9.000.000	0	0	0	9.000.000	(10.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	42.570.000	0	0	0	42.570.000	7.470.000	0	0	0	7.470.000	(35.100.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	14.990.000	0	0	0	14.990.000	0	0	0	0	0	(14.990.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	18.110.000	0	0	0	18.110.000	0	0	0	0	0	(18.110.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	15.000.000	0	0	0	15.000.000	9.000.000	0	0	0	9.000.000	(6.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	51.435.000	0	0	0	51.435.000	30.300.000	0	0	0	30.300.000	(21.135.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	0	0	0	0	6.600.000	0	0	0	6.600.000	6.600.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	187.484.000	0	0	0	187.484.000	276.489.000	0	0	0	276.489.000	89.005.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20.915.000	0	0	0	20.915.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	(15.915.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	41.350.000	0	0	0	41.350.000	83.295.000	0	0	0	83.295.000	41.945.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	20.000.000	0	0	0	20.000.000	11.000.000	0	0	0	11.000.000	(9.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	23.550.000	0	0	0	23.550.000	94.400.000	0	0	0	94.400.000	70.850.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	168.761.000	0	0	0	168.761.000	172.801.000	0	0	0	172.801.000	4.040.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	0	0	0	0	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	0	0	0	0	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012				PUSKESMAS PARSINGKAMAN	883.886.500	0	0	0	883.886.500	883.886.500	0	0	0	883.886.500	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	863.926.500	0	0	0	863.926.500	863.926.500	0	0	0	863.926.500	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8.838.000	0	0	0	8.838.000	8.838.000	0	0	0	8.838.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	8.838.000	0	0	0	8.838.000	8.838.000	0	0	0	8.838.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	855.088.500	0	0	0	855.088.500	855.088.500	0	0	0	855.088.500	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	126.775.000	0	0	0	126.775.000	129.000.000	0	0	0	129.000.000	2.225.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5.500.000	0	0	0	5.500.000	0	0	0	0	0	(5.500.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	(5.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	113.750.000	0	0	0	113.750.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	(108.750.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	11.620.000	0	0	0	11.620.000	11.620.000	0	0	0	11.620.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	13.100.000	0	0	0	13.100.000	0	0	0	0	0	(13.100.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	25.320.000	0	0	0	25.320.000	0	0	0	0	0	(25.320.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	14.000.000	0	0	0	14.000.000	12.600.000	0	0	0	12.600.000	(1.400.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	25.800.000	0	0	0	25.800.000	25.800.000	0	0	0	25.800.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.600.000	0	0	0	6.600.000	6.600.000	0	0	0	6.600.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	(9.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	196.130.000	0	0	0	196.130.000	312.155.000	0	0	0	312.155.000	116.025.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	11.027.000	0	0	0	11.027.000	36.347.000	0	0	0	36.347.000	25.320.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	55.800.000	0	0	0	55.800.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	(45.800.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000	1.400.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	34.600.000	0	0	0	34.600.000	100.500.000	0	0	0	100.500.000	65.900.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	180.066.500	0	0	0	180.066.500	180.066.500	0	0	0	180.066.500	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000	0	0	0	19.960.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000	0	0	0	19.960.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000	0	0	0	19.960.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013				PUSKESMAS SARULLA	850.304.500	0	0	0	850.304.500	850.304.500	0	0	0	850.304.500	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	850.304.500	0	0	0	850.304.500	830.344.500	0	0	0	830.344.500	(19.960.000)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8.502.000	0	0	0	8.502.000	8.502.000	0	0	0	8.502.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	8.502.000	0	0	0	8.502.000	8.502.000	0	0	0	8.502.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	841.802.500	0	0	0	841.802.500	821.842.500	0	0	0	821.842.500	(19.960.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	71.200.000	0	0	0	71.200.000	118.200.000	0	0	0	118.200.000	47.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	54.000.000	0	0	0	54.000.000	0	0	0	0	0	(54.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	9.100.000	0	0	0	9.100.000	0	0	0	0	0	(9.100.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	111.900.000	0	0	0	111.900.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	(105.900.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.000.000	0	0	0	13.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	(3.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	16.600.000	0	0	0	16.600.000	6.600.000	0	0	0	6.600.000	(10.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	10.790.000	0	0	0	10.790.000	10.790.000	0	0	0	10.790.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	14.600.000	0	0	0	14.600.000	0	0	0	0	0	(14.600.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	22.600.000	0	0	0	22.600.000	0	0	0	0	0	(22.600.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.000.000	0	0	0	2.000.000	11.700.000	0	0	0	11.700.000	9.700.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	17.300.000	0	0	0	17.300.000	17.300.000	0	0	0	17.300.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.600.000	0	0	0	6.600.000	6.600.000	0	0	0	6.600.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	(8.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	180.917.000	0	0	0	180.917.000	302.517.000	0	0	0	302.517.000	121.600.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.100.000	0	0	0	7.100.000	7.100.000	0	0	0	7.100.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	33.602.700	0	0	0	33.602.700	46.577.000	0	0	0	46.577.000	12.974.300
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	38.400.000	0	0	0	38.400.000	9.900.000	0	0	0	9.900.000	(28.500.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	51.990.300	0	0	0	51.990.300	90.500.000	0	0	0	90.500.000	38.509.700
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	172.102.500	0	0	0	172.102.500	173.058.500	0	0	0	173.058.500	956.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	0	0	0	0	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	0	0	0	0	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014				PUSKESMAS SIATAS BARITA	827.508.500	0	0	0	827.508.500	827.508.500	0	0	0	827.508.500	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	827.508.500	0	0	0	827.508.500	807.548.500	0	0	0	807.548.500	(19.960.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8.278.000	0	0	0	8.278.000	8.278.000	0	0	0	8.278.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	8.278.000	0	0	0	8.278.000	8.278.000	0	0	0	8.278.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	819.230.500	0	0	0	819.230.500	799.270.500	0	0	0	799.270.500	(19.960.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	58.320.000	0	0	0	58.320.000	93.800.000	0	0	0	93.800.000	35.480.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	(8.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	(9.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	58.620.000	0	0	0	58.620.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	(55.620.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	15.000.000	0	0	0	15.000.000	8.000.000	0	0	0	8.000.000	(7.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000	12.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	60.150.000	0	0	0	60.150.000	10.560.000	0	0	0	10.560.000	(49.590.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.800.000	0	0	0	10.800.000	800.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	0	0	0	0	25.800.000	0	0	0	25.800.000	25.800.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	0	0	0	0	6.600.000	0	0	0	6.600.000	6.600.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	168.837.000	0	0	0	168.837.000	279.037.000	0	0	0	279.037.000	110.200.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	49.950.000	0	0	0	49.950.000	0	0	0	0	0	(49.950.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	29.210.000	0	0	0	29.210.000	7.100.000	0	0	0	7.100.000	(22.110.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	87.016.000	0	0	0	87.016.000	58.296.000	0	0	0	58.296.000	(28.720.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	17.000.000	0	0	0	17.000.000	9.000.000	0	0	0	9.000.000	(8.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	79.550.000	0	0	0	79.550.000	101.700.000	0	0	0	101.700.000	22.150.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	168.577.500	0	0	0	168.577.500	168.577.500	0	0	0	168.577.500	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	0	0	0	0	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	0	0	0	0	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015				PUSKESMAS SIBORONGBORONG	900.284.000	0	0	0	900.284.000	900.284.000	0	0	0	900.284.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	900.284.000	0	0	0	900.284.000	880.324.000	0	0	0	880.324.000	(19.960.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8.916.000	0	0	0	8.916.000	8.916.000	0	0	0	8.916.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	8.916.000	0	0	0	8.916.000	8.916.000	0	0	0	8.916.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	891.368.000	0	0	0	891.368.000	871.408.000	0	0	0	871.408.000	(19.960.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	110.000.000	0	0	0	110.000.000	110.500.000	0	0	0	110.500.000	500.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	16.000.000	0	0	0	16.000.000	0	0	0	0	0	(16.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	78.000.000	0	0	0	78.000.000	0	0	0	0	0	(78.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	44.000.000	0	0	0	44.000.000	16.000.000	0	0	0	16.000.000	(28.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	0	0	0	0	13.500.000	0	0	0	13.500.000	13.500.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	0	0	0	0	8.130.000	0	0	0	8.130.000	8.130.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.200.000	0	0	0	10.200.000	9.000.000	0	0	0	9.000.000	(1.200.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	30.790.000	0	0	0	30.790.000	25.800.000	0	0	0	25.800.000	(4.990.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	0	0	0	0	6.600.000	0	0	0	6.600.000	6.600.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	(8.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	205.740.000	0	0	0	205.740.000	300.340.000	0	0	0	300.340.000	94.600.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	0	0	0	0	7.100.000	0	0	0	7.100.000	7.100.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	102.323.000	0	0	0	102.323.000	73.593.000	0	0	0	73.593.000	(28.730.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	20.190.000	0	0	0	20.190.000	9.000.000	0	0	0	9.000.000	(11.190.000)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000	1.200.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	70.590.000	0	0	0	70.590.000	99.200.000	0	0	0	99.200.000	28.610.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	183.445.000	0	0	0	183.445.000	183.445.000	0	0	0	183.445.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	12.090.000	0	0	0	12.090.000	0	0	0	0	0	(12.090.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	0	0	0	0	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	0	0	0	0	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016				PUSKESMAS SILANGIT	730.631.500	0	0	0	730.631.500	730.631.500	0	0	0	730.631.500	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	730.631.500	0	0	0	730.631.500	710.671.500	0	0	0	710.671.500	(19.960.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.270.000	0	0	0	7.270.000	7.270.000	0	0	0	7.270.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	7.270.000	0	0	0	7.270.000	7.270.000	0	0	0	7.270.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	723.361.500	0	0	0	723.361.500	703.401.500	0	0	0	703.401.500	(19.960.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	71.000.000	0	0	0	71.000.000	71.000.000	0	0	0	71.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	(1.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	(5.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	49.500.000	0	0	0	49.500.000	12.000.000	0	0	0	12.000.000	(37.500.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	12.000.000	0	0	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	5.250.000	0	0	0	5.250.000	5.250.000	0	0	0	5.250.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	4.990.000	0	0	0	4.990.000	0	0	0	0	0	(4.990.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	14.100.000	0	0	0	14.100.000	0	0	0	0	0	(14.100.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.500.000	0	0	0	7.500.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	(1.500.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	30.230.000	0	0	0	30.230.000	20.250.000	0	0	0	20.250.000	(9.980.000)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.300.000	0	0	0	6.300.000	6.300.000	0	0	0	6.300.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	176.292.000	0	0	0	176.292.000	232.892.000	0	0	0	232.892.000	56.600.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	47.900.000	0	0	0	47.900.000	21.400.000	0	0	0	21.400.000	(26.500.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.300.000	0	0	0	15.300.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	(10.300.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	32.882.000	0	0	0	32.882.000	47.792.000	0	0	0	47.792.000	14.910.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10.000.000	0	0	0	10.000.000	11.000.000	0	0	0	11.000.000	1.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	80.000.000	0	0	0	80.000.000	90.900.000	0	0	0	90.900.000	10.900.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	149.117.500	0	0	0	149.117.500	149.117.500	0	0	0	149.117.500	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	0	0	0	0	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	0	0	0	0	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017				PUSKESMAS SIMANGUMBAN	779.906.000	0	0	0	779.906.000	779.906.000	0	0	0	779.906.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	777.106.000	0	0	0	777.106.000	759.946.000	0	0	0	759.946.000	(17.160.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.800.000	0	0	0	7.800.000	7.800.000	0	0	0	7.800.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	7.800.000	0	0	0	7.800.000	7.800.000	0	0	0	7.800.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	769.306.000	0	0	0	769.306.000	752.146.000	0	0	0	752.146.000	(17.160.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	58.500.000	0	0	0	58.500.000	82.700.000	0	0	0	82.700.000	24.200.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	38.500.000	0	0	0	38.500.000	0	0	0	0	0	(38.500.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	14.000.000	0	0	0	14.000.000	0	0	0	0	0	(14.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	72.400.000	0	0	0	72.400.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	(67.400.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.600.000	0	0	0	20.600.000	14.000.000	0	0	0	14.000.000	(6.600.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	12.000.000	0	0	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	7.040.000	0	0	0	7.040.000	7.040.000	0	0	0	7.040.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.200.000	0	0	0	7.200.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	2.800.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	27.790.000	0	0	0	27.790.000	22.800.000	0	0	0	22.800.000	(4.990.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.300.000	0	0	0	6.300.000	6.300.000	0	0	0	6.300.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	(10.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	159.268.000	0	0	0	159.268.000	253.968.000	0	0	0	253.968.000	94.700.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.990.000	0	0	0	9.990.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	(4.990.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	56.603.000	0	0	0	56.603.000	56.603.000	0	0	0	56.603.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	84.400.000	0	0	0	84.400.000	11.000.000	0	0	0	11.000.000	(73.400.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	25.880.000	0	0	0	25.880.000	100.900.000	0	0	0	100.900.000	75.020.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	158.835.000	0	0	0	158.835.000	158.835.000	0	0	0	158.835.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.800.000	0	0	0	2.800.000	19.960.000	0	0	0	19.960.000	17.160.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.800.000	0	0	0	2.800.000	19.960.000	0	0	0	19.960.000	17.160.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.800.000	0	0	0	2.800.000	19.960.000	0	0	0	19.960.000	17.160.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018				PUSKESMAS SIPAHUTAR	928.026.000	0	0	0	928.026.000	928.026.000	0	0	0	928.026.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	928.026.000	0	0	0	928.026.000	908.066.000	0	0	0	908.066.000	(19.960.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9.276.000	0	0	0	9.276.000	9.276.000	0	0	0	9.276.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	9.276.000	0	0	0	9.276.000	9.276.000	0	0	0	9.276.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	918.750.000	0	0	0	918.750.000	898.790.000	0	0	0	898.790.000	(19.960.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	86.100.000	0	0	0	86.100.000	136.000.000	0	0	0	136.000.000	49.900.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	70.000.000	0	0	0	70.000.000	0	0	0	0	0	(70.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	11.000.000	0	0	0	11.000.000	0	0	0	0	0	(11.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	117.000.000	0	0	0	117.000.000	35.000.000	0	0	0	35.000.000	(82.000.000)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	16.300.000	0	0	0	16.300.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	(6.300.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	12.000.000	0	0	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	12.450.000	0	0	0	12.450.000	12.450.000	0	0	0	12.450.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	20.290.000	0	0	0	20.290.000	0	0	0	0	0	(20.290.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	41.000.000	0	0	0	41.000.000	0	0	0	0	0	(41.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	14.500.000	0	0	0	14.500.000	13.500.000	0	0	0	13.500.000	(1.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	20.780.000	0	0	0	20.780.000	10.800.000	0	0	0	10.800.000	(9.980.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.600.000	0	0	0	6.600.000	6.600.000	0	0	0	6.600.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	(5.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	212.845.000	0	0	0	212.845.000	344.945.000	0	0	0	344.945.000	132.100.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.090.000	0	0	0	12.090.000	7.100.000	0	0	0	7.100.000	(4.990.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	14.932.000	0	0	0	14.932.000	55.932.000	0	0	0	55.932.000	41.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.300.000	0	0	0	8.300.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	(2.300.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	48.600.000	0	0	0	48.600.000	55.500.000	0	0	0	55.500.000	6.900.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	188.963.000	0	0	0	188.963.000	188.963.000	0	0	0	188.963.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	0	0	0	0	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	0	0	0	0	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019				PUSKESMAS SIPULTAK	738.566.500	0	0	0	738.566.500	738.566.500	0	0	0	738.566.500	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	738.566.500	0	0	0	738.566.500	718.606.500	0	0	0	718.606.500	(19.960.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.344.000	0	0	0	7.344.000	7.344.000	0	0	0	7.344.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	7.344.000	0	0	0	7.344.000	7.344.000	0	0	0	7.344.000	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	731.222.500	0	0	0	731.222.500	711.262.500	0	0	0	711.262.500	(19.960.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	135.816.000	0	0	0	135.816.000	70.900.000	0	0	0	70.900.000	(64.916.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	17.500.000	0	0	0	17.500.000	0	0	0	0	0	(17.500.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	131.050.000	0	0	0	131.050.000	0	0	0	0	0	(131.050.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.000.000	0	0	0	14.000.000	14.000.000	0	0	0	14.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000	12.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	6.300.000	0	0	0	6.300.000	6.300.000	0	0	0	6.300.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	22.800.000	0	0	0	22.800.000	22.800.000	0	0	0	22.800.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	0	0	0	0	6.900.000	0	0	0	6.900.000	6.900.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	9.500.000	0	0	0	9.500.000	0	0	0	0	0	(9.500.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	14.000.000	0	0	0	14.000.000	236.866.000	0	0	0	236.866.000	222.866.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.100.000	0	0	0	8.100.000	8.100.000	0	0	0	8.100.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	84.085.000	0	0	0	84.085.000	60.270.000	0	0	0	60.270.000	(23.815.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	25.300.000	0	0	0	25.300.000	10.500.000	0	0	0	10.500.000	(14.800.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	0	0	0	0	8.200.000	0	0	0	8.200.000	8.200.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	112.445.000	0	0	0	112.445.000	98.100.000	0	0	0	98.100.000	(14.345.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	150.326.500	0	0	0	150.326.500	150.326.500	0	0	0	150.326.500	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	0	0	0	0	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	0	0	0	0	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020				PUSKESMAS SITADATADA	747.488.000	0	0	0	747.488.000	747.488.000	0	0	0	747.488.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	747.488.000	0	0	0	747.488.000	727.528.000	0	0	0	727.528.000	(19.960.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.416.000	0	0	0	7.416.000	7.416.000	0	0	0	7.416.000	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	7.416.000	0	0	0	7.416.000	7.416.000	0	0	0	7.416.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	740.072.000	0	0	0	740.072.000	720.112.000	0	0	0	720.112.000	(19.960.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	118.995.000	0	0	0	118.995.000	70.900.000	0	0	0	70.900.000	(48.095.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	29.500.000	0	0	0	29.500.000	0	0	0	0	0	(29.500.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	(15.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	56.800.000	0	0	0	56.800.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	(51.800.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	22.000.000	0	0	0	22.000.000	14.000.000	0	0	0	14.000.000	(8.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	4.000.000	0	0	0	4.000.000	12.000.000	0	0	0	12.000.000	8.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	6.300.000	0	0	0	6.300.000	6.300.000	0	0	0	6.300.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	6.850.000	0	0	0	6.850.000	0	0	0	0	0	(6.850.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	6.250.000	0	0	0	6.250.000	0	0	0	0	0	(6.250.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.400.000	0	0	0	5.400.000	5.400.000	0	0	0	5.400.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	22.800.000	0	0	0	22.800.000	22.800.000	0	0	0	22.800.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.600.000	0	0	0	6.600.000	6.600.000	0	0	0	6.600.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	(8.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	95.906.000	0	0	0	95.906.000	239.301.000	0	0	0	239.301.000	143.395.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16.590.000	0	0	0	16.590.000	8.100.000	0	0	0	8.100.000	(8.490.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	61.762.000	0	0	0	61.762.000	60.262.000	0	0	0	60.262.000	(1.500.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	69.700.000	0	0	0	69.700.000	10.500.000	0	0	0	10.500.000	(59.200.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	0	0	0	0	2.800.000	0	0	0	2.800.000	2.800.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	35.270.000	0	0	0	35.270.000	97.800.000	0	0	0	97.800.000	62.530.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	152.349.000	0	0	0	152.349.000	152.349.000	0	0	0	152.349.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	0	0	0	0	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	0	0	0	0	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021				PUSKESMAS SITUMEANG HABINSARAN	833.204.000	0	0	0	833.204.000	833.204.000	0	0	0	833.204.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	833.204.000	0	0	0	833.204.000	813.244.000	0	0	0	813.244.000	(19.960.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8.280.000	0	0	0	8.280.000	8.280.000	0	0	0	8.280.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	8.280.000	0	0	0	8.280.000	8.280.000	0	0	0	8.280.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	824.924.000	0	0	0	824.924.000	804.964.000	0	0	0	804.964.000	(19.960.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	103.925.000	0	0	0	103.925.000	82.200.000	0	0	0	82.200.000	(21.725.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	22.000.000	0	0	0	22.000.000	0	0	0	0	0	(22.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	36.000.000	0	0	0	36.000.000	0	0	0	0	0	(36.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	62.400.000	0	0	0	62.400.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	(56.400.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.400.000	0	0	0	19.400.000	12.000.000	0	0	0	12.000.000	(7.400.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	9.000.000	0	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	11.630.000	0	0	0	11.630.000	6.640.000	0	0	0	6.640.000	(4.990.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.200.000	0	0	0	9.200.000	7.200.000	0	0	0	7.200.000	(2.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	25.800.000	0	0	0	25.800.000	25.800.000	0	0	0	25.800.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.600.000	0	0	0	6.600.000	6.600.000	0	0	0	6.600.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	(5.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	135.573.000	0	0	0	135.573.000	265.708.000	0	0	0	265.708.000	130.135.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.080.000	0	0	0	15.080.000	5.100.000	0	0	0	5.100.000	(9.980.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	79.767.000	0	0	0	79.767.000	79.767.000	0	0	0	79.767.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	87.700.000	0	0	0	87.700.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	(81.700.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	25.600.000	0	0	0	25.600.000	115.700.000	0	0	0	115.700.000	90.100.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	170.249.000	0	0	0	170.249.000	170.249.000	0	0	0	170.249.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	0	0	0	0	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	0	0	0	0	19.960.000	0	0	0	19.960.000	19.960.000
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000				RSU DAERAH TARUTUNG	97.174.402.118	10.924.084.356	0	0	108.098.486.474	105.780.298.874	11.035.429.460	0	0	116.815.728.334	8.717.241.860
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.608.264.511	0	0	0	25.608.264.511	30.063.650.256	0	0	0	30.063.650.256	4.455.385.745
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.608.264.511	0	0	0	25.608.264.511	30.063.650.256	0	0	0	30.063.650.256	4.455.385.745
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.608.264.511	0	0	0	25.608.264.511	30.063.650.256	0	0	0	30.063.650.256	4.455.385.745
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	71.566.137.607	10.924.084.356	0	0	82.490.221.963	75.716.648.618	11.035.429.460	0	0	86.752.078.078	4.261.856.115
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	5.424.090.000	0	0	5.424.090.000	0	5.424.090.000	0	0	5.424.090.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	5.424.090.000	0	0	5.424.090.000	0	5.424.090.000	0	0	5.424.090.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	71.566.137.607	5.499.994.356	0	0	77.066.131.963	75.716.648.618	5.611.339.460	0	0	81.327.988.078	4.261.856.115
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	71.566.137.607	5.499.994.356	0	0	77.066.131.963	75.716.648.618	5.611.339.460	0	0	81.327.988.078	4.261.856.115
1	**03**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**23.784.079.137**	**92.856.371.464**	**0**	**0**	**116.640.450.601**	**24.378.370.807**	**92.630.823.361**	**0**	**0**	**117.009.194.168**	**368.743.567**
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	13.276.597.006	91.506.371.764	0	0	104.782.968.770	13.455.908.276	91.310.274.661	0	0	104.766.182.937	(16.785.833)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.549.137.855	281.357.138	0	0	10.830.494.993	10.300.681.278	99.632.850	0	0	10.400.314.128	(430.180.865)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	158.723.800	0	0	0	158.723.800	141.734.200	0	0	0	141.734.200	(16.989.600)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.044.300	0	0	0	66.044.300	54.494.700	0	0	0	54.494.700	(11.549.600)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.779.500	0	0	0	7.779.500	7.779.500	0	0	0	7.779.500	0
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.900.000	0	0	0	84.900.000	79.460.000	0	0	0	79.460.000	(5.440.000)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.975.570.978	0	0	0	7.975.570.978	7.365.104.855	0	0	0	7.365.104.855	(610.466.123)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.887.663.178	0	0	0	7.887.663.178	7.277.197.055	0	0	0	7.277.197.055	(610.466.123)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	77.809.200	0	0	0	77.809.200	77.809.200	0	0	0	77.809.200	0
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.098.600	0	0	0	5.098.600	5.098.600	0	0	0	5.098.600	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.992.900	0	0	0	7.992.900	7.992.900	0	0	0	7.992.900	0
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.992.900	0	0	0	7.992.900	7.992.900	0	0	0	7.992.900	0
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69.959.000	0	0	0	69.959.000	113.690.000	0	0	0	113.690.000	43.731.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	69.959.000	0	0	0	69.959.000	113.690.000	0	0	0	113.690.000	43.731.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	675.382.100	0	0	0	675.382.100	824.782.100	0	0	0	824.782.100	149.400.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.241.900	0	0	0	10.241.900	10.241.900	0	0	0	10.241.900	0
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.998.700	0	0	0	94.998.700	94.998.700	0	0	0	94.998.700	0
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.513.500	0	0	0	26.513.500	26.513.500	0	0	0	26.513.500	0
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.249.900	0	0	0	31.249.900	31.249.900	0	0	0	31.249.900	0
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	34.985.600	0	0	0	34.985.600	34.985.600	0	0	0	34.985.600	0
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.996.500	0	0	0	19.996.500	19.996.500	0	0	0	19.996.500	0
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	457.396.000	0	0	0	457.396.000	606.796.000	0	0	0	606.796.000	149.400.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.170.000	137.820.200	0	0	139.990.200	0	83.210.100	0	0	83.210.100	(56.780.100)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.170.000	107.625.900	0	0	109.795.900	0	83.210.100	0	0	83.210.100	(26.585.800)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	30.194.300	0	0	30.194.300	0	0	0	0	0	(30.194.300)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.063.700	0	0	0	146.063.700	141.058.946	0	0	0	141.058.946	(5.004.754)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.240.000	0	0	0	5.240.000	5.240.000	0	0	0	5.240.000	0
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.995.700	0	0	0	49.995.700	44.990.946	0	0	0	44.990.946	(5.004.754)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.828.000	0	0	0	90.828.000	90.828.000	0	0	0	90.828.000	0
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.513.275.377	143.536.938	0	0	1.656.812.315	1.706.318.277	16.422.750	0	0	1.722.741.027	65.928.712
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	222.800.355	0	0	0	222.800.355	222.800.355	0	0	0	222.800.355	0
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1.246.250.772	0	0	0	1.246.250.772	1.452.250.772	0	0	0	1.452.250.772	206.000.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.699.400	0	0	0	27.699.400	27.699.400	0	0	0	27.699.400	0
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	140.071.288	0	0	140.071.288	0	0	0	0	0	(140.071.288)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.524.850	3.465.650	0	0	19.990.500	3.567.750	16.422.750	0	0	19.990.500	0
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	310.949.421	11.873.340.000	0	0	12.184.289.421	541.965.121	11.338.844.300	0	0	11.880.809.421	(303.480.000)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	0	0	0	75.000.000	75.000.000	0	0	0	75.000.000	0
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	235.949.421	11.873.340.000	0	0	12.109.289.421	466.965.121	11.338.844.300	0	0	11.805.809.421	(303.480.000)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	77.830.921	685.662.950	0	0	763.493.871	308.846.621	456.557.250	0	0	765.403.871	1.910.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	0	10.987.677.050	0	0	10.987.677.050	0	10.784.417.050	0	0	10.784.417.050	(203.260.000)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	158.118.500	200.000.000	0	0	358.118.500	158.118.500	97.870.000	0	0	255.988.500	(102.130.000)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	2.044.510.150	79.303.674.626	0	0	81.348.184.776	2.296.392.377	79.823.797.511	0	0	82.120.189.888	772.005.112
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	2.044.510.150	79.303.674.626	0	0	81.348.184.776	2.296.392.377	79.823.797.511	0	0	82.120.189.888	772.005.112
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	0	1.544.327.000	0	0	1.544.327.000	211.840.000	1.452.357.000	0	0	1.664.197.000	119.870.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	0	400.000.000	0	0	400.000.000	0	387.710.000	0	0	387.710.000	(12.290.000)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	1.300.000.000	4.794.585.000	0	0	6.094.585.000	1.190.000.000	4.766.685.459	0	0	5.956.685.459	(137.899.541)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	0	52.032.795.000	0	0	52.032.795.000	0	53.435.472.078	0	0	53.435.472.078	1.402.677.078
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	0	7.484.400.000	0	0	7.484.400.000	0	6.173.570.000	0	0	6.173.570.000	(1.310.830.000)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	444.510.150	875.489.850	0	0	1.320.000.000	408.513.150	1.392.936.850	0	0	1.801.450.000	481.450.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	0	10.517.077.776	0	0	10.517.077.776	0	10.998.796.124	0	0	10.998.796.124	481.718.348
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	0	590.000.000	0	0	590.000.000	0	387.210.000	0	0	387.210.000	(202.790.000)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	300.000.000	0	0	0	300.000.000	486.039.227	0	0	0	486.039.227	186.039.227
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	24	Pembangunan Jalan Strategis Desa	0	480.000.000	0	0	480.000.000	0	408.960.000	0	0	408.960.000	(71.040.000)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	25	Rekonstruksi Jalan Strategis Desa	0	585.000.000	0	0	585.000.000	0	420.100.000	0	0	420.100.000	(164.900.000)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	35.000.000	0	0	0	35.000.000	35.000.000	0	0	0	35.000.000	0
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	35.000.000	0	0	0	35.000.000	35.000.000	0	0	0	35.000.000	0
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	35.000.000	0	0	0	35.000.000	35.000.000	0	0	0	35.000.000	0
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	336.999.580	48.000.000	0	0	384.999.580	281.869.500	48.000.000	0	0	329.869.500	(55.130.080)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	161.999.580	48.000.000	0	0	209.999.580	175.669.500	48.000.000	0	0	223.669.500	13.669.920
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	34.999.900	0	0	0	34.999.900	124.599.900	0	0	0	124.599.900	89.600.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	126.999.680	48.000.000	0	0	174.999.680	51.069.600	48.000.000	0	0	99.069.600	(75.930.080)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000	0	0	0	175.000.000	106.200.000	0	0	0	106.200.000	(68.800.000)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	175.000.000	0	0	0	175.000.000	106.200.000	0	0	0	106.200.000	(68.800.000)
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10.507.482.131	1.349.999.700	0	0	11.857.481.831	10.922.462.531	1.320.548.700	0	0	12.243.011.231	385.529.400
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.990.084.631	0	0	0	2.990.084.631	3.087.241.631	0	0	0	3.087.241.631	97.157.000
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.990.084.631	0	0	0	2.990.084.631	3.087.241.631	0	0	0	3.087.241.631	97.157.000
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.078.085.133	0	0	0	1.078.085.133	1.213.736.133	0	0	0	1.213.736.133	135.651.000
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.831.999.698	0	0	0	1.831.999.698	1.823.505.698	0	0	0	1.823.505.698	(8.494.000)
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.01	12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	79.999.800	0	0	0	79.999.800	49.999.800	0	0	0	49.999.800	(30.000.000)
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7.132.397.600	0	0	0	7.132.397.600	7.132.397.600	0	0	0	7.132.397.600	0
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.132.397.600	0	0	0	7.132.397.600	7.132.397.600	0	0	0	7.132.397.600	0
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	129.080.600	0	0	0	129.080.600	129.080.600	0	0	0	129.080.600	0
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	7.003.317.000	0	0	0	7.003.317.000	7.003.317.000	0	0	0	7.003.317.000	0
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	0	549.999.900	0	0	549.999.900	0	534.938.900	0	0	534.938.900	(15.061.000)
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	549.999.900	0	0	549.999.900	0	534.938.900	0	0	534.938.900	(15.061.000)
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	0	549.999.900	0	0	549.999.900	0	534.938.900	0	0	534.938.900	(15.061.000)
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	384.999.900	799.999.800	0	0	1.184.999.700	702.823.300	785.609.800	0	0	1.488.433.100	303.433.400
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	384.999.900	799.999.800	0	0	1.184.999.700	702.823.300	785.609.800	0	0	1.488.433.100	303.433.400
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	160.000.000	0	0	0	160.000.000	116.400.000	0	0	0	116.400.000	(43.600.000)
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	224.999.900	799.999.800	0	0	1.024.999.700	586.423.300	785.609.800	0	0	1.372.033.100	347.033.400

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	**04**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**15.092.722.605**	**2.671.661.000**	**0**	**0**	**17.764.383.605**	**15.194.659.275**	**3.438.642.100**	**0**	**0**	**18.633.301.375**	**868.917.770**
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	15.092.722.605	2.671.661.000	0	0	17.764.383.605	15.194.659.275	3.438.642.100	0	0	18.633.301.375	868.917.770
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.290.642.295	263.015.100	0	0	11.553.657.395	11.483.502.265	248.015.100	0	0	11.731.517.365	177.859.970
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	129.334.700	0	0	0	129.334.700	71.224.700	0	0	0	71.224.700	(58.110.000)
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	106.658.200	0	0	0	106.658.200	48.548.200	0	0	0	48.548.200	(58.110.000)
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.678.500	0	0	0	7.678.500	7.678.500	0	0	0	7.678.500	0
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.998.000	0	0	0	14.998.000	14.998.000	0	0	0	14.998.000	0
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.111.885.595	0	0	0	3.111.885.595	3.206.236.197	0	0	0	3.206.236.197	94.350.602
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.022.370.195	0	0	0	3.022.370.195	2.995.920.797	0	0	0	2.995.920.797	(26.449.398)
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78.517.200	0	0	0	78.517.200	199.317.200	0	0	0	199.317.200	120.800.000
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.998.200	0	0	0	10.998.200	10.998.200	0	0	0	10.998.200	0
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	498.493.400	0	0	0	498.493.400	487.429.200	0	0	0	487.429.200	(11.064.200)
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.996.500	0	0	0	14.996.500	14.996.500	0	0	0	14.996.500	0
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.768.100	0	0	0	39.768.100	39.768.100	0	0	0	39.768.100	0
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.616.500	0	0	0	22.616.500	22.616.500	0	0	0	22.616.500	0
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.605.900	0	0	0	31.605.900	31.605.900	0	0	0	31.605.900	0
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.676.400	0	0	0	30.676.400	10.677.200	0	0	0	10.677.200	(19.999.200)
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.160.000	0	0	0	11.160.000	11.160.000	0	0	0	11.160.000	0
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347.670.000	0	0	0	347.670.000	356.605.000	0	0	0	356.605.000	8.935.000
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	263.015.100	0	0	263.015.100	0	248.015.100	0	0	248.015.100	(15.000.000)
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	263.015.100	0	0	263.015.100	0	248.015.100	0	0	248.015.100	(15.000.000)
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.301.314.800	0	0	0	7.301.314.800	7.518.998.368	0	0	0	7.518.998.368	217.683.568
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.950.000	0	0	0	4.950.000	4.950.000	0	0	0	4.950.000	0
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.218.900.000	0	0	0	7.218.900.000	7.436.583.568	0	0	0	7.436.583.568	217.683.568
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	77.464.800	0	0	0	77.464.800	77.464.800	0	0	0	77.464.800	0
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.613.800	0	0	0	249.613.800	199.613.800	0	0	0	199.613.800	(50.000.000)
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	175.177.600	0	0	0	175.177.600	125.177.600	0	0	0	125.177.600	(50.000.000)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	54.793.700	0	0	0	54.793.700	54.793.700	0	0	0	54.793.700	0
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.642.500	0	0	0	19.642.500	19.642.500	0	0	0	19.642.500	0
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	137.033.400	966.400	0	0	137.999.800	87.033.400	966.400	0	0	87.999.800	(50.000.000)
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	37.033.400	966.400	0	0	37.999.800	37.033.400	966.400	0	0	37.999.800	0
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	02	2.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	37.033.400	966.400	0	0	37.999.800	37.033.400	966.400	0	0	37.999.800	0
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000	0	0	0	100.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	(50.000.000)
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	100.000.000	0	0	0	100.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	(50.000.000)
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	554.033.400	966.400	0	0	554.999.800	536.999.800	0	0	0	536.999.800	(18.000.000)
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	99.033.600	966.400	0	0	100.000.000	98.000.000	0	0	0	98.000.000	(2.000.000)
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	99.033.600	966.400	0	0	100.000.000	98.000.000	0	0	0	98.000.000	(2.000.000)
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	454.999.800	0	0	0	454.999.800	438.999.800	0	0	0	438.999.800	(16.000.000)
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	29.999.800	0	0	0	29.999.800	27.999.800	0	0	0	27.999.800	(2.000.000)
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.03	03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	425.000.000	0	0	0	425.000.000	411.000.000	0	0	0	411.000.000	(14.000.000)
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	3.111.013.510	2.406.713.100	0	0	5.517.726.610	3.087.123.810	3.189.660.600	0	0	6.276.784.410	759.057.800
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	3.111.013.510	2.406.713.100	0	0	5.517.726.610	3.087.123.810	3.189.660.600	0	0	6.276.784.410	759.057.800
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	2.208.523.010	2.406.713.100	0	0	4.615.236.110	2.290.873.310	3.189.660.600	0	0	5.480.533.910	865.297.800
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	902.490.500	0	0	0	902.490.500	796.250.500	0	0	0	796.250.500	(106.240.000)
1	**05**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**13.618.969.203**	**160.591.500**	**0**	**0**	**13.779.560.703**	**14.831.954.780**	**123.437.000**	**0**	**0**	**14.955.391.780**	**1.175.831.077**
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	9.461.970.813	102.610.100	0	0	9.564.580.913	10.836.617.852	55.136.700	0	0	10.891.754.552	1.327.173.639
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.683.642.663	94.210.100	0	0	7.777.852.763	7.986.095.202	46.736.700	0	0	8.032.831.902	254.979.139
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.999.700	0	0	0	81.999.700	81.999.700	0	0	0	81.999.700	0
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.900	0	0	0	4.999.900	4.999.900	0	0	0	4.999.900	0
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.999.900	0	0	0	4.999.900	4.999.900	0	0	0	4.999.900	0
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.999.900	0	0	0	4.999.900	4.999.900	0	0	0	4.999.900	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.000.000	0	0	0	62.000.000	62.000.000	0	0	0	62.000.000	0
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.451.365.885	0	0	0	2.451.365.885	2.653.704.274	0	0	0	2.653.704.274	202.338.389
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.396.126.685	0	0	0	2.396.126.685	2.598.465.074	0	0	0	2.598.465.074	202.338.389
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.239.200	0	0	0	50.239.200	50.239.200	0	0	0	50.239.200	0
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	399.932.200	0	0	0	399.932.200	0	0	0	0	0	(399.932.200)
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	399.932.200	0	0	0	399.932.200	0	0	0	0	0	(399.932.200)
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	211.279.100	0	0	0	211.279.100	271.304.100	0	0	0	271.304.100	60.025.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.999.600	0	0	0	7.999.600	7.999.600	0	0	0	7.999.600	0
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.098.200	0	0	0	24.098.200	24.098.200	0	0	0	24.098.200	0
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.171.300	0	0	0	6.171.300	6.171.300	0	0	0	6.171.300	0
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.400.000	0	0	0	3.400.000	3.400.000	0	0	0	3.400.000	0
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.610.000	0	0	0	169.610.000	229.635.000	0	0	0	229.635.000	60.025.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	94.210.100	0	0	94.210.100	0	46.736.700	0	0	46.736.700	(47.473.400)
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	94.210.100	0	0	94.210.100	0	46.736.700	0	0	46.736.700	(47.473.400)
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.232.895.728	0	0	0	4.232.895.728	4.548.695.328	0	0	0	4.548.695.328	315.799.600
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.330.000	0	0	0	1.330.000	1.330.000	0	0	0	1.330.000	0
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.998.900	0	0	0	26.998.900	33.998.500	0	0	0	33.998.500	6.999.600
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.204.566.828	0	0	0	4.204.566.828	4.513.366.828	0	0	0	4.513.366.828	308.800.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	306.170.050	0	0	0	306.170.050	430.391.800	0	0	0	430.391.800	124.221.750
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	298.797.250	0	0	0	298.797.250	423.019.000	0	0	0	423.019.000	124.221.750
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.372.800	0	0	0	7.372.800	7.372.800	0	0	0	7.372.800	0
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.618.428.150	0	0	0	1.618.428.150	2.490.672.750	0	0	0	2.490.672.750	872.244.600
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.265.281.350	0	0	0	1.265.281.350	1.989.275.050	0	0	0	1.989.275.050	723.993.700

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.265.281.350	0	0	0	1.265.281.350	1.989.275.050	0	0	0	1.989.275.050	723.993.700
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	353.146.800	0	0	0	353.146.800	501.397.700	0	0	0	501.397.700	148.250.900
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	0	0	0	0	0	98.250.800	0	0	0	98.250.800	98.250.800
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	214.199.900	0	0	0	214.199.900	264.200.000	0	0	0	264.200.000	50.000.100
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	138.946.900	0	0	0	138.946.900	138.946.900	0	0	0	138.946.900	0
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	159.900.000	8.400.000	0	0	168.300.000	359.849.900	8.400.000	0	0	368.249.900	199.949.900
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	159.900.000	8.400.000	0	0	168.300.000	359.849.900	8.400.000	0	0	368.249.900	199.949.900
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	159.900.000	0	0	0	159.900.000	209.850.000	0	0	0	209.850.000	49.950.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	0	8.400.000	0	0	8.400.000	149.999.900	8.400.000	0	0	158.399.900	149.999.900
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.156.998.390	57.981.400	0	0	4.214.979.790	3.995.336.928	68.300.300	0	0	4.063.637.228	(151.342.562)
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.202.050.990	10.931.400	0	0	3.212.982.390	3.148.242.158	34.424.300	0	0	3.182.666.458	(30.315.932)
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.483.300	0	0	0	35.483.300	41.007.300	0	0	0	41.007.300	5.524.000
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.772.200	0	0	0	4.772.200	4.772.200	0	0	0	4.772.200	0
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.246.600	0	0	0	4.246.600	4.246.600	0	0	0	4.246.600	0
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.464.500	0	0	0	26.464.500	31.988.500	0	0	0	31.988.500	5.524.000
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.462.094.390	0	0	0	2.462.094.390	2.368.334.378	0	0	0	2.368.334.378	(93.760.012)
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.415.747.290	0	0	0	2.415.747.290	2.321.987.278	0	0	0	2.321.987.278	(93.760.012)
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.347.200	0	0	0	41.347.200	41.347.200	0	0	0	41.347.200	0
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.999.900	0	0	0	4.999.900	4.999.900	0	0	0	4.999.900	0
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	87.999.900	0	0	0	87.999.900	0	0	0	0	0	(87.999.900)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	87.999.900	0	0	0	87.999.900	0	0	0	0	0	(87.999.900)
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	228.862.100	0	0	0	228.862.100	299.789.300	1.875.500	0	0	301.664.800	72.802.700
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.601.900	0	0	0	9.601.900	10.186.100	0	0	0	10.186.100	584.200
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.477.600	0	0	0	20.477.600	20.477.600	0	0	0	20.477.600	0
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.986.900	0	0	0	5.986.900	8.206.400	1.875.500	0	0	10.081.900	4.095.000
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.899.300	0	0	0	20.899.300	22.015.800	0	0	0	22.015.800	1.116.500
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.996.400	0	0	0	19.996.400	19.996.400	0	0	0	19.996.400	0
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.900.000	0	0	0	151.900.000	218.907.000	0	0	0	218.907.000	67.007.000
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	9.701.400	0	0	9.701.400	7.000.000	30.908.800	0	0	37.908.800	28.207.400
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0	0	0	7.000.000	21.207.400	0	0	28.207.400	28.207.400
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	9.701.400	0	0	9.701.400	0	9.701.400	0	0	9.701.400	0
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.346.300	0	0	0	251.346.300	252.146.300	0	0	0	252.146.300	800.000
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	0	0	0	1.200.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	800.000
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.159.100	0	0	0	32.159.100	32.159.100	0	0	0	32.159.100	0
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	217.987.200	0	0	0	217.987.200	217.987.200	0	0	0	217.987.200	0
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.265.000	1.230.000	0	0	137.495.000	179.964.880	1.640.000	0	0	181.604.880	44.109.880
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.042.500	0	0	0	81.042.500	97.964.900	0	0	0	97.964.900	16.922.400
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.230.800	0	0	0	26.230.800	47.650.380	0	0	0	47.650.380	21.419.580
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.058.100	0	0	0	6.058.100	6.058.100	0	0	0	6.058.100	0
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.933.600	1.230.000	0	0	24.163.600	28.291.500	1.640.000	0	0	29.931.500	5.767.900
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	954.947.400	47.050.000	0	0	1.001.997.400	847.094.770	33.876.000	0	0	880.970.770	(121.026.630)
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	507.948.900	47.050.000	0	0	554.998.900	520.992.900	33.876.000	0	0	554.868.900	(130.000)
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	499.999.000	0	0	0	499.999.000	513.049.000	0	0	0	513.049.000	13.050.000
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	7.949.900	47.050.000	0	0	54.999.900	7.943.900	33.876.000	0	0	41.819.900	(13.180.000)
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	311.998.500	0	0	0	311.998.500	227.932.670	0	0	0	227.932.670	(84.065.830)
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	15.000.000	0	0	0	15.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	(10.000.000)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	186.998.500	0	0	0	186.998.500	156.998.500	0	0	0	156.998.500	(30.000.000)
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	100.000.000	0	0	0	100.000.000	62.934.170	0	0	0	62.934.170	(37.065.830)
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	10.000.000	0	0	0	10.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	(7.000.000)
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	130.000.000	0	0	0	130.000.000	95.169.200	0	0	0	95.169.200	(34.830.800)
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	95.000.000	0	0	0	95.000.000	76.869.200	0	0	0	76.869.200	(18.130.800)
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10.000.000	0	0	0	10.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	(7.000.000)
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10.000.000	0	0	0	10.000.000	9.000.000	0	0	0	9.000.000	(1.000.000)
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	10.000.000	0	0	0	10.000.000	1.300.000	0	0	0	1.300.000	(8.700.000)
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	5.000.000	0	0	0	5.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	(2.000.000)
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	5.000.000	0	0	0	5.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	(2.000.000)
1	**06**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**4.563.186.320**	**52.843.200**	**0**	**0**	**4.616.029.520**	**4.661.284.385**	**55.843.200**	**0**	**0**	**4.717.127.585**	**101.098.065**
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000				DINAS SOSIAL	4.563.186.320	52.843.200	0	0	4.616.029.520	4.661.284.385	55.843.200	0	0	4.717.127.585	101.098.065
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.643.126.420	52.843.200	0	0	2.695.969.620	2.792.988.085	55.843.200	0	0	2.848.831.285	152.861.665
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.869.500	0	0	0	25.869.500	25.869.500	0	0	0	25.869.500	0
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.869.500	0	0	0	16.869.500	16.869.500	0	0	0	16.869.500	0
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.193.126.560	0	0	0	2.193.126.560	2.180.335.225	0	0	0	2.180.335.225	(12.791.335)
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.149.034.960	0	0	0	2.149.034.960	2.136.243.625	0	0	0	2.136.243.625	(12.791.335)
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.591.600	0	0	0	39.591.600	39.591.600	0	0	0	39.591.600	0
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.500.000	0	0	0	4.500.000	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	241.340.700	0	0	0	241.340.700	350.358.700	0	0	0	350.358.700	109.018.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.599.700	0	0	0	9.599.700	9.599.700	0	0	0	9.599.700	0
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.000.000	0	0	0	45.000.000	44.457.000	0	0	0	44.457.000	(543.000)
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.998.700	0	0	0	29.998.700	32.998.700	0	0	0	32.998.700	3.000.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.412.600	0	0	0	27.412.600	27.412.600	0	0	0	27.412.600	0
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.058.700	0	0	0	6.058.700	7.050.700	0	0	0	7.050.700	992.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.271.000	0	0	0	123.271.000	228.840.000	0	0	0	228.840.000	105.569.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	52.843.200	0	0	52.843.200	0	55.843.200	0	0	55.843.200	3.000.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	52.843.200	0	0	52.843.200	0	55.843.200	0	0	55.843.200	3.000.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.927.800	0	0	0	125.927.800	172.245.200	0	0	0	172.245.200	46.317.400
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.420.000	0	0	0	3.420.000	3.420.000	0	0	0	3.420.000	0
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.679.800	0	0	0	31.679.800	31.679.800	0	0	0	31.679.800	0
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.828.000	0	0	0	90.828.000	137.145.400	0	0	0	137.145.400	46.317.400
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.861.860	0	0	0	56.861.860	64.179.460	0	0	0	64.179.460	7.317.600
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.852.260	0	0	0	32.852.260	40.169.860	0	0	0	40.169.860	7.317.600
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.093.900	0	0	0	7.093.900	7.093.900	0	0	0	7.093.900	0
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.535.700	0	0	0	8.535.700	8.535.700	0	0	0	8.535.700	0
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.380.000	0	0	0	8.380.000	8.380.000	0	0	0	8.380.000	0
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	750.516.300	0	0	0	750.516.300	752.916.200	0	0	0	752.916.200	2.399.900
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	750.516.300	0	0	0	750.516.300	752.916.200	0	0	0	752.916.200	2.399.900
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	750.516.300	0	0	0	750.516.300	752.916.200	0	0	0	752.916.200	2.399.900
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	279.543.700	0	0	0	279.543.700	290.473.500	0	0	0	290.473.500	10.929.800
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	106.079.400	0	0	0	106.079.400	102.979.400	0	0	0	102.979.400	(3.100.000)
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	88.000.000	0	0	0	88.000.000	84.900.000	0	0	0	84.900.000	(3.100.000)
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5.108.000	0	0	0	5.108.000	5.108.000	0	0	0	5.108.000	0
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	12.971.400	0	0	0	12.971.400	12.971.400	0	0	0	12.971.400	0
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	173.464.300	0	0	0	173.464.300	187.494.100	0	0	0	187.494.100	14.029.800
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	7.000.000	0	0	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	46.225.000	0	0	0	46.225.000	45.255.000	0	0	0	45.255.000	(970.000)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	97.487.400	0	0	0	97.487.400	82.487.400	0	0	0	82.487.400	(15.000.000)
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	4.444.900	0	0	0	4.444.900	4.444.900	0	0	0	4.444.900	0
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	9.900.000	0	0	0	9.900.000	39.899.800	0	0	0	39.899.800	29.999.800
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	8.407.000	0	0	0	8.407.000	8.407.000	0	0	0	8.407.000	0
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	470.000.000	0	0	0	470.000.000	426.999.900	0	0	0	426.999.900	(43.000.100)
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	470.000.000	0	0	0	470.000.000	426.999.900	0	0	0	426.999.900	(43.000.100)
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	170.000.000	0	0	0	170.000.000	196.999.900	0	0	0	196.999.900	26.999.900
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	300.000.000	0	0	0	300.000.000	230.000.000	0	0	0	230.000.000	(70.000.000)
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	215.000.000	0	0	0	215.000.000	314.999.800	0	0	0	314.999.800	99.999.800
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	180.000.000	0	0	0	180.000.000	279.999.800	0	0	0	279.999.800	99.999.800
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	180.000.000	0	0	0	180.000.000	279.999.800	0	0	0	279.999.800	99.999.800
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	35.000.000	0	0	0	35.000.000	35.000.000	0	0	0	35.000.000	0
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	35.000.000	0	0	0	35.000.000	35.000.000	0	0	0	35.000.000	0
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	204.999.900	0	0	0	204.999.900	82.906.900	0	0	0	82.906.900	(122.093.000)
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	204.999.900	0	0	0	204.999.900	82.906.900	0	0	0	82.906.900	(122.093.000)
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	198.999.900	0	0	0	198.999.900	76.906.900	0	0	0	76.906.900	(122.093.000)
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0
2						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**74.982.294.603**	**3.341.496.700**	**0**	**0**	**78.323.791.303**	**72.475.236.535**	**2.778.758.700**	**0**	**0**	**75.253.995.235**	**(3.069.796.068)**
2	**07**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**3.221.434.890**	**124.956.000**	**0**	**0**	**3.346.390.890**	**3.154.485.912**	**6.200.000**	**0**	**0**	**3.160.685.912**	**(185.704.978)**
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000				DINAS KETENAGAKERJAAN	3.221.434.890	124.956.000	0	0	3.346.390.890	3.154.485.912	6.200.000	0	0	3.160.685.912	(185.704.978)
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.671.272.090	124.956.000	0	0	2.796.228.090	2.454.323.212	6.200.000	0	0	2.460.523.212	(335.704.878)
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.952.200	0	0	0	47.952.200	15.365.600	0	0	0	15.365.600	(32.586.600)
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.215.600	0	0	0	33.215.600	12.158.000	0	0	0	12.158.000	(21.057.600)
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.999.900	0	0	0	4.999.900	3.207.600	0	0	0	3.207.600	(1.792.300)
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.736.700	0	0	0	9.736.700	0	0	0	0	0	(9.736.700)
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.176.232.470	0	0	0	2.176.232.470	1.983.341.992	0	0	0	1.983.341.992	(192.890.478)
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.129.885.370	0	0	0	2.129.885.370	1.938.782.392	0	0	0	1.938.782.392	(191.102.978)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.347.200	0	0	0	41.347.200	41.347.200	0	0	0	41.347.200	0
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.999.900	0	0	0	4.999.900	3.212.400	0	0	0	3.212.400	(1.787.500)
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	233.929.700	0	0	0	233.929.700	244.969.100	0	0	0	244.969.100	11.039.400
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.593.000	0	0	0	9.593.000	5.656.900	0	0	0	5.656.900	(3.936.100)
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.672.400	0	0	0	29.672.400	20.972.600	0	0	0	20.972.600	(8.699.800)
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.997.800	0	0	0	11.997.800	6.634.800	0	0	0	6.634.800	(5.363.000)
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.281.900	0	0	0	16.281.900	14.669.200	0	0	0	14.669.200	(1.612.700)
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.394.600	0	0	0	6.394.600	6.394.600	0	0	0	6.394.600	0
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.990.000	0	0	0	159.990.000	190.641.000	0	0	0	190.641.000	30.651.000
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	51.478.000	0	0	51.478.000	0	6.200.000	0	0	6.200.000	(45.278.000)
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	51.478.000	0	0	51.478.000	0	6.200.000	0	0	6.200.000	(45.278.000)
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.158.600	0	0	0	176.158.600	175.658.600	0	0	0	175.658.600	(500.000)
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	0	0	0	1.000.000	500.000	0	0	0	500.000	(500.000)
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.999.400	0	0	0	47.999.400	47.999.400	0	0	0	47.999.400	0
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.159.200	0	0	0	127.159.200	127.159.200	0	0	0	127.159.200	0
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.999.120	73.478.000	0	0	110.477.120	34.987.920	0	0	0	34.987.920	(75.489.200)
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.999.120	0	0	0	36.999.120	34.987.920	0	0	0	34.987.920	(2.011.200)
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	73.478.000	0	0	73.478.000	0	0	0	0	0	(73.478.000)
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	442.642.800	0	0	0	442.642.800	592.642.700	0	0	0	592.642.700	149.999.900
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	409.278.600	0	0	0	409.278.600	559.278.500	0	0	0	559.278.500	149.999.900
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	409.278.600	0	0	0	409.278.600	559.278.500	0	0	0	559.278.500	149.999.900
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	33.364.200	0	0	0	33.364.200	33.364.200	0	0	0	33.364.200	0
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	33.364.200	0	0	0	33.364.200	33.364.200	0	0	0	33.364.200	0
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	47.520.000	0	0	0	47.520.000	47.520.000	0	0	0	47.520.000	0
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	47.520.000	0	0	0	47.520.000	47.520.000	0	0	0	47.520.000	0
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	27.520.000	0	0	0	27.520.000	27.520.000	0	0	0	27.520.000	0
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	60.000.000	0	0	0	60.000.000	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	0	0	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	40.000.000	0	0	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
2	**08**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**380.000.000**	**0**	**0**	**0**	**380.000.000**	**395.000.000**	**0**	**0**	**0**	**395.000.000**	**15.000.000**
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	380.000.000	0	0	0	380.000.000	395.000.000	0	0	0	395.000.000	15.000.000
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	190.000.000	0	0	0	190.000.000	250.000.000	0	0	0	250.000.000	60.000.000
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000	0	0	0	40.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	10.000.000
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	(20.000.000)
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	0	0	0	20.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	30.000.000
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000	0	0	0	150.000.000	200.000.000	0	0	0	200.000.000	50.000.000
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	50.000.000	0	0	0	50.000.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	50.000.000
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	40.000.000	0	0	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000	0	0	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	150.000.000	0	0	0	150.000.000	105.000.000	0	0	0	105.000.000	(45.000.000)
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	0	0	0	150.000.000	75.000.000	0	0	0	75.000.000	(75.000.000)
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000	0	0	0	150.000.000	75.000.000	0	0	0	75.000.000	(75.000.000)
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000
2	**09**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**5.423.801.148**	**39.974.000**	**0**	**0**	**5.463.775.148**	**5.120.439.209**	**39.974.000**	**0**	**0**	**5.160.413.209**	**(303.361.939)**
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000				DINAS KETAHANAN PANGAN	5.423.801.148	39.974.000	0	0	5.463.775.148	5.120.439.209	39.974.000	0	0	5.160.413.209	(303.361.939)
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.693.801.228	39.974.000	0	0	4.733.775.228	4.455.439.289	39.974.000	0	0	4.495.413.289	(238.361.939)
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.000.000	0	0	0	90.000.000	70.000.000	0	0	0	70.000.000	(20.000.000)
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000	0	0	0	60.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000	(20.000.000)
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.693.619.978	0	0	0	3.693.619.978	3.390.120.039	0	0	0	3.390.120.039	(303.499.939)
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.634.269.978	0	0	0	3.634.269.978	3.314.090.039	0	0	0	3.314.090.039	(320.179.939)
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48.835.200	0	0	0	48.835.200	65.515.200	0	0	0	65.515.200	16.680.000
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.514.800	0	0	0	10.514.800	10.514.800	0	0	0	10.514.800	0
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	301.999.300	0	0	0	301.999.300	371.999.300	0	0	0	371.999.300	70.000.000
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.000	0	0	0	9.999.000	9.999.000	0	0	0	9.999.000	0
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000	0	0	0	35.000.000	35.000.000	0	0	0	35.000.000	0
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.000.300	0	0	0	22.000.300	22.000.300	0	0	0	22.000.300	0
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.000.000	0	0	0	190.000.000	260.000.000	0	0	0	260.000.000	70.000.000
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.500.000	39.974.000	0	0	56.474.000	16.500.000	39.974.000	0	0	56.474.000	0
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	4.374.000	0	0	4.374.000	0	4.374.000	0	0	4.374.000	0
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.500.000	35.600.000	0	0	52.100.000	16.500.000	35.600.000	0	0	52.100.000	0
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	459.268.900	0	0	0	459.268.900	474.406.900	0	0	0	474.406.900	15.138.000
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.160.100	0	0	0	35.160.100	35.160.100	0	0	0	35.160.100	0
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	422.608.800	0	0	0	422.608.800	437.746.800	0	0	0	437.746.800	15.138.000
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.413.050	0	0	0	132.413.050	132.413.050	0	0	0	132.413.050	0
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	81.494.250	0	0	0	81.494.250	81.494.250	0	0	0	81.494.250	0
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.477.800	0	0	0	9.477.800	9.477.800	0	0	0	9.477.800	0
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41.441.000	0	0	0	41.441.000	41.441.000	0	0	0	41.441.000	0
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	439.999.920	0	0	0	439.999.920	439.999.920	0	0	0	439.999.920	0
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	70.000.000	0	0	0	70.000.000	70.000.000	0	0	0	70.000.000	0
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	40.000.000	0	0	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	64.999.920	0	0	0	64.999.920	64.999.920	0	0	0	64.999.920	0
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	39.998.420	0	0	0	39.998.420	39.998.420	0	0	0	39.998.420	0
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	25.001.500	0	0	0	25.001.500	25.001.500	0	0	0	25.001.500	0
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	305.000.000	0	0	0	305.000.000	305.000.000	0	0	0	305.000.000	0
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	225.000.000	0	0	0	225.000.000	225.000.000	0	0	0	225.000.000	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	80.000.000	0	0	0	80.000.000	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	265.000.000	0	0	0	265.000.000	200.000.000	0	0	0	200.000.000	(65.000.000)
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	265.000.000	0	0	0	265.000.000	200.000.000	0	0	0	200.000.000	(65.000.000)
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	265.000.000	0	0	0	265.000.000	200.000.000	0	0	0	200.000.000	(65.000.000)
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	05	2.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0
2	**10**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**307.775.200**	**5.100.000**	**0**	**0**	**312.875.200**	**176.897.400**	**0**	**0**	**0**	**176.897.400**	**(135.977.800)**
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	307.775.200	5.100.000	0	0	312.875.200	176.897.400	0	0	0	176.897.400	(135.977.800)
2	10	1.04.2.10.1.03.01.0000	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	74.977.300	0	0	0	74.977.300	0	0	0	0	0	(74.977.300)
2	10	1.04.2.10.1.03.01.0000	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	74.977.300	0	0	0	74.977.300	0	0	0	0	0	(74.977.300)
2	10	1.04.2.10.1.03.01.0000	06	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	74.977.300	0	0	0	74.977.300	0	0	0	0	0	(74.977.300)
2	10	1.04.2.10.1.03.01.0000	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	232.797.900	5.100.000	0	0	237.897.900	176.897.400	0	0	0	176.897.400	(61.000.500)
2	10	1.04.2.10.1.03.01.0000	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	232.797.900	5.100.000	0	0	237.897.900	176.897.400	0	0	0	176.897.400	(61.000.500)
2	10	1.04.2.10.1.03.01.0000	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	136.932.000	5.100.000	0	0	142.032.000	102.031.500	0	0	0	102.031.500	(40.000.500)
2	10	1.04.2.10.1.03.01.0000	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	95.865.900	0	0	0	95.865.900	74.865.900	0	0	0	74.865.900	(21.000.000)
2	**11**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**8.494.931.493**	**712.329.600**	**0**	**0**	**9.207.261.093**	**8.569.168.227**	**712.329.600**	**0**	**0**	**9.281.497.827**	**74.236.734**
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8.494.931.493	712.329.600	0	0	9.207.261.093	8.569.168.227	712.329.600	0	0	9.281.497.827	74.236.734
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.596.112.643	12.329.600	0	0	7.608.442.243	7.366.028.377	12.329.600	0	0	7.378.357.977	(230.084.266)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.854.800	0	0	0	45.854.800	45.854.800	0	0	0	45.854.800	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.354.800	0	0	0	8.354.800	8.354.800	0	0	0	8.354.800	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.500.000	0	0	0	32.500.000	32.500.000	0	0	0	32.500.000	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.905.523.453	0	0	0	2.905.523.453	2.528.445.687	0	0	0	2.528.445.687	(377.077.766)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.830.724.253	0	0	0	2.830.724.253	2.453.646.487	0	0	0	2.453.646.487	(377.077.766)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	69.799.200	0	0	0	69.799.200	69.799.200	0	0	0	69.799.200	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.747.500	0	0	0	60.747.500	60.747.500	0	0	0	60.747.500	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60.747.500	0	0	0	60.747.500	60.747.500	0	0	0	60.747.500	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	301.278.100	0	0	0	301.278.100	362.628.200	0	0	0	362.628.200	61.350.100
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.990.800	0	0	0	4.990.800	4.990.800	0	0	0	4.990.800	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.796.600	0	0	0	59.796.600	64.800.900	0	0	0	64.800.900	5.004.300
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.869.900	0	0	0	30.869.900	38.095.700	0	0	0	38.095.700	7.225.800
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.999.800	0	0	0	24.999.800	24.999.800	0	0	0	24.999.800	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.621.000	0	0	0	180.621.000	229.741.000	0	0	0	229.741.000	49.120.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	12.329.600	0	0	12.329.600	0	12.329.600	0	0	12.329.600	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	7.500.000	0	0	7.500.000	0	7.500.000	0	0	7.500.000	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	4.829.600	0	0	4.829.600	0	4.829.600	0	0	4.829.600	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.063.411.400	0	0	0	3.063.411.400	3.067.408.100	0	0	0	3.067.408.100	3.996.700
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.359.700	0	0	0	26.359.700	20.359.600	0	0	0	20.359.600	(6.000.100)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.035.051.700	0	0	0	3.035.051.700	3.045.048.500	0	0	0	3.045.048.500	9.996.800
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.219.297.390	0	0	0	1.219.297.390	1.300.944.090	0	0	0	1.300.944.090	81.646.700
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.787.530	0	0	0	78.787.530	78.787.530	0	0	0	78.787.530	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.095.675.860	0	0	0	1.095.675.860	1.177.322.560	0	0	0	1.177.322.560	81.646.700
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	24.999.700	0	0	0	24.999.700	24.999.700	0	0	0	24.999.700	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.964.400	0	0	0	9.964.400	9.964.400	0	0	0	9.964.400	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.869.900	0	0	0	9.869.900	9.869.900	0	0	0	9.869.900	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	335.000.000	0	0	0	335.000.000	334.998.900	0	0	0	334.998.900	(1.100)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	335.000.000	0	0	0	335.000.000	334.998.900	0	0	0	334.998.900	(1.100)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	335.000.000	0	0	0	335.000.000	334.998.900	0	0	0	334.998.900	(1.100)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	204.297.650	0	0	0	204.297.650	204.297.650	0	0	0	204.297.650	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	76.919.000	0	0	0	76.919.000	76.919.000	0	0	0	76.919.000	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	33.838.800	0	0	0	33.838.800	33.838.800	0	0	0	33.838.800	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	21.639.200	0	0	0	21.639.200	21.639.200	0	0	0	21.639.200	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	21.441.000	0	0	0	21.441.000	21.441.000	0	0	0	21.441.000	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	52.430.000	0	0	0	52.430.000	52.430.000	0	0	0	52.430.000	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	32.500.000	0	0	0	32.500.000	32.500.000	0	0	0	32.500.000	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	19.930.000	0	0	0	19.930.000	19.930.000	0	0	0	19.930.000	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	74.948.650	0	0	0	74.948.650	74.948.650	0	0	0	74.948.650	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	32.499.700	0	0	0	32.499.700	32.499.700	0	0	0	32.499.700	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	42.448.950	0	0	0	42.448.950	42.448.950	0	0	0	42.448.950	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	41.761.400	0	0	0	41.761.400	41.761.400	0	0	0	41.761.400	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	41.761.400	0	0	0	41.761.400	41.761.400	0	0	0	41.761.400	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	41.761.400	0	0	0	41.761.400	41.761.400	0	0	0	41.761.400	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	90.000.000	0	0	0	90.000.000	90.000.000	0	0	0	90.000.000	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000	0	0	0	90.000.000	90.000.000	0	0	0	90.000.000	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	40.000.000	0	0	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	59.999.800	0	0	0	59.999.800	349.999.800	0	0	0	349.999.800	290.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	59.999.800	0	0	0	59.999.800	349.999.800	0	0	0	349.999.800	290.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	07	2.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	59.999.800	0	0	0	59.999.800	349.999.800	0	0	0	349.999.800	290.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	47.082.200	0	0	0	47.082.200	47.082.200	0	0	0	47.082.200	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47.082.200	0	0	0	47.082.200	47.082.200	0	0	0	47.082.200	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	47.082.200	0	0	0	47.082.200	47.082.200	0	0	0	47.082.200	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	35.677.900	0	0	0	35.677.900	0	0	0	0	0	(35.677.900)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.677.900	0	0	0	35.677.900	0	0	0	0	0	(35.677.900)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	35.677.900	0	0	0	35.677.900	0	0	0	0	0	(35.677.900)
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	40.000.000	0	0	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	40.000.000	0	0	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	40.000.000	0	0	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	44.999.900	700.000.000	0	0	744.999.900	94.999.900	700.000.000	0	0	794.999.900	50.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01		Pengelolaan Sampah	44.999.900	700.000.000	0	0	744.999.900	94.999.900	700.000.000	0	0	794.999.900	50.000.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	44.999.900	0	0	0	44.999.900	44.999.900	0	0	0	44.999.900	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	0	700.000.000	0	0	700.000.000	50.000.000	700.000.000	0	0	750.000.000	50.000.000
2	**12**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**3.825.528.708**	**735.286.000**	**0**	**0**	**4.560.814.708**	**3.598.905.720**	**618.883.600**	**0**	**0**	**4.217.789.320**	**(343.025.388)**
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.825.528.708	735.286.000	0	0	4.560.814.708	3.598.905.720	618.883.600	0	0	4.217.789.320	(343.025.388)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.179.195.508	735.286.000	0	0	3.914.481.508	2.948.790.420	618.883.600	0	0	3.567.674.020	(346.807.488)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.326.300	0	0	0	39.326.300	21.425.000	0	0	0	21.425.000	(17.901.300)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.178.700	0	0	0	3.178.700	3.178.700	0	0	0	3.178.700	0
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.959.900	0	0	0	4.959.900	2.686.300	0	0	0	2.686.300	(2.273.600)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.187.700	0	0	0	31.187.700	15.560.000	0	0	0	15.560.000	(15.627.700)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.495.222.808	0	0	0	2.495.222.808	2.294.126.020	0	0	0	2.294.126.020	(201.096.788)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.441.717.608	0	0	0	2.441.717.608	2.241.955.820	0	0	0	2.241.955.820	(199.761.788)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48.505.200	0	0	0	48.505.200	48.505.200	0	0	0	48.505.200	0
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	0	0	0	5.000.000	3.665.000	0	0	0	3.665.000	(1.335.000)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	288.991.500	0	0	0	288.991.500	327.998.200	0	0	0	327.998.200	39.006.700
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.250.000	0	0	0	5.250.000	5.250.000	0	0	0	5.250.000	0
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.309.400	0	0	0	78.309.400	63.935.600	0	0	0	63.935.600	(14.373.800)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.883.100	0	0	0	26.883.100	23.226.600	0	0	0	23.226.600	(3.656.500)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173.549.000	0	0	0	173.549.000	230.586.000	0	0	0	230.586.000	57.037.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.928.400	735.286.000	0	0	763.214.400	26.144.300	618.883.600	0	0	645.027.900	(118.186.500)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.928.400	735.286.000	0	0	763.214.400	26.144.300	618.883.600	0	0	645.027.900	(118.186.500)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.533.600	0	0	0	216.533.600	180.500.000	0	0	0	180.500.000	(36.033.600)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000	0
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.033.600	0	0	0	36.033.600	0	0	0	0	0	(36.033.600)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.000.000	0	0	0	180.000.000	180.000.000	0	0	0	180.000.000	0
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.192.900	0	0	0	111.192.900	98.596.900	0	0	0	98.596.900	(12.596.000)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.994.400	0	0	0	66.994.400	66.994.400	0	0	0	66.994.400	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.905.000	0	0	0	33.905.000	31.602.500	0	0	0	31.602.500	(2.302.500)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.993.500	0	0	0	9.993.500	0	0	0	0	0	(9.993.500)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	(300.000)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	570.982.000	0	0	0	570.982.000	570.982.000	0	0	0	570.982.000	0
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	570.982.000	0	0	0	570.982.000	570.982.000	0	0	0	570.982.000	0
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	519.407.000	0	0	0	519.407.000	519.407.000	0	0	0	519.407.000	0
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	51.575.000	0	0	0	51.575.000	51.575.000	0	0	0	51.575.000	0
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	34.544.000	0	0	0	34.544.000	35.426.000	0	0	0	35.426.000	882.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	34.544.000	0	0	0	34.544.000	35.426.000	0	0	0	35.426.000	882.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	34.544.000	0	0	0	34.544.000	35.426.000	0	0	0	35.426.000	882.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	8.999.800	0	0	0	8.999.800	3.999.900	0	0	0	3.999.900	(4.999.900)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	8.999.800	0	0	0	8.999.800	3.999.900	0	0	0	3.999.900	(4.999.900)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	3.999.900	0	0	0	3.999.900	3.999.900	0	0	0	3.999.900	0
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	4.999.900	0	0	0	4.999.900	0	0	0	0	0	(4.999.900)
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	31.807.400	0	0	0	31.807.400	39.707.400	0	0	0	39.707.400	7.900.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	31.807.400	0	0	0	31.807.400	39.707.400	0	0	0	39.707.400	7.900.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	31.807.400	0	0	0	31.807.400	39.707.400	0	0	0	39.707.400	7.900.000
2	**13**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**6.084.414.165**	**29.002.100**	**0**	**0**	**6.113.416.265**	**5.919.153.639**	**0**	**0**	**0**	**5.919.153.639**	**(194.262.626)**
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.084.414.165	29.002.100	0	0	6.113.416.265	5.919.153.639	0	0	0	5.919.153.639	(194.262.626)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.347.741.665	29.002.100	0	0	3.376.743.765	3.020.800.430	0	0	0	3.020.800.430	(355.943.335)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.035.000	0	0	0	15.035.000	8.520.000	0	0	0	8.520.000	(6.515.000)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	0	0	0	4.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	(1.000.000)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.035.000	0	0	0	11.035.000	5.520.000	0	0	0	5.520.000	(5.515.000)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.897.753.865	0	0	0	2.897.753.865	2.594.779.030	0	0	0	2.594.779.030	(302.974.835)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.841.440.665	0	0	0	2.841.440.665	2.539.805.730	0	0	0	2.539.805.730	(301.634.935)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.313.200	0	0	0	51.313.200	51.313.200	0	0	0	51.313.200	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	0	0	0	5.000.000	3.660.100	0	0	0	3.660.100	(1.339.900)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	126.178.100	0	0	0	126.178.100	121.673.600	0	0	0	121.673.600	(4.504.500)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	0	0	0	5.000.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	(2.500.000)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.000.000	0	0	0	14.000.000	8.000.000	0	0	0	8.000.000	(6.000.000)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.500.000	0	0	0	7.500.000	4.500.000	0	0	0	4.500.000	(3.000.000)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.015.700	0	0	0	14.015.700	8.172.600	0	0	0	8.172.600	(5.843.100)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.997.400	0	0	0	5.997.400	0	0	0	0	0	(5.997.400)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.665.000	0	0	0	79.665.000	98.501.000	0	0	0	98.501.000	18.836.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	29.002.100	0	0	29.002.100	0	0	0	0	0	(29.002.100)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	9.000.000	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	(9.000.000)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	20.002.100	0	0	20.002.100	0	0	0	0	0	(20.002.100)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.787.200	0	0	0	250.787.200	241.887.200	0	0	0	241.887.200	(8.900.000)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800.000	0	0	0	800.000	400.000	0	0	0	400.000	(400.000)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.000.000	0	0	0	32.000.000	23.500.000	0	0	0	23.500.000	(8.500.000)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	217.987.200	0	0	0	217.987.200	217.987.200	0	0	0	217.987.200	0
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.987.500	0	0	0	57.987.500	53.940.600	0	0	0	53.940.600	(4.046.900)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.145.500	0	0	0	51.145.500	49.559.100	0	0	0	49.559.100	(1.586.400)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.842.000	0	0	0	6.842.000	4.381.500	0	0	0	4.381.500	(2.460.500)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	300.000.000	0	0	0	300.000.000	414.917.100	0	0	0	414.917.100	114.917.100
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	300.000.000	0	0	0	300.000.000	414.917.100	0	0	0	414.917.100	114.917.100
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	300.000.000	0	0	0	300.000.000	414.917.100	0	0	0	414.917.100	114.917.100
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.779.337.700	0	0	0	1.779.337.700	1.772.923.800	0	0	0	1.772.923.800	(6.413.900)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.779.337.700	0	0	0	1.779.337.700	1.772.923.800	0	0	0	1.772.923.800	(6.413.900)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	80.000.000	0	0	0	80.000.000	56.788.000	0	0	0	56.788.000	(23.212.000)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	85.000.000	0	0	0	85.000.000	77.095.000	0	0	0	77.095.000	(7.905.000)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	70.000.100	0	0	0	70.000.100	70.000.100	0	0	0	70.000.100	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1.512.000.000	0	0	0	1.512.000.000	1.556.210.000	0	0	0	1.556.210.000	44.210.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	7.337.600	0	0	0	7.337.600	7.337.600	0	0	0	7.337.600	0
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	15.000.000	0	0	0	15.000.000	588.100	0	0	0	588.100	(14.411.900)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10.000.000	0	0	0	10.000.000	4.905.000	0	0	0	4.905.000	(5.095.000)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	657.334.800	0	0	0	657.334.800	710.512.309	0	0	0	710.512.309	53.177.509
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	657.334.800	0	0	0	657.334.800	710.512.309	0	0	0	710.512.309	53.177.509
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	200.000.000	0	0	0	200.000.000	166.527.509	0	0	0	166.527.509	(33.472.491)
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	327.337.600	0	0	0	327.337.600	327.337.600	0	0	0	327.337.600	0
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	29.997.200	0	0	0	29.997.200	116.647.200	0	0	0	116.647.200	86.650.000
2	**14**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**13.094.076.311**	**769.536.400**	**0**	**0**	**13.863.612.711**	**12.576.318.604**	**741.000.000**	**0**	**0**	**13.317.318.604**	**(546.294.107)**
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	13.094.076.311	769.536.400	0	0	13.863.612.711	12.576.318.604	741.000.000	0	0	13.317.318.604	(546.294.107)
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.152.638.311	89.536.400	0	0	5.242.174.711	4.550.938.704	61.000.000	0	0	4.611.938.704	(630.236.007)
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.956.000	0	0	0	19.956.000	11.403.000	0	0	0	11.403.000	(8.553.000)
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	(5.000.000)
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.956.000	0	0	0	14.956.000	11.403.000	0	0	0	11.403.000	(3.553.000)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.535.400.161	0	0	0	4.535.400.161	3.937.284.154	0	0	0	3.937.284.154	(598.116.007)
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.469.004.561	0	0	0	4.469.004.561	3.871.913.554	0	0	0	3.871.913.554	(597.091.007)
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.395.600	0	0	0	61.395.600	61.395.600	0	0	0	61.395.600	0
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	0	0	0	5.000.000	3.975.000	0	0	0	3.975.000	(1.025.000)
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	193.977.100	0	0	0	193.977.100	221.256.400	0	0	0	221.256.400	27.279.300
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.994.100	0	0	0	5.994.100	3.545.000	0	0	0	3.545.000	(2.449.100)
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	0	0	0	25.000.000	17.316.100	0	0	0	17.316.100	(7.683.900)
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.998.000	0	0	0	11.998.000	8.950.300	0	0	0	8.950.300	(3.047.700)
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000	0	0	0	15.000.000	7.500.000	0	0	0	7.500.000	(7.500.000)
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.993.000	0	0	0	5.993.000	5.993.000	0	0	0	5.993.000	0
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.992.000	0	0	0	129.992.000	177.952.000	0	0	0	177.952.000	47.960.000
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	89.536.400	0	0	89.536.400	0	61.000.000	0	0	61.000.000	(28.536.400)
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	89.536.400	0	0	89.536.400	0	61.000.000	0	0	61.000.000	(28.536.400)
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	211.655.400	0	0	0	211.655.400	211.793.400	0	0	0	211.793.400	138.000
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.999.400	0	0	0	26.999.400	26.999.400	0	0	0	26.999.400	0
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.656.000	0	0	0	181.656.000	181.794.000	0	0	0	181.794.000	138.000
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	191.649.650	0	0	0	191.649.650	169.201.750	0	0	0	169.201.750	(22.447.900)
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	116.649.750	0	0	0	116.649.750	94.201.850	0	0	0	94.201.850	(22.447.900)
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000	0	0	0	60.000.000	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.999.900	0	0	0	14.999.900	14.999.900	0	0	0	14.999.900	0
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	880.679.100	0	0	0	880.679.100	880.675.400	0	0	0	880.675.400	(3.700)
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	808.679.100	0	0	0	808.679.100	808.675.400	0	0	0	808.675.400	(3.700)
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	808.679.100	0	0	0	808.679.100	808.675.400	0	0	0	808.675.400	(3.700)
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	72.000.000	0	0	0	72.000.000	72.000.000	0	0	0	72.000.000	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	72.000.000	0	0	0	72.000.000	72.000.000	0	0	0	72.000.000	0
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.139.160.900	680.000.000	0	0	4.819.160.900	4.179.167.500	680.000.000	0	0	4.859.167.500	40.006.600
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.230.962.900	0	0	0	1.230.962.900	1.230.962.900	0	0	0	1.230.962.900	0
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	64.200.000	0	0	0	64.200.000	64.200.000	0	0	0	64.200.000	0
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	194.983.800	0	0	0	194.983.800	194.983.800	0	0	0	194.983.800	0
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	721.789.300	0	0	0	721.789.300	721.789.300	0	0	0	721.789.300	0
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	199.989.800	0	0	0	199.989.800	199.989.800	0	0	0	199.989.800	0
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.138.667.000	680.000.000	0	0	1.818.667.000	1.138.667.000	680.000.000	0	0	1.818.667.000	0
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	25.467.000	680.000.000	0	0	705.467.000	25.467.000	680.000.000	0	0	705.467.000	0
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.113.200.000	0	0	0	1.113.200.000	1.113.200.000	0	0	0	1.113.200.000	0
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.385.052.000	0	0	0	1.385.052.000	1.385.052.000	0	0	0	1.385.052.000	0
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	22.500.000	0	0	0	22.500.000	22.500.000	0	0	0	22.500.000	0
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	429.300.000	0	0	0	429.300.000	429.300.000	0	0	0	429.300.000	0
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	44.690.000	0	0	0	44.690.000	44.690.000	0	0	0	44.690.000	0
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	851.010.000	0	0	0	851.010.000	851.010.000	0	0	0	851.010.000	0
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	37.552.000	0	0	0	37.552.000	37.552.000	0	0	0	37.552.000	0
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	384.479.000	0	0	0	384.479.000	424.485.600	0	0	0	424.485.600	40.006.600
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.04	01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	50.000.000	0	0	0	50.000.000	90.006.600	0	0	0	90.006.600	40.006.600

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	334.479.000	0	0	0	334.479.000	334.479.000	0	0	0	334.479.000	0
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.921.598.000	0	0	0	2.921.598.000	2.965.537.000	0	0	0	2.965.537.000	43.939.000
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.921.598.000	0	0	0	2.921.598.000	2.965.537.000	0	0	0	2.965.537.000	43.939.000
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.136.600.000	0	0	0	2.136.600.000	2.136.600.000	0	0	0	2.136.600.000	0
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	50.000.000	0	0	0	50.000.000	93.939.500	0	0	0	93.939.500	43.939.500
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	04	2.01	14	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	734.998.000	0	0	0	734.998.000	734.997.500	0	0	0	734.997.500	(500)
2	**15**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**5.421.437.908**	**384.054.300**	**0**	**0**	**5.805.492.208**	**5.006.219.683**	**314.805.900**	**0**	**0**	**5.321.025.583**	**(484.466.625)**
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000				DINAS PERHUBUNGAN	5.421.437.908	384.054.300	0	0	5.805.492.208	5.006.219.683	314.805.900	0	0	5.321.025.583	(484.466.625)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.639.358.370	93.000.000	0	0	4.732.358.370	4.174.177.645	93.000.000	0	0	4.267.177.645	(465.180.725)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.497.000	0	0	0	47.497.000	27.497.000	0	0	0	27.497.000	(20.000.000)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.499.000	0	0	0	7.499.000	7.499.000	0	0	0	7.499.000	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.999.000	0	0	0	4.999.000	4.999.000	0	0	0	4.999.000	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.999.000	0	0	0	34.999.000	14.999.000	0	0	0	14.999.000	(20.000.000)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.857.868.908	0	0	0	3.857.868.908	3.510.430.023	0	0	0	3.510.430.023	(347.438.885)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.802.113.708	0	0	0	3.802.113.708	3.454.674.823	0	0	0	3.454.674.823	(347.438.885)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.755.200	0	0	0	50.755.200	50.755.200	0	0	0	50.755.200	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	220.211.200	0	0	0	220.211.200	150.371.200	0	0	0	150.371.200	(69.840.000)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.995.200	0	0	0	6.995.200	6.995.200	0	0	0	6.995.200	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.706.100	0	0	0	23.706.100	23.706.100	0	0	0	23.706.100	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.996.200	0	0	0	4.996.200	4.996.200	0	0	0	4.996.200	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.097.200	0	0	0	14.097.200	14.097.200	0	0	0	14.097.200	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.458.500	0	0	0	10.458.500	10.458.500	0	0	0	10.458.500	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.958.000	0	0	0	159.958.000	90.118.000	0	0	0	90.118.000	(69.840.000)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	93.000.000	0	0	93.000.000	0	93.000.000	0	0	93.000.000	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	93.000.000	0	0	93.000.000	0	93.000.000	0	0	93.000.000	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	384.019.600	0	0	0	384.019.600	384.019.600	0	0	0	384.019.600	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.714.000	0	0	0	48.714.000	48.714.000	0	0	0	48.714.000	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	334.305.600	0	0	0	334.305.600	334.305.600	0	0	0	334.305.600	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.761.662	0	0	0	129.761.662	101.859.822	0	0	0	101.859.822	(27.901.840)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124.999.662	0	0	0	124.999.662	97.097.822	0	0	0	97.097.822	(27.901.840)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.762.000	0	0	0	4.762.000	4.762.000	0	0	0	4.762.000	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	762.079.738	291.054.300	0	0	1.053.134.038	820.202.238	221.805.900	0	0	1.042.008.138	(11.125.900)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	40.000.000	291.054.300	0	0	331.054.300	5.437.200	170.619.100	0	0	176.056.300	(154.998.000)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	40.000.000	291.054.300	0	0	331.054.300	5.437.200	170.619.100	0	0	176.056.300	(154.998.000)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	26.889.600	0	0	0	26.889.600	22.313.300	51.186.800	0	0	73.500.100	46.610.500
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	26.889.600	0	0	0	26.889.600	22.313.300	51.186.800	0	0	73.500.100	46.610.500
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	95.070.238	0	0	0	95.070.238	95.070.238	0	0	0	95.070.238	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	59.083.200	0	0	0	59.083.200	59.083.200	0	0	0	59.083.200	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	35.987.038	0	0	0	35.987.038	35.987.038	0	0	0	35.987.038	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	570.119.900	0	0	0	570.119.900	697.381.500	0	0	0	697.381.500	127.261.600
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	479.890.600	0	0	0	479.890.600	667.381.500	0	0	0	667.381.500	187.490.900
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	90.229.300	0	0	0	90.229.300	30.000.000	0	0	0	30.000.000	(60.229.300)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	(30.000.000)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	(30.000.000)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	19.999.800	0	0	0	19.999.800	11.839.800	0	0	0	11.839.800	(8.160.000)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	19.999.800	0	0	0	19.999.800	11.839.800	0	0	0	11.839.800	(8.160.000)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	19.999.800	0	0	0	19.999.800	11.839.800	0	0	0	11.839.800	(8.160.000)
2	**16**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**5.827.993.730**	**23.000.000**	**0**	**0**	**5.850.993.730**	**6.017.918.391**	**14.200.000**	**0**	**0**	**6.032.118.391**	**181.124.661**
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.827.993.730	23.000.000	0	0	5.850.993.730	6.017.918.391	14.200.000	0	0	6.032.118.391	181.124.661
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.188.207.330	4.800.000	0	0	4.193.007.330	3.797.409.991	4.800.000	0	0	3.802.209.991	(390.797.339)
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.000.000	0	0	0	56.000.000	56.000.000	0	0	0	56.000.000	0
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	0	0	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.548.069.838	0	0	0	2.548.069.838	2.324.096.499	0	0	0	2.324.096.499	(223.973.339)
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.491.387.438	0	0	0	2.491.387.438	2.270.134.099	0	0	0	2.270.134.099	(221.253.339)
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.682.400	0	0	0	52.682.400	49.962.400	0	0	0	49.962.400	(2.720.000)
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	83.099.200	0	0	0	83.099.200	83.099.200	0	0	0	83.099.200	0
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	83.099.200	0	0	0	83.099.200	83.099.200	0	0	0	83.099.200	0
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	371.486.500	0	0	0	371.486.500	455.645.500	0	0	0	455.645.500	84.159.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.599.000	0	0	0	9.599.000	14.046.200	0	0	0	14.046.200	4.447.200
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.228.200	0	0	0	35.228.200	35.228.200	0	0	0	35.228.200	0
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.191.900	0	0	0	20.191.900	24.835.900	0	0	0	24.835.900	4.644.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.796.900	0	0	0	25.796.900	27.259.700	0	0	0	27.259.700	1.462.800
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	46.081.500	0	0	0	46.081.500	46.081.500	0	0	0	46.081.500	0
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	234.589.000	0	0	0	234.589.000	308.194.000	0	0	0	308.194.000	73.605.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	945.423.792	4.800.000	0	0	950.223.792	627.703.792	4.800.000	0	0	632.503.792	(317.720.000)
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	538.609.500	4.800.000	0	0	543.409.500	460.889.500	4.800.000	0	0	465.689.500	(77.720.000)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	403.814.292	0	0	0	403.814.292	163.814.292	0	0	0	163.814.292	(240.000.000)
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.128.000	0	0	0	184.128.000	250.865.000	0	0	0	250.865.000	66.737.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	94.358.800	0	0	0	94.358.800	94.358.800	0	0	0	94.358.800	0
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.498.200	0	0	0	65.498.200	69.182.200	0	0	0	69.182.200	3.684.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.271.000	0	0	0	24.271.000	87.324.000	0	0	0	87.324.000	63.053.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.253.786.400	5.000.000	0	0	1.258.786.400	1.744.512.900	5.000.000	0	0	1.749.512.900	490.726.500
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.253.786.400	5.000.000	0	0	1.258.786.400	1.744.512.900	5.000.000	0	0	1.749.512.900	490.726.500
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	85.000.000	5.000.000	0	0	90.000.000	335.726.500	5.000.000	0	0	340.726.500	250.726.500
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	600.000.000	0	0	0	600.000.000	900.000.000	0	0	0	900.000.000	300.000.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	70.000.000	0	0	0	70.000.000	70.000.000	0	0	0	70.000.000	0
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	498.786.400	0	0	0	498.786.400	438.786.400	0	0	0	438.786.400	(60.000.000)
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	386.000.000	13.200.000	0	0	399.200.000	475.995.500	4.400.000	0	0	480.395.500	81.195.500
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	36.000.000	0	0	0	36.000.000	26.200.000	0	0	0	26.200.000	(9.800.000)
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	36.000.000	0	0	0	36.000.000	26.200.000	0	0	0	26.200.000	(9.800.000)
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000	13.200.000	0	0	363.200.000	449.795.500	4.400.000	0	0	454.195.500	90.995.500
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	13.200.000	0	0	63.200.000	50.000.000	4.400.000	0	0	54.400.000	(8.800.000)
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	260.000.000	0	0	0	260.000.000	359.795.500	0	0	0	359.795.500	99.795.500
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	40.000.000	0	0	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0
2	**17**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**9.275.982.905**	**48.098.700**	**0**	**0**	**9.324.081.605**	**8.852.914.456**	**0**	**0**	**0**	**8.852.914.456**	**(471.167.149)**
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	9.275.982.905	48.098.700	0	0	9.324.081.605	8.852.914.456	0	0	0	8.852.914.456	(471.167.149)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.712.677.905	48.098.700	0	0	7.760.776.605	7.382.854.456	0	0	0	7.382.854.456	(377.922.149)
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.262.900	0	0	0	37.262.900	37.262.900	0	0	0	37.262.900	0
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.999.900	0	0	0	4.999.900	4.999.900	0	0	0	4.999.900	0
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.263.000	0	0	0	22.263.000	22.263.000	0	0	0	22.263.000	0
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.822.081.245	0	0	0	5.822.081.245	5.405.173.516	0	0	0	5.405.173.516	(416.907.729)
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.765.262.945	0	0	0	5.765.262.945	5.341.355.216	0	0	0	5.341.355.216	(423.907.729)
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.818.400	0	0	0	51.818.400	58.818.400	0	0	0	58.818.400	7.000.000
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.999.900	0	0	0	4.999.900	4.999.900	0	0	0	4.999.900	0
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.999.900	0	0	0	4.999.900	4.999.900	0	0	0	4.999.900	0
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.999.900	0	0	0	4.999.900	4.999.900	0	0	0	4.999.900	0
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	321.042.500	0	0	0	321.042.500	371.861.500	0	0	0	371.861.500	50.819.000
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.999.500	0	0	0	11.999.500	11.999.500	0	0	0	11.999.500	0
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.055.000	0	0	0	36.055.000	49.534.000	0	0	0	49.534.000	13.479.000
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	0	0	0	10.000.000	11.522.000	0	0	0	11.522.000	1.522.000
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.000.000	0	0	0	55.000.000	55.000.000	0	0	0	55.000.000	0
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000	0	0	0	8.000.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	(6.500.000)
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.988.000	0	0	0	199.988.000	242.306.000	0	0	0	242.306.000	42.318.000
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.570.000	48.098.700	0	0	49.668.700	0	0	0	0	0	(49.668.700)
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.570.000	48.098.700	0	0	49.668.700	0	0	0	0	0	(49.668.700)
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.346.194.600	0	0	0	1.346.194.600	1.402.418.600	0	0	0	1.402.418.600	56.224.000
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.000.000	0	0	0	17.000.000	10.724.000	0	0	0	10.724.000	(6.276.000)
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.327.994.600	0	0	0	1.327.994.600	1.390.494.600	0	0	0	1.390.494.600	62.500.000
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.526.760	0	0	0	174.526.760	156.138.040	0	0	0	156.138.040	(18.388.720)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.307.360	0	0	0	79.307.360	60.921.040	0	0	0	60.921.040	(18.386.320)
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.074.500	0	0	0	50.074.500	50.074.500	0	0	0	50.074.500	0
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.144.900	0	0	0	45.144.900	45.142.500	0	0	0	45.142.500	(2.400)
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	327.305.200	0	0	0	327.305.200	327.305.200	0	0	0	327.305.200	0
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	327.305.200	0	0	0	327.305.200	327.305.200	0	0	0	327.305.200	0
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	327.305.200	0	0	0	327.305.200	327.305.200	0	0	0	327.305.200	0
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	231.000.000	0	0	0	231.000.000	231.000.000	0	0	0	231.000.000	0
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	231.000.000	0	0	0	231.000.000	231.000.000	0	0	0	231.000.000	0
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	150.000.000	0	0	0	150.000.000	150.000.000	0	0	0	150.000.000	0
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	31.000.000	0	0	0	31.000.000	31.000.000	0	0	0	31.000.000	0
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	904.999.800	0	0	0	904.999.800	811.754.800	0	0	0	811.754.800	(93.245.000)
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	904.999.800	0	0	0	904.999.800	811.754.800	0	0	0	811.754.800	(93.245.000)
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	904.999.800	0	0	0	904.999.800	811.754.800	0	0	0	811.754.800	(93.245.000)
2	17	2.17.3.31.3.30.03.0000				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**18**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**3.995.993.272**	**20.000.000**	**0**	**0**	**4.015.993.272**	**3.575.908.787**	**0**	**0**	**0**	**3.575.908.787**	**(440.084.485)**

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.995.993.272	20.000.000	0	0	4.015.993.272	3.575.908.787	0	0	0	3.575.908.787	(440.084.485)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.884.891.372	20.000.000	0	0	2.904.891.372	2.700.775.887	0	0	0	2.700.775.887	(204.115.485)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.999.800	0	0	0	39.999.800	36.999.800	0	0	0	36.999.800	(3.000.000)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.900	0	0	0	4.999.900	4.999.900	0	0	0	4.999.900	0
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.999.900	0	0	0	29.999.900	26.999.900	0	0	0	26.999.900	(3.000.000)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.269.286.172	0	0	0	2.269.286.172	2.104.924.887	0	0	0	2.104.924.887	(164.361.285)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.207.736.272	0	0	0	2.207.736.272	2.043.374.987	0	0	0	2.043.374.987	(164.361.285)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53.050.000	0	0	0	53.050.000	53.050.000	0	0	0	53.050.000	0
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.499.900	0	0	0	3.499.900	3.499.900	0	0	0	3.499.900	0
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	291.121.800	0	0	0	291.121.800	321.772.300	0	0	0	321.772.300	30.650.500
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.999.900	0	0	0	8.999.900	4.943.900	0	0	0	4.943.900	(4.056.000)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.260.200	0	0	0	63.260.200	63.260.200	0	0	0	63.260.200	0
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.864.900	0	0	0	28.864.900	23.726.300	0	0	0	23.726.300	(5.138.600)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.999.800	0	0	0	29.999.800	24.154.900	0	0	0	24.154.900	(5.844.900)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.997.000	0	0	0	159.997.000	205.687.000	0	0	0	205.687.000	45.690.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	(20.000.000)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	(20.000.000)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.712.000	0	0	0	161.712.000	149.722.000	0	0	0	149.722.000	(11.990.000)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.552.800	0	0	0	51.552.800	39.562.800	0	0	0	39.562.800	(11.990.000)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109.159.200	0	0	0	109.159.200	109.159.200	0	0	0	109.159.200	0
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.771.600	0	0	0	122.771.600	87.356.900	0	0	0	87.356.900	(35.414.700)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.000.500	0	0	0	79.000.500	74.996.100	0	0	0	74.996.100	(4.004.400)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.959.900	0	0	0	5.959.900	9.188.600	0	0	0	9.188.600	3.228.700

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.998.000	0	0	0	19.998.000	0	0	0	0	0	(19.998.000)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.813.200	0	0	0	17.813.200	3.172.200	0	0	0	3.172.200	(14.641.000)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	136.702.100	0	0	0	136.702.100	71.293.000	0	0	0	71.293.000	(65.409.100)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	119.963.100	0	0	0	119.963.100	56.201.000	0	0	0	56.201.000	(63.762.100)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	119.963.100	0	0	0	119.963.100	56.201.000	0	0	0	56.201.000	(63.762.100)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	16.739.000	0	0	0	16.739.000	15.092.000	0	0	0	15.092.000	(1.647.000)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	16.739.000	0	0	0	16.739.000	15.092.000	0	0	0	15.092.000	(1.647.000)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	225.470.700	0	0	0	225.470.700	81.402.900	0	0	0	81.402.900	(144.067.800)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	225.470.700	0	0	0	225.470.700	81.402.900	0	0	0	81.402.900	(144.067.800)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	87.400.300	0	0	0	87.400.300	26.384.900	0	0	0	26.384.900	(61.015.400)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	138.070.400	0	0	0	138.070.400	55.018.000	0	0	0	55.018.000	(83.052.400)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	122.595.800	0	0	0	122.595.800	99.796.000	0	0	0	99.796.000	(22.799.800)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	122.595.800	0	0	0	122.595.800	99.796.000	0	0	0	99.796.000	(22.799.800)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	80.000.000	0	0	0	80.000.000	84.200.000	0	0	0	84.200.000	4.200.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	18.636.300	0	0	0	18.636.300	11.636.500	0	0	0	11.636.500	(6.999.800)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	13.959.500	0	0	0	13.959.500	3.959.500	0	0	0	3.959.500	(10.000.000)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	(10.000.000)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	541.612.800	0	0	0	541.612.800	548.632.800	0	0	0	548.632.800	7.020.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	541.612.800	0	0	0	541.612.800	548.632.800	0	0	0	548.632.800	7.020.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	32.829.000	0	0	0	32.829.000	39.849.000	0	0	0	39.849.000	7.020.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	456.386.800	0	0	0	456.386.800	456.386.800	0	0	0	456.386.800	0
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	52.397.000	0	0	0	52.397.000	52.397.000	0	0	0	52.397.000	0
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	84.720.500	0	0	0	84.720.500	74.008.200	0	0	0	74.008.200	(10.712.300)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	84.720.500	0	0	0	84.720.500	74.008.200	0	0	0	74.008.200	(10.712.300)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	84.720.500	0	0	0	84.720.500	74.008.200	0	0	0	74.008.200	(10.712.300)
2	**19**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**5.854.951.901**	**428.359.600**	**0**	**0**	**6.283.311.501**	**5.718.970.256**	**232.423.600**	**0**	**0**	**5.951.393.856**	**(331.917.645)**
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000				DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	5.854.951.901	428.359.600	0	0	6.283.311.501	5.718.970.256	232.423.600	0	0	5.951.393.856	(331.917.645)
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.992.400.901	41.380.800	0	0	3.033.781.701	2.694.294.456	41.380.800	0	0	2.735.675.256	(298.106.445)
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.476.000	0	0	0	36.476.000	36.476.000	0	0	0	36.476.000	0
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.993.200	0	0	0	4.993.200	4.993.200	0	0	0	4.993.200	0
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.292.800	0	0	0	4.292.800	4.292.800	0	0	0	4.292.800	0
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.190.000	0	0	0	22.190.000	22.190.000	0	0	0	22.190.000	0
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.481.467.781	0	0	0	2.481.467.781	2.140.429.336	0	0	0	2.140.429.336	(341.038.445)
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.426.837.581	0	0	0	2.426.837.581	2.085.799.136	0	0	0	2.085.799.136	(341.038.445)
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.587.200	0	0	0	50.587.200	50.587.200	0	0	0	50.587.200	0
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.043.000	0	0	0	4.043.000	4.043.000	0	0	0	4.043.000	0
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	228.673.720	0	0	0	228.673.720	272.105.720	0	0	0	272.105.720	43.432.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.137.000	0	0	0	15.137.000	12.201.000	0	0	0	12.201.000	(2.936.000)
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.176.000	0	0	0	28.176.000	28.176.000	0	0	0	28.176.000	0
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.775.100	0	0	0	15.775.100	15.775.100	0	0	0	15.775.100	0
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.518.620	0	0	0	14.518.620	12.218.620	0	0	0	12.218.620	(2.300.000)
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.104.000	0	0	0	15.104.000	13.850.000	0	0	0	13.850.000	(1.254.000)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	139.963.000	0	0	0	139.963.000	189.885.000	0	0	0	189.885.000	49.922.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	41.380.800	0	0	41.380.800	0	41.380.800	0	0	41.380.800	0
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	41.380.800	0	0	41.380.800	0	41.380.800	0	0	41.380.800	0
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	186.052.800	0	0	0	186.052.800	185.552.800	0	0	0	185.552.800	(500.000)
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	0	0	0	1.000.000	500.000	0	0	0	500.000	(500.000)
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.893.600	0	0	0	57.893.600	57.893.600	0	0	0	57.893.600	0
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.159.200	0	0	0	127.159.200	127.159.200	0	0	0	127.159.200	0
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.730.600	0	0	0	59.730.600	59.730.600	0	0	0	59.730.600	0
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.000.000	0	0	0	37.000.000	37.000.000	0	0	0	37.000.000	0
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.736.000	0	0	0	7.736.000	7.736.000	0	0	0	7.736.000	0
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.994.600	0	0	0	14.994.600	14.994.600	0	0	0	14.994.600	0
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	507.953.100	0	0	0	507.953.100	437.449.600	0	0	0	437.449.600	(70.503.500)
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	222.953.100	0	0	0	222.953.100	167.449.600	0	0	0	167.449.600	(55.503.500)
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	67.449.600	0	0	0	67.449.600	67.449.600	0	0	0	67.449.600	0
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	55.503.500	0	0	0	55.503.500	0	0	0	0	0	(55.503.500)
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	285.000.000	0	0	0	285.000.000	270.000.000	0	0	0	270.000.000	(15.000.000)
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	(15.000.000)
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	270.000.000	0	0	0	270.000.000	270.000.000	0	0	0	270.000.000	0
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.354.597.900	386.978.800	0	0	2.741.576.700	2.587.226.200	191.042.800	0	0	2.778.269.000	36.692.300

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	324.597.900	386.978.800	0	0	711.576.700	457.226.200	191.042.800	0	0	648.269.000	(63.307.700)
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	324.597.900	386.978.800	0	0	711.576.700	457.226.200	191.042.800	0	0	648.269.000	(63.307.700)
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	330.000.000	0	0	0	330.000.000	330.000.000	0	0	0	330.000.000	0
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah	80.000.000	0	0	0	80.000.000	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	250.000.000	0	0	0	250.000.000	250.000.000	0	0	0	250.000.000	0
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.700.000.000	0	0	0	1.700.000.000	1.800.000.000	0	0	0	1.800.000.000	100.000.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1.700.000.000	0	0	0	1.700.000.000	1.800.000.000	0	0	0	1.800.000.000	100.000.000
2	**20**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**128.543.000**	**0**	**0**	**0**	**128.543.000**	**128.543.000**	**0**	**0**	**0**	**128.543.000**	**0**
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	128.543.000	0	0	0	128.543.000	128.543.000	0	0	0	128.543.000	0
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	128.543.000	0	0	0	128.543.000	128.543.000	0	0	0	128.543.000	0
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	128.543.000	0	0	0	128.543.000	128.543.000	0	0	0	128.543.000	0
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	73.179.600	0	0	0	73.179.600	73.179.600	0	0	0	73.179.600	0
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	55.363.400	0	0	0	55.363.400	55.363.400	0	0	0	55.363.400	0
2	**21**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**57.359.800**	**0**	**0**	**0**	**57.359.800**	**5.985.000**	**0**	**0**	**0**	**5.985.000**	**(51.374.800)**
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	57.359.800	0	0	0	57.359.800	5.985.000	0	0	0	5.985.000	(51.374.800)
2	21	2.16.2.20.2.21.01.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	57.359.800	0	0	0	57.359.800	5.985.000	0	0	0	5.985.000	(51.374.800)
2	21	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	57.359.800	0	0	0	57.359.800	5.985.000	0	0	0	5.985.000	(51.374.800)
2	21	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	57.359.800	0	0	0	57.359.800	5.985.000	0	0	0	5.985.000	(51.374.800)
2	**22**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**270.320.300**	**0**	**0**	**0**	**270.320.300**	**608.709.190**	**0**	**0**	**0**	**608.709.190**	**338.388.890**
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	270.320.300	0	0	0	270.320.300	608.709.190	0	0	0	608.709.190	338.388.890
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	270.320.300	0	0	0	270.320.300	608.709.190	0	0	0	608.709.190	338.388.890
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000	0	0	0	70.000.000	70.000.000	0	0	0	70.000.000	0
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	70.000.000	0	0	0	70.000.000	70.000.000	0	0	0	70.000.000	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.320.300	0	0	0	200.320.300	538.709.190	0	0	0	538.709.190	338.388.890
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	100.320.300	0	0	0	100.320.300	123.709.190	0	0	0	123.709.190	23.388.890
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	100.000.000	0	0	0	100.000.000	415.000.000	0	0	0	415.000.000	315.000.000
2	**23**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**3.257.749.872**	**21.800.000**	**0**	**0**	**3.279.549.872**	**2.989.699.061**	**98.942.000**	**0**	**0**	**3.088.641.061**	**(190.908.811)**
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000				DINAS PERPUSTAKAAN	3.257.749.872	21.800.000	0	0	3.279.549.872	2.989.699.061	98.942.000	0	0	3.088.641.061	(190.908.811)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.996.399.872	18.000.000	0	0	3.014.399.872	2.807.991.461	15.500.000	0	0	2.823.491.461	(190.908.411)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.999.500	0	0	0	34.999.500	17.787.400	0	0	0	17.787.400	(17.212.100)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.997.800	0	0	0	4.997.800	2.890.300	0	0	0	2.890.300	(2.107.500)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.964.600	0	0	0	1.964.600	1.672.500	0	0	0	1.672.500	(292.100)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.965.900	0	0	0	1.965.900	0	0	0	0	0	(1.965.900)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.989.600	0	0	0	4.989.600	4.989.600	0	0	0	4.989.600	0
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.081.600	0	0	0	21.081.600	8.235.000	0	0	0	8.235.000	(12.846.600)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.501.026.352	0	0	0	2.501.026.352	2.360.791.041	0	0	0	2.360.791.041	(140.235.311)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.463.238.052	0	0	0	2.463.238.052	2.325.321.741	0	0	0	2.325.321.741	(137.916.311)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.859.600	0	0	0	32.859.600	32.859.600	0	0	0	32.859.600	0
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.928.700	0	0	0	4.928.700	2.609.700	0	0	0	2.609.700	(2.319.000)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.104.600	0	0	0	180.104.600	121.949.700	0	0	0	121.949.700	(58.154.900)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.404.400	0	0	0	2.404.400	1.063.200	0	0	0	1.063.200	(1.341.200)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.001.100	0	0	0	33.001.100	29.637.100	0	0	0	29.637.100	(3.364.000)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.191.500	0	0	0	12.191.500	8.009.700	0	0	0	8.009.700	(4.181.800)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.059.100	0	0	0	15.059.100	14.096.200	0	0	0	14.096.200	(962.900)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.803.500	0	0	0	5.803.500	5.803.500	0	0	0	5.803.500	0
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.645.000	0	0	0	111.645.000	63.340.000	0	0	0	63.340.000	(48.305.000)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	18.000.000	0	0	18.000.000	1.720.000	15.500.000	0	0	17.220.000	(780.000)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	18.000.000	0	0	18.000.000	1.720.000	15.500.000	0	0	17.220.000	(780.000)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.602.500	0	0	0	243.602.500	273.857.200	0	0	0	273.857.200	30.254.700

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150.000	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	150.000	0
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.596.500	0	0	0	36.596.500	23.320.000	0	0	0	23.320.000	(13.276.500)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	206.856.000	0	0	0	206.856.000	250.387.200	0	0	0	250.387.200	43.531.200
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.666.920	0	0	0	36.666.920	31.886.120	0	0	0	31.886.120	(4.780.800)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.285.920	0	0	0	34.285.920	29.505.120	0	0	0	29.505.120	(4.780.800)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.381.000	0	0	0	2.381.000	2.381.000	0	0	0	2.381.000	0
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	261.350.000	3.800.000	0	0	265.150.000	181.707.600	83.442.000	0	0	265.149.600	(400)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	193.459.000	3.800.000	0	0	197.259.000	181.707.600	83.442.000	0	0	265.149.600	67.890.600
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	1.500.000	0	0	0	1.500.000	3.190.000	65.000.000	0	0	68.190.000	66.690.000
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	181.669.000	3.800.000	0	0	185.469.000	168.707.300	17.992.000	0	0	186.699.300	1.230.300
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	10.290.000	0	0	0	10.290.000	9.810.300	450.000	0	0	10.260.300	(29.700)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	67.891.000	0	0	0	67.891.000	0	0	0	0	0	(67.891.000)
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.02	01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	67.891.000	0	0	0	67.891.000	0	0	0	0	0	(67.891.000)
2	**24**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**60.000.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000.000**	**60.000.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000.000**	**0**
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000				DINAS PERPUSTAKAAN	60.000.000	0	0	0	60.000.000	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	60.000.000	0	0	0	60.000.000	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	0	0	0	60.000.000	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	48.000.000	0	0	0	48.000.000	48.000.000	0	0	0	48.000.000	0
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	12.000.000	0	0	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0
3						**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**54.922.435.278**	**19.301.391.145**	**0**	**0**	**74.223.826.423**	**54.404.228.617**	**18.589.559.910**	**0**	**0**	**72.993.788.527**	**(1.230.037.896)**
3	**25**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**1.577.571.500**	**0**	**0**	**0**	**1.577.571.500**	**2.217.064.650**	**0**	**0**	**0**	**2.217.064.650**	**639.493.150**
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000				DINAS KETAHANAN PANGAN	1.577.571.500	0	0	0	1.577.571.500	2.217.064.650	0	0	0	2.217.064.650	639.493.150
3	25	2.09.3.25.3.27.01.0000	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.577.571.500	0	0	0	1.577.571.500	2.217.064.650	0	0	0	2.217.064.650	639.493.150
3	25	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.577.571.500	0	0	0	1.577.571.500	2.217.064.650	0	0	0	2.217.064.650	639.493.150
3	25	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	0	0	0	100.000.000	500.000.000	0	0	0	500.000.000	400.000.000
3	25	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	0	0	0	150.000.000	150.000.000	0	0	0	150.000.000	0
3	25	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	550.000.000	0	0	0	550.000.000	740.320.000	0	0	0	740.320.000	190.320.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3	25	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	777.571.500	0	0	0	777.571.500	826.744.650	0	0	0	826.744.650	49.173.150
3	**26**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**8.123.867.024**	**16.615.835.545**	**0**	**0**	**24.739.702.569**	**7.688.963.244**	**16.386.319.810**	**0**	**0**	**24.075.283.054**	**(664.419.515)**
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000				DINAS PARIWISATA	8.123.867.024	16.615.835.545	0	0	24.739.702.569	7.688.963.244	16.386.319.810	0	0	24.075.283.054	(664.419.515)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.515.229.764	342.834.946	0	0	4.858.064.710	4.442.424.036	528.694.031	0	0	4.971.118.067	113.053.357
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.027.626	0	0	0	50.027.626	50.027.626	0	0	0	50.027.626	0
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.184.303	0	0	0	6.184.303	6.184.303	0	0	0	6.184.303	0
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.456.100	0	0	0	4.456.100	4.456.100	0	0	0	4.456.100	0
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.140.700	0	0	0	4.140.700	4.140.700	0	0	0	4.140.700	0
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.296.523	0	0	0	4.296.523	4.296.523	0	0	0	4.296.523	0
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.500.000	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0	3.500.000	0
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.450.000	0	0	0	22.450.000	22.450.000	0	0	0	22.450.000	0
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.631.046.220	0	0	0	3.631.046.220	3.386.058.601	0	0	0	3.386.058.601	(244.987.619)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.561.046.220	0	0	0	3.561.046.220	3.316.058.601	0	0	0	3.316.058.601	(244.987.619)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	65.000.000	0	0	0	65.000.000	65.000.000	0	0	0	65.000.000	0
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	355.745.874	0	0	0	355.745.874	356.809.368	0	0	0	356.809.368	1.063.494
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.928.700	0	0	0	28.928.700	39.929.800	0	0	0	39.929.800	11.001.100
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.820.000	0	0	0	25.820.000	20.127.500	0	0	0	20.127.500	(5.692.500)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.157.174	0	0	0	25.157.174	35.119.068	0	0	0	35.119.068	9.961.894
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	275.840.000	0	0	0	275.840.000	261.633.000	0	0	0	261.633.000	(14.207.000)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	179.780.000	0	0	179.780.000	0	215.780.000	0	0	215.780.000	36.000.000
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	179.780.000	0	0	179.780.000	0	215.780.000	0	0	215.780.000	36.000.000
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	412.798.147	0	0	0	412.798.147	563.810.241	0	0	0	563.810.241	151.012.094
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000	0	0	0	900.000	900.000	0	0	0	900.000	0
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.899.997	0	0	0	46.899.997	74.499.997	0	0	0	74.499.997	27.600.000
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	364.998.150	0	0	0	364.998.150	488.410.244	0	0	0	488.410.244	123.412.094

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.611.897	163.054.946	0	0	228.666.843	85.718.200	312.914.031	0	0	398.632.231	169.965.388
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.829.997	0	0	0	48.829.997	28.824.600	0	0	0	28.824.600	(20.005.397)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.783.400	0	0	0	6.783.400	12.769.900	0	0	0	12.769.900	5.986.500
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	163.054.946	0	0	163.054.946	29.939.000	237.914.189	0	0	267.853.189	104.798.243
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.998.500	0	0	0	9.998.500	14.184.700	74.999.842	0	0	89.184.542	79.186.042
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.567.702.285	16.273.000.599	0	0	18.840.702.884	2.050.026.377	15.857.625.779	0	0	17.907.652.156	(933.050.728)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	981.232.300	16.191.226.600	0	0	17.172.458.900	906.231.900	15.774.651.780	0	0	16.680.883.680	(491.575.220)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	881.232.400	16.191.226.600	0	0	17.072.459.000	856.232.200	15.774.651.780	0	0	16.630.883.980	(441.575.020)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	99.999.900	0	0	0	99.999.900	49.999.700	0	0	0	49.999.700	(50.000.200)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.586.469.985	81.773.999	0	0	1.668.243.984	1.143.794.477	82.973.999	0	0	1.226.768.476	(441.475.508)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	209.205.985	81.773.999	0	0	290.979.984	209.205.985	81.773.999	0	0	290.979.984	0
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.377.264.000	0	0	0	1.377.264.000	934.588.492	1.200.000	0	0	935.788.492	(441.475.508)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	855.935.075	0	0	0	855.935.075	665.037.575	0	0	0	665.037.575	(190.897.500)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	855.935.075	0	0	0	855.935.075	665.037.575	0	0	0	665.037.575	(190.897.500)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	600.000.000	0	0	0	600.000.000	464.183.500	0	0	0	464.183.500	(135.816.500)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	183.364.900	0	0	0	183.364.900	128.283.900	0	0	0	128.283.900	(55.081.000)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	72.570.175	0	0	0	72.570.175	72.570.175	0	0	0	72.570.175	0
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	184.999.900	0	0	0	184.999.900	89.999.900	0	0	0	89.999.900	(95.000.000)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	184.999.900	0	0	0	184.999.900	89.999.900	0	0	0	89.999.900	(95.000.000)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	02	Pengembangan Pendidikan	75.000.000	0	0	0	75.000.000	0	0	0	0	0	(75.000.000)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	(50.000.000)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	40.000.000	0	0	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	19.999.900	0	0	0	19.999.900	49.999.900	0	0	0	49.999.900	30.000.000
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	0	0	0	0	0	441.475.356	0	0	0	441.475.356	441.475.356
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	0	0	0	0	0	441.475.356	0	0	0	441.475.356	441.475.356
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	0	0	0	0	0	441.475.356	0	0	0	441.475.356	441.475.356
3	**27**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**40.318.235.054**	**2.676.670.200**	**0**	**0**	**42.994.905.254**	**39.780.198.730**	**2.142.626.800**	**0**	**0**	**41.922.825.530**	**(1.072.079.724)**
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000				DINAS KETAHANAN PANGAN	2.108.388.410	627.748.500	0	0	2.736.136.910	2.049.123.610	161.019.100	0	0	2.210.142.710	(525.994.200)
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	826.894.820	471.600.000	0	0	1.298.494.820	683.030.720	0	0	0	683.030.720	(615.464.100)
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	338.394.820	471.600.000	0	0	809.994.820	110.000.720	0	0	0	110.000.720	(699.994.100)
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	02	2.05	01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	318.394.820	471.600.000	0	0	789.994.820	90.000.720	0	0	0	90.000.720	(699.994.100)
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	488.500.000	0	0	0	488.500.000	573.030.000	0	0	0	573.030.000	84.530.000
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	488.500.000	0	0	0	488.500.000	573.030.000	0	0	0	573.030.000	84.530.000
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	815.920.500	156.148.500	0	0	972.069.000	809.519.900	161.019.100	0	0	970.539.000	(1.530.000)
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	815.920.500	156.148.500	0	0	972.069.000	809.519.900	161.019.100	0	0	970.539.000	(1.530.000)
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	815.920.500	156.148.500	0	0	972.069.000	809.519.900	161.019.100	0	0	970.539.000	(1.530.000)
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	465.573.090	0	0	0	465.573.090	556.572.990	0	0	0	556.572.990	90.999.900
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	285.000.000	0	0	0	285.000.000	375.999.900	0	0	0	375.999.900	90.999.900
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	130.000.000	0	0	0	130.000.000	221.000.000	0	0	0	221.000.000	91.000.000
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	155.000.000	0	0	0	155.000.000	154.999.900	0	0	0	154.999.900	(100)
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	180.573.090	0	0	0	180.573.090	180.573.090	0	0	0	180.573.090	0
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	180.573.090	0	0	0	180.573.090	180.573.090	0	0	0	180.573.090	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000				DINAS PERTANIAN	38.209.846.644	2.048.921.700	0	0	40.258.768.344	37.731.075.120	1.981.607.700	0	0	39.712.682.820	(546.085.524)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.716.870.654	125.171.700	0	0	18.842.042.354	16.212.502.221	57.857.700	0	0	16.270.359.921	(2.571.682.433)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.525.600	0	0	0	44.525.600	44.735.100	0	0	0	44.735.100	209.500
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.999.800	0	0	0	5.999.800	5.999.800	0	0	0	5.999.800	0
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.525.800	0	0	0	38.525.800	38.735.300	0	0	0	38.735.300	209.500
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.840.508.114	0	0	0	15.840.508.114	13.632.612.881	0	0	0	13.632.612.881	(2.207.895.233)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.762.099.014	0	0	0	15.762.099.014	13.414.573.781	0	0	0	13.414.573.781	(2.347.525.233)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72.409.200	0	0	0	72.409.200	212.039.200	0	0	0	212.039.200	139.630.000
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.999.900	0	0	0	5.999.900	5.999.900	0	0	0	5.999.900	0
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	337.825.000	0	0	0	337.825.000	399.872.900	0	0	0	399.872.900	62.047.900
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.772.400	0	0	0	5.772.400	5.772.400	0	0	0	5.772.400	0
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.475.500	0	0	0	63.475.500	63.475.500	0	0	0	63.475.500	0
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.999.900	0	0	0	4.999.900	4.999.900	0	0	0	4.999.900	0
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.581.000	0	0	0	31.581.000	35.733.900	0	0	0	35.733.900	4.152.900
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29.996.800	0	0	0	29.996.800	29.996.800	0	0	0	29.996.800	0
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.999.400	0	0	0	1.999.400	1.999.400	0	0	0	1.999.400	0
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	0	0	0	200.000.000	257.895.000	0	0	0	257.895.000	57.895.000
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	115.857.700	125.171.700	0	0	241.029.400	0	57.857.700	0	0	57.857.700	(183.171.700)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	125.171.700	0	0	125.171.700	0	57.857.700	0	0	57.857.700	(67.314.000)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	115.857.700	0	0	0	115.857.700	0	0	0	0	0	(115.857.700)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.048.837.700	0	0	0	2.048.837.700	1.883.316.900	0	0	0	1.883.316.900	(165.520.800)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.705.700	0	0	0	39.705.700	35.556.700	0	0	0	35.556.700	(4.149.000)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.004.132.000	0	0	0	2.004.132.000	1.842.760.200	0	0	0	1.842.760.200	(161.371.800)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	319.316.540	0	0	0	319.316.540	241.964.440	0	0	0	241.964.440	(77.352.100)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	142.808.440	0	0	0	142.808.440	148.201.440	0	0	0	148.201.440	5.393.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.763.000	0	0	0	13.763.000	13.763.000	0	0	0	13.763.000	0
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	162.745.100	0	0	0	162.745.100	80.000.000	0	0	0	80.000.000	(82.745.100)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	6.560.391.620	0	0	0	6.560.391.620	7.010.954.430	0	0	0	7.010.954.430	450.562.810
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	4.970.272.700	0	0	0	4.970.272.700	5.581.116.510	0	0	0	5.581.116.510	610.843.810
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4.645.272.800	0	0	0	4.645.272.800	5.376.116.560	0	0	0	5.376.116.560	730.843.760
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	324.999.900	0	0	0	324.999.900	204.999.950	0	0	0	204.999.950	(119.999.950)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.590.118.920	0	0	0	1.590.118.920	1.429.837.920	0	0	0	1.429.837.920	(160.281.000)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	240.000.000	0	0	0	240.000.000	228.166.000	0	0	0	228.166.000	(11.834.000)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1.350.118.920	0	0	0	1.350.118.920	1.201.671.920	0	0	0	1.201.671.920	(148.447.000)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	10.546.544.400	0	0	0	10.546.544.400	12.156.188.200	0	0	0	12.156.188.200	1.609.643.800
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	838.044.400	0	0	0	838.044.400	278.288.200	0	0	0	278.288.200	(559.756.200)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	375.000.000	0	0	0	375.000.000	0	0	0	0	0	(375.000.000)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	149.875.000	0	0	0	149.875.000	0	0	0	0	0	(149.875.000)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	263.169.600	0	0	0	263.169.600	239.498.200	0	0	0	239.498.200	(23.671.400)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	49.999.800	0	0	0	49.999.800	38.790.000	0	0	0	38.790.000	(11.209.800)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	9.708.500.000	0	0	0	9.708.500.000	11.877.900.000	0	0	0	11.877.900.000	2.169.400.000
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2.480.000.000	0	0	0	2.480.000.000	2.672.030.000	0	0	0	2.672.030.000	192.030.000
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	7.128.500.000	0	0	0	7.128.500.000	9.105.870.000	0	0	0	9.105.870.000	1.977.370.000
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	396.690.200	0	0	0	396.690.200	396.690.200	0	0	0	396.690.200	0
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	396.690.200	0	0	0	396.690.200	396.690.200	0	0	0	396.690.200	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	396.690.200	0	0	0	396.690.200	396.690.200	0	0	0	396.690.200	0
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	70.000.000	0	0	0	70.000.000	59.999.900	0	0	0	59.999.900	(10.000.100)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000	0	0	0	70.000.000	59.999.900	0	0	0	59.999.900	(10.000.100)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	70.000.000	0	0	0	70.000.000	59.999.900	0	0	0	59.999.900	(10.000.100)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.919.349.770	1.923.750.000	0	0	3.843.099.770	1.894.740.169	1.923.750.000	0	0	3.818.490.169	(24.609.601)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.919.349.770	1.923.750.000	0	0	3.843.099.770	1.894.740.169	1.923.750.000	0	0	3.818.490.169	(24.609.601)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	998.099.830	0	0	0	998.099.830	998.440.229	0	0	0	998.440.229	340.399
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	789.999.940	0	0	0	789.999.940	789.249.940	0	0	0	789.249.940	(750.000)
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	131.250.000	1.923.750.000	0	0	2.055.000.000	107.050.000	1.923.750.000	0	0	2.030.800.000	(24.200.000)
3	**30**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**1.107.371.700**	**8.885.400**	**0**	**0**	**1.116.257.100**	**944.056.993**	**39.168.300**	**0**	**0**	**983.225.293**	**(133.031.807)**
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.107.371.700	8.885.400	0	0	1.116.257.100	944.056.993	39.168.300	0	0	983.225.293	(133.031.807)
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	71.324.200	0	0	0	71.324.200	0	0	0	0	0	(71.324.200)
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	71.324.200	0	0	0	71.324.200	0	0	0	0	0	(71.324.200)
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	71.324.200	0	0	0	71.324.200	0	0	0	0	0	(71.324.200)
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	343.473.800	8.885.400	0	0	352.359.200	347.352.900	39.168.300	0	0	386.521.200	34.162.000
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	343.473.800	8.885.400	0	0	352.359.200	347.352.900	39.168.300	0	0	386.521.200	34.162.000
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	186.175.300	0	0	0	186.175.300	166.392.400	19.782.900	0	0	186.175.300	0
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	157.298.500	8.885.400	0	0	166.183.900	180.960.500	19.385.400	0	0	200.345.900	34.162.000
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	173.773.800	0	0	0	173.773.800	173.773.800	0	0	0	173.773.800	0
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	78.774.000	0	0	0	78.774.000	78.774.000	0	0	0	78.774.000	0
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	78.774.000	0	0	0	78.774.000	78.774.000	0	0	0	78.774.000	0
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	49.999.900	0	0	0	49.999.900	49.999.900	0	0	0	49.999.900	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	49.999.900	0	0	0	49.999.900	49.999.900	0	0	0	49.999.900	0
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.999.900	0	0	0	44.999.900	44.999.900	0	0	0	44.999.900	0
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	04	2.03	01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	14.999.900	0	0	0	14.999.900	14.999.900	0	0	0	14.999.900	0
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	518.799.900	0	0	0	518.799.900	422.930.293	0	0	0	422.930.293	(95.869.607)
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	518.799.900	0	0	0	518.799.900	422.930.293	0	0	0	422.930.293	(95.869.607)
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	518.799.900	0	0	0	518.799.900	422.930.293	0	0	0	422.930.293	(95.869.607)
2	17	2.17.3.31.3.30.03.0000				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**31**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**3.795.390.000**	**0**	**0**	**0**	**3.795.390.000**	**3.773.945.000**	**21.445.000**	**0**	**0**	**3.795.390.000**	**0**
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.795.390.000	0	0	0	3.795.390.000	3.773.945.000	21.445.000	0	0	3.795.390.000	0
3	31	2.17.3.30.3.31.03.0000	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.795.390.000	0	0	0	3.795.390.000	3.773.945.000	21.445.000	0	0	3.795.390.000	0
3	31	2.17.3.30.3.31.03.0000	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.795.390.000	0	0	0	3.795.390.000	3.773.945.000	21.445.000	0	0	3.795.390.000	0
3	31	2.17.3.30.3.31.03.0000	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.795.390.000	0	0	0	3.795.390.000	3.773.945.000	21.445.000	0	0	3.795.390.000	0
2	17	2.17.3.31.3.30.03.0000				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4						**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**72.590.731.959**	**2.386.912.600**	**0**	**0**	**74.977.644.559**	**78.059.242.054**	**844.750.000**	**0**	**0**	**78.903.992.054**	**3.926.347.495**
4	**01**					**SEKRETARIAT DAERAH**	**35.817.659.722**	**1.024.093.500**	**0**	**0**	**36.841.753.222**	**40.623.330.238**	**731.050.000**	**0**	**0**	**41.354.380.238**	**4.512.627.016**
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001				BAGIAN UMUM	14.777.783.789	1.024.093.500	0	0	15.801.877.289	16.803.969.190	731.050.000	0	0	17.535.019.190	1.733.141.901
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.777.783.789	1.024.093.500	0	0	15.801.877.289	16.803.969.190	731.050.000	0	0	17.535.019.190	1.733.141.901
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.279.955.800	0	0	0	4.279.955.800	5.762.823.726	21.550.000	0	0	5.784.373.726	1.504.417.926
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80.111.400	0	0	0	80.111.400	80.111.400	0	0	0	80.111.400	0
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	420.721.000	0	0	0	420.721.000	596.348.150	21.550.000	0	0	617.898.150	197.177.150
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.002.400	0	0	0	100.002.400	80.334.400	0	0	0	80.334.400	(19.668.000)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.322.237.000	0	0	0	2.322.237.000	3.077.296.976	0	0	0	3.077.296.976	755.059.976
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.356.884.000	0	0	0	1.356.884.000	1.928.732.800	0	0	0	1.928.732.800	571.848.800

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	170.239.500	624.125.000	0	0	794.364.500	202.864.500	509.500.000	0	0	712.364.500	(82.000.000)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	212.000.000	0	0	212.000.000	8.000.000	192.000.000	0	0	200.000.000	(12.000.000)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	170.239.500	412.125.000	0	0	582.364.500	194.864.500	317.500.000	0	0	512.364.500	(70.000.000)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.340.836.189	0	0	0	3.340.836.189	3.573.807.964	0	0	0	3.573.807.964	232.971.775
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	152.500.000	0	0	0	152.500.000	52.500.000	0	0	0	52.500.000	(100.000.000)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	742.877.189	0	0	0	742.877.189	821.814.189	0	0	0	821.814.189	78.937.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	433.964.000	0	0	0	433.964.000	653.098.775	0	0	0	653.098.775	219.134.775
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.011.495.000	0	0	0	2.011.495.000	2.046.395.000	0	0	0	2.046.395.000	34.900.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.567.072.300	399.968.500	0	0	1.967.040.800	1.338.262.100	200.000.000	0	0	1.538.262.100	(428.778.700)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	769.698.100	0	0	0	769.698.100	942.471.200	0	0	0	942.471.200	172.773.100
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	22.000.000	0	0	0	22.000.000	0	0	0	0	0	(22.000.000)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	260.374.200	0	0	0	260.374.200	188.413.700	0	0	0	188.413.700	(71.960.500)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	515.000.000	200.000.000	0	0	715.000.000	207.377.200	200.000.000	0	0	407.377.200	(307.622.800)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	199.968.500	0	0	199.968.500	0	0	0	0	0	(199.968.500)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	5.419.680.000	0	0	0	5.419.680.000	5.926.210.900	0	0	0	5.926.210.900	506.530.900
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	3.241.980.000	0	0	0	3.241.980.000	3.399.390.400	0	0	0	3.399.390.400	157.410.400
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2.177.700.000	0	0	0	2.177.700.000	2.526.820.500	0	0	0	2.526.820.500	349.120.500
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002				BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA	273.006.248	0	0	0	273.006.248	709.600.900	0	0	0	709.600.900	436.594.652
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	273.006.248	0	0	0	273.006.248	709.600.900	0	0	0	709.600.900	436.594.652
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	245.153.300	0	0	0	245.153.300	678.120.700	0	0	0	678.120.700	432.967.400
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	71.729.200	0	0	0	71.729.200	129.719.500	0	0	0	129.719.500	57.990.300
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	82.490.700	0	0	0	82.490.700	53.290.000	0	0	0	53.290.000	(29.200.700)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	90.933.400	0	0	0	90.933.400	495.111.200	0	0	0	495.111.200	404.177.800
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	27.852.948	0	0	0	27.852.948	31.480.200	0	0	0	31.480.200	3.627.252
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	18.423.948	0	0	0	18.423.948	31.480.200	0	0	0	31.480.200	13.056.252
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	9.429.000	0	0	0	9.429.000	0	0	0	0	0	(9.429.000)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003				BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	527.787.900	0	0	0	527.787.900	494.923.900	0	0	0	494.923.900	(32.864.000)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	527.787.900	0	0	0	527.787.900	494.923.900	0	0	0	494.923.900	(32.864.000)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	527.787.900	0	0	0	527.787.900	494.923.900	0	0	0	494.923.900	(32.864.000)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	198.632.500	0	0	0	198.632.500	150.227.100	0	0	0	150.227.100	(48.405.400)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	185.085.100	0	0	0	185.085.100	216.410.600	0	0	0	216.410.600	31.325.500
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	144.070.300	0	0	0	144.070.300	128.286.200	0	0	0	128.286.200	(15.784.100)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004				BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	4.390.282.400	0	0	0	4.390.282.400	7.024.187.300	0	0	0	7.024.187.300	2.633.904.900
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.390.282.400	0	0	0	4.390.282.400	7.024.187.300	0	0	0	7.024.187.300	2.633.904.900
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.390.282.400	0	0	0	4.390.282.400	7.024.187.300	0	0	0	7.024.187.300	2.633.904.900
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	778.646.800	0	0	0	778.646.800	936.470.200	0	0	0	936.470.200	157.823.400
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	3.455.000.000	0	0	0	3.455.000.000	5.905.000.000	0	0	0	5.905.000.000	2.450.000.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	156.635.600	0	0	0	156.635.600	182.717.100	0	0	0	182.717.100	26.081.500
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005				BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	350.978.400	0	0	0	350.978.400	412.897.700	0	0	0	412.897.700	61.919.300
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	350.978.400	0	0	0	350.978.400	412.897.700	0	0	0	412.897.700	61.919.300
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	350.978.400	0	0	0	350.978.400	412.897.700	0	0	0	412.897.700	61.919.300
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	48.809.200	0	0	0	48.809.200	85.966.600	0	0	0	85.966.600	37.157.400
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	281.931.000	0	0	0	281.931.000	326.931.100	0	0	0	326.931.100	45.000.100
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	20.238.200	0	0	0	20.238.200	0	0	0	0	0	(20.238.200)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006				BAGIAN HUKUM	1.460.580.900	0	0	0	1.460.580.900	1.439.130.300	0	0	0	1.439.130.300	(21.450.600)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.460.580.900	0	0	0	1.460.580.900	1.439.130.300	0	0	0	1.439.130.300	(21.450.600)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.460.580.900	0	0	0	1.460.580.900	1.439.130.300	0	0	0	1.439.130.300	(21.450.600)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	636.007.200	0	0	0	636.007.200	539.566.800	0	0	0	539.566.800	(96.440.400)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	723.976.300	0	0	0	723.976.300	826.831.100	0	0	0	826.831.100	102.854.800
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	100.597.400	0	0	0	100.597.400	72.732.400	0	0	0	72.732.400	(27.865.000)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007				BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	391.867.800	0	0	0	391.867.800	354.642.300	0	0	0	354.642.300	(37.225.500)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	391.867.800	0	0	0	391.867.800	354.642.300	0	0	0	354.642.300	(37.225.500)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	391.867.800	0	0	0	391.867.800	354.642.300	0	0	0	354.642.300	(37.225.500)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	195.517.000	0	0	0	195.517.000	228.353.600	0	0	0	228.353.600	32.836.600
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	94.343.800	0	0	0	94.343.800	76.478.500	0	0	0	76.478.500	(17.865.300)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	102.007.000	0	0	0	102.007.000	49.810.200	0	0	0	49.810.200	(52.196.800)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008				BAGIAN ORGANISASI	391.707.100	0	0	0	391.707.100	393.048.300	0	0	0	393.048.300	1.341.200

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	391.707.100	0	0	0	391.707.100	393.048.300	0	0	0	393.048.300	1.341.200
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13		Penataan Organisasi	391.707.100	0	0	0	391.707.100	393.048.300	0	0	0	393.048.300	1.341.200
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	139.792.700	0	0	0	139.792.700	158.005.600	0	0	0	158.005.600	18.212.900
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	122.402.200	0	0	0	122.402.200	147.575.500	0	0	0	147.575.500	25.173.300
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	129.512.200	0	0	0	129.512.200	87.467.200	0	0	0	87.467.200	(42.045.000)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009				BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	12.594.908.485	0	0	0	12.594.908.485	12.181.923.948	0	0	0	12.181.923.948	(412.984.537)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.594.908.485	0	0	0	12.594.908.485	12.181.923.948	0	0	0	12.181.923.948	(412.984.537)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.286.700	0	0	0	86.286.700	97.156.700	0	0	0	97.156.700	10.870.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.428.400	0	0	0	8.428.400	8.428.400	0	0	0	8.428.400	0
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.999.800	0	0	0	4.999.800	4.999.800	0	0	0	4.999.800	0
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.999.800	0	0	0	4.999.800	4.999.800	0	0	0	4.999.800	0
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.999.800	0	0	0	4.999.800	4.999.800	0	0	0	4.999.800	0
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.858.900	0	0	0	57.858.900	68.728.900	0	0	0	68.728.900	10.870.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.702.008.672	0	0	0	11.702.008.672	11.269.864.135	0	0	0	11.269.864.135	(432.144.537)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.514.350.772	0	0	0	11.514.350.772	11.067.206.335	0	0	0	11.067.206.335	(447.144.437)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	176.604.000	0	0	0	176.604.000	176.604.000	0	0	0	176.604.000	0
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.053.900	0	0	0	6.053.900	6.053.900	0	0	0	6.053.900	0
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000	0	0	0	5.000.000	19.999.900	0	0	0	19.999.900	14.999.900
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.104.000	0	0	0	29.104.000	37.394.000	0	0	0	37.394.000	8.290.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	29.104.000	0	0	0	29.104.000	37.394.000	0	0	0	37.394.000	8.290.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	777.509.113	0	0	0	777.509.113	777.509.113	0	0	0	777.509.113	0
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	777.509.113	0	0	0	777.509.113	777.509.113	0	0	0	777.509.113	0
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010				BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	658.756.700	0	0	0	658.756.700	809.006.400	0	0	0	809.006.400	150.249.700
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	658.756.700	0	0	0	658.756.700	809.006.400	0	0	0	809.006.400	150.249.700
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	658.756.700	0	0	0	658.756.700	809.006.400	0	0	0	809.006.400	150.249.700

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	435.690.700	0	0	0	435.690.700	582.396.600	0	0	0	582.396.600	146.705.900
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	178.690.000	0	0	0	178.690.000	198.533.800	0	0	0	198.533.800	19.843.800
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	44.376.000	0	0	0	44.376.000	28.076.000	0	0	0	28.076.000	(16.300.000)
4	**02**					**SEKRETARIAT DPRD**	**36.773.072.237**	**1.362.819.100**	**0**	**0**	**38.135.891.337**	**37.435.911.816**	**113.700.000**	**0**	**0**	**37.549.611.816**	**(586.279.521)**
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000				SEKRETARIAT DPRD	36.773.072.237	1.362.819.100	0	0	38.135.891.337	37.435.911.816	113.700.000	0	0	37.549.611.816	(586.279.521)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.949.277.937	1.362.819.100	0	0	25.312.097.037	24.105.799.116	113.700.000	0	0	24.219.499.116	(1.092.597.921)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	195.024.400	0	0	0	195.024.400	235.252.400	0	0	0	235.252.400	40.228.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.999.500	0	0	0	4.999.500	0	0	0	0	0	(4.999.500)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.999.900	0	0	0	4.999.900	4.999.900	0	0	0	4.999.900	0
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	175.025.000	0	0	0	175.025.000	220.252.500	0	0	0	220.252.500	45.227.500
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.815.752.736	0	0	0	2.815.752.736	2.630.445.315	0	0	0	2.630.445.315	(185.307.421)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.738.072.436	0	0	0	2.738.072.436	2.556.330.415	0	0	0	2.556.330.415	(181.742.021)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	67.684.900	0	0	0	67.684.900	69.114.900	0	0	0	69.114.900	1.430.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.995.400	0	0	0	4.995.400	0	0	0	0	0	(4.995.400)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.566.700	0	0	0	150.566.700	136.838.700	0	0	0	136.838.700	(13.728.000)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.566.700	0	0	0	150.566.700	136.838.700	0	0	0	136.838.700	(13.728.000)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	953.203.900	0	0	0	953.203.900	903.853.900	0	0	0	903.853.900	(49.350.000)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.331.600	0	0	0	12.331.600	12.331.600	0	0	0	12.331.600	0
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.687.100	0	0	0	85.687.100	85.687.100	0	0	0	85.687.100	0
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.027.200	0	0	0	50.027.200	50.027.200	0	0	0	50.027.200	0
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	79.758.000	0	0	0	79.758.000	79.758.000	0	0	0	79.758.000	0
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	125.400.000	0	0	0	125.400.000	76.050.000	0	0	0	76.050.000	(49.350.000)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000	0	0	0	600.000.000	600.000.000	0	0	0	600.000.000	0
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	124.800.000	1.362.819.100	0	0	1.487.619.100	0	95.000.000	0	0	95.000.000	(1.392.619.100)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	1.244.098.700	0	0	1.244.098.700	0	0	0	0	0	(1.244.098.700)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	73.720.400	0	0	73.720.400	0	95.000.000	0	0	95.000.000	21.279.600

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	124.800.000	45.000.000	0	0	169.800.000	0	0	0	0	0	(169.800.000)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	590.883.200	0	0	0	590.883.200	584.884.200	0	0	0	584.884.200	(5.999.000)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	0	0	0	12.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	(6.000.000)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.001.000	0	0	0	50.001.000	1.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	528.883.200	0	0	0	528.883.200	528.883.200	0	0	0	528.883.200	0
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	404.564.956	0	0	0	404.564.956	326.003.656	0	0	0	326.003.656	(78.561.300)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	324.571.156	0	0	0	324.571.156	274.571.156	0	0	0	274.571.156	(50.000.000)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.993.800	0	0	0	49.993.800	39.132.500	0	0	0	39.132.500	(10.861.300)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	0	0	0	30.000.000	12.300.000	0	0	0	12.300.000	(17.700.000)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	14.271.414.845	0	0	0	14.271.414.845	14.227.064.845	0	0	0	14.227.064.845	(44.350.000)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	13.453.899.845	0	0	0	13.453.899.845	13.441.099.845	0	0	0	13.441.099.845	(12.800.000)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	412.680.000	0	0	0	412.680.000	325.930.000	0	0	0	325.930.000	(86.750.000)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	404.835.000	0	0	0	404.835.000	460.035.000	0	0	0	460.035.000	55.200.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	4.443.067.200	0	0	0	4.443.067.200	5.061.456.100	18.700.000	0	0	5.080.156.100	637.088.900
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	6.654.200	0	0	0	6.654.200	6.654.200	0	0	0	6.654.200	0
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	2.636.200.000	0	0	0	2.636.200.000	3.246.975.000	0	0	0	3.246.975.000	610.775.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.800.213.000	0	0	0	1.800.213.000	1.807.826.900	18.700.000	0	0	1.826.526.900	26.313.900
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	12.823.794.300	0	0	0	12.823.794.300	13.330.112.700	0	0	0	13.330.112.700	506.318.400
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	632.034.200	0	0	0	632.034.200	457.624.000	0	0	0	457.624.000	(174.410.200)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	(15.000.000)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	457.624.000	0	0	0	457.624.000	457.624.000	0	0	0	457.624.000	0
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	159.410.200	0	0	0	159.410.200	0	0	0	0	0	(159.410.200)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	470.000.000	0	0	0	470.000.000	470.000.000	0	0	0	470.000.000	0
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	Pembahasan APBD	450.000.000	0	0	0	450.000.000	450.000.000	0	0	0	450.000.000	0
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	127.860.800	0	0	0	127.860.800	127.860.800	0	0	0	127.860.800	0
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	127.860.800	0	0	0	127.860.800	127.860.800	0	0	0	127.860.800	0
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	1.789.903.400	0	0	0	1.789.903.400	1.291.940.600	0	0	0	1.291.940.600	(497.962.800)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	1.300.000.000	0	0	0	1.300.000.000	937.160.000	0	0	0	937.160.000	(362.840.000)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	185.170.000	0	0	0	185.170.000	126.987.000	0	0	0	126.987.000	(58.183.000)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	76.939.800	0	0	0	76.939.800	0	0	0	0	0	(76.939.800)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	227.793.600	0	0	0	227.793.600	227.793.600	0	0	0	227.793.600	0
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.854.895.200	0	0	0	3.854.895.200	3.765.515.200	0	0	0	3.765.515.200	(89.380.000)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	150.000.000	0	0	0	150.000.000	95.000.000	0	0	0	95.000.000	(55.000.000)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	3.704.895.200	0	0	0	3.704.895.200	3.670.515.200	0	0	0	3.670.515.200	(34.380.000)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	152.200.000	0	0	0	152.200.000	120.271.400	0	0	0	120.271.400	(31.928.600)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	152.200.000	0	0	0	152.200.000	120.271.400	0	0	0	120.271.400	(31.928.600)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	5.796.900.700	0	0	0	5.796.900.700	7.096.900.700	0	0	0	7.096.900.700	1.300.000.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5.200.000.000	0	0	0	5.200.000.000	6.500.000.000	0	0	0	6.500.000.000	1.300.000.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	450.000.000	0	0	0	450.000.000	450.000.000	0	0	0	450.000.000	0
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	146.900.700	0	0	0	146.900.700	146.900.700	0	0	0	146.900.700	0
5						**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**31.760.577.146**	**1.118.113.096**	**10.672.000.000**	**242.453.421.817**	**286.004.112.059**	**29.646.132.530**	**450.172.290**	**13.116.614.000**	**259.726.239.000**	**302.939.157.820**	**16.935.045.761**
5	**01**					**PERENCANAAN**	**5.828.331.753**	**564.457.400**	**0**	**0**	**6.392.789.153**	**5.813.264.560**	**65.957.400**	**0**	**0**	**5.879.221.960**	**(513.567.193)**
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.828.331.753	564.457.400	0	0	6.392.789.153	5.813.264.560	65.957.400	0	0	5.879.221.960	(513.567.193)
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.322.010.453	564.457.400	0	0	4.886.467.853	4.214.959.160	65.957.400	0	0	4.280.916.560	(605.551.293)
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.054.700	0	0	0	14.054.700	17.840.700	0	0	0	17.840.700	3.786.000
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.040.000	0	0	0	3.040.000	3.040.000	0	0	0	3.040.000	0
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.004.700	0	0	0	2.004.700	2.004.700	0	0	0	2.004.700	0
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.010.000	0	0	0	9.010.000	12.796.000	0	0	0	12.796.000	3.786.000
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.770.397.153	0	0	0	3.770.397.153	3.594.168.960	0	0	0	3.594.168.960	(176.228.193)
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.716.417.753	0	0	0	3.716.417.753	3.540.189.560	0	0	0	3.540.189.560	(176.228.193)
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.979.200	0	0	0	51.979.200	51.979.200	0	0	0	51.979.200	0
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.200	0	0	0	2.000.200	2.000.200	0	0	0	2.000.200	0
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	353.604.900	0	0	0	353.604.900	393.525.800	0	0	0	393.525.800	39.920.900
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.011.300	0	0	0	5.011.300	5.011.300	0	0	0	5.011.300	0
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.973.100	0	0	0	22.973.100	22.973.100	0	0	0	22.973.100	0
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.921.300	0	0	0	2.921.300	2.898.200	0	0	0	2.898.200	(23.100)
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.917.700	0	0	0	39.917.700	20.201.700	0	0	0	20.201.700	(19.716.000)
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	47.503.500	0	0	0	47.503.500	47.503.500	0	0	0	47.503.500	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	235.278.000	0	0	0	235.278.000	294.938.000	0	0	0	294.938.000	59.660.000
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.267.700	564.457.400	0	0	565.725.100	1.267.700	65.957.400	0	0	67.225.100	(498.500.000)
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.267.700	564.457.400	0	0	565.725.100	1.267.700	65.957.400	0	0	67.225.100	(498.500.000)
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.350.500	0	0	0	124.350.500	128.320.500	0	0	0	128.320.500	3.970.000
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.088.000	0	0	0	2.088.000	2.638.000	0	0	0	2.638.000	550.000
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.184.800	0	0	0	50.184.800	53.604.800	0	0	0	53.604.800	3.420.000
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.077.700	0	0	0	72.077.700	72.077.700	0	0	0	72.077.700	0
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.335.500	0	0	0	58.335.500	79.835.500	0	0	0	79.835.500	21.500.000
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.290.100	0	0	0	52.290.100	52.290.100	0	0	0	52.290.100	0
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.045.400	0	0	0	6.045.400	21.045.400	0	0	0	21.045.400	15.000.000
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0	0	0	6.500.000	0	0	0	6.500.000	6.500.000
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	995.335.600	0	0	0	995.335.600	1.027.319.700	0	0	0	1.027.319.700	31.984.100
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	706.335.600	0	0	0	706.335.600	726.319.700	0	0	0	726.319.700	19.984.100
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	30.320.000	0	0	0	30.320.000	30.320.000	0	0	0	30.320.000	0
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	42.528.900	0	0	0	42.528.900	42.513.000	0	0	0	42.513.000	(15.900)
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	235.986.700	0	0	0	235.986.700	235.986.700	0	0	0	235.986.700	0
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	397.500.000	0	0	0	397.500.000	417.500.000	0	0	0	417.500.000	20.000.000
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	265.000.000	0	0	0	265.000.000	265.000.000	0	0	0	265.000.000	0
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	125.000.000	0	0	0	125.000.000	125.000.000	0	0	0	125.000.000	0
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	140.000.000	0	0	0	140.000.000	140.000.000	0	0	0	140.000.000	0
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	24.000.000	0	0	0	24.000.000	36.000.000	0	0	0	36.000.000	12.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	24.000.000	0	0	0	24.000.000	36.000.000	0	0	0	36.000.000	12.000.000
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	510.985.700	0	0	0	510.985.700	570.985.700	0	0	0	570.985.700	60.000.000
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	243.999.600	0	0	0	243.999.600	263.999.600	0	0	0	263.999.600	20.000.000
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	30.647.400	0	0	0	30.647.400	30.647.400	0	0	0	30.647.400	0
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	13.058.400	0	0	0	13.058.400	13.058.400	0	0	0	13.058.400	0
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	12.699.000	0	0	0	12.699.000	16.316.000	0	0	0	16.316.000	3.617.000
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	87.512.000	0	0	0	87.512.000	100.751.000	0	0	0	100.751.000	13.239.000
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	75.812.100	0	0	0	75.812.100	75.812.100	0	0	0	75.812.100	0
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	24.270.700	0	0	0	24.270.700	27.414.700	0	0	0	27.414.700	3.144.000
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	156.986.100	0	0	0	156.986.100	176.986.100	0	0	0	176.986.100	20.000.000
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	96.601.100	0	0	0	96.601.100	108.526.100	0	0	0	108.526.100	11.925.000
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	30.385.000	0	0	0	30.385.000	38.460.000	0	0	0	38.460.000	8.075.000
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	110.000.000	0	0	0	110.000.000	130.000.000	0	0	0	130.000.000	20.000.000
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	31.000.000	0	0	0	31.000.000	31.000.000	0	0	0	31.000.000	0
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	31.000.000	0	0	0	31.000.000	31.000.000	0	0	0	31.000.000	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	9.000.000	0	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	15.000.000	0	0	0	15.000.000	35.000.000	0	0	0	35.000.000	20.000.000
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	9.000.000	0	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0
5	**02**					**KEUANGAN**	**19.321.019.748**	**472.080.896**	**10.672.000.000**	**242.453.421.817**	**272.918.522.461**	**18.320.150.132**	**340.234.490**	**13.116.614.000**	**259.726.239.000**	**291.503.237.622**	**18.584.715.161**
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000				BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	13.049.165.592	375.002.696	10.672.000.000	242.453.421.817	266.549.590.105	12.315.540.565	267.830.990	13.116.614.000	259.726.239.000	285.426.224.555	18.876.634.450
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.423.975.892	216.118.496	0	0	5.640.094.388	5.359.764.690	265.230.990	0	0	5.624.995.680	(15.098.708)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	334.933.200	0	0	0	334.933.200	357.183.100	0	0	0	357.183.100	22.249.900
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	329.933.200	0	0	0	329.933.200	352.183.100	0	0	0	352.183.100	22.249.900
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.898.047.832	0	0	0	3.898.047.832	3.529.170.218	0	0	0	3.529.170.218	(368.877.614)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.413.467.032	0	0	0	3.413.467.032	3.044.589.418	0	0	0	3.044.589.418	(368.877.614)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	425.497.200	0	0	0	425.497.200	425.497.200	0	0	0	425.497.200	0
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	54.083.600	0	0	0	54.083.600	54.083.600	0	0	0	54.083.600	0
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	403.753.900	0	0	0	403.753.900	565.312.700	0	0	0	565.312.700	161.558.800
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.997.200	0	0	0	11.997.200	31.911.700	0	0	0	31.911.700	19.914.500
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000	0	0	0	80.000.000	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.996.000	0	0	0	24.996.000	42.864.300	0	0	0	42.864.300	17.868.300
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53.206.900	0	0	0	53.206.900	68.502.900	0	0	0	68.502.900	15.296.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	33.586.800	0	0	0	33.586.800	33.586.800	0	0	0	33.586.800	0
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.967.000	0	0	0	199.967.000	308.447.000	0	0	0	308.447.000	108.480.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	216.118.496	0	0	216.118.496	65.765.600	243.347.310	0	0	309.112.910	92.994.414
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	216.118.496	0	0	216.118.496	65.765.600	243.347.310	0	0	309.112.910	92.994.414
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	412.928.660	0	0	0	412.928.660	424.251.872	0	0	0	424.251.872	11.323.212
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.904.300	0	0	0	44.904.300	44.126.700	0	0	0	44.126.700	(777.600)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	363.024.360	0	0	0	363.024.360	375.125.172	0	0	0	375.125.172	12.100.812
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	374.312.300	0	0	0	374.312.300	418.081.200	21.883.680	0	0	439.964.880	65.652.580
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.134.100	0	0	0	108.134.100	160.077.300	0	0	0	160.077.300	51.943.200
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	246.178.200	0	0	0	246.178.200	159.267.516	21.883.680	0	0	181.151.196	(65.027.004)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	0	0	0	20.000.000	98.736.384	0	0	0	98.736.384	78.736.384
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	6.835.140.800	37.880.200	10.672.000.000	242.453.421.817	259.998.442.817	6.178.415.575	0	13.116.614.000	259.726.239.000	279.021.268.575	19.022.825.758
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.693.782.700	0	0	0	1.693.782.700	1.790.571.900	0	0	0	1.790.571.900	96.789.200
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	220.488.000	0	0	0	220.488.000	220.806.000	0	0	0	220.806.000	318.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	214.865.800	0	0	0	214.865.800	159.400.300	0	0	0	159.400.300	(55.465.500)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	60.882.400	0	0	0	60.882.400	59.382.400	0	0	0	59.382.400	(1.500.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	58.298.700	0	0	0	58.298.700	54.528.400	0	0	0	54.528.400	(3.770.300)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	340.353.000	0	0	0	340.353.000	419.794.000	0	0	0	419.794.000	79.441.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	422.674.700	0	0	0	422.674.700	475.261.700	0	0	0	475.261.700	52.587.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	160.695.000	0	0	0	160.695.000	155.902.800	0	0	0	155.902.800	(4.792.200)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	50.008.000	0	0	0	50.008.000	79.979.200	0	0	0	79.979.200	29.971.200
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	165.517.100	0	0	0	165.517.100	165.517.100	0	0	0	165.517.100	0
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	394.472.000	0	0	0	394.472.000	544.037.350	0	0	0	544.037.350	149.565.350
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	75.727.900	0	0	0	75.727.900	75.803.600	0	0	0	75.803.600	75.700
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	78.750.000	0	0	0	78.750.000	128.750.550	0	0	0	128.750.550	50.000.550

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	29.994.000	0	0	0	29.994.000	29.935.100	0	0	0	29.935.100	(58.900)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	60.000.000	0	0	0	60.000.000	109.548.000	0	0	0	109.548.000	49.548.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	125.000.100	0	0	0	125.000.100	175.000.100	0	0	0	175.000.100	50.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	496.408.100	0	0	0	496.408.100	549.096.825	0	0	0	549.096.825	52.688.725
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	54.408.600	0	0	0	54.408.600	54.408.600	0	0	0	54.408.600	0
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	57.499.800	0	0	0	57.499.800	57.499.800	0	0	0	57.499.800	0
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	149.999.900	0	0	0	149.999.900	266.188.625	0	0	0	266.188.625	116.188.725
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	170.999.800	0	0	0	170.999.800	170.999.800	0	0	0	170.999.800	0
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	63.500.000	0	0	0	63.500.000	0	0	0	0	0	(63.500.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.150.478.000	0	10.672.000.000	242.453.421.817	257.275.899.817	3.150.478.000	0	13.116.614.000	259.726.239.000	275.993.331.000	18.717.431.183
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	4.150.478.000	0	0	0	4.150.478.000	3.150.478.000	0	0	0	3.150.478.000	(1.000.000.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0	0	0	238.889.565.800	238.889.565.800	0	0	0	259.726.239.000	259.726.239.000	20.836.673.200
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0	0	10.672.000.000	0	10.672.000.000	0	0	13.116.614.000	0	13.116.614.000	2.444.614.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	0	0	0	3.563.856.017	3.563.856.017	0	0	0	0	0	(3.563.856.017)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100.000.000	37.880.200	0	0	137.880.200	144.231.500	0	0	0	144.231.500	6.351.300
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	100.000.000	37.880.200	0	0	137.880.200	144.231.500	0	0	0	144.231.500	6.351.300
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	790.048.900	121.004.000	0	0	911.052.900	777.360.300	2.600.000	0	0	779.960.300	(131.092.600)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	790.048.900	121.004.000	0	0	911.052.900	777.360.300	2.600.000	0	0	779.960.300	(131.092.600)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	170.474.400	2.600.000	0	0	173.074.400	111.154.400	2.600.000	0	0	113.754.400	(59.320.000)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	284.055.400	118.404.000	0	0	402.459.400	263.617.400	0	0	0	263.617.400	(138.842.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	72.646.400	0	0	0	72.646.400	72.366.400	0	0	0	72.366.400	(280.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	98.685.200	0	0	0	98.685.200	136.605.100	0	0	0	136.605.100	37.919.900
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	113.151.600	0	0	0	113.151.600	105.781.100	0	0	0	105.781.100	(7.370.500)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	51.035.900	0	0	0	51.035.900	87.835.900	0	0	0	87.835.900	36.800.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000				BADAN PENDAPATAN DAERAH	6.271.854.156	97.078.200	0	0	6.368.932.356	6.004.609.567	72.403.500	0	0	6.077.013.067	(291.919.289)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.933.737.056	97.078.200	0	0	5.030.815.256	4.983.475.467	72.403.500	0	0	5.055.878.967	25.063.711
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.484.000	0	0	0	53.484.000	40.565.300	0	0	0	40.565.300	(12.918.700)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.984.000	0	0	0	4.984.000	0	0	0	0	0	(4.984.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	(2.000.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.000.000	0	0	0	44.000.000	38.065.300	0	0	0	38.065.300	(5.934.700)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.179.095.920	0	0	0	4.179.095.920	4.241.767.567	0	0	0	4.241.767.567	62.671.647
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.037.174.320	0	0	0	4.037.174.320	4.104.956.367	0	0	0	4.104.956.367	67.782.047
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	141.921.600	0	0	0	141.921.600	136.811.200	0	0	0	136.811.200	(5.110.400)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	30.475.000	0	0	0	30.475.000	16.134.900	0	0	0	16.134.900	(14.340.100)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	30.475.000	0	0	0	30.475.000	16.134.900	0	0	0	16.134.900	(14.340.100)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.140.100	0	0	0	188.140.100	221.656.900	0	0	0	221.656.900	33.516.800
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.336.000	0	0	0	21.336.000	21.313.100	0	0	0	21.313.100	(22.900)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.931.600	0	0	0	57.931.600	53.193.700	0	0	0	53.193.700	(4.737.900)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.000.000	0	0	0	11.000.000	11.000.000	0	0	0	11.000.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.560.500	0	0	0	31.560.500	18.237.100	0	0	0	18.237.100	(13.323.400)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.700.000	0	0	0	6.700.000	0	0	0	0	0	(6.700.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.612.000	0	0	0	59.612.000	117.913.000	0	0	0	117.913.000	58.301.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.808.900	93.478.200	0	0	121.287.100	22.128.900	72.403.500	0	0	94.532.400	(26.754.700)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.016.000	74.378.200	0	0	77.394.200	0	69.803.500	0	0	69.803.500	(7.590.700)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.792.900	19.100.000	0	0	43.892.900	22.128.900	2.600.000	0	0	24.728.900	(19.164.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	362.322.736	0	0	0	362.322.736	359.500.000	0	0	0	359.500.000	(2.822.736)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000	0	0	0	5.500.000	5.500.000	0	0	0	5.500.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	0	0	0	18.000.000	18.000.000	0	0	0	18.000.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	338.822.736	0	0	0	338.822.736	336.000.000	0	0	0	336.000.000	(2.822.736)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.410.400	3.600.000	0	0	96.010.400	81.721.900	0	0	0	81.721.900	(14.288.500)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.495.100	0	0	0	32.495.100	38.550.700	0	0	0	38.550.700	6.055.600
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.447.900	0	0	0	9.447.900	0	0	0	0	0	(9.447.900)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.467.400	3.600.000	0	0	54.067.400	43.171.200	0	0	0	43.171.200	(10.896.200)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.338.117.100	0	0	0	1.338.117.100	1.021.134.100	0	0	0	1.021.134.100	(316.983.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.338.117.100	0	0	0	1.338.117.100	1.021.134.100	0	0	0	1.021.134.100	(316.983.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	51.500.000	0	0	0	51.500.000	61.460.000	0	0	0	61.460.000	9.960.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	106.280.000	0	0	0	106.280.000	115.045.600	0	0	0	115.045.600	8.765.600
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	43.775.000	0	0	0	43.775.000	28.775.000	0	0	0	28.775.000	(15.000.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	91.999.900	0	0	0	91.999.900	77.160.600	0	0	0	77.160.600	(14.839.300)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	108.000.000	0	0	0	108.000.000	99.999.800	0	0	0	99.999.800	(8.000.200)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	19.999.800	0	0	0	19.999.800	19.599.800	0	0	0	19.599.800	(400.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	80.000.000	0	0	0	80.000.000	69.990.000	0	0	0	69.990.000	(10.010.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	210.000.000	0	0	0	210.000.000	199.999.900	0	0	0	199.999.900	(10.000.100)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	53.000.200	0	0	0	53.000.200	47.071.200	0	0	0	47.071.200	(5.929.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	49.619.300	0	0	0	49.619.300	46.046.400	0	0	0	46.046.400	(3.572.900)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	123.000.100	0	0	0	123.000.100	104.975.100	0	0	0	104.975.100	(18.025.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	35.000.000	0	0	0	35.000.000	0	0	0	0	0	(35.000.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	298.148.400	0	0	0	298.148.400	74.182.800	0	0	0	74.182.800	(223.965.600)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	67.794.400	0	0	0	67.794.400	76.827.900	0	0	0	76.827.900	9.033.500
5	**03**					**KEPEGAWAIAN**	**5.434.625.645**	**78.174.800**	**0**	**0**	**5.512.800.445**	**4.436.215.838**	**40.580.400**	**0**	**0**	**4.476.796.238**	**(1.036.004.207)**
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.434.625.645	78.174.800	0	0	5.512.800.445	4.436.215.838	40.580.400	0	0	4.476.796.238	(1.036.004.207)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.034.142.845	78.174.800	0	0	3.112.317.645	2.740.027.538	40.580.400	0	0	2.780.607.938	(331.709.707)
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.590.800	0	0	0	18.590.800	18.590.800	0	0	0	18.590.800	0
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.145.400	0	0	0	5.145.400	5.145.400	0	0	0	5.145.400	0
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.445.400	0	0	0	8.445.400	8.445.400	0	0	0	8.445.400	0
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.565.420.745	0	0	0	2.565.420.745	2.300.444.239	0	0	0	2.300.444.239	(264.976.506)
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.515.665.545	0	0	0	2.515.665.545	2.250.689.039	0	0	0	2.250.689.039	(264.976.506)
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.755.200	0	0	0	44.755.200	44.755.200	0	0	0	44.755.200	0
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.499.900	0	0	0	3.499.900	3.499.900	0	0	0	3.499.900	0
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.499.900	0	0	0	3.499.900	3.499.900	0	0	0	3.499.900	0
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	275.541.400	0	0	0	275.541.400	254.442.100	0	0	0	254.442.100	(21.099.300)
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.541.500	0	0	0	7.541.500	7.541.500	0	0	0	7.541.500	0
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	0	0	0	50.000.000	40.001.500	0	0	0	40.001.500	(9.998.500)
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.999.000	0	0	0	9.999.000	9.999.000	0	0	0	9.999.000	0
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.000.000	0	0	0	27.000.000	26.036.200	0	0	0	26.036.200	(963.800)
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.997.400	0	0	0	15.997.400	15.997.400	0	0	0	15.997.400	0
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.997.500	0	0	0	4.997.500	4.997.500	0	0	0	4.997.500	0
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.006.000	0	0	0	160.006.000	149.869.000	0	0	0	149.869.000	(10.137.000)
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	26.000.000	0	0	26.000.000	0	0	0	0	0	(26.000.000)
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	26.000.000	0	0	26.000.000	0	0	0	0	0	(26.000.000)
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.039.600	0	0	0	78.039.600	85.039.599	0	0	0	85.039.599	6.999.999
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000	0
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.042.800	0	0	0	23.042.800	30.042.799	0	0	0	30.042.799	6.999.999
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	0	0	0	54.496.800	54.496.800	0	0	0	54.496.800	0
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.050.400	52.174.800	0	0	145.225.200	78.010.900	40.580.400	0	0	118.591.300	(26.633.900)
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.423.400	0	0	0	73.423.400	63.417.600	0	0	0	63.417.600	(10.005.800)
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	2.550.000	0	0	0	2.550.000	2.550.000	0	0	0	2.550.000	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.077.000	0	0	0	17.077.000	12.043.300	0	0	0	12.043.300	(5.033.700)
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	52.174.800	0	0	52.174.800	0	40.580.400	0	0	40.580.400	(11.594.400)
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.400.482.800	0	0	0	2.400.482.800	1.696.188.300	0	0	0	1.696.188.300	(704.294.500)
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	401.011.400	0	0	0	401.011.400	444.608.900	0	0	0	444.608.900	43.597.500
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	24.999.900	0	0	0	24.999.900	14.999.700	0	0	0	14.999.700	(10.000.200)
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	150.000.000	0	0	0	150.000.000	351.579.700	0	0	0	351.579.700	201.579.700
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	34.999.800	0	0	0	34.999.800	34.999.800	0	0	0	34.999.800	0
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	118.000.000	0	0	0	118.000.000	0	0	0	0	0	(118.000.000)
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	20.089.900	0	0	0	20.089.900	20.089.900	0	0	0	20.089.900	0
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	52.921.800	0	0	0	52.921.800	22.939.800	0	0	0	22.939.800	(29.982.000)
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	107.244.900	0	0	0	107.244.900	72.224.900	0	0	0	72.224.900	(35.020.000)
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	57.244.900	0	0	0	57.244.900	47.224.900	0	0	0	47.224.900	(10.020.000)
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	(25.000.000)
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	1.733.736.700	0	0	0	1.733.736.700	1.020.864.700	0	0	0	1.020.864.700	(712.872.000)
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	1.005.148.500	0	0	0	1.005.148.500	646.468.900	0	0	0	646.468.900	(358.679.600)
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	430.000.000	0	0	0	430.000.000	200.000.000	0	0	0	200.000.000	(230.000.000)
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	298.588.200	0	0	0	298.588.200	174.395.800	0	0	0	174.395.800	(124.192.400)
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	158.489.800	0	0	0	158.489.800	158.489.800	0	0	0	158.489.800	0
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	99.999.900	0	0	0	99.999.900	99.999.900	0	0	0	99.999.900	0
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	18.240.100	0	0	0	18.240.100	18.240.100	0	0	0	18.240.100	0
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	40.249.800	0	0	0	40.249.800	40.249.800	0	0	0	40.249.800	0
5	**04**					**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**700.000.000**	**0**	**0**	**0**	**700.000.000**	**611.902.000**	**0**	**0**	**0**	**611.902.000**	**(88.098.000)**
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	700.000.000	0	0	0	700.000.000	611.902.000	0	0	0	611.902.000	(88.098.000)
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	700.000.000	0	0	0	700.000.000	611.902.000	0	0	0	611.902.000	(88.098.000)
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	700.000.000	0	0	0	700.000.000	611.902.000	0	0	0	611.902.000	(88.098.000)
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	700.000.000	0	0	0	700.000.000	611.902.000	0	0	0	611.902.000	(88.098.000)
5	**05**					**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**476.600.000**	**3.400.000**	**0**	**0**	**480.000.000**	**464.600.000**	**3.400.000**	**0**	**0**	**468.000.000**	**(12.000.000)**
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	476.600.000	3.400.000	0	0	480.000.000	464.600.000	3.400.000	0	0	468.000.000	(12.000.000)
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	476.600.000	3.400.000	0	0	480.000.000	464.600.000	3.400.000	0	0	468.000.000	(12.000.000)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	160.000.000	0	0	0	160.000.000	160.000.000	0	0	0	160.000.000	0
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	160.000.000	0	0	0	160.000.000	160.000.000	0	0	0	160.000.000	0
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	140.000.000	0	0	0	140.000.000	140.000.000	0	0	0	140.000.000	0
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	140.000.000	0	0	0	140.000.000	140.000.000	0	0	0	140.000.000	0
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	70.000.000	0	0	0	70.000.000	58.000.000	0	0	0	58.000.000	(12.000.000)
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	70.000.000	0	0	0	70.000.000	58.000.000	0	0	0	58.000.000	(12.000.000)
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	106.600.000	3.400.000	0	0	110.000.000	106.600.000	3.400.000	0	0	110.000.000	0
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	106.600.000	3.400.000	0	0	110.000.000	106.600.000	3.400.000	0	0	110.000.000	0
6						**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**11.569.515.657**	**1.536.075.000**	**0**	**0**	**13.105.590.657**	**9.800.406.919**	**1.563.000.000**	**0**	**0**	**11.363.406.919**	**(1.742.183.738)**
6	**01**					**INSPEKTORAT DAERAH**	**11.569.515.657**	**1.536.075.000**	**0**	**0**	**13.105.590.657**	**9.800.406.919**	**1.563.000.000**	**0**	**0**	**11.363.406.919**	**(1.742.183.738)**
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000				INSPEKTORAT	11.569.515.657	1.536.075.000	0	0	13.105.590.657	9.800.406.919	1.563.000.000	0	0	11.363.406.919	(1.742.183.738)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.089.515.657	1.536.075.000	0	0	9.625.590.657	7.529.276.919	1.563.000.000	0	0	9.092.276.919	(533.313.738)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.000.000	0	0	0	14.000.000	0	0	0	0	0	(14.000.000)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	(8.000.000)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	(4.000.000)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	(2.000.000)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.620.826.397	0	0	0	5.620.826.397	5.495.024.459	0	0	0	5.495.024.459	(125.801.938)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.569.342.797	0	0	0	5.569.342.797	5.446.540.859	0	0	0	5.446.540.859	(122.801.938)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48.483.600	0	0	0	48.483.600	48.483.600	0	0	0	48.483.600	0
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	(3.000.000)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	500.000.000	0	0	0	500.000.000	460.000.000	0	0	0	460.000.000	(40.000.000)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	500.000.000	0	0	0	500.000.000	460.000.000	0	0	0	460.000.000	(40.000.000)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	864.004.700	0	0	0	864.004.700	1.018.691.700	0	0	0	1.018.691.700	154.687.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	0	0	0	15.000.000	10.005.000	0	0	0	10.005.000	(4.995.000)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	0	0	0	100.000.000	125.800.000	0	0	0	125.800.000	25.800.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000	0	0	0	25.000.000	12.500.000	0	0	0	12.500.000	(12.500.000)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	56.896.700	0	0	0	56.896.700	58.452.700	0	0	0	58.452.700	1.556.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.108.000	0	0	0	17.108.000	17.108.000	0	0	0	17.108.000	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	650.000.000	0	0	0	650.000.000	794.826.000	0	0	0	794.826.000	144.826.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	109.959.800	1.536.075.000	0	0	1.646.034.800	8.210.000	1.365.000.000	0	0	1.373.210.000	(272.824.800)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.959.800	1.536.075.000	0	0	1.646.034.800	8.210.000	1.365.000.000	0	0	1.373.210.000	(272.824.800)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.996.800	0	0	0	133.996.800	133.696.800	0	0	0	133.696.800	(300.000)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.500.000	0	0	0	73.500.000	73.200.000	0	0	0	73.200.000	(300.000)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	0	0	0	54.496.800	54.496.800	0	0	0	54.496.800	0
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	846.727.960	0	0	0	846.727.960	413.653.960	198.000.000	0	0	611.653.960	(235.074.000)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	138.807.620	0	0	0	138.807.620	138.807.620	0	0	0	138.807.620	0
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	485.074.340	0	0	0	485.074.340	246.690.340	0	0	0	246.690.340	(238.384.000)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	198.000.000	0	0	0	198.000.000	13.870.000	198.000.000	0	0	211.870.000	13.870.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.846.000	0	0	0	24.846.000	14.286.000	0	0	0	14.286.000	(10.560.000)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.680.000.000	0	0	0	2.680.000.000	1.891.130.000	0	0	0	1.891.130.000	(788.870.000)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.680.000.000	0	0	0	1.680.000.000	471.130.000	0	0	0	471.130.000	(1.208.870.000)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	300.000.000	0	0	0	300.000.000	85.280.000	0	0	0	85.280.000	(214.720.000)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	300.000.000	0	0	0	300.000.000	5.220.000	0	0	0	5.220.000	(294.780.000)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	(15.000.000)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	(15.000.000)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	Pengawasan Desa	500.000.000	0	0	0	500.000.000	142.200.000	0	0	0	142.200.000	(357.800.000)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	Kerja Sama Pengawasan Internal	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	(50.000.000)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	500.000.000	0	0	0	500.000.000	238.430.000	0	0	0	238.430.000	(261.570.000)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	1.420.000.000	0	0	0	1.420.000.000	420.000.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	(100.000.000)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	900.000.000	0	0	0	900.000.000	1.420.000.000	0	0	0	1.420.000.000	520.000.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	800.000.000	0	0	0	800.000.000	380.000.000	0	0	0	380.000.000	(420.000.000)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	(200.000.000)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	(100.000.000)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	(100.000.000)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	600.000.000	0	0	0	600.000.000	380.000.000	0	0	0	380.000.000	(220.000.000)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	(100.000.000)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	100.000.000	0	0	0	100.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	(50.000.000)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	100.000.000	0	0	0	100.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	(50.000.000)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	300.000.000	0	0	0	300.000.000	280.000.000	0	0	0	280.000.000	(20.000.000)
7						**UNSUR KEWILAYAHAN**	**35.540.316.565**	**1.429.819.817**	**0**	**0**	**36.970.136.382**	**33.607.925.249**	**1.450.013.392**	**0**	**0**	**35.057.938.641**	**(1.912.197.741)**
7	**01**					**KECAMATAN**	**35.540.316.565**	**1.429.819.817**	**0**	**0**	**36.970.136.382**	**33.607.925.249**	**1.450.013.392**	**0**	**0**	**35.057.938.641**	**(1.912.197.741)**
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000				KANTOR KECAMATAN TARUTUNG	5.816.937.162	82.250.000	0	0	5.899.187.162	5.907.922.943	77.250.000	0	0	5.985.172.943	85.985.781
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.752.635.862	82.250.000	0	0	5.834.885.862	5.850.921.643	77.250.000	0	0	5.928.171.643	93.285.781
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.114.400	0	0	0	19.114.400	26.414.400	0	0	0	26.414.400	7.300.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.374.400	0	0	0	2.374.400	2.374.400	0	0	0	2.374.400	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.740.000	0	0	0	16.740.000	24.040.000	0	0	0	24.040.000	7.300.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.434.443.542	0	0	0	5.434.443.542	5.520.429.423	0	0	0	5.520.429.423	85.985.881
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.390.483.342	0	0	0	5.390.483.342	5.476.469.223	0	0	0	5.476.469.223	85.985.881
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.775.600	0	0	0	41.775.600	41.775.600	0	0	0	41.775.600	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.184.600	0	0	0	2.184.600	2.184.600	0	0	0	2.184.600	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	121.059.200	0	0	0	121.059.200	126.059.100	0	0	0	126.059.100	4.999.900
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.605.000	0	0	0	8.605.000	8.605.000	0	0	0	8.605.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.389.500	0	0	0	39.389.500	39.389.500	0	0	0	39.389.500	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.724.600	0	0	0	6.724.600	6.724.600	0	0	0	6.724.600	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.450.100	0	0	0	16.450.100	27.125.000	0	0	0	27.125.000	10.674.900
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.890.000	0	0	0	49.890.000	44.215.000	0	0	0	44.215.000	(5.675.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.600.000	82.250.000	0	0	93.850.000	11.600.000	77.250.000	0	0	88.850.000	(5.000.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	11.600.000	51.750.000	0	0	63.350.000	11.600.000	51.750.000	0	0	63.350.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	30.500.000	0	0	30.500.000	0	25.500.000	0	0	25.500.000	(5.000.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.434.700	0	0	0	109.434.700	109.434.700	0	0	0	109.434.700	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	860.000	0	0	0	860.000	860.000	0	0	0	860.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.912.300	0	0	0	35.912.300	35.912.300	0	0	0	35.912.300	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.662.400	0	0	0	72.662.400	72.662.400	0	0	0	72.662.400	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.984.020	0	0	0	56.984.020	56.984.020	0	0	0	56.984.020	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.987.720	0	0	0	36.987.720	36.987.720	0	0	0	36.987.720	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.996.300	0	0	0	19.996.300	19.996.300	0	0	0	19.996.300	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.701.900	0	0	0	22.701.900	15.401.900	0	0	0	15.401.900	(7.300.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.701.900	0	0	0	22.701.900	15.401.900	0	0	0	15.401.900	(7.300.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22.701.900	0	0	0	22.701.900	15.401.900	0	0	0	15.401.900	(7.300.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	26.599.800	0	0	0	26.599.800	26.599.800	0	0	0	26.599.800	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	26.599.800	0	0	0	26.599.800	26.599.800	0	0	0	26.599.800	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4.999.800	0	0	0	4.999.800	4.999.800	0	0	0	4.999.800	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	21.600.000	0	0	0	21.600.000	21.600.000	0	0	0	21.600.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.999.600	0	0	0	4.999.600	4.999.600	0	0	0	4.999.600	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.999.600	0	0	0	4.999.600	4.999.600	0	0	0	4.999.600	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.999.600	0	0	0	4.999.600	4.999.600	0	0	0	4.999.600	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0001				KELURAHAN HUTATORUAN V	106.485.500	93.514.200	0	0	199.999.700	106.485.500	93.514.200	0	0	199.999.700	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0001	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	106.485.500	93.514.200	0	0	199.999.700	106.485.500	93.514.200	0	0	199.999.700	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0001	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	106.485.500	93.514.200	0	0	199.999.700	106.485.500	93.514.200	0	0	199.999.700	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0001	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.999.700	0	0	0	4.999.700	4.999.700	0	0	0	4.999.700	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0001	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6.485.800	93.514.200	0	0	100.000.000	6.485.800	93.514.200	0	0	100.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0001	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	95.000.000	0	0	0	95.000.000	95.000.000	0	0	0	95.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0002				KELURAHAN HUTATORUAN VI	100.145.600	99.890.800	0	0	200.036.400	146.181.635	53.158.100	0	0	199.339.735	(696.665)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0002	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100.145.600	99.890.800	0	0	200.036.400	146.181.635	53.158.100	0	0	199.339.735	(696.665)
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100.145.600	99.890.800	0	0	200.036.400	146.181.635	53.158.100	0	0	199.339.735	(696.665)
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.000.000	0	0	0	5.000.000	3.940.000	0	0	0	3.940.000	(1.060.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	99.544.000	0	0	99.544.000	39.628.035	53.158.100	0	0	92.786.135	(6.757.865)
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	95.145.600	346.800	0	0	95.492.400	102.613.600	0	0	0	102.613.600	7.121.200
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0003				KELURAHAN HUTATORUAN VII	106.485.900	93.514.200	0	0	200.000.100	106.485.900	93.514.200	0	0	200.000.100	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0003	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	106.485.900	93.514.200	0	0	200.000.100	106.485.900	93.514.200	0	0	200.000.100	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0003	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	106.485.900	93.514.200	0	0	200.000.100	106.485.900	93.514.200	0	0	200.000.100	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0003	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0003	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6.485.800	93.514.200	0	0	100.000.000	6.485.800	93.514.200	0	0	100.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0003	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	95.000.100	0	0	0	95.000.100	95.000.100	0	0	0	95.000.100	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0004				KELURAHAN HUTATORUAN IX	139.806.300	60.064.400	0	0	199.870.700	139.806.300	60.064.400	0	0	199.870.700	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0004	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	139.806.300	60.064.400	0	0	199.870.700	139.806.300	60.064.400	0	0	199.870.700	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0004	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	139.806.300	60.064.400	0	0	199.870.700	139.806.300	60.064.400	0	0	199.870.700	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0004	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.998.700	0	0	0	4.998.700	4.998.700	0	0	0	4.998.700	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0004	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	7.213.000	60.064.400	0	0	67.277.400	7.213.000	60.064.400	0	0	67.277.400	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0004	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	127.594.600	0	0	0	127.594.600	127.594.600	0	0	0	127.594.600	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0005				KELURAHAN HUTATORUAN X	103.052.700	88.330.000	0	0	191.382.700	107.965.881	88.004.700	0	0	195.970.581	4.587.881
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0005	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	103.052.700	88.330.000	0	0	191.382.700	107.965.881	88.004.700	0	0	195.970.581	4.587.881
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	103.052.700	88.330.000	0	0	191.382.700	107.965.881	88.004.700	0	0	195.970.581	4.587.881
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	88.330.000	0	0	88.330.000	4.913.181	88.004.700	0	0	92.917.881	4.587.881
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	98.052.700	0	0	0	98.052.700	98.052.700	0	0	0	98.052.700	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0006				KELURAHAN HUTATORUAN XI	100.000.000	100.000.000	0	0	200.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	200.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0006	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100.000.000	100.000.000	0	0	200.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	200.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0006	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100.000.000	100.000.000	0	0	200.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	200.000.000	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0006	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0006	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	100.000.000	0	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0	100.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0006	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	95.000.000	0	0	0	95.000.000	95.000.000	0	0	0	95.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0007				KELURAHAN PARTALI TORUAN	110.431.600	89.568.400	0	0	200.000.000	110.431.600	89.568.400	0	0	200.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0007	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	110.431.600	89.568.400	0	0	200.000.000	110.431.600	89.568.400	0	0	200.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0007	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	110.431.600	89.568.400	0	0	200.000.000	110.431.600	89.568.400	0	0	200.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0007	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.999.900	0	0	0	4.999.900	4.999.900	0	0	0	4.999.900	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0007	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6.636.900	89.568.400	0	0	96.205.300	6.636.900	89.568.400	0	0	96.205.300	0
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0007	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	98.794.800	0	0	0	98.794.800	98.794.800	0	0	0	98.794.800	0
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000				KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA	2.010.622.010	28.030.000	0	0	2.038.652.010	1.893.813.027	28.030.000	0	0	1.921.843.027	(116.808.983)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.842.474.010	28.030.000	0	0	1.870.504.010	1.805.260.027	28.030.000	0	0	1.833.290.027	(37.213.983)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.045.800	0	0	0	30.045.800	30.045.800	0	0	0	30.045.800	0
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.647.500	0	0	0	2.647.500	2.647.500	0	0	0	2.647.500	0
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.738.300	0	0	0	2.738.300	2.738.300	0	0	0	2.738.300	0
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.160.000	0	0	0	2.160.000	2.160.000	0	0	0	2.160.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.500.000	0	0	0	22.500.000	22.500.000	0	0	0	22.500.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.595.296.710	0	0	0	1.595.296.710	1.566.260.427	0	0	0	1.566.260.427	(29.036.283)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.556.809.110	0	0	0	1.556.809.110	1.525.001.627	0	0	0	1.525.001.627	(31.807.483)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.087.600	0	0	0	36.087.600	38.858.800	0	0	0	38.858.800	2.771.200
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.400.000	0	0	0	2.400.000	2.400.000	0	0	0	2.400.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.607.700	0	0	0	85.607.700	85.705.200	0	0	0	85.705.200	97.500
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.200.000	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.423.700	0	0	0	30.423.700	30.423.700	0	0	0	30.423.700	0
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.134.000	0	0	0	4.134.000	4.134.000	0	0	0	4.134.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.650.000	0	0	0	16.650.000	7.957.500	0	0	0	7.957.500	(8.692.500)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.200.000	0	0	0	33.200.000	41.990.000	0	0	0	41.990.000	8.790.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	28.030.000	0	0	28.030.000	0	28.030.000	0	0	28.030.000	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	28.030.000	0	0	28.030.000	0	28.030.000	0	0	28.030.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.496.800	0	0	0	85.496.800	74.590.400	0	0	0	74.590.400	(10.906.400)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	0	0	0	30.000.000	19.093.600	0	0	0	19.093.600	(10.906.400)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	0	0	0	54.496.800	54.496.800	0	0	0	54.496.800	0
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.027.000	0	0	0	46.027.000	48.658.200	0	0	0	48.658.200	2.631.200
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.063.800	0	0	0	38.063.800	40.695.000	0	0	0	40.695.000	2.631.200
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.201.200	0	0	0	1.201.200	1.201.200	0	0	0	1.201.200	0
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.762.000	0	0	0	6.762.000	6.762.000	0	0	0	6.762.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	49.970.700	0	0	0	49.970.700	8.970.700	0	0	0	8.970.700	(41.000.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	49.970.700	0	0	0	49.970.700	8.970.700	0	0	0	8.970.700	(41.000.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	23.950.700	0	0	0	23.950.700	4.880.700	0	0	0	4.880.700	(19.070.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	26.020.000	0	0	0	26.020.000	4.090.000	0	0	0	4.090.000	(21.930.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	23.836.700	0	0	0	23.836.700	24.166.700	0	0	0	24.166.700	330.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	23.836.700	0	0	0	23.836.700	24.166.700	0	0	0	24.166.700	330.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23.836.700	0	0	0	23.836.700	24.166.700	0	0	0	24.166.700	330.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.409.700	0	0	0	13.409.700	5.464.700	0	0	0	5.464.700	(7.945.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	04	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13.409.700	0	0	0	13.409.700	5.464.700	0	0	0	5.464.700	(7.945.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	04	7.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13.409.700	0	0	0	13.409.700	5.464.700	0	0	0	5.464.700	(7.945.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	55.930.900	0	0	0	55.930.900	24.950.900	0	0	0	24.950.900	(30.980.000)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	55.930.900	0	0	0	55.930.900	24.950.900	0	0	0	24.950.900	(30.980.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.091.800	0	0	0	3.091.800	3.091.800	0	0	0	3.091.800	0
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4.855.000	0	0	0	4.855.000	6.210.000	0	0	0	6.210.000	1.355.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.000.000	0	0	0	10.000.000	2.650.000	0	0	0	2.650.000	(7.350.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	37.984.100	0	0	0	37.984.100	12.999.100	0	0	0	12.999.100	(24.985.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000				KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING	1.617.315.574	9.882.000	0	0	1.627.197.574	1.446.491.473	9.882.000	0	0	1.456.373.473	(170.824.101)
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.513.452.974	9.882.000	0	0	1.523.334.974	1.342.628.873	9.882.000	0	0	1.352.510.873	(170.824.101)
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.570.000	0	0	0	71.570.000	71.570.000	0	0	0	71.570.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.820.000	0	0	0	22.820.000	22.820.000	0	0	0	22.820.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.250.000	0	0	0	46.250.000	46.250.000	0	0	0	46.250.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.286.723.984	0	0	0	1.286.723.984	1.115.899.883	0	0	0	1.115.899.883	(170.824.101)
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.255.761.684	0	0	0	1.255.761.684	1.084.937.583	0	0	0	1.084.937.583	(170.824.101)
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.500.400	0	0	0	27.500.400	27.500.400	0	0	0	27.500.400	0
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.461.900	0	0	0	3.461.900	3.461.900	0	0	0	3.461.900	0
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.667.000	0	0	0	49.667.000	49.667.000	0	0	0	49.667.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.600	0	0	0	4.999.600	4.999.600	0	0	0	4.999.600	0
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.301.800	0	0	0	18.301.800	18.301.800	0	0	0	18.301.800	0
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.356.200	0	0	0	19.356.200	19.356.200	0	0	0	19.356.200	0
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.009.400	0	0	0	7.009.400	7.009.400	0	0	0	7.009.400	0
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	9.882.000	0	0	9.882.000	0	9.882.000	0	0	9.882.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	9.882.000	0	0	9.882.000	0	9.882.000	0	0	9.882.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.495.900	0	0	0	78.495.900	78.495.900	0	0	0	78.495.900	0
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000	0	0	0	700.000	700.000	0	0	0	700.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.299.100	0	0	0	23.299.100	23.299.100	0	0	0	23.299.100	0
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	0	0	0	54.496.800	54.496.800	0	0	0	54.496.800	0
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.996.090	0	0	0	26.996.090	26.996.090	0	0	0	26.996.090	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.996.090	0	0	0	26.996.090	26.996.090	0	0	0	26.996.090	0
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	33.512.700	0	0	0	33.512.700	33.512.700	0	0	0	33.512.700	0
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	33.512.700	0	0	0	33.512.700	33.512.700	0	0	0	33.512.700	0
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	33.512.700	0	0	0	33.512.700	33.512.700	0	0	0	33.512.700	0
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	19.999.900	0	0	0	19.999.900	19.999.900	0	0	0	19.999.900	0
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	19.999.900	0	0	0	19.999.900	19.999.900	0	0	0	19.999.900	0
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.999.900	0	0	0	19.999.900	19.999.900	0	0	0	19.999.900	0
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.600.000	0	0	0	21.600.000	21.600.000	0	0	0	21.600.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.600.000	0	0	0	21.600.000	21.600.000	0	0	0	21.600.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	21.600.000	0	0	0	21.600.000	21.600.000	0	0	0	21.600.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.750.000	0	0	0	8.750.000	8.750.000	0	0	0	8.750.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.750.000	0	0	0	8.750.000	8.750.000	0	0	0	8.750.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.750.000	0	0	0	8.750.000	8.750.000	0	0	0	8.750.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000				KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON	2.403.208.552	13.167.600	0	0	2.416.376.152	2.173.448.481	13.167.600	0	0	2.186.616.081	(229.760.071)
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.343.208.552	13.167.600	0	0	2.356.376.152	2.113.448.481	13.167.600	0	0	2.126.616.081	(229.760.071)
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.745.000	0	0	0	6.745.000	6.745.000	0	0	0	6.745.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.097.400	0	0	0	3.097.400	3.097.400	0	0	0	3.097.400	0
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.674.700	0	0	0	1.674.700	1.674.700	0	0	0	1.674.700	0
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.972.900	0	0	0	1.972.900	1.972.900	0	0	0	1.972.900	0
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.075.018.032	0	0	0	2.075.018.032	1.845.257.961	0	0	0	1.845.257.961	(229.760.071)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.031.056.832	0	0	0	2.031.056.832	1.801.296.761	0	0	0	1.801.296.761	(229.760.071)
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.201.200	0	0	0	41.201.200	41.201.200	0	0	0	41.201.200	0
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.176.000	0	0	0	1.176.000	1.176.000	0	0	0	1.176.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.584.000	0	0	0	1.584.000	1.584.000	0	0	0	1.584.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.270.800	0	0	0	2.270.800	2.270.800	0	0	0	2.270.800	0
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.270.800	0	0	0	2.270.800	2.270.800	0	0	0	2.270.800	0
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	122.680.600	375.000	0	0	123.055.600	122.680.600	375.000	0	0	123.055.600	0
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.817.300	0	0	0	4.817.300	4.817.300	0	0	0	4.817.300	0
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.633.600	0	0	0	17.633.600	17.633.600	0	0	0	17.633.600	0
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.950.700	375.000	0	0	8.325.700	7.950.700	375.000	0	0	8.325.700	0
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.171.000	0	0	0	6.171.000	6.171.000	0	0	0	6.171.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.498.000	0	0	0	3.498.000	3.498.000	0	0	0	3.498.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.610.000	0	0	0	52.610.000	52.610.000	0	0	0	52.610.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	12.792.600	0	0	12.792.600	0	12.792.600	0	0	12.792.600	0
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	12.792.600	0	0	12.792.600	0	12.792.600	0	0	12.792.600	0
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.193.400	0	0	0	82.193.400	82.193.400	0	0	0	82.193.400	0
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.696.600	0	0	0	26.696.600	26.696.600	0	0	0	26.696.600	0
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	0	0	0	54.496.800	54.496.800	0	0	0	54.496.800	0
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.300.720	0	0	0	54.300.720	54.300.720	0	0	0	54.300.720	0
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.302.420	0	0	0	32.302.420	32.302.420	0	0	0	32.302.420	0
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.998.300	0	0	0	21.998.300	21.998.300	0	0	0	21.998.300	0
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	60.000.000	0	0	0	60.000.000	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60.000.000	0	0	0	60.000.000	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	60.000.000	0	0	0	60.000.000	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0001				KELURAHAN SITUMEANG HABINSARAN	199.999.820	0	0	0	199.999.820	120.376.520	79.623.300	0	0	199.999.820	0
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0001	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	199.999.820	0	0	0	199.999.820	120.376.520	79.623.300	0	0	199.999.820	0
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0001	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	199.999.820	0	0	0	199.999.820	120.376.520	79.623.300	0	0	199.999.820	0
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0001	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	90.402.820	0	0	0	90.402.820	10.779.500	79.623.300	0	0	90.402.800	(20)
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0001	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	109.597.000	0	0	0	109.597.000	109.597.020	0	0	0	109.597.020	20
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000				KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU	2.951.439.802	162.343.300	0	0	3.113.783.102	2.712.622.722	12.501.700	0	0	2.725.124.422	(388.658.680)
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.749.695.502	12.501.700	0	0	2.762.197.202	2.561.036.822	12.501.700	0	0	2.573.538.522	(188.658.680)
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.569.104.502	0	0	0	2.569.104.502	2.380.445.822	0	0	0	2.380.445.822	(188.658.680)
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.537.999.002	0	0	0	2.537.999.002	2.349.340.322	0	0	0	2.349.340.322	(188.658.680)
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.955.200	0	0	0	27.955.200	27.955.200	0	0	0	27.955.200	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.150.300	0	0	0	3.150.300	3.150.300	0	0	0	3.150.300	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.400.000	0	0	0	15.400.000	15.400.000	0	0	0	15.400.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	15.400.000	0	0	0	15.400.000	15.400.000	0	0	0	15.400.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.425.900	0	0	0	45.425.900	45.425.900	0	0	0	45.425.900	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.997.400	0	0	0	1.997.400	1.997.400	0	0	0	1.997.400	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.141.500	0	0	0	16.141.500	16.141.500	0	0	0	16.141.500	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.492.000	0	0	0	1.492.000	1.492.000	0	0	0	1.492.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.795.000	0	0	0	25.795.000	25.795.000	0	0	0	25.795.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.190.000	12.501.700	0	0	14.691.700	2.190.000	12.501.700	0	0	14.691.700	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.190.000	12.501.700	0	0	14.691.700	2.190.000	12.501.700	0	0	14.691.700	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.096.300	0	0	0	77.096.300	77.096.300	0	0	0	77.096.300	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0	600.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.999.500	0	0	0	21.999.500	21.999.500	0	0	0	21.999.500	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	0	0	0	54.496.800	54.496.800	0	0	0	54.496.800	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.478.800	0	0	0	40.478.800	40.478.800	0	0	0	40.478.800	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.999.200	0	0	0	36.999.200	36.999.200	0	0	0	36.999.200	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.981.500	0	0	0	1.981.500	1.981.500	0	0	0	1.981.500	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.498.100	0	0	0	1.498.100	1.498.100	0	0	0	1.498.100	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28.463.500	0	0	0	28.463.500	28.463.500	0	0	0	28.463.500	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28.463.500	0	0	0	28.463.500	28.463.500	0	0	0	28.463.500	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	28.463.500	0	0	0	28.463.500	28.463.500	0	0	0	28.463.500	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	71.700.800	149.841.600	0	0	221.542.400	21.542.400	0	0	0	21.542.400	(200.000.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	21.542.400	0	0	0	21.542.400	21.542.400	0	0	0	21.542.400	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21.542.400	0	0	0	21.542.400	21.542.400	0	0	0	21.542.400	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	50.158.400	149.841.600	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	(200.000.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	149.841.600	0	0	149.841.600	0	0	0	0	0	(149.841.600)
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.158.400	0	0	0	50.158.400	0	0	0	0	0	(50.158.400)
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	61.580.000	0	0	0	61.580.000	61.580.000	0	0	0	61.580.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	61.580.000	0	0	0	61.580.000	61.580.000	0	0	0	61.580.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	39.980.000	0	0	0	39.980.000	39.980.000	0	0	0	39.980.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	21.600.000	0	0	0	21.600.000	21.600.000	0	0	0	21.600.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0001				KELURAHAN ONAN HASANG	0	0	0	0	0	50.863.600	149.136.400	0	0	200.000.000	200.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0001	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0	0	0	0	0	50.863.600	149.136.400	0	0	200.000.000	200.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0001	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	0	0	0	0	0	50.863.600	149.136.400	0	0	200.000.000	200.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0001	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	0	0	0	0	0	149.136.400	0	0	149.136.400	149.136.400
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0001	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	0	0	0	0	50.863.600	0	0	0	50.863.600	50.863.600

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000				KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE	2.053.191.162	33.720.000	0	0	2.086.911.162	2.013.141.182	26.220.000	0	0	2.039.361.182	(47.549.980)
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.991.277.562	33.720.000	0	0	2.024.997.562	1.937.677.682	26.220.000	0	0	1.963.897.682	(61.099.880)
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.759.579.362	0	0	0	1.759.579.362	1.711.979.482	0	0	0	1.711.979.482	(47.599.880)
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.716.406.362	0	0	0	1.716.406.362	1.668.806.482	0	0	0	1.668.806.482	(47.599.880)
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	38.673.100	0	0	0	38.673.100	38.673.100	0	0	0	38.673.100	0
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.499.900	0	0	0	4.499.900	4.499.900	0	0	0	4.499.900	0
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.508.200	0	0	0	87.508.200	87.508.200	0	0	0	87.508.200	0
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.332.700	0	0	0	3.332.700	3.332.700	0	0	0	3.332.700	0
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.495.500	0	0	0	12.495.500	12.495.500	0	0	0	12.495.500	0
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.670.000	0	0	0	38.670.000	29.908.000	0	0	0	29.908.000	(8.762.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.010.000	0	0	0	33.010.000	41.772.000	0	0	0	41.772.000	8.762.000
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	33.720.000	0	0	33.720.000	0	26.220.000	0	0	26.220.000	(7.500.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	33.720.000	0	0	33.720.000	0	26.220.000	0	0	26.220.000	(7.500.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.011.300	0	0	0	76.011.300	70.011.300	0	0	0	70.011.300	(6.000.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.420.000	0	0	0	20.420.000	14.420.000	0	0	0	14.420.000	(6.000.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.591.300	0	0	0	54.591.300	54.591.300	0	0	0	54.591.300	0
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.178.700	0	0	0	68.178.700	68.178.700	0	0	0	68.178.700	0
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.184.600	0	0	0	48.184.600	48.184.600	0	0	0	48.184.600	0
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.994.100	0	0	0	19.994.100	19.994.100	0	0	0	19.994.100	0
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	47.821.600	0	0	0	47.821.600	67.741.500	0	0	0	67.741.500	19.919.900
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	47.821.600	0	0	0	47.821.600	67.741.500	0	0	0	67.741.500	19.919.900
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	47.821.600	0	0	0	47.821.600	67.741.500	0	0	0	67.741.500	19.919.900
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.092.000	0	0	0	14.092.000	7.722.000	0	0	0	7.722.000	(6.370.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.092.000	0	0	0	14.092.000	7.722.000	0	0	0	7.722.000	(6.370.000)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	(1.300.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.792.000	0	0	0	12.792.000	7.722.000	0	0	0	7.722.000	(5.070.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0001				KELURAHAN PASAR SARULLA	99.142.700	104.980.000	0	0	204.122.700	99.092.700	104.980.000	0	0	204.072.700	(50.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0001	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	99.142.700	104.980.000	0	0	204.122.700	99.092.700	104.980.000	0	0	204.072.700	(50.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0001	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3.151.700	0	0	0	3.151.700	3.151.700	0	0	0	3.151.700	0
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0001	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.151.700	0	0	0	3.151.700	3.151.700	0	0	0	3.151.700	0
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0001	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	95.991.000	104.980.000	0	0	200.971.000	95.941.000	104.980.000	0	0	200.921.000	(50.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0001	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	45.981.300	104.980.000	0	0	150.961.300	45.931.300	104.980.000	0	0	150.911.300	(50.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0001	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.009.700	0	0	0	50.009.700	50.009.700	0	0	0	50.009.700	0
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000				KANTOR KECAMATAN PURBATUA	1.669.063.645	4.000.000	0	0	1.673.063.645	1.360.186.315	19.600.000	0	0	1.379.786.315	(293.277.330)
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.564.195.645	4.000.000	0	0	1.568.195.645	1.259.122.315	19.600.000	0	0	1.278.722.315	(289.473.330)
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	619.600	0	0	0	619.600	619.600	0	0	0	619.600	0
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	619.600	0	0	0	619.600	619.600	0	0	0	619.600	0
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.336.872.945	0	0	0	1.336.872.945	1.043.595.615	0	0	0	1.043.595.615	(293.277.330)
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.294.365.845	0	0	0	1.294.365.845	1.001.088.515	0	0	0	1.001.088.515	(293.277.330)
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.548.300	0	0	0	40.548.300	40.548.300	0	0	0	40.548.300	0
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.958.800	0	0	0	1.958.800	1.958.800	0	0	0	1.958.800	0
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.977.500	0	0	0	49.977.500	53.337.500	0	0	0	53.337.500	3.360.000
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.569.900	0	0	0	2.569.900	2.569.900	0	0	0	2.569.900	0
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.975.800	0	0	0	4.975.800	4.975.800	0	0	0	4.975.800	0
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.156.500	0	0	0	15.156.500	18.516.500	0	0	0	18.516.500	3.360.000
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.542.600	0	0	0	11.542.600	11.542.600	0	0	0	11.542.600	0
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	15.732.700	0	0	0	15.732.700	15.732.700	0	0	0	15.732.700	0
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	750.000	4.000.000	0	0	4.750.000	750.000	19.600.000	0	0	20.350.000	15.600.000
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	750.000	4.000.000	0	0	4.750.000	750.000	19.600.000	0	0	20.350.000	15.600.000
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.628.400	0	0	0	78.628.400	66.628.400	0	0	0	66.628.400	(12.000.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000	0	0	0	700.000	700.000	0	0	0	700.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.431.600	0	0	0	23.431.600	11.431.600	0	0	0	11.431.600	(12.000.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	0	0	0	54.496.800	54.496.800	0	0	0	54.496.800	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.347.200	0	0	0	97.347.200	94.191.200	0	0	0	94.191.200	(3.156.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.041.400	0	0	0	68.041.400	68.045.400	0	0	0	68.045.400	4.000
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.468.200	0	0	0	2.468.200	2.468.200	0	0	0	2.468.200	0
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.197.600	0	0	0	14.197.600	14.197.600	0	0	0	14.197.600	0
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.640.000	0	0	0	12.640.000	9.480.000	0	0	0	9.480.000	(3.160.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	63.435.000	0	0	0	63.435.000	63.355.000	0	0	0	63.355.000	(80.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	63.435.000	0	0	0	63.435.000	63.355.000	0	0	0	63.355.000	(80.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	63.435.000	0	0	0	63.435.000	63.355.000	0	0	0	63.355.000	(80.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	19.833.000	0	0	0	19.833.000	16.109.000	0	0	0	16.109.000	(3.724.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	19.833.000	0	0	0	19.833.000	16.109.000	0	0	0	16.109.000	(3.724.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19.833.000	0	0	0	19.833.000	16.109.000	0	0	0	16.109.000	(3.724.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.600.000	0	0	0	21.600.000	21.600.000	0	0	0	21.600.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.600.000	0	0	0	21.600.000	21.600.000	0	0	0	21.600.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	21.600.000	0	0	0	21.600.000	21.600.000	0	0	0	21.600.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000				KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN	1.466.802.451	21.100.000	0	0	1.487.902.451	1.391.525.748	27.700.000	0	0	1.419.225.748	(68.676.703)
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.335.081.451	21.100.000	0	0	1.356.181.451	1.281.354.748	27.700.000	0	0	1.309.054.748	(47.126.703)
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.905.300	0	0	0	20.905.300	20.905.300	0	0	0	20.905.300	0
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.216.300	0	0	0	2.216.300	2.216.300	0	0	0	2.216.300	0
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.689.000	0	0	0	18.689.000	18.689.000	0	0	0	18.689.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.138.509.951	0	0	0	1.138.509.951	1.067.413.568	0	0	0	1.067.413.568	(71.096.383)
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.101.396.751	0	0	0	1.101.396.751	1.032.720.368	0	0	0	1.032.720.368	(68.676.383)
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.907.600	0	0	0	32.907.600	32.907.600	0	0	0	32.907.600	0
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.205.600	0	0	0	4.205.600	1.785.600	0	0	0	1.785.600	(2.420.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	56.198.000	0	0	0	56.198.000	59.381.000	0	0	0	59.381.000	3.183.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.045.500	0	0	0	2.045.500	4.435.900	0	0	0	4.435.900	2.390.400
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.377.900	0	0	0	14.377.900	14.377.900	0	0	0	14.377.900	0
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.222.100	0	0	0	12.222.100	14.641.700	0	0	0	14.641.700	2.419.600
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.352.500	0	0	0	4.352.500	4.355.500	0	0	0	4.355.500	3.000
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.200.000	0	0	0	23.200.000	21.570.000	0	0	0	21.570.000	(1.630.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	21.100.000	0	0	21.100.000	0	27.700.000	0	0	27.700.000	6.600.000
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	21.100.000	0	0	21.100.000	0	27.700.000	0	0	27.700.000	6.600.000
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.598.000	0	0	0	79.598.000	72.598.000	0	0	0	72.598.000	(7.000.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.101.200	0	0	0	24.101.200	17.101.200	0	0	0	17.101.200	(7.000.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	0	0	0	54.496.800	54.496.800	0	0	0	54.496.800	0
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.870.200	0	0	0	39.870.200	61.056.880	0	0	0	61.056.880	21.186.680
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.187.000	0	0	0	32.187.000	42.851.280	0	0	0	42.851.280	10.664.280
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.191.700	0	0	0	3.191.700	4.278.400	0	0	0	4.278.400	1.086.700
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.491.500	0	0	0	4.491.500	13.927.200	0	0	0	13.927.200	9.435.700
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	42.530.000	0	0	0	42.530.000	41.830.000	0	0	0	41.830.000	(700.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	42.530.000	0	0	0	42.530.000	41.830.000	0	0	0	41.830.000	(700.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	42.530.000	0	0	0	42.530.000	41.830.000	0	0	0	41.830.000	(700.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	19.500.000	0	0	0	19.500.000	16.500.000	0	0	0	16.500.000	(3.000.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	19.500.000	0	0	0	19.500.000	16.500.000	0	0	0	16.500.000	(3.000.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19.500.000	0	0	0	19.500.000	16.500.000	0	0	0	16.500.000	(3.000.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.000.000	0	0	0	12.000.000	7.000.000	0	0	0	7.000.000	(5.000.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.000.000	0	0	0	12.000.000	7.000.000	0	0	0	7.000.000	(5.000.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.000.000	0	0	0	12.000.000	7.000.000	0	0	0	7.000.000	(5.000.000)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	42.600.000	0	0	0	42.600.000	33.600.000	0	0	0	33.600.000	(9.000.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	42.600.000	0	0	0	42.600.000	33.600.000	0	0	0	33.600.000	(9.000.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	42.600.000	0	0	0	42.600.000	33.600.000	0	0	0	33.600.000	(9.000.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.091.000	0	0	0	15.091.000	11.241.000	0	0	0	11.241.000	(3.850.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.091.000	0	0	0	15.091.000	11.241.000	0	0	0	11.241.000	(3.850.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.091.000	0	0	0	15.091.000	11.241.000	0	0	0	11.241.000	(3.850.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000				KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR	2.386.073.397	36.000.000	0	0	2.422.073.397	1.964.667.388	36.000.000	0	0	2.000.667.388	(421.406.009)
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.273.322.497	36.000.000	0	0	2.309.322.497	1.851.916.488	36.000.000	0	0	1.887.916.488	(421.406.009)
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.810.000	0	0	0	36.810.000	36.810.000	0	0	0	36.810.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.310.000	0	0	0	35.310.000	35.310.000	0	0	0	35.310.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.064.386.597	0	0	0	2.064.386.597	1.646.161.188	0	0	0	1.646.161.188	(418.225.409)
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.037.251.397	0	0	0	2.037.251.397	1.615.845.988	0	0	0	1.615.845.988	(421.405.409)
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.627.200	0	0	0	25.627.200	28.807.200	0	0	0	28.807.200	3.180.000
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.508.000	0	0	0	1.508.000	1.508.000	0	0	0	1.508.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.910.300	0	0	0	53.910.300	53.910.300	0	0	0	53.910.300	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.650.000	0	0	0	1.650.000	1.650.000	0	0	0	1.650.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.524.100	0	0	0	25.524.100	25.524.100	0	0	0	25.524.100	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.634.400	0	0	0	7.634.400	7.634.400	0	0	0	7.634.400	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.770.000	0	0	0	3.770.000	3.770.000	0	0	0	3.770.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.926.800	0	0	0	1.926.800	1.926.800	0	0	0	1.926.800	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.405.000	0	0	0	13.405.000	13.405.000	0	0	0	13.405.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	36.000.000	0	0	36.000.000	0	36.000.000	0	0	36.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	36.000.000	0	0	36.000.000	0	36.000.000	0	0	36.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.195.100	0	0	0	85.195.100	82.014.500	0	0	0	82.014.500	(3.180.600)
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.698.300	0	0	0	29.698.300	26.517.700	0	0	0	26.517.700	(3.180.600)
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	0	0	0	54.496.800	54.496.800	0	0	0	54.496.800	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.020.500	0	0	0	33.020.500	33.020.500	0	0	0	33.020.500	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.093.600	0	0	0	28.093.600	28.093.600	0	0	0	28.093.600	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.926.900	0	0	0	4.926.900	4.926.900	0	0	0	4.926.900	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.500.000	0	0	0	5.500.000	5.500.000	0	0	0	5.500.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.500.000	0	0	0	5.500.000	5.500.000	0	0	0	5.500.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.500.000	0	0	0	5.500.000	5.500.000	0	0	0	5.500.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	34.200.000	0	0	0	34.200.000	34.200.000	0	0	0	34.200.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	34.200.000	0	0	0	34.200.000	34.200.000	0	0	0	34.200.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21.900.000	0	0	0	21.900.000	21.900.000	0	0	0	21.900.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.300.000	0	0	0	12.300.000	12.300.000	0	0	0	12.300.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.097.500	0	0	0	8.097.500	8.097.500	0	0	0	8.097.500	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.097.500	0	0	0	8.097.500	8.097.500	0	0	0	8.097.500	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8.097.500	0	0	0	8.097.500	8.097.500	0	0	0	8.097.500	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	42.853.000	0	0	0	42.853.000	42.853.000	0	0	0	42.853.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	42.853.000	0	0	0	42.853.000	42.853.000	0	0	0	42.853.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	42.853.000	0	0	0	42.853.000	42.853.000	0	0	0	42.853.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	22.100.400	0	0	0	22.100.400	22.100.400	0	0	0	22.100.400	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.100.400	0	0	0	22.100.400	22.100.400	0	0	0	22.100.400	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.455.000	0	0	0	10.455.000	10.455.000	0	0	0	10.455.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	11.645.400	0	0	0	11.645.400	11.645.400	0	0	0	11.645.400	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000				KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN	1.749.645.732	36.002.100	0	0	1.785.647.832	1.548.489.873	36.002.100	0	0	1.584.491.973	(201.155.859)
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.644.407.432	36.002.100	0	0	1.680.409.532	1.443.251.573	36.002.100	0	0	1.479.253.673	(201.155.859)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.189.800	0	0	0	28.189.800	28.189.800	0	0	0	28.189.800	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.800	0	0	0	4.999.800	4.999.800	0	0	0	4.999.800	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.190.000	0	0	0	21.190.000	21.190.000	0	0	0	21.190.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.432.151.132	0	0	0	1.432.151.132	1.230.995.273	0	0	0	1.230.995.273	(201.155.859)
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.402.650.732	0	0	0	1.402.650.732	1.201.494.873	0	0	0	1.201.494.873	(201.155.859)
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.500.400	0	0	0	27.500.400	27.500.400	0	0	0	27.500.400	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.717.200	0	0	0	65.717.200	65.717.200	0	0	0	65.717.200	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.996.000	0	0	0	2.996.000	2.996.000	0	0	0	2.996.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.241.500	0	0	0	7.241.500	7.241.500	0	0	0	7.241.500	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.087.900	0	0	0	4.087.900	4.087.900	0	0	0	4.087.900	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.391.800	0	0	0	4.391.800	4.391.800	0	0	0	4.391.800	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000	0	0	0	45.000.000	45.000.000	0	0	0	45.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	36.002.100	0	0	36.002.100	0	36.002.100	0	0	36.002.100	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	36.002.100	0	0	36.002.100	0	36.002.100	0	0	36.002.100	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.416.800	0	0	0	81.416.800	81.416.800	0	0	0	81.416.800	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.920.000	0	0	0	25.920.000	25.920.000	0	0	0	25.920.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	0	0	0	54.496.800	54.496.800	0	0	0	54.496.800	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.932.500	0	0	0	34.932.500	34.932.500	0	0	0	34.932.500	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.932.500	0	0	0	34.932.500	34.932.500	0	0	0	34.932.500	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	70.600.000	0	0	0	70.600.000	70.600.000	0	0	0	70.600.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	70.600.000	0	0	0	70.600.000	70.600.000	0	0	0	70.600.000	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	70.600.000	0	0	0	70.600.000	70.600.000	0	0	0	70.600.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.638.300	0	0	0	10.638.300	10.638.300	0	0	0	10.638.300	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.638.300	0	0	0	10.638.300	10.638.300	0	0	0	10.638.300	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5.640.000	0	0	0	5.640.000	5.640.000	0	0	0	5.640.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.998.300	0	0	0	4.998.300	4.998.300	0	0	0	4.998.300	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.500.000	0	0	0	11.500.000	11.500.000	0	0	0	11.500.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.500.000	0	0	0	11.500.000	11.500.000	0	0	0	11.500.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	11.500.000	0	0	0	11.500.000	11.500.000	0	0	0	11.500.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.500.000	0	0	0	7.500.000	7.500.000	0	0	0	7.500.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.500.000	0	0	0	7.500.000	7.500.000	0	0	0	7.500.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000				KANTOR KECAMATAN GAROGA	1.860.715.394	40.137.600	0	0	1.900.852.994	1.746.156.679	16.200.000	0	0	1.762.356.679	(138.496.315)
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.730.564.394	40.137.600	0	0	1.770.701.994	1.616.005.679	16.200.000	0	0	1.632.205.679	(138.496.315)
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.310.000	0	0	0	19.310.000	19.310.000	0	0	0	19.310.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.910.000	0	0	0	2.910.000	2.910.000	0	0	0	2.910.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.400.000	0	0	0	16.400.000	16.400.000	0	0	0	16.400.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.552.171.994	0	0	0	1.552.171.994	1.413.655.679	0	0	0	1.413.655.679	(138.516.315)
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.513.064.394	0	0	0	1.513.064.394	1.374.608.079	0	0	0	1.374.608.079	(138.456.315)
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.087.600	0	0	0	36.087.600	36.087.600	0	0	0	36.087.600	0
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.020.000	0	0	0	3.020.000	2.960.000	0	0	0	2.960.000	(60.000)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.975.400	0	0	0	50.975.400	51.779.000	0	0	0	51.779.000	803.600
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.504.500	0	0	0	3.504.500	3.504.500	0	0	0	3.504.500	0
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.425.600	0	0	0	10.425.600	5.210.600	0	0	0	5.210.600	(5.215.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.143.900	0	0	0	6.143.900	6.143.900	0	0	0	6.143.900	0
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.301.400	0	0	0	3.301.400	3.350.000	0	0	0	3.350.000	48.600
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.600.000	0	0	0	27.600.000	33.570.000	0	0	0	33.570.000	5.970.000
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	40.137.600	0	0	40.137.600	0	16.200.000	0	0	16.200.000	(23.937.600)
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	32.244.000	0	0	32.244.000	0	16.200.000	0	0	16.200.000	(16.044.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	7.893.600	0	0	7.893.600	0	0	0	0	0	(7.893.600)
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.138.100	0	0	0	79.138.100	74.278.100	0	0	0	74.278.100	(4.860.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.410.000	0	0	0	2.410.000	2.410.000	0	0	0	2.410.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.231.300	0	0	0	22.231.300	17.371.300	0	0	0	17.371.300	(4.860.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	0	0	0	54.496.800	54.496.800	0	0	0	54.496.800	0
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.968.900	0	0	0	28.968.900	56.982.900	0	0	0	56.982.900	28.014.000
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.904.800	0	0	0	17.904.800	45.982.000	0	0	0	45.982.000	28.077.200
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.064.100	0	0	0	11.064.100	11.000.900	0	0	0	11.000.900	(63.200)
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	44.998.000	0	0	0	44.998.000	44.998.000	0	0	0	44.998.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	44.998.000	0	0	0	44.998.000	44.998.000	0	0	0	44.998.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	44.998.000	0	0	0	44.998.000	44.998.000	0	0	0	44.998.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	19.993.000	0	0	0	19.993.000	19.993.000	0	0	0	19.993.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	19.993.000	0	0	0	19.993.000	19.993.000	0	0	0	19.993.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.993.000	0	0	0	9.993.000	9.993.000	0	0	0	9.993.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.399.000	0	0	0	15.399.000	15.399.000	0	0	0	15.399.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	15.399.000	0	0	0	15.399.000	15.399.000	0	0	0	15.399.000	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	15.399.000	0	0	0	15.399.000	15.399.000	0	0	0	15.399.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	35.221.000	0	0	0	35.221.000	35.221.000	0	0	0	35.221.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	35.221.000	0	0	0	35.221.000	35.221.000	0	0	0	35.221.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	35.221.000	0	0	0	35.221.000	35.221.000	0	0	0	35.221.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.540.000	0	0	0	14.540.000	14.540.000	0	0	0	14.540.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.540.000	0	0	0	14.540.000	14.540.000	0	0	0	14.540.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.440.000	0	0	0	7.440.000	7.440.000	0	0	0	7.440.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	7.100.000	0	0	0	7.100.000	7.100.000	0	0	0	7.100.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000				KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG	3.437.605.829	40.686.500	0	0	3.478.292.329	3.426.628.254	35.046.200	0	0	3.461.674.454	(16.617.875)
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.311.860.129	40.686.500	0	0	3.352.546.629	3.318.762.554	35.046.200	0	0	3.353.808.754	1.262.125
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.827.200	0	0	0	30.827.200	26.774.200	0	0	0	26.774.200	(4.053.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.371.200	0	0	0	1.371.200	1.371.200	0	0	0	1.371.200	0
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.456.000	0	0	0	29.456.000	25.403.000	0	0	0	25.403.000	(4.053.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.008.211.029	0	0	0	3.008.211.029	2.991.593.154	0	0	0	2.991.593.154	(16.617.875)
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.967.889.929	0	0	0	2.967.889.929	2.951.272.054	0	0	0	2.951.272.054	(16.617.875)
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	38.695.200	0	0	0	38.695.200	38.695.200	0	0	0	38.695.200	0
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.625.900	0	0	0	1.625.900	1.625.900	0	0	0	1.625.900	0
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	114.805.800	0	0	0	114.805.800	143.643.850	0	0	0	143.643.850	28.838.050
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.990.600	0	0	0	2.990.600	1.714.800	0	0	0	1.714.800	(1.275.800)
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.046.800	0	0	0	18.046.800	23.355.650	0	0	0	23.355.650	5.308.850
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.563.400	0	0	0	8.563.400	8.563.400	0	0	0	8.563.400	0
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.750.000	0	0	0	4.750.000	4.750.000	0	0	0	4.750.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.200.000	0	0	0	5.200.000	3.640.000	0	0	0	3.640.000	(1.560.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.255.000	0	0	0	75.255.000	101.620.000	0	0	0	101.620.000	26.365.000
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.000.000	40.686.500	0	0	45.686.500	7.050.000	35.046.200	0	0	42.096.200	(3.590.300)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	40.686.500	0	0	45.686.500	7.050.000	35.046.200	0	0	42.096.200	(3.590.300)
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.194.000	0	0	0	88.194.000	85.194.000	0	0	0	85.194.000	(3.000.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000	0	0	0	700.000	700.000	0	0	0	700.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.997.200	0	0	0	32.997.200	29.997.200	0	0	0	29.997.200	(3.000.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	0	0	0	54.496.800	54.496.800	0	0	0	54.496.800	0
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.822.100	0	0	0	64.822.100	64.507.350	0	0	0	64.507.350	(314.750)
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.052.100	0	0	0	48.052.100	52.696.250	0	0	0	52.696.250	4.644.150
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.775.500	0	0	0	6.775.500	4.210.000	0	0	0	4.210.000	(2.565.500)
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.994.500	0	0	0	9.994.500	7.601.100	0	0	0	7.601.100	(2.393.400)
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	34.500.000	0	0	0	34.500.000	46.980.000	0	0	0	46.980.000	12.480.000
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.500.000	0	0	0	34.500.000	46.980.000	0	0	0	46.980.000	12.480.000
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	34.500.000	0	0	0	34.500.000	46.980.000	0	0	0	46.980.000	12.480.000
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20.345.700	0	0	0	20.345.700	20.345.700	0	0	0	20.345.700	0
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	20.345.700	0	0	0	20.345.700	20.345.700	0	0	0	20.345.700	0
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.345.700	0	0	0	20.345.700	20.345.700	0	0	0	20.345.700	0
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	33.800.000	0	0	0	33.800.000	9.500.000	0	0	0	9.500.000	(24.300.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	33.800.000	0	0	0	33.800.000	9.500.000	0	0	0	9.500.000	(24.300.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	33.800.000	0	0	0	33.800.000	9.500.000	0	0	0	9.500.000	(24.300.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	28.800.000	0	0	0	28.800.000	28.800.000	0	0	0	28.800.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	28.800.000	0	0	0	28.800.000	28.800.000	0	0	0	28.800.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	28.800.000	0	0	0	28.800.000	28.800.000	0	0	0	28.800.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.300.000	0	0	0	8.300.000	2.240.000	0	0	0	2.240.000	(6.060.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.300.000	0	0	0	8.300.000	2.240.000	0	0	0	2.240.000	(6.060.000)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.300.000	0	0	0	8.300.000	2.240.000	0	0	0	2.240.000	(6.060.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0001				KELURAHAN PASAR SIBORONGBORONG	56.075.382	143.924.617	0	0	199.999.999	56.075.382	143.924.617	0	0	199.999.999	0
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0001	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	56.075.382	143.924.617	0	0	199.999.999	56.075.382	143.924.617	0	0	199.999.999	0
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0001	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	56.075.382	143.924.617	0	0	199.999.999	56.075.382	143.924.617	0	0	199.999.999	0
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0001	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6.075.383	143.924.617	0	0	150.000.000	6.075.383	143.924.617	0	0	150.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0001	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	49.999.999	0	0	0	49.999.999	49.999.999	0	0	0	49.999.999	0
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000				KANTOR KECAMATAN PAGARAN	1.999.935.096	19.994.800	0	0	2.019.929.896	1.822.155.523	28.206.175	0	0	1.850.361.698	(169.568.198)
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.862.841.596	19.994.800	0	0	1.882.836.396	1.725.550.523	28.206.175	0	0	1.753.756.698	(129.079.698)
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.114.500	0	0	0	10.114.500	16.462.500	0	0	0	16.462.500	6.348.000
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.114.500	0	0	0	10.114.500	16.462.500	0	0	0	16.462.500	6.348.000
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.669.954.376	0	0	0	1.669.954.376	1.500.473.903	0	0	0	1.500.473.903	(169.480.473)
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.639.453.876	0	0	0	1.639.453.876	1.469.973.403	0	0	0	1.469.973.403	(169.480.473)
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.667.200	0	0	0	27.667.200	27.667.200	0	0	0	27.667.200	0
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.833.300	0	0	0	2.833.300	2.833.300	0	0	0	2.833.300	0
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.277.100	0	0	0	45.277.100	82.020.000	0	0	0	82.020.000	36.742.900
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.742.000	0	0	0	2.742.000	5.410.800	0	0	0	5.410.800	2.668.800
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.069.600	0	0	0	12.069.600	12.069.600	0	0	0	12.069.600	0
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.535.500	0	0	0	4.535.500	5.479.600	0	0	0	5.479.600	944.100
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.930.000	0	0	0	25.930.000	59.060.000	0	0	0	59.060.000	33.130.000
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.981.820	19.994.800	0	0	28.976.620	8.981.820	28.206.175	0	0	37.187.995	8.211.375
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.981.820	19.994.800	0	0	28.976.620	8.981.820	28.206.175	0	0	37.187.995	8.211.375
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.509.200	0	0	0	78.509.200	64.607.700	0	0	0	64.607.700	(13.901.500)
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000	0	0	0	700.000	700.000	0	0	0	700.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.312.400	0	0	0	23.312.400	9.410.900	0	0	0	9.410.900	(13.901.500)
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	0	0	0	54.496.800	54.496.800	0	0	0	54.496.800	0
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.004.600	0	0	0	50.004.600	53.004.600	0	0	0	53.004.600	3.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.549.000	0	0	0	27.549.000	30.549.000	0	0	0	30.549.000	3.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.862.400	0	0	0	18.862.400	18.862.400	0	0	0	18.862.400	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.593.200	0	0	0	3.593.200	3.593.200	0	0	0	3.593.200	0
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12.564.000	0	0	0	12.564.000	23.784.000	0	0	0	23.784.000	11.220.000
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.564.000	0	0	0	12.564.000	23.784.000	0	0	0	23.784.000	11.220.000
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12.564.000	0	0	0	12.564.000	23.784.000	0	0	0	23.784.000	11.220.000
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.929.000	0	0	0	22.929.000	32.929.000	0	0	0	32.929.000	10.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.929.000	0	0	0	22.929.000	32.929.000	0	0	0	32.929.000	10.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22.929.000	0	0	0	22.929.000	32.929.000	0	0	0	32.929.000	10.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.000.500	0	0	0	20.000.500	4.061.000	0	0	0	4.061.000	(15.939.500)
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.000.500	0	0	0	20.000.500	4.061.000	0	0	0	4.061.000	(15.939.500)
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.000.500	0	0	0	20.000.500	4.061.000	0	0	0	4.061.000	(15.939.500)
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	61.600.000	0	0	0	61.600.000	29.431.000	0	0	0	29.431.000	(32.169.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	61.600.000	0	0	0	61.600.000	29.431.000	0	0	0	29.431.000	(32.169.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40.000.000	0	0	0	40.000.000	7.831.000	0	0	0	7.831.000	(32.169.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	21.600.000	0	0	0	21.600.000	21.600.000	0	0	0	21.600.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.000.000	0	0	0	20.000.000	6.400.000	0	0	0	6.400.000	(13.600.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.000.000	0	0	0	20.000.000	6.400.000	0	0	0	6.400.000	(13.600.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.000.000	0	0	0	20.000.000	6.400.000	0	0	0	6.400.000	(13.600.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000				KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN	1.214.378.915	25.719.300	0	0	1.240.098.215	1.280.788.285	25.719.300	0	0	1.306.507.585	66.409.370
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.085.186.315	25.719.300	0	0	1.110.905.615	1.175.939.285	25.719.300	0	0	1.201.658.585	90.752.970
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.600.000	0	0	0	3.600.000	13.200.000	0	0	0	13.200.000	9.600.000
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.800.000	0	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	1.800.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.800.000	0	0	0	1.800.000	11.400.000	0	0	0	11.400.000	9.600.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	888.315.535	0	0	0	888.315.535	954.744.505	0	0	0	954.744.505	66.428.970
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	865.915.135	0	0	0	865.915.135	932.344.105	0	0	0	932.344.105	66.428.970
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22.400.400	0	0	0	22.400.400	22.400.400	0	0	0	22.400.400	0
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	56.862.000	15.841.600	0	0	72.703.600	71.586.000	15.841.600	0	0	87.427.600	14.724.000
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.292.400	0	0	0	4.292.400	4.292.400	0	0	0	4.292.400	0
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.835.600	15.841.600	0	0	43.677.200	27.835.600	15.841.600	0	0	43.677.200	0
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.358.000	0	0	0	2.358.000	3.858.000	0	0	0	3.858.000	1.500.000
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.376.000	0	0	0	22.376.000	35.600.000	0	0	0	35.600.000	13.224.000
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.938.400	9.877.700	0	0	98.816.100	88.938.400	9.877.700	0	0	98.816.100	0
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	550.000	0	0	0	550.000	550.000	0	0	0	550.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.979.100	0	0	0	4.979.100	4.979.100	0	0	0	4.979.100	0
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.409.300	9.877.700	0	0	39.287.000	29.409.300	9.877.700	0	0	39.287.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.000.000	0	0	0	54.000.000	54.000.000	0	0	0	54.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.470.380	0	0	0	47.470.380	47.470.380	0	0	0	47.470.380	0
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.738.280	0	0	0	30.738.280	30.738.280	0	0	0	30.738.280	0
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.228.100	0	0	0	11.228.100	11.228.100	0	0	0	11.228.100	0
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.504.000	0	0	0	5.504.000	5.504.000	0	0	0	5.504.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	41.547.600	0	0	0	41.547.600	32.864.000	0	0	0	32.864.000	(8.683.600)
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40.047.600	0	0	0	40.047.600	32.864.000	0	0	0	32.864.000	(7.183.600)
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	40.047.600	0	0	0	40.047.600	32.864.000	0	0	0	32.864.000	(7.183.600)
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	(1.500.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	(1.500.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	66.045.000	0	0	0	66.045.000	50.385.000	0	0	0	50.385.000	(15.660.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	66.045.000	0	0	0	66.045.000	50.385.000	0	0	0	50.385.000	(15.660.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	66.045.000	0	0	0	66.045.000	50.385.000	0	0	0	50.385.000	(15.660.000)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.600.000	0	0	0	21.600.000	21.600.000	0	0	0	21.600.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.600.000	0	0	0	21.600.000	21.600.000	0	0	0	21.600.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	21.600.000	0	0	0	21.600.000	21.600.000	0	0	0	21.600.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000				KANTOR KECAMATAN MUARA	1.781.756.342	3.000.000	0	0	1.784.756.342	1.776.122.338	3.000.000	0	0	1.779.122.338	(5.634.004)
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.669.970.442	3.000.000	0	0	1.672.970.442	1.664.336.438	3.000.000	0	0	1.667.336.438	(5.634.004)
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.771.900	0	0	0	16.771.900	16.771.900	0	0	0	16.771.900	0
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.666.900	0	0	0	3.666.900	3.666.900	0	0	0	3.666.900	0
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.105.000	0	0	0	13.105.000	13.105.000	0	0	0	13.105.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.414.345.992	0	0	0	1.414.345.992	1.408.716.988	0	0	0	1.408.716.988	(5.629.004)
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.378.366.292	0	0	0	1.378.366.292	1.372.737.288	0	0	0	1.372.737.288	(5.629.004)
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.727.200	0	0	0	30.727.200	30.727.200	0	0	0	30.727.200	0
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.252.500	0	0	0	5.252.500	5.252.500	0	0	0	5.252.500	0
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.610.400	0	0	0	61.610.400	61.605.400	0	0	0	61.605.400	(5.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.669.200	0	0	0	5.669.200	5.669.200	0	0	0	5.669.200	0
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.964.000	0	0	0	6.964.000	6.964.000	0	0	0	6.964.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.267.600	0	0	0	4.267.600	4.267.600	0	0	0	4.267.600	0
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.318.400	0	0	0	2.318.400	2.318.400	0	0	0	2.318.400	0
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.891.200	0	0	0	1.891.200	1.891.200	0	0	0	1.891.200	0
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.500.000	0	0	0	40.500.000	40.495.000	0	0	0	40.495.000	(5.000)
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.102.900	3.000.000	0	0	78.102.900	75.102.900	3.000.000	0	0	78.102.900	0
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.102.900	3.000.000	0	0	78.102.900	75.102.900	3.000.000	0	0	78.102.900	0
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.052.200	0	0	0	79.052.200	79.052.200	0	0	0	79.052.200	0
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.555.400	0	0	0	23.555.400	23.555.400	0	0	0	23.555.400	0
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	0	0	0	54.496.800	54.496.800	0	0	0	54.496.800	0
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.087.050	0	0	0	23.087.050	23.087.050	0	0	0	23.087.050	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.087.050	0	0	0	23.087.050	23.087.050	0	0	0	23.087.050	0
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	71.875.600	0	0	0	71.875.600	71.875.600	0	0	0	71.875.600	0
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	71.875.600	0	0	0	71.875.600	71.875.600	0	0	0	71.875.600	0
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	71.875.600	0	0	0	71.875.600	71.875.600	0	0	0	71.875.600	0
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.710.300	0	0	0	12.710.300	12.710.300	0	0	0	12.710.300	0
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.710.300	0	0	0	12.710.300	12.710.300	0	0	0	12.710.300	0
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.710.300	0	0	0	12.710.300	12.710.300	0	0	0	12.710.300	0
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.600.000	0	0	0	5.600.000	5.600.000	0	0	0	5.600.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.600.000	0	0	0	5.600.000	5.600.000	0	0	0	5.600.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.600.000	0	0	0	5.600.000	5.600.000	0	0	0	5.600.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.600.000	0	0	0	21.600.000	21.600.000	0	0	0	21.600.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.600.000	0	0	0	21.600.000	21.600.000	0	0	0	21.600.000	0
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	21.600.000	0	0	0	21.600.000	21.600.000	0	0	0	21.600.000	0
8						**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**5.637.909.676**	**23.598.800**	**0**	**0**	**5.661.508.476**	**6.244.719.699**	**16.320.000**	**0**	**0**	**6.261.039.699**	**599.531.223**
8	**01**					**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**5.637.909.676**	**23.598.800**	**0**	**0**	**5.661.508.476**	**6.244.719.699**	**16.320.000**	**0**	**0**	**6.261.039.699**	**599.531.223**
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.637.909.676	23.598.800	0	0	5.661.508.476	6.244.719.699	16.320.000	0	0	6.261.039.699	599.531.223
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.159.050.613	23.598.800	0	0	3.182.649.413	2.959.265.036	16.320.000	0	0	2.975.585.036	(207.064.377)
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.050.000	0	0	0	29.050.000	29.050.000	0	0	0	29.050.000	0
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.050.000	0	0	0	20.050.000	20.050.000	0	0	0	20.050.000	0
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.761.504.213	0	0	0	2.761.504.213	2.587.226.936	0	0	0	2.587.226.936	(174.277.277)
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.712.749.013	0	0	0	2.712.749.013	2.538.471.736	0	0	0	2.538.471.736	(174.277.277)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.755.200	0	0	0	44.755.200	44.755.200	0	0	0	44.755.200	0
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	219.653.900	0	0	0	219.653.900	211.558.000	0	0	0	211.558.000	(8.095.900)
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.783.400	0	0	0	8.783.400	5.769.600	0	0	0	5.769.600	(3.013.800)
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.818.000	0	0	0	17.818.000	17.818.000	0	0	0	17.818.000	0
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.132.700	0	0	0	10.132.700	8.126.200	0	0	0	8.126.200	(2.006.500)
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.176.800	0	0	0	15.176.800	12.171.200	0	0	0	12.171.200	(3.005.600)
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.748.000	0	0	0	7.748.000	7.748.000	0	0	0	7.748.000	0
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.995.000	0	0	0	159.995.000	159.925.000	0	0	0	159.925.000	(70.000)
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.860.000	23.598.800	0	0	31.458.800	0	16.320.000	0	0	16.320.000	(15.138.800)
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.860.000	23.598.800	0	0	31.458.800	0	16.320.000	0	0	16.320.000	(15.138.800)
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.988.200	0	0	0	90.988.200	86.555.000	0	0	0	86.555.000	(4.433.200)
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.200.000	0	0	0	4.200.000	4.200.000	0	0	0	4.200.000	0
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.291.400	0	0	0	32.291.400	27.858.200	0	0	0	27.858.200	(4.433.200)
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	0	0	0	54.496.800	54.496.800	0	0	0	54.496.800	0
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.994.300	0	0	0	49.994.300	44.875.100	0	0	0	44.875.100	(5.119.200)
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.262.800	0	0	0	28.262.800	28.262.800	0	0	0	28.262.800	0
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.741.900	0	0	0	11.741.900	9.110.700	0	0	0	9.110.700	(2.631.200)
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.989.600	0	0	0	9.989.600	7.501.600	0	0	0	7.501.600	(2.488.000)
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	877.741.500	0	0	0	877.741.500	917.372.900	0	0	0	917.372.900	39.631.400
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	877.741.500	0	0	0	877.741.500	917.372.900	0	0	0	917.372.900	39.631.400
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	30.000.000	0	0	0	30.000.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	70.000.000
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	597.975.700	0	0	0	597.975.700	597.975.700	0	0	0	597.975.700	0

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	249.765.800	0	0	0	249.765.800	219.397.200	0	0	0	219.397.200	(30.368.600)
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	907.367.663	0	0	0	907.367.663	1.871.239.063	0	0	0	1.871.239.063	963.871.400
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	907.367.663	0	0	0	907.367.663	1.871.239.063	0	0	0	1.871.239.063	963.871.400
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	871.239.063	0	0	0	871.239.063	1.871.239.063	0	0	0	1.871.239.063	1.000.000.000
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	36.128.600	0	0	0	36.128.600	0	0	0	0	0	(36.128.600)
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	31.539.200	0	0	0	31.539.200	31.539.200	0	0	0	31.539.200	0
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	31.539.200	0	0	0	31.539.200	31.539.200	0	0	0	31.539.200	0
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	31.539.200	0	0	0	31.539.200	31.539.200	0	0	0	31.539.200	0
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	0	(60.000.000)
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	0	(60.000.000)
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	0	(60.000.000)

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	602.210.700	0	0	0	602.210.700	465.303.500	0	0	0	465.303.500	(136.907.200)
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	602.210.700	0	0	0	602.210.700	465.303.500	0	0	0	465.303.500	(136.907.200)
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150.000.000	0	0	0	150.000.000	119.050.000	0	0	0	119.050.000	(30.950.000)
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	97.372.900	0	0	0	97.372.900	66.479.800	0	0	0	66.479.800	(30.893.100)
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	354.837.800	0	0	0	354.837.800	279.773.700	0	0	0	279.773.700	(75.064.100)
						TOTAL	**1.043.615.563.395**	**162.308.226.046**	**10.672.000.000**	**242.453.421.817**	**1.459.049.211.258**	**998.717.209.488**	**173.506.978.029**	**13.116.614.000**	**259.726.239.000**	**1.445.067.040.517**	**(13.982.170.741)**

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
	A SPM Bidang Pendidikan					
	Pendidikan Dasar					
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
			Penambahan Ruang Kelas Baru	0	153.480.000	153.480.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	350.000.000	516.524.600	166.524.600
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	50.000.000	50.000.000
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.250.000.000	1.297.507.000	47.507.000
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5.580.575.350	4.261.262.350	(1.319.313.000)
			Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**7.180.575.350**	**6.278.773.950**	**(901.801.400)**
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	800.000.000	804.400.000	4.400.000
			Penambahan Ruang Kelas Baru	180.000.000	179.692.400	(307.600)
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	231.100.000	235.834.300	4.734.300
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	269.252.700	167.012.700	(102.240.000)
			Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**1.480.352.700**	**1.386.939.400**	**(93.413.300)**
			Jumlah Pendidikan Dasar	**8.660.928.050**	**7.665.713.350**	**(995.214.700)**
	Pendidikan Anak Usia Dini					
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
			Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	150.021.000	150.021.000	0
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.720.950.000	1.720.950.000	0
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	100.000.000	100.000.000	0
			Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**1.970.971.000**	**1.970.971.000**	**0**
			Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini	**1.970.971.000**	**1.970.971.000**	**0**
			Jumlah SPM Bidang Pendidikan	**10.631.899.050**	**9.636.684.350**	**(995.214.700)**
	B SPM Bidang Kesehatan					

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	402.713.400	268.800.000	(133.913.400)
	Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**402.713.400**	**268.800.000**	**(133.913.400)**
	Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			**402.713.400**	**268.800.000**	**(133.913.400)**
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	472.966.000	486.650.000	13.684.000
	Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**472.966.000**	**486.650.000**	**13.684.000**
	Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			**472.966.000**	**486.650.000**	**13.684.000**
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	664.100.600	787.727.600	123.627.000
	Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**664.100.600**	**787.727.600**	**123.627.000**
	Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut			**664.100.600**	**787.727.600**	**123.627.000**
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	317.614.000	179.814.000	(137.800.000)
	Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**317.614.000**	**179.814.000**	**(137.800.000)**
	Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			**317.614.000**	**179.814.000**	**(137.800.000)**
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	325.885.300	117.865.300	(208.020.000)
	Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**325.885.300**	**117.865.300**	**(208.020.000)**
	Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			**325.885.300**	**117.865.300**	**(208.020.000)**
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat					
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	605.430.300	601.706.800	(3.723.500)
	Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**605.430.300**	**601.706.800**	**(3.723.500)**
	Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat			**605.430.300**	**601.706.800**	**(3.723.500)**
	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis					
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	527.685.000	475.600.000	(52.085.000)
	Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**527.685.000**	**475.600.000**	**(52.085.000)**
	Jumlah Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis			**527.685.000**	**475.600.000**	**(52.085.000)**
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)					
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	129.750.000	176.960.000	47.210.000
	Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**129.750.000**	**176.960.000**	**47.210.000**
	Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)			**129.750.000**	**176.960.000**	**47.210.000**
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.194.599.500	2.481.768.500	287.169.000
	Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**2.194.599.500**	**2.481.768.500**	**287.169.000**
	Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			**2.194.599.500**	**2.481.768.500**	**287.169.000**
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	864.282.500	246.650.000	(617.632.500)
	Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**864.282.500**	**246.650.000**	**(617.632.500)**
	Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			**864.282.500**	**246.650.000**	**(617.632.500)**
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	501.661.500	161.461.500	(340.200.000)
	Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**501.661.500**	**161.461.500**	**(340.200.000)**
	Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			**501.661.500**	**161.461.500**	**(340.200.000)**
	Pelayanan Kesehatan Balita					
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.584.061.100	669.162.100	(914.899.000)
	Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**1.584.061.100**	**669.162.100**	**(914.899.000)**
	Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita			**1.584.061.100**	**669.162.100**	**(914.899.000)**
	Jumlah SPM Bidang Kesehatan			**8.590.749.200**	**6.654.165.800**	**(1.936.583.400)**
	C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang					
	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari					
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.078.085.133	1.213.736.133	135.651.000
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.831.999.698	1.823.505.698	(8.494.000)
			Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	79.999.800	49.999.800	(30.000.000)
	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			**2.990.084.631**	**3.087.241.631**	**97.157.000**
	Jumlah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari			**2.990.084.631**	**3.087.241.631**	**97.157.000**
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik					
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	129.080.600	129.080.600	0
			Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	7.003.317.000	7.003.317.000	0
	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			**7.132.397.600**	**7.132.397.600**	**0**
	Jumlah Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik			**7.132.397.600**	**7.132.397.600**	**0**
	Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			**10.122.482.231**	**10.219.639.231**	**97.157.000**
	D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
	Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota					
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	100.000.000	50.000.000	(50.000.000)
	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			**100.000.000**	**50.000.000**	**(50.000.000)**
	Jumlah Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota			**100.000.000**	**50.000.000**	**(50.000.000)**
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota					
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				
			Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	37.999.800	37.999.800	0
	Jumlah Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			**37.999.800**	**37.999.800**	**0**
	Jumlah Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota			**37.999.800**	**37.999.800**	**0**
	Jumlah SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			**137.999.800**	**87.999.800**	**(50.000.000)**
	E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum					
	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum					
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.265.281.350	1.989.275.050	723.993.700
	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			**1.265.281.350**	**1.989.275.050**	**723.993.700**
	Jumlah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum			**1.265.281.350**	**1.989.275.050**	**723.993.700**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	15.000.000	5.000.000	(10.000.000)
			Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**15.000.000**	**5.000.000**	**(10.000.000)**
			Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	**15.000.000**	**5.000.000**	**(10.000.000)**
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
			Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	5.000.000	5.000.000	0
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	95.000.000	76.869.200	(18.130.800)
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10.000.000	3.000.000	(7.000.000)
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10.000.000	9.000.000	(1.000.000)
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	10.000.000	1.300.000	(8.700.000)
			Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**130.000.000**	**95.169.200**	**(34.830.800)**
			Jumlah Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	**130.000.000**	**95.169.200**	**(34.830.800)**
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran					
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	159.900.000	209.850.000	49.950.000
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	8.400.000	158.399.900	149.999.900
			Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**168.300.000**	**368.249.900**	**199.949.900**
			Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	**168.300.000**	**368.249.900**	**199.949.900**
			Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	**1.578.581.350**	**2.457.694.150**	**879.112.800**
	F SPM Bidang Sosial					
	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti					
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
			Penyediaan Alat Bantu	88.000.000	84.900.000	(3.100.000)
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5.108.000	5.108.000	0
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	12.971.400	12.971.400	0
			Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**106.079.400**	**102.979.400**	**(3.100.000)**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
	Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti			**106.079.400**	**102.979.400**	**(3.100.000)**
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial					
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				
			Penyediaan Makanan	180.000.000	279.999.800	99.999.800
	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			**180.000.000**	**279.999.800**	**99.999.800**
	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial			**180.000.000**	**279.999.800**	**99.999.800**
	Jumlah SPM Bidang Sosial			**286.079.400**	**382.979.200**	**96.899.800**

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode null			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	789.260.619.244	889.782.601.399	862.293.721.622	(27.488.879.777)	3 %
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	434.032.000.000	450.669.963.460	418.521.280.323	(32.148.683.137)	7 %
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	330.800.000.000	359.273.969.542	327.695.236.303	(31.578.733.239)	9 %
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	103.192.000.000	91.395.993.918	90.826.044.020	(569.949.898)	1 %
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	285.267.552.000	286.312.213.510	288.457.426.391	2.145.212.881	1 %
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	144.728.776.000	125.706.508.247	125.701.150.605	(5.357.642)	0 %
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.492.128.776.000	158.516.953.563	160.368.762.886	1.851.809.323	1 %
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.650.000.000	1.233.079.700	1.233.079.700	0	0 %
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	730.000.000	564.994.000	556.815.200	(8.178.800)	1 %
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.770.000.000	290.678.000	338.138.000	47.460.000	16 %
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	52.992.023.194	116.640.450.601	117.009.194.168	368.743.567	0 %
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	10.830.494.993	10.400.314.128	(430.180.865)	4 %
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	6.738.228.980	12.184.289.421	11.880.809.421	(303.480.000)	2 %
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.356.000.000	2.990.084.631	3.087.241.631	97.157.000	3 %
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.841.855.000	7.132.397.600	7.132.397.600	0	0 %
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	157.500.000	549.999.900	534.938.900	(15.061.000)	3 %
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	997.499.000	1.184.999.700	1.488.433.100	303.433.400	26 %
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	36.790.218.974	81.348.184.776	82.120.189.888	772.005.112	1 %
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	426.232.920	35.000.000	35.000.000	0	0 %
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	684.488.320	384.999.580	329.869.500	(55.130.080)	14 %

Kode null			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9.089.742.450	17.764.383.605	18.633.301.375	868.917.770	5 %
1	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	11.553.657.395	11.731.517.365	177.859.970	2 %
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	38.000.000	137.999.800	87.999.800	(50.000.000)	36 %
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.546.000.000	554.999.800	536.999.800	(18.000.000)	3 %
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	7.505.742.450	5.517.726.610	6.276.784.410	759.057.800	14 %
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3.574.801.600	13.779.560.703	14.955.391.780	1.175.831.077	9 %
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	10.990.835.153	11.215.498.360	224.663.207	2 %
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	580.500.000	1.618.428.150	2.490.672.750	872.244.600	54 %
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	400.000.000	1.001.997.400	880.970.770	(121.026.630)	12 %
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.594.301.600	168.300.000	368.249.900	199.949.900	119 %
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	4.304.500.000	4.616.029.520	4.717.127.585	101.098.065	2 %
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.980.000.000	2.695.969.620	2.848.831.285	152.861.665	6 %
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	184.000.000	750.516.300	752.916.200	2.399.900	0 %
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	270.000.000	279.543.700	290.473.500	10.929.800	4 %
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	610.500.000	470.000.000	426.999.900	(43.000.100)	9 %
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	235.000.000	215.000.000	314.999.800	99.999.800	47 %
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	25.000.000	204.999.900	82.906.900	(122.093.000)	60 %
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	33.198.145.553	78.323.791.303	75.253.995.235	(3.069.796.068)	4 %
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4.680.000.000	3.346.390.890	3.160.685.912	(185.704.978)	6 %
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.990.000.000	2.796.228.090	2.460.523.212	(335.704.878)	12 %
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	600.000.000	442.642.800	592.642.700	149.999.900	34 %
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	30.000.000	47.520.000	47.520.000	0	0 %
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	0 %
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	381.000.000	380.000.000	395.000.000	15.000.000	4 %
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	191.000.000	190.000.000	250.000.000	60.000.000	32 %

Kode null			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0 %
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	150.000.000	150.000.000	105.000.000	(45.000.000)	30 %
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0	5.463.775.148	5.160.413.209	(303.361.939)	6 %
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	4.733.775.228	4.495.413.289	(238.361.939)	5 %
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	0	439.999.920	439.999.920	0	0 %
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	0	265.000.000	200.000.000	(65.000.000)	25 %
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	0	25.000.000	25.000.000	0	0 %
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1.388.146.800	312.875.200	176.897.400	(135.977.800)	43 %
2	10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	74.999.800	74.977.300	0	(74.977.300)	100 %
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	1.313.147.000	237.897.900	176.897.400	(61.000.500)	26 %
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1.847.088.500	9.207.261.093	9.281.497.827	74.236.734	1 %
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	7.608.442.243	7.378.357.977	(230.084.266)	3 %
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	389.500.000	335.000.000	334.998.900	(1.100)	0 %
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	195.000.000	204.297.650	204.297.650	0	0 %
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	47.961.000	41.761.400	41.761.400	0	0 %
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	106.314.400	90.000.000	90.000.000	0	0 %
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	125.220.000	59.999.800	349.999.800	290.000.000	483 %
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	42.010.000	47.082.200	47.082.200	0	0 %
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	47.961.100	35.677.900	0	(35.677.900)	100 %
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	44.470.000	40.000.000	40.000.000	0	0 %
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	791.652.000	744.999.900	794.999.900	50.000.000	7 %
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.585.019.200	4.560.814.708	4.217.789.320	(343.025.388)	8 %
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.780.000.000	3.914.481.508	3.567.674.020	(346.807.488)	9 %

Kode null			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	653.019.200	570.982.000	570.982.000	0	0 %
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	45.000.000	34.544.000	35.426.000	882.000	3 %
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	35.000.000	8.999.800	3.999.900	(4.999.900)	56 %
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	72.000.000	31.807.400	39.707.400	7.900.000	25 %
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.760.000.000	6.113.416.265	5.919.153.639	(194.262.626)	3 %
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	3.376.743.765	3.020.800.430	(355.943.335)	11 %
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	450.000.000	300.000.000	414.917.100	114.917.100	38 %
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	400.000.000	1.779.337.700	1.772.923.800	(6.413.900)	0 %
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	460.000.000	657.334.800	710.512.309	53.177.509	8 %
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.892.068.935	13.863.612.711	13.317.318.604	(546.294.107)	4 %
2	14	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	5.242.174.711	4.611.938.704	(630.236.007)	12 %
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	60.000.000	880.679.100	880.675.400	(3.700)	0 %
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.825.359.735	4.819.160.900	4.859.167.500	40.006.600	1 %
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.006.709.200	2.921.598.000	2.965.537.000	43.939.000	2 %
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	670.000.000	5.805.492.208	5.321.025.583	(484.466.625)	8 %
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	4.732.358.370	4.267.177.645	(465.180.725)	10 %
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	650.000.000	1.053.134.038	1.042.008.138	(11.125.900)	1 %
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	20.000.000	19.999.800	11.839.800	(8.160.000)	41 %
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.107.700.000	5.850.993.730	6.032.118.391	181.124.661	3 %
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.130.000.000	4.193.007.330	3.802.209.991	(390.797.339)	9 %
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	690.000.000	1.258.786.400	1.749.512.900	490.726.500	39 %
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	287.700.000	399.200.000	480.395.500	81.195.500	20 %
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	0	9.324.081.605	8.852.914.456	(471.167.149)	5 %
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	7.760.776.605	7.382.854.456	(377.922.149)	5 %
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	0	100.000.000	100.000.000	0	0 %

Kode null			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	0	327.305.200	327.305.200	0	0 %
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	0	231.000.000	231.000.000	0	0 %
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	0	904.999.800	811.754.800	(93.245.000)	10 %
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	814.925.118	4.015.993.272	3.575.908.787	(440.084.485)	11 %
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	2.904.891.372	2.700.775.887	(204.115.485)	7 %
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	344.000.000	136.702.100	71.293.000	(65.409.100)	48 %
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	217.411.227	225.470.700	81.402.900	(144.067.800)	64 %
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	117.595.800	122.595.800	99.796.000	(22.799.800)	19 %
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	0	541.612.800	548.632.800	7.020.000	1 %
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	135.918.091	84.720.500	74.008.200	(10.712.300)	13 %
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.932.197.000	6.283.311.501	5.951.393.856	(331.917.645)	5 %
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	3.033.781.701	2.735.675.256	(298.106.445)	10 %
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	475.000.000	507.953.100	437.449.600	(70.503.500)	14 %
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.457.197.000	2.741.576.700	2.778.269.000	36.692.300	1 %
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	210.000.000	128.543.000	128.543.000	0	0 %
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	210.000.000	128.543.000	128.543.000	0	0 %
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	20.000.000	57.359.800	5.985.000	(51.374.800)	90 %
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	20.000.000	57.359.800	5.985.000	(51.374.800)	90 %
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	230.000.000	270.320.300	608.709.190	338.388.890	125 %
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	230.000.000	270.320.300	608.709.190	338.388.890	125 %
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	620.000.000	3.279.549.872	3.088.641.061	(190.908.811)	6 %
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	3.014.399.872	2.823.491.461	(190.908.411)	6 %
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	620.000.000	265.150.000	265.149.600	(400)	0 %
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	0 %
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	0 %
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	34.731.010.867	74.223.826.423	72.993.788.527	(1.230.037.896)	2 %
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	1.577.571.500	2.217.064.650	639.493.150	41 %

Kode null			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	0	1.577.571.500	2.217.064.650	639.493.150	41 %
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	6.035.610.767	24.739.702.569	24.075.283.054	(664.419.515)	3 %
3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	4.858.064.710	4.971.118.067	113.053.357	2 %
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	4.900.000.000	18.840.702.884	17.907.652.156	(933.050.728)	5 %
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	550.000.000	855.935.075	665.037.575	(190.897.500)	22 %
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	200.000.000	184.999.900	89.999.900	(95.000.000)	51 %
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	385.610.767	0	441.475.356	441.475.356	100 %
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	28.695.400.100	42.994.905.254	41.922.825.530	(1.072.079.724)	2 %
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.700.000.000	18.842.042.354	16.270.359.921	(2.571.682.433)	14 %
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	6.989.900.000	7.858.886.440	7.693.985.150	(164.901.290)	2 %
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.100.500.000	11.518.613.400	13.126.727.200	1.608.113.800	14 %
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	450.000.000	465.573.090	556.572.990	90.999.900	20 %
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	180.000.000	396.690.200	396.690.200	0	0 %
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	50.000.100	70.000.000	59.999.900	(10.000.100)	14 %
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.225.000.000	3.843.099.770	3.818.490.169	(24.609.601)	1 %
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	0	1.116.257.100	983.225.293	(133.031.807)	12 %
3	30	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	71.324.200	0	(71.324.200)	100 %
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	0	352.359.200	386.521.200	34.162.000	10 %
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	0	173.773.800	173.773.800	0	0 %
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	0	518.799.900	422.930.293	(95.869.607)	18 %
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	0	3.795.390.000	3.795.390.000	0	0 %
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	0	3.795.390.000	3.795.390.000	0	0 %
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	46.908.358.000	74.977.644.559	78.903.992.054	3.926.347.495	5 %
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	35.668.358.000	36.841.753.222	41.354.380.238	4.512.627.016	12 %

Kode null			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	29.180.360.674	30.464.633.738	1.284.273.064	4 %
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	10.500.000.000	6.123.869.548	9.172.918.500	3.049.048.952	50 %
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.420.000.000	1.537.523.000	1.716.828.000	179.305.000	12 %
4	02		SEKRETARIAT DPRD	11.240.000.000	38.135.891.337	37.549.611.816	(586.279.521)	2 %
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	25.312.097.037	24.219.499.116	(1.092.597.921)	4 %
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	11.240.000.000	12.823.794.300	13.330.112.700	506.318.400	4 %
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	304.062.029.671	286.004.112.059	302.939.157.820	16.935.045.761	6 %
5	01		PERENCANAAN	6.650.803.400	6.392.789.153	5.879.221.960	(513.567.193)	8 %
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.715.000.000	4.886.467.853	4.280.916.560	(605.551.293)	12 %
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.100.000.000	995.335.600	1.027.319.700	31.984.100	3 %
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	835.803.400	510.985.700	570.985.700	60.000.000	12 %
5	02		KEUANGAN	294.111.226.271	272.918.522.461	291.503.237.622	18.584.715.161	7 %
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.292.822.705	10.670.909.644	10.680.874.647	9.965.003	0 %
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	280.296.881.666	259.998.442.817	279.021.268.575	19.022.825.758	7 %
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	771.521.900	911.052.900	779.960.300	(131.092.600)	14 %
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.750.000.000	1.338.117.100	1.021.134.100	(316.983.000)	24 %
5	03		KEPEGAWAIAN	1.500.000.000	5.512.800.445	4.476.796.238	(1.036.004.207)	19 %
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	3.112.317.645	2.780.607.938	(331.709.707)	11 %
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.500.000.000	2.400.482.800	1.696.188.300	(704.294.500)	29 %
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.450.000.000	700.000.000	611.902.000	(88.098.000)	13 %
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.450.000.000	700.000.000	611.902.000	(88.098.000)	13 %
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	350.000.000	480.000.000	468.000.000	(12.000.000)	3 %
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	350.000.000	480.000.000	468.000.000	(12.000.000)	3 %
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.100.000.000	13.105.590.657	11.363.406.919	(1.742.183.738)	13 %
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	6.100.000.000	13.105.590.657	11.363.406.919	(1.742.183.738)	13 %
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	9.625.590.657	9.092.276.919	(533.313.738)	6 %
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	750.000.000	2.680.000.000	1.891.130.000	(788.870.000)	29 %
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	5.350.000.000	800.000.000	380.000.000	(420.000.000)	53 %

Kode null			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
7			UNSUR KEWILAYAHAN	13.747.034.850	36.970.136.382	35.057.938.641	(1.912.197.741)	5 %
7	01		KECAMATAN	13.747.034.850	36.970.136.382	35.057.938.641	(1.912.197.741)	5 %
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.945.000.000	33.076.365.963	31.341.738.206	(1.734.627.757)	5 %
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	811.479.100	617.318.700	610.475.000	(6.843.700)	1 %
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	42.242.835.750	2.309.687.319	2.294.174.535	(15.512.784)	1 %
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	350.000.000	133.306.700	80.122.200	(53.184.500)	40 %
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	400.000.000	357.353.800	316.184.800	(41.169.000)	12 %
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	215.000.000	191.303.900	130.443.900	(60.860.000)	32 %
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5.234.639.200	5.661.508.476	6.261.039.699	599.531.223	11 %
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.234.639.200	5.661.508.476	6.261.039.699	599.531.223	11 %
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.278.000.000	3.182.649.413	2.975.585.036	(207.064.377)	7 %
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	270.000.000	877.741.500	917.372.900	39.631.400	5 %
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	970.100.000	907.367.663	1.871.239.063	963.871.400	106 %
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	31.539.200	31.539.200	31.539.200	0	0 %
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	65.000.000	60.000.000	0	(60.000.000)	100 %
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	620.000.000	602.210.700	465.303.500	(136.907.200)	23 %

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0000						DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	410.244.666.086	406.170.353.086	419.129.989.513
1.01.2.22.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	410.032.766.086	405.958.453.086	418.521.280.323
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	410.032.766.086	405.958.453.086	418.521.280.323
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	317.785.406.066	315.125.768.266	327.695.236.303
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.697.200	95.631.200	95.631.200
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.247.300	23.247.300	23.247.300
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.999.900	4.999.900	4.999.900
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98.450.000	67.384.000	67.384.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	315.357.154.206	312.357.154.206	324.926.622.243
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	315.134.150.406	312.134.150.406	324.703.618.443
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	217.474.800	217.474.800	217.474.800
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.529.000	5.529.000	5.529.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	149.977.300	149.977.300	149.977.300
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	149.977.300	149.977.300	149.977.300
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	799.940.300	1.107.682.100	1.107.682.100
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.821.500	34.821.500	34.821.500
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	222.709.400	222.709.400	222.709.400
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.187.800	25.187.800	25.187.800

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	112.948.400	112.948.400	112.948.400
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.956.200	19.956.200	19.956.200
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.007.000	194.015.000	194.015.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	335.310.000	498.043.800	498.043.800
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	267.548.500	267.548.500	267.548.500
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	267.548.500	267.548.500	267.548.500
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	647.048.900	647.048.900	647.048.900
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	4.500.000	4.500.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.412.200	101.412.200	101.412.200
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.136.700	91.136.700	91.136.700
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	450.000.000	450.000.000	450.000.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	437.039.660	500.726.060	500.726.060
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	337.039.660	325.726.060	325.726.060
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	175.000.000	175.000.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	92.247.360.020	90.832.684.820	90.826.044.020
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	54.720.808.352	53.709.866.552	53.784.204.652
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	153.480.000	153.480.000	153.480.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	596.046.000	582.702.000	579.982.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	939.880.500	934.128.500	931.898.500
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.122.595.500	3.175.002.400	3.133.430.500
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	518.797.000	517.304.600	516.524.600
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	0	50.000.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.283.691.000	1.300.867.000	1.297.507.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	209.478.200	209.478.200	209.478.200

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5.580.575.350	4.261.262.350	4.261.262.350
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	863.999.600	863.999.600	938.999.600
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	41.452.265.202	41.711.641.902	41.711.641.902
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	29.864.323.900	29.460.590.500	29.379.611.600
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	800.000.000	804.400.000	804.400.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	180.000.000	180.032.400	179.692.400
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.044.527.100	2.041.593.500	2.053.013.800
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	677.206.000	683.617.100	676.297.100
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	243.768.900	239.094.300	235.834.300
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	150.000.000	149.951.300	150.281.300
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	25.520.000.000	25.113.080.000	25.113.080.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	248.821.900	248.821.900	167.012.700
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.252.987.768	7.252.987.768	7.252.987.768
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	190.532.268	190.532.268	190.532.268
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	150.021.000	150.021.000	150.021.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	47.074.500	47.074.500	47.074.500
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.720.950.000	1.720.950.000	1.720.950.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	5.044.410.000	5.044.410.000	5.044.410.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	409.240.000	409.240.000	409.240.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	409.240.000	409.240.000	409.240.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	211.900.000	211.900.000	608.709.190
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	211.900.000	211.900.000	608.709.190

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	211.900.000	211.900.000	608.709.190
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000	70.000.000	70.000.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	70.000.000	70.000.000	70.000.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	141.900.000	141.900.000	538.709.190
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	41.900.000	41.900.000	123.709.190
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	100.000.000	100.000.000	415.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000						DINAS KESEHATAN	178.057.131.750	174.364.903.450	171.641.698.057
1.02.0.00.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	178.057.131.750	174.364.903.450	171.641.698.057
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	178.057.131.750	174.364.903.450	171.641.698.057
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	99.759.025.742	98.284.025.742	95.637.500.349
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	272.140.000	298.840.000	298.840.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.800.000	57.800.000	57.800.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	189.340.000	216.040.000	216.040.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	91.877.201.217	91.885.781.217	89.246.735.824
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	91.547.684.817	91.547.684.817	88.824.479.424

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	324.516.400	333.096.400	417.256.400
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	56.029.000	56.029.000	56.029.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	56.029.000	56.029.000	56.029.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	356.957.200	566.448.600	566.448.600
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	54.999.600	54.999.600
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.980.100	80.976.900	80.976.900
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.003.000	35.003.000	35.003.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43.006.100	53.006.100	53.006.100
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	39.497.000	39.497.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.968.000	42.966.000	42.966.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.000.000	260.000.000	260.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.000.000	90.000.000	82.520.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	40.000.000	40.000.000	36.260.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	50.000.000	46.260.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.411.209.593	4.704.447.993	4.704.447.993
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	297.342.850	205.866.100	205.866.100
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.113.866.743	4.498.581.893	4.498.581.893
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	595.488.732	582.478.932	582.478.932
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	474.997.832	411.997.832	411.997.832
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000	90.000.000	90.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.490.900	80.481.100	80.481.100

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	75.899.874.308	73.693.364.808	73.616.684.808
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	22.110.362.000	22.110.362.000	21.577.939.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.690.000.000	1.690.000.000	1.672.920.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14.102.085.000	14.102.085.000	14.063.265.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	175.001.000	175.001.000	175.001.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	1.940.783.000	1.940.783.000	1.937.090.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	4.062.070.000	4.062.070.000	3.589.240.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	140.423.000	140.423.000	140.423.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53.113.301.608	50.751.792.108	51.213.175.108
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.460.768.500	2.481.768.500	2.481.768.500
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	246.650.000	246.650.000	246.650.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	161.461.500	161.461.500	161.461.500
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	576.855.500	669.162.100	669.162.100
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	268.800.000	268.800.000	268.800.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	486.650.000	486.650.000	486.650.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	727.841.600	793.614.600	787.727.600
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	179.814.000	179.814.000	179.814.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	117.865.300	117.865.300	117.865.300
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	596.630.300	601.706.800	601.706.800

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	475.600.000	475.600.000	475.600.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	176.950.000	176.960.000	176.960.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.719.268.700	5.638.648.700	5.638.648.700
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	110.390.600	91.209.400	91.209.400
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	970.660.500	952.376.500	952.376.500
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.695.698.200	1.659.730.400	1.659.730.400
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	346.581.100	359.515.100	359.515.100
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	37.600.000	37.600.000	37.600.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	165.000.000	165.000.000	165.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.435.798.900	2.467.085.100	2.467.085.100
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	31.146.757.908	28.699.529.608	28.699.529.608
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	45.608.000	82.048.000	82.048.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.688.512.000	3.667.111.500	3.667.111.500
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	91.585.000	91.585.000	558.855.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	112.000.000	112.000.000	112.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	21.954.000	18.300.000	18.300.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	138.260.700	293.260.700	287.620.700
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	74.785.300	74.785.300	74.785.300
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	63.475.400	218.475.400	212.835.400
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	537.950.000	537.950.000	537.950.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	309.950.000	309.950.000	309.950.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	228.000.000	228.000.000	228.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.233.079.700	1.233.079.700	1.233.079.700
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	103.000.000	103.000.000	103.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	53.000.000	53.000.000	53.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	135.000.000	135.000.000	135.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	60.000.000	60.000.000	60.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	35.000.000	35.000.000	35.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	40.000.000	40.000.000	40.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	995.079.700	995.079.700	995.079.700
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	995.079.700	995.079.700	995.079.700
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	564.994.000	556.815.200	556.815.200
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	40.000.000	40.000.000	40.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	40.000.000	40.000.000	40.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	85.000.000	85.000.000	85.000.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	40.000.000	40.000.000	40.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.02	02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	45.000.000	45.000.000	45.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	187.800.000	187.800.000	187.800.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	187.800.000	187.800.000	187.800.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	40.000.000	34.280.000	34.280.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	40.000.000	34.280.000	34.280.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	30.000.000	27.541.200	27.541.200
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	30.000.000	27.541.200	27.541.200
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	182.194.000	182.194.000	182.194.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	182.194.000	182.194.000	182.194.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	600.158.000	597.618.000	597.618.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000	90.000.000	90.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	90.000.000	90.000.000	90.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	510.158.000	507.618.000	507.618.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	510.158.000	507.618.000	507.618.000
1.02.0.00.0.00.02.0000						RSU DAERAH TARUTUNG	118.535.176.390	118.535.176.390	116.815.728.334
1.02.0.00.0.00.02.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	118.535.176.390	118.535.176.390	116.815.728.334
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	118.535.176.390	118.535.176.390	116.815.728.334
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.783.098.312	31.783.098.312	30.063.650.256
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.783.098.312	31.783.098.312	30.063.650.256
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31.783.098.312	31.783.098.312	30.063.650.256
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	86.752.078.078	86.752.078.078	86.752.078.078
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.424.090.000	5.424.090.000	5.424.090.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.424.090.000	5.424.090.000	5.424.090.000
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	81.327.988.078	81.327.988.078	81.327.988.078
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	81.327.988.078	81.327.988.078	81.327.988.078
1.03.0.00.0.00.01.0000						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	103.760.901.744	105.110.901.744	104.766.182.937
1.03.0.00.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	103.760.901.744	105.110.901.744	104.766.182.937

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	103.760.901.744	105.110.901.744	104.766.182.937
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.506.945.916	10.931.072.162	10.400.314.128
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	139.564.200	139.564.200	141.734.200
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	54.494.700	54.494.700	54.494.700
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.779.500	7.779.500	7.779.500
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.290.000	77.290.000	79.460.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.859.823.662	7.859.823.662	7.365.104.855
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.771.915.862	7.771.915.862	7.277.197.055
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	77.809.200	77.809.200	77.809.200
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.098.600	5.098.600	5.098.600
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.992.900	7.992.900	7.992.900
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.992.900	7.992.900	7.992.900
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69.959.000	113.690.000	113.690.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	69.959.000	113.690.000	113.690.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	655.382.100	824.782.100	824.782.100
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.241.900	10.241.900	10.241.900
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.998.700	94.998.700	94.998.700
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.513.500	26.513.500	26.513.500
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.249.900	31.249.900	31.249.900
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	34.985.600	34.985.600	34.985.600
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.996.500	19.996.500	19.996.500

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	437.396.000	606.796.000	606.796.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85.380.100	85.380.100	83.210.100
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.380.100	85.380.100	83.210.100
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.063.700	141.058.946	141.058.946
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.240.000	5.240.000	5.240.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.995.700	44.990.946	44.990.946
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.828.000	90.828.000	90.828.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.542.780.254	1.758.780.254	1.722.741.027
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	222.800.355	222.800.355	222.800.355
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1.226.250.772	1.376.250.772	1.452.250.772
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.699.400	27.699.400	27.699.400
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.039.227	112.039.227	0
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.990.500	19.990.500	19.990.500
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	11.820.989.421	11.880.809.421	11.880.809.421
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	75.000.000	75.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	25.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.745.989.421	11.805.809.421	11.805.809.421
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	748.493.871	765.403.871	765.403.871

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	10.739.377.050	10.784.417.050	10.784.417.050
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	258.118.500	255.988.500	255.988.500
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	81.068.096.907	81.934.150.661	82.120.189.888
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	81.068.096.907	81.934.150.661	82.120.189.888
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.424.327.000	1.664.197.000	1.664.197.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	400.000.000	387.710.000	387.710.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	5.925.395.459	5.956.685.459	5.956.685.459
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	53.162.588.324	53.285.472.078	53.435.472.078
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	6.141.700.000	6.173.570.000	6.173.570.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.315.500.000	1.801.450.000	1.801.450.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	11.050.786.124	10.998.796.124	10.998.796.124
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	493.450.000	387.210.000	387.210.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	300.000.000	450.000.000	486.039.227
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	24	Pembangunan Jalan Strategis Desa	420.200.000	408.960.000	408.960.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	25	Rekonstruksi Jalan Strategis Desa	434.150.000	420.100.000	420.100.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	35.000.000	35.000.000	35.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	35.000.000	35.000.000	35.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	35.000.000	35.000.000	35.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	329.869.500	329.869.500	329.869.500
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	154.869.500	223.669.500	223.669.500
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	34.999.900	124.599.900	124.599.900
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	119.869.600	99.069.600	99.069.600
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000	106.200.000	106.200.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	175.000.000	106.200.000	106.200.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.04.2.10.1.03.01.0000						DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	29.369.606.691	30.873.502.998	31.053.210.006
1.04.2.10.1.03.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	29.192.709.291	30.696.605.598	30.876.312.606
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11.963.616.831	12.093.011.231	12.243.011.231
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.960.084.631	2.937.241.631	3.087.241.631
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.960.084.631	2.937.241.631	3.087.241.631
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.078.085.133	1.063.736.133	1.213.736.133
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.831.999.698	1.823.505.698	1.823.505.698
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	03	03	2.01	12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	49.999.800	49.999.800	49.999.800
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7.132.397.600	7.132.397.600	7.132.397.600
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.132.397.600	7.132.397.600	7.132.397.600
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	129.080.600	129.080.600	129.080.600
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	7.003.317.000	7.003.317.000	7.003.317.000
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	549.999.900	534.938.900	534.938.900
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	549.999.900	534.938.900	534.938.900
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	549.999.900	534.938.900	534.938.900
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.321.134.700	1.488.433.100	1.488.433.100
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.321.134.700	1.488.433.100	1.488.433.100

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	116.400.000	116.400.000	116.400.000
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1.204.734.700	1.372.033.100	1.372.033.100
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	17.229.092.460	18.603.594.367	18.633.301.375
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.213.349.950	11.751.810.357	11.731.517.365
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.224.700	71.224.700	71.224.700
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.548.200	48.548.200	48.548.200
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.678.500	7.678.500	7.678.500
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.998.000	14.998.000	14.998.000
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.055.549.189	3.176.529.189	3.206.236.197
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.966.033.789	2.966.033.789	2.995.920.797
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78.517.200	199.497.200	199.317.200
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.998.200	10.998.200	10.998.200
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	387.485.200	487.429.200	487.429.200
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.996.500	14.996.500	14.996.500
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.768.100	39.768.100	39.768.100
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.616.500	22.616.500	22.616.500
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.605.900	31.605.900	31.605.900
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.677.200	10.677.200	10.677.200
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.160.000	11.160.000	11.160.000
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	256.661.000	356.605.000	356.605.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	248.015.100	248.015.100	248.015.100
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	248.015.100	248.015.100	248.015.100
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.201.461.961	7.518.998.368	7.518.998.368
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.950.000	4.950.000	4.950.000
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.119.047.161	7.436.583.568	7.436.583.568
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	77.464.800	77.464.800	77.464.800
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.613.800	249.613.800	199.613.800
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	175.177.600	175.177.600	125.177.600
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	54.793.700	54.793.700	54.793.700
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.642.500	19.642.500	19.642.500
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	87.999.800	87.999.800	87.999.800
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	37.999.800	37.999.800	37.999.800
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	02	2.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	37.999.800	37.999.800	37.999.800
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	536.999.800	536.999.800	536.999.800
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	98.000.000	98.000.000	98.000.000
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	98.000.000	98.000.000	98.000.000
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	438.999.800	438.999.800	438.999.800
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	27.999.800	27.999.800	27.999.800

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	03	2.03	03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	411.000.000	411.000.000	411.000.000
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	5.390.742.910	6.226.784.410	6.276.784.410
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	5.390.742.910	6.226.784.410	6.276.784.410
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	4.645.852.410	5.430.533.910	5.480.533.910
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	744.890.500	796.250.500	796.250.500
1.04.2.10.1.03.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	176.897.400	176.897.400	176.897.400
1.04.2.10.1.03.01.0000	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	176.897.400	176.897.400	176.897.400
1.04.2.10.1.03.01.0000	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	176.897.400	176.897.400	176.897.400
1.04.2.10.1.03.01.0000	2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	176.897.400	176.897.400	176.897.400
1.04.2.10.1.03.01.0000	2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	102.031.500	102.031.500	102.031.500
1.04.2.10.1.03.01.0000	2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	74.865.900	74.865.900	74.865.900
1.05.0.00.0.00.01.0000						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	9.714.404.069	10.644.515.419	10.891.754.552
1.05.0.00.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9.714.404.069	10.644.515.419	10.891.754.552
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	9.714.404.069	10.644.515.419	10.891.754.552
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.285.546.419	7.785.592.769	8.032.831.902
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.999.700	81.999.700	81.999.700
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.900	4.999.900	4.999.900
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.999.900	4.999.900	4.999.900
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.999.900	4.999.900	4.999.900
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.000.000	62.000.000	62.000.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.406.465.141	2.406.465.141	2.653.704.274
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.351.225.941	2.351.225.941	2.598.465.074
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.239.200	50.239.200	50.239.200
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	211.279.100	271.304.100	271.304.100
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.999.600	7.999.600	7.999.600
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.098.200	24.098.200	24.098.200
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.171.300	6.171.300	6.171.300
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.400.000	3.400.000	3.400.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.610.000	229.635.000	229.635.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.736.700	46.736.700	46.736.700
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.736.700	46.736.700	46.736.700
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.232.895.728	4.548.695.328	4.548.695.328
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.330.000	1.330.000	1.330.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.998.900	33.998.500	33.998.500
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.204.566.828	4.513.366.828	4.513.366.828
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	306.170.050	430.391.800	430.391.800
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	298.797.250	423.019.000	423.019.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.372.800	7.372.800	7.372.800
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.260.557.650	2.490.672.750	2.490.672.750
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.809.160.050	1.989.275.050	1.989.275.050

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.809.160.050	1.989.275.050	1.989.275.050
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	451.397.600	501.397.700	501.397.700
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	98.250.800	98.250.800	98.250.800
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	214.199.900	264.200.000	264.200.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	138.946.900	138.946.900	138.946.900
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	168.300.000	368.249.900	368.249.900
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	168.300.000	368.249.900	368.249.900
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	159.900.000	209.850.000	209.850.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	8.400.000	158.399.900	158.399.900
1.05.0.00.0.00.04.0000						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.903.564.309	4.109.864.089	4.063.637.228
1.05.0.00.0.00.04.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.903.564.309	4.109.864.089	4.063.637.228
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3.903.564.309	4.109.864.089	4.063.637.228
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.065.643.539	3.228.893.319	3.182.666.458
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.483.300	41.007.300	41.007.300
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.772.200	4.772.200	4.772.200

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.246.600	4.246.600	4.246.600
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.464.500	31.988.500	31.988.500
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.414.561.239	2.414.561.239	2.368.334.378
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.368.214.139	2.368.214.139	2.321.987.278
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.347.200	41.347.200	41.347.200
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.999.900	4.999.900	4.999.900
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	223.287.100	301.664.800	301.664.800
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.601.900	10.186.100	10.186.100
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.477.600	20.477.600	20.477.600
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.986.900	10.081.900	10.081.900
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.899.300	22.015.800	22.015.800
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.996.400	19.996.400	19.996.400
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.325.000	218.907.000	218.907.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.701.400	37.908.800	37.908.800
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	28.207.400	28.207.400
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.701.400	9.701.400	9.701.400
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.346.300	252.146.300	252.146.300
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	2.000.000	2.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.159.100	32.159.100	32.159.100
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	217.987.200	217.987.200	217.987.200
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.264.200	181.604.880	181.604.880
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.042.500	97.964.900	97.964.900
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	47.650.380	47.650.380

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.058.100	6.058.100	6.058.100
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.163.600	29.931.500	29.931.500
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	837.920.770	880.970.770	880.970.770
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	541.818.900	554.868.900	554.868.900
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	499.999.000	513.049.000	513.049.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	41.819.900	41.819.900	41.819.900
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	227.932.670	227.932.670	227.932.670
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	156.998.500	156.998.500	156.998.500
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	62.934.170	62.934.170	62.934.170
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	3.000.000	3.000.000	3.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	65.169.200	95.169.200	95.169.200
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	46.869.200	76.869.200	76.869.200
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	3.000.000	3.000.000	3.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	9.000.000	9.000.000	9.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1.300.000	1.300.000	1.300.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	3.000.000	3.000.000	3.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	3.000.000	3.000.000	3.000.000
1.06.0.00.0.00.01.0000						DINAS SOSIAL	4.361.253.885	4.691.852.585	4.717.127.585

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.361.253.885	4.691.852.585	4.717.127.585
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	4.361.253.885	4.691.852.585	4.717.127.585
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.649.956.985	2.823.556.285	2.848.831.285
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.869.500	25.869.500	25.869.500
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	4.000.000	4.000.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.869.500	16.869.500	16.869.500
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.155.060.225	2.155.060.225	2.180.335.225
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.110.968.625	2.110.968.625	2.136.243.625
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.591.600	39.591.600	39.591.600
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.500.000	4.500.000	4.500.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	233.394.400	350.358.700	350.358.700
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.599.700	9.599.700	9.599.700
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.453.700	44.457.000	44.457.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.998.700	32.998.700	32.998.700
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.412.600	27.412.600	27.412.600
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.058.700	7.050.700	7.050.700
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.871.000	228.840.000	228.840.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52.843.200	55.843.200	55.843.200
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.843.200	55.843.200	55.843.200
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.927.800	172.245.200	172.245.200
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.420.000	3.420.000	3.420.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.679.800	31.679.800	31.679.800

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.828.000	137.145.400	137.145.400
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.861.860	64.179.460	64.179.460
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.852.260	40.169.860	40.169.860
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.093.900	7.093.900	7.093.900
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.535.700	8.535.700	8.535.700
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.380.000	8.380.000	8.380.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	737.916.300	752.916.200	752.916.200
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	737.916.300	752.916.200	752.916.200
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	737.916.300	752.916.200	752.916.200
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	275.473.700	290.473.500	290.473.500
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	102.979.400	102.979.400	102.979.400
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	84.900.000	84.900.000	84.900.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5.108.000	5.108.000	5.108.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	12.971.400	12.971.400	12.971.400
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	172.494.300	187.494.100	187.494.100
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	7.000.000	7.000.000	7.000.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	45.255.000	45.255.000	45.255.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	97.487.400	82.487.400	82.487.400
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	4.444.900	4.444.900	4.444.900
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	9.900.000	39.899.800	39.899.800

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	8.407.000	8.407.000	8.407.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	400.000.000	426.999.900	426.999.900
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	426.999.900	426.999.900
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	170.000.000	196.999.900	196.999.900
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	230.000.000	230.000.000	230.000.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	215.000.000	314.999.800	314.999.800
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	180.000.000	279.999.800	279.999.800
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	180.000.000	279.999.800	279.999.800
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	35.000.000	35.000.000	35.000.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	35.000.000	35.000.000	35.000.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	82.906.900	82.906.900	82.906.900
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	82.906.900	82.906.900	82.906.900
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	76.906.900	76.906.900	76.906.900
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	6.000.000	6.000.000	6.000.000
2.07.3.32.0.00.01.0000						DINAS KETENAGAKERJAAN	3.089.980.576	3.410.913.576	3.160.685.912
2.07.3.32.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.089.980.576	3.410.913.576	3.160.685.912
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3.089.980.576	3.410.913.576	3.160.685.912
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.539.817.776	2.610.750.776	2.460.523.212
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.365.600	15.365.600	15.365.600
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.158.000	12.158.000	12.158.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.207.600	3.207.600	3.207.600
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.133.569.556	2.133.569.556	1.983.341.992
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.089.009.956	2.089.009.956	1.938.782.392
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.347.200	41.347.200	41.347.200
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.212.400	3.212.400	3.212.400
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	174.036.100	244.969.100	244.969.100
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.656.900	5.656.900	5.656.900
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.972.600	20.972.600	20.972.600
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.634.800	6.634.800	6.634.800
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.669.200	14.669.200	14.669.200
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.394.600	6.394.600	6.394.600
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119.708.000	190.641.000	190.641.000
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.200.000	6.200.000	6.200.000
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.200.000	6.200.000	6.200.000
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.658.600	175.658.600	175.658.600
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	500.000
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.999.400	47.999.400	47.999.400
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.159.200	127.159.200	127.159.200
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.987.920	34.987.920	34.987.920
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.987.920	34.987.920	34.987.920
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	442.642.800	692.642.800	592.642.700
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	409.278.600	659.278.600	559.278.500

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	409.278.600	659.278.600	559.278.500
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	33.364.200	33.364.200	33.364.200
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	33.364.200	33.364.200	33.364.200
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	47.520.000	47.520.000	47.520.000
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	47.520.000	47.520.000	47.520.000
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	27.520.000	27.520.000	27.520.000
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	60.000.000	60.000.000	60.000.000
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	40.000.000	40.000.000
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	40.000.000	40.000.000	40.000.000
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000						DINAS KETAHANAN PANGAN	9.527.578.746	9.843.722.546	9.587.620.569
2.09.3.25.3.27.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.314.697.186	5.399.835.186	5.160.413.209
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5.314.697.186	5.399.835.186	5.160.413.209
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.649.697.266	4.734.835.266	4.495.413.289
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.000.000	70.000.000	70.000.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	40.000.000	40.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.629.542.016	3.629.542.016	3.390.120.039
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.570.192.016	3.570.192.016	3.314.090.039
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48.835.200	48.835.200	65.515.200
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.514.800	10.514.800	10.514.800
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	301.999.300	371.999.300	371.999.300
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.000	9.999.000	9.999.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000	35.000.000	35.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.000.300	22.000.300	22.000.300
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	25.000.000	25.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.000.000	260.000.000	260.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56.474.000	56.474.000	56.474.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	4.374.000	4.374.000	4.374.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.100.000	52.100.000	52.100.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	459.268.900	474.406.900	474.406.900
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.160.100	35.160.100	35.160.100
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	422.608.800	437.746.800	437.746.800
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.413.050	132.413.050	132.413.050

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	81.494.250	81.494.250	81.494.250
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.477.800	9.477.800	9.477.800
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41.441.000	41.441.000	41.441.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	439.999.920	439.999.920	439.999.920
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	70.000.000	70.000.000	70.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	40.000.000	40.000.000	40.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	64.999.920	64.999.920	64.999.920
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	39.998.420	39.998.420	39.998.420
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	03	2.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	25.001.500	25.001.500	25.001.500
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	305.000.000	305.000.000	305.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	225.000.000	225.000.000	225.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	80.000.000	80.000.000	80.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	200.000.000	200.000.000	200.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000	200.000.000	200.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	200.000.000	200.000.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	25.000.000	25.000.000	25.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	25.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	05	2.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	25.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4.212.881.560	4.443.887.360	4.427.207.360
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.926.744.650	2.226.744.650	2.217.064.650
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.926.744.650	2.226.744.650	2.217.064.650
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.926.744.650	2.226.744.650	2.217.064.650
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	500.000.000	500.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000	150.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	550.000.000	750.000.000	740.320.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	25	04	2.04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	726.744.650	826.744.650	826.744.650
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	2.286.136.910	2.217.142.710	2.210.142.710
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	848.494.820	688.500.720	683.030.720
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	409.994.820	110.000.720	110.000.720
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	27	02	2.05	01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	389.994.820	90.000.720	90.000.720
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	438.500.000	578.500.000	573.030.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	438.500.000	578.500.000	573.030.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	972.069.000	972.069.000	970.539.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	972.069.000	972.069.000	970.539.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	972.069.000	972.069.000	970.539.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	465.573.090	556.572.990	556.572.990
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	285.000.000	375.999.900	375.999.900
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	130.000.000	221.000.000	221.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	27	04	2.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	155.000.000	154.999.900	154.999.900
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	180.573.090	180.573.090	180.573.090
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	180.573.090	180.573.090	180.573.090
2.11.0.00.0.00.01.0000						DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8.958.205.508	9.498.204.308	9.281.497.827
2.11.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8.958.205.508	9.498.204.308	9.281.497.827
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	8.958.205.508	9.498.204.308	9.281.497.827
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.560.064.558	7.635.064.458	7.378.357.977
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.854.800	45.854.800	45.854.800
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.354.800	8.354.800	8.354.800
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.500.000	32.500.000	32.500.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.857.145.768	2.857.145.768	2.528.445.687
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.782.346.568	2.782.346.568	2.453.646.487
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	69.799.200	69.799.200	69.799.200

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.747.500	60.747.500	60.747.500
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60.747.500	60.747.500	60.747.500
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	301.278.100	362.628.200	362.628.200
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.990.800	4.990.800	4.990.800
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.796.600	64.800.900	64.800.900
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.869.900	38.095.700	38.095.700
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.999.800	24.999.800	24.999.800
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.621.000	229.741.000	229.741.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.329.600	12.329.600	12.329.600
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	7.500.000	7.500.000	7.500.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.829.600	4.829.600	4.829.600
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.063.411.400	3.057.411.300	3.067.408.100
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.359.700	20.359.600	20.359.600
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.035.051.700	3.035.051.700	3.045.048.500
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.219.297.390	1.238.947.290	1.300.944.090
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.787.530	78.787.530	78.787.530
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.095.675.860	1.115.325.760	1.177.322.560
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	24.999.700	24.999.700	24.999.700
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.964.400	9.964.400	9.964.400
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.869.900	9.869.900	9.869.900

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	170.000.000	334.998.900	334.998.900
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	170.000.000	334.998.900	334.998.900
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	170.000.000	334.998.900	334.998.900
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	204.297.650	204.297.650	204.297.650
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	76.919.000	76.919.000	76.919.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	33.838.800	33.838.800	33.838.800
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	21.639.200	21.639.200	21.639.200
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	21.441.000	21.441.000	21.441.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	52.430.000	52.430.000	52.430.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	32.500.000	32.500.000	32.500.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	19.930.000	19.930.000	19.930.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	74.948.650	74.948.650	74.948.650
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	32.499.700	32.499.700	32.499.700
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	42.448.950	42.448.950	42.448.950
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	41.761.400	41.761.400	41.761.400
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	41.761.400	41.761.400	41.761.400
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	41.761.400	41.761.400	41.761.400

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	90.000.000	90.000.000	90.000.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000	90.000.000	90.000.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	40.000.000	40.000.000	40.000.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	59.999.800	359.999.800	349.999.800
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	59.999.800	359.999.800	349.999.800
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	07	2.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	59.999.800	359.999.800	349.999.800
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	47.082.200	47.082.200	47.082.200
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47.082.200	47.082.200	47.082.200
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	08	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	47.082.200	47.082.200	47.082.200
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	40.000.000	40.000.000	40.000.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	40.000.000	40.000.000	40.000.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	40.000.000	40.000.000	40.000.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	744.999.900	744.999.900	794.999.900
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	744.999.900	744.999.900	794.999.900
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	44.999.900	44.999.900	44.999.900
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	700.000.000	700.000.000	750.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.301.563.030	4.371.552.030	4.217.789.320
2.12.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.301.563.030	4.371.552.030	4.217.789.320
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.301.563.030	4.371.552.030	4.217.789.320
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.660.229.730	3.721.436.730	3.567.674.020
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.425.000	21.425.000	21.425.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.178.700	3.178.700	3.178.700
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.686.300	2.686.300	2.686.300
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.560.000	15.560.000	15.560.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.447.858.730	2.447.858.730	2.294.126.020
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.395.688.530	2.395.688.530	2.241.955.820
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48.505.200	48.505.200	48.505.200
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.665.000	3.665.000	3.665.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	266.821.200	328.028.200	327.998.200
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.250.000	5.250.000	5.250.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.935.600	63.935.600	63.935.600
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	5.000.000	5.000.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.226.600	23.226.600	23.226.600
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.409.000	230.616.000	230.586.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	645.027.900	645.027.900	645.027.900
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	645.027.900	645.027.900	645.027.900
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.500.000	180.500.000	180.500.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	500.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.000.000	180.000.000	180.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.596.900	98.596.900	98.596.900
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.994.400	66.994.400	66.994.400
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.602.500	31.602.500	31.602.500
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	570.982.000	570.982.000	570.982.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	570.982.000	570.982.000	570.982.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	519.407.000	519.407.000	519.407.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	51.575.000	51.575.000	51.575.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	34.544.000	35.426.000	35.426.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	34.544.000	35.426.000	35.426.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	34.544.000	35.426.000	35.426.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	3.999.900	3.999.900	3.999.900
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	3.999.900	3.999.900	3.999.900
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	3.999.900	3.999.900	3.999.900
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	31.807.400	39.707.400	39.707.400
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	31.807.400	39.707.400	39.707.400

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	31.807.400	39.707.400	39.707.400
2.13.0.00.0.00.01.0000						DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.894.246.232	6.169.959.732	5.919.153.639
2.13.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.894.246.232	6.169.959.732	5.919.153.639
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.894.246.232	6.169.959.732	5.919.153.639
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.241.670.123	3.271.606.523	3.020.800.430
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.520.000	8.520.000	8.520.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.520.000	5.520.000	5.520.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.845.585.123	2.845.585.123	2.594.779.030
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.790.611.823	2.790.611.823	2.539.805.730
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.313.200	51.313.200	51.313.200
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.660.100	3.660.100	3.660.100
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	91.708.600	121.673.600	121.673.600
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000	8.000.000	8.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.500.000	4.500.000	4.500.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.172.600	8.172.600	8.172.600
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.536.000	98.501.000	98.501.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.387.200	241.887.200	241.887.200
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400.000	400.000	400.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.000.000	23.500.000	23.500.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	217.987.200	217.987.200	217.987.200

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.469.200	53.940.600	53.940.600
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.087.700	49.559.100	49.559.100
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.381.500	4.381.500	4.381.500
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	300.000.000	414.917.100	414.917.100
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	300.000.000	414.917.100	414.917.100
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	300.000.000	414.917.100	414.917.100
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.728.713.800	1.772.923.800	1.772.923.800
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.728.713.800	1.772.923.800	1.772.923.800
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	56.788.000	56.788.000	56.788.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	77.095.000	77.095.000	77.095.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	70.000.100	70.000.100	70.000.100
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1.512.000.000	1.556.210.000	1.556.210.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	7.337.600	7.337.600	7.337.600
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	588.100	588.100	588.100
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	4.905.000	4.905.000	4.905.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	623.862.309	710.512.309	710.512.309
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	623.862.309	710.512.309	710.512.309

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	166.527.509	166.527.509	166.527.509
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	327.337.600	327.337.600	327.337.600
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	29.997.200	116.647.200	116.647.200
2.14.2.08.0.00.01.0000						DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	14.044.704.965	14.244.702.965	13.712.318.604
2.14.2.08.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	14.044.704.965	14.244.702.965	13.712.318.604
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	390.000.000	395.000.000	395.000.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	200.000.000	250.000.000	250.000.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000	200.000.000	200.000.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	50.000.000	100.000.000	100.000.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	40.000.000	40.000.000	40.000.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000	40.000.000	40.000.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	150.000.000	105.000.000	105.000.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	75.000.000	75.000.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000	75.000.000	75.000.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	30.000.000	30.000.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	0	30.000.000	30.000.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13.654.704.965	13.849.702.965	13.317.318.604
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.064.327.465	5.144.321.365	4.611.938.704
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.703.000	11.403.000	11.403.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.703.000	11.403.000	11.403.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.469.666.815	4.469.666.815	3.937.284.154
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.404.296.215	4.404.296.215	3.871.913.554

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.395.600	61.395.600	61.395.600
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.975.000	3.975.000	3.975.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	171.116.400	221.256.400	221.256.400
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.545.000	3.545.000	3.545.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.316.100	17.316.100	17.316.100
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.950.300	8.950.300	8.950.300
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.500.000	7.500.000	7.500.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.993.000	5.993.000	5.993.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127.812.000	177.952.000	177.952.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61.000.000	61.000.000	61.000.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.000.000	61.000.000	61.000.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	211.655.400	211.793.400	211.793.400
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.999.400	26.999.400	26.999.400
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.656.000	181.794.000	181.794.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.185.850	169.201.750	169.201.750
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83.185.850	94.201.850	94.201.850
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000	60.000.000	60.000.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	14.999.900	14.999.900
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	880.679.100	880.676.600	880.675.400

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	808.679.100	808.676.600	808.675.400
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	808.679.100	808.676.600	808.675.400
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	72.000.000	72.000.000	72.000.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	72.000.000	72.000.000	72.000.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.819.160.900	4.859.167.500	4.859.167.500
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.230.962.900	1.230.962.900	1.230.962.900
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	64.200.000	64.200.000	64.200.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	194.983.800	194.983.800	194.983.800
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	721.789.300	721.789.300	721.789.300
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	199.989.800	199.989.800	199.989.800
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.818.667.000	1.818.667.000	1.818.667.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	705.467.000	705.467.000	705.467.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.113.200.000	1.113.200.000	1.113.200.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.385.052.000	1.385.052.000	1.385.052.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	22.500.000	22.500.000	22.500.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	429.300.000	429.300.000	429.300.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	44.690.000	44.690.000	44.690.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	851.010.000	851.010.000	851.010.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	37.552.000	37.552.000	37.552.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	384.479.000	424.485.600	424.485.600
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	50.000.000	90.006.600	90.006.600
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	334.479.000	334.479.000	334.479.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.890.537.500	2.965.537.500	2.965.537.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.890.537.500	2.965.537.500	2.965.537.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.136.600.000	2.136.600.000	2.136.600.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	18.939.500	93.939.500	93.939.500
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.01	14	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	734.998.000	734.998.000	734.997.500
2.15.0.00.0.00.01.0000						DINAS PERHUBUNGAN	5.383.675.231	5.610.166.131	5.321.025.583

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.383.675.231	5.610.166.131	5.321.025.583
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	5.383.675.231	5.610.166.131	5.321.025.583
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.526.392.193	4.556.318.193	4.267.177.645
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.497.000	27.497.000	27.497.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.499.000	7.499.000	7.499.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.999.000	4.999.000	4.999.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.999.000	14.999.000	14.999.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.799.570.571	3.799.570.571	3.510.430.023
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.743.815.371	3.743.815.371	3.454.674.823
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.755.200	50.755.200	50.755.200
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	120.445.200	150.371.200	150.371.200
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.995.200	6.995.200	6.995.200
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.706.100	23.706.100	23.706.100
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.996.200	4.996.200	4.996.200
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.097.200	14.097.200	14.097.200
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.458.500	10.458.500	10.458.500
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.192.000	90.118.000	90.118.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	93.000.000	93.000.000	93.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	93.000.000	93.000.000	93.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	384.019.600	384.019.600	384.019.600
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.714.000	48.714.000	48.714.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	334.305.600	334.305.600	334.305.600
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.859.822	101.859.822	101.859.822
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	97.097.822	97.097.822	97.097.822
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.762.000	4.762.000	4.762.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	845.443.238	1.042.008.138	1.042.008.138
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	176.056.300	176.056.300	176.056.300
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	176.056.300	176.056.300	176.056.300
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	18.820.600	73.500.100	73.500.100
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	18.820.600	73.500.100	73.500.100
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	95.070.238	95.070.238	95.070.238
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	59.083.200	59.083.200	59.083.200
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	35.987.038	35.987.038	35.987.038
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	534.496.100	697.381.500	697.381.500
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	479.890.600	667.381.500	667.381.500
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	54.605.500	30.000.000	30.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.000.000	0	0
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	21.000.000	0	0
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	11.839.800	11.839.800	11.839.800

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	11.839.800	11.839.800	11.839.800
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	2.13	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	11.839.800	11.839.800	11.839.800
2.16.2.20.2.21.01.0000						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.524.396.845	6.343.396.845	6.166.646.391
2.16.2.20.2.21.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.524.396.845	6.343.396.845	6.166.646.391
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.389.868.845	6.208.868.845	6.032.118.391
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.908.504.445	3.976.560.445	3.802.209.991
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.000.000	58.040.000	56.000.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000	3.680.000	3.000.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.000.000	3.680.000	3.000.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.000.000	3.680.000	3.000.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	4.000.000	4.000.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	40.000.000	40.000.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.503.566.953	2.496.766.953	2.324.096.499
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.446.884.553	2.446.884.553	2.270.134.099
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.682.400	45.882.400	49.962.400
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000	4.000.000	4.000.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	83.099.200	83.779.200	83.099.200
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	83.099.200	83.779.200	83.099.200
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	371.486.500	454.605.500	455.645.500
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.599.000	12.741.000	14.046.200
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.228.200	35.908.200	35.228.200

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.191.900	24.853.100	24.835.900
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.796.900	26.827.700	27.259.700
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	46.081.500	46.081.500	46.081.500
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	234.589.000	308.194.000	308.194.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	710.223.792	632.503.792	632.503.792
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	543.409.500	465.689.500	465.689.500
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163.814.292	163.814.292	163.814.292
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.128.000	250.865.000	250.865.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	94.358.800	94.358.800	94.358.800
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.498.200	69.182.200	69.182.200
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.271.000	87.324.000	87.324.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.198.786.400	1.751.912.900	1.749.512.900
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.198.786.400	1.751.912.900	1.749.512.900
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	90.000.000	341.766.500	340.726.500
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	600.000.000	900.680.000	900.000.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	70.000.000	70.000.000	70.000.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	438.786.400	439.466.400	438.786.400
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	282.578.000	480.395.500	480.395.500
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26.200.000	26.200.000	26.200.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26.200.000	26.200.000	26.200.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	256.378.000	454.195.500	454.195.500
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	54.400.000	54.400.000	54.400.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	161.978.000	359.795.500	359.795.500
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	40.000.000	40.000.000	40.000.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	128.543.000	128.543.000	128.543.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	128.543.000	128.543.000	128.543.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	128.543.000	128.543.000	128.543.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	73.179.600	73.179.600	73.179.600
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	55.363.400	55.363.400	55.363.400
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	5.985.000	5.985.000	5.985.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	5.985.000	5.985.000	5.985.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.985.000	5.985.000	5.985.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.985.000	5.985.000	5.985.000
2.17.3.30.3.31.03.0000						DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	13.720.703.103	13.872.746.003	13.631.529.749
2.17.3.30.3.31.03.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9.074.967.110	9.187.465.110	8.852.914.456

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	9.074.967.110	9.187.465.110	8.852.914.456
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.601.767.110	7.714.265.110	7.382.854.456
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.262.900	37.262.900	37.262.900
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.999.900	4.999.900	4.999.900
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.263.000	22.263.000	22.263.000
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.737.676.170	5.737.676.170	5.405.173.516
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.680.857.870	5.680.857.870	5.341.355.216
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.818.400	51.818.400	58.818.400
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.999.900	4.999.900	4.999.900
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.999.900	4.999.900	4.999.900
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.999.900	4.999.900	4.999.900
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	314.495.500	372.089.500	371.861.500
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.999.500	11.999.500	11.999.500
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.055.000	49.534.000	49.534.000
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	10.000.000	11.522.000
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.000.000	55.000.000	55.000.000
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.941.000	244.056.000	242.306.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.346.194.600	1.401.098.600	1.402.418.600
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.000.000	9.404.000	10.724.000
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.327.994.600	1.390.494.600	1.390.494.600
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.138.040	156.138.040	156.138.040
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.921.040	60.921.040	60.921.040
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.074.500	50.074.500	50.074.500
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.142.500	45.142.500	45.142.500
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	327.305.200	327.305.200	327.305.200
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	327.305.200	327.305.200	327.305.200
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	327.305.200	327.305.200	327.305.200
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	231.000.000	231.000.000	231.000.000
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	231.000.000	231.000.000	231.000.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	150.000.000	150.000.000	150.000.000
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	31.000.000	31.000.000	31.000.000
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	814.894.800	814.894.800	811.754.800
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	814.894.800	814.894.800	811.754.800
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	814.894.800	814.894.800	811.754.800
2.17.3.30.3.31.03.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4.645.735.993	4.685.280.893	4.778.615.293
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	850.345.993	885.345.893	983.225.293
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	352.359.200	387.359.100	386.521.200
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	352.359.200	387.359.100	386.521.200
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	186.175.300	186.175.300	186.175.300
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	166.183.900	201.183.800	200.345.900
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	173.773.800	173.773.800	173.773.800
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	78.774.000	78.774.000	78.774.000
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	78.774.000	78.774.000	78.774.000
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	49.999.900	49.999.900	49.999.900
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	49.999.900	49.999.900	49.999.900

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.999.900	44.999.900	44.999.900
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30	04	2.03	01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	14.999.900	14.999.900	14.999.900
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	324.212.993	324.212.993	422.930.293
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	324.212.993	324.212.993	422.930.293
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	324.212.993	324.212.993	422.930.293
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.795.390.000	3.799.935.000	3.795.390.000
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.795.390.000	3.799.935.000	3.795.390.000
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.795.390.000	3.799.935.000	3.795.390.000
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.795.390.000	3.799.935.000	3.795.390.000
2.18.0.00.0.00.01.0000						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.651.999.488	3.696.996.988	3.575.908.787
2.18.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.651.999.488	3.696.996.988	3.575.908.787
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	3.651.999.488	3.696.996.988	3.575.908.787
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.781.134.288	2.821.864.088	2.700.775.887
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.999.800	36.999.800	36.999.800
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.900	4.999.900	4.999.900
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.999.900	26.999.900	26.999.900
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.226.013.088	2.226.013.088	2.104.924.887
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.164.463.188	2.164.463.188	2.043.374.987

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53.050.000	53.050.000	53.050.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.499.900	3.499.900	3.499.900
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	264.976.800	321.772.300	321.772.300
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.993.900	4.943.900	4.943.900
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.260.200	63.260.200	63.260.200
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.726.300	23.726.300	23.726.300
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.999.400	24.154.900	24.154.900
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144.997.000	205.687.000	205.687.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.712.000	149.722.000	149.722.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.552.800	39.562.800	39.562.800
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109.159.200	109.159.200	109.159.200
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.432.600	87.356.900	87.356.900
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.000.500	74.996.100	74.996.100
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.959.900	9.188.600	9.188.600
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.472.200	3.172.200	3.172.200
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	71.293.000	71.293.000	71.293.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	56.201.000	56.201.000	56.201.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	56.201.000	56.201.000	56.201.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	15.092.000	15.092.000	15.092.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	15.092.000	15.092.000	15.092.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	84.892.900	81.402.900	81.402.900
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	84.892.900	81.402.900	81.402.900
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	26.384.900	26.384.900	26.384.900
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	58.508.000	55.018.000	55.018.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	95.596.000	99.796.000	99.796.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	95.596.000	99.796.000	99.796.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	80.000.000	84.200.000	84.200.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	11.636.500	11.636.500	11.636.500
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	3.959.500	3.959.500	3.959.500
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	541.612.800	548.632.800	548.632.800
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	541.612.800	548.632.800	548.632.800
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	32.829.000	39.849.000	39.849.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	456.386.800	456.386.800	456.386.800
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	52.397.000	52.397.000	52.397.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	77.470.500	74.008.200	74.008.200
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	77.470.500	74.008.200	74.008.200
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	77.470.500	74.008.200	74.008.200
2.19.0.00.0.00.01.0000						DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	6.052.961.927	6.202.961.427	5.951.393.856
2.19.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.052.961.927	6.202.961.427	5.951.393.856
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6.052.961.927	6.202.961.427	5.951.393.856
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.987.320.827	3.037.242.827	2.735.675.256
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.476.000	36.476.000	36.476.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.993.200	4.993.200	4.993.200
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.292.800	4.292.800	4.292.800
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.190.000	22.190.000	22.190.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.441.996.907	2.441.996.907	2.140.429.336
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.387.366.707	2.387.366.707	2.085.799.136
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.587.200	50.587.200	50.587.200
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.043.000	4.043.000	4.043.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	222.183.720	272.105.720	272.105.720
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.201.000	12.201.000	12.201.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.176.000	28.176.000	28.176.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.775.100	15.775.100	15.775.100
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.218.620	12.218.620	12.218.620
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.850.000	13.850.000	13.850.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	139.963.000	189.885.000	189.885.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	41.380.800	41.380.800	41.380.800
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.380.800	41.380.800	41.380.800
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.552.800	185.552.800	185.552.800
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	500.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.893.600	57.893.600	57.893.600
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.159.200	127.159.200	127.159.200
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.730.600	59.730.600	59.730.600
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.000.000	37.000.000	37.000.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.736.000	7.736.000	7.736.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.994.600	14.994.600	14.994.600
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	507.953.100	437.449.600	437.449.600
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	222.953.100	167.449.600	167.449.600
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	67.449.600	67.449.600	67.449.600
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	55.503.500	0	0

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	285.000.000	270.000.000	270.000.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	2.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	15.000.000	0	0
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	270.000.000	270.000.000	270.000.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.557.688.000	2.728.269.000	2.778.269.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	527.688.000	648.269.000	648.269.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	527.688.000	648.269.000	648.269.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	330.000.000	330.000.000	330.000.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah	80.000.000	80.000.000	80.000.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	2.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	250.000.000	250.000.000	250.000.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.700.000.000	1.750.000.000	1.800.000.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1.700.000.000	1.750.000.000	1.800.000.000
2.23.2.24.0.00.01.0000						DINAS PERPUSTAKAAN	3.168.044.057	3.246.743.807	3.148.641.061
2.23.2.24.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.168.044.057	3.246.743.807	3.148.641.061
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3.108.044.057	3.186.743.807	3.088.641.061
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.842.894.057	2.921.594.057	2.823.491.461
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.787.400	17.787.400	17.787.400
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.890.300	2.890.300	2.890.300

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.672.500	1.672.500	1.672.500
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.989.600	4.989.600	4.989.600
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.235.000	8.235.000	8.235.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.458.893.637	2.458.893.637	2.360.791.041
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.423.424.337	2.423.424.337	2.325.321.741
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.859.600	32.859.600	32.859.600
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.609.700	2.609.700	2.609.700
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	74.172.800	121.169.700	121.949.700
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.063.200	1.063.200	1.063.200
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.989.400	29.637.100	29.637.100
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.111.200	8.009.700	8.009.700
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.295.500	13.316.200	14.096.200
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.803.500	5.803.500	5.803.500
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.910.000	63.340.000	63.340.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.000.000	18.000.000	17.220.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.000.000	18.000.000	17.220.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.602.500	273.857.200	273.857.200
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150.000	150.000	150.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.596.500	23.320.000	23.320.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	206.856.000	250.387.200	250.387.200
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.437.720	31.886.120	31.886.120
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.056.720	29.505.120	29.505.120
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.381.000	2.381.000	2.381.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	265.150.000	265.149.750	265.149.600
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	197.259.000	265.149.750	265.149.600
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	1.500.000	66.500.000	68.190.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	185.469.000	188.389.450	186.699.300
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	10.290.000	10.260.300	10.260.300
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	67.891.000	0	0
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.02	01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	67.891.000	0	0
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	60.000.000	60.000.000	60.000.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	60.000.000	60.000.000	60.000.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	60.000.000	60.000.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	48.000.000	48.000.000	48.000.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	12.000.000	12.000.000	12.000.000
3.26.0.00.0.00.01.0000						DINAS PARIWISATA	23.816.846.947	24.184.979.037	24.075.283.054
3.26.0.00.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	23.816.846.947	24.184.979.037	24.075.283.054
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	23.816.846.947	24.184.979.037	24.075.283.054
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.702.081.660	5.080.814.050	4.971.118.067
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.027.626	50.027.626	50.027.626
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.184.303	6.184.303	6.184.303
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.456.100	4.456.100	4.456.100
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.140.700	4.140.700	4.140.700
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.296.523	4.296.523	4.296.523
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.500.000	3.500.000	3.500.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.450.000	22.450.000	22.450.000
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.570.613.827	3.570.613.827	3.386.058.601
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.500.613.827	3.500.613.827	3.316.058.601
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	65.000.000	65.000.000	65.000.000
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	280.200.614	354.469.528	356.809.368
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.928.700	39.929.800	39.929.800
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.572.200	20.127.500	20.127.500
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.156.714	32.779.228	35.119.068
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	211.543.000	261.633.000	261.633.000
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	179.780.000	218.119.840	215.780.000
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	179.780.000	218.119.840	215.780.000
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	412.798.147	563.810.241	563.810.241
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000	900.000	900.000
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.899.997	74.499.997	74.499.997
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	364.998.150	488.410.244	488.410.244
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.661.446	323.772.988	398.632.231
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.824.600	28.824.600	28.824.600
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.783.400	12.769.900	12.769.900
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	163.054.946	192.993.946	267.853.189
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.998.500	89.184.542	89.184.542

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	17.907.652.156	17.907.652.156	17.907.652.156
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	16.680.883.680	16.680.883.680	16.680.883.680
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	16.630.883.980	16.630.883.980	16.630.883.980
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.02	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	49.999.700	49.999.700	49.999.700
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.226.768.476	1.226.768.476	1.226.768.476
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	290.979.984	290.979.984	290.979.984
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	935.788.492	935.788.492	935.788.492
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	655.637.875	665.037.575	665.037.575
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	655.637.875	665.037.575	665.037.575
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	454.783.800	464.183.500	464.183.500
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	128.283.900	128.283.900	128.283.900
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	72.570.175	72.570.175	72.570.175
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	109.999.900	89.999.900	89.999.900
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	109.999.900	89.999.900	89.999.900
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	2.02	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	50.000.000	0	0
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	2.02	09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	40.000.000	40.000.000	40.000.000
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	2.02	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	19.999.900	49.999.900	49.999.900
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	441.475.356	441.475.356	441.475.356

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	441.475.356	441.475.356	441.475.356
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	441.475.356	441.475.356	441.475.356
3.27.0.00.0.00.01.0000						DINAS PERTANIAN	40.704.884.631	41.557.884.430	39.712.682.820
3.27.0.00.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	40.704.884.631	41.557.884.430	39.712.682.820
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	40.704.884.631	41.557.884.430	39.712.682.820
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.338.860.631	18.605.830.031	16.270.359.921
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.525.600	44.525.600	44.735.100
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.999.800	5.999.800	5.999.800
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.525.800	38.525.800	38.735.300
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.688.147.591	15.865.167.591	13.632.612.881
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.609.738.491	15.609.738.491	13.414.573.781
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72.409.200	249.429.200	212.039.200
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.999.900	5.999.900	5.999.900
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	337.825.000	391.932.900	399.872.900
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.772.400	5.772.400	5.772.400
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.475.500	63.475.500	63.475.500
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.999.900	4.999.900	4.999.900
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.581.000	35.733.900	35.733.900
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29.996.800	29.996.800	29.996.800
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.999.400	1.999.400	1.999.400

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	249.955.000	257.895.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.857.700	57.857.700	57.857.700
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.857.700	57.857.700	57.857.700
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.003.016.300	1.998.867.300	1.883.316.900
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.705.700	35.556.700	35.556.700
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.958.310.600	1.958.310.600	1.842.760.200
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	197.488.440	237.478.940	241.964.440
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103.725.440	143.715.940	148.201.440
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.763.000	13.763.000	13.763.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.000.000	80.000.000	80.000.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	6.642.504.530	7.010.954.530	7.010.954.430
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	5.201.776.610	5.581.116.610	5.581.116.510
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4.996.776.560	5.376.116.560	5.376.116.560
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	205.000.050	205.000.050	204.999.950
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.440.727.920	1.429.837.920	1.429.837.920
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	229.376.000	228.166.000	228.166.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1.211.351.920	1.201.671.920	1.201.671.920
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	11.467.729.600	11.665.919.600	12.156.188.200
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	259.229.600	258.019.600	278.288.200
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	219.229.600	219.229.600	239.498.200

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	40.000.000	38.790.000	38.790.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	11.208.500.000	11.407.900.000	11.877.900.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2.480.000.000	2.672.030.000	2.672.030.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	8.628.500.000	8.635.870.000	9.105.870.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	396.690.200	396.690.200	396.690.200
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	396.690.200	396.690.200	396.690.200
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	396.690.200	396.690.200	396.690.200
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	59.999.900	59.999.900	59.999.900
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	59.999.900	59.999.900	59.999.900
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	59.999.900	59.999.900	59.999.900
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.799.099.770	3.818.490.169	3.818.490.169
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.799.099.770	3.818.490.169	3.818.490.169
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	998.099.830	998.440.229	998.440.229
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	745.999.940	789.249.940	789.249.940
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2.055.000.000	2.030.800.000	2.030.800.000
4.01.0.00.0.00.01.0000						SEKRETARIAT DAERAH	34.705.571.748	40.473.173.896	41.354.380.238
4.01.0.00.0.00.01.0000	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	34.705.571.748	40.473.173.896	41.354.380.238
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	34.705.571.748	40.473.173.896	41.354.380.238
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.808.978.448	29.284.619.496	30.464.633.738

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.156.700	97.156.700	97.156.700
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.428.400	8.428.400	8.428.400
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.999.800	4.999.800	4.999.800
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.999.800	4.999.800	4.999.800
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.999.800	4.999.800	4.999.800
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.728.900	68.728.900	68.728.900
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.375.858.945	11.641.849.893	11.269.864.135
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.188.201.045	11.454.191.993	11.067.206.335
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	176.604.000	176.604.000	176.604.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.053.900	6.053.900	6.053.900
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000	5.000.000	19.999.900
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.394.000	37.394.000	37.394.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.394.000	37.394.000	37.394.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.012.177.676	5.024.926.176	5.784.373.726
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80.111.400	80.111.400	80.111.400
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	420.721.000	567.898.900	617.898.150
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	80.334.400	80.334.400	80.334.400
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.263.111.876	2.397.286.476	3.077.296.976
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.167.899.000	1.899.295.000	1.928.732.800
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	782.364.500	712.364.500	712.364.500
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	200.000.000	200.000.000	200.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	582.364.500	512.364.500	512.364.500
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.221.524.564	3.324.067.964	3.573.807.964

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	52.500.000	52.500.000	52.500.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	727.117.189	811.814.189	821.814.189
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	430.412.375	448.258.775	653.098.775
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.011.495.000	2.011.495.000	2.046.395.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.527.622.350	1.483.961.850	1.538.262.100
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	701.315.700	727.655.200	942.471.200
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	218.930.200	218.930.200	188.413.700
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	607.376.450	537.376.450	407.377.200
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	777.509.113	777.509.113	777.509.113
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	777.509.113	777.509.113	777.509.113
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	5.419.680.000	5.587.698.700	5.926.210.900
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	3.241.980.000	3.284.878.200	3.399.390.400
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2.177.700.000	2.302.820.500	2.526.820.500
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	293.048.300	293.048.300	393.048.300
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	100.342.600	98.922.600	158.005.600
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	96.658.500	106.658.500	147.575.500
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	96.047.200	87.467.200	87.467.200
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	304.642.300	304.642.300	354.642.300
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	178.353.600	178.353.600	228.353.600
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	76.478.500	76.478.500	76.478.500
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	49.810.200	49.810.200	49.810.200
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.546.025.000	9.486.726.500	9.172.918.500
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	191.611.100	1.041.928.700	678.120.700

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	65.259.300	117.705.300	129.719.500
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	53.290.000	53.290.000	53.290.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	73.061.800	870.933.400	495.111.200
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.315.112.400	6.974.187.300	7.024.187.300
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	778.646.800	886.470.200	936.470.200
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	3.455.000.000	5.905.000.000	5.905.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	81.465.600	182.717.100	182.717.100
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.039.301.500	1.439.130.300	1.439.130.300
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	357.170.800	507.166.800	539.566.800
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	609.398.300	859.231.100	826.831.100
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	72.732.400	72.732.400	72.732.400
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	0	31.480.200	31.480.200
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	0	31.480.200	31.480.200
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.350.568.300	1.701.827.900	1.716.828.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	317.897.700	397.897.600	412.897.700
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	35.966.700	85.966.600	85.966.600
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	281.931.000	311.931.000	326.931.100
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	394.923.900	494.923.900	494.923.900
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	128.467.400	150.227.100	150.227.100
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	171.410.600	216.410.600	216.410.600
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	95.045.900	128.286.200	128.286.200
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	637.746.700	809.006.400	809.006.400
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	435.690.700	582.396.600	582.396.600
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	178.690.000	198.533.800	198.533.800
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	23.366.000	28.076.000	28.076.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000						SEKRETARIAT DPRD	35.530.011.916	37.530.011.816	37.549.611.816
4.02.0.00.0.00.01.0000	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	35.530.011.916	37.530.011.816	37.549.611.816
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02				SEKRETARIAT DPRD	35.530.011.916	37.530.011.816	37.549.611.816
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.412.399.216	24.199.899.116	24.219.499.116
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	190.024.900	215.252.400	235.252.400
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.999.900	4.999.900	4.999.900
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	175.025.000	200.252.500	220.252.500
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.609.415.315	2.609.415.315	2.630.445.315
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.536.730.415	2.536.730.415	2.556.330.415
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	67.684.900	67.684.900	69.114.900
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	119.792.700	136.838.700	136.838.700
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	119.792.700	136.838.700	136.838.700
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	928.743.900	903.853.900	903.853.900
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.331.600	12.331.600	12.331.600
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.687.100	85.687.100	85.687.100
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.027.200	50.027.200	50.027.200
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	79.758.000	79.758.000	79.758.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.940.000	76.050.000	76.050.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000	600.000.000	600.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.173.500	95.000.000	95.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	37.173.500	95.000.000	95.000.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	584.883.200	584.884.200	584.884.200
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000	6.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000	50.001.000	50.001.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	528.883.200	528.883.200	528.883.200
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	326.003.656	326.003.656	326.003.656
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	274.571.156	274.571.156	274.571.156
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.132.500	39.132.500	39.132.500
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.300.000	12.300.000	12.300.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	14.173.294.845	14.228.494.845	14.227.064.845
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	13.441.099.845	13.441.099.845	13.441.099.845
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	327.360.000	327.360.000	325.930.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	404.835.000	460.035.000	460.035.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	4.443.067.200	5.100.156.100	5.080.156.100
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	6.654.200	6.654.200	6.654.200
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	2.636.200.000	3.266.975.000	3.246.975.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.800.213.000	1.826.526.900	1.826.526.900
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	12.117.612.700	13.330.112.700	13.330.112.700
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	457.624.000	457.624.000	457.624.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	457.624.000	457.624.000	457.624.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	470.000.000	470.000.000	470.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	20.000.000	20.000.000	20.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	450.000.000	450.000.000	450.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	127.860.800	127.860.800	127.860.800
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	127.860.800	127.860.800	127.860.800

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	1.354.440.600	1.291.940.600	1.291.940.600
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	999.660.000	937.160.000	937.160.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	126.987.000	126.987.000	126.987.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	227.793.600	227.793.600	227.793.600
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.790.515.200	3.765.515.200	3.765.515.200
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	120.000.000	95.000.000	95.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	3.670.515.200	3.670.515.200	3.670.515.200
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	120.271.400	120.271.400	120.271.400
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	120.271.400	120.271.400	120.271.400
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	5.796.900.700	7.096.900.700	7.096.900.700
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5.200.000.000	6.500.000.000	6.500.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	450.000.000	450.000.000	450.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	146.900.700	146.900.700	146.900.700
5.01.5.05.0.00.01.0000						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	6.283.091.118	6.433.091.118	6.347.221.960
5.01.5.05.0.00.01.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	6.283.091.118	6.433.091.118	6.347.221.960
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01				PERENCANAAN	5.807.091.118	5.965.091.118	5.879.221.960
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.296.785.718	4.366.785.718	4.280.916.560
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.054.700	17.840.700	17.840.700
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.040.000	3.040.000	3.040.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.004.700	2.004.700	2.004.700
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.010.000	12.796.000	12.796.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.680.038.118	3.680.038.118	3.594.168.960
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.626.058.718	3.626.058.718	3.540.189.560
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.979.200	51.979.200	51.979.200
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.200	2.000.200	2.000.200

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	352.781.800	408.525.800	393.525.800
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.011.300	5.011.300	5.011.300
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.973.100	22.973.100	22.973.100
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.898.200	2.898.200	2.898.200
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.917.700	20.201.700	20.201.700
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	47.503.500	47.503.500	47.503.500
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	234.478.000	309.938.000	294.938.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67.225.100	67.225.100	67.225.100
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.225.100	67.225.100	67.225.100
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.350.500	128.320.500	128.320.500
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.088.000	2.638.000	2.638.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.184.800	53.604.800	53.604.800
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.077.700	72.077.700	72.077.700
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.335.500	64.835.500	79.835.500
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.290.100	52.290.100	52.290.100
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.045.400	6.045.400	21.045.400
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	6.500.000	6.500.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	999.319.700	1.027.319.700	1.027.319.700
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	706.319.700	726.319.700	726.319.700
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	30.320.000	30.320.000	30.320.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	42.513.000	42.513.000	42.513.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	235.986.700	235.986.700	235.986.700

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	397.500.000	417.500.000	417.500.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	257.000.000	265.000.000	265.000.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	125.000.000	125.000.000	125.000.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	132.000.000	140.000.000	140.000.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	36.000.000	36.000.000	36.000.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.04	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	36.000.000	36.000.000	36.000.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	510.985.700	570.985.700	570.985.700
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	243.999.600	263.999.600	263.999.600
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	30.647.400	30.647.400	30.647.400
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	13.058.400	13.058.400	13.058.400
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	12.699.000	16.316.000	16.316.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	87.512.000	100.751.000	100.751.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	75.812.100	75.812.100	75.812.100
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	24.270.700	27.414.700	27.414.700

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	156.986.100	176.986.100	176.986.100
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	96.601.100	108.526.100	108.526.100
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	30.385.000	38.460.000	38.460.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	30.000.000	30.000.000	30.000.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	110.000.000	130.000.000	130.000.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	31.000.000	31.000.000	31.000.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	31.000.000	31.000.000	31.000.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	9.000.000	9.000.000	9.000.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15.000.000	15.000.000	15.000.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	15.000.000	35.000.000	35.000.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	9.000.000	9.000.000	9.000.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	476.000.000	468.000.000	468.000.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	476.000.000	468.000.000	468.000.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	160.000.000	160.000.000	160.000.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	160.000.000	160.000.000	160.000.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	140.000.000	140.000.000	140.000.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	140.000.000	140.000.000	140.000.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	70.000.000	58.000.000	58.000.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	70.000.000	58.000.000	58.000.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	106.000.000	110.000.000	110.000.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	106.000.000	110.000.000	110.000.000
5.02.0.00.0.00.02.0000						BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	278.662.649.011	284.458.334.833	285.426.224.555
5.02.0.00.0.00.02.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	278.662.649.011	284.458.334.833	285.426.224.555
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02				KEUANGAN	278.662.649.011	284.458.334.833	285.426.224.555
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.409.340.011	5.853.387.783	5.624.995.680
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	275.136.700	375.136.500	357.183.100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	270.136.700	370.136.500	352.183.100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.807.990.509	3.807.990.509	3.529.170.218
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.323.409.709	3.323.409.709	3.044.589.418
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	425.497.200	425.497.200	425.497.200
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	54.083.600	54.083.600	54.083.600
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	403.753.900	538.827.600	565.312.700
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.997.200	26.996.400	31.911.700
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000	80.000.000	80.000.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.996.000	34.994.500	42.864.300

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53.206.900	63.502.900	68.502.900
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	33.586.800	33.586.800	33.586.800
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.967.000	299.747.000	308.447.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	194.695.850	321.034.010	309.112.910
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	194.695.850	321.034.010	309.112.910
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	411.647.960	424.251.872	424.251.872
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	5.000.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.623.600	44.126.700	44.126.700
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	363.024.360	375.125.172	375.125.172
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	316.115.092	386.147.292	439.964.880
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.134.012	136.131.412	160.077.300
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	187.981.196	190.021.196	181.151.196
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.999.884	59.994.684	98.736.384
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	272.468.256.200	277.907.724.850	279.021.268.575
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.624.134.500	1.793.312.900	1.790.571.900
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	218.408.000	218.408.000	220.806.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	165.185.800	165.185.800	159.400.300
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	59.382.400	59.382.400	59.382.400
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	56.798.700	56.528.400	54.528.400
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	333.703.000	414.597.000	419.794.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	419.228.700	477.812.200	475.261.700
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	155.902.800	155.902.800	155.902.800
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	50.008.000	79.979.200	79.979.200
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	165.517.100	165.517.100	165.517.100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	393.991.500	543.941.350	544.037.350
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	75.727.600	75.707.600	75.803.600
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	25.000.000	25.000.000	25.000.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	78.750.000	128.750.550	128.750.550
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	29.965.800	29.935.100	29.935.100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	59.548.000	109.548.000	109.548.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	125.000.100	175.000.100	175.000.100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	432.908.100	432.908.100	549.096.825
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	54.408.600	54.408.600	54.408.600
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	57.499.800	57.499.800	57.499.800
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	149.999.900	149.999.900	266.188.625

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	170.999.800	170.999.800	170.999.800
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	269.917.222.100	274.993.331.000	275.993.331.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	3.150.478.000	3.150.478.000	3.150.478.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	259.726.239.000	259.726.239.000	259.726.239.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	7.040.505.100	12.116.614.000	13.116.614.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100.000.000	144.231.500	144.231.500
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	100.000.000	144.231.500	144.231.500
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	785.052.800	697.222.200	779.960.300
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	785.052.800	697.222.200	779.960.300
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	173.074.400	113.754.400	113.754.400
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	276.459.400	255.319.300	263.617.400
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	72.646.400	72.646.400	72.366.400
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	98.685.100	98.685.100	136.605.100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	113.151.600	105.781.100	105.781.100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	51.035.900	51.035.900	87.835.900
5.02.0.00.0.00.03.0000						BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.768.068.964	5.917.920.764	6.077.013.067
5.02.0.00.0.00.03.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.768.068.964	5.917.920.764	6.077.013.067
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02				KEUANGAN	5.768.068.964	5.917.920.764	6.077.013.067
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.793.160.664	4.896.786.564	5.055.878.967
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.930.000	40.565.300	40.565.300

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.430.000	38.065.300	38.065.300
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.082.635.164	4.082.635.164	4.241.767.567
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.945.823.964	3.945.823.964	4.104.956.367
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	136.811.200	136.811.200	136.811.200
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	22.524.900	16.134.900	16.134.900
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	22.524.900	16.134.900	16.134.900
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	163.355.900	221.696.900	221.656.900
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.313.100	21.313.100	21.313.100
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.193.700	53.193.700	53.193.700
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.000.000	11.000.000	11.000.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.237.100	18.237.100	18.237.100
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.612.000	117.953.000	117.913.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.548.400	94.532.400	94.532.400
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.819.500	69.803.500	69.803.500
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.728.900	24.728.900	24.728.900
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	359.500.000	359.500.000	359.500.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000	5.500.000	5.500.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	18.000.000	18.000.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	336.000.000	336.000.000	336.000.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.666.300	81.721.900	81.721.900
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.495.100	38.550.700	38.550.700
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.171.200	43.171.200	43.171.200
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	974.908.300	1.021.134.200	1.021.134.100

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	974.908.300	1.021.134.200	1.021.134.100
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	36.500.000	61.460.000	61.460.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	98.380.000	115.045.600	115.045.600
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	28.775.000	28.775.000	28.775.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	83.920.600	77.160.600	77.160.600
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	100.000.000	99.999.800	99.999.800
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	19.599.800	19.599.800	19.599.800
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	70.000.000	69.990.000	69.990.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	210.000.000	199.999.900	199.999.900
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	43.071.200	47.071.200	47.071.200
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	47.648.000	46.046.400	46.046.400
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	102.590.100	104.975.100	104.975.100
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	73.807.800	74.182.800	74.182.800
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	60.615.800	76.828.000	76.827.900
5.03.5.04.0.00.01.0000						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.767.487.471	5.824.487.470	5.088.698.238
5.03.5.04.0.00.01.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.767.487.471	5.824.487.470	5.088.698.238
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03				KEPEGAWAIAN	5.067.487.471	5.188.685.470	4.476.796.238
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.938.165.971	3.420.502.170	2.780.607.938
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.590.800	18.590.800	18.590.800
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.145.400	5.145.400	5.145.400
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.445.400	8.445.400	8.445.400

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.519.038.471	2.519.038.471	2.300.444.239
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.469.283.271	2.469.283.271	2.250.689.039
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.755.200	44.755.200	44.755.200
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.499.900	3.499.900	3.499.900
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.499.900	3.499.900	3.499.900
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.405.900	254.442.100	254.442.100
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.541.500	7.541.500	7.541.500
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.001.500	40.001.500	40.001.500
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.999.000	9.999.000	9.999.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.000.000	26.036.200	26.036.200
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.997.400	15.997.400	15.997.400
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.997.500	4.997.500	4.997.500
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.869.000	149.869.000	149.869.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	421.300.000	0
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	421.300.000	0
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.039.600	85.039.599	85.039.599
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	500.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.042.800	30.042.799	30.042.799
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	54.496.800
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.591.300	118.591.300	118.591.300
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	63.417.600	63.417.600	63.417.600
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	2.550.000	2.550.000	2.550.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.043.300	12.043.300	12.043.300
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.580.400	40.580.400	40.580.400
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.129.321.500	1.768.183.300	1.696.188.300
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	303.029.100	303.029.100	444.608.900
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	14.999.700	14.999.700	14.999.700
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	149.999.900	149.999.900	351.579.700
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	34.999.800	34.999.800	34.999.800
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	60.000.000	60.000.000	0
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	20.089.900	20.089.900	20.089.900
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	22.939.800	22.939.800	22.939.800
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	72.224.900	72.224.900	72.224.900
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	25.000.000	25.000.000	25.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	47.224.900	47.224.900	47.224.900
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	1.595.577.700	1.234.439.500	1.020.864.700
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	867.953.700	860.043.700	646.468.900
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	340.000.000	200.000.000	200.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	387.624.000	174.395.800	174.395.800
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	158.489.800	158.489.800	158.489.800
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	99.999.900	99.999.900	99.999.900
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	18.240.100	18.240.100	18.240.100
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	40.249.800	40.249.800	40.249.800
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	700.000.000	635.802.000	611.902.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	700.000.000	635.802.000	611.902.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	700.000.000	635.802.000	611.902.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	700.000.000	635.802.000	611.902.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000						INSPEKTORAT	11.355.818.942	11.355.818.942	11.363.406.919
6.01.0.00.0.00.01.0000	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	11.355.818.942	11.355.818.942	11.363.406.919
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01				INSPEKTORAT DAERAH	11.355.818.942	11.355.818.942	11.363.406.919
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.860.488.942	9.084.688.942	9.092.276.919
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.487.436.482	5.487.436.482	5.495.024.459
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.438.952.882	5.438.952.882	5.446.540.859
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48.483.600	48.483.600	48.483.600
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	400.000.000	460.000.000	460.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	400.000.000	460.000.000	460.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	771.767.700	1.019.851.700	1.018.691.700
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.005.000	10.005.000	10.005.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.310.100	125.800.000	125.800.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.500.000	12.500.000	12.500.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	56.844.600	58.452.700	58.452.700
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.108.000	17.108.000	17.108.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000	795.986.000	794.826.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.357.520.000	1.372.730.000	1.373.210.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.357.520.000	1.372.730.000	1.373.210.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.996.800	133.696.800	133.696.800
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000	6.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.500.000	73.200.000	73.200.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	54.496.800
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	709.767.960	610.973.960	611.653.960

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	138.807.620	138.807.620	138.807.620
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	356.874.340	246.690.340	246.690.340
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	198.000.000	211.190.000	211.870.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.086.000	14.286.000	14.286.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.062.530.000	1.891.130.000	1.891.130.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.162.530.000	471.130.000	471.130.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	150.000.000	85.280.000	85.280.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	150.000.000	5.220.000	5.220.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	500.000.000	142.200.000	142.200.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	362.530.000	238.430.000	238.430.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	900.000.000	1.420.000.000	1.420.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	900.000.000	1.420.000.000	1.420.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	432.800.000	380.000.000	380.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	32.800.000	0	0
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	16.400.000	0	0
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	16.400.000	0	0
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	400.000.000	380.000.000	380.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	50.000.000	50.000.000	50.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	50.000.000	50.000.000	50.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	300.000.000	280.000.000	280.000.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.01.0000						KANTOR KECAMATAN TARUTUNG	7.218.811.426	7.218.803.626	7.380.353.759
7.01.0.00.0.00.01.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	7.218.811.426	7.218.803.626	7.380.353.759
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01				KECAMATAN	7.218.811.426	7.218.803.626	7.380.353.759
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.758.632.645	5.765.932.545	5.928.171.643
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.114.400	26.414.400	26.414.400
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.374.400	2.374.400	2.374.400
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.740.000	24.040.000	24.040.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.358.190.325	5.358.190.325	5.520.429.423
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.314.230.125	5.314.230.125	5.476.469.223
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.775.600	41.775.600	41.775.600
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.184.600	2.184.600	2.184.600
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	121.059.200	126.059.100	126.059.100
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.605.000	8.605.000	8.605.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.389.500	39.389.500	39.389.500
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.724.600	6.724.600	6.724.600
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.450.100	26.705.000	27.125.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.890.000	44.635.000	44.215.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	93.850.000	88.850.000	88.850.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	63.350.000	63.350.000	63.350.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.500.000	25.500.000	25.500.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.434.700	109.434.700	109.434.700
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	860.000	860.000	860.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.912.300	35.912.300	35.912.300
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.662.400	72.662.400	72.662.400
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.984.020	56.984.020	56.984.020

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.987.720	36.987.720	36.987.720
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.996.300	19.996.300	19.996.300
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.000.000	10.000.000	10.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.000.000	10.000.000	10.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.000.000	10.000.000	10.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.418.579.381	1.411.271.681	1.410.582.716
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.701.900	15.401.900	15.401.900
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22.701.900	15.401.900	15.401.900
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.395.877.481	1.395.869.781	1.395.180.816
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	34.998.300	33.938.300	33.938.300
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	655.944.581	652.275.681	649.186.716
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	704.934.600	709.655.800	712.055.800
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	26.599.800	26.599.800	26.599.800
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	26.599.800	26.599.800	26.599.800
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4.999.800	4.999.800	4.999.800
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	21.600.000	21.600.000	21.600.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.999.600	4.999.600	4.999.600
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.999.600	4.999.600	4.999.600
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.999.600	4.999.600	4.999.600

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.02.0000						KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA	2.011.987.881	2.011.987.881	1.921.843.027
7.01.0.00.0.00.02.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.011.987.881	2.011.987.881	1.921.843.027
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01				KECAMATAN	2.011.987.881	2.011.987.881	1.921.843.027
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.900.524.881	1.906.194.881	1.833.290.027
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.045.800	30.045.800	30.045.800
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.647.500	2.647.500	2.647.500
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.738.300	2.738.300	2.738.300
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.160.000	2.160.000	2.160.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.500.000	22.500.000	22.500.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.653.633.981	1.653.633.981	1.566.260.427
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.615.146.381	1.615.146.381	1.525.001.627
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.087.600	36.087.600	38.858.800
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.400.000	2.400.000	2.400.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.397.700	73.067.700	85.705.200
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.423.700	30.423.700	30.423.700
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.134.000	4.134.000	4.134.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.190.000	8.205.000	7.957.500
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.450.000	29.105.000	41.990.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.030.000	28.030.000	28.030.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.030.000	28.030.000	28.030.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.390.400	75.390.400	74.590.400
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.893.600	19.893.600	19.093.600
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	54.496.800

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.027.000	46.027.000	48.658.200
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.063.800	38.063.800	40.695.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.201.200	1.201.200	1.201.200
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.762.000	6.762.000	6.762.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.305.700	26.210.700	8.970.700
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.305.700	26.210.700	8.970.700
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.725.700	4.880.700	4.880.700
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	22.580.000	21.330.000	4.090.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	23.836.700	24.166.700	24.166.700
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	23.836.700	24.166.700	24.166.700
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23.836.700	24.166.700	24.166.700
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.564.700	5.464.700	5.464.700
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.564.700	5.464.700	5.464.700
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04	7.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9.564.700	5.464.700	5.464.700
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000	25.000.000	25.000.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000	25.000.000	25.000.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	25.000.000	25.000.000	25.000.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	22.755.900	24.950.900	24.950.900

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.755.900	24.950.900	24.950.900
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.091.800	3.091.800	3.091.800
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4.855.000	6.210.000	6.210.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.050.000	2.650.000	2.650.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	9.759.100	12.999.100	12.999.100
7.01.0.00.0.00.03.0000						KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING	1.608.750.553	1.608.750.553	1.456.373.473
7.01.0.00.0.00.03.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	1.608.750.553	1.608.750.553	1.456.373.473
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01				KECAMATAN	1.608.750.553	1.608.750.553	1.456.373.473
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.504.887.953	1.504.887.953	1.352.510.873
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.570.000	71.570.000	71.570.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.820.000	22.820.000	22.820.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.250.000	46.250.000	46.250.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.268.276.963	1.268.276.963	1.115.899.883
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.237.314.663	1.237.314.663	1.084.937.583
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.500.400	27.500.400	27.500.400
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.461.900	3.461.900	3.461.900
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.667.000	49.667.000	49.667.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.600	4.999.600	4.999.600
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.301.800	18.301.800	18.301.800
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.356.200	19.356.200	19.356.200
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.009.400	7.009.400	7.009.400

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.882.000	9.882.000	9.882.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	9.882.000	9.882.000	9.882.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.495.900	78.495.900	78.495.900
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000	700.000	700.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.299.100	23.299.100	23.299.100
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	54.496.800
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.996.090	26.996.090	26.996.090
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.996.090	26.996.090	26.996.090
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	33.512.700	33.512.700	33.512.700
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	33.512.700	33.512.700	33.512.700
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	33.512.700	33.512.700	33.512.700
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	19.999.900	19.999.900	19.999.900
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	19.999.900	19.999.900	19.999.900
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.999.900	19.999.900	19.999.900
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.000.000	20.000.000	20.000.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.000.000	20.000.000	20.000.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.000.000	20.000.000	20.000.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.600.000	21.600.000	21.600.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.600.000	21.600.000	21.600.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	21.600.000	21.600.000	21.600.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.750.000	8.750.000	8.750.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.750.000	8.750.000	8.750.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.750.000	8.750.000	8.750.000
7.01.0.00.0.00.04.0000						KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON	2.585.465.046	2.585.465.046	2.386.615.901
7.01.0.00.0.00.04.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.585.465.046	2.585.465.046	2.386.615.901
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01				KECAMATAN	2.585.465.046	2.585.465.046	2.386.615.901
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.325.465.226	2.325.465.226	2.126.616.081
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.745.000	6.745.000	6.745.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.097.400	3.097.400	3.097.400
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.674.700	1.674.700	1.674.700
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.972.900	1.972.900	1.972.900
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.044.107.106	2.044.107.106	1.845.257.961
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.000.145.906	2.000.145.906	1.801.296.761
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.201.200	41.201.200	41.201.200
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.176.000	1.176.000	1.176.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.584.000	1.584.000	1.584.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.270.800	2.270.800	2.270.800
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.270.800	2.270.800	2.270.800
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	123.055.600	123.055.600	123.055.600
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.817.300	4.817.300	4.817.300
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.633.600	17.633.600	17.633.600
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.325.700	8.325.700	8.325.700
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	30.000.000	30.000.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.171.000	6.171.000	6.171.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.498.000	3.498.000	3.498.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.610.000	52.610.000	52.610.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.792.600	12.792.600	12.792.600
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.792.600	12.792.600	12.792.600
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.193.400	82.193.400	82.193.400
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.696.600	26.696.600	26.696.600
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	54.496.800
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.300.720	54.300.720	54.300.720
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.302.420	32.302.420	32.302.420
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.998.300	21.998.300	21.998.300
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	60.000.000	60.000.000	60.000.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60.000.000	60.000.000	60.000.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	60.000.000	60.000.000	60.000.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	199.999.820	199.999.820	199.999.820
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	199.999.820	199.999.820	199.999.820
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	90.402.800	90.402.800	90.402.800
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	109.597.020	109.597.020	109.597.020
7.01.0.00.0.00.05.0000						KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU	3.078.293.599	3.078.293.599	2.925.124.422
7.01.0.00.0.00.05.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	3.078.293.599	3.078.293.599	2.925.124.422
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01				KECAMATAN	3.078.293.599	3.078.293.599	2.925.124.422

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.726.707.699	2.726.707.699	2.573.538.522
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.533.614.999	2.533.614.999	2.380.445.822
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.502.509.499	2.502.509.499	2.349.340.322
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.955.200	27.955.200	27.955.200
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.150.300	3.150.300	3.150.300
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.400.000	15.400.000	15.400.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	15.400.000	15.400.000	15.400.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.425.900	45.425.900	45.425.900
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.997.400	1.997.400	1.997.400
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.141.500	16.141.500	16.141.500
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.492.000	1.492.000	1.492.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.795.000	25.795.000	25.795.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.691.700	14.691.700	14.691.700
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.691.700	14.691.700	14.691.700
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.096.300	77.096.300	77.096.300
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	600.000	600.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.999.500	21.999.500	21.999.500
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	54.496.800
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.478.800	40.478.800	40.478.800
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.999.200	36.999.200	36.999.200
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.981.500	1.981.500	1.981.500
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.498.100	1.498.100	1.498.100

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28.463.500	28.463.500	28.463.500
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28.463.500	28.463.500	28.463.500
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	28.463.500	28.463.500	28.463.500
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	221.542.400	221.542.400	221.542.400
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	21.542.400	21.542.400	21.542.400
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21.542.400	21.542.400	21.542.400
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200.000.000	200.000.000	200.000.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	149.136.400	149.136.400	149.136.400
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.863.600	50.863.600	50.863.600
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.000.000	20.000.000	20.000.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.000.000	20.000.000	20.000.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.000.000	20.000.000	20.000.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	61.580.000	61.580.000	61.580.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	61.580.000	61.580.000	61.580.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	39.980.000	39.980.000	39.980.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	21.600.000	21.600.000	21.600.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.000.000	20.000.000	20.000.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.000.000	20.000.000	20.000.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.000.000	20.000.000	20.000.000
7.01.0.00.0.00.06.0000						KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE	2.264.137.486	2.264.137.386	2.243.433.882

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.06.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.264.137.486	2.264.137.386	2.243.433.882
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01				KECAMATAN	2.264.137.486	2.264.137.386	2.243.433.882
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.998.101.186	1.984.601.186	1.963.897.682
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.732.682.986	1.732.682.986	1.711.979.482
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.689.509.986	1.689.509.986	1.668.806.482
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	38.673.100	38.673.100	38.673.100
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.499.900	4.499.900	4.499.900
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.508.200	87.508.200	87.508.200
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.332.700	3.332.700	3.332.700
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.495.500	12.495.500	12.495.500
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.670.000	38.670.000	29.908.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.010.000	33.010.000	41.772.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.720.000	26.220.000	26.220.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.720.000	26.220.000	26.220.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.011.300	70.011.300	70.011.300
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.420.000	14.420.000	14.420.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.591.300	54.591.300	54.591.300
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.178.700	68.178.700	68.178.700
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.184.600	48.184.600	48.184.600
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.994.100	19.994.100	19.994.100
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	47.821.600	67.741.500	67.741.500
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	47.821.600	67.741.500	67.741.500

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	47.821.600	67.741.500	67.741.500
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	204.122.700	204.072.700	204.072.700
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3.151.700	3.151.700	3.151.700
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.151.700	3.151.700	3.151.700
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200.971.000	200.921.000	200.921.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	150.961.300	150.911.300	150.911.300
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.009.700	50.009.700	50.009.700
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.092.000	7.722.000	7.722.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.092.000	7.722.000	7.722.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.300.000	0	0
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.792.000	7.722.000	7.722.000
7.01.0.00.0.00.07.0000						KANTOR KECAMATAN PURBATUA	1.652.780.769	1.652.780.769	1.379.786.315
7.01.0.00.0.00.07.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	1.652.780.769	1.652.780.769	1.379.786.315
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01				KECAMATAN	1.652.780.769	1.652.780.769	1.379.786.315
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.547.912.769	1.551.716.769	1.278.722.315
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	619.600	619.600	619.600
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	619.600	619.600	619.600
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.316.590.069	1.316.590.069	1.043.595.615
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.274.082.969	1.274.082.969	1.001.088.515
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.548.300	40.548.300	40.548.300
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.958.800	1.958.800	1.958.800
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.977.500	53.337.500	53.337.500

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.569.900	2.569.900	2.569.900
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.975.800	4.975.800	4.975.800
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.156.500	18.516.500	18.516.500
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.542.600	11.542.600	11.542.600
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	15.732.700	15.732.700	15.732.700
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.750.000	20.350.000	20.350.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.750.000	20.350.000	20.350.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.628.400	66.628.400	66.628.400
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000	700.000	700.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.431.600	11.431.600	11.431.600
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	54.496.800
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.347.200	94.191.200	94.191.200
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.041.400	68.045.400	68.045.400
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.468.200	2.468.200	2.468.200
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.197.600	14.197.600	14.197.600
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.640.000	9.480.000	9.480.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	63.435.000	63.355.000	63.355.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	63.435.000	63.355.000	63.355.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	63.435.000	63.355.000	63.355.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	19.833.000	16.109.000	16.109.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	19.833.000	16.109.000	16.109.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19.833.000	16.109.000	16.109.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.600.000	21.600.000	21.600.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.600.000	21.600.000	21.600.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	21.600.000	21.600.000	21.600.000
7.01.0.00.0.00.08.0000						KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN	1.469.167.886	1.469.167.666	1.419.225.748
7.01.0.00.0.00.08.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	1.469.167.886	1.469.167.666	1.419.225.748
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01				KECAMATAN	1.469.167.886	1.469.167.666	1.419.225.748
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.337.446.886	1.358.996.666	1.309.054.748
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.905.300	20.905.300	20.905.300
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.216.300	2.216.300	2.216.300
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.689.000	18.689.000	18.689.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.119.775.386	1.117.355.386	1.067.413.568
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.082.662.186	1.082.662.186	1.032.720.368
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.907.600	32.907.600	32.907.600
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.205.600	1.785.600	1.785.600
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	56.198.000	59.391.000	59.381.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.045.500	4.435.900	4.435.900
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.377.900	14.377.900	14.377.900
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.222.100	14.641.700	14.641.700
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.352.500	4.355.500	4.355.500
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.200.000	21.580.000	21.570.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.100.000	27.700.000	27.700.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.100.000	27.700.000	27.700.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.598.000	72.598.000	72.598.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.101.200	17.101.200	17.101.200
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	54.496.800
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.870.200	61.046.980	61.056.880
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.187.000	42.851.280	42.851.280
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.191.700	4.278.400	4.278.400
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.491.500	13.917.300	13.927.200
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	42.530.000	41.830.000	41.830.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	42.530.000	41.830.000	41.830.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	42.530.000	41.830.000	41.830.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	19.500.000	16.500.000	16.500.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	19.500.000	16.500.000	16.500.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19.500.000	16.500.000	16.500.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.000.000	7.000.000	7.000.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.000.000	7.000.000	7.000.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.000.000	7.000.000	7.000.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	42.600.000	33.600.000	33.600.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	42.600.000	33.600.000	33.600.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	42.600.000	33.600.000	33.600.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.091.000	11.241.000	11.241.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.091.000	11.241.000	11.241.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.091.000	11.241.000	11.241.000
7.01.0.00.0.00.09.0000						KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR	2.398.472.712	2.398.472.712	2.000.667.388
7.01.0.00.0.00.09.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.398.472.712	2.398.472.712	2.000.667.388
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01				KECAMATAN	2.398.472.712	2.398.472.712	2.000.667.388
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.285.721.812	2.285.721.812	1.887.916.488
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.810.000	36.810.000	36.810.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.310.000	35.310.000	35.310.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.040.785.912	2.040.785.912	1.646.161.188
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.013.650.712	2.013.650.712	1.615.845.988
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.627.200	25.627.200	28.807.200
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.508.000	1.508.000	1.508.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.910.300	53.910.300	53.910.300
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.650.000	1.650.000	1.650.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.524.100	25.524.100	25.524.100
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.634.400	7.634.400	7.634.400
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.770.000	3.770.000	3.770.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.926.800	1.926.800	1.926.800
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.405.000	13.405.000	13.405.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.000.000	36.000.000	36.000.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.000.000	36.000.000	36.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.195.100	85.195.100	82.014.500
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.698.300	29.698.300	26.517.700
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	54.496.800
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.020.500	33.020.500	33.020.500
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.093.600	28.093.600	28.093.600
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.926.900	4.926.900	4.926.900
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.500.000	5.500.000	5.500.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.500.000	5.500.000	5.500.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.500.000	5.500.000	5.500.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	34.200.000	34.200.000	34.200.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	34.200.000	34.200.000	34.200.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21.900.000	21.900.000	21.900.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.300.000	12.300.000	12.300.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.097.500	8.097.500	8.097.500
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.097.500	8.097.500	8.097.500
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8.097.500	8.097.500	8.097.500
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	42.853.000	42.853.000	42.853.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	42.853.000	42.853.000	42.853.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	42.853.000	42.853.000	42.853.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	22.100.400	22.100.400	22.100.400
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.100.400	22.100.400	22.100.400
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.455.000	10.455.000	10.455.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	11.645.400	11.645.400	11.645.400
7.01.0.00.0.00.10.0000						KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN	1.762.699.649	1.762.699.649	1.584.491.973
7.01.0.00.0.00.10.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	1.762.699.649	1.762.699.649	1.584.491.973
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01				KECAMATAN	1.762.699.649	1.762.699.649	1.584.491.973
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.657.461.349	1.657.461.349	1.479.253.673
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.189.800	28.189.800	28.189.800
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.800	4.999.800	4.999.800
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.190.000	21.190.000	21.190.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.409.202.949	1.409.202.949	1.230.995.273
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.379.702.549	1.379.702.549	1.201.494.873
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.500.400	27.500.400	27.500.400
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.717.200	65.717.200	65.717.200
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.996.000	2.996.000	2.996.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.241.500	7.241.500	7.241.500
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.087.900	4.087.900	4.087.900
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.391.800	4.391.800	4.391.800
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000	45.000.000	45.000.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.002.100	36.002.100	36.002.100
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.002.100	36.002.100	36.002.100
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.416.800	81.416.800	81.416.800
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.920.000	25.920.000	25.920.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	54.496.800
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.932.500	34.932.500	34.932.500
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.932.500	34.932.500	34.932.500
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	70.600.000	70.600.000	70.600.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	70.600.000	70.600.000	70.600.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	70.600.000	70.600.000	70.600.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.638.300	10.638.300	10.638.300
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.638.300	10.638.300	10.638.300
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5.640.000	5.640.000	5.640.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.998.300	4.998.300	4.998.300

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.000.000	5.000.000	5.000.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.000.000	5.000.000	5.000.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.000.000	5.000.000	5.000.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.500.000	11.500.000	11.500.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.500.000	11.500.000	11.500.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	11.500.000	11.500.000	11.500.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.500.000	7.500.000	7.500.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.500.000	7.500.000	7.500.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5.000.000	5.000.000	5.000.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7.01.0.00.0.00.11.0000						KANTOR KECAMATAN GAROGA	1.877.296.546	1.877.296.546	1.762.356.679
7.01.0.00.0.00.11.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	1.877.296.546	1.877.296.546	1.762.356.679
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01				KECAMATAN	1.877.296.546	1.877.296.546	1.762.356.679
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.747.145.546	1.747.145.546	1.632.205.679
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.310.000	19.310.000	19.310.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.910.000	2.910.000	2.910.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.400.000	16.400.000	16.400.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.528.615.546	1.528.555.546	1.413.655.679
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.489.507.946	1.489.507.946	1.374.608.079
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.087.600	36.087.600	36.087.600
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.020.000	2.960.000	2.960.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.975.400	53.179.000	51.779.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.504.500	3.504.500	3.504.500
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.425.600	5.210.600	5.210.600
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.143.900	6.143.900	6.143.900
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.301.400	3.335.000	3.350.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.600.000	34.985.000	33.570.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.137.600	16.200.000	16.200.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	32.244.000	16.200.000	16.200.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.893.600	0	0
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.138.100	72.918.100	74.278.100
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.410.000	1.050.000	2.410.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.231.300	17.371.300	17.371.300
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	54.496.800
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.968.900	56.982.900	56.982.900
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.904.800	45.982.000	45.982.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.064.100	11.000.900	11.000.900
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	44.998.000	44.998.000	44.998.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	44.998.000	44.998.000	44.998.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	44.998.000	44.998.000	44.998.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	19.993.000	19.993.000	19.993.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	19.993.000	19.993.000	19.993.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.000.000	10.000.000	10.000.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.993.000	9.993.000	9.993.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.399.000	15.399.000	15.399.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	15.399.000	15.399.000	15.399.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	15.399.000	15.399.000	15.399.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	35.221.000	35.221.000	35.221.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	35.221.000	35.221.000	35.221.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	35.221.000	35.221.000	35.221.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.540.000	14.540.000	14.540.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.540.000	14.540.000	14.540.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.440.000	7.440.000	7.440.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	7.100.000	7.100.000	7.100.000
7.01.0.00.0.00.12.0000						KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG	3.636.399.453	3.636.399.453	3.661.674.453
7.01.0.00.0.00.12.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	3.636.399.453	3.636.399.453	3.661.674.453
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01				KECAMATAN	3.636.399.453	3.636.399.453	3.661.674.453
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.310.653.754	3.310.653.754	3.353.808.754
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.827.200	30.827.200	26.774.200
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.371.200	1.371.200	1.371.200
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.456.000	29.456.000	25.403.000
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.966.318.154	2.966.318.154	2.991.593.154

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.925.997.054	2.925.997.054	2.951.272.054
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	38.695.200	38.695.200	38.695.200
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.625.900	1.625.900	1.625.900
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	114.805.800	114.805.800	143.643.850
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.990.600	2.990.600	1.714.800
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.046.800	18.046.800	23.355.650
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.563.400	8.563.400	8.563.400
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.750.000	4.750.000	4.750.000
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.200.000	5.200.000	3.640.000
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.255.000	75.255.000	101.620.000
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.686.500	45.686.500	42.096.200
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.686.500	45.686.500	42.096.200
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.194.000	88.194.000	85.194.000
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000	700.000	700.000
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.997.200	32.997.200	29.997.200
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	54.496.800
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.822.100	64.822.100	64.507.350
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.052.100	48.052.100	52.696.250
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.775.500	6.775.500	4.210.000
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.994.500	9.994.500	7.601.100
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	34.500.000	34.500.000	46.980.000
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.500.000	34.500.000	46.980.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	34.500.000	34.500.000	46.980.000
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	220.345.699	220.345.699	220.345.699
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	20.345.700	20.345.700	20.345.700
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.345.700	20.345.700	20.345.700
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	199.999.999	199.999.999	199.999.999
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	150.000.000	150.000.000	150.000.000
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	49.999.999	49.999.999	49.999.999
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	33.800.000	33.800.000	9.500.000
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	33.800.000	33.800.000	9.500.000
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	33.800.000	33.800.000	9.500.000
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	28.800.000	28.800.000	28.800.000
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	28.800.000	28.800.000	28.800.000
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	28.800.000	28.800.000	28.800.000
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.300.000	8.300.000	2.240.000
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.300.000	8.300.000	2.240.000
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.300.000	8.300.000	2.240.000
7.01.0.00.0.00.13.0000						KANTOR KECAMATAN PAGARAN	1.994.697.954	1.994.610.454	1.850.361.698
7.01.0.00.0.00.13.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	1.994.697.954	1.994.610.454	1.850.361.698
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01				KECAMATAN	1.994.697.954	1.994.610.454	1.850.361.698
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.857.604.454	1.879.582.954	1.753.756.698

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.114.500	13.414.500	16.462.500
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.114.500	13.414.500	16.462.500
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.644.722.434	1.644.722.434	1.500.473.903
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.614.221.934	1.614.221.934	1.469.973.403
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.667.200	27.667.200	27.667.200
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.833.300	2.833.300	2.833.300
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.277.100	77.857.100	82.020.000
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.742.000	2.742.000	5.410.800
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.069.600	12.069.600	12.069.600
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.535.500	4.535.500	5.479.600
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.930.000	58.510.000	59.060.000
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.976.620	28.976.620	37.187.995
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.976.620	28.976.620	37.187.995
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.509.200	64.607.700	64.607.700
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000	700.000	700.000
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.312.400	9.410.900	9.410.900
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	54.496.800
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.004.600	50.004.600	53.004.600
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.549.000	27.549.000	30.549.000
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.862.400	18.862.400	18.862.400
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.593.200	3.593.200	3.593.200
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12.564.000	21.705.000	23.784.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.564.000	21.705.000	23.784.000
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12.564.000	21.705.000	23.784.000
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.929.000	32.929.000	32.929.000
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.929.000	32.929.000	32.929.000
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22.929.000	32.929.000	32.929.000
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.000.500	6.511.000	4.061.000
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.000.500	6.511.000	4.061.000
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.000.500	6.511.000	4.061.000
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	61.600.000	33.882.500	29.431.000
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	61.600.000	33.882.500	29.431.000
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40.000.000	12.282.500	7.831.000
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	21.600.000	21.600.000	21.600.000
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.000.000	20.000.000	6.400.000
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.000.000	20.000.000	6.400.000
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.000.000	20.000.000	6.400.000
7.01.0.00.0.00.14.0000						KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN	1.222.602.299	1.222.602.299	1.306.507.585
7.01.0.00.0.00.14.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	1.222.602.299	1.222.602.299	1.306.507.585
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01				KECAMATAN	1.222.602.299	1.222.602.299	1.306.507.585
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.093.409.699	1.093.409.699	1.201.658.585

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.600.000	3.600.000	13.200.000
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.800.000	1.800.000	1.800.000
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.800.000	1.800.000	11.400.000
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	870.819.619	870.819.619	954.744.505
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	848.419.219	848.419.219	932.344.105
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22.400.400	22.400.400	22.400.400
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	72.703.600	72.703.600	87.427.600
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.292.400	4.292.400	4.292.400
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.677.200	43.677.200	43.677.200
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.358.000	2.358.000	3.858.000
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.376.000	22.376.000	35.600.000
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.816.100	98.816.100	98.816.100
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	550.000	550.000	550.000
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.979.100	4.979.100	4.979.100
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.287.000	39.287.000	39.287.000
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.000.000	54.000.000	54.000.000
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.470.380	47.470.380	47.470.380
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.738.280	30.738.280	30.738.280
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.228.100	11.228.100	11.228.100
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.504.000	5.504.000	5.504.000
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	41.547.600	41.547.600	32.864.000
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40.047.600	40.047.600	32.864.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	40.047.600	40.047.600	32.864.000
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.500.000	1.500.000	0
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.500.000	1.500.000	0
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	66.045.000	66.045.000	50.385.000
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	66.045.000	66.045.000	50.385.000
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	66.045.000	66.045.000	50.385.000
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.600.000	21.600.000	21.600.000
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.600.000	21.600.000	21.600.000
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	21.600.000	21.600.000	21.600.000
7.01.0.00.0.00.15.0000						KANTOR KECAMATAN MUARA	1.759.709.092	1.759.709.092	1.779.122.338
7.01.0.00.0.00.15.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	1.759.709.092	1.759.709.092	1.779.122.338
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01				KECAMATAN	1.759.709.092	1.759.709.092	1.779.122.338
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.647.923.192	1.647.923.192	1.667.336.438
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.771.900	16.771.900	16.771.900
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.666.900	3.666.900	3.666.900
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.105.000	13.105.000	13.105.000
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.389.298.742	1.389.298.742	1.408.716.988
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.353.319.042	1.353.319.042	1.372.737.288
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.727.200	30.727.200	30.727.200
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.252.500	5.252.500	5.252.500
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.610.400	61.610.400	61.605.400
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.669.200	5.669.200	5.669.200

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.964.000	6.964.000	6.964.000
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.267.600	4.267.600	4.267.600
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.318.400	2.318.400	2.318.400
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.891.200	1.891.200	1.891.200
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.500.000	40.500.000	40.495.000
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78.102.900	78.102.900	78.102.900
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	78.102.900	78.102.900	78.102.900
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.052.200	79.052.200	79.052.200
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.555.400	23.555.400	23.555.400
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	54.496.800
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.087.050	23.087.050	23.087.050
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.087.050	23.087.050	23.087.050
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	71.875.600	71.875.600	71.875.600
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	71.875.600	71.875.600	71.875.600
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	71.875.600	71.875.600	71.875.600
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.710.300	12.710.300	12.710.300
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.710.300	12.710.300	12.710.300
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.710.300	12.710.300	12.710.300
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.600.000	5.600.000	5.600.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.600.000	5.600.000	5.600.000
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.600.000	5.600.000	5.600.000
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.600.000	21.600.000	21.600.000
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.600.000	21.600.000	21.600.000
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	21.600.000	21.600.000	21.600.000
8.01.0.00.0.00.02.0000						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.260.305.361	6.365.305.361	6.261.039.699
8.01.0.00.0.00.02.0000	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6.260.305.361	6.365.305.361	6.261.039.699
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.260.305.361	6.365.305.361	6.261.039.699
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.074.850.698	3.104.850.698	2.975.585.036
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.050.000	29.050.000	29.050.000
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000	2.500.000	2.500.000
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000	2.500.000	2.500.000
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	4.000.000	4.000.000
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.050.000	20.050.000	20.050.000
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.716.492.598	2.716.492.598	2.587.226.936
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.667.737.398	2.667.737.398	2.538.471.736
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.755.200	44.755.200	44.755.200
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000	4.000.000	4.000.000
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	181.558.000	211.558.000	211.558.000
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.769.600	5.769.600	5.769.600
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.818.000	17.818.000	17.818.000
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.126.200	8.126.200	8.126.200
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.171.200	12.171.200	12.171.200

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.748.000	7.748.000	7.748.000
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.925.000	159.925.000	159.925.000
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.320.000	16.320.000	16.320.000
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.320.000	16.320.000	16.320.000
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.555.000	86.555.000	86.555.000
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.200.000	4.200.000	4.200.000
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.858.200	27.858.200	27.858.200
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	54.496.800
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.875.100	44.875.100	44.875.100
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.262.800	28.262.800	28.262.800
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.110.700	9.110.700	9.110.700
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.501.600	7.501.600	7.501.600
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	817.372.900	892.372.900	917.372.900
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	817.372.900	892.372.900	917.372.900
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	75.000.000	100.000.000
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	597.975.700	597.975.700	597.975.700
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	219.397.200	219.397.200	219.397.200

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.871.239.063	1.871.239.063	1.871.239.063
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.871.239.063	1.871.239.063	1.871.239.063
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	03	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.871.239.063	1.871.239.063	1.871.239.063
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	31.539.200	31.539.200	31.539.200
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	31.539.200	31.539.200	31.539.200
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	31.539.200	31.539.200	31.539.200
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	465.303.500	465.303.500	465.303.500
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	465.303.500	465.303.500	465.303.500
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	119.050.000	119.050.000	119.050.000

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	66.479.800	66.479.800	66.479.800
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	279.773.700	279.773.700	279.773.700

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan**												
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA											
			DINAS KETENAGAKERJAAN	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	400
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL											
			DINAS KETENAGAKERJAAN	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0	0	0	40.000.000	800
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA											
			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	300.000.000	0	0	0	414.917.100	0	0	0	414.917.100	8.299
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT											
			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	29.997.200	0	0	0	116.647.200	0	0	0	116.647.200	2.333
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI											
			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000	2.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	100
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL											
			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	13.959.500	0	0	0	3.959.500	0	0	0	3.959.500	79
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA											
			DINAS KETAHANAN PANGAN	550.000.000	0	0	0	740.320.000	0	0	0	740.320.000	14.807
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			DINAS PARIWISATA	3.500.000	0	0	0	3.500.000	0	0	0	3.500.000	70
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA											
			DINAS PARIWISATA	99.999.900	0	0	0	49.999.700	0	0	0	49.999.700	1.000

		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL											
			DINAS PARIWISATA	19.999.900	0	0	0	49.999.900	0	0	0	49.999.900	1.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN											
			DINAS KETAHANAN PANGAN	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	400
			DINAS PERTANIAN	4.645.272.800	0	0	0	5.376.116.560	0	0	0	5.376.116.560	107.524
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER											
			DINAS KETAHANAN PANGAN	130.000.000	0	0	0	221.000.000	0	0	0	221.000.000	4.420
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN											
			DINAS PERTANIAN	789.999.940	0	0	0	789.249.940	0	0	0	789.249.940	15.785
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	199.967.000	0	0	0	308.447.000	0	0	0	308.447.000	6.169
2	**Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan**												
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM											
			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.078.085.133	0	0	0	1.213.736.133	0	0	0	1.213.736.133	100
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH											
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	59.999.800	0	0	0	349.999.800	0	0	0	349.999.800	29
3	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**												
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			DINAS KESEHATAN	64.800.000	0	0	0	57.800.000	0	0	0	57.800.000	223
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											
			DINAS KESEHATAN	0	1.690.000.000	0	0	0	1.672.920.000	0	0	1.672.920.000	6.447
			RSU DAERAH TARUTUNG	143.132.275.214	10.999.988.712	0	0	151.433.297.236	11.222.678.920	0	0	162.655.976.156	626.805
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI											
			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	70.000.000	0	0	0	70.000.000	0	0	0	70.000.000	270
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA											
			DINAS KETENAGAKERJAAN	409.278.600	0	0	0	559.278.500	0	0	0	559.278.500	2.155
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN											
			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	50.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000	385
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT											
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	47.082.200	0	0	0	47.082.200	0	0	0	47.082.200	181
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											

			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	12
			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	14.956.000	0	0	0	11.403.000	0	0	0	11.403.000	44
			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0	0	0	40.000.000	154
			DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.426.837.581	0	0	0	2.085.799.136	0	0	0	2.085.799.136	8.038
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN											
			DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	324.597.900	386.978.800	0	0	457.226.200	191.042.800	0	0	648.269.000	2.498
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			DINAS PERTANIAN	5.999.800	0	0	0	5.999.800	0	0	0	5.999.800	23
			SEKRETARIAT DPRD	12.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000	23
			BADAN PENDAPATAN DAERAH	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	10
			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.499.900	0	0	0	3.499.900	0	0	0	3.499.900	13
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH											
			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	57.244.900	0	0	0	47.224.900	0	0	0	47.224.900	182
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH											
			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	106.600.000	3.400.000	0	0	106.600.000	3.400.000	0	0	110.000.000	424
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING	26.996.090	0	0	0	26.996.090	0	0	0	26.996.090	104
			KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU	3.150.300	0	0	0	3.150.300	0	0	0	3.150.300	12
			KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR	1.508.000	0	0	0	1.508.000	0	0	0	1.508.000	6
			KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN	21.190.000	0	0	0	21.190.000	0	0	0	21.190.000	82
			KANTOR KECAMATAN GAROGA	16.400.000	0	0	0	16.400.000	0	0	0	16.400.000	63
			KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG	4.750.000	0	0	0	4.750.000	0	0	0	4.750.000	18
			KANTOR KECAMATAN PAGARAN	27.667.200	0	0	0	27.667.200	0	0	0	27.667.200	107
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
			KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU	28.463.500	0	0	0	28.463.500	0	0	0	28.463.500	110

			KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR	5.500.000	0	0	0	5.500.000	0	0	0	5.500.000	21
			KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG	34.500.000	0	0	0	46.980.000	0	0	0	46.980.000	181
			KANTOR KECAMATAN PAGARAN	12.564.000	0	0	0	23.784.000	0	0	0	23.784.000	92
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
			KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG	49.999.999	0	0	0	49.999.999	0	0	0	49.999.999	193
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
			KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR	8.097.500	0	0	0	8.097.500	0	0	0	8.097.500	31
			KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG	33.800.000	0	0	0	9.500.000	0	0	0	9.500.000	37
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
			KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR	42.853.000	0	0	0	42.853.000	0	0	0	42.853.000	165
			KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN	21.600.000	0	0	0	21.600.000	0	0	0	21.600.000	83
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
			KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG	8.300.000	0	0	0	2.240.000	0	0	0	2.240.000	9
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN											
			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	31.539.200	0	0	0	31.539.200	0	0	0	31.539.200	122
4	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**												
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			RSU DAERAH TARUTUNG	25.608.264.511	0	0	0	30.063.650.256	0	0	0	30.063.650.256	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN											
			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	100.320.300	0	0	0	123.709.190	0	0	0	123.709.190	0
5	**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar**												
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	217.474.800	0	0	0	217.474.800	0	0	0	217.474.800	935
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											
			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	1.250.000.000	0	0	47.507.000	1.250.000.000	0	0	1.297.507.000	5.581
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG											
			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	224.999.900	799.999.800	0	0	586.423.300	785.609.800	0	0	1.372.033.100	5.902
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN											

			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	600.000.000	0	0	0	972.078.454	0	0	0	972.078.454	4.181
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)											
			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	902.490.500	0	0	0	796.250.500	0	0	0	796.250.500	3.425
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN											
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0	700.000.000	0	0	50.000.000	700.000.000	0	0	750.000.000	3.226
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			DINAS PERHUBUNGAN	34.999.000	0	0	0	14.999.000	0	0	0	14.999.000	65
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)											
			DINAS PERHUBUNGAN	40.000.000	291.054.300	0	0	5.437.200	170.619.100	0	0	176.056.300	757
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN											
			DINAS PERHUBUNGAN	19.999.800	0	0	0	11.839.800	0	0	0	11.839.800	51
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			DINAS PERPUSTAKAAN	12.191.500	0	0	0	8.009.700	0	0	0	8.009.700	34
			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	329.933.200	0	0	0	352.183.100	0	0	0	352.183.100	1.515
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH											
			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	50.008.000	0	0	0	79.979.200	0	0	0	79.979.200	344
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH											
			BADAN PENDAPATAN DAERAH	53.000.200	0	0	0	47.071.200	0	0	0	47.071.200	202
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN	14.377.900	0	0	0	14.377.900	0	0	0	14.377.900	62
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
			KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN	12.000.000	0	0	0	7.000.000	0	0	0	7.000.000	30
6	**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim**												
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP											
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	33.838.800	0	0	0	33.838.800	0	0	0	33.838.800	35
7	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik**												
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	5.098.600	0	0	0	5.098.600	0	0	0	5.098.600	4
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG											

			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	104.999.700	0	0	0	373.799.700	0	0	0	373.799.700	300
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7.678.500	0	0	0	7.678.500	0	0	0	7.678.500	6
			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.999.900	0	0	0	4.999.900	0	0	0	4.999.900	4
			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	26.464.500	0	0	0	31.988.500	0	0	0	31.988.500	26
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.265.281.350	0	0	0	1.989.275.050	0	0	0	1.989.275.050	1.598
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			DINAS SOSIAL	16.869.500	0	0	0	16.869.500	0	0	0	16.869.500	14
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL											
			DINAS SOSIAL	750.516.300	0	0	0	752.916.200	0	0	0	752.916.200	605
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL											
			DINAS SOSIAL	176.000.000	0	0	0	169.800.000	0	0	0	169.800.000	136
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL											
			DINAS SOSIAL	170.000.000	0	0	0	196.999.900	0	0	0	196.999.900	158
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA											
			DINAS SOSIAL	180.000.000	0	0	0	279.999.800	0	0	0	279.999.800	225
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN											
			DINAS SOSIAL	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000	5
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			DINAS KETENAGAKERJAAN	4.999.900	0	0	0	3.207.600	0	0	0	3.207.600	3
			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	33.905.000	0	0	0	31.602.500	0	0	0	31.602.500	25
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK											
			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	51.575.000	0	0	0	51.575.000	0	0	0	51.575.000	41
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL											
			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	34.544.000	0	0	0	35.426.000	0	0	0	35.426.000	28
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	4
			DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	14.518.620	0	0	0	12.218.620	0	0	0	12.218.620	10
			DINAS PERPUSTAKAAN	4.989.600	0	0	0	4.989.600	0	0	0	4.989.600	4

			SEKRETARIAT DAERAH	1.356.884.000	0	0	0	1.928.732.800	0	0	0	1.928.732.800	1.550
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT											
			SEKRETARIAT DAERAH	3.455.000.000	0	0	0	5.905.000.000	0	0	0	5.905.000.000	4.745
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN											
			SEKRETARIAT DAERAH	44.376.000	0	0	0	28.076.000	0	0	0	28.076.000	23
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			SEKRETARIAT DPRD	2.738.072.436	0	0	0	2.556.330.415	0	0	0	2.556.330.415	2.054
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD											
			SEKRETARIAT DPRD	127.860.800	0	0	0	127.860.800	0	0	0	127.860.800	103
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			INSPEKTORAT	500.000.000	0	0	0	460.000.000	0	0	0	460.000.000	370
			KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
			KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA	23.836.700	0	0	0	24.166.700	0	0	0	24.166.700	19

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si

Lampiran X : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 Tahun 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

GOLONGAN/ RUANG	ESELON					TENAGA FUNGSIONAL			STAFF	JUMLAH
	I	II	III	IV	V	PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINNYA		
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/d	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Golongan IV/c	-	21	-	-	-	23	2	-	-	46
Golongan IV/b	-	10	30	-	-	390	18	4	7	459
Golongan IV/a	-	3	83	28	-	351	25	8	26	524
JUMLAH GOLONGAN IV	-	34	113	28	-	765	45	12	33	1.030
Golongan III/d	-	-	42	179	-	295	150	13	41	720
Golongan III/c	-	-	14	70	-	425	101	6	28	644
Golongan III/b	-	-	-	127	-	229	102	14	147	619
Golongan III/a	-	-	-	21	-	157	168	27	335	708
JUMLAH GOLONGAN III	-	-	56	397	-	1.106	521	60	551	2.691
Golongan II/d	-	-	-	-	-	21	109	4	175	309
Golongan II/c	-	-	-	-	-	5	62	19	201	287
Golongan II/b	-	-	-	-	-	2	2	2	78	84
Golongan II/a	-	-	-	-	-	9	1	-	51	61
JUMLAH GOLONGAN II	-	-	-	-	-	37	174	25	505	741
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH GOLONGAN I	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20
TOTAL	**-**	**34**	**169**	**425**	**-**	**1.908**	**740**	**97**	**1.109**	**4.482**

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. NIKSON NABABAN, M.Si

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 Tahun 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan piutang	Jumlah piutang sampai dengan tahun N-2	Perkiraan Penambahan Tahun N-1	Perkiraan Pengurangan tahun N-1	Perkiraan Saldo Akhir tahun N-1
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
1	**N**	**I**	**H**	**I**	**L**	
Jumlah						

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. NIKSON NABABAN, M.Si

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 Tahun 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal Investasi Daerah	Jumlah Modal Yang telah di sertakan sampai tahun Anggaran Lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang di sertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7+8	10	11	12	13
1	Tahun 2022	PT. Bank Sumut	-	Saham	32.665.887.948,00	35.717.536.643,00		35.717.536.643,00	-	-	-	35.717.536.643,00
2	Tahun 2022	PDAM Mual Natio	-	Non Saham	33.709.558.859,00	33.709.558.859,00	-	33.709.558.859,00	-	-	-	33.709.558.859,00
3	Tahun 2017	Perusda Pertanian	-	Non Saham	15.500.000.000,00	15.500.000.000,00	-	15.500.000.000,00	-	-	-	15.500.000.000,00
4	Tahun 2017	Perusda Pertambangan dan Aneka Industri	-	Non Saham	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	5.000.000.000,00	-	-	-	5.000.000.000,00
Jumlah					86.875.446.807,00	89.927.095.502,00	-	89.927.095.502,00	-	-	-	89.927.095.502,00

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. NIKSON NABABAN, M.Si

Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 Tahun 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET DAERAH

(Dalam rupiah)

NO.	NAMA ASET	SALDO PADA AKHIR TAHUN 2022	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2023	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2023	PERKIRAAN SALDO PADA AKHIR TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6
1	TANAH	848.962.288.284,00	2.601.922.842,00	2.601.922.842,00	848.962.288.284,00
2	PERALATAN DAN MESIN	422.188.448.212,93	5.937.590.208,66	4.113.698.947,00	424.012.339.474,59
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	772.716.826.128,17	5.901.803.470,00	5.837.273.469,00	772.781.356.129,17
4	JALAN, IRIGASI DAN BANGUNAN	1.690.728.709.180,40	15.500.000,00	15.500.000,00	1.690.728.709.180,40
5	ASET TETAP LAINNYA	17.736.537.379,00			17.736.537.379,00
6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	2.741.508.432,00	0,00		2.741.508.432,00
JUMLAH		**3.755.074.317.616,50**	**14.456.816.520,66**	**12.568.395.258,00**	**3.756.962.738.879,16**

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. NIKSON NABABAN, M.Si

Lampiran XIV : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor : 06 Tahun 2023
Tanggal : 02 Oktober 2023

KABUPATEN TAPANULI UTARA
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (*MULTI YEARS*);
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran T-1 (Rp)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA T-1 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp)	
				APBD TA T-1	Perubahan APBD TA T-1		APBD TA 2023	Perubahan APBD TA T
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- N I H I L -						
Jumlah.....				-		-	-	-

Bupati Tapanuli Utara

Dr. Drs. NIKSON NABABAN, M.Si

BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 yang terdiri atas:

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

c) Neraca

d) Laporan Operasional (LO)

e) Laporan Arus Kas (LAK)

f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan Keuangan TA 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Tarutung, 14 April 2023
BUPATI TAPANULI UTARA,

Drs. NIKSON NABABAN, M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tapanuli Utara untuk tahun buku yang berakhir per tanggal 31 Desember 2022 telah dapat disusun. Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan berperan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sehubungan dengan laporan Keuangan Tahun 2022 ini, diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran, menyajikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, sisa lebih pembiayaan anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan tersebut terdiri dari Saldo anggaran lebih, dikurangi Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan dijumlahkan dengan Sisa Lebih atau Kurang Pembiayaan Anggaran, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Lain-lain.

3. Neraca, menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2022.
4. Laporan Operasional, menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan akun-akun luar biasa.
5. Laporan Arus Kas, menyajikan informasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris, Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran, Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran, Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan, Saldo Akhir Kas.
6. Laporan Perubahan Ekuitas, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Disertai penjelasan pos-pos laporan keuangan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terkait yang telah memberikan sumbangsih tenaga dan pikiran sehingga penyusunan laporan keuangan pemerintah ini dapat disajikan. Kiranya dengan tersusunnya laporan keuangan ini dapat mendorong terciptanya keterbukaan sebagai salah satu pilar pencapaian kepemerintahan yang baik.

Tarutung, 14 April 2023
BUPATI TAPANULI UTARA,

Drs. NIKSON NABABAN, M.Si

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

KATA PENGANTAR .....

DAFTAR ISI 3

DAFTAR TABEL 6

DAFTAR LAMPIRAN 9

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 10

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 11

NERACA 12

LAPORAN OPERASIONAL 14

LAPORAN ARUS KAS 15

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 17

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I. PENDAHULUAN 18

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 18

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 22

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 25

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 27

2.1. Ekonomi Makro 27

2.2. Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah 31

2.3. Kebijakan Keuangan 34

2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 73

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 76

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 76

3.1.1. Realisasi Pendapatan 76

3.1.2. Realisasi Belanja 77

3.1.3. Realisasi Pembiayaan 84

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target 84

3.2.1. Pendapatan Daerah 84

3.2.2. Belanja Daerah 85

3.2.3. Pembiayaan 87

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 88
4.1. Entitas Akuntansi/ Pelaporan Keuangan Daerah 88
4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 90
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan..... 92
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada..... 98
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 188
5.1. Rincian dan Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran 188
5.1.1. Pendapatan – LRA 188
5.1.2. Belanja 193
5.1.3. Pembiayaan 202
5.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)..... 202
5.2. Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) 203
5.2.1. Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Tahun Berjalan 203
5.2.2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA. 2021 203
5.2.3 Saldo Anggaran Lebih Akhir (SAL) 204
5.3. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Neraca 204
5.3.1. Aset Lancar 204
5.3.2. Investasi Jangka Panjang 210
5.3.3. Aset Tetap 216
5.3.4. Aset Lain Lain 225
5.3.5. Aset Tidak Berwujud 225
5.3.6. Kewajiban 226
5.3.7. Ekuitas 230
5.4. Penjelasan Atas Laporan Operasional 230
5.4.1. Pendapatan – LO 230
5.4.2. Beban 238
5.4.3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi 249
5.4.4 Defisit dari Kegiatan Non Operasional 249
5.4.5 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa 249
5.4.6. Pos Luar Biasa 250
5.4.7. Surplus/Defisit – LO 250

5.5. Rincian dan Penjelasan Laporan Arus Kas 250
5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi 250
5.5.2. Arus Kas dari Aktifitas Investasi 252
5.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 253
5.5.4. Arus Kas dari Aktifitas Transitoris 253
5.5.5. Saldo Akhir Kas 254
5.6. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas 255
5.6.1. Ekuitas Awal 255
5.6.2. Surplus/Defisit –LO 256
5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar 256
5.6.4. Ekuitas Akhir 256
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN 257
6.1. Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Tapanuli Utara 257
6.2. Letak Geografis 257
6.3. Visi dan Misi 259
6.4. Organisasi dan Personalia 260
6.5. Informasi Tambahan Penyajian Laporan Keuangan 263
BAB VII PENUTUP 266

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Makro Ekonomi Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara	28
Tabel 2.2	Kondisi Pertumbuhan Penduduk	29
Tabel 2.3	Besaran Kontribusi Tiap Sektor / Lapangan Usaha	29
Tabel 2.4	Perkembangan PDRB	30
Tabel 2.5	Perubahan APBD TA 2021	31
Tabel 2.6	Perubahan Pendapatan Daerah TA 2021	31
Tabel 2.7	Perubahan Belanja Daerah TA 2021	32
Tabel 2.8	Angka Partisipasi Kasar	73
Tabel 2.9	Angka Partisipasi Murni	74
Tabel 2.10	Pencapaian Kinerja Kesehatan	74
Tabel 3.1	Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan TA 2021	76
Tabel 3.2	Rincian Realisasi Anggaran Belanja TA 2021	77
Tabel 3.3	Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan SKPD	78
Tabel 3.4	Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Rangka Pengelolaan Keungan Daerah TA 2021	82
Tabel 3.5	Rincian Realisasi Anggaran Pembiayaan TA 2021	84
Tabel 4.1	Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021	88
Tabel 4.2	Penyisihan investasi non permanen berdasarkan angsuran	117
Tabel 4.3	Komponen Biaya Perolehan Berdasarkan Jenis Aset Tetap	120
Tabel 4.4	Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*)	123
Tabel 4.5	Masa manfaat aset tetap	124
Tabel 4.6	Penambahan Masa manfaat aset tetap	129
Tabel 4.7	Masa manfaat aset tidak berwujud	152
Tabel 5.1	Daftar Rincian Pajak Daerah TA. 2021	188
Tabel 5.2	Daftar Rincian Retribusi Daerah TA. 2021	189
Tabel 5.3	Daftar rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	189
Tabel 5.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	190
Tabel 5.5	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	191
Tabel 5.6	Realisasi Transfer Antar Daerah	192
Tabel 5.7	Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	192
Tabel 5.8	Realisasi Belanja Operasi	193

Tabel 5.9 Rincian Belanja Pegawai per Objek 194
Tabel 5.10 Rincian Belanja Barang per Objek 195
Tabel 5.11 Realisasi Belanja Modal 197
Tabel 5.12 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2021 198
Tabel 5.13 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2021 199
Tabel 5.14 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 200
Tabel 5.15 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA. 2021 201
Tabel 5.16 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan 202
Tabel 5.17 Daftar Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2021 204
Tabel 5.18 Anggaran dan Realisasi Dana Kapitasi BPJS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 205
Tabel 5.19 Silpa Dana BOS Per 31 Desember 2021 207
Tabel 5.20 Daftar Piutang Pendapatan TA. 2021 209
Tabel 5.21 Daftar Piutang Lain-lain TA 2021 210
Tabel 5.22 Daftar Investasi Jangka Panjang TA. 2021 211
Tabel 5.23 Dana Bergulir 211
Tabel 5.24 Penyertaan Modal pada PDAM Mual Na Tio 213
Tabel 5.25 Penyertaan Modal pada PD Pertanian 213
Tabel 5.26 Daftar Penyertaan Modal kepada PT Bank Sumut 214
Tabel 5.27 Daftar Modal Disetor Pemkab Tapanuli Utara kepada PT Bank Sumut 215
Tabel 5.28 Penyertaan Modal pada PD Pertambangan 216
Tabel 5.29 Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Tanah 216
Tabel 5.30 Penambahan/Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin 217
Tabel 5.31 Penambahan/Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan 218
Tabel 5.32 Penambahan/Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan 220
Tabel 5.33 Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Lainnya 221
Tabel 5.34 Penambahan/Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan 222
Tabel 5.35 Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 dan 2020 222
Tabel 5.36 Rekapitulasi Aset Ekstrakomptabel 223
Tabel 5.37 Aset Tidak Berwujud 225
Tabel 5.38 Nilai Kewajiban Tahun 2021 226
Tabel 5.39 Nilai Utang Beban Tahun 2021 227
Tabel 5.40 Pendapatan – LO 231

Tabel 5.41 Pendapatan Asli Daerah– LO 231
Tabel 5.42 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO 232
Tabel 5.43 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO 233
Tabel 5.44 Rincian Lain-lain PAD yang sah - LO 234
Tabel 5.45 Rincian Pendapatan Transfer – LO 235
Tabel 5.46 Rincian Transfer Pemerintah Pusat – LO 235
Tabel 5.47 Rincian Bagi Hasil Pajak - LO 236
Tabel 5.48 Rincian Beban – LO 238
Tabel 5.49 Rincian Beban Pegawai - LO 239
Tabel 5.50 Rincian Beban Barang dan Jasa - LO 239
Tabel 5.51 Rincian Beban Hibah 246
Tabel 5.52 Rincian Beban Bantuan Sosial 246
Tabel 5.53 Rincian Beban dan Amortisasi 247
Tabel 5.54 Rincian Beban Transfer – LO 248
Tabel 5.55 Surplus dan Defisit dari Kegiatan Operasional – LO 249
Tabel 5.56 Koreksi Kegiatan Non Operasional Dari Investasi Jangka Panjang Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 249
Tabel 5.57 Kenaikan/Penurunan Kas Tahun 2021 251
Tabel 5.58 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi 251
Tabel 5.59 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi 252
Tabel 5.60 Arus Kas dari Aktifitas Investasi 252
Tabel 5.61 Arus Kas dari Aktivitas Transistoris 253
Tabel 5.62 Saldo Akhir Kas 254
Table 5.63 Rincian Saldo Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 255
Tabel 6.1 Luas Wilayah Per Kecamatan 258
Tabel 6.2 Urusan dan Bidang 260
Tabel 6.3 Unit Organisasi (OPD) 261

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Daftar Rincian Retribusi Daerah
Lampiran	2	Daftar Rincian Pendapatan dari Pengembalian
Lampiran	3	Rekapitulasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa
Lampiran	4	Realisasi Belanja Hibah
Lampiran	5	Rekapitulasi Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Lampiran	6	Rekapitulasi Belanja Modal
Lampiran	7	Rekapitulasi Realisasi Belanja Tak Terduga
Lampiran	8	Laporan Penggunaan dana BOS Tingkat SD
Lampiran	9	Laporan Penggunaan Dana BOS Tingkat SMP
Lampiran	10	Rekapitulasi Piutang Lainnya
Lampiran	11	Rekapitulasi Penyisihan Piutang Pajak Daerah
Lampiran	12	Rekapitulasi Penyisihan Piutang Retribusi Daerah
Lampiran	13	Beban Penyisihan Piutang
Lampiran	14	Daftar Rincian Persediaan
Lampiran	15	Rekapitulasi Aset Tetap
Lampiran	16	Daftar Saldo Aset Tetap
Lampiran	17	Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah
Lampiran	17a	Daftar Aset Tanah Bermasalah/Bersengketa
Lampiran	18	Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Lampiran	19	Daftar Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Lampiran	20	Daftar Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi
Lampiran	21	Daftar Mutasi Aset Tetap Lainnya
Lampiran	22	Daftar Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Lampiran	23	Rekapitulasi Daftar Aset Lain-lain
Lampiran	24	Rekapitulasi Daftar Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Lampiran	25	Daftar Utang pada Rumah Sakit Umum Daerah
Lampiran	26	Laporan Keuangan Perusahaan Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.334.353.095.216.00**	**1.311.206.689.495.70**	**98.27**	**1.418.077.322.328.40**
4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**172.558.357.397.00**	**154.965.471.085.70**	**89.80**	**162.791.620.432.40**
4 . 1 . 1	Pajak Daerah	28.098.797.351.00	27.198.848.606.86	96.80	21.703.779.853.00
4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	9.167.860.000.00	7.349.423.360.50	80.17	5.470.983.860.00
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.483.046.458.00	8.283.046.458.00	97.64	6.961.082.639.00
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD yang Sah	126.808.653.588.00	112.134.152.660.34	88.43	128.655.774.080.40
4 . 2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.145.048.795.137.00**	**1.144.667.163.798.00**	**99.97**	**1.178.811.365.743.00**
4 . 2 . 1	*Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat*	*1.095.280.067.190.00*	*1.091.966.702.935.00*	*99.70*	*1.129.177.555.060.00*
4 . 2 . 1 . 1	Dana Perimbangan	906.905.239.190.00	903.591.874.935.00	99.63	907.453.944.060.00
4 . 2 . 1 . 2	Dana Insentif Daerah (DID)	0.00	0.00	0.00	29.706.794.000.00
4 . 2 . 1 . 5	Dana Desa	188.374.828.000.00	188.374.828.000.00	100.00	192.016.817.000.00
4 . 2 . 2	*Pendapatan Transfer Antar Daerah*	*49.768.727.947.00*	*52.700.460.863.00*	*105.89*	*49.633.810.683.00*
4 . 2 . 2 . 1	Pendapatan Bagi Hasil	49.768.727.947.00	52.700.460.863.00	105.89	49.633.810.683.00
4 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**16.745.942.682.00**	**11.574.054.612.00**	**69.12**	**76.474.336.153.00**
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	16.745.942.682.00	11.574.054.612.00	69.12	16.140.380.025.00
4 . 3 . 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.00	0.00	0.00	60.333.956.128.00
5	**BELANJA DAERAH**	**1.508.231.909.779.00**	**1.429.139.214.177.15**	**94.76**	**1.473.274.599.069.95**
5 . 1	**BELANJA OPERASI**	**989.374.692.503.00**	**910.494.986.690.52**	**92.03**	**918.034.972.259.75**
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	550.253.436.808.00	511.725.220.276.00	93.00	521.578.901.088.90
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	351.702.687.446.00	371.597.822.512.89	105.66	326.238.489.421.85
5. 1. 3	Belanja Bunga	4.150.478.000.00	4.387.554.738.63	105.71	0.00
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	80.628.699.063.00	16.935.055.043.00	21.00	68.565.971.013.00
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	2.639.391.186.00	5.849.334.120.00	221.62	1.651.610.736.00
5 . 2	**BELANJA MODAL**	**248.203.847.132.00**	**249.371.360.042.63**	**100.47**	**287.918.257.694.20**
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	1.194.894.342.00	216.405.558.00	18.11	5.032.098.143.00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.496.699.116.00	45.730.931.689.63	136.52	41.376.791.335.91
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.487.335.072.00	35.287.481.926.18	91.69	102.883.849.131.30
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	174.876.418.602.00	160.284.346.599.82	91.66	138.088.293.593.99
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	148.500.000.00	7.852.194.269.00	5.287.67	537.225.490.00
5 . 3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**14.322.919.900.00**	**12.942.417.200.00**	**90.36**	**10.126.560.516.00**
5 . 3 . 1	Belanja Tidak Terduga	14.322.919.900.00	12.942.417.200.00	90.36	10.126.560.516.00
5 . 4	**BELANJA TRANSFER**	**256.330.450.244.00**	**256.330.450.244.00**	**100.00**	**257.194.808.600.00**
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	3.299.290.744.00	3.299.290.744.00	100.00	0.00
5 . 4 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	253.031.159.500.00	253.031.159.500.00	100.00	257.194.808.600.00
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(173.878.814.563.00)**	**(117.932.524.681.45)**	**67.82**	**(55.197.276.741.55)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
6 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**192.336.463.258.00**	**193.830.810.519.93**	**100.78**	**238.451.801.575.30**
6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	171.934.953.658.00	171.934.953.658.30	100.00	96.583.610.774.30
6 . 1 . 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	20.401.509.600.00	18.895.856.861.63	92.62	141.868.190.801.00
6 . 1 . 6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0.00	3.000.000.000.00	0.00	0.00
6 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**18.457.648.695.00**	**12.816.709.884.61**	**69.44**	**11.319.571.175.45**
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal Daerah	3.051.648.695.00	2.999.994.336.61	98.31	7.536.977.814.00
6 . 2 . 3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh	15.406.000.000.00	9.816.715.548.00	63.72	3.782.593.361.45
	PEMBIAYAAN NETTO	**173.878.814.563.00**	**181.014.100.635.32**	**104.10**	**227.132.230.399.85**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**0.00**	**63.081.575.953.87**		**171.934.953.658.30**

Tarutung, 14 April 2023

BUPATI TAPANULI UTARA,

Drs. NIKSON NABABAN, M.Si

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2022	2021
Saldo Anggaran Lebih Awal	171.934.953.658.30	96.583.610.774.30
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	171.934.953.658.30	96.583.610.774.30
Sub Total	0.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	63.081.575.953.87	171.930.931.558.30
Sub Total	63.081.575.953.87	171.930.931.558.30
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0.00	0.00
Lain-lain	0.00	4.022.100.00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**63.081.575.953.87**	**171.934.953.658.30**

Tarutung, 14 April 2023

BUPATI TAPANULI UTARA,

Drs. NIKSON NABABAN, M.Si

NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	60.309.688.631.07	147.997.984.794.50
Kas di BUD	60.277.065.923.07	146.115.158.709.50
Kas di Bendahara FKTP	32.622.708.00	1.882.826.085.00
Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	953.864.00	5.391.500.00
Kas di BLUD	1.807.065.832.00	22.945.373.571.00
Kas di Bendahara Dana BOS	963.867.626.80	986.203.792.80
Kas Lainnya	292.283.044.00	260.224.003.00
Setara Kas	0.00	0.00
Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00
Piutang Pendapatan	27.027.618.947.13	34.763.356.747.13
Piutang Lainnya	3.157.221.638.21	3.174.729.249.29
Penyisihan Piutang	(7.456.601.141.35)	(5.335.679.731.15)
Beban Dibayar Dimuka	0.00	0.00
Persediaan	10.953.525.821.77	11.798.977.208.30
JUMLAH ASET LANCAR	97.055.624.263.63	216.596.561.134.87
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0.00	0.00
Investasi dalam Obligasi	0.00	0.00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0.00	0.00
Dana Bergulir	0.00	0.00
Deposito Jangka Panjang	0.00	0.00
Investasi Non Permanen Lainnya	3.522.788.739.00	3.522.788.739.00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	3.522.788.739.00	3.522.788.739.00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	78.168.569.700.61	81.624.056.573.00
Investasi Permanen Lainnya	0.00	0.00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	78.168.569.700.61	81.624.056.573.00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	81.691.358.439.61	85.146.845.312.00
ASET TETAP		
Tanah	848.962.288.284.00	825.123.244.227.00
Peralatan dan Mesin	422.020.062.030.93	379.857.751.686.78
Gedung dan Bangunan	772.619.497.916.17	742.136.090.397.87
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.690.503.644.433.49	1.515.761.562.332.62
Aset Tetap Lainnya	17.620.537.209.00	14.256.093.354.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.741.508.432.00	4.788.972.325.95
Akumulasi Penyusutan	(1.334.001.583.790.82)	(1.186.382.049.812.80)
JUMLAH ASET TETAP	2.420.465.954.514.77	2.295.541.664.511.42
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0.00	0.00
JUMLAH DANA CADANGAN	0.00	0.00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0.00	0.00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0.00	0.00
Aset Tidak Berwujud	610.419.681.00	737.051.408.28
Aset Lain-lain	73.063.381.537.91	63.915.900.124.00
JUMLAH ASET LAINNYA	73.673.801.218.91	64.652.951.532.28
JUMLAH ASET	**2.672.886.738.436.92**	**2.661.938.022.490.57**

URAIAN	2022	2021
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0.00	0.00
Utang Bunga	3.096.653.900.00	0.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	68.807.005.488.00	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	223.261.721.08	13.300.000.00
Utang Beban	12.030.110.712.00	13.208.212.422.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	876.420.521.63	210.161.451.56
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	85.033.452.342.71	13.431.673.873.56
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	316.683.731.749.43	374.523.858.969.80
Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	316.683.731.749.43	374.523.858.969.80
JUMLAH KEWAJIBAN	**401.717.184.092.14**	**387.955.532.843.36**
EKUITAS		
EKUITAS	2.271.169.554.344.78	2.273.982.489.647.21
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**2.672.886.738.436.92**	**2.661.938.022.490.57**

Tarutung, 14 April 2023

BUPATI TAPANULI UTARA,

Drs. NIKSON NABABAN, M.Si

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
7	**PENDAPATAN - LO**	**1.309.981.833.896.54**	**1.429.572.874.138.96**	**(119.591.040.242.42)**	**(8.37)**
7.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO**	**158.802.161.057.54**	**167.569.024.195.96**	**(8.766.863.138.42)**	**(5.23)**
7.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	28.345.184.989.78	23.131.800.214.00	5.213.384.775.78	22.54
7.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	7.488.029.060.50	5.609.373.007.88	1.878.656.052.62	33.49
7.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	8.284.679.405.56	6.961.082.639.00	1.323.596.766.56	19.01
7.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	114.684.267.601.70	131.866.768.335.08	(17.182.500.733.38)	(13.03)
7.2	**PENDAPATAN TRANSFER - LO**	**1.139.605.618.227.00**	**1.182.249.505.790.00**	**(42.643.887.563.00)**	**(3.61)**
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	1.098.699.662.968.00	1.129.177.555.060.00	(30.477.892.092.00)	(2.70)
7.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	40.905.955.259.00	53.071.950.730.00	(12.165.995.471.00)	(22.92)
7.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO**	**11.574.054.612.00**	**79.754.344.153.00**	**(68.180.289.541.00)**	**(85.49)**
7.3.1	Pendapatan Hibah - LO	11.574.054.612.00	19.420.388.025.00	(7.846.333.413.00)	(40.40)
7.3.2	Dana Darurat - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0.00	60.333.956.128.00	(60.333.956.128.00)	(100.00)
8	**BEBAN**	**1.340.099.775.941.26**	**1.325.044.792.002.04**	**15.054.983.939.22**	**1.14**
8.1.1	Beban Pegawai - LO	511.652.023.203.00	521.558.550.570.90	(9.906.527.367.90)	(1.90)
8.1.2	Beban Persediaan	112.148.713.906.27	107.333.187.840.31	4.815.526.065.96	4.49
8.1.2	Beban Jasa	212.198.715.972.15	194.265.528.245.87	17.933.187.726.28	9.23
8.1.2	Beban Pemeliharaan	3.825.649.066.00	3.351.002.188.00	474.646.878.00	14.16
8.1.2	Beban Perjalanan Dinas	42.726.798.318.00	34.364.826.073.00	8.361.972.245.00	24.33
8.1.3	Beban Bunga	4.387.554.738.63	0.00	4.387.554.738.63	#DIV/0!
8.1.4	Beban Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.5	Beban Hibah	17.373.547.043.00	68.565.971.013.00	(51.192.423.970.00)	(74.66)
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	5.849.334.120.00	1.651.610.736.00	4.197.723.384.00	254.16
8.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	152.400.476.058.38	135.362.853.418.06	17.037.622.640.32	12.59
8.1.8	Beban Penyisihan Piutang	2.120.921.410.20	1.270.633.316.97	850.288.093.23	66.92
8.1.9	Beban Lain-lain	19.085.591.861.63	125.819.999.93	18.959.771.861.70	0.00
8.2.1	Beban Transfer	256.330.450.244.00	257.194.808.600.00	(864.358.356.00)	(0.34)
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	**(30.117.942.044.72)**	**104.528.082.136.92**	**(134.646.024.181.64)**	**(128.81)**
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.753.212.640.37	87.760.063.00	5.665.452.577.37	6.455.62
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**(5.753.212.640.37)**	**(87.760.063.00)**	**(5.665.452.577.37)**	**6.455.62**
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	**(35.871.154.685.09)**	**104.440.322.073.92**	**(140.311.476.759.01)**	**(134.35)**
	POS LUAR BIASA				
7.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.1	Beban Luar Biasa	12.942.417.200.00	10.126.560.516.00	2.815.856.684.00	100.00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	**(12.942.417.200.00)**	**(10.126.560.516.00)**	**(2.815.856.684.00)**	**100.00**
	SURPLUS/DEFISIT-LO	**(48.813.571.885.09)**	**94.313.761.557.92**	**(143.127.333.443.01)**	**(151.76)**

Tarutung, 14 April 2023

BUPATI TAPANULI UTARA,

Drs. NIKSON NABABAN, M.Si

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
LAPORAN ARUS KAS
Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	27.198.848.606.86	21.703.779.853.00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	7.349.423.360.50	5.470.983.860.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	8.283.046.458.00	6.961.082.639.00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	112.128.352.660.34	128.655.774.080.40
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.091.966.702.935.00	1.129.177.555.060.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	52.700.460.863.00	49.633.810.683.00
Pendapatan Hibah - LRA	11.574.054.612.00	16.140.380.025.00
Pendapatan Lainnya - LRA	0.00	60.333.956.128.00
Jumlah Arus Kas Masuk	*1.311.200.889.495.70*	*1.418.077.322.328.40*
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	511.725.220.276.00	521.578.901.088.90
Belanja Barang dan Jasa	371.597.822.512.89	326.238.489.421.85
Belanja Bunga	4.387.554.738.63	0.00
Belanja Hibah	16.935.055.043.00	68.565.971.013.00
Belanja Bantuan Sosial	5.849.334.120.00	1.651.610.736.00
Belanja Tak Terduga	12.942.417.200.00	10.126.560.516.00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	256.330.450.244.00	257.194.808.600.00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang	0.00	3.782.593.361.45
Jumlah Arus Kas Keluar	*1.179.767.854.134.52*	*1.189.138.934.737.20*
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**131.433.035.361.18**	**228.938.387.591.20**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Kas Masuk		
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA	5.800.000.00	0.00
Jumlah Arus Kas Masuk	*5.800.000.00*	*0.00*
Arus Kas Keluar		
Belanja Modal Tanah	216.405.558.00	5.032.098.143.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.730.931.689.63	41.376.791.335.91
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.287.481.926.18	102.883.849.131.30
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	160.284.346.599.82	138.088.293.593.99
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.852.194.269.00	537.225.490.00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.999.994.336.61	7.536.977.814.00
Jumlah Arus Kas Keluar	*252.371.354.379.24*	*295.455.235.508.20*
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(252.365.554.379.24)**	**(295.455.235.508.20)**
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Kas Masuk		
Pinjaman Dalam Negeri	18.895.856.861.63	141.868.190.801.00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya	3.000.000.000.00	0.00
Jumlah Arus Kas Masuk	*21.895.856.861.63*	*141.868.190.801.00*
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga keuangan Bukan Bank	9.816.715.548.00	0.00
Jumlah Arus Kas Keluar	*9.816.715.548.00*	*0.00*
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**12.079.141.313.63**	**141.868.190.801.00**
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	83.315.209.143.00	38.697.521.641.41
Jumlah Arus Kas Masuk	*83.315.209.143.00*	*38.697.521.641.41*
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	83.315.209.143.00	38.697.521.641.41
Koreksi SiLPA	0.00	98.750.824.00
Jumlah Arus Kas Keluar	*83.315.209.143.00*	*38.796.272.465.41*
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**0.00**	**(98.750.824.00)**

URAIAN	2022	2021
Kenaikan / (Penurunan) Kas	**(108.853.377.704,43)**	**75.252.592.060.00**
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerin	**171.934.953.658.30**	**96.682.361.598.30**
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerir	**63.081.575.953.87**	**171.934.953.658.30**
Kas di BUD	60.277.065.923.07	146.115.158.709.50
Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	953.864.00	5.391.500.00
Kas di BLUD	1.807.065.832.00	22.945.373.571.00
Kas di Bendahara FKTP	32.622.708.00	1.882.826.085.00
Kas di Bendahara Dana BOS	963.867.626.80	986.203.792.80
Kas Lainnya	292.283.044.00	260.224.003.00
Setara Kas	0.00	0.00
Beban Dibayar Dimuka	0.00	0.00
Saldo Akhir Kas	**63.373.858.997.87**	**172.195.177.661.30**

Tarutung, 14 April 2023
BUPATI TAPANULI UTARA,

Drs. NIKSON NABABAN, M.Si

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	2.273.982.489.647.21	2.119.645.522.166.86
SURPLUS/DEFISIT-LO	(48.813.571.885.09)	94.313.761.557.92
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0.00	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0.00	0.00
Koreksi ekuitas lainnya	46.000.636.582.66	60.023.205.922.43
EKUITAS AKHIR	**2.271.169.554.344.78**	**2.273.982.489.647.21**

Tarutung, 14 April 2023

BUPATI TAPANULI UTARA,

Drs. NIKSON NABABAN, M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam Target APBD tahun 2022.

Sedangkan dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam menyusun dan melaksanakan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Daerah sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara selaku entitas pelaporan

mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1) Akuntabilitas

   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

   Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

   Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pemakai (*user*) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 yang disusun berdasarkan SAP Berbasis Akrual terdiri atas:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Pendapatan;
b. Belanja;
c. Transfer;
d. Surplus/defisit;
e. Pembiayaan;
f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL secara komparatif dengan periode sebelumnya terdiri dari:

a. Saldo Anggaran Lebih awal;
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan (SiLPA/SiKPA);
d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
e. Lain-lain;
f. Saldo Anggaran Lebih akhir.

Disamping itu, pemerintah daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban entitas pada tanggal laporan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

a. Kas dan setara kas;
b. Investasi jangka pendek;
c. Piutang pajak dan bukan pajak;
d. Persediaan;
e. Investasi jangka panjang;
f. Aset tetap;
g. Aset lainnya;
h. Kewajiban jangka pendek;
i. Kewajiban jangka panjang;
j. Ekuitas.

4) Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

a. Pendapatan LO dari kegiatan operasional;
b. Beban dari kegiatan operasional;
c. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional;
d. Pos luar biasa;
e. Surplus/defisit LO.

5) Laporan Arus Kas (LAK)

yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan:

a. Aktifitas operasional;
b. Aktifitas investasi aset non keuangan;
c. Aktifitas pembiayaan;
d. Aktifitas transaksi non anggaran;
e. Saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pada periode tertentu.

6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan pos-pos:

a. Ekuitas awal;
b. Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan;
c. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan runtutan sebagai berikut:

a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target, Undang-Undang/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.

c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 5 Tambahan lembaran negara nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022;
30. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara;
31. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
32. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

33. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
34. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
35. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
36. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Kedua Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
37. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 7 (tujuh) Bab:

Bab I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

2.2. Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah

2.3. Kebijakan Keuangan

2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target

Bab IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Bab V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2. Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

5.3. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Neraca

5.4. Rincian dan Penjelasan Laporan Operasional (LO)

5.5. Rincian dan Penjelasan Laporan Arus Kas (LAK)

5.6. Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Informasi Tambahan Penyajian Laporan Keuangan

6.2. Letak Geografis

6.3. Visi dan Misi

6.4. Organisasi dan Personalia

6.5. Informasi Tambahan Penyajian Laporan Keuangan

Bab VII PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi Makro adalah studi tentang ekonomi yang menjelaskan perubahan ekonomi yang dapat mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijakan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena sangat akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada Tahun 2022 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Ekonomi makro daerah dapat menjadi reflektor kinerja makro perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan secara umum di daerah tersebut, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Pandemi Covid-19 merupakan *unprecedented shock* yang mengubah secara signifikan pola interaksi antar manusia, sehingga berimplikasi terhadap perubahan pola aktivitas ekonomi, sosial, serta pelayanan publik.

Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12/SKB/TU/VIII//2022 dan Nomor 05/PB/DPRD-TU/2022 tanggal 05 Agustus 2022 tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 serta Nomor 13/SKB/TU/VIII/2022 dan Nomor 06/PB/DPRD-TU/2022 tanggal 05 Agustus 2022 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022, maka Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 adalah:

1. Pemulihan ekonomi;
2. Peningkatan ketahanan pangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Meningkatkan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
5. Meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.

Dalam rangka penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, maka asumsi-asumsi dasar sebagai indikator Makro Ekonomi Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 yang digunakan seperti pada tabel 2.1 di bawah ini, namun untuk data terkait dengan PDRB Harga Berlaku, PDRB Harga Konstan dan PDRB Perkapita atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2022 yang disajikan dalam penyusunan LKPD ini merupakan angka sementara.

Tabel 2.1 Indikator Makro Ekonomi Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara

No	Uraian	2022	2021
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	318.424	315.222
2	PDRB Harga Berlaku (Rp milyar)	9.645,64	8.800,08
3	PDRB Harga Konstan (Rp milyar) tahun dasar 2010	6.315,72	6.058,35
4	PDRB Perkapita ADHB (Rp Juta)	30.291,79	27.9147,07
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,25	3,54
6	Tingkat Kemiskinan (%)	8,93	9,72
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,07	1,54
8	Angka Partisipasi Sekolah:		
	- 7 sampai dengan 12 Tahun (%)	99,29	99,41
	- 13 sampai dengan 15 Tahun (%)	99,35	89,22
	- 16 sampai dengan 18 Tahun (%)	87,61	90,55
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	74,14	73,36

Sumber : Diolah dari Data BPS Provinsi Sumatera Utara dan BPS Kabupaten Tapanuli Utara.

Selama tahun 2022 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Utara maupun Kabupaten Tapanuli Utara telah mengalami peningkatan walaupun lajunya tidaklah sangat signifikan hal ini diakibatkan masih fokusnya Pemerintah untuk mengatasi wabah Covid-19 yang mengakibatkan adanya kebijakan pembatasan sosial di berbagai wilayah di Indonesia, sehingga kegiatan ekonomi menjadi sangat terbatas. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara mengalami Peningkatan dari tahun 2021 sebesar 3,54 menjadi 4,25 pada tahun 2022. Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2022 fokus pada pemulihan ekonomi nasional di daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 tidak terlepas dari adanya Pinjaman Daerah untuk mendukung PEN Daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Persero, sehingga Kabupaten Tapanuli Utara memiliki daya tahan terhadap aspek perubahan ekonomi global kondisi Makro maupun Mikro Ekonomi yang berpengaruh pada pelaksanaan program dan kegiatan.

a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan relatif tidak begitu tinggi. Jumlah penduduk pada tahun 2022 bertambah sebanyak 3.202 jiwa dari Tahun 2021 menjadi 318.424 jiwa atau meningkat sebesar 1,02% sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2 Kondisi Pertumbuhan Penduduk

Uraian	Kondisi Tahunan	
	2022	2021
- Jumlah Penduduk	318.424	315.222
- Luas Wilayah	3.793,71 km²	3.793,71 km²
- Kepadatan Penduduk	83,94 jiwa/ km²	83,09 jiwa/ km²

Sumber : Diolah dari Data BPS Kabupaten Tapanuli Utara

b. Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator dalam melihat keberhasilan pembangunan di suatu daerah, dimana pertumbuhan PDRB suatu daerah merupakan gambaran pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dimana perhitungannya didasarkan pada 2 (dua) pola yaitu:

1) PDRB atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) dihitung berdasarkan harga barang dan jasa pada tahun berkenaan/ berjalan. Informasi yang dapat diperoleh antara lain kinerja ekonomi, struktur ekonomi dan pendapatan per-kapita penduduk.

2) PDRB atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK) dihitung berdasarkan harga barang dan jasa pada tahun tertentu (dasar). Informasi yang diperoleh antara lain kinerja ekonomi riil, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita riil suatu daerah.

Secara keseluruhan struktur ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Besaran Kontribusi Tiap Sektor/Lapangan Usaha

Sektor/Lapangan Usaha	Besaran Kontribusi 2021	Besaran Kontribusi 2022
Pertanian dan Kehutanan	43,91	44,91
Pertambangan dan Penggalian	0,07	0,07
Industri Pengolahan	2,31	2,25
Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,09
Pengadaan Air, Pengelolaan	0,10	0,1
Konstruksi	14,19	14,24
Perdagangan Besar dan Eceran	15,84	15,79
Transportasi dan Pergudangan	4,80	4,87
Penyediaan Akomodasi dan Makan	2,36	2,34
Informasi dan Komunikasi	0,82	0,78
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,59	1,57
Real Estate	2,32	2,25

Sektor/Lapangan Usaha	Besaran Kontribusi 2021	Besaran Kontribusi 2022
Jasa Perusahaan	0,31	0,3
Administrasi Pemerintahan	8,88	8,12
Jasa Pendidikan	1,56	1,5
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,70	0,68
Jasa lainnya	0,13	0,13
Jumlah	**100,00**	**100,00**

Sumber : Data BPS Kabupaten Tapanuli Utara.

Selama periode 2021-2022, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dan konstan terus mengalami peningkatan seperti terlihat dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Perkembangan PDRB

URAIAN	TAHUN		KENAIKAN PERTUMBUHAN (%)
	2021	2022	2022
> PDRB-ADHB			
PDRB (milyar)	8.800,08	9.645,64	9,61
Penduduk pertengahan tahun	315.222	318.424	1,02
PDRB Per Kapita	27.917,07	30.291,79	8,51
> PDRB-ADHK			
PDRB (milyar)	6.058,35	6.315,72	4,25
Penduduk pertengahan tahun	315.222	318.424	1,02
PDRB Per Kapita	19.219,31	19.834,31	3,20

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara.

c. Perkembangan Investasi

Perkembangan investasi dalam Tahun 2022 belum banyak mengalami peningkatan dari tahun lalu, hal ini sangat dipengaruhi masih adanya bencana wabah pandemi Covid-19 yang memaksa sektor investasi tidak dapat memberi kontribusi baik secara nasional maupun tingkat daerah dalam pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 dan perkiraan ke tahun berikutnya terlihat bahwa kegiatan investasi masih cenderung bersumber dari sektor publik, baik melalui APBD Kabupaten Tapanuli Utara, APBD Provinsi Sumatera Utara maupun APBN.

2.2. Perubahan APBD dan Penjelasannya

Secara umum P-APBD Tahun Anggaran 2022 meningkat dari APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini:

Tabel 2.5 Perubahan APBD TA 2022

No	Uraian	APBD TA 2022	P-APBD TA 2022
1.	Pendapatan	1.300.195.776.206,00	1.334.353.095.216,00
2.	Belanja	1.369.870.099.393,00	1.508.231.909.779,00
3.	Surplus/(Defisit)	(69.674.323.187,00)	(173.878.814.563,00)
4.	Pembiayaan:		
	a. Penerimaan	93.080.323.187,00	192.336.463.258,00
	b. Pengeluaran	23.406.000.000,00	18.457.648.695,00
5.	Pembiayaan netto	69.674.323.187,00	173.878.814.563,00
6.	SILPA setelah Perubahan	0,00	0,00

Sumber : BKAD Kabupaten Tapanuli Utara.

1) Perubahan Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah pada P-APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 meningkat 2,62% dari Rp1.300.195.776.206,00 menjadi Rp1.334.353.095.216,00 atau naik sebesar Rp34.157.319.010,00. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, bentuk dan susunan Pendapatan Daerah pada P-APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Perbandingan anggaran pendapatan dalam APBD TA. 2022 dengan rencana pendapatan pada P-APBD Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.6 di bawah ini:

Tabel 2.6 Perubahan Pendapatan Daerah TA 2022

No.	Uraian	APBD 2022	P-APBD 2022	Bertambah/ (Berkurang)
1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**140.441.969.888,00**	**172.558.357.397,00**	**32.116.387.509,00**
a.	Pajak Daerah	27.091.047.443,00	28.098.797.351,00	1.007.749.908,00
b.	Retribusi Daerah	6.901.860.000,00	9.167.860.000,00	2.266.000.000,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.607.286.366,00	8.483.046.458,00	(124.239.908,00)
d.	Lain-lain PAD yang sah	97.841.776.079,00	126.808.653.588,00	28.966.877.509,00
2.	**Pendapatan Transfer**	**1.143.007.863.636,00**	**1.145.048.795.137,00**	**2.040.931.501,00**

No.	Uraian	APBD 2022	P-APBD 2022	Bertambah/ (Berkurang)
a.	Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat	1.095.501.013.000,00	1.095.280.067.190,00	(220.945.810,00)
b.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	47.506.850.636,00	49.768.727.947,00	2.261.877.311,00
3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**16.745.942.682,00**	**16.745.942.682,00**	**0,00**
a.	Pendapatan Hibah	16.745.942.682,00	16.745.942.682,00	0,00
	Jumlah Pendapatan (1+2+3)	**1.300.195.776.206,00**	**1.334.353.095.216,00**	**34.157.319.010,00**

Sumber : BKAD Kabupaten Tapanuli Utara.

2) Perubahan Belanja Daerah.

Jumlah anggaran belanja daerah pada P-APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 meningkat 10,10% dari Rp1.369.870.099.393,00 menjadi Rp1.508.231.909.779,00 bertambah Rp138.361.810.386,00. Jumlah belanja operasi pada P-APBD meningkat 1,93% dari Rp970.630.303.950,00 menjadi Rp989.374.692.503,00 atau naik sebesar Rp18.744.388.553,00. Belanja modal pada P-APBD meningkat 88,91% dari Rp131.389.345.199,00 menjadi Rp248.203.847.132,00 atau bertambah sebesar Rp116.814.501.933,00. Belanja tidak terduga pada P-APBD meningkat 24,33% dari Rp11.520.000.000 menjadi Rp14.322.919.900,00 atau bertambah sebesar Rp2.802.919.900,00. Untuk lebih jelasnya perbandingan penggunaan anggaran belanja operasi dan belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7 Perubahan Belanja Daerah TA 2022

URAIAN		APBD 2022	P-APBD 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1.	**Belanja Operasi**	**970.630.303.950,00**	**989.374.692.503,00**	**18.744.388.553,00**
a.	Belanja Pegawai	578.819.409.116,00	550.253.436.808,00	(28.565.972.308,00)
b.	Belanja Barang dan Jasa	307.596.056.585,00	351.702.687.446,00	44.106.630.861,00
c.	Belanja Bunga	4.150.478.000,00	4.150.478.000,00	0,00
d.	Belanja Hibah	78.536.854.063,00	80.628.699.063,00	2.091.845.000,00
e.	Belanja Bantuan Sosial	1.527.506.186,00	2.639.391.186,00	1.111.885.000,00
Jumlah Belanja Operasi				
2.	**Belanja Modal**	**131.389.345.199,00**	**248.203.847.132,00**	**116.814.501.933,00**
a.	Belanja Modal Tanah	1.461.929.000,00	1.194.894.342,00	(267.034.658,00)
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.131.727.103,00	36.496.699.116,00	7.364.972.013,00
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.073.288.373,00	35.487.335.072,00	8.414.046.699,00

URAIAN		APBD 2022	P-APBD 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	73.660.900.723,00	174.876.418.602,00	101.215.517.879,00
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	61.500.000,00	148.500.000,00	87.000.000,00
Jumlah Belanja Modal				
3.	**Belanja Tidak Terduga**	**11.520.000.000**	**14.322.919.900,00**	**2.802.919.900,00**
a.	Belanja Tidak Terduga	11.520.000.000	14.322.919.900,00	2.802.919.900,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga				
4.	**Belanja Transfer**	**256.330.450.244,00**	**256.330.450.244,00**	**0,00**
a.	Belanja Bagi Hasil	3.299.290.744,00	3.299.290.744,00	0,00
b.	Belanja Bantuan Keuangan	253.031.159.500,00	253.031.159.500,00	0,00
Jumlah Belanja Transfer		**1.369.870.099.393,00**	**1.508.231.909.779,00**	**138.361.810.386,00**

Sumber : BKAD Kabupaten Tapanuli Utara

3) Perubahan Pembiayaan

Jumlah anggaran pembiayaan netto pada P-APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 meningkat 149,56% dari Rp69.674.323.187,00 menjadi Rp173.878.814.563,00 bertambah Rp104.204.491.376,00.

Jumlah Penerimaan Pembiayaan pada P-APBD meningkat 106,63% dari Rp93.080.323.187,00 menjadi Rp192.336.463.258,00 atau naik sebesar Rp99.256.140.071,00.

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan pada P-APBD berkurang 21,14% dari Rp23.406.000.000,00 menjadi Rp18.457.648.695,00 atau berkurang sebesar Rp4.948.351.305,00.

Dalam rangka pemenuhan prasarana dan alat kesehatan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan memaksimalkan realisasi anggaran, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menerbitkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dimana Pendapatan menjadi sebesar Rp1.351.212.677.216,00 bertambah sebesar Rp16.541.977.000,00 dari semula sebesar Rp1.334.670.700.216,00. Belanja menjadi sebesar Rp1.525.091.191.779,00 bertambah sebesar Rp16.541.977.000,00 dari semula sebesar Rp1.508.549.514.779.

2.3. Kebijakan Keuangan

Dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, maka Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah menetapkan kebijakan keuangan yang dituangkan dalam APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

a) Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

- Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

- Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi.
- Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam Peraturan Daerah.
- Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
- Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia.

- Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 sepanjang peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 belum ditetapkan.
- Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan:
  (1) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
  (2) menghambat mobilitas penduduk;
  (3) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
  (4) kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.
- Hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum di atas wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.
- Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

b) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan:

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- hasil kerja sama daerah;
- jasa giro;
- hasil pengelolaan dana bergulir;
- pendapatan bunga;
- penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- pendapatan denda pajak daerah;
- Pendapatan denda retribusi daerah;
- pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- pendapatan dari pengembalian;
- pendapatan dari BLUD; dan
- pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

a) Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

(1) Dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

(a) Dana Transfer Umum

Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

- Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan, negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018. Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBHCHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT

menurut provinsi /kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

- Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

  Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

  ✓ DBH-Kehutanan;

  ✓ DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;

  ✓ DBH-Pertambangan Minyak Bumi;

  ✓ DBH-Pertambangan Gas Bumi;

  ✓ DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan

  ✓ DBH-Perikanan.

  dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau

ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2021, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

b) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk membantu mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan:

a. DAK Fisik; dan

b. DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai

alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

(2) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

(3) Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Penyaluran Dana Otonomi Khusus Pemerintah Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

(4) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah

Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

b) Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

(1) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2022, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota

(2) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota; dan
- bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung

dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

a) Pendapatan hibah;

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

b) Dana darurat;

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun

Anggaran 2022 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

c) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Penganggaran Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:

- Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.
- Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Tambahan Infrastruktur dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

d) Bagi daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi pengusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi. Penganggaran Bonus Produksi Panas Bumi berdasarkan penetapan yang diterbitkan Kementerian Energi Sumberdaya Mineral, sesuai dengan hasil rekonsiliasi antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, PT SOL dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

a. Urusan pemerintahan wajib

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

1) Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar

Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:

a) pendidikan;

b) kesehatan;

c) pekerjaan umum dan penataan ruang;

d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

e) ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan

f) sosial.

2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar

Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:

a) tenaga kerja;

b) pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;

c) pangan;

d) pertanahan;
e) lingkungan hidup;
f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i) perhubungan;
j) komunikasi dan informatika;
k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l) penanaman modal;
m) kepemudaan dan olah raga;
n) statistik;
o) persandian;
p) kebudayaan;
q) perpustakaan; dan
r) kearsipan.

b. Urusan pemerintahan pilihan

Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:

1) kelautan dan perikanan;
2) pariwisata;
3) pertanian;
4) kehutanan;
5) energi dan sumber daya mineral;
6) Perdagangan;
7) perindustrian; dan
8) transmigrasi.

c. Unsur pendukung, meliputi:

1) sekretariat Daerah; dan
2) sekretariat DPRD.

d. Unsur penunjang, meliputi:

1) perencanaan;
2) keuangan;
3) kepegawaian;

4) pendidikan dan pelatihan;

5) penelitian dan pengembangan;

6) penghubung; dan

7) pengelolaan perbatasan daerah.

e. Unsur pengawas yaitu inspektorat;

f. Unsur kewilayahan, meliputi:

g. Unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan

h. Unsur kekhususan.

Selanjutnya, dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Standar harga satuan regional tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, Pemerintah Daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut. Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja daerah diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

a) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;

b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan

c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Penganggaran belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.

b) Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun.

c) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.

d) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2022.

e) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

i) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

j) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan

kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Penganggaran honorarium memperhatikan penetapan honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (SHSR). Kepala daerah dapat menetapkan standar honorarium selain SHSR, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dengan mempedomani ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.

k) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

2) Belanja Barang dan Jasa Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment)*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka

mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.

c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (*UHC*), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan iuran bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda. Kategori skema ganda, yaitu:

   (1) Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

   (2) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

   Kategori bukan skema ganda, yaitu:

   (1) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

   (2) Pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional.

(3) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya.

(4) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

(5) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:

(a) Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;

(b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;

(c) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;

(d) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

f) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:

(1) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

g) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:

(1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;

(2) pimpinan dan anggota DPRD; serta

(3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; diprioritaskan pelaksanaannya pada

masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi. Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan infomasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19.

h) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, yaitu:

(1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas didalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri, yaitu:

(1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri;

(2) Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.

l) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya *riil* atau *lumpsum*, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

(1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.

(2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

(3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

(4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

(5) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19). Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

m) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

n) Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam bentuk:

1) hadiah yang bersifat perlombaan;

2) penghargaan atas suatu prestasi;

3) beasiswa kepada masyarakat;

4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

5) pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit

SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

4) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2022 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah. Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh *(full cost recovery),* Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia serta Partai Politik yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan

sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

(1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

(2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;

(3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

(a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

(b) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan

(5) memenuhi persyaratan penerima hibah. Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3) batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
2) Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
   a) belanja modal tanah; belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
   b) belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
   c) belanja modal bangunan dan gedung; belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e) Belanja modal aset tetap lainnya; Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f) Belanja modal aset tidak berwujud; Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

1) bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

1) keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) keperluan mendesak; dan/atau
3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

2) memanfaatkan kas yang tersedia. Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota. Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);

(2) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);

(3) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan

(4) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen). Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota

dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD. Selanjutnya, penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2022. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dapat dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil penerimaan pajak daerah provinsi. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2021, disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2021, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2022. Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;

b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;

c) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;

d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau

e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa. Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus.

Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen)

dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah kabupaten/kota menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

3. Surplus dan Defisit

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus atau defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran dana transfer umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

1) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional

dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari:

a) pelampauan penerimaan PAD;

b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;

c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;

d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;

e) penghematan belanja;

f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau

g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan. Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman

daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman bersumber dari:

a) Pemerintah Pusat;

b) Pemerintah Daerah lain;

c) Lembaga Keuangan Bank;

d) Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan

e) Masyarakat (obligasi daerah),

harus mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan sebagai berikut:

a) persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang;

b) salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;

c) kerangka acuan kegiatan;

d) RPJMD;

e) RKPD;

f) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;

g) APBD tahun anggaran berjalan;

h) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan;

i) Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;

j) Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;

k) Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman/DSCR; dan

l) Perbandingan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.

Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.

Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan:

a) menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;

b) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau

c) memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan Kepala Daerah, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Kepala Daerah.

5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya

merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

2) Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

   Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

   a) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan penyertaan modal daerah tersebut, Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal daerah.

      Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

      Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi

jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih. Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

d) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's* (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai

SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

3) Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

   Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:

   a) DAK;

   b) pinjaman daerah; dan

   c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi, untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.

   Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dana cadangan. Peraturan Daerah tersebut paling sedikit memuat:

   a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

   b) program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

   c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;

   d) sumber dana cadangan; dan

   e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

   Selanjutnya, Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

4) Pemberian Pinjaman Daerah Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam

Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan

a. Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 bersaldo nihil.

b. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

c. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam mengemban amanat untuk mencapai visi yakni Mewujudkan Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan, Lumbung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Daerah Wisata dimana misinya direpresentasikan dalam bentuk indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Pencapaian kinerja makro suatu daerah pada umumnya dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita dan tingkat penurunan angka kemiskinan. Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 dalam bidang pendidikan dan kesehatan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

a. Pendidikan

Selama periode Tahun 2020-2022 indikator kinerja pendidikan mengalami kondisi fluktuasi pencapaian sebagaimana yang ditargetkan dalam standar pelayanan minimal, dengan kondisi seperti pada tabel 2.8 s/d tabel 2.9 di bawah ini:

1) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Tabel 2.8 Angka Partisipasi Kasar

No	Indikator Kinerja	Tahun / %		
		2020	2021	2022
1	SD/MI/Paket A	113,17	112,06	94,89
2	SMP/MTS/Paket B	95,67	91,92	95,61
3	SMA/MA/SMK/Paket C	91,91	95,67	-

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara.

2) Angka Partisipasi Murni (APM)

Tabel 2.9 Angka Partisipasi Murni

No	Indikator Kinerja	Tahun / %		
		2020	2021	2022
1	SD/MI/Paket A	99,40	99,41	93,07
2	SMP/MTS/Paket B	88,80	89,22	90,53
3	SMA/MA/SMK/Paket C	78,89	90,55	-

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara

b. Kesehatan

Pencapaian kinerja derajat kesehatan masyarakat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terutama angka mortalitas selama periode 2020-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Kesehatan

No	Indikator Kinerja	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Angka Kematian Bayi (Kasus)	50/1000 KH	34/1000 KH	15/1000 KH
2	Angka Kematian Balita (Kasus)	2/1000 KH	1/1000 KH	5/1000 KH
3	Angka Kematian Ibu Melahirkan (Kasus)	8/100000 KH	5/100000 KH	4/100000 KH
4	Angka Harapan Hidup	68,63	68,76	69,16

Sumber: BPS Kab. Tapanuli Utara dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara.

Indikator kinerja kesehatan Tahun 2022 secara umum mengalami perbaikan walaupun angka kematian Balita mengalami peningkatan dari 1 kasus pada Tahun 2021 menjadi 5 kasus di Tahun 2022. Perbaikan tersebut antara lain menurunnya kasus kematian bayi dari 34 kasus pada Tahun 2021 menjadi 15 kasus dalam Tahun 2022 sementara angka kematian Ibu melahirkan juga mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 4 kematian ibu melahirkan dibandingkan 5 kasus yang dilaporkan pada tahun 2021. Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara juga meningkat dari 68,76 pada tahun 2021 menjadi 69,16 pada tahun 2022. Hal ini dapat dicapai dengan terealisasinya berbagai program antara lain:

- Adanya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Posyandu berupa pembangunan baru dan rehabilitasi gedung kesehatan serta pengadaan alat-alat kesehatan;
- Peningkatan upaya promosi kesehatan baik melalui penyuluhan dan pengadaan poster-poster kesehatan;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan melalui pembinaan, pelatihan di tingkat Kabupaten dan Provinsi, peningkatan strata pendidikan petugas kesehatan melalui pemberian tugas belajar dan izin belajar;

- Meningkatnya kerja sama yang baik antar lintas sektor dengan tim penggerak PKK.

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam mewujudkan *good governance*. Sejalan dengan upaya perwujudan otonomi daerah dan *good governance*, maka tepat untuk memperhatikan masalah akuntabilitas. Dalam konteks birokrasi pemerintah akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelakasanan misi instansi yang bersangkutan. Manajemen suatu organisasi apapun dapat dikatakan akuntabel apabila dalam pelaksanaan kegiatannya telah menentukan tujuan (*goal*) yang tepat, mengembangkan standar yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan, merupakan pemakaian standar serta mengembangkan standar organisasi dan operasi secara efektif dan efisien.

Oleh karena itu hakekat otonomi daerah harus tercermin dalam pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, partisipatif dan bertanggungjawaban dan pengawasan daerah, keberhasilan pencapaian target kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara masih terbatas pada sumber dana *(input)* dan keluaran *(output)* belum dapat menilai sampai dengan hasil *(outcome)*. Penilaian capaian efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan belum dapat dilakukan mengingat belum dibangunnya sistem pengukuran data kinerja dan dibuatnya Standar Analisis Belanja (SAB) terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Standar Analisa Belanja (SAB) merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBN/APBD dengan pendekatan kinerja. SAB adalah standar atau pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Kementerian/Lembaga/SKPD dalam satu tahun anggaran.

Penilaian terhadap kewajaran beban kerja usulan program atau kegiatan dikaitkan dengan kebijakan anggaran, komponen dan tingkat pelayanan yang akan dicapai, jangka waktu pelaksanaannya, serta kapasitas satuan kerja untuk melaksanakannya, sehingga penerapan SAB pada dasarnya akan memberikan manfaat antara lain: (1) mendorong setiap instansi untuk lebih selektif dalam merencanakan program dan atau kegiatannya, (2) menghindari adanya belanja yang kurang efektif dalam upaya pencapaian kinerja, (3) mengurangi tumpang tindih belanja dalam kegiatan investasi dan non investasi.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berupa realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

3.1.1. Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.311.206.689.495.70 atau 98,27% dari target sebesar Rp1.334.353.095.216,00. Rincian realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dalam Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan TA 2022

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
PENDAPATAN DAERAH	**1.334.353.095.216,00**	**1.311.206.689.495.70**	**98,27**	**1.418.077.300.228,40**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**172.558.357.397,00**	**154.965.471.085.70**	**89,80**	**162.791.598.332,40**
- Pendapatan Pajak Daerah	28.098.797.351,00	27.198.848.606,86	96,80	21.703.779.853,00
- Pendapatan Retribusi Daerah	9.167.860.000,00	7.349.423.360,50	80,17	5.470.983.860,00
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -	8.483.046.458,00	8.283.046.458,00	97,64	6.961.082.639,00
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	126.808.653.588,00	112.134.152.660.34	88,43	128.655.751.980,40
PENDAPATAN TRANSFER	**1.145.048.795.137,00**	**1.144.667.163.798,00**	**99,97**	**1.178.811.365.743,00**
- Dana Perimbangan	906.905.239.190,00	903.591.874.935,00	99,63	907.453.944.060,00
- Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	29.706.794.000,00
- Dana Desa	188.374.828.000,00	188.374.828.000,00	100,00	192.016.817.000,00
- Pendapatan Bagi Hasil	47.268.727.947,00	50.229.017.663,00	106,26	49.633.810.683,00
- Bantuan Keuangan	2.500.000.000,00	2.471.443.200,00	98,86	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**16.745.942.682,00**	**11.574.054.612,00**	**69,12**	**76.474.336.153,00**
- Pendapatan Hibah	16.745.942.682,00	11.574.054.612,00	69,12	16.140.380.025,00
- Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Peundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	60.333.956.128,00

Sumber: Diolah dari data BKAD Kabupaten Tapanuli Utara.

3.1.2. Realisasi Belanja Daerah

Realisasi belanja daerah pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.429.139.214.177.15 atau mencapai 94,76% dari anggaran sebesar Rp1.508.231.909.779,00. Rincian lebih lanjut mengenai realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Rincian Realisasi Anggaran Belanja TA 2022

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
BELANJA	**1.508.231.909.779,00**	**1.429.139.214.177,15**	**94,76**	**1.473.274.599.069,95**
BELANJA OPERASI	**989.374.692.503,00**	**910.494.986.690,52**	**92,03**	**918.034.972.259,75**
Belanja Pegawai	550.253.436.808,00	511.725.220.276,00	93,00	521.578.901.088,90
Belanja Barang dan Jasa	351.702.687.446,00	371.597.822.512,89	105,66	326.238.489.421,85
Belanja Bunga	4.150.478.000,00	4.387.554.738,63	105,71	0,00
Belanja Hibah	80.628.699.063,00	16.935.055.043,00	21,00	68.565.971.013,00
Belanja Bantuan Sosial	2.639.391.186,00	5.849.334.120,00	221,62	1.651.610.736,00
BELANJA MODAL	**248.203.847.132,00**	**249.371.360.042,63**	**100,47**	**287.918.257.694,20**
Belanja Modal Tanah	1.194.894.342,00	216.405.558,00	18,11	5.032.098.143,00
Belanja Peralatan dan Mesin	33.496.699.116,00	45.730.931.689,63	136,52	41.376.791.335,91
Belanja Gedung dan Bangunan	38.487.335.072,00	35.287.481.926,18	91,69	102.883.849.131,30
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	174.876.418.602,00	160.284.346.599,82	91,66	138.088.293.593,99
Belanja Aset Tetap Lainnya	148.500.000,00	7.852.194.269,00	5.287,67	537.225.490,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	**14.322.919.900,00**	**12.942.417.200,00**	**90,36**	**10.126.560.516,00**
Belanja Tidak Terduga	14.322.919.900,00	12.942.417.200,00	90,36	10.126.560.516,00
BELANJA TRANSFER	**256.330.450.244,00**	**256.330.450.244,00**	**100,00**	**257.194.808.600,00**
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.299.290.744,00	3.299.290.744,00	100,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	253.031.159.500,00	253.031.159.500,00	100,00	257.194.808.600,00

Sumber: Diolah dari data BKAD Kabupaten Tapanuli Utara

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan dan SKPD dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3 Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan SKPD Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian Fungsi, Urusan dan Bidang	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	Bertambah/ berkurang	(%)
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	**925.482.597.717,00**	**862.818.145.295,84**	**(62.664.452.421,16)**	**93,23**
1.01	**Pendidikan**	**433.792.198.891,00**	**379.274.169.995,16**	**(54.518.028.895,84)**	**87,43**
1.01.01	Dinas Pendidikan	433.792.198.891,00	379.274.169.995,16	(54.518.028.895,84)	87,43
1.02	**Kesehatan**	**248.838.246.018,00**	**253.264.662.865,00**	**4.426.416.847,00**	**101,78**
1.02.01	Dinas Kesehatan	134.468.634.481,00	125.872.066.640,00	(8.596.567.841,00)	93,61
1.02.02	RSU Daerah Tarutung	114.369.611.537,00	127.392.596.225,00	13.022.984.688,00	111,39
1.03	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**191.786.657.892,00**	**176.548.347.529,17**	**(15.238.310.362,83)**	**92,05**
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	176.328.357.266,00	161.345.562.440,00	(14.982.794.826,00)	91,50
1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15.458.300.626,00	15.202.785.089,17	(255.515.536,83)	98,35
1.04	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**	**27.269.158.577,00**	**26.702.129.285,93**	**(567.029.291,07)**	**97,92**
1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27.269.158.577,00	26.702.129.285,93	(567.029.291,07)	97,92
1.05	**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**18.800.682.986,00**	**18.891.767.023,58**	**91.084.037,58**	**100,48**
1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	13.286.509.046,00	13.434.005.005,58	147.495.959,58	101,11
1.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.514.173.940,00	5.457.762.018,00	(56.411.922,00)	98,98
1.06	**Sosial**	**4.995.653.353,00**	**8.137.068.597,00**	**3.141.415.244,00**	**162,88**
1.06.01	Dinas Sosial	4.995.653.353,00	8.137.068.597,00	3.141.415.244,00	162,88
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**	**80.720.847.406,00**	**75.600.719.741,50**	**(5.120.127.664,50)**	**93,66**
2.01	**Tenaga Kerja**	**3.736.390.034,00**	**3.589.801.095,00**	**(146.588.939,00)**	**96,08**
2.01.01	Dinas Ketenagakerjaan	3.736.390.034,00	3.589.801.095,00	(146.588.939,00)	96,08
2.02	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**523.380.200,00**	**519.888.500,00**	**(3.491.700,00)**	**99,33**
2.02.01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan	523.380.200,00	519.888.500,00	(3.491.700,00)	99,33

Kode	Uraian Fungsi, Urusan dan Bidang	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	Bertambah/ berkurang	(%)
	Perempuan dan Perlindungan Anak				
2.03	**Pangan**	**6.846.724.836,00**	**6.761.372.514,00**	**(85.352.322,00)**	**98,75**
2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	6.846.724.836,00	6.761.372.514,00	(85.352.322,00)	98,75
2.04	**Pertanahan**	**2.077.613.142,00**	**720.391.658,00**	**(1.357.221.484,00)**	**34,67**
2.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.077.613.142,00	720.391.658,00	(1.357.221.484,00)	34,67
2.05	**Lingkungan Hidup**	**8.841.144.722,00**	**8.514.173.105,00**	**(326.971.617,00)**	**96,30**
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	8.841.144.722,00	8.514.173.105,00	(326.971.617,00)	96,30
2.06	**Administrasi Kependudukan dan Catpil**	**4.423.078.945,00**	**4.339.879.155,00**	**(83.199.790,00)**	**98,12**
2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.423.078.945,00	4.339.879.155,00	(83.199.790,00)	98,12
2.07	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**5.336.509.805,00**	**5.212.874.652,00**	**(123.635.153,00)**	**97,68**
2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.336.509.805,00	5.212.874.652,00	(123.635.153,00)	97,68
2.08	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**11.346.356.382,00**	**10.216.085.011,93**	**(1.130.271.370,07)**	**90,04**
2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.346.356.382,00	10.216.085.011,93	(1.130.271.370,07)	90,04
2.09	**Perhubungan**	**6.084.179.504,00**	**5.676.721.812,65**	**(407.457.691,35)**	**93,30**
2.09.01	Dinas Perhubungan	6.084.179.504,00	5.676.721.812,65	(407.457.691,35)	93,30
2.10	**Komunikasi dan Informatika**	**9.440.865.065,00**	**9.088.380.711,00**	**(352.484.354,00)**	**96,27**
2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informasi	9.440.865.065,00	9.088.380.711,00	(352.484.354,00)	96,27
2.11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**7.594.333.898,00**	**7.093.550.281,22**	**(500.783.616,78)**	**93,41**
2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.117.277.195,00	1.047.901.447,00	(69.375.748,00)	93,79
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	6.477.056.703,00	6.045.648.834,22	(431.407.868,78)	93,34
2.12	**Penanaman Modal**	**3.935.871.415,00**	**3.667.352.986,00**	**(268.518.429,00)**	**93,18**

Kode	Uraian Fungsi, Urusan dan Bidang	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	Bertambah/ berkurang	(%)
2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	3.935.871.415,00	3.667.352.986,00	(268.518.429,00)	93,18
2.13	**Kepemudaan dan Olah Raga**	**6.065.346.348,00**	**5.927.400.386,00**	**(137.945.962,00)**	**97,73**
2.13.01	Dinas Pemuda dan Olah Raga	6.065.346.348,00	5.927.400.386,00	(137.945.962,00)	97,73
2.14	**Statistik**	**198.473.000,00**	**198.369.000,00**	**(104.000,00)**	**99,95**
2.14.01	Dinas Komunikasi dan Informasi	198.473.000,00	198.369.000,00	(104.000,00)	99,95
2.16	**Kebudayaan**	**819.999.900,00**	**806.036.852,00**	**(13.963.048,00)**	**98,30**
2.16.01	Dinas Pendidikan	819.999.900,00	806.036.852,00	(13.963.048,00)	98,30
2.17	**Perpustakaan**	**3.434.346.610,00**	**3.258.248.421,70**	**(176.098.188,30)**	**94,87**
2.17.01	Dinas Perpustakaan	3.434.346.610,00	3.258.248.421,70	(176.098.188,30)	94,87
2.18	**Kearsipan**	**16.233.600,00**	**10.193.600,00**	**(6.040.000,00)**	**62,79**
2.18.01	Dinas Perpustakaan	16.233.600,00	10.193.600,00	(6.040.000,00)	62,79
3	**Urusan Pemerintahan Pilihan**	**56.725.953.283,00**	**53.472.154.288,35**	**(3.253.798.994,65)**	**94,26**
3.01	**Kelautan dan Perikanan**	**1.597.571.432,00**	**1.648.482.600,00**	**50.911.168,00**	**103,19**
3.01.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.597.571.432,00	1.648.482.600,00	50.911.168,00	103,19
3.02	**Pariwisata**	**8.695.670.823,00**	**8.216.226.876,00**	**(479.443.947,00)**	**94,49**
3.02.01	Dinas Pariwisata	8.695.670.823,00	8.216.226.876,00	(479.443.947,00)	94,49
3.03	**Pertanian**	**37.605.711.140,00**	**35.920.454.410,35**	**(1.685.256.729,65)**	**95,52**
3.03.01	Dinas Ketahanan Pangan	1.396.063.100,00	1.279.990.750,00	(116.072.350,00)	91,69
3.03.02	Dinas Pertanian	36.209.648.040,00	34.640.463.660,35	(1.569.184.379,65)	95,67
3.06	**Perdagangan**	**3.387.841.788,00**	**3.314.967.557,00**	**(72.874.231,00)**	**97,85**
3.06.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	1.165.122.483,00	1.093.283.467,00	(71.839.016,00)	93,83
3.06.02	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	2.222.719.305,00	2.221.684.090,00	(1.035.215,00)	99,95
3.07	**Perindustrian**	**5.439.158.100,00**	**4.372.022.845,00**	**(1.067.135.255,00)**	**80,38**
3.07.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	5.439.158.100,00	4.372.022.845,00	(1.067.135.255,00)	80,38
4	**Unsur pendukung Urusan Pemerintahan**	**445.302.511.373,00**	**437.248.194.851,46**	**(8.054.316.521,54)**	**98,19**

Kode	Uraian Fungsi, Urusan dan Bidang	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	Bertambah/ berkurang	(%)
4.01	**Administrasi Pemerintahan**	**46.680.342.404,00**	**45.460.794.687,15**	**(1.219.547.716,85)**	**97,39**
4.01.03	Sekretariat Daerah	46.680.342.404,00	45.460.794.687,15	(1.219.547.716,85)	97,39
4.02	**Pengawasan**	**10.785.558.007,00**	**10.273.672.971,00**	**(511.885.036,00)**	**95,25**
4.02.01	Inspektorat	10.785.558.007,00	10.273.672.971,00	(511.885.036,00)	95,25
4.03	**Perencanaan**	**6.412.468.991,00**	**6.168.017.192,00**	**(244.451.799,00)**	**96,19**
4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	6.412.468.991,00	6.168.017.192,00	(244.451.799,00)	96,19
4.04	**Keuangan**	**290.963.296.148,00**	**287.558.187.915,00**	**(3.405.108.233,00)**	**98,83**
4.04.05	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	4.460.733.323,00	4.370.751.222,00	(89.982.101,00)	97,98
	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	281.188.431.622,00	278.734.706.359,00	(2.453.725.263,00)	99,13
	Badan Pendapatan Daerah	5.313.632.303,00	4.452.231.434,00	(861.400.869,00)	83,79
	Kantor Kecamatan Sipoholon	498.900,00	498.900,00	0,00	100,00
4.05	**Kepegawaian**	**5.054.866.012,00**	**4.630.448.659,00**	**(424.417.353,00)**	**91,60**
4.05.06	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.054.866.012,00	4.630.448.659,00	(424.417.353,00)	91,60
4.06	**Pendidikan dan Pelatihan**	**1.410.308.800,00**	**1.404.906.800,00**	**(5.402.000,00)**	**99,62**
4.06.01	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.410.308.800,00	1.404.906.800,00	(5.402.000,00)	99,62
4.07	**Penelitian dan Pengembangan**	**312.351.500,00**	**265.564.403,00**	**(46.787.097,00)**	**85,02**
4.07.01	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	312.351.500,00	265.564.403,00	(46.787.097,00)	85,02
4.08	**Sekretariat DPRD**	**37.540.766.873,00**	**36.518.594.277,00**	**(1.022.172.596,00)**	**97,28**
4.08.01	Sekretariat DPRD	37.540.766.873,00	36.518.594.277,00	(1.022.172.596,00)	97,28
4.11	**Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan**	**41.109.972.312,00**	**40.034.666.564,31**	**(1.075.305.747,69)**	**97,38**
4.11.01	Kantor Kecamatan Tarutung	13.012.554.910,00	12.547.405.884,32	(465.149.025,68)	96,43
4.11.02	Kantor Kecamatan Siatas Barita	1.863.244.418,00	1.840.249.128,00	(22.995.290,00)	98,77
4.11.03	Kantor Kecamatan Adiankoting	1.485.771.179,00	1.459.839.964,00	(25.931.215,00)	98,25

Kode	Uraian Fungsi, Urusan dan Bidang	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	Bertambah/ berkurang	(%)
4.11.04	Kantor Kecamatan Sipoholon	3.090.779.353,00	2.973.540.036,00	(117.239.317,00)	96,21
4.11.05	Kantor Kecamatan Pahae Julu	3.465.162.612,00	3.436.155.510,00	(29.007.102,00)	99,16
4.11.06	Kantor Kecamatan Pahae Jae	2.664.019.534,00	2.591.342.201,99	(72.677.332,01)	97,27
4.11.07	Kantor Kecamatan Purbatua	1.545.844.548,00	1.523.218.607,00	(22.625.941,00)	98,54
4.11.08	Kantor Kecamatan Simangumban	1.353.249.844,00	1.347.221.609,00	(6.028.235,00)	99,55
4.11.09	Kantor Kecamatan Sipahutar	2.250.470.762,00	2.166.159.576,00	(84.311.186,00)	96,25
4.11.10	Kantor Kecamatan Pangaribuan	1.731.584.585,00	1.699.214.460,00	(32.370.125,00)	98,13
4.11.11	Kantor Kecamatan Siborongborong	3.939.559.539,00	3.836.916.540,00	(102.642.999,00)	97,39
4.11.12	Kantor Kecamatan Garoga	3.620.665.511,00	3.555.307.184,00	(65.358.327,00)	98,19
4.11.13	Kantor Kecamatan Parmonangan	1.087.065.517,00	1.058.095.864,00	(28.969.653,00)	97,34
4.12	**Kesatuan Bangsa dan Politik**	**5.032.580.326,00**	**4.933.341.383,00**	**(99.238.943,00)**	**98,03**
4.14.01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	5.032.580.326,00	4.933.341.383,00	(99.238.943,00)	98,03

Untuk realisasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4 Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian Fungsi, Urusan dan Bidang	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	Bertambah/ berkurang	(%)
1	**Pelayanan Umum**	**456.772.227.548,00**	**448.373.169.293,46**	**(8.399.058.254,54)**	**98,16**
1.2.09	Pangan	6.846.724.836,00	6.761.372.514,00	(85.352.322,00)	98,75
1.2.16	Komunikasi dan Informatika	9.440.865.065,00	9.088.380.711,00	(352.484.354,00)	96,27
1.2.20	Statistik	198.473.000,00	198.369.000,00	(104.000,00)	99,95
1.2.24	Kearsipan	16.233.600,00	10.193.600,00	(6.040.000,00)	62,79
1.4.01	Sekretariat Daerah	46.680.342.404,00	45.460.794.687,15	(1.219.547.716,85)	97,39
1.4.02	Sekretariat DPRD	37.540.766.873,00	36.518.594.277,00	(1.022.172.596,00)	97,28
1.5.01	Perencanaan	6.412.468.991,00	6.168.017.192,00	(244.451.799,00)	96,19
1.5.02	Keuangan	290.963.296.148,00	287.558.187.915,00	(3.405.108.233,00)	98,83
1.5.03	Kepegawaian	5.054.866.012,00	4.630.448.659,00	(424.417.353,00)	91,60
1.5.04	Pendidikan dan Pelatihan	1.410.308.800,00	1.404.906.800,00	(5.402.000,00)	99,62

Kode	Uraian Fungsi, Urusan dan Bidang	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	Bertambah/ berkurang	(%)
1.5.05	Penelitian dan Pengembangan	312.351.500,00	265.564.403,00	(46.787.097,00)	85,02
1.6.01	Inspektorat	10.785.558.007,00	10.273.672.971,00	(511.885.036,00)	95,25
1.7.01	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	41.109.972.312,00	40.034.666.564,31	(1.075.305.747,69)	97,38
3	**Ketertiban Dan Keamanan**	**23.833.263.312,00**	**23.825.108.406,58**	**(8.154.905,42)**	**99,97**
3.1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	18.800.682.986,00	18.891.767.023,58	91.084.037,58	100,48
3.8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	5.032.580.326,00	4.933.341.383,00	(99.238.943,00)	98,03
4	**Ekonomi**	**74.717.567.116,00**	**70.496.228.239,22**	**(4.221.338.876,78)**	**94,35**
4.2.07	Tenaga Kerja	3.736.390.034,00	3.589.801.095,00	(146.588.939,00)	96,08
4.2.13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.336.509.805,00	5.212.874.652,00	(123.635.153,00)	97,68
4.2.15	Perhubungan	6.084.179.504,00	5.676.721.812,65	(407.457.691,35)	93,30
4.2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.594.333.898,00	7.093.550.281,22	(500.783.616,78)	93,41
4.2.18	Penanaman Modal	3.935.871.415,00	3.667.352.986,00	(268.518.429,00)	93,18
4.3.25	Kelautan dan Perikanan	1.597.571.432,00	1.648.482.600,00	50.911.168,00	103,19
4.3.27	Pertanian	37.605.711.140,00	35.920.454.410,35	(1.685.256.729,65)	95,52
4.3.30	Perdagangan	3.387.841.788,00	3.314.967.557,00	(72.874.231,00)	97,85
4.3.31	Perindustrian	5.439.158.100,00	4.372.022.845,00	(1.067.135.255,00)	80,38
5	**Lingkungan Hidup**	**10.918.757.864,00**	**9.234.564.763,00**	**(1.684.193.101,00)**	**84,58**
5.2.10	Pertanahan	2.077.613.142,00	720.391.658,00	(1.357.221.484,00)	34,67
5.2.11	Lingkungan Hidup	8.841.144.722,00	8.514.173.105,00	(326.971.617,00)	96,30
6	**Perumahan Dan Fasilitas Umum**	**219.055.816.469,00**	**203.250.476.815,10**	**(15.805.339.653,90)**	**92,78**
6.1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	191.786.657.892,00	176.548.347.529,17	(15.238.310.362,83)	92,05
6.1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	27.269.158.577,00	26.702.129.285,93	(567.029.291,07)	97,92
7	**Kesehatan**	**260.184.602.400,00**	**263.480.747.876,93**	**3.296.145.476,93**	**101,27**
7.1.02	Kesehatan	248.838.246.018,00	253.264.662.865,00	4.426.416.847,00	101,78
7.2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.346.356.382,00	10.216.085.011,93	(1.130.271.370,07)	90,04
8	**Pariwisata dan Budaya**	**9.515.670.723,00**	**9.022.263.728,00**	**(493.406.995,00)**	**94,81**
8.2.22	Kebudayaan	819.999.900,00	806.036.852,00	(13.963.048,00)	98,30

Kode	Uraian Fungsi, Urusan dan Bidang	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	Bertambah/ berkurang	(%)
8.3.26	Pariwisata	8.695.670.823,00	8.216.226.876,00	(479.443.947,00)	94,49
10	**Pendidikan**	**443.291.891.849,00**	**388.459.818.802,86**	**(54.832.073.046,14)**	**87,63**
10.1.01	Pendidikan	433.792.198.891,00	379.274.169.995,16	(54.518.028.895,84)	87,43
10.2.19	Kepemudaan dan Olah Raga	6.065.346.348,00	5.927.400.386,00	(137.945.962,00)	97,73
10.2.23	Perpustakaan	3.434.346.610,00	3.258.248.421,70	(176.098.188,30)	94,87
11	**Perlindungan Sosial**	**9.942.112.498,00**	**12.996.836.252,00**	**3.054.723.754,00**	**130,73**
11.1.06	Sosial	4.995.653.353,00	8.137.068.597,00	3.141.415.244,00	162,88
11.2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	523.380.200,00	519.888.500,00	(3.491.700,00)	99,33
11.2.12	Administrasi Kependudukan dan Capil	4.423.078.945,00	4.339.879.155,00	(83.199.790,00)	98,12

3.1.3. Realisasi Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp193.830.810.519,63 atau 100,78% dari anggaran sebesar Rp192.336.463.258,00 sedangkan realisasi Pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp12.816.709.884.61 atau 69.44% dari anggaran sebesar Rp18.457.648.695,00. Rincian lebih lanjut mengenai realisasi pembiayaan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dalam Tabel 3.5

Tabel 3.5 Rincian Realisasi Anggaran Pembiayaan TA 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Penerimaan Pembiayaan	**192.336.463.258,00**	**193.830.810.519,63**	**100.78**	**238.451.801.575,30**
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	171.934.953.658,00	171.934.953.658,00	100,00	96.583.610.774,30
Pinjaman Dalam Negeri	20.401.509.600,00	18.895.856.861,63	92,62	141.868.190.801,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	**18.457.648.695,00**	**12.816.709.884.61**	**69.44**	**11.319.571.175,45**
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.051.648.695,00	2.999.994.336.61	98,31	7.536.977.814,00
Pembayaran Utang Beban	15.406.000.000,00	9.816.715.548.00	63.72	3.782.593.361,45

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target

3.2.1. Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran 2022 Pendapatan Transfer masih mendominasi pendapatan Kabupaten Tapanuli Utara dengan kontribusi terbanyak yaitu 85,78%, disusul Pendapatan Asli Daerah sebesar 12,59% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah

yang Sah memberikan kontribusi sebesar 0,87% dari total pendapatan. Sedangkan rasio kemandirian daerah yaitu perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Dana Perimbangan hanya sebesar 18,59%. Dengan kata lain ketergantungan finansial Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terhadap sumber pendanaan dari pendapatan dana perimbangan masih sangat tinggi.

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain:

a. Pemutahiran data PAD belum efektif dan kurang optimal dilaksanakan;
b. Subjek/objek/petugas pemungut pajak/retribusi daerah belum jujur dalam mengisi potensi pajak/retribusi daerah;
c. Penetapan target penerimaan dari pajak/retribusi daerah masih ditetapkan dengan perkiraan yang tidak terukur;
d. Sistem administrasi yang manual dan tidak terintegrasi;
e. Sering terjadi keterlambatan penyetoran PAD ke Kas Daerah.

3.2.2. Belanja Daerah

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap OPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa hal yang menjadi perhatian oleh Pemerintah Daerah terkait dengan belanja daerah antara lain:

a. Melakukan pengutamaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan perubahan alokasi anggaran melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersedia dalam Tahun Anggaran 2022;
b. Dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan perubahan anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia;
c. Sejak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID - 19) ditetapkan sebagai bencana nasional, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan *refocusing*, realokasi anggaran untuk mendanai penanganan Covid-19 dan juga melakukan *refocusing* untuk pemulihan ekonomi nasional, dengan demikian anggaran belanja difokuskan untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID - 19) serta pemulihan ekonomi nasional untuk menggairahkan kembali usaha masyarakat pada semua lini;
d. Sumber Pendapatan transfer pusat yang beberapa kali mengalami *refocussing*, mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

melakukan *realokasi* anggaran sehingga beberapa kegiatan yang prioritas mengalami penundaan pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2022;

e. Belum semua aparat pengelola keuangan khususnya Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) memahami dengan baik mengenai sistem pengelolaan keuangan daerah yang ada berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga terdapat keterlambatan baik dalam proses pencairan keuangan maupun penyusunan pertanggungjawaban keuangan. Selain itu, adanya berbagai hambatan dan kendala baik yang bersifat teknis maupun administratif yang dialami dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan;

f. Dalam penerapan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, sebagian besar SKPD masih mengalami kendala dalam mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual tersebut. Seperti proses jurnal, pemahaman antara beban dan belanja, pengakuan aset tetap, penyusutan aset tetap, pencatatan persediaan dan lainnya;

g. Sinkronisasi antara perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan fisik belum optimal, sehingga berdampak pada penyelesaian kegiatan yang mengalami kemunduran dari jadwal. Selain itu akan berakibat pada terlambatnya proses penatausahaan dan pelaporan;

h. Kurang tersedianya informasi keuangan yang cepat dan akurat, misalnya informasi tentang jenis penerimaan pada pos-pos pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat ketika dananya diterima pada kas daerah, informasi tentang jenis penerimaan baru diterima setelah beberapa minggu. Hal ini menjadi kendala dalam penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) serta kendala dalam penyerapan anggaran serta penyusunan Laporan Realisasi Anggaran yang cepat dan akurat;

i. Kurangnya kesadaran masyarakat dan lembaga penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam mempertanggungjawabkan dana yang sudah diterima dan dikelolanya, sehingga menjadi kendala dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran;

j. Kapasitas dukungan infrastruktur yang belum terukur, baik melalui peningkatan kuantitas dan kualitas berbagai sarana dan prasarana penunjang pembangunan, terutama antar desa/kecamatan yang memiliki potensi yang tinggi serta pengembangan akses ke lokasi wisata;

k. Belum maksimalnya revitalisasi pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan serta kecukupan pangan termasuk di dalam agropolitan dan minapolitan;

l. Risiko bencana alam;

m. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang masih belum sesuai dengan rencana tata ruang.

3.2.3. Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dimana pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mendapatkan Pinjaman Daerah untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah. Sesuai Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 78 Tanggal 17 September 2021 telah ditandatangani Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Berdasarkan perjanjian tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memperoleh pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang direalisasikan pada tahun 2021 dan 2022. Adapun jangka waktu pinjaman yang ditetapkan adalah 5 (lima) tahun dengan masa tenggang selama 6 (enam) bulan, sedangkan Bunga pinjaman sebesar 5,66% (lima koma enam puluh enam persen) dan biaya provisi sebesar 1% yang dibayarkan satu kali serta biaya pengelolaan sebesar 0,185% per tahun.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah

Struktur akuntansi pemerintahan daerah sesuai Pasal 10 ayat (3) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 189 Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan hal ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna angaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara meliputi Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kantor.

Tabel 4.1 Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021

No.	Kode	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	1 . 01 . 1 . 1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	1 . 02 . 1 . 1	DINAS KESEHATAN
3	1 . 02 . 2 . 1	RSU DAERAH TARUTUNG
4	1 . 03 . 1 . 1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
5	1 . 04 . 1 . 1	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6	1 . 05 . 1 . 1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
7	1 . 05 . 2 . 1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
8	1 . 06 . 1 . 1	DINAS SOSIAL
9	2 . 01 . 1 . 1	DINAS KETENAGAKERJAAN
10	2 . 03 . 1 . 1	DINAS KETAHANAN PANGAN
11	2 . 05 . 1 . 1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12	2 . 06 . 1 . 1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13	2 . 07 . 1 . 1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
14	2 . 08 . 1 . 1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
15	2 . 09 . 1 . 1	DINAS PERHUBUNGAN
16	2 . 10 . 1 . 1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
17	2 . 11 . 1 . 1	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
18	2 . 11 . 2 . 1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
19	2 . 12 . 1 . 1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
20	2 . 13 . 1 . 1	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

No.	Kode	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
21	2 . 17 . 1 . 1	DINAS PERPUSTAKAAN
22	3 . 02 . 1 . 1	DINAS PARIWISATA
23	3 . 03 . 1 . 1	DINAS PERTANIAN
24	3 . 07 . 1 . 1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
25	4 . 01 . 1 . 1	SEKRETARIAT DAERAH
26	4 . 02 . 1 . 1	INSPEKTORAT
27	4 . 03 . 1 . 1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
28	4 . 04 . 1 . 1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
29	4 . 04 . 2 . 1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
30	4 . 04 . 3 . 1	BADAN PENDAPATAN DAERAH
31	4 . 05 . 1 . 1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
32	4 . 08 . 1 . 1	SEKRETARIAT DPRD
33	4 . 11 . 1 . 1	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
34	4 . 11 . 2 . 1	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
35	4 . 11 . 3 . 1	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
36	4 . 11 . 4 . 1	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
37	4 . 11 . 5 . 1	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
38	4 . 11 . 6 . 1	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
39	4 . 11 . 8 . 1	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
40	4 . 11 . 9 . 1	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
41	4 . 11 . 10 . 1	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
42	4 . 11 . 11 . 1	KANTOR KECAMATAN GAROGA
43	4 . 11 . 12 . 1	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
44	4 . 11 . 13 . 1	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
45	4 . 11 . 14 . 1	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
46	4 . 11 . 15 . 1	KANTOR KECAMATAN MUARA
47	4 . 12 . 1 . 1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Laporan Keuangan yang dibuat oleh SKPD sebagai entitas akuntansi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, disusun berdasarkan struktur anggaran APBD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Untuk menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dilakukan konversi sesuai susunan akun yang ditetapkan dalam SAP.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan laporan keuangan gabungan dari seluruh SKPD dan laporan keuangan PPKD sebagai BUD yang dilakukan oleh entitas pelaporan pemerintah daerah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Produk dari entitas pelaporan ini adalah laporan keuangan konsolidasi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan daerah adalah ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu:

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Namun demikian dalam hal penyusunan anggaran dan penyusunan LRA disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan *(consideration)* untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah. Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Prinsip Realisasi

Bagi Pemerintah Daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan *(matching cost against revenue principle)* tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

d. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.

e. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan peLaporan Keuangan Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam CaLK.

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka *(on the face)* laporan keuangan atau CaLK.

h. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan Keuangan menyajikan dengan wajar LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran

LRA mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

a) Pendapatan-LRA;

b) Belanja;

c) Surplus/Defisit-LRA;

d) Pembiayaan; dan

e) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

LRA dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Entitas akuntansi/pelaporan menyajikan LRA sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

LPSAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

a) SAL awal;

b) Penggunaan SAL;

c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;

d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;

e) Lain-lain; dan

f) SAL akhir.

Di samping itu, Pemerintah Daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LPSAL dalam CaLK. Format LPSAL mengacu pada contoh format perubahan SAL menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, namun demikian format tersebut dapat diubah sesuai kebutuhan

apabila ada transaksi-transaksi yang belum terakomodir dalam format laporan tersebut.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Pemerintah Daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

a) Kas dan setara kas;

b) Investasi jangka pendek;

c) Piutang;

d) Persediaan;

e) Investasi jangka panjang;

f) Aset tetap;

g) Aset lainnya

h) Kewajiban jangka pendek;

i) Kewajiban jangka panjang; dan

j) Ekuitas.

Format Neraca mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format neraca dapat diubah sesuai kebutuhan apabila terdapat transaksi-transaksi yang belum terakomodir dalam format neraca tersebut.

d. Laporan Operasional

LO menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos tidak terduga, pos tidak terduga ,dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

LO dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Dalam LO harus diidentifikasikan secara jelas, dan jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:

a) Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;

b) Cakupan entitas pelaporan;

c) Periode yang dicakup;

d) Mata uang pelaporan; dan

e) Satuan angka yang digunakan.

LO menyajikan pos-pos sebagai berikut:

a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;

b) Beban dari kegiatan operasional;

c) Surplus/defisit dari kegiatan operasional;

d) Kegiatan Non Operasional;

e) Surplus/defisit sebelum Pos Tidak Terduga;

f) Pos Tidak Terduga; dan

g) Surplus/defisit-LO.

Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke LPE.

Format LO mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format dapat diubah sesuai kebutuhan apabila terdapat transaksi-transaksi yang belum terakomodir dalam format tersebut.

e. Laporan Arus Kas

LAK menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan transitoris.

a) Aktivitas Operasi

(1) Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

(2) Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain:

(a) Penerimaan Pajak Daerah;

(b) Penerimaan Retribusi Daerah;

(c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;

(d) Penerimaan Transfer;

(e) Penerimaan Hibah;

(f) Penerimaan Dana Darurat; dan

(g) Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Tidak Terduga.

(3) Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain:

(a) Belanja Pegawai;

(b) Belanja Barang dan Jasa;

(c) Belanja Bunga;

(d) Belanja Subsidi;

(e) Belanja Hibah;

(f) Belanja Bantuan Sosial

(g) Belanja Lain-lain/Tidak Terduga; dan

(h) Belanja Transfer.

b) Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

(a) Penjualan Aset Tetap; dan

(b) Penjualan Aset Lainnya.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

(a) Perolehan Aset Tetap; dan

(b) Perolehan Aset Lainnya.

c) Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

(a) Penerimaan Utang Luar Negeri;

(b) Penerimaan Utang Obligasi;

(c) Pencairan Dana Cadangan;

(d) Penerimaan Divestasi;

(e) Penjualan Investasi dalam bentuk sekuritas;

(f) Penerimaan kembali pinjaman kepada Pemerintah Daerah;

(g) Penerimaan kembali pinjaman kepada Perusahaan Negara.

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain

(a) Pembayaran Pokok Utang Luar Negeri;

(b) Pembayaran Pokok Utang Obligasi;

(c) Pembentukan Dana Cadangan;

(d) Penyertaan Modal Pemerintah;

(e) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas;

(f) Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan pemerintah daerah;

(g) Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada perusahaan Negara.

d) Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan.

Arus kas dari aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah.

Arus masuk kas dari aktivitas Transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

Arus keluar kas dari aktivitas Transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran Non Anggaran seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Format LAK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format dapat diubah sesuai dengan kebutuhan apabila terdapat transaksi yang tidak terakomodir dalam format tersebut.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

LPE menyajikan pos-pos:

a) Ekuitas awal;

b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

(1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;

(2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

d) Ekuitas akhir

Format LPE mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format dapat diubah sesuai kebutuhan apabila terdapat transaksi yang belum terakomodasi dalam format tersebut.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, CaLK disajikan dengan susunan sebagai berikut:

a) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;

b) Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; dan

c) Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya.

d) Kebijakan akuntansi yang penting:

1) Entitas akuntansi/pelaporan;

2) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;

3) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;

4) Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan pernyataan SAP oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan; dan

5) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

e) Penjelasan pos-pos laporan keuangan memuat tentang:

1) Rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan; dan

2) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

f) Informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti gambaran umum daerah;

g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

CaLK disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK.

Di dalam bagian penjelasan akan kebijakan akuntansi, dijelaskan hal-hal berikut ini:

1) Dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;

2) Kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi SAP diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan

3) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan dalam CaLK meliputi akan tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1) Pengakuan pendapatan-LRA;
2) Pengakuan pendapatan-LO;
3) Pengakuan belanja;
4) Pengakuan beban;
5) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
6) Investasi;
7) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
8) Kontrak-kontrak konstruksi;
9) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
10) Kemitraan dengan fihak ketiga;
11) Biaya penelitian dan pengembangan;
12) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
13) Dana cadangan; dan
14) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

Format laporan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format dapat diubah sesuai dengan kebutuhan apabila terdapat transaksi yang belum terakomodasi dalam format tersebut.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP Pemerintah Daerah

Kebijakan akuntansi ini menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akun-akun yang ada pada lembaran muka laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang disusun oleh Pemerintah Daerah terkait dengan implementasi akuntansi berbasis akrual didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh sebab itu, jika terdapat hal-hal yang belum diatur di dalam kebijakan akuntansi ini, maka PSAP akan menjadi rujukan perlakuan akuntansi *(accountancy treatment)* atas transaksi yang terjadi.

1. Kebijakan Akuntansi Aset

   a. Tujuan

      Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam Laporan Keuangan.

   b. Ruang Lingkup

      Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam Laporan Keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

   c. Definisi

      Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi aset ini dengan pengertiannya:

      1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

      2) Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

      3) Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

2. Aset Lancar

   a. Kas dan Setara Kas

      1) Definisi Kas dan Setara Kas

         a) Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

         b) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

c) Kas terdiri dari:

(1) Kas di Kas Daerah;

(2) Kas di Bendahara Penerimaan;

(3) Kas di Bendahara Pengeluaran;

(4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan

(5) Kas lainnya.

d) Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

e) Setara kas terdiri dari:

(1) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan; dan

(2) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

f) Klasifikasi kas dan setara kas secara terinci diuraikan dalam BAS.

2) Pengakuan Kas dan Setara Kas

a) Secara umum pengakuan Kas dan Setara Kas dilakukan:

(1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan

(2) Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

b) Atas dasar butir a) tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

c) Kas di BLUD merupakan kas di Bank maupun tunai yang dikelola oleh entitas yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

d) Kas lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah dan Kas BLUD serta menjadi tanggung jawab entitas pelaksana teknis.

3) Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai Rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi Rupiah menggunakan kurs tengah Bank sentral pada tanggal neraca.

4) Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

a) Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;

b) Rincian dan nilai kas yang ada dalam RKUD namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.

b. Investasi Jangka Pendek

1) Definisi Investasi Jangka Pendek

a) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

c) Klasifikasi investasi jangka pendek secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

2) Pengakuan Investasi Jangka Pendek

a) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

(1) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.

(2) Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/ mengidentifikasikan biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.

b) Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/ pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan Pemerintah Daerah.

c) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

3) Pengukuran Investasi Jangka Pendek

a) Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

b) Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

(a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

(c) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

(2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

4) Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

a) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar

b) Pengungkapan investasi jangka pendek dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

(1) Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah;

(2) Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;

(3) Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);

(4) Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; dan

(5) Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).

c. Piutang

1) Definisi Piutang

a) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

b) Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

c) Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/ karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

d) Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam BAS.

2) Pengakuan Piutang

a) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

(1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan

(2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.

b) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

(1) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan

(2) Jumlah piutang dapat diukur.

c) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.

d) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

e) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.

f) Piutang transfer lainnya diakui apabila:

(1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan

(2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

g) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.

h) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.

i) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

j) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Tuntutan Perbendaharaan – Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR), harus didukung dengan bukti Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah (SKP2K)/ Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM)/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP-TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP-TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

3) Pengukuran Piutang

a) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

(1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau

(2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk wajib pajak (wp) yang mengajukan banding; atau

(3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

b) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

(1) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

(2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

(3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan- ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

(4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

c) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

(1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

(2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten; dan

(3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

d) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

(1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

(2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

e) Pengukuran Berikutnya *(Subsequent Measurement)*

Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

f) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan *(write-off)* dan penghapusbukuan *(write down)*.

g) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value)*, yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

h) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

(1) Kualitas Piutang Lancar;

(2) Kualitas Piutang Kurang Lancar;

(3) Kualitas Piutang Diragukan; dan

(4) Kualitas Piutang Macet.

i) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

(1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan

(2) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

j) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak *(self assessment)* dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas lancar, dengan kriteria:

(a) Umur piutang kurang dari 1 tahun;

(b) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;

(d) Wajib Pajak kooperatif;

(e) Wajib Pajak likuid; dan/atau

(f) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

(2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

(a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;

(b) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;

(c) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau

(d) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

(3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

(a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun;

(b) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan;

(c) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau

(d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

(4) Kualitas Macet, dengan kriteria:

(a) Umur piutang diatas 3 tahun;

(b) Wajib Pajak tidak ditemukan;

(c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

(d) Wajib Pajak mengalami musibah *(force majeure)*.

k) Penggolongan kualitas piutang pajak yangpemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah *(official assessment)* dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:

(a) Umur piutang kurang dari 1 tahun;

(b) Wajib Pajak kooperatif;

(c) Wajib Pajak likuid; dan/atau

(d) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

(2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

(a) Umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun;

(b) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau

(c) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

(3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

(a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun;

(b) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau

(c) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

(4) Kualitas Macet, dengan kriteria:

(a) Umur piutang diatas 3 tahun;

(b) Wajib Pajak tidak ditemukan;

(c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

(d) Wajib Pajak mengalami musibah *(force majeure)*.

l) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

(1) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;

(2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan;

(3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan; dan

(4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

m) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

(2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;

(3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan

(4) Kualitas macet, jika piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara.

n) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

(1) 0,5% (setengah perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar;

(2) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

(3) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

(4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

o) Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

p) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat

restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

4) Pemberhentian Pengakuan

a) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

b) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

c) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.

d) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel*.

e) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

f) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:

(1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.

(a) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

(b) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.

(c) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.

(2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila perlu).

(3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku *(write off)*. Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang

yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

g) Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

h) Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan lima milyar rupiah oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas lima milyar rupiah oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

i) Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

(1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.

(2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.

(3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.

(4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.

(5) Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/ penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.

(6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan /peraturan *write off* di negara lain.

(7) Dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomtabel.*

j) Pengungkapan Piutang

(1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:

(a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;

(b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;

(c) Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan

(d) Jaminan atau sita jaminan jika ada.

(2) TP-TGR yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.

(3) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

(4) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

d. Beban Dibayar Dimuka

1) Definisi Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi Pemerintah Daerah.

2) Pengakuan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

3) Pengukuran Beban Dibayar Dimuka

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluaran/dibayarkan.

4) Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

e. Persediaan

1) Definisi Persediaan

a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:

(1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;

(2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;

(3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

(4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

c. Klasifikasi persediaan meliputi:

1. Persediaan Alat Tulis Kantor;
2. Persediaan Barang Cetakan;
3. Persediaan Obat dan Alat Kesehatan;
4. Persediaan Hewan dan Tanaman;
5. Persediaan Aspal; dan
6. Persediaan Lain-lain.

2) Pengakuan Persediaan

a) Persediaan diakui:

(1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan

(2) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

b) Pengakuan Persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

3) Pengukuran Persediaan

a) Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir untuk selain obat dan alat kesehatan, sedangkan untuk obat dan alat kesehatan menggunakan FIFO.

b) Persediaan disajikan sebesar:

(1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

(2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

(3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

(4) Penyajian dan Pengungkapan Persediaan

a) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

b) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:

(1) Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

(2) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

f. Aset Untuk Dikonsolidasikan

1) Defenisi Aset untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik akuntansi SKPD dan entitas akuntansi SKPKD. Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan SKPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi SKPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

2) Pengakuan Aset untuk Dikonsolidasikan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

3) Pengukuran Aset untuk Dikonsolidasikan

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

4) Pengungkapan Aset untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi SKPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi.

3. Aset Non Lancar

Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

a. Investasi Jangka Panjang

1) Definisi Investasi Jangka Panjang

a) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

b) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

c) Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

d) Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.

e) Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

f) Klasifikasi investasi jangka panjang secara terinci diuraikan dalam BAS.

2) Pengakuan Investasi Jangka Panjang

a) Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

(1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah; dan

(2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

b) Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:

(1) Deviden tunai;

(2) Deviden saham; dan

(3) Bagian laba.

c) Pengakuan untuk hasil investasi untuk deviden dapat dilakukan dengan cara hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan

metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).

d) Pengakuan hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.

e) Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

(1) Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.

(2) Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

3) Pengukuran Investasi Jangka Panjang

a) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

b) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:

(1) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

(2) Yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.

(3) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

(4) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

(5) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

(6) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

c) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.

d) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

e) Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1. Metode biaya;
2. Metode ekuitas; dan
3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

f) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

g) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

h) Metode biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

i) Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

j) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika kepemilikan bersifat non permanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

4) Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

a) Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir

(1) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (*outstanding*).

(2) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non permanen dana bergulir.

(3) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir mengacu pada Peraturan Bupati.

(4) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan angsuran pengembalian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Penyisihan investasi non permanen berdasarkan angsuran

Uraian	Prosentase Penyisihan Berdasarkan Angsuran				
	Tidak Melampaui Jatuh Tempo	Jatuh Tempo 0-3 Bulan	Jatuh Tempo 4-9 Bulan	Jatuh Tempo 10-12 Bulan	Jatuh Tempo Lebih dari 12 Bulan
Investasi Non Permanen Dana Bergulir	0%	20%	50%	75%	100%

(5) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi non permanen dana bergulir yang bersangkutan.

4. Aset Tetap

1) Definisi Aset Tetap

a) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

b) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

c) Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

d) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan *(depreciable assets)* selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

e) Masa manfaat adalah:

(1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau

(2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

f) Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

g) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

h) Klasifikasikan Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.

i) Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

l) Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

m) Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

n) Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

(1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;

(2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;

(3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan

(4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

o) Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

p) Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.

q) Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal Laporan Keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

r) Klasifikasi aset tetap secara terinci diuraikan dalam BAS.

2) Pengakuan Aset Tetap

a) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

b) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

(1) Berwujud;

(2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

(3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

(4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

(5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan

(6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

c) Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.

d) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

e) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

f) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

3) Pengukuran Aset Tetap

a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.

b) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

c) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan.Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

d) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

e) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

f) Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Komponen Biaya Perolehan Berdasarkan Jenis Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	Pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
Jalan, Jaringan, & Instalasi	Biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
	Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk aset tetap renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

g) Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold.* Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap.

h) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

i) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

4) Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

5) Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

6) Aset Tetap Digunakan Bersama

a) Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

b) Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

7) Aset Perjanjian Kerja sama Fasos Fasum

a) Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya BAST atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

b) Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum BAST. Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

8) Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

a) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/ diserahkan.

b) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

c) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun nilai bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun nilai bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima.

Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

9) Aset Donasi

a) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

b) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

c) Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

d) Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

10) Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

a) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal

suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.

b) Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

(1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:

(a) Bertambah ekonomis/efisien;

(b) Bertambah umur ekonomis;

(c) Bertambah volume; dan/atau

(d) Bertambah kapasitas produksi.

(2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/ melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).

c) Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

d) Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.4 Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*)

NO.	ASET TETAP	KONDISI	NILAI KAPITALISASI
1	Tanah		Tidak dibatasi
2	Peralatan Mesin		
	Pembelian selain angkutan darat tidak bermotor dan alat angkutan air tidak bermotor	Harga per satuan barang	Rp300.000,00
	Perbaikan menyeluruh termasuk turun mesin (over haul)	Selain angkutan darat bermotor beroda dua	Rp5.000.000,00
	Perbaikan menyeluruh termasuk turun mesin *(over haul)*	Angkutan darat bermotor beroda dua	Rp1.000.000,00
	Pembelian angkutan darat tidak bermotor	Harga per satuan barang	Rp500.000,00

NO.	ASET TETAP	KONDISI	NILAI KAPITALISASI
	dan alat angkutan air tidak bermotor		
3	Gedung dan Bangunan		
	Rehabilitasi total atau menambah ruang		Rp10.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
	Jalan, Jembatan dan jaringan air		Tidak Dibatasi
	Penerangan jalan, taman dan hutan kota dan instalasi listrik dan telepon		Rp300.000,00
5	Aset Tetap Lainnya		
	Buku dan kepustakaan		Tidak dibatasi
	Bercorak kesenian /kebudayaan		Rp300.000,00
	Hewan/ternak/tanaman	Sepanjang bukan dalam rangka untuk diperjualbelikan dan/atau pemberian bantuan	Tidak dibatasi
6	Konstruksi dalam pengerjaan		Tidak dibatasi

11) Penyusutan

a) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan tahun perolehan.

b) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

(1) Nilai residu 0;

(2) Ada nilai residu konsekuensi dengan peraturan bupati penilaian barang.

c) Untuk aset yang diperoleh pada tahun berjalan penyusutan dilakukan pada penyusunan Laporan Keuangan tahun berkenaan.

d) Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5 Masa manfaat aset tetap

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3				ASET TETAP	
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
1	3	2	1		Alat Besar	
1	3	2	1	1	Alat Besar Darat	10

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	1	2	Alat Besar Apung	8
1	3	2	1	3	Alat Bantu	7
1	3	2	2		Alat Angkutan	
1	3	2	2	1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	2	2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	2	3	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	2	4	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	2	5	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	3		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	3	1	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	3	2	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	3	3	Alat Ukur	5
1	3	2	4		Alat Pertanian	
1	3	2	4	1	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	5		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	5	1	Alat Kantor	5
1	3	2	5	2	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	5	3	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	6		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	6	1	Alat Studio	5
1	3	2	6	2	Alat Komunikasi	5
1	3	2	6	3	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	6	4	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
1	3	2	7		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	7	1	Alat Kedokteran	5
1	3	2	7	2	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	8		Alat Laboratorium	
1	3	2	8	1	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	8	2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	8	3	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	8	4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	15
1	3	2	8	5	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	8	6	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	8	7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	8	8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	8	9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	15
1	3	2	9		Alat Persenjataan	
1	3	2	9	1	Senjata Api	10
1	3	2	9	2	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	9	3	Senjata Sinar	3
1	3	2	9	4	Alat Khusus Kepolisian	3
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	1	Komputer Unit	5
1	3	2	10	2	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	1	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	2	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	1	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	12	2	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	
1	3	2	13	1	Sumur	10
1	3	2	13	2	Produksi	10
1	3	2	13	3	Pengolahan Dan Pemurnian	15
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	1	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	2	14	2	Alat Bantu Produksi	10
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	1	Alat Deteksi	5
1	3	2	15	2	Alat Pelindung	5

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	15	3	Alat Sar	2
1	3	2	15	4	Alat Kerja Penerbangan	10
1	3	2	16		Alat Peraga	
1	3	2	16	1	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	10
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	1	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1	3	2	18		Rambu – Rambu	
1	3	2	18	1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3	2	18	2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	18	3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga	
1	3	2	19	1	Peralatan Olah Raga	3
1	3	3			Gedung dan Bangunan	
1	3	3	1		Bangunan dan Gedung	
1	3	3	1	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	1	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	2		Monumen	
1	3	3	2	1	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	3		Bangunan Menara	
1	3	3	3	1	Bangunan Menara / Perambuan	40
	3	3	4		Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	4	1	Tugu / Tanda Batas	50
1	3	4			Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1	3	4	1		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	1	1	Jalan	10
1	3	4	1	2	Jembatan	50
1	3	4	2		Bangunan Air	
1	3	4	2	1	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	2	2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	2	3	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	2	4	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	2	5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	2	6	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	2	7	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	3		Instalasi	
1	3	4	3	1	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
1	3	4	3	2	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	3	3	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	3	4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	3	5	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	3	6	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	3	7	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	3	8	Instalasi Gas	30
1	3	4	3	9	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	3	10	Instalasi Lain	20
1	3	4	4		Jaringan	
1	3	4	4	1	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	4	2	Jaringan Listrik	40
1	3	4	4	3	Jaringan Telepon	20
1	3	4	4	4	Jaringan Gas	30
1	3	5			Aset Tetap Lainnya	
1	3	5	2		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
1	3	5	2	1	Barang Bercorak Kesenian	4

e) Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Buku-buku Perpustakaan, Hewan ternak, dan Tanaman.

f) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam Neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

g) Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

(1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan

(2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

h) Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Penambahan Masa manfaat aset tetap

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65% s.d 100%	6
Alat Besar Apung	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
		>65% s.d 100%	5
Alat Bantu	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
		>65% s.d 100%	5
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	1

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Angkutan Apung Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d 100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	1
Alat Ukur	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan Pertanian	*Overhaul*	>0% s.d. 20%	1
		>20% s.d 40%	2
		>40% s.d 75%	4

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d 100%	4
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Rumah Tangga	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Komunikasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Peralatan Pemancar	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Kesehatan Umum	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	5
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	5
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat Proteksi radiasi /	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Proteksi Lingkungan		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	6
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	6
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	6
Alat Persenjataan			
Senjata Api	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	1
Senjata Sinar	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d 100%	2
Alat Khusus Kepolisian	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Komputer			
Komputer Unit	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Peralatan Komputer	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	6
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d 100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d 100%	7
Alat Bantu Produksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d 100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat SAR	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Kerja Penerbangan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	6
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	5
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d 100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	9
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d 100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	35
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	35
Bangunan Menara			

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	35
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>65% s.d 100%	15
Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
		>65% s.d 100%	5
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	20
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	20
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>65% s.d 100%	7
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65% s.d 100%	7
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65% s.d 100%	10
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	20
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
		>65% s.d 100%	5
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
		>65% s.d 100%	5

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Jaringan			
Jaringan air Minum	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Jaringan Listrik	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
Jaringan Telepon	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Jaringan Gas	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Barang Bercorak Kesenian /Kebudayaan/ Olahraga			
Barang Bercorak Kesenian	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Aset Tetap Dalam Renovasi			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	*Overhaul*	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan Bangunan dalam renovasi	*Renovasi*	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	35

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d. 100%	5

12) Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

a) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

b) Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

13) Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

14) Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

a) Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

b) Laporan Keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

(1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);

(2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

(a) Penambahan;

(b) Pelepasan;

(c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan

(d) Mutasi aset tetap lainnya.

(3) Informasi penyusutan, meliputi:

(a) Nilai penyusutan;

(b) Metode penyusutan yang digunakan;

(c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

(d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

c) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:

(1) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(2) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

(3) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

(4) Pemerintah Daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di Neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK.

(5) Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti Aset Tetap Lainnya.

(6) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.

(7) Suatu aset tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.

(8) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).

(9) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi

yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing- masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

5. Akuntansi Konstruksi dalam pengerjaan

1) Definisi Konstruksi Dalam Pengerjaan

a) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal Neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

b) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

2) Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

a) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:

(1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;

(2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan

(3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

b) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

c) Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

3) Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

a) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

b) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

(1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;

(2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan

(3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

c) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

(1) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;

(2) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;

(3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;

(4) Biaya penyewaaan sarana dan prasarana; dan

(5) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.

d) Biaya-biaya yang dapat distribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:

(1) Asuransi;

(2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan

(3) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

4) Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;

b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;

c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;

d) Uang muka kerja yang diberikan; dan

e) Retensi.

6. Dana Cadangan

1) Definisi Dana Cadangan

a) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

b) Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.

c) Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

2) Pengakuan Dana Cadangan

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.

3) Pengukuran Dana Cadangan

a) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.

b) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

c) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

d) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

4) Penyajian dan Pengungkapan Dana Cadangan

a) Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset NonLancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.

b) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya, kemudian ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana Cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam dalam CaLK.

7. Aset Lainnya

1) Definisi Aset Lainnya

a) Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

b) Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

(1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

(2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

(3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

(4) Aset Tidak Berwujud; dan

(5) Aset Lain-lain.

c) Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

d) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah Tagihan sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan

melawan hukum baik sengaja maupun lalai. TP-TGR diakui ketika keputusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa SKP2K.

e) Jenis Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah:

(1) Aset Kerja sama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama /kemitraan.

(2) Bangun, Guna, Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerja sama BGS.

(3) Bangun, Serah, Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.

(4) Kerja sama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.

(5) Masa kerja sama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerja sama/kemitraan.

f) Aset tidak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

g) Jenis Aset Tidak Berwujud adalah:

(1) Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

(2) Hak Paten, Hak Cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

(3) Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

(4) *Software*. *Software* komputer yang masuk dalam kategori Aset Tidak Berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.

(5) Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

(6) Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

(7) Aset Tidak Berwujud Lainnya merupakan jenis Aset Tidak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis Aset Tidak Berwujud yang ada.

(8) Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.

h) Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

i) Klasifikasi aset lainnya secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

2) Pengakuan Aset Lainnya

a) Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

b) Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan

informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.

c) Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:

(1) Telah ditandatanganinya Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau

(2) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.

d) Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat:

(1) Aset kerja sama/kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.

(2) Aset kerja sama/kemitraan berupa gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/ pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.

(3) Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya utang kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.

(4) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.

(5) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

(6) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

(7) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari "Aset Lainnya" menjadi "Aset Tetap" sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

e) Aset Tidak Berwujud diakui pada saat:

Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan

f) Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

3) Pengukuran Aset Lainnya

a) Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

b) Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

c) Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K).

d) Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:

(1) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

(2) Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.

(3) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

e) Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

f) Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:

(1) Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

(2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

(a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

(b) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; dan

(c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

g) Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

(1) Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.

(2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian hari.

(3) Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

h) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tidak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

i) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya.

j) Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.

k) Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

4) Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya

a) Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.

b) Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur.

c) Pengungkapan Tuntutan Ganti Rugi di Laporan Keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tuntutan Ganti Rugi menurut nama pegawai.

d) Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Laporan Keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya.

e) Aset Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya". Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tidak Berwujud antara lain sebagai berikut:

(1) Masa manfaat dan metode amortisasi;

(2) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa aset tidak berwujud; dan

(3) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak Berwujud.

f) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

g) Berdasarkan masa manfaat, Aset Tidak Berwujud dapat dibedakan menjadi:

(1) Aset Tidak Berwujud dengan umur manfaat terbatas *(finite life)* yaitu Hak Paten atau Hak Cipta, Royalti, *Software*, Lisensi, Hasil Kajian, Aset Tak Berwujud Lainnya dan Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan dengan;

(2) Aset Tidak Berwujud dengan umur manfaat yang tak terbatas *(indefinite life)* yaitu *Goodwill*.

8. Amortisasi

1) Definisi

a) Amortisasi adalah pengurangan atau penurunan nilai Aset Tidak Berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.

b) Aset Tidak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

2) Pengakuan Amortisasi

Pengakuan amortisasi Aset Tidak Berwujud dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan Laporan Keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindahtangankan kepemilikannya.

3) Pengukuran Amortisasi

a) Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.

b) Masa manfaat Aset Tidak Berwujud dapat dijelaskan dalam berikut ini:

Tabel 4.7 Masa manfaat aset tidak berwujud

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TIDAK BERWUJUD	
Goodwill	Tidak Terbatas
Hak Paten atau Hak Cipta	20
Royalti	20

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Software	5
Lisensi	10
Hasil Kajian	5
Aset Tak Berwujud Lainnya	5
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	5

4) Pengungkapan Amortisasi

Amortisasi Aset Tidak Berwujud diungkapkan dalam Neraca dalam akun "Akumulasi Amortisasi" yang akan mengurangi Nilai Buku dari Aset Tidak Berwujud tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam LO sebagai "Beban Amortisasi".

5) Penyajian Amortisasi

Penyajian Amortisasi disajikan dalam Neraca bagian dari "Aset Tidak Berwujud".

9. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

a. Tujuan

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

b. Ruang Lingkup

1) Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas Pemerintah Daerah yang menyajikan Laporan Keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

2) Kebijakan akuntansi ini mengatur:

a) akuntansi kewajiban pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri; dan

b) perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

c) Definisi Kewajiban

1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

2) Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.

3) Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

10. Kewajiban Jangka Pendek

a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

1) Definisi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

b) Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan Iuran BPJS Kesehatan) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

2) Pengakuan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

3) Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh BUD namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

a) Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di Neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.

b) Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada Laporan Keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

b. Utang Bunga (*Accrued Interest)*

1) Definisi Utang Bunga (*Accrued Interest*)

a) Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.

b) Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

2) Pengakuan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

3) Pengukuran Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga (*Accrued Interest*) Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada CaLK. Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

c. Utang Jangka Pendek Lainnya

1) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan.

2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.

3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.

4) Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek.

d. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

1) Definisi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan:

a) Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara SKPKD yang dikelola oleh PPKD dan SKPD.

b) Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPKD dengan SKPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPKD atau Rekening Koran SKPKD. Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang dipimpin oleh PPKD.

c) Akun ini menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 diakomodasi dalam akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan.

d) Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan.

2) Pengakuan kewajiban untuk dikonsolidasikan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPD.

3) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan

a) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.

b) Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi

4) Pengungkapan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya pada SKPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi.

e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

1) Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca.

2) Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

a) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.

b) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

3) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di Neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di Neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

4) Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di Neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

f. Pendapatan Diterima Dimuka

1) Definisi Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain.

2) Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

3) Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam CaLK.

g. Utang Beban

1) Definisi Utang Beban

Utang Beban adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang

pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).

Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:

a) Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

b) Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air pdam, telepon oleh masing- masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.

c) Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

d) Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

2) Pengakuan Utang Beban

Utang Beban diakui pada saat:

a) Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

b) Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.

c) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

3) Pengukuran Utang Beban

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal Neraca.

4) Penyajian dan pengungkapan Utang Beban

Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam CaLK.

h. Utang Jangka Pendek Lainnya

1) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas.

2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul klaim kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal Neraca.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam CaLK.

11. Kewajiban Jangka Panjang

a. Utang Dalam Negeri

1) Definisi Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.

Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:

a) Utang Dalam Negeri-sektor perbankan;

b) Utang Dalam Negeri-sektor lembaga keuangan non bank;

c) Utang Dalam Negeri-obligasi;

d) Utang Pemerintah Pusat;

e) Utang Pemerintah Provinsi; dan

f) Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.

2) Pengakuan Utang Dalam Negeri

a) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.

b) Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

3) Pengukuran Utang Dalam Negeri

a) Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

b) Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

c) Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di CaLK berdasarkan pemberi pinjaman.

b. Utang Luar Negeri

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman menyatakan Pemerintah Daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri.

Dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (3) dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat menerima sumber dana dari Utang Luar Negeri dengan cara penerusan pinjaman dalam bentuk pinjaman atau hibah.

1) Definisi Utang Luar Negeri

a) Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran.

b) Nilai nominal adalah nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

c) Nilai tercatat (*carrying amount*) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

d) Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban *(present value)* dengan nilai jatuh tempo kewajiban *(maturity value)* karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.

e) Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban *(present value)* dengan nilai jatuh tempo kewajiban *(maturity value)* dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.

2) Pengakuan Utang Luar Negeri

Sesuai dengan PSAP 9 paragraf 21 disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

3) Pengukuran Utang Luar Negeri

a) Sesuai paragraf 32 PSAP 9, Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.

b) Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Luar Negeri

a) Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (*carrying amount*).

b) Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

c) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos- pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.

c. Utang Jangka Panjang Lainnya

1) Definisi Utang Jangka Panjang Lainnya

a) Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan.

b) Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Guna (BSG).

c) Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.

d) Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.

e) Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

2) Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya

a) Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.

b) Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.

3) Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya

a) Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.

b) Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya

a) Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam CaLK.

b) Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

12. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

a. Tujuan

1) Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2) Perlakuan akuntansi ekuitas mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi Ekuitas

1) Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan.

2) Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada LPE.

3) Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam LPE.

4) Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

5) Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K SKPKD diakomodasi pada rincian akun kewajiban untuk dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD ada pada klasifikasi aset untuk dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.

6) Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

d. Pengakuan Ekuitas

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

e. Pengukuran Ekuitas

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

f. Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK.

13. Kebijakan Akuntansi Pendapatan–LRA

a. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

b. Ruang Lingkup

1) Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA dalam penyusunan LRA.

2) Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Pendapatan LRA

1) Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

2) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

3) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

4) Pendapatan LRA terdiri dari:

a) Pendapatan Asli Daerah – LRA;

b) Pendapatan Transfer – LRA; dan

c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA.

d. Pengakuan Pendapatan LRA.

1) Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah dinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya.

2) Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

a) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.

b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.

c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

d) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

e) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

e. Pengukuran Pendapatan LRA

1) Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

f. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan LRA

1) Pendapatan – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:

a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan

d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

14. Pendapatan Asli Daerah–LRA (PAD – LRA)

a. Definisi PAD – LRA.

1) PAD – LRA adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.

2) PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah).

b. Pengakuan PAD – LRA.

PAD – LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.

c. Pengukuran PAD – LRA

PAD – LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat tanda Setoran.

d. Penyajian dan Pengungkapan PAD – LRA

PAD – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

15. Pendapatan Transfer–LRA

a. Definisi Pendapatan Transfer –LRA

Pendapatan Transfer – LRA adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

b. Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA

1) Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer – LRA pada RKUD. Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD.

2) Pendapatan Transfer – LRA ini hanya diakui dan dicatat di BUD atau dicatat oleh SKPKD.

c. Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA

Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.

d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer – LRA

Pendapatan Transfer – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

16. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA

a. Definisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah – LRA dan Pendapatan Transfer – LRA.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

1) Pendapatan Hibah – LRA;

2) Dana Darurat – LRA; dan

3) Pendapatan Lainnya – LRA.

b. Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada RKUD.

2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui oleh SKPKD.

c. Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada RKUD.

d. Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

17. Kebijakan Akuntansi Belanja

a. Tujuan

Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

c. Definisi Belanja

1) Belanja adalah semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2) Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan LRA.

3) Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

4) Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

5) Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang bukan berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

6) Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

7) Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

8) Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

9) Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

10) Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

11) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

12) Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

13) Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

14) Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

a) Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau SKPD Pengguna Anggaran; dan

b) Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

15) Klasifikasi Belanja secara terinci diuraikan dalam BAS.

d. Pengakuan Belanja

Belanja diakui pada saat:

1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD.

2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D GU/TU Nihil.

3) Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

e. Pengukuran Belanja

1) Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

2) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

f. Penyajian Dan Pengungkapan Belanja

1) Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

a) Belanja Operasi;

b) Belanja Modal;

c) Belanja Tidak Terduga; dan

d) Belanja Transfer.

2) Belanja disajikan dalam mata uang Rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

3) Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

18. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

a. Tujuan

1) Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2) Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi Pembiayaan

1) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

2) Pembiayaan terdiri dari :

a) Penerimaan pembiayaan; dan

b) Pengeluaran pembiayaan.

19. Penerimaan Pembiayaan

a. Definisi Penerimaan Pembiayaan

1) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

2) Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD dan BLUD.

b. Pengakuan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.

c. Pengukuran Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Penyajian dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

20. Pengeluaraan Pembiayaan

a. Definisi Pengeluaran Pembiayaan

1) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

2) Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPPKD dan BLUD

b. Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD.

c. Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

d. Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

e. Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Dana Bergulir

1) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.

2) Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi RKUD dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.

3) Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah RKUD dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.

4) Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui RKUD, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.

5) Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui RKUD), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

21. Saldo Anggaran Lebih (SAL)

a. Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL)

1) SAL adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

2) Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.

3) Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan.

4) SAL terdiri dari:

a) Surplus/Defisit – LRA;

b) Pembiayaan Netto;

c) SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan); dan

d) Perubahan SAL.

5) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

6) Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

7) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

8) Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan LRA dan LPSAL.

b. Pengakuan SAL

1) Akun SAL diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.

2) Akun ini akan menutup akun Pendapatan – LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.

c. Penyajian dan Pengungkapan SAL

SAL merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan LRA dan LPSAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

22. Kebijakan Akuntansi Pendapatan–LO

a. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam LO untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi Pendapatan-LO

1) Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

2) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

d. Pengakuan Pendapatan-LO

1) Pendapatan-LO diakui pada saat:

a) timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau

b) pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

2) Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

   a) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;

   b) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;

   c) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.

   d) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan).

   e) Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemerintah Daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

3) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

4) Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

   a) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan

      Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

   b) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

      Pencatatan pendapatan pada saat penyusunan laporan keuangan berdasarkan dua kondisi:

      (1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

         Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/ Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah.Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

(2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan- LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

5) Pengukuran Pendapatan-LO

a) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

c) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

6) Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan-LO

a) Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

b) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

(1) Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

(2) Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

(3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan

(4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

23. Kebijakan Akuntansi Beban

a. Tujuan

Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan

untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi Beban

1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

2) Beban merupakan unsur/komponen penyusunan LO.

3) Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

4) Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Tranfer, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.

5) Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang tidak berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

6) Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

7) Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

8) Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

9) Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

10) Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga,

kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

11) Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

12) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

13) Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

14) Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.

15) Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

16) Beban Tidak Terduga adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

17) Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

d. Pengakuan Beban

1) Beban diakui pada:

(a) Saat timbulnya kewajiban;

(b) Saat terjadinya konsumsi aset; dan

(c) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

2) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

3) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

4) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

5) Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

   (a) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;

   (b) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan

   (c) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

6) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

7) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

8) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

9) Pengakuan beban pada periode berjalan pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

10) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen SP2D LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

11) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

12) Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

(a) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.

(b) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

(c) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

(d) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

(e) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan peLaporan Keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

(f) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

e. Pengukuran Beban

Beban diukur sesuai dengan:

1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

f. Penyajian dan Pengungkapan Beban

1) Beban disajikan dalam LO. Rincian dari Beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

(a) Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Transfer dan Beban lain- lain;

(b) Beban Non Operasional; dan

(c) Beban Tidak Terduga.

2) Pos Tidak Terduga disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam LO dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

3) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

(a) Pengeluaran beban tahun berkenaan;

(b) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan

(c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

24. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang tidak dilanjutkan

a. Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

b. Ruang Lingkup

1) Dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

2) Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Defenisi

1) Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.

2) Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

3) Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

4) Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.

5) Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

6) Laporan Keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

d. Koreksi Kesalahan

1) Kesalahan dalam penyusunan Laporan Keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

2) Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

3) Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

a) Kesalahan yang tidak berulang; dan

b) Kesalahan yang berulang dan sistemik.

4) Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

a) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan

b) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

5) Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

6) Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

7) Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

8) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

9) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak,

dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

10) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

11) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun SAL.

Contoh koreksi kesalahan belanja:

a) yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas

Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.

b) yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.

c) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun SAL dan mengurangi saldo kas.

d) yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun SAL dan mengurangi saldo kas.

12) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

a) Yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.

b) Yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

13) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban:

a) Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain- lain-LO.

b) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.

14) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun SAL.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA:

a) Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

b) Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:

(1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun SAL dan mengurangi saldo kas.

(2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah SAL.

15) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

a) Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.

b) Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:

1. Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.

2. Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.

(1) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun SAL.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

a. Yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun SAL.

b. Yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun SAL dan mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

a) Yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun SAL.

b) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun SAL.

(2) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

a) Yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban

dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.

b) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

(3) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada LRA tidak perlu dilakukan koreksi

(4) Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam LAK tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

(5) Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.

25. Perubahan Kebijakan Akuntansi

a. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

b. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

c. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian Laporan Keuangan entitas.

d. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

1) Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan

2) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

e. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

f. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada LPE dan diungkapkan dalam CaLK.

27. Perubahan Estimasi Akuntansi

a. Agar memperoleh laporan keuangan yang handal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

b. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

c. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CaLK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

28. Operasi yang tidak dilanjutkan:

a. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.

b. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada CaLK.

c. Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada laporan keuangan.

d. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

e. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

1) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.

2) Fungsi tersebut tetap ada.

3) Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan kewilayah lain.

4) Menutup suatu fasilitas yang berutilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

29. Peristiwa Luar Biasa.

a. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah stermasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa- peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

b. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

c. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

d. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia.

e. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

f. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

g. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:

1. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
2. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
3. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan
4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

h. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam CaLK.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada

Pada dasarnya seluruh kebijakan akuntansi dijelaskan dalam bagian terdahulu. Namun demikian, setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan- kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib, Kurs. Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai akun-akun yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Pernyataan Standar ini.

Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang penting, sedapat mungkin menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi atas elemen-elemen utama laporan keuangan seperti pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan akuntansi yang hendak dijelaskan pada intinya adalah penjelasan mengenai basis dan kebijakan akuntansi yang mendasari pelaksanaan akuntansi pemerintahan yang menghasilkan Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi yang perlu dijelaskan adalah kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam mengakui, mencatat dan melaporkan seluruh hal yang terkait dalam Laporan Keuangan. Contoh penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang mencakup pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas adalah sebagai berikut:

a) Pengakuan Pendapatan pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah;

b) Pengakuan Belanja pada saat kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah;

c) Pengakuan Pembiayaan pada saat kas diterima pada/keluar dari Kas Umum Daerah;

d) Jenis-jenis sumber daya/kekayaan yang dapat dikelompokkan sebagai aset secara umum dan aset secara khusus yang terdiri dari aset lancar, investasi, aset tetap, dana cadangan.

Selain itu, dalam bagian ini pun diuraikan cara penilaiannya. Tentang Aset Tetap misalnya, bagian ini menguraikan bahwa Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Jenis-jenis kewajiban yang dapat dikelompokkan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Mengingat instrumen keuangan yang berkaitan dengan kewajiban jangka panjang mengandung kompleksitas yang masih belum banyak diketahui awam, bagian ini perlu ditambahi dengan penjelasan mengenai aspek-aspek khusus yang berkaitan dengan berbagai instrumen hutang jangka panjang seperti obligasi dan lain-lain.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

5.1. Rincian dan Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi pada Tahun Anggaran 2022. Selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, realisasi atas jumlah pendapatan, belanja, transfer, surplus/(defisit) dan pembiayaan adalah sebagai berikut:

5.1.1. Pendapatan Daerah – LRA

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp1.311.206.689.495,70	Rp1.418.077.322.328,40

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.311.206.689.495,70 atau 98,27% dari anggaran sebesar Rp1.334.353.095.216,00 yang terdiri dari:

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp154.965.471.085,70	Rp162.791.620.432,40

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp154.965.471.085.70 atau 89,80% dari target sebesar Rp172.558.357.397,80 atau kurang realisasi sebesar Rp17.592.886.311.30 dengan rincian sebagai berikut:

A.1. Pajak Daerah - LRA

Realisasi pajak daerah sebesar Rp27.198.848.606,86 atau 96,80% dari target sebesar Rp28.098.797.351,00 atau kurang realisasi sebesar Rp899.948.744,14 dengan rincian dalam Tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1 Daftar Rincian Pajak Daerah TA 2021

No.	Jenis Pajak	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Pajak Hotel	506.000.000,00	292.843.856,00	192.672.653,00
2	Pajak Restoran	4.068.036.370,00	4.194.834.107,00	3.855.189.002,00
3	Pajak Hiburan	30.230.000,00	6.500.000,00	2.050.000,00
4	Pajak Reklame	900.000.000,00	780.345.218,00	666.395.885,00
5	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	7.300.769.908,00	7.694.949.557,00	6.135.083.562,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.833.969.779,00	3.490.995.936,86	2.594.405.263,00

No.	Jenis Pajak	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
7	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.500.000.000,00	5.894.597.425,00	4.051.797.650,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	4.609.791.294,00	4.432.859.284,00	4.059.658.588,00
9	Pajak Parkir	250.000.000,00	294.682.500,00	75.382.250,00
10	Pajak Air Tanah	100.000.000,00	116.240.723,00	71.145.000,00
	Jumlah	**28.098.797.351,00**	**27.198.848.606,86**	**21.703.779.853,00**

A.2. Retribusi Daerah - LRA

Realisasi retribusi daerah sebesar Rp7.349.423.360,50 atau 80,17% dari target sebesar Rp9.167.860.000,00 atau kurang realisasi sebesar Rp1.818.436.639,50 dengan rincian pada Tabel 5.2 berikut ini:

Tabel 5.2 Daftar Rincian Retribusi Daerah TA 2021

No.	Jenis Retribusi	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Retribusi Jasa Umum	2.875.000.000,00	2.200.982.500,00	2.037.167.100,00
2	Retribusi Jasa Usaha	2.747.860.000,00	1.513.408.360,50	1.303.581.660,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	3.545.000.000,00	3.635.032.500,00	2.130.235.100,00
	Jumlah	**9.167.860.000,00**	**7.349.423.360,50**	**5.470.983.860,00**

Daftar rincian masing-masing retribusi tersebut dapat dilihat pada **lampiran 1**.

A.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LRA

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp8.283.046.458,00 atau 97,64% dari target sebesar Rp8.483.046.458,00 dengan rincian dalam Tabel 5.3 berikut.

Tabel 5.3 Daftar Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No.	Nama BUMD	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada PDAM Mual Natio	50.000.000,00	0,00	0,00
2.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD Pertanian	150.000.000,00	0,00	75.000.000,00
3.	PT Bank SUMUT (Dividen)	8.283.046.458,00	8.283.046.458,00	6.886.082.639,00
	Jumlah	**8.483.046.458,00**	**8.283.046.458,00**	**6.961.082.639,00**

A.4. Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA

Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp112.134.152.660,34 atau 88,43% dari target sebesar Rp126.808.653.588,00 atau kurang realisasi sebesar Rp14.674.500.927,66 dengan rincian dalam Tabel 5.4.

Tabel 5.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No.	Penerimaan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan – LRA	305.800.000,00	5.800.000,00	344.209.100,00
2	Penerimaan Jasa Giro – LRA	2.500.000.000,00	1.252.008.572,00	3.677.118.015,00
3	Pendapatan Bunga Deposito – LRA	5.500.000.000,00	4.218.750.000,00	3.708.333.330,00
4	Hasil dari Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan – LRA	320.690.000,00	234.091.462,40	536.306.040,00
5	Pendapatan Dana Kapitasi JKN – LRA	13.873.000.000,00	9.276.351.465,00	11.432.280..075,00
6	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	86.535.287.256,00	93.600.111.863,00	103.765.397.756,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LRA	4.000.000.000,00	2.523.456.777,94	3.295.560.095,06
8	Pendapatan dari Pengembalian-LRA	13.633.876.332,00	916.677.520,00	1.718.534.669,34
9	Hasil Kerja Sama Daerah	100.000.000,00	106.905.000,00	178.035.000,00
10	Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	40.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	**126.808.653.588,00**	**112.134.152.660,34**	**128.655.774.080,40**

Dapat dijelaskan bahwa Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp3.916.677.520,00, merupakan pengembalian-pengembalian atas keterlanjuran penghasilan, pengembalian atas belanja dan pengembalian TGR sebelum tahun anggaran 2022. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada **lampiran 2.**

B. Pendapatan Transfer - LRA

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp1.144.667.163.798,00	Rp1.178.811.365.743,00

Pendapatan transfer merupakan penerimaan daerah yang berasal dari transfer atau penerimaan dari pemerintah pusat, pemerintah pusat lainnya, pemerintah daerah lainnya maupun pemerintah provinsi dengan persentase atau pembagian tertentu. Transfer ke daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 menjadi dasar acuan penganggaran penerimaan transfer pada APBD 2022. Realisasi pendapatan transfer

sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.144.667.163.798,00 atau 99,97% dari target sebesar Rp1.145.048.795.137,00 dengan rincian:

B.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA

Realisasi dana perimbangan dari pemerintah pusat sebesar Rp1.091.966.702.935,00 atau 99,70% dari target sebesar Rp1.095.280.067.190,00 dengan rincian sebagaimana dalam Tabel 5.5 berikut:

Tabel 5.5 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

No	Penerimaan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Dana Perimbangan	906.905.239.190,00	903.591.874.935,00	907.453.944.060,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	29.706.794.000,00
3	Dana Desa	188.374.828.000,00	188.374.828.000,00	192.016.817.000,00
	Jumlah	**1.095.280.067.190,00**	**1.091.966.702.935,00**	**1.129.177.555.060,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan sebesar Rp903.591.874.935,00, terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil (DBH) realisasi sebesar Rp79.675.626.142,00 atau 143,55% dari anggaran sebesar Rp55.505.645.000,00.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) realisasi sebesar Rp596.239.246.009,00 atau 99,96% dari anggaran sebesar Rp596.478.347.690,00.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik realisasi sebesar Rp61.316.619.966,00 atau 93,94% dari anggaran sebesar Rp65.271.856.500,00.
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik realisasi sebesar Rp166.360.382.818,00 atau 87,72% dari anggaran sebesar Rp189.649.390.000,00.

Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dialokasikan kepada 241 Desa di Kabupaten Tapanuli Utara, dimana rincian alokasi Dana Desa per desa dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

B.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA

Realisasi Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp52.700.460.863,00 atau 105,89% dari target sebesar Rp49.768.727.947,00. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya adalah merupakan dana transfer dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dialokasikan untuk setiap Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara, yaitu berupa Bagi Hasil Pajak sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/189/KPTS/2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Rincian Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada

Kabupaten/Kota yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rincian sesuai Tabel 5.6 berikut.

Tabel 5.6 Realisasi Transfer Antar Daerah

No	Penerimaan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.011.261.060,00	10.011.261.060,00	13.217.342.334,00
2	Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	5.680.402.201,00	5.680.402.201,00	6.916.944.472,00
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor (PBB-KB)	12.751.132.208,00	12.751.132.208,00	11.403.297.897,00
4	Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PAP)	523.069.564,00	523.069.564,00	224.330.310,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	19.302.862.914,00	21.263.152.630,00	17.871.895.670,00
6	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	2.500.000.000,00	2.441.443.200,00	0,00
7	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0,00	30.000.000,00	0,00
	Jumlah	**49.768.727.947,00**	**52.700.460.863,00**	**49.633.810.683,00**

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah - LRA

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp11.574.054.612,00	Rp76.474.336.153,00

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp11.574.054.612,00 atau sebesar 69,12% dari target sebesar Rp16.745.942.682,00 atau kurang realisasi sebesar Rp5.171.888.070,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7 Realisasi Lain-Lain Pendapatan daerah yang Sah

No	Penerimaan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	16.745.942.682,00	11.574.054.612,00	16.140.380.025,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	60.333.956.128,00
	Jumlah	**16.745.942.682,00**	**11.574.054.612,00**	**76.474.336.153,00**

Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp11.574.054.612,00 merupakan Pendapatan Bonus Produksi panas bumi dari PT SOL Tahun Anggaran 2022.

5.1.2. Belanja.

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp1.429.139.214.177,15	Rp1.473.274.599.069,95

Realisasi belanja tidak melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp1.429.139.214.177,15 atau 94,76% dari anggaran sebesar Rp1.508.231.909.779,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp79.092.695.601,85. Capaian belanja dirinci menjadi:

A. Belanja Operasi.

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp910.494.986.690,52	Rp918.034.972.259,75

Realisasi belanja operasi sebesar Rp910.494.986.690,52 atau 92,03% dari anggaran sebesar Rp989.374.692.503,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp78.879.705.812,48 dengan rincian dalam Tabel 5.8.

Tabel 5.8. Realisasi Belanja Operasi

No	Belanja	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Belanja Pegawai	550.253.436.808,00	511.725.220.276,00	521.578.901.088,90
2	Belanja Barang dan Jasa	351.702.687.446,00	371.597.822.512,89	326.238.489.421,85
3	Belanja Bunga	4.150.478.000,00	4.387.554.738,63	0,00
4	Belanja Hibah	80.628.699.063,00	16.935.055.043,00	68.565.971.013,00
5	Belanja Bantuan Sosial	2.639.391.186,00	5.849.334.120,00	1.651.610.736,00
	Jumlah	**989.374.692.503,00**	**910.494.986.690,52**	**918.034.972.259,75**

A.1. Belanja Pegawai

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp511.725.220.276,00	Rp521.578.901.088,90

Realisasi belanja pegawai sebesar Rp511.725.220.276,00 atau 93,00% dari anggaran sebesar Rp550.253.436.808,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp38.528.216.532,00, Rincian belanja pegawai dapat dilihat pada Tabel 5.9 berikut:

Tabel 5.9. Rincian Belanja Pegawai per Objek

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Gaji dan Tunjangan	375.375.181.020,00	339.785.460.080,00	334.607.690.621,90
2	Tambahan Penghasilan PNS	94.153.693.200,00	79.835.273.258,00	56.972.437.647,00
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	713.100.000,00	616.280.000,00	575.280.000,00
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	64.586.924.342,00	60.942.426.187,00	115.032.682.743,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.436.424.964,00	13.189.784.930,00	13.228.158.165,00
6	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	172.168.391,00	279.958.766,00	172.685.243,00
7	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.275.956.091,00	872.129.132,00	786.029.565,00
8	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	539.988.800,00	291.536.723,00	203.937.104,00
9	Belanja Pegawai BOS	0,00	15.912.371.200,00	0,00
	Jumlah	**550.253.436.808,00**	**511.725.220.276,00**	**521.578.901.088,90**

A.2. Belanja Barang dan Jasa

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp371.597.822.512,89	Rp326.238.489.421,85

Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp371.597.822.512,89 atau 105,66% dari anggaran sebesar Rp351.702.687.446,00 lebih realisasi sebesar Rp19.895.135.066,89. Rincian belanja barang dan jasa dapat dilihat pada Tabel 5.10.

Tabel 5.10 Rincian Belanja Barang dan Jasa per Objek

No.	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Belanja Barang	93.009.867.162,00	89.338.207.875,74	106.902.727.657,98
2	Belanja Jasa	99.405.385.912,00	93.467.509.136,15	171.311.502.362,87
3	Belanja Pemeliharaan	4.230.073.445,00	3.825.649.066,00	3.351.002.188,00
4	Belana Perjalanan Dinas	44.562.945.924,00	42.726.798.318,00	34.364.826.073,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	27.167.754.176,00	21.965.054.644,00	10.308.431.140,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	33.008.068.673,00	0,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	83.326.660.827,00	87.266.534.800,00	0,00
	Jumlah	**351.702.687.446,00**	**371.597.822.512,89**	**326.238.489.421,85**

untuk belanja barang sebesar Rp89.338.207.875,74 merupakan belanja barang pakai habis sebesar Rp89.323.962.699,74 dan belanja barang tidak pakai habis sebesar Rp14.245.176,00.

Untuk belanja jasa dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Jasa Kantor sebesar Rp65.432.584.084,00.
b. Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi sebesar Rp17.115.793.497,00.
c. Belanja sewa peralatan mesin sebesar Rp2.828.926.725,15.
d. Belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp1.053.052.120,00.
e. Belanja Jasa Konsultansi konstruksi sebesar Rp3.580.007.800,00.
f. Belanja Jasa Konsultansi Non konstruksi sebesar Rp886.178.910,00.
g. Belanja kursus/ pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp2.570.966.000,00.

Sedangkan belanja pemeliharaan digunakan untuk pemeliharaan sebagai berikut:

a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.600.608.206,00.
b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp225.040.860,00.

Belanja perjalanan pada Tahun Anggaran 2022 realisasi sebesar Rp42.726.798.318,00, yang dipergunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp42.647.363.090,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp79.435.228,00.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri dari berikut:

a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp31.733.866.698,00.
b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp10.832.496.392,00.
c. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp81.000.000,00.

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat merupakan belanja yang diberikan kepada pihak lain yaitu:

a. Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp493.476.408,00.
b. Belanja Beasiswa sebesar Rp165.000.000,00.
c. Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) Rp1.100.000.000,00.
d. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp19.569.230.517,00.
e. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat sebesar Rp637.347.719,00.

A.3. Belanja Bunga

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp4.387.554.738,63	Rp0,00

Realisasi belanja bunga Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp3.685.286.170,00 merupakan Belanja Bunga Utang Pinjaman PEN kepada PT. SMI (Persero) dan Pembayaran Biaya Provisi Pinjaman PEN Tahun 2021 sebesar Rp702.268.568,63, dimana sebelumnya dianggaran pada pos rekening Pengeluaran Pembiayaan dan realisasi dicatatkan pada Belanja Bunga.

A.4. Belanja Hibah

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp16.935.055.043,00	Rp68.565.971.013,00

Realisasi belanja hibah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp16.935.055.043,00 merupakan belanja hibah yang dikelola oleh OPD pengelola hibah dimana realisasi belanja hibah dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp16.063.816.000,00.

b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp871.239.043,00.

Rincian realisasi Belanja Hibah pada **lampiran 4**.

A.5. Belanja Bantuan Sosial.

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp5.849.334.120,00	Rp1.651.610.736,00

Realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp5.849.334.120,00 atau 221,62% dari anggaran sebesar Rp2.639.391.186,00 sehingga lebih realisasi sebesar Rp3.213.166.934,00, terdiri dari:

1. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu realisasi sebesar Rp1.044.775.020,00 atau 97,70% dari anggaran sebesar Rp1.069.391.186,00.
2. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga realisasi sebesar Rp3.780.559.100,00 atau 756,11% dari anggaran sebesar Rp500.000.000,00.
3. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat realisasi sebesar Rp1.024.000.000,00 atau 95,70% dari anggaran sebesar Rp1.070.000.000,00.

Untuk keterangan yang lebih rinci dapat dilihat pada **lampiran 5**.

B. Belanja Modal

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp249.371.360.042,63	Rp287.918.257.694,20

Realisasi belanja modal sebesar Rp249.371.360.042,63 atau 100,47% dari anggaran sebesar Rp248.203.847.132,00 sehingga lebih realisasi sebesar Rp1.167.512.910,63 dengan rincian dalam Tabel 5.11. Sedangkan rekapitulasi belanja modal per SKPD dapat dilihat dalam **lampiran 6**.

Tabel 5.11 Realisasi Belanja Modal TA 2022

No	Belanja	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Belanja Tanah	1.194.894.342,00	216.405.558,00	5.032.098.143,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	33.496.699.116,00	45.730.931.689,63	41.376.791.335,91

No	Belanja	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
3	Belanja Bangunan dan Gedung	38.487.335.072,00	35.287.481.926,18	102.883.849.131,30
4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	174.876.418.602,00	160.284.346.599,82	138.088.293.593,99
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	148.500.000,00	7.852.194.269,00	537.225.490,00
	Jumlah	**248.203.847.132,00**	**249.371.360.042,63**	**287.918.257.694,20**

B.1. Belanja Modal Tanah

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp216.405.558,00	Rp5.032.098.143,00

Realisasi belanja modal tanah sebesar Rp216.405.558,00 atau 18,11% dari anggaran sebesar Rp1.194.894.342,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp978.488.784,00. Realisasi belanja modal tanah terdiri dari Belanja Modal Tanah Persil Lainnya sebesar Rp216.405.558,00.

B.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp45.730.931.689,63	Rp41.376.791.335.91

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp45.730.931.689,63 atau 136.52% dari anggaran sebesar Rp33.496.699.116,00 lebih realisasi sebesar Rp12.234.232.573.63, rincian belanja modal peralatan dan mesin dapat dilihat pada berikut ini:

Tabel 5.12 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	956.986.000,00	927.240.500,00	136.557.200,00
2	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	7.378.743.000,00	6.734.919.415,00	7.286.845.798,90
3	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel bermesin	787.508.000,00	714.548.000,00	887.000.000,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	16.000.000,00	16.000.000,00	2.324.087.700,00
6	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.179.404.085,00	6.709.305.529,00	7.601.990.330,01

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
7	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.620.156.928,00	4.402.070.037,70	4.449.073.162,00
8	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	299.297.000,00	283.980.970,00	184.109.000,00
9	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kesehatan	9.518.707.803,00	20.418.374.845,00	11.878.427.745,00
10	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat peraga/ praktek sekolah	0,00	0,00	42.143.600,00
11	Pengadaan Unit-unit Laboratorium	5.633.065.800,00	5.407.509.600,00	5.970.575.100,00
12	Belanja Modal Alat Eksplorasi	20.000.000,00	18.234.000,00	477.602.000,00
13	Belanja Modal Alat Pengeboran	10.000.000,00	9.046.500,00	0,00
14	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	19.257.500,00	0,00
15	Belanja Modal Rambu-Rambu	60.330.500,00	58.444.792,93	60.250.000,00
16	Belanja Modal Peralatan Olahraga	16.500.000,00	12.000.000,00	78.129.700,00
	Jumlah	**33.496.699.116,00**	**45.730.931.689,63**	**41.376.791.335.91**

B.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp35.287.481.926,18	Rp102.883.849.131,30

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan berupa pembangunan konstruksi gedung kantor, gudang, gedung sekolah, bangunan pasar, sebesar Rp35.287.481.926,18 atau 91,69% dari anggaran sebesar Rp38.487.335.072.00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp3.199.853.145,82. Untuk rincian realisasi belanja modal gedung dan bangunan dapat dilihat pada Tabel 5.13.

Tabel 5.13 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Tempat Kerja	34.574.112.499,00	33.326.187.456,46	102.396.827.372,30
2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.000.000.000,00	1.049.182.147,00	0,00
4	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Bangunan Tugu Titik Kontrol/ Pasti	913.222.573,00	912.112.322,72	487.021.759,00
	Jumlah	**38.487.335.072,00**	**35.287.481.926,18**	**102.883.849.131,30**

B.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp160.284.346.599,82	Rp138.088.293.593,99

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp160.284.346.599,82 atau 91,66% dari anggaran sebesar Rp174.876.418.602,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp14.592.072.002,18, sesuai Tabel 5.14.

Tabel 5.14 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	151.180.479.060,00	137.779.653.090,89	104.722.458.070,10
2	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	7.447.625.495,00	6.773.221.063,00	9.183.508.708,18
3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	12.274.023.606,00	11.770.882.035,93	10.260.145.197,15
4	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	2.545.321.792,00	2.540.901.610,00	965.340.793,00
5	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	674.500.000,00	673.805.000,00	0,00
6	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/ Baku	69.972.495,00	69.110.400,00	848.596.999,00
7	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	9.752.358.500,00
8	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	397.579.200,00
9	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	0,00	1.958.306.126,56
10	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	684.496.154,00	676.773.400,00	0,00
	Jumlah	**174.876.418.602,00**	**160.284.346.599,82**	**138.088.293.593,99**

B.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp7.852.194.269,00	Rp537.225.490,00,00

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya berupa pengadaan buku, barang bercorak kebudayaan dan asset tak berwujud sebesar

Rp7.852.194.269,00 dari anggaran sebesar Rp148.500.000,00 sehingga lebih realisasi sebesar Rp7.703.694.269,00. Rincian belanja modal aset tetap lainnya dapat dilihat pada Tabel 5.15.

Tabel 5.15 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA. 2022

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Pengadaan Buku	60.000.000,00	59.700.573,00	346.310.490,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	38.500.000,00	7.742.556.206,00	45.000.000,00
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00	49.937.490,00	145.915.000,00
	Jumlah	**148.500.000,00**	**7.852.194.269,00**	**537.225.490,00**

C. Belanja Tak Terduga

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp12.942.417.200,00	Rp10.126.560.516,00

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa misalnya untuk penanggulangan bencana alam, dimana pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengalokasikan sebagian besar Belanja Tidak Terduga untuk penanganan Bencana Gempa Bumi yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp12.942.417.200,00 atau 90,36% dari anggaran sebesar Rp14.322.919.900,00, sehingga kurang realisasi sebesar Rp1.380.502.700,00 dengan rincian dapat dilihat pada **lampiran 7**.

D. Belanja Transfer

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp256.330.450.244,00	Rp257.194.808.600,00

Belanja Transfer merupakan belanja bagi hasil pajak daerah dan belanja bantuan keuangan. Realisasi belanja bagi hasil pajak daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.299.290.744,00. Bantuan Keuangan merupakan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa, dimana untuk Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD sebesar Rp64.656.331.500,00 sedangkan realisasi dana desa yang bersumber dari APBN berdasarkan transfer dari Pusat untuk tahun 2022 sebesar Rp188.374.828.000,00, sampai dengan 31 Desember 2022, dana desa untuk Kabupaten Tapanuli Utara telah seluruhnya ditransfer oleh Pemerintah Pusat , rincian dana desa terdapat pada **lampiran 3**.

5.1.3. Pembiayaan Netto

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp 181.014.100.635,32	Rp227.132.230.399,85

Pembiayaan netto sebesar Rp181.014.100.635,32 adalah selisih antara realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp193.830.810.519,93 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp12.816.709.884,61.

A. Penerimaan Pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp193.830.810.519,93 atau 100,78% dari anggaran sebesar Rp192.336.463.258,00.

B. Pengeluaran Pembiayaan.

Realisasi pengeluaran pembiayaan yang merupakan Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kepada PT Bank Sumut, PDAM Mual Na Tio dan biaya pengelolaan, dengan rincian dalam tabel berikut:

Tabel 5.16 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

No	Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada BUMD PT Bank Sumut	3.051.648.695,00	2.999.994.336,61	2.536.977.814,00
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada PDAM Mual Natio	0,00	0,00	5.000.000.000,00
3	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	15.406.000.000,00	9.816.715.548,00	3.782.593.361,45
	Jumlah	**18.457.648.695,00**	**12.816.709.884,01**	**11.319.571.175,45**

5.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp63.081.575.953,87	Rp171.934.953.658,30

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebesar Rp63.081.575.953,87. Hal ini disebabkan adanya defisit APBD Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2022 sebesar (Rp117.932.524.681.45) ditambah dengan pembiayaan netto sebesar Rp181.014.100.635.32.

5.2. Rincian Dan Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

5.2.1. Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp171.934.953.658,00 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2021. Jumlah SAL tersebut telah direalisasikan sebagai penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2021 dari yang dianggarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp171.934.953.658,00. Pada tahun anggaran 2022 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan menjadi sebesar Rp171.934.953.658,00.

5.2.2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan realisasi defisit APBD Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2022 sebesar Rp117.932.524.681.45 ditambah dengan pembiayaan netto sebesar Rp181.014.100.635.32 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp63.081.575.953.87. SILPA Tahun Anggaran 2022 tersebut berasal dari pelampauan target pendapatan, sisa anggaran belanja, transfer dan kelebihan pembiayaan netto, sebagaimana diuraikan berikut ini:

A. Kurang realisasi dari target pendapatan sebesar (Rp23.146.405.720,30)

B. Dari anggaran belanja sebesar Rp1.508.231.909.779,00 realisasinya sebesar Rp1.429.139.214.177,15 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar (Rp79.092.695.601,85). Sisa belanja tersebut terdiri atas rincian sebagai berikut:

   a. Sisa anggaran belanja operasi sebesar Rp78.879.705.812,48 yang terdiri atas:

      - Sisa anggaran belanja pegawai sebesar Rp38.528.216.532,00.
      - Kelebihan belanja barang dan jasa sebesar Rp19.895.135.066,89.
      - Kelebihan Belanja Bunga sebesar Rp237.076.738,63.
      - Sisa Belanja Hibah sebesar Rp63.693.644.020,00.
      - Kelebihan belanja bantuan sosial Rp3.209.942.934,00.

   b. Kelebihan belanja modal sebesar Rp1.167.512.910,63.

   c. Sisa anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp1.380.502.700,00.

C. Terdapat kelebihan pembiayaan netto sebesar Rp181.014.100.635,32 yang berasal dari selisih penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp193.830.810.519,93 dengan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp12.816.709.884,61.

5.2.3. Saldo Anggaran Lebih Akhir (SAL)

Jumlah SAL per 31 Desember 2021 sebesar Rp63.081.575.953,87.

5.3. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.3.1. Aset Lancar

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp97.055.624.263.63	Rp216.596.561.134,87

Saldo Aset Lancar senilai Rp97.055.624.263.63 terdiri dari saldo Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOS, Kas Dana Kapitasi pada FKTP, Kas Lainnya, Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang dan Persediaan per 31 Desember 2022.

A. **Kas**

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp63.373.858.997,87	Rp172.195.177.661.30

Saldo kas sebesar Rp63.373.858.997,87, terdiri dari:

A.1. Kas di Kas Daerah

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp60.309.688.631.07	Rp147.997.984.794,50

Jumlah Kas Di Kas Daerah adalah sebesar Rp60.309.688.631.07 yang merupakan saldo giro bank milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2022 dan sisa dana kapitasi BPJS pada FKTP, rincian kas di kas daerah dapat dilihat pada Tabel 5.17.

Tabel 5.17 Daftar Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022

	Nama Bank	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Bank Sumut Cabang Tarutung AC. 320.01.02.000266-0	60.277.065.923,07	146.114.877.459,50
2	Bank Sumut Cabang Tarutung AC. 320. 01.02.000001-0	0,00	0,00
3	Bank BRI Cabang Tarutung AC. 0099.01.000027.30.2	0,00	281.250,00
	Jumlah	**60.277.065.923,07**	**146.115.158.709,50**
	Sisa Dana Kapitasi BPJS Tahun 2021 + BMHP/Obat	32.622.708.00	1.882.826.085,00
	Jumlah	**32.622.708.00**	**1.882.826.085,00**
	Jumlah Kas di Kas Daerah	**60.309.688.631.07**	**147.997.984.794,50**

Kas di Bendahara FKTP Dana BPJS merupakan sisa Dana Kapitasi BPJS yang masih berada pada Bendahara Dana JKN pada Puskesmas se-Kabupaten Tapanuli Utara. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah Pasal 6 ayat (4) bahwa Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari rekening BUD.

Pada Tahun Anggaran 2022, Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara mengelola kegiatan yang anggarannya bersumber dari Pemerintah Pusat dan dari Badan Pelaksana Jaminan Kesehatan (BPJS). Hal tersebut dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900/2280/SJ tanggal 05 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Alokasi Dana Kapitasi BPJS digunakan untuk Jasa Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas sebesar 60%, Alokasi Dana Kapitasi Dukungan Operasional seperti Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Habis Pakai sebesar 40%.

Berdasarkan Laporan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara tercatat Laporan Realisasi Dana Kapitasi BPJS di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.18 Anggaran dan Realisasi Dana Kapitasi BPJS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022

No	FKTP	Rekening Bank	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir
1	Puskesmas Silangit	AC.0099-01-007950-53-0	49.249.824,00	384.830.570,00	433.669.780,50	410.613,50
2	Puskesmas Siatas Barita	AC.0099-01-007941-53-1	29.824.221,00	568.055.278,00	592.753.631,00	5.125.868,00
3	Puskesmas Hutabaginda	AC.0099-01-007934-53-4	323.206.170,00	1.295.165.528,00	1.618.349.852,00	21.846,00
4	Puskesmas	AC.0099-01-007944-53-9	114.675.302,00	475.939.871,00	587.827.317,25	2.787.855,75

No	FKTP	Rekening Bank	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir
	Parsingkaman					
5	Puskesmas Sarulla	AC.0099-01-007936-53-6	85.676.780,00	292.437.546,00	377.769.126,25	345.199,75
6	Puskesmas Janji Angkola	AC.0099-01-007939-53-4	54.768.311,00	241.007.651,00	295.557.230,25	218.731,75
7	Puskesmas Onan Hasang	AC.0099-01-007949-53-9	49.836.656,00	484.624.144,00	531.618.874,00	2.841.926,00
8	Puskesmas Lumban Sinaga	AC.0099-01-007932-53-2	39.787.120,00	377.078.780,00	416.033.076,50	832.823,50
9	Puskesmas Pangaribuan	AC.0099-01-007940-53-5	114.788.802,00	312.671.148,00	424.656.539,75	2.803.410,25
10	Puskesmas Garoga	AC.0099-01-007947-53-7	71.550.383,00	514.828.242,00	585.447.917,25	930.707,75
11	Puskesmas Sipoholon	AC.0099-01-007931-53-6	122.621.272,00	477.269.880,00	592.689.162,50	7.201.989,50
12	Puskesmas Sitada-tada	AC.0099-01-007945-53-5	74.256.888,00	286.073.412,00	359.413.113,00	917.187,00
13	Puskesmas Siborong-borong	AC.0099-01-007943-53-3	231.244.725,00	958.351.800,00	1.189.564.445,00	32.080,00
14	Puskesmas Butar	AC.0099-01-007933-53-8	77.766.559,00	339.026.583,00	414.560.966,25	2.232.175,75
15	Puskesmas Sipahutar	AC.0099-01-007946-53-1	195.552.336,00	838.806.964,00	1.034.288.093,00	71.207,00
16	Puskesmas Muara	AC.0099-01-007935-53-0	86.123.161,00	446.090.289,00	531.173.077,25	1.040.372,75
17	Puskesmas Aek Raja	AC.0099-01-007937-53-2	100.523.078,00	183.296.298,00	282.723.114,75	1.096.261,25
18	Puskesmas Parmonangan	AC.0099-01-007942-53-7	14.403.284,00	220.444.061,00	234.812.887,00	34.458,00
19	Puskesmas Simangumban	AC.0099-01-007948-53-3	36.824.451,00	240.750.899,00	276.557.290,50	1.018.059,50
20	Puskesmas Sipultak	AC.0099-01-000787-30-0	9.480.847,00	149.293.353,00	156.260.957,00	2.513.243,00
21	Puskesmas Paniaran	AC.0099-01-001284-30-5	665.915,00	163.359.411,00	163.878.633,00	146.693,00
Jumlah			1.882.826.085,00	9.249.401.708,00	11.099.605.084,00	32.622.708,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara

A.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp0,00	Rp0,00

Saldo kas yang ada di bendahara penerimaan SKPD per 31 Desember 2022 adalah Nihil.

A.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp953.864,00	Rp5.391.500,00

Saldo kas yang ada di bendahara pengeluaran SKPD per 31 Desember 2022 sebesar Rp953.864,00. Kas ini merupakan UYHD, yakni Pengembalian Kurang Setor sisa TU dari Dinas Kesehatan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan TW II Tahun 2022 sebesar Rp80.000,00 yang telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 19 Januari 2023, Kurang Setor sisa TU dari Sekretariat Daerah Kegiatan RT Wakil Bupati Bulan Maret Tahun 2022 sebesar Rp273.864,00 yang telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 19 Januari 2023 dan Kurang Setor sisa TU dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kegiatan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) sebesar Rp600.000,00 yang telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 03 Januari 2023.

A.4. Kas di BLUD

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp1.807.065.832,00	Rp22.945.373.571,00

Saldo kas di BLUD RSU Daerah Tarutung Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.807.065.832,00. Kas ini merupakan selisih antara pendapatan dan belanja pada BLUD RSU Daerah Tarutung.

A.5. Kas di Bendahara BOS dan BOP PAUD

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2021
Rp963.867.626,80	Rp986.203.792,80

Rincian sisa dana di Bendahara Dana BOS dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.19 Silpa Dana BOS per 31 Desember 2022

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal	986.203.792.80
2	Pendapatan Dana BOS	64.428.857.980.00
3	Belanja Dana BOS	64.457.057.146.00
	Sisa Tahun 2022	**958.004.626.80**

Sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp958.004.626.80. Lebih rinci terkait dengan alokasi dana BOS tingkat SD terdapat pada **lampiran 8** dan SMP terdapat pada **lampiran 9.** Selain itu terdapat sisa dana BOP PAUD untuk sekolah TK Negeri tahun anggaran 2022 sebesar Rp5.863.000,00, dimana jumlah yang ditransfer Pemerintah Pusat sebesar Rp225.109.000,00 dan realisasi sebesar Rp219.246.000,00.

A.6. Kas Lainnya

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp292.283.044,00	Rp260.224.003,00

Saldo Kas Lainnya Per 31 Desember 2022 sebesar Rp292.283.044,00 merupakan kas yang ada di Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dibuka berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penetapan Ketua Pelaksana Harian, Bendahara, dan Nomor Rekening Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 dengan Nomor Rekening 32002040176400 pada Bank Sumut Cabang Tarutung. Dana yang masuk ke rekening gugus tugas berasal dari sumbangan pihak ketiga, baik perorangan maupun kelompok masyarakat, adapun saldo akhi per 31 Desember 2022 di rekening Gugus Tugas Penanganan Covid-19 sebesar Rp263.360.957,00, sedangkan sisanya berada di Rekening Tapanuli Utara Margogo dengan Nomor Rekening 32002040195090 sebesar Rp28.922.087,00 yang merupakan rekening untuk menggalang bantuan korban bencana gempa di Kabupaten Tapanuli Utara yang terjadi pada tanggal 01 Oktober 2022.

B. Piutang Pendapatan

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp27.027.618.947,13	Rp34.763.356.747.13

Piutang Pendapatan tahun anggaran 2022 sebesar Rp27.027.618.947,13 terdiri dari:

B.1. Piutang Pajak Daerah

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp11.651.210.234,00	Rp22.076.117.734,00

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.651.210.234,00 dengan rincian dalam Tabel 5.20 berikut.

Tabel 5.20 Daftar Piutang Pendapatan TA 2022

No.	Nama Piutang	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Pajak Hotel	38.851.200,00	44.255.200,00
2	Pajak Restoran	314.772.037,00	322.126.437,00
3	Pajak Hiburan	18.561.200,00	18.561.200,00
4	PPJU	0,00	117.318.896,00
5	DBH Provinsi Sumatera Utara	0,00	11.794.505.604,00
6	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	11.279.025.797,00	9.779.350.397,00
	Jumlah	**11.651.210.234,00**	**22.076.117.734,00**

Keterangan lebih rinci terdapat pada **Lampiran 11.**

B.2. Piutang Retribusi Daerah

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp1.049.000.713,13	Rp910.395.013,13

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.049.000.713,13. Keterangan lebih rinci pada **Lampiran 12**.

B.3. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp14.327.408.000,00	Rp11.776.844.000,00

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp14.327.408.000,00 yang merupakan piutang pendapatan BLUD RSUD Tarutung, yang merupakan Piutang Usaha dari Jasa Layanan Umum BPJS untuk bulan Oktober – Desember 2021.

B.4. Piutang Lainnya

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp3.157.221.638.21	Rp3.174.729.249,29

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.157.221.638.21, piutang ini merupakan TGR Kerugian Daerah yang telah ditetapkan statusnya pada Tahun 2005 s.d 2022 dan saldo Remunerasi sebesar Berdasarkan PMK Nomor 19 Tahun 2023 tentang

Pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara non tunai melalui Fasilitas Treasury Deposit (TDF), dengan rincian dalam Tabel 5.21 berikut:

Tabel 5.21 Daftar Piutang Lain-lain TA 2022

No.	Nama Piutang	Saldo 2022	Saldo 2021
1	TGR Kerugian Daerah	3.155.588.690,65	3.174.729.249,29
2	Saldo Remunerasi TDF	1.632.947,56	0,00
	Jumlah	**3.157.221.638.21**	**3.174.729.249,29**

Rincian TGR Kerugian daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada **lampiran 10**.

C. **Penyisihan Piutang**

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp7.456.601.141,35	Rp5.335.679.731,15

Perhitungan penyisihan piutang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir.

Penyisihan piutang pajak daerah daerah Tahun Anggaran 2022 merupakan penyisihan pajak daerah sebesar Rp6.616.357.740,50 (rincian pada **lampiran 11**) dan Penyisihan Retribusi daerah sebesar Rp840.243.400,85 (rincian pada **lampiran 12**).

D. **Persediaan**

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp10.953.525.821,77	Rp11.798.977.208,30

Jumlah saldo persediaan barang habis pakai yang dikelola oleh pengguna barang melalui bendahara barang daerah pada tiap SKPD per 31 Desember 2022 berdasarkan hasil *stock opname* yang dilakukan pada akhir tahun sebesar Rp10.953.525.821,77. Rincian pada **lampiran 14**.

5.3.2. Investasi Jangka Panjang.

Jumlah investasi jangka panjang sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp81.691.358.439,61 yang terdiri dari Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen. Rincian Investasi Jangka Panjang dapat dilihat pada Tabel 5.22 berikut:

Tabel 5.22 Daftar Investasi Jangka Panjang TA 2021

Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	3.522.788.739,00	3.522.788.739,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	78.168.569.700,61	81.624.056.573,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang	**81.691.358.439,61**	**85.146.845.312,00**

1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp3.522.788.739,00	Rp3.522.788.739,00

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen berupa Investasi Non Permanen lainnya per 31 Desember 2022 yang merupakan investasi dalam bentuk dana bergulir dari Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2010 yang diberikan kepada masyarakat, LSM dan Badan Usaha lainnya sebesar Rp3.522.788.739,00, dengan rincian:

- Dana Bergulir UKM dikelola oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Rp2.462.656.220,00
- Dana Bergulir Bona Pasogit dikelola oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Tap. Utara dimana penyalurannya melalui PT Bank Sumut Rp1.060.132.519,00

Jumlah **Rp3.522.788.739,00**

Sejak Tahun 2010, Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya tidak pernah digulirkan kembali. Uraian di atas dapat dijelaskan dalam Tabel 5.23 berikut:

Tabel 5.23 Dana Bergulir

No.	Tahun Anggaran	Dana Bergulir	Bona Pasogit	Jumlah
1	2002	382.656.220,00	500.000.000,00	882.656.220,00
2	2003	540.000.000,00	500.000.000,00	1.040.000.000,00
3	2004	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
4	2005	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
5	2006	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
6	2007	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
7	2008	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00
Bunga yang menjadi pokok dana bergulir		0,00	60.132.519,00	60.132.519,00
	Jumlah	**2.462.656.220,00**	**1.060.132.519,00**	**3.522.788.739,00**

No.	Tahun Anggaran	Dana Bergulir	Bona Pasogit	Jumlah
Dana yang digulirkan kembali				
8	2006	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
9	2007	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00
10	2008	138.000.000,00	0,00	138.000.000,00
11	2009	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00
12	2010	194.000.000,00	0,00	194.000.000,00
	Jumlah	**583.000.000,00**	**0,00**	**583.000.000,00**

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Tapanuli Utara.

Pengelolaan Dana Bergulir UKM yang dikelola oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan semula adalah sebesar Rp2.530.000.000,00 namun ada pengembalian pokok angsuran Tahun Anggaran 2002 yang disetor ke Kas Daerah Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp67.343.780,00 sehingga saldo dana bergulir menjadi Rp2.462.656.220,00 (Rp2.530.000.000,00 - Rp67.343.780,00).

2. Investasi Permanen

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp78.168.569.700,61	Rp81.624.056.573,00

Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yaitu:

- PDAM Mual Na Tio	Rp32.638.645.152,00
- PD Pertanian	Rp9.864.034.779,00
- PT Bank Sumut	Rp35.665.889.769,61
- PD Pertambangan	Rp0,00
Jumlah	Rp78.168.569.700,61

B.1. Penyertaan Modal kepada PDAM Mual Na Tio.

Jumlah penyertaan modal kepemilikan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara 100,00% kepada PDAM Mual Na Tio sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp32.638.645.152,00, jumlah tersebut temasuk jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan statusnya Rp3.923.670.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor: 268/DCKP/2012 Nomor: 6905151/PDAM/2012. Untuk posisi penyertaan modal pada PDAM Mual Natio sampai dengan posisi 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Tabel 5.24.

Tabel 5.24 Penyertaan Modal pada PDAM Mual Natio

No	Keterangan	Nilai
1	Modal Disetor s.d. 31 Desember 2022 (termasuk Rp3.923.670.000,00)	35.193.280.528,00
2	Modal Pemerintah Pusat	2.814.498.342,00
3	Laba (rugi) s.d tahun 2022	(4.227.603.289,00)
4	Laba (rugi) tahun 2022	(1.141.530.429,00)
Jumlah		**32.638.645.152,00**

B.2. Penyertaan Modal PD Pertanian.

Jumlah penyertaan modal Pemda Taput s.d. 31 Desember 2022 sebesar Rp12.500.000.000,00 yang terdiri dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada PD Tahun 1997 sebesar Rp100.000.000,00 dan Tahun 2001 sebesar Rp400.000.000,00, dan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp5.000.000.000,00. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memprogramkan Penyertaaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Pertanian sebesar Rp5.000.000.000,00 untuk Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp5.000.000.000,00 dan pengembalian atas penyertaan modal (dana talangan) tahun 2017 sebesar Rp3.000.000.000,00. PD Pertanian 100% dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sehingga perhitungan nilai penyertaan modal adalah menggunakan *equity method.*

Selama tahun buku 2022 PD Pertanian mengalami Kerugian sebesar Rp1.921.261.645,00 sehingga nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.864.034.779,00. Dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.25 Penyertaan Modal pada PD Pertanian

No.	Keterangan	Nilai
1	Modal Disetor Tahun 1997	100.000.000,00
2	Modal Disetor Tahun 2001	400.000.000,00
3	Modal Disetor Tahun 2015	5.000.000.000,00
4	Modal Disetor Tahun 2016	5.000.000.000,00
5	Modal Disetor Tahun 2017	5.000.000.000,00
6	Akumulasi Kerugian	(1.921.261.645,00)
7	Saldo Laba	(714.703.576,00)
8	Pengembalian ke Kas Daerah	(3.000.000.000,00)
	Jumlah	**9.864.034.779,00**

B.3. Penyertaan Modal kepada PT Bank Sumut.

Jumlah penyertaan modal ke PT Bank Sumut sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp35.665.890.000,00 dengan jumlah lembar saham sebanyak 3.012.891 lembar dan harga per saham @Rp10.000,00. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang diinvestasikan ke dalam saham PT Bank Sumut sampai dengan Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.26 Daftar Penyertaan Modal kepada PT Bank Sumut

No.	Hasil RUPS	% Kepemi-likan	Tanggal	Jumlah Saham (lembar)	Nilai
1	No.008/DIR/DPEMTS/SKS/2001	0,3	28-Jun-01	132.017	1.320.170.000,00
2	No.008/DIR/DTS-TS/SKS/2005	0,79	21-Mar-05	26.632	266.320.000,00
3	No.036/DIR/DTS-TS/SKS/2005	0,79	21-Mar-05	10.000	100.000.000,00
4	No.005/DIR/DTS-TS/SKS/2006	3,63	24-Mar-06	116.919	1.169.190.000,00
5	No.007/DIR/DTS-TS/SKS/2007	0,91	14-Feb-07	76.001	760.010.000,00
6	No.029/DIR/DTSPPJ/SKS/2007	3,18	12-Nov-07	299.240	2.992.400.000,00
7	No.005/DIR/DTSPPJ/SKS/2008	3,28	30-Des-08	75.503	755.030.000,00
8	No.006/DIR/DTSPPJ/SKS/2009	2,38	23-Okt-09	60.000	600.000.000,00
9	No.006/DIR/DTSPDJ/SKS/2011	1,84	28-Mar-11	396.688	3.966.880.000,00
10	No.008/Dir/DTs-PDJ/SKS/2013	1,62	08-Feb-13	349.471	3.494.710.000,00
11	No. 2767/RC1Z-PN/HRS/2013	1,72	24-Des-13	143.545	1.435.450.000,00
12	No. 007/SP-SPr/SKS/2017	1,60	21-Mar-17	217.062	2.170.620.000,00
13	No. 039/SP-SPr/SKS/2017	1,69	08-Mar-18	314.952	3.149.520.000,00
14	No. 006/Dir/SP-SPr/SKS/2019	1,76	18-Mar-19	348.820	3.488.200.000,00
15	No. 004/Dir/SP-SPr/SKS/2020	1,5	24-Peb-20	290.098	2.900.980.000,00
16	No. 001/Dir/SP-SPr/SKS/2021	1,45	04 Mar-21	155.943	1.559.430.000,00
17	No. 004/Dir/SP-SPr/SKS/2022	1,42	02-Mar-22	253.698	2.536.980.000,00
18	No. 025/Dir/SP-SPr/SKS/2022	1,45	30-Ags-22	300.000	3.000.000.000,00
	Jumlah			**3.566.589**	**35.665.890.000,00**

Selama kurun waktu Tahun 2001 s.d 2022 penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada PT Bank Sumut telah mencapai Rp35.665.895.433,00. Untuk lebih rinci daftar modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada PT Bank Sumut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.27 Daftar Modal disetor Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kepada PT Bank Sumut

No.	Tahun Anggaran	Penyertaan Modal
1	2001	1.320.170.000,00
2	2005	366.320.000,00
3	2006	1.169.190.000,00
4	2007	3.752.410.000,00
5	2008	755.030.000,00
6	2009	600.000.000,00
7	2011	3.966.880.000,00
8	2012	3.494.710.000,00
9	2013	1.435.450.000,00
10	2016	2.170.620.000,00
11	2017	3.149.529.251,00
12	2018	3.488.198.234,00
13	2019	2.900.981.425,00
14	2020	1.559.428.709,00
15	2021	2.536.977.814,00
16	2022	2.999.994.336,61
	Jumlah	**35.665.889.769,61**

B.4. Penyertaan Modal PD Industri dan Pertambangan

Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara kepada Perusahaan Daerah Pertambangan s.d. 31 Desember 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00. PD Industri dan Pertambangan 100% dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sehingga perhitungan nilai penyertaan modal adalah menggunakan *equity method*. Saldo ekuitas pada PD Industri dan Pertambangan per 31 Desember 2022 tercatat sebesar (Rp472.871.655,00), dengan demikian maka nilai investasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara di PD Industri dan Pertambangan berdasarkan metode ekuitas menjadi bernilai Nihil. Sampai dengan tahun buku 2022 PD Industri dan Pertambangan mengalami akumulasi kerugian sebesar Rp472.871.655,00. Dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.28 Penyertaan Modal pada PD Industri dan Pertambangan

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Modal Disetor sampai tahun 2021	5.000.000.000,00
2	Laba (Rugi) ditahan	(4.607.395.431,00)
3	Laba (Rugi) tahun berjalan	(865.476.224,00)
	Jumlah	**(472.871.655,00)**
	Nilai investasi (*equity metode*)	**0.00**

Laporan Keuangan Perusahaan Daerah dapat dilihat dalam **lampiran 29**

5.3.3. Aset Tetap

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2021
Rp2.420.465.954.514.77	Rp2.295.541.664.511,42

Saldo aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.420.465.954.514.77sudah mencakup saldo awal aset tetap ditambah dengan belanja modal pada tahun berjalan, mutasi penambahan dan mutasi pengurangan atas aset tetap Tahun 2022. Rekapitulasi aset tetap pada **lampiran 15**, dan daftar saldo aset tetap per SKPD dapat dilihat pada **lampiran 16**.

Saldo Aset Tetap terdiri dari:

1. Tanah

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2021
Rp848.962.288.284,00	Rp825.123.244.227,00

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp848.962.288.284,00 dengan uraian penambahan dan pengurangan sebagai berikut. Rincian aset tetap tanah tercantum dalam **lampiran 17 dan** daftar aset tanah yang masih sengketa terdapat pada **lampiran 17a**.

Tabel 5.29 Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Tanah

Saldo Awal	Penambahan	(Pengurangan)	Saldo Akhir
825.123.244.227,00	212.825.220.990,00	188.986.176.933,00	848.962.288.284,00

Rekapitulasi mutasi Aset Tetap Tanah dapat dilihat berikut ini:

Saldo Awal		**825.123.244.227,00**
Mutasi Bertambah	:	**212.825.220.990,00**

	-	Belanja Modal	216.405.558,00	
	-	Mutasi antar SKPD	189.183.658.133,00	
	-	Biaya Umum	95.301.100,00	
	-	Hibah 2021	22.821.801.199,00	
	-	Reklasisfikasi dari KIB C	508.055.000,00	
Mutasi Berkurang	:			**188.986.176.933,00**
	-	Mutasi antar OPD	188.986.176.933,00	
Saldo akhir				**848.962.288.284,00**

2. Peralatan dan Mesin

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp422.020.062.030,93	Rp379.857.751.686,78

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp422.020.062.030,93 dengan uraian penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Tabel 5.30 Penambahan/Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin

Saldo Awal	Penambahan	(Pengurangan)	Saldo Akhir
379.857.751.686,78	62.763.561.405,15	20.601.251.061,00	422.020.062.030,93

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 mencakup saldo awal aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp379.857.751.686,78 penambahan sebesar Rp62.763.561.405,15 dan pengurangan sebesar Rp20.601.251.061,00. Rincian aset Peralatan dan Mesin per SKPD tercantum dalam **lampiran 18**.

Rekapitulasi mutasi peralatan dan mesin dapat dilihat berikut ini:

Saldo Awal			**379.857.751.686,78**
Mutasi Bertambah :			**62.763.561.405,15**
	- Belanja Modal	42.718.510.572,63	
	- Dana BOS	3.307.959.293,00	
	- Pengadaan JKN dan BOK	645.129.323,00	
	- Hibah	190.680.000,00	
	- Reklasifikasi dari Ekstrakompatabel	1.720.000,00	
	- Reklasifikasi dari KIB C Ke KIB B	1.205.749.270,72	

- Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa/ Persediaan ke KIB B	729.843.520,00	
- Mutasi Antar OPD	13.963.969.425,80	
Mutasi Berkurang :		**20.601.251.061,00**
- Reklasifikasi Aset Ke BHP	530.546.360,00	
- Rusak Berat Tahun 2022	4.417.346.361,00	
- Reklasifikasi Aset Yg Merupakan Beban Lain lain	18.000.000,00	
- Reklasifikasi Peralatan dan Mesin Ke Ekstrakompatabel	1.316.553.034,00	
- Reklasifikasi Ke KIB D	577.000,00	
- Reklasifikasi Ke KIB E	18.906.000,00	
- Pengurangan	138.550.000,00	
- Mutasi Antar OPD	13.963.969.426,00	
- Hibah	196.802.880,00	
Saldo akhir		**422.020.062.030,93**

3. Gedung dan Bangunan

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp772.619.497.916.17	Rp742.136.090.397,87

Saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp772.619.497.916.17 dengan uraian penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Tabel 5.31 Penambahan/Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan

Saldo Awal	Penambahan	(Pengurangan)	Saldo Akhir
742.136.090.397,87	90.927.244.809,18	60.443.837.290,88	772.619.497.916.17

Saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp772.619.497.916.17 mencakup saldo awal aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp742.136.090.397,87, penambahan sebesar Rp90.927.244.809,18 dan pengurangan sebesar Rp60.443.837.290,88. Rincian aset tetap gedung dan bangunan per SKPD tercantum dalam **lampiran 19**.

Rekapitulasi mutasi gedung dan bangunan dapat dilihat berikut ini:

Saldo Awal			**742.136.090.397,87**
Mutasi Bertambah	:		**90.927.244.809,18**
	- Belanja Modal	35.272.239.906,18	
	- Biaya Umum	189.735.000,00	
	- Hibah	22.761.800,00	
	- Kapitalisasi/Rehab	500.000.000,00	
	- Reklas Dari Barang Habis Pakai	56.230.000,00	
	- Reklas Dari KIB D	1.061.364.965,00	
	- Mutasi Antar OPD	327.342.000,00	
		53.493.911.138,00	
		3.660.000,00	
Mutasi Berkurang	:		**60.443.837.290,88**
	- Reklasifikasi Ke KIB E	544.137.520,00	
	- Reklasifikasi Ke Barang Habis Pakai	280.861.000,00	
	- Hibah	304.733.000,00	
	- Reklasifikasi Ke Ekstrakompatabel	1.040.672.500,00	
	- Mutasi Antar OPD	51.642.340.838,16	
	- Reklasifikasi Ke KIB A	508.055.000,00	
	- Reklasifikasi Ke KIB B	1.205.749.270,72	
	- Reklasifikasi Ke KIB D	3.519.959.950,00	
	- Pengurangan	1.300.000.000,00	
	- Koreksi Akibat TGR	97.328.212,00	
Saldo akhir			**772.619.497.916,17**

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp1.690.503.644.433,49	Rp1.515.761.562.332,62

Saldo aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.690.503.644.433,49 dengan uraian penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Tabel 5.32 Penambahan/Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Awal	Penambahan	(Pengurangan)	Saldo Akhir
1.515.761.562.332,62	190.371.752.297,78	15.629.670.196.91	1.690.503.644.433.49

Saldo aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.690.503.644.433.49 mencakup saldo awal aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp1.515.761.562.332,62, penambahan sebesar Rp190.371.752.297,78 dan pengurangan sebesar Rp15.629.670.196.91. Rincian aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per SKPD tercantum dalam **lampiran 20**.

Rekapitulasi mutasi jalan, irigasi dan jaringan dapat dilihat berikut ini:

Saldo Awal				**1.515.761.562.332,62**
Mutasi Bertambah	:			**190.371.752.297,78**
	-	Belanja Modal	160.284.346.598,83	
	-	Belanja Dana TT	11.585.923.000,00	
	-	Biaya Umum	149.940.000,00	
	-	Reklasifikasi Aset Ke KIB B	577.000,00	
	-	Reklasifikasi Aset Ke KIB C	3.519.959.950,00	
	-	Reklas Dari Barang Pakai Habis	334.294.800,00	
	-	Reklasifikasi Aset Ke KIB F	3.727.607.360,95	
	-	Mutasi Antar OPD	10.769.103.588,00	
Mutasi Berkurang	:			**15.629.670.196.91**
	-	Reklasifikasi Ke Ekstrakompatabel	694.022.900,00	
	-	Mutasi Antar OPD	11.965.413.488,00	
	-	Reklasifikasi Aset Ke KIB C	3.660.000,00	
	-	Reklasifikasi Aset Ke KIB F	2.741.508.432,00	
	-	Koreksi Akibat TGR	225.065.376.91	
Saldo akhir				**1.690.503.644.433.49**

5. Aset Tetap Lainnya

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2021
Rp17.620.537.209,00	Rp14.256.093.354,00

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp17.620.537.209,00 dengan uraian penambahan dan pengurangan sebagai berikut.

Tabel 5.33 Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Lainnya

Saldo Awal	Penambahan	(Pengurangan)	Saldo Akhir
u 14.256.093.354,00	8.286.148.438,00	4.921.704.583,00	17.620.537.209,00

m

Jumlah tersebut merupakan saldo buku perpustakaan dan barang bercorak kebudayaan dan kesenian per 31 Desember 2022, mencakup saldo awal aset tetap lainnya sebesar Rp14.256.093.354,00, penambahan sebesar Rp8.286.148.438,00 dan pengurangan sebesar Rp4.921.704.583,00. Rincian nilai aset tetap lainnya per SKPD tercantum dalam **lampiran 21**.

Rekapitulasi mutasi aset tetap lainnya dapat dilihat sebagai berikut:

Saldo Awal			**14.256.093.354,00**
Mutasi Bertambah	:		**8.286.148.438,00**
	- Belanja Modal	148.138.063,00	
	- Pengadaan BOS Reguler 2022	6.919.017.400,00	
	- Reklasifikasi Ke Ekstrakompatabel	8.250.000,00	
	Reklasifikasi Aset dari KIB C	544.137.520,00	
	Reklasifikasi Aset dari KIB B	18.906.000,00	
	Mutasi dari OPD	647.699.455,00	
Mutasi Berkurang	:		**4.921.704.583,00**
	- Rusak Berat 2022	45.000.000,00	
	- Mutasi Ke Aset Lainnya (Aset Tak Berwujud)	49.937.490,00	
	- Mutasi Antar OPD	647.699.455,00	
	- Reklassifikasi Ke Belanja Beban	38.500.000,00	
	- Reklasifikasi Ke Ekstrakompatabel	4.140.567.638,00	
Saldo akhir			**17.620.537.209,00**

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp2.741.508.431,95	Rp4.788.972.325,95

Saldo aset tetap konstruksi dalam pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.741.508.432,00, dengan uraian penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Tabel 5.34 Penambahan/Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Awal	Penambahan	(Pengurangan)	Saldo Akhir
4.788.972.325,95	2.741.508.432,00	4.788.972.326,00	2.741.508.431,95

Rincian KDP per SKPD tercantum dalam **lampiran 22**.

Rekapitulasi mutasi konstruksi dalam pengerjaan dapat dilihat sebagai berikut:

Saldo Awal				**4.788.972.325,95**
Mutasi Bertambah	:			**2.741.508.432,00**
	-	Reklasifikasi Aset Dari KIB D	4.788.972.325,95	
Mutasi Berkurang	:	Reklasifikasi Aset ke KIB C	1.061.364.965,00	**4.788.972.326,00**
		Reklasifikasi Aset ke KIB D	3.727.607.361,00	
Saldo akhir				**2.741.508.431,95**

7. Akumulasi Penyusutan.

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp1.334.001.583.790,82	Rp1.186.382.049.812,80

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.334.001.583.790,82 dengan uraian penambahan dan pengurangan sebagai berikut.

Tabel 5.35 Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 dan 2021

NO	URAIAN	Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	Akumulasi Penyusutan Tahun 2021	Penambahan/ Pengurangan
1	Peralatan dan Mesin	293.136.033.534,78	247.424.323.906,02	45.711.709.628,76
2	Gedung dan Bangunan	181.096.832.968,17	165.468.560.870,04	15.628.272.098,13
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	854.578.026.263,19	768.784.735.921,39	85.793.290.341,80
4	Aset Tetap Lainnya	5.190.691.024,68	4.704.429.115,35	486.261.909,33
	Jumlah	**1.334.001.583.790,82**	**1.186.382.049.812,80**	**147.619.533.978,02**

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 merupakan akumulasi penyusutan dari aset tetap gedung dan bangunan, peralatan dan mesin,

jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya serta saldo awal akumulasi penyusutan aset tahun 2021.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebagaimana telah dijelaskan diatas tidak termasuk aset ekstrakompetabel, yaitu Aset Tetap yang nilainya dibawah kapitalisasi, dengan rincian berikut:

Tabel 5.36 Rekapitulasi Aset Ekstrakomptabel

NO	OPD	JUMLAH		JUMLAH TOTAL
		BAIK	RUSAK BERAT	
1	Sekretariat DPRD	182.906.364,00	5.872.500,00	188.778.864,00
2	Sekretariat Daerah	605.975.044,00	1.692.161.834,00	2.298.136.878,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	136.848.531,00	5.940.000,00	142.788.531,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	21.205.307.431,00	0,00	21.205.307.431,00
5	Dinas Perhubungan	60.308.381,00	13.359.191,00	73.667.572,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	220.194.220,00	3.122.276,00	223.316.496,00
7	Dinas Kesehatan	4.489.659.337,00	1.055.049.473,00	5.544.708.810,00
8	Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung	1.436.959.964,00	98.275.644,00	1.535.235.608,00
9	Dinas Pendidikan	135.956.884.535,92	4.693.342.167,00	140.650.226.702,92
10	Dinas Pemuda Dan Olahraga	13.059.200,00	0,00	13.059.200,00
11	Dinas Sosial	23.064.800,00	3.600.000,00	26.664.800,00
12	Dinas Ketenagakerjaan	78.343.469,00	299.999,00	78.643.468,00
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	16.499.859,00	10.215.426,00	26.715.285,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.080.000,00	1.855.972,00	8.935.972,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.012.380.264,00	15.392.000,00	1.027.772.264,00
16	Dinas Pertanian	141.173.175,00	111.641.487,00	252.814.662,00
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	469.155.877,00	0,00	469.155.877,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
20	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00
21	Inspektorat	9.026.368,00	1.770.666,00	10.797.034,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	41.084.290,00	437.160,00	41.521.450,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	441.360.049,00	25.618.896,00	466.978.945,00

NO	OPD	JUMLAH		JUMLAH TOTAL
		BAIK	RUSAK BERAT	
24	Dinas Pariwisata	1.609.663.021,00	19.247.664,00	1.628.910.685,00
25	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	10.895.635,00	449.000,00	11.344.635,00
26	Satuan Polisi Pamong Praja	133.009.987,00	27.084.025,00	160.094.012,00
27	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	0,00	0,00
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	78.845.164,00	406.980,00	79.252.144,00
29	Kantor Kecamatan Tarutung	278.995.500,00	5.066.180,00	284.061.680,00
30	Kantor Kecamatan Adiankoting	28.053.191,00	1.000.000,00	29.053.191,00
31	Kantor Kecamatan Siatas Barita	46.070.000,00	12.140.000,00	58.210.000,00
32	Kantor Kecamatan Pahae Julu	34.446.412,00	3.354.000,00	37.800.412,00
33	Kantor Kecamatan Pahae Jae	49.713.220,00	3.100.000,00	52.813.220,00
34	Kantor Kecamatan Purbatua	29.361.690,00	5.929.940,00	35.291.630,00
35	Kantor Kecamatan Simangumban	17.000.000,00	21.775.775,00	38.775.775,00
36	Kantor Kecamatan Sipoholon	12.748.180,00	18.330.470,00	31.078.650,00
37	Kantor Kecamatan Parmonangan	28.508.745,00	2.215.630,00	30.724.375,00
38	Kantor Kecamatan Pagaran	16.247.026,00	0,00	16.247.026,00
39	Kantor Kecamatan Siborong-borong	99.800.206,00	1.000.000,00	100.800.206,00
40	Kantor Kecamatan Muara	25.106.911,00	0,00	25.106.911,00
41	Kantor Kecamatan Sipahutar	13.814.588,00	4.786.940,00	18.601.528,00
42	Kantor Kecamatan Pangaribuan	21.659.232,00	1.600.000,00	23.259.232,00
43	Kantor Kecamatan Garoga	56.614.301,00	280.000,00	56.894.301,00
44	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	9.901.380,00	0,00	9.901.380,00
45	Dinas Perpustakaan	1.365.012.578,00	11.881.100,00	1.376.893.678,00
46	Badan Keuangan dan Aset Daerah	177.027.829,00	0,00	177.027.829,00
47	Badan Pendapatan Daerah	3.938.000,00	0,00	3.938.000,00
48	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Perdagangan	357.045.952,00	250.000,00	357.295.952,00
49	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	67.242.739,00	7.078.193,00	74.320.932,00
JUMLAH		**171.117.992.646**	**7.884.930.588**	**179.002.923.234**

5.3.4. Aset Lain-lain

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp73.063.381.537,91	Rp63.915.900.124,00

Jumlah saldo aset lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp73.063.381.537,91 merupakan Aset lain-lain berupa aset rusak berat sebesar Rp.62.554.272.191,00, aset lain-lain sebesar Rp3.453.755.725,00, Bagi hasil melalui pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp6.732.960.033,00, koreksi aset tetap jalan, jaringan dan irigasi akibat kelebihan bayar sebesar Rp225.065.376,91 dan koreksi asset tetap gedung dan bangunan akibat kelebihan bayar sebesar Rp97.328.212,00. akibat kelebihan pembayaran. Rincian daftar Aset Lainnya tercantum di **lampiran 23**.

5.3.5. Aset Tidak Berwujud

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp610.419.681,00	Rp737.051.408,28

Jumlah saldo aset tidak berwujud setelah dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp610.419.681,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.37 Saldo Aset Tidak Berwujud

Uraian	Nilai Perolehan	Amortisasi s.d Tahun ini	Nilai Buku
Aset tidak berwujud berbentuk *software* pada:			
BPKPAD	363.818.400,00	363.818.400,00	-
BPPTPM	89.280.000,00	89.280.000,00	-
RSUD TARUTUNG	1.221.648.795,00	739.157.055,00	482.491.740,00
DINAS PERHUBUNGAN	114.404.417,00	52.714.584,00	61.689.833,00
SEKRETARIAT DAERAH	13.135.602,00	13.135.602,00	-
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	79.450.000,00	79.450.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	39.950.000,00	39.950.000,00	-
DINAS PERTANIAN	49.918.000,00	49.918.000,00	-
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	74.833.000,00	74.833.000,00	-
DINAS PENDIDIKAN	86.760.000,00	69.627.091,00	17.132.909,00
DINAS PERPUSTAKAAN	49.937.490,00	832.292,00	49.105.199,00
Jumlah Aset Tidak Berwujud	**2.183.135.704,00**	**1.572.716.024,00**	**610.419.681,00**

Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 tercantum dalam **lampiran 24.**

5.3.6. Kewajiban

Jumlah kewajiban Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp401.717.184.092,14, yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Rincian Kewajiban dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 5.38 Nilai Kewajiban Tahun 2022

Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
Kewajiban Jangka Pendek	85.033.452.342,71	13.431.673.873,56
Kewajiban Jangka Panjang	316.683.731.749,43	374.523.858.969,80
Jumlah Kewajiban	**401.717.184.092,14**	**387.955.532.843,36**

A. Kewajiban Jangka Pendek

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp85.033.452.342,71	Rp13.431.673.873,56

Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp85.033.452.342,71 dengan rincian sebagai berikut:

A.1. Utang Bunga

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp3.096.653.900,00	Rp,00

Utang Bunga sebesar Rp3.096.653.900,00 merupakan utang Bunga pinjaman PEN tahun 2021 yang akan dibayar pada tahun 2023 ke PT. SMI (Persero).

A.2. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp68.807.005.488,00	Rp,00

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan pembayaran pokok utang pinjaman dana PEN Tahun 2020 sebesar Rp53.201.036.052,00 dan pembayaran pinjaman pen tahun 2021 sebesar Rp15.605.969.436,00 ke PT.SMI (Persero) untuk pembayaran tahun 2023.

A.3. Pendapatan Diterima dimuka

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp223.261.721,08	Rp13.300.000,00

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan dari Pajak Reklame dimana jumlah realisasi Pajak Reklame selama Tahun 2022 adalah sebesar Rp780.345.218,00 dimana jangka waktu perjanjian selama 1 tahun. Setelah dilakukan perhitungan, pendapatan yang diterima murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp557.083.496,92, sehingga selisihnya sebesar Rp223.261.721,08 merupakan pendapatan diterima di muka.

A.4. Utang Beban

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp12.030.110.712.00	Rp13.208.212.422,00

Saldo utang beban per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.030.110.712.00 merupakan utang beban yang dianggarkan pada jenis belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.39 Nilai Utang Beban Tahun 2022

NO	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan
1.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan IV TA 2020, dibayarkan pada TA 2021	359.559.111,00	453.532.106,00	(93.972.995.00)
2.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Triwulan IV TA 2020, dibayarkan pada TA 2021.	129.861.495,00	109.085.573,00	20.775.922.00
3.	Pembayaran Barang Obat pada RSUD Tarutung	3.026.453.422,00	3.935.106.000,00	(908.652.578,00)
4.	Pembayaran BHP Medis pada RSUD Tarutung	3.269.384.865,00	5.011.265.132,00	(1.741.880.267,00)
5.	Biaya Pemakaian Oksigen (BLUD)	317.170.600,00	255.993.200,00	61.177.400,00
6.	Utang Usaha-Bahan Makanan Pasien (BLUD)	22.313.533,00	21.918.712,00	394.821,00
7.	Utang Usaha-Makan Minuman Kegiatan Covid-19	31.416.963,00	77.311.699,00	(45.894.736,00)
8.	Utang Cetak dan Penggandaan	392.620.875,00	0,00	392.620.875,00
9.	Utang Penanganan Limbah LB3	151.590.000,00	0,00	151.590.000,00
10.	Utang Jasa Pelayanan Medis Pasien JKN (BLUD)	2.783.825.939	1.839.200.000,00	944.625.939,00

NO	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan
11.	Utang Jasa Manajemen (BLUD)	1.437.768.179	1.504.800.000,00	(67.031.821,00)
12.	Utang Beban Listrik dan lain lain	108.145.730	0,00	108.145.730,00
	Jumlah	**12.030.110.712,00**	**13.208.212.422,00**	**(1.178.101.710.00)**

Rincian Utang Obat pada RSUD Tarutung, BHP Medis pada RSUD Tarutung dan Utang isi ulang Oksigen terdapat pada **lampiran 25**.

A.5. Utang Jangka Pendek Lainnya

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp876.420.521,63	Rp210.161.451,56

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 adalah utang jangka pendek yang terdiri dari:

1. Utang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp189.735.000,00 yaitu kegiatan Rehabilitasi Polindes Lumban Sianipar Desa Sitabotabo Toruan Kecamatan Siborongborong;
2. Utang Pembangunan PAUD di kecamatan Pangaribuan yang bersumber dari dana BKPSU Tahun 2014 yang tidak disalurkan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp84.341.451,63.
3. Utang Biaya Pengelolaan PEN sebesar Rp602.344.070 yang merupakan biaya pengelolaan Tahun 2020 sebesar Rp508.513.189,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp93.830.881,00.

B. Kewajiban Jangka Panjang

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp316.683.731.749,43	Rp374.523.858.969,80

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 kepada 2 (dua) kreditur dengan 3 (tiga) pinjaman yaitu:

1. Kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia atas Pembangunan Pusat Pasar Tarutung yang telah rusak total akibat gempa bumi tahun 1987 sebesar Rp3.986.668.168,80. Utang pembangunan Pasar Harungguan Tarutung dari PT Bank Dagang Negara Cabang Sibolga telah diusulkan oleh Bupati Tapanuli Utara untuk dihapuskan sesuai dengan surat permohonan Nomor 900/3833/1999 tanggal 8 Juli 1999 kepada Menteri Keuangan, namun belum ada jawaban sampai dengan saat ini. Sejak tahun 1988 utang pokok dan bunga tidak pernah

diangsur. Lokasi Pasar Harungguan Tarutung telah menjadi bangunan perkantoran SKPD. Pada Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengajukan permohonan penghapusan kredit investasi sesuai dengan Surat Bupati Tapanuli Utara Nomor 900/1962/Dipenloka.III/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Permohonan Penghapusan Kredit Investasi Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Tapanuli Utara dengan Bank Dagang Negara Cabang Sibolga, namun belum ada jawaban sampai dengan saat ini.

2. Kepada PT Sarana Multi Infrastruktur dengan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Tahun 2021, dimana sesuai Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 78 Tanggal 17 September 2021 telah ditandatangani Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp73.330.000.000,00 untuk kegiatan yang dibiayai sebagai berikut:

   a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 119 (seratus sembilan belas) kegiatan dengan pagu sebesar Rp62.800.000.000,00;

   b) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 17 (tujuh belas) kegiatan dengan pagu sebesar Rp3.000.000.000,00;

   c) Dinas Pendidikan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan dengan pagu sebesar Rp3.000.000.000,00;

   d) Dinas Pertanian 15 (lima belas) kegiatan dengan pagu sebesar Rp2.500.000.000,00;

   e) Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 (dua) kegiatan dengan pagu sebesar Rp1.030.000.000,00;

   f) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 5 (lima) kegiatan dengan pagu sebesar Rp1.000.000.000,00.

Adapun jangka waktu pinjaman yang ditetapkan adalah 5 (lima) tahun dengan masa tenggang selama 6 (enam) bulan, sedangkan bunga pinjaman sebesar 5,66% (lima koma enam puluh enam persen) dan biaya provisi sebesar 1% yang dibayarkan satu kali serta biaya pengelolaan sebesar 0,185% per tahun dan disalurkan sebanyak 3 tahap. Tahun 2021 disalurkan sebanyak 2 (dua) tahap dengan nilai penyaluran sebesar Rp51.331.000.000,00 dan pada tahun 2022 disalurkan untuk tahap terakhir sebesar Rp18.895.856.861,63. Tahun 2022 telah dibayarkan sebesar Rp9.103.482.171,00 dan pada tahun 2023 akan dibayarkan sebesar Rp68.807.005.488,00 yang terdiri dari pembayaran pokok utang pinjaman dana PEN Tahun 2020 sebesar Rp53.201.036.052,00 dan tahun 2021 sebesar Rp15.605.969.436,00 ke PT.SMI (Persero) sehingga sisa pinjaman pokok dana PEN yang masih harus dibayarkan adalah sebesar Rp311.522.560.003,63.

3. Kewajiban biaya pengelolaan PEN yang masih harus dibayar untuk Tahun 2020 sebesar Rp1.574.750.384,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp202.097.263,00, dikurangi dengan bagian lancar sebesar Rp602.344.070,00 sehingga kewajiban pengelolaan PEN sebesar Rp1.174.503.577,00.

5.3.7. Ekuitas

Akun ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, yang menunjukkan hak pemerintah daerah terhadap aset yang dimiliki/ dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp2.273.982.489.647.21
Surplus/ (defisit)-LO	(Rp48.813.571.885.09)
Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp46.000.636.582,66
Ekuitas Akhir	Rp2.271.169.554.344,78

Surplus/ (defisit)-LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional. Koreksi ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan penerapan SAP Berbasis Akrual untuk pertama kali. Koreksi ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan aset.

5.4. Penjelasan Atas Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional.

Penyajian LO Komparatif TA 2022.

5.4.1. Pendapatan - LO

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp1.309.981.833.896,54	Rp1.429.572.874.138,96

Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.40 Pendapatan - LO

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	158.802.161.057,54	167.569.024.195,96	(8.766.863.138,42)	(5,23)
2	Pendapatan Transfer	1.139.605.618.227,00	1.182.249.505.790,00	(42.643.887.563,00)	(3,61)
3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	11.574.054.612,00	79.754.344.153,00	(68.180.289.541,00)	(85,49)
	Jumlah	**1.309.981.833.896,54**	**1.429.572.874.138,96**	**(119.591.040.242,42)**	**(8,37)**

Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah – LO

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp158.802.161.057,54	Rp167.569.024.195,96

Pos ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode TA 2022 dan TA 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.41 Pendapatan Asli Daerah - LO

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) (Rp)	%
1	Pajak Daerah	28.345.184.989,78	23.131.800.214,00	5.213.384.775,78	22,54
2	Retribusi Daerah	7.488.029.060,50	5.609.373.007,88	1.878.656.052,62	33,49
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.284.679.405,56	6.961.082.639,00	1.323.596.766,56	19,01
4	Lain-lain PAD yang Sah	114.684.267.601,70	131.866.768.335,08	(17.182.500.733,38)	(13,03)
	Jumlah	**158.802.161.057,54**	**167.569.024.195,96**	**(8.766.863.138,42)**	**(5,23)**

Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2022 dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

A.1. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapanuli Utara. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tapanuli Utara. Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.42 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Pajak Hotel	287.439.856,00	192.672.653,00	94.767.203,00	49,19
2	Pajak Restoran	2.788.140.982,00	2.716.334.935,00	71.806.047,00	2,64
3	Pajak Hiburan	0,00	2.050.000,00	(2.050.000,00)	(100,00)
4	Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron	359.953.713,92	503.349.072,00	(143.395.358,08)	(28,49)
5	Pajak Reklame Kain	180.052.283,00	163.046.813,00	17.005.470,00	10,43
6	Pajak Reklame Melekat/ Stiker	17.077.500,00	0,00	17.077.500,00	0,00
5	Pajak Penerangan Jalan	7.577.630.661,00	6.252.402.458,00	1.325.228.203,00	21,20
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.490.995.936,86	2.594.405.263,00	896.590.673,86	34,56
7	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.932.534.684,00	5.378.610.053,00	553.924.631,00	10,30
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5.894.597.425,00	4.051.797.650,00	1.842.799.775,00	45,48
9	Pajak Parkir	294.682.500,00	75.382.250,00	219.300.250,00	290,92
10	Pajak Air Tanah	116.240.723,00	71.145.000,00	45.095.723,00	63,39
12	Pajak Jasa Boga/ Katering dan sejenisnya	764.945.400,00	806.062.500,00	(41.117.100,00)	(5,10)
13	Pajak Rumah Makan dan sejenisnya	634.393.325,00	324.541.567,00	309.851.758,00	95,47
14	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00
	Jumlah	**28.345.184.989,78**	**23.131.800.214,00**	**5.213.384.775,78**	**22,54**

A.2. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil. Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun Anggaran 2022 berdasarkan jenis retribusi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.43 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	74.374.500,00	80.938.100,00	(6.563.600,00)	(8,11)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	318.185.500,00	258.663.000,00	59.522.500,00	23,01
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	26.160.000,00	17.925.000,00	8.235.000,00	45,94
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	103.150.000,00	92.802.000,00	10.348.000,00	11,15
5	Retribusi Pelayanan Pasar	852.327.000,00	791.671.000,00	60.656.000,00	7,66
6	Retribusi Tempat Khusus Parkir	6.200.000,00	2.570.000,00	3.630.000,00	141,25
7	Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus	20.000.000,00	20.090.000,00	(90.000,00)	(0,45)
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	668.960.000,00	594.240.000,00	74.720.000,00	12,57
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.233.654.560,50	1.056.029.807,88	177.624.752,62	16,82
10	Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan	9.277.500,00	9.070.000,00	207.500,00	2,29
11	Retribusi Terminal	48.591.000,00	36.437.000,00	12.154.000,00	33,36
12	Retribusi Tempat Penginapan/ Prasanggahan/Villa	18.350.000,00	6.000.000,00	12.350.000,00	205,83
13	Retribusi Rumah Potong Hewan	10.920.000,00	7.950.000,00	2.970.000,00	37,36
14	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	6.870.000,00	7.230.000,00	(360.000,00)	(4,98)
15	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	318.151.000,00	316.684.000,00	1.467.000,00	0,46
17	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.616.362.500,00	2.121.465.100,00	1.494.897.400,00	70,47
18	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	16.820.000,00	6.670.000,00	10.150.000,00	152,17
19	Retribusi Izin Trayek	1.850.000,00	2.100.000,00	(250.000,00)	(11,90)
20	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	135.828.000,00	179.188.000,00	(43.360.000,00)	(24,20)
21	Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	1.997.500,00	1.650.000,00	347.500,00	21,06
	Jumlah	**7.488.029.060,50**	**5.609.373.007,88**	**1.878.656.052,62**	**33,49**

A.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan realisasi sebesar Rp8.284.679.405.56 terdiri dari PAD dalam bentuk pendapatan deviden dan hasil investasi atas Penyertaan Modal pada PT Bank Sumut sebesar Rp8.283.046.458,00 dan saldo Remunerasi sebesar Rp1.632.947,56 yang disalurkan secara non tunai melalui Fasilitas TDF yang merupakan DBH tahun 2022 yang masih terdapat pada rekening Bank Indonesia.

A.4. Lain-lain PAD yang Sah – LO

Lain-lain PAD yang Sah merupakan Pendapatan Asli Daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang realisasinya untuk periode Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.44 Rincian Lain-lain PAD yang sah – LO

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	5.800.000,00	343.894.100,00	(338.094.100,00)	(98,31)
2	Penerimaan Jasa Giro - LO	1.252.008.572,00	3.677.118.015,00	(2.425.109.443,00)	(65,95)
3	Pendapatan Bunga - LO	4.218.750.000,00	3.708.333.330,00	510.416.670,00	13,76
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	2.523.456.777,94	3.295.560.095,06	(772.103.317,12)	(23,43)
5	Pendapatan dari Pengembalian, Sisa Dana TU, GU, UP, Keterlanjuran dan Pengembalian – LO	922.069.020,00	1.722.534.669,34	(800.465.649,34)	(46,47)
8	Pendapatan Dana Kapitasi JKN – LO	9.276.351.465,00	11.432.280.075,00	(2.155.928.610,00)	(18,86)
10	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	0,00	107.024.583.556,00	(107.024.583.556,00)	(100,00)
13	Pendapatan BLUD - LO	96.163.975.863,00	0,00	96.163.975.863,00	0,00
14	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	(19.140.558,64)	(52.191.545,32)	33.050.986,68	(63,33)
15	Hasil Penjulan Bangunan Gedung	0,00	315.000,00	(315.000,00)	(100,00)
16	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	234.091.462,40	536.306.040,00	(302.214.577,60)	(56,35)
17	Hasil Kerjasama Daerah	106.905.000,00	178.035.000,00	(71.130.000,00)	(39,95)
	Jumlah	**114.684.267.601,70**	**131.866.768.335,08**	**(17.182.500.733,38)**	**(13,03)**

B. Pendapatan Transfer – LO

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp1.139.605.618.227,00	Rp1.182.249.505.790,00

Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, namun ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Realisasi Pendapatan Transfer untuk periode TA 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.45 Rincian Pendapatan Transfer - LO

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	1.098.699.662.968,00	1.129.177.555.060,00	(30.477.892.092,00)	(2,70)
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah –LO	40.905.955.259,00	53.071.950.730,00	(12.165.995.471,00)	(22,92)
	Jumlah	**1.139.605.618.227,00**	**1.182.249.505.790,00**	**(42.643.887.563,00)**	**(3,61)**

B.1. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LO

Rincian Pendapatan dari Tranfer Pemerintah Pusat dapat dilihat pada tabel 5.46 berikut:

Tabel 5.46 Rincian Transfer Pemerintah Pusat - LO

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak (DBH) – LO	86.408.586.175,00	109.744.869.923,00	(23.336.283.748,00)	(21,26)
2	Dana Alokasi Umum – LO	596.239.246.009,00	597.636.159.000,00	(1.396.912.991,00)	(0,23)
3	Dana Alokasi Khusus – LO	227.677.002.784,00	200.072.915.137,00	27.604.087.647,00	13,80
4	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	0,00	29.706.794.000,00	(29.706.794.000,00)	(100,00)
5	Dana Desa –LO	188.374.828.000,00	192.016.817.000,00	(3.641.989.000,00)	(1,90)
	Jumlah	**1.098.699.662.968,00**	**1.129.177.555.060,00**	**(30.477.892.092,00)**	**(2,70)**

a. Bagi Hasil Pajak – LO

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat terdiri atas Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.47 Rincian Bagi Hasil Pajak - LO

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan	0,00	22.707.800,00	(22.707.800,00)	(100,00)
2	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor perhutanan	0,00	1.018.987.564,00	(1.018.987.564,00)	(100,00)
3	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan	0,00	8.988.833.497,00	(8.988.833.497,00)	(100,00)
4	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	1.283.396.215,00	972.807.465,00	310.588.750,00	31,93
5	Bagi hasil PBB Bagian Pusat yang dikembalikan ke Daerah	0,00	91.186.535.844,00	(91.186.535.844,00)	(100,00)
6	Bagi Hasil SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	271.608.342,00	251.183.239,00	20.425.103,00	8,13
7	Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara-Royalti-LO	6.527.000.687,00	5.833.356.259,00	693.644.428,00	11,89
8	Bagi Hasil SDA Perikanan-LO	0,00	1.470.458.255,00	(1.470.458.255,00)	(100,00)
9	DBH PBB-LO	56.855.360.921,00	0,00	56.855.360.921,00	100,00
10	DBH PPh Pasal 21-LO	8.256.678.058,00	0,00	8.256.678.058,00	100,00
11	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	883.281.681,00	0,00	883.281.681,00	100,00
12	DBH SDA Minyak Bumi-LO	33.201.500,00	0,00	33.201.500,00	100,00
13	DBH SDA Gas Bumi-LO	46.549.308,00	0,00	46.549.308,00	100,00
14	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	2.908.551.430,00	0,00	2.908.551.430,00	100,00
15	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	651.687.000,00	0,00	651.687.000,00	100,00
16	DBH SDA Perikanan-LO	1.958.311.000,00	0,00	1.958.311.000,00	100,00
17	DBH Treasury Deposit Facility	6.732.960.033,00	0,00	6.732.960.033,00	(100,00)
	Jumlah	**86.408.586.175,00**	**109.744.869.923,00**	**(23.336.283.748,00)**	**(21,26)**

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU sebesar Rp596.239.246.009,00 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Pendapatan operasional yang berasal dari alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 untuk Kabupaten Tapanuli Utara telah diterima sebesar 99,96% dari yang dianggarkan pada APBD Kabupaten

Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp596.478.347.690,00.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK sebesar Rp227.677.002.784,00 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dapat dirinci menjadi 2 (dua) bagian yaitu DAK NON Fisik sebesar Rp166.360.382.818,00 dan DAK Fisik sebesar Rp61.316.619.966,00.

Pendapatan DAK secara akrual nilainya sama dengan pendapatan DAK berbasis kas yang disajikan pada LRA. Tidak terdapat hak Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara atas alokasi DAK yang belum dibayar oleh Pemerintah Pusat.

d. Dana Desa

Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp188.374.828.000,00 dimana penyaluran Dana desa dengan mekanisme Transfer dari Pusat dari RKUN ke Rekening Kas Desa (RKD), sehingga pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara hanya pencatatan.

B.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Merupakan Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara periode Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp40.905.955.259.00 merupakan penerimaan Tahun Anggaran 2022 telah disalurkan dari Pemerintah Provinsi ke kas daerah tahun anggaran 2022. Dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp7.255.056.118.00
- Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp 3.579.372.683.00.
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp 7.713.626.653.00.
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp 243.739.934.00.
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp19.642.716.671.00.
- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp2.441.443.200,00.
- Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp30.000.000,00.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah - LO

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp11.574.054.612,00	Rp79.754.344.153,00

Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp11.574.054.612,00 merupakan Pendapatan Bonus Produksi panas bumi dari PT SOL Tahun Anggaran 2022.

5.4.2. Beban

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp1.340.099.775.941,26	Rp1.325.044.792.002,04

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi beban Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.48 Rincian Beban - LO

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Beban Pegawai - LO	511.652.023.203,00	521.558.550.570,90	(9.906.527.367,90)	(1,90)
2	Beban Barang dan Jasa	370.899.877.262,42	339.314.544.347,18	31.585.332.915,24	8,52
3	Beban Bunga	4.387.554.738,63	0,00	4.387.554.738,63	100
4	Beban Hibah	17.373.547.043,00	68.565.971.013,00	(51.192.423.970,00)	(74,66)
5	Beban Bantuan Sosial	5.849.334.120,00	1.651.610.736,00	4.197.723.384,00	254,16
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	152.400.476.058,38	135.362.853.418,06	17.037.622.640,32	12,59
7	Beban Penyisihan Piutang	2.120921410,20	1.270.633.316,97	850.288.093,23	66,92
8	Beban Lain-lain	19.085.591.861,63	125.819.999,93	18.959.771.861,70	15.068,97
9	Beban Transfer	256.330.450.244,00	257.194.808.600,00	(864.358.356,00)	(0,34)
	Jumlah	**1.340.099.775.941,26**	**1.325.044.792.002,04**	**15.054.983.939,22**	**(1,14)**

Rincian lebih lanjut mengenai Beban Operasi, Beban Transfer, Defisit Non Operasional dan Beban luar Biasa adalah sebagai berikut:

A. Beban Pegawai -LO

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp511.652.023.203,00	Rp521.558.550.570,90

Beban Pegawai terdiri atas beban sebagai berikut:

Tabel 5.49 Rincian Beban Pegawai - LO

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan	339.785.460.080,00	334.607.690.621,90	5.177.769.458,10	1,55
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	60.942.426.187,00	56.972.437.647,00	3.969.988.540,00	6,97
3	Beban Penerimaan Lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	616.280.000,00	575.280.000,00	41.000.000,00	7,13
4	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	778.156.137,00	656.593.474,00	121.562.663,00	18,51
5	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	312.312.645,00	313.022.677,00	(710.032,00)	(0,23)
6	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	79.835.273.258,00	115.032.682.743,00	(35.197.409.485,00)	(30,60)
7	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	13.189.784.930,00	13.228.158.165,00	(38.373.235,00)	(0,29)
8	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	279.958.766,00	172.685.243,00	107.273.523,00	62,12
9	Beban BOS	15.912.371.200,00	0,00	15.912.371.200,00	0,00
	Jumlah	**511.652.023.203,00**	**521.558.550.570,90**	**(9.906.527.367,90)**	**(1,90)**

B. Beban Barang dan Jasa

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp370.899.877.262,42	Rp339.314.544.347,18

Beban Barang dan Jasa terdiri atas beban sebagai berikut:

Tabel 5.50 Rincian Beban Barang dan Jasa – LO

No.	URAIAN	Rp.
Beban Persediaan		
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.457.436.629,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	22.269.450,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.142.373.298,00
4	Beban Bahan-Bahan Baku	(669.574.800,00)

No.	URAIAN	Rp.
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.625.411.765,00
6	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	991.059.200,00
7	Beban Bahan-Bahan Lainnya	7.255.760.119,76
8	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	672.531.738,00
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	208.282.900,00
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	20.150.000,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	(240.000,00)
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	963.231.284,00
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.705.818.336,00
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.599.824.032,37
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	179.371.000,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	563.611.800,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	662.342.200,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.124.208.905,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	707.880.764,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	242.456.500,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	8.000.000,00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.756.814.649,00
23	Beban Obat-Obatan-Obat	673.441.985,62
24	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.669.760.663,91
25	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	26.574.803.926,52
26	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	219.891.002,22
27	Beban Natura dan Pakan-Natura	12.085.838.337,00
28	Beban Natura dan Pakan-Pakan	128.946.800,00
29	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	145.729.800,00
30	Beban Makanan dan Minuman Rapat	4.396.127.700,00
31	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.791.909.100,00
32	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	21.840.000,00
33	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	725.718.600,00

No.	URAIAN	Rp.
34	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	554.375.500,00
35	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	36.000.000,00
36	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	859.946.095,00
37	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	128.220.343,00
38	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	52.728.400,00
39	Beban Pakaian Teknik	60.500.000,00
40	Beban Pakaian KORPRI	22.923.200,00
41	Beban Pakaian Adat Daerah	214.495.500,00
42	Beban Pakaian Olahraga	205.621.787,00
43	Beban Pakaian Paskibraka	33.363.000,00
44	Beban Pakaian Jas/Safari	78.000.000,00
45	Beban Komponen-Komponen Peralatan	1.600.000,00
46	Beban Pipa-Pipa Baja	(749.787.424,13)
47	Beban Pipa-Pipa Lainnya	12.645.176,00
48	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	493.476.408,00
49	Beban Beasiswa	165.000.000,00
50	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	1.100.000.000,00
51	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	19.569.230.517,00
52	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	637.347.719,00
JUMLAH		**112.148.713.906,27**
Beban Jasa		
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.929.916.000,00
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.991.646.000,00
3	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.616.580.000,00
4	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	21.500.000,00
5	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	584.500.000,00
6	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	6.640.500.000,00
7	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	9.544.158.861,00
8	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.444.482.600,00
9	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan	2.484.332.134,00

No.	URAIAN	Rp.
	Masyarakat	
10	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	216.900.000,00
11	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	354.400.000,00
12	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	54.000.000,00
13	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	774.200.000,00
14	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	105.970.000,00
15	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	18.376.190.708,00
16	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.269.337.700,00
17	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1.248.000.000,00
18	Beban Jasa Tenaga Supir	649.250.000,00
19	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	346.931.000,00
20	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	22.006.400,00
21	Beban Jasa Tata Rias	7.000.000,00
22	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	80.700.000,00
23	Beban Jasa Pelayanan Perpustakaan	151.200.000,00
24	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	852.818.190,00
25	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	166.345.000,00
26	Beban Jasa Kalibrasi	37.042.000,00
27	Beban Jasa Pengolahan Sampah	180.000,00
28	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	840.709.200,00
29	Beban Tagihan Telepon	54.914.281,00
30	Beban Tagihan Air	333.831.695,00
31	Beban Tagihan Listrik	7.182.895.688,00
32	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	526.008.100,00
33	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.488.851.967,00
34	Beban Paket/Pengiriman	190.765.999,00
35	Beban Registrasi/Keanggotaan	50.000.000,00
36	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	213.364.316,00
37	Beban Lembur	321.843.000,00
38	Beban Medical Check Up	259.313.245,00
39	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	231.761.820,00

No.	URAIAN	Rp.
40	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	14.855.978.200,00
41	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.561.376.500,00
42	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	141.222.275,00
43	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	176.187.902,00
44	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	149.266.800,00
45	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	7.600.000,00
46	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	56.440.000,00
47	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	387.652.800,00
48	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12.000.000,00
49	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	19.588.000,00
50	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	12.600.000,00
51	Beban Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	58.000.000,00
52	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	2.208.045.925,15
53	Beban Sewa Personal Computer	17.000.000,00
54	Beban Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	50.000.000,00
55	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	245.673.920,00
56	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	184.300.000,00
57	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	83.200.000,00
58	Beban Sewa Hotel	539.878.200,00
59	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	685.314.000,00
60	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	188.980.000,00
61	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	178.690.000,00
62	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	133.320.000,00
63	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	569.288.500,00
64	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	99.500.000,00
65	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	1.056.808.500,00
66	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas	93.421.200,00

No.	URAIAN	Rp.
	Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	
67	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	230.000.000,00
68	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	47.000.000,00
69	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	188.894.500,00
70	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	34.088.100,00
71	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas	74.703.000,00
72	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	283.938.000,00
73	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei	218.169.150,00
74	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	384.071.760,00
75	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	2.570.966.000,00
76	Beban Barang dan Jasa BOS	32.788.822.673,00
77	Beban Barang dan Jasa BLUD	85.942.384.163,00
JUMLAH		**212.198.715.972,15**
Beban Pemeliharaan		
1	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	149.850.000,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	1.223.122.127,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	592.518.943,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	41.598.000,00
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	29.800.000,00
6	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	734.771.954,00
7	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	7.720.000,00
8	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen	55.003.600,00
9	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat	741.283.582,00

No.	URAIAN	Rp.
	Kantor Lainnya	
10	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	2.440.000,00
11	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	22.500.000,00
12	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	225.040.860,00
JUMLAH		**3.825.649.066,00**
Beban Perjalanan Dinas		
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	31.733.866.698,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.832.496.392,00
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	81.000.000,00
4	Beban Perjalanan Dinas BiasaûLuar Negeri	79.435.228,00
JUMLAH		42.726.798.318,00
	TOTAL	**370.899.877.262,42**

C. Beban Bunga

Tahun Anggaran 2021	Tahun Anggaran 2021
Rp4.387.554.738,63	Rp0,00

Realisasi beban bunga Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp3.685.286.170,00 merupakan Belanja Bunga Utang Pinjaman PEN kepada PT. SMI (Persero) dan Pembayaran Biaya Provisi Pinjaman PEN Tahun 2021 sebesar Rp702.268.568,63.

D. Beban Hibah

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp17.373.547.043,00	Rp68.565.971.013,00

Beban Hibah merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara atas pemberian Hibah yang telah diprogramkan pada APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022, dimana beban hibah pada masing-masing OPD yang mengelola belanja hibah daerah. Pengelolaan hibah diatur melalui Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata cara pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Rincian beban **hibah dapat dilihat pada tabel berikut:**

Tabel 5.51 Rincian Beban Hibah

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Beban Hibah kepada kelompok/ anggota masyarakat	3.033.750.000,00	1.919.500.000,00	1.114.250.000,00	58,05
2	Beban Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi/ Dana BOS	13.408.558.000,00	64.350.186.092,00	(50.941.628.092,00)	(79,16)
3	Beban Hibah kepada Pemerintah	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
4	Beban Hibah kepada Partai Politik	871.239.043,00	827.284.921,00	43.954.122,00	5,31
5	Beban Hibah dari Kelompok Masyarakat	0,00	1.219.000.000,00	(1.219.000.000,00)	(100,00)
6	Hibah Uang kepada Koperasi	60.000.000,00	150.000.000,00	(90.000.000,00)	(60,00)
	Jumlah	**17.373.547.043,00**	**68.565.971.013,00**	**(51.192.423.970,00)**	**(74,66)**

E. Beban Bantuan Sosial.

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp5.849.334.120,00	Rp1.651.610.736,00

Beban Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata cara pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Rincian beban bantuan social dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 5.52 Rincian Beban Bantuan Sosial

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/	%
1	Beban Bantuan sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	5.849.334.120,00	1.651.610.736,00	4.197.723.384,00	254,16
	Jumlah	**5.849.334.120,00**	**1.651.610.736,00**	**4.197.723.384,00**	**254,16**

F. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp152.400.476.058,38	Rp135.362.853.418,06

Beban Penyusutan merupakan penyusutan aset tetap TA 2022, yang terdiri atas:

Tabel 5.53 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	49.849.592.422,24	39.654.947.241,80	10.194.645.180,44	25,71
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	16.094.762.168,68	15.420.167.931,41	674.594.237,27	4,37
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	85.793.290.341,80	79.531.056.581,72	6.262.233.760,08	7,87
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	486.261.909,33	550.977.679,77	(64.715.770,44)	(11,75)
5	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	176.569.216,33	205.703.983,36	(29.134.767,03)	(14,16)
	Jumlah	**152.400.476.058,38**	**135.362.853.418,06**	**17.037.622.640,32**	**12,59**

Beban Penyusutan Tahun Anggaran 2022, dilakukan dengan mempedomani beberapa hal sebagai berikut:

- Metode penyusutan yang diterapkan adalah garis lurus untuk semua jenis aset tetap.
- Nilai aset tetap yang dapat disusutkan diperhitungkan berdasarkan nilai perolehan aset tetap pada akhir tahun tanpa nilai residu.
  Untuk aset tetap yang diperoleh pada pertengahan tahun, nilai penyusutan diperhitungkan dengan menggunakan pendekatan bulanan dimulai bulan pertama perolehan.

G. Beban Penyisihan Piutang

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp2.120.921.410,20	Rp1.270.633.316,97

Beban penyisihan piutang merupakan penyisihan piutang tak tertagih. Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Bersamaan dengan dimulainya penerapan SAP Berbasis Akrual pada TA 2015, kenaikan penyisihan piutang tidak tertagih diakui sebagai beban penyisihan piutang.

Beban penyisihan piutang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.120.921.410,20 terdiri dari beban penyisihan piutang pajak sebesar Rp1.970.669.940,03 dan beban penyisihan piutang retribusi sebesar Rp150.251.470,17. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 dapat dilihat pada **lampiran 13.**

H. Beban Lain-lain

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp19.085.591.861,63	Rp125.819.999,93

Beban Lain-lain pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp19.085.591.861,63 yang merupakan kewajiban kepada pihak ketiga atau utang jangka pendek yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp189.735.000,00 yaitu kegiatan Rehabilitasi Polindes Lumban Sianipar Desa Sitabotabo Toruan Kecamatan Siborongborong dan penerimaan transfer tahap III pinjaman dana PEN Tahun 2021 yang disalurkan pada Tahun 2022 sebesar Rp18.895.856.861,63.

I. Beban Transfer

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp256.330.450.244,00	Rp257.194.808.600,00

Beban transfer terdiri atas pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Transfer terdiri atas Bantuan Keuangan ke Desa atau Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.54 Rincian Beban Transfer – LO

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah	3.299.290.744,00	0,00	3.299.290.744,00	0,00
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa	253.031.159.500,00	257.194.808.600,00	(4.163.649.100,00)	(1,62)
	Jumlah	**256.330.450.244,00**	**257.194.808.600,00**	**(864.358.356,00)**	**(0,34)**

5.4.3. Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasi

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
(Rp30.117.942.044,72)	Rp104.528.082.136,92

Defisit dari Kegiatan Operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp30.117.942.044,72) yang merupakan selisih dari Pendapatan-LO sebesar Rp1.309.981.833.896,54 dengan Beban sebesar Rp1.340.099.775.941,26 sehingga dibandingkan dengan kegiatan operasi tahun 2021, terdapat penurunan kegiatan operasional pada tahun 2022 sebesar Rp134.646.024.181.64 atau 128,81%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.55 Surplus dan Defisit dari Kegiatan Operasi – LO

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Pendapatan-LO	1.309.981.833.896,54	1.429.572.874.138,96	(119.591.040.242,42)	(8,37)
2	Beban	1.340.099.775.941,26	1.325.044.792.002,04	15.054.983.939,22	1,14
Surplus/ Defisit dari Operasi		**(30.117.942.044,72)**	**104.528.082.136,92**	**(134.646.024.181,64)**	**(128,81)**

5.4.4. Kegiatan Non Operasional

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp5.753.212.640,37	Rp87.760.063,00

Sedangkan surplus/ defisit dari kegiatan non operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp5.753.212.640,37) merupakan selisih koreksi dari investasi jangka panjang permanen penyertaan modal pemerintah daerah sebesar (Rp6.455.481.209,00) ditambah belanja biaya provisi pembayaran PEN Tahun 2021 sebesar Rp702.268.568,63, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.56 Koreksi Kegiatan Non Operasional Dari Investasi Jangka Panjang Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

No	Uraian	Saldo Akhir 2021	Pertambahan 2022	Total Penvertaan Modal	Penyesuaian	Investasi
1	PDAM Mual Na Tio	33.780.175.580,00	0,00	33.780.175.580,00	32.638.645.152,00	(1.141.530.428,00)
2	PT Bank SUMUT	32.665.980.000,00	2.999.994.336,61	35.665.974.336,61	35.665.889.769,61	(84.567,00)
3	PD Pertanian	14.785.296.424,00	0,00	14.785.296.424,00	9.864.034.779,00	(4.921.261.645,00)
4	PD Pertambangan	392.604.569,00	0,00	392.604.569,00	0,00	(392.604.569,00
5	Biaya provisi	0,00	0,00	0,00	0,00	702.268.568,63
	JUMLAH	**81.624.056.573,00**	**2.999.994.336,61**	**84.624.050.909,61**	**78.168.569.700,61**	**(5.753.212.640,37)**

5.4.5. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah sebesar (Rp35.871.154.685,09) (surplus/defisit dari kegiatan operasi (Rp30.117.942.044,72) – defisit dari kegiatan non operasional Rp5.753.212.640,37.

5.4.6. Pos Luar Biasa

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp12.942.417.200,00	Rp10.126.560.516,00

Pos luar biasa terdiri dari:

a. Pendapatan Luar Biasa – LO sebesar Rp0,00.

b. Beban Luar Biasa – LO sebesar Rp12.942.417.200,00.

5.4.7. Surplus/ Defisit LO.

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
(Rp48.813.571.885,09)	Rp94.313.761.557,92

Surplus/defisit LO TA 2022 adalah sebesar (Rp48.813.571.885,09) merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa sebesar (Rp35.871.154.685,09) + surplus/defisit dari pos luar biasa sebesar (Rp12.942.417.200,00). Dibandingkan dengan surplus Laporan Operasional Tahun 2021 sebesar Rp94.313.761.557,92 maka Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengalami defisit-LO laporan operasional Tahun 2022 sebesar Rp143.127.333.443.01 atau sebesar 151,76%.

5.5. Rincian dan Penjelasan Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan/aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran. Laporan arus kas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengalami penurunan kas sebesar Rp108.853.377.704.43 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.57 Kenaikan/Penurunan Kas Tahun 2022

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	131.433.035.361.18	228.938.387.591,20
2	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(252.365.554.379,24)	(295.455.235.508,20)
3	Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	12.079.141.313.63	141.868.190.801,00
4	Arus kas bersih dari aktivitas transistoris	0,00	(98.750.824,00)
	Jumlah Kenaikan/(Penurunan) Kas	**(108.853.377.704.43)**	**75.252.592.060,00**

5.5.1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp131.433.035.361.18	Rp228.938.387.591,20

Arus kas dari aktivitas operasi merupakan realisasi pendapatan daerah setelah dikurangi belanja operasi kegiatan pemerintah dan belanja tidak terduga dan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dan Bantuan Keuangan Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

A. Arus Kas Masuk

Rincian arus kas masuk dari aktifitas operasi dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 5.58 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

No.	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
1	Pendapatan Pajak Daerah-LRA	27.198.848.606,86	21.703.779.853,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	7.349.423.360,50	5.470.983.860,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LRA	8.283.046.458,00	6.961.082.639,00
4	Lain-lain PAD yang sah-LRA	112.128.352.660,34	128.655.774.080,40
5	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA	1.091.966.702.935,00	1.129.177.555.060,00
6	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainya-LRA	52.700.460.863,00	49.633.810.683,00
7	Pendapatan Hibah-LRA	11.574.054.612,00	16.140.380.025,00
8	Pendapatan Lainnya-LRA	0,00	60.333.956.128,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	**1.311.200.889.495,70**	**1.418.077.322.328,40**

B. Arus Kas Keluar

Rincian arus kas keluar dari aktifitas operasi dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 5.59 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

No.	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
1	Belanja Pegawai	511.725.220.276,00	521.578.901.088,90
2	Belanja Barang dan Jasa	371.597.822.512.89	326.238.489.421,85
3	Belanja Bunga	4.387.554.738.63	0,00
4	Belanja Hibah	16.935.055.043.00	68.565.971.013,00
5	Bantuan Sosial	5.849.334.120,00	1.651.610.736,00
6	Belanja Tidak Terduga	12.942.417.200,00	10.126.560.516,00
7	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	256.330.450.244,00	257.194.808.600,00
8	Pembayaran Cicilan Pokok Utang	0,00	3.782.593.361,45
	Jumlah Arus Kas Keluar	**1.179.767.854.134.52**	**1.189.138.934.737,20**

Dengan demikian, jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp131.433.035.361.18, dimana arus kas masuk sebesar Rp1.311.200.889.495,70 dikurangi jumlah arus kas keluar sebesar Rp1.179.767.854.134.52.

5.5.2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2022
(Rp252.365.554.379,24)	(Rp295.455.235.508,20)

Arus kas dari aktivitas investasi merupakan Belanja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk belanja modal berupa pengadaan barang inventaris milik daerah dalam rangka kegiatan pemerintahan termasuk pelayanan publik.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi Tahun Anggaran 2022 menunjukkan bahwa dalam Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan penambahan aset untuk pelayanan publik senilai Rp252.365.554.379,24 Perincian atas aktivitas investasi Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.60 Arus Kas dari Aktifitas Investasi

No.	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
1	**Arus Kas Masuk**	**5.800.000,00**	**0,00**
	a) Hasil Penjualan Peralatan/ Mesin-LRA	5.800.000,00	0,00
	b) Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00

No.	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
2	**Arus Kas Keluar:**	**252.371.354.379.24**	**295.455.235.508,20**
	a) Belanja Modal Tanah	216.405.558,00	5.032.098.143,00
	b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.730.931.689,63	41.376.791.335,91
	c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.287.481.926,18	102.883.849.131,30
	d) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	160.284.346.599,82	138.088.293.593,99
	e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.852.194.269,00	537.225.490,00
	f) Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah	2.999.994.336,61	7.536.977.814,00
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(252.365.554.379.24)**	**(295.455.235.508,20)**

5.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp12.079.141.313.63	Rp141.868.190.801,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan merupakan jumlah arus kas masuk sebesar Rp21.895.856.861,63 merupakan penyaluran Tahap ke III dari Pinjaman dari PT. SMI (Persero) Tahun Anggaran 2021 yang disalurkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp18.895.856.861,63 dan pengembalian atas penyertaan modal (Dana talangan) Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara sebesar Rp3.000.000.000,00 dikurangi dengan arus kas keluar pembayaran pinjaman PEN Tahun 2022 sebesar Rp9.816.715.548.00 yang terdiri dari Biaya Pengelolaan pinjaman PEN tahun 2020 sebesar Rp590.531.453,00, Pembayaran Biaya Pengelolaan pinjaman PEN tahun 2021 sebesar Rp122.701.924,00, dan Pembayaran pokok pinjaman PEN tahun 2021 sebesar Rp9.103.482.171,00.

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp0,00	(Rp98.750.824,00)

Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas non anggaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara selama Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.61 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

No.	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
1	**Arus Kas Masuk:**	**83.315.209.143,00**	**38.697.521.641,41**
	a) Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	83.315.209.143,00	38.697.521.641,41

No.	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
	b) Pendapatan yang ditangguhkan	0,00	0,00
2	**Arus Kas Keluar:**	**83.315.209.143,00**	**38.796.272.465,41**
	a) Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	83.315.209.143,00	38.697.521.641,41
	b) Koreksi Silpa	0,00	98.750.824,00
	Jumlah Arus Kas Bersih	**0,00**	**(98.750.824,00)**

Penerimaan perhitungan fihak ketiga sudah termasuk penerimaan dari pemotongan PPh dan PPN dari pembayaran SP2D untuk pihak ketiga. Pemungutan PPh dan PPN atas pembayaran kepada pihak ketiga melalui mekanisme SP2D LS kepada rekanan dilakukan oleh BUD/Kuasa BUD dengan memotong dan menyetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Negara atas pajak yang dipotong.

5.5.5. Saldo Akhir Kas

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp63.373.858.997.87	Rp172.195.177.661,30

Saldo akhir kas adalah merupakan saldo akhir kas di BUD, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di BLUD, Kas di Bendahara FKTP, Kas di Bendahara BOS dan Kas Lainnya, seperti dirinci pada Tabel 5.63.

Tabel 5.62 Saldo Akhir Kas

No.	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
1	Kenaikan/ (Penurunan) Kas	**(108.853.377.704.43)**	**75.252.592.060,00**
2	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan	**171.934.953.658,30**	**96.682.361.598,30**
3	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas BLUD, Kas Bendahara FKTP, Kas di Bendahara BOS	**63.081.575.953.87**	**171.934.953.658,30**
	Kas di BUD	60.277.065.923,07	146.115.158.709,50
	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran	953.864,00	5.391.500,00
	Kas di BLUD	1.807.065.832,00	22.945.373.571,00

No.	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
	Kas di Bendahara FKTP	32.622.708,00	1.882.826.085,00
	Kas di Bendahara Dana BOS	963.867.626.80	986.203.792,80
	Kas Lainnya	292.283.044,00	260.224.003,00
	Setara Kas	0,00	0,00
	Saldo Akhir Kas	**63.373.858.997.87**	**172.195.177.661,30**

5.6. Penjelasan Atas Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun Anggaran 2022 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021.

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan jumlah kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berjalan dibandingkan dengan tahun lalu. Laporan Perubahan Ekuitas Kabupaten merupakan konsolidasi dari Laporan Perubahan Ekuitas pada Seluruh SKPD di Kabupaten Tapanuli Utara. Rincian Perubahan Ekuitas yang terjadi selama tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.63 Rincian Saldo Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021	Peningkatan/ (Penurunan)	(%)
1.	Ekuitas Awal	2.273.982.489.647,21	2.119.645.522.166,86	154.336.967.480.35	7,28
2.	Surplus/ Defisit-LO	(48.813.571.885,09)	94.313.761.557,92	(143.127.333.443,01)	(151,76)
3.	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Koreksi Ekuitas Lainnya	46.000.636.582.66	60.023.205.922,43	(14.022.569.339,77)	(23,36)
Ekuitas Akhir		**2.271.169.554.344,78**	**2.273.982.489.647,21**	**(2.812.935.302,43)**	(0.12)

5.6.1. Ekuitas Awal

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp2.273.982.489.647.21	Rp2.119.645.522.166,86

Ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.273.982.489.647.21 yang merupakan ekuitas akhir per 31 Desember 2021. Saldo Ekuitas awal Tahun 2022 lebih tinggi sebesar Rp154.336.967.480.35 atau 7,28% dibandingkan saldo ekuitas awal tahun 2021.

5.6.2. Surplus/Defisit –LO

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp48.813.571.885,09)	Rp94.313.761.557,92

Operasional Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengalami defisit Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp48.813.571.885,09) yang merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan beban. Pada Tahun Anggaran 2021 operasional Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengalami surplus sebesar Rp94.313.761.557.92 sehingga terjadi kenaikan defisit pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp143.127.333.443,01 atau 151,76%.

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp46.000.636.582.66	Rp60.023.205.922,43

Saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp46.000.636.582.66 dan Rp60.023.205.922,43 mengalami penurunan sebesar Rp9.547.456.282.99 atau 23,36%.

5.6.4. Ekuitas Akhir

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp2.271.169.554.344,78	Rp2.273.982.489.647,21

Saldo ekuitas akhir Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.271.169.554.344,78 dan Rp2.273.982.489.647,21, atau mengalami penurunan sebesar Rp2.812.935.302,43 atau 0,12%. Saldo ekuitas akhir tersebut terdiri dari ekuitas awal sebesar Rp2.273.982.489.647.21 ditambah surplus/ defisit-LO sebesar (Rp48.813.571.885,09) dan ditambah koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp46.000.636.582.66.

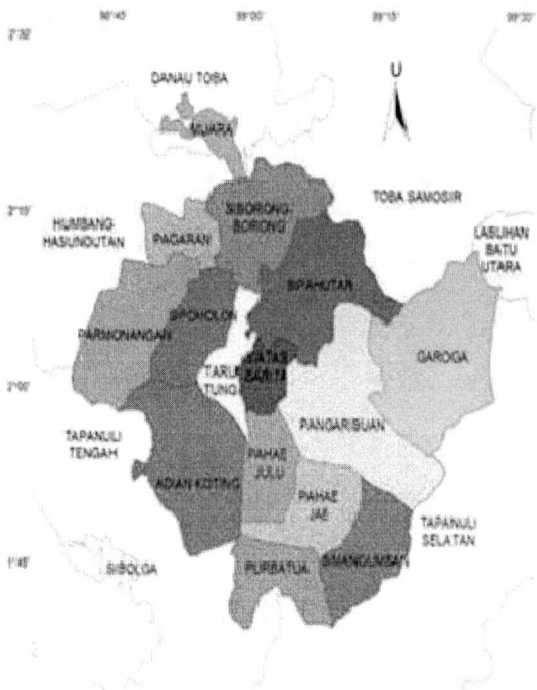
BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH

6.1. Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Tapanuli Utara

Kabupaten Tapanuli Utara dan pemekerannya dibentuk berdasarkan Undang-undang:

1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.

6.2. Letak Geografis



Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu bagian dari wilayah Provinsi Sumatera Utara, 1°20'00" - 2°41'00" Lintang Utara dan 98°05'-99°16' Bujur Timur dengan luas wilayah 3.800,31 km² (sudah termasuk perairan Danau Toba yang berada di Kecamatan Muara seluas 6,60 km2) dengan jumlah penduduk 284.148 jiwa. Kabupaten Tapanuli Utara dikelilingi oleh lima kabupaten, yakni sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir, sebelah timur berbatasan dengan Labuhan Batu, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Secara administratif, Kabupaten Tapanuli Utara terbagi dalam 15 kecamatan 241 Desa dan 11 Kelurahan. Dari 15 kecamatan yang ada, kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Garoga dengan luas sekitar 567,58 Km² atau 14,96 persen dari luas Kabupaten Tapanuli Utara, dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Muara dengan luas sekitar 79,75 Km² atau 2,10 persen.

Tabel 6.1 Luas Wilayah per Kecamatan

Kecamatan	Luas (Km2)	Rasio Terhadap Total (%)
Parmonangan	257,35	6,78
Adiankoting	502,90	13,26
Sipoholon	189,20	4,99
Tarutung	107,68	2,84
Siatas Barita	92,92	2,45
Pahae Julu	165,90	4,37
Pahae Jae	203,20	5,36
Purbatua	191,80	5,06
Simangumban	150,00	3,95
Pangaribuan	459,25	12,10
Garoga	567,58	14,96
Sipahutar	408,22	10,76
Siborongborong	279,91	7,38
Pagaran	138,05	3,64
Muara	79,75	2,10
Tapanuli Utara	**3.793,71**	**100,00**

Topografi dan kontur tanah Kabupaten Tapanuli Utara beraneka ragam yaitu yang tergolong datar (3,16 persen), landai (26,86 persen), miring (25,63 persen) dan terjal (44,35 persen).

Berdasarkan topografinya daerah ini berada dijajaran Bukit Barisan dengan keadaan tanah umumnya berbukit dan bergelombang, hanya sekitar 9,66 % dari keseluruhan luas wilayah yang berbentuk datar dan berada pada ketinggian 300-2.000 m di atas permukaan laut.

Menurut ketinggian di atas permukaan laut (dpl)

1	300 – 500 m	: 13.784 Ha	3,63 %
2	500 – 1.000 m	: 148.072 Ha	39,03 %
3	1.000 – 1.500 m	: 216.919 Ha	57,18 %
4	1.500 m – keatas	: 596 Ha	0,16 %
	Jumlah	: 379.371 Ha	100 %

Menurut kemiringan/kelerengan tanah

1	Datar (0 s.d. 2 %)	: 11.976 Ha	3,16 %
2	Landai (2 s.d. 5 %)	: 101.903 Ha	26,86 %

3	Miring (15 s.d. 40 %)	: 97.230 Ha	25,63 %
4	Terjal (45 %)	: 168.262 Ha	44,35 %
	Jumlah	: 379.371 Ha	100 %

Kabupaten Tapanuli Utara merupakan daerah dengan potensi alam antara lain luasnya lahan kering untuk dijadikan persawahan baru dengan membangun irigasi. Sebagian perairan Danau Toba yang dimiliki dan sungai yang cukup banyak untuk dimanfaatkan potensinya untuk irigasi, pengembangan perikanan maupun pembangkit tenaga listrik. Keindahan alam dengan panorama, khususnya Pulau Sibandang di kawasan Danau Toba di Kecamatan Muara dan wisata rohani Salib Kasih. Kekayaan seni budaya asli merupakan potensi daerah dalam upaya mengembangkan kepariwisataan nasional. Potensi lain terdapat berbagai jenis mineral, seperti kaolin, batu gamping, belerang, batu besi, mika, batubara, panas bumi, dan sebagainya.

6.3. Visi dan Misi

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun 2020 mengacu pada Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 yang merupakan operasionalisasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019–2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024.

Berdasarkan aturan tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan visi "***Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata***" serta implementasi dari misi Kabupaten Tapanuli Utara, yakni:

1. Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan;
2. Pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbasis pertanian dan sumber daya lokal;
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan;
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pelatihan tenaga kerja, pemanfaatan IPTEK dan pengembangan jiwa kewirausahaan;
5. Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani, dan agrowisata;
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/ wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup;
7. Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri;
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan system *e-government.*

6.4. Organisasi dan Personalia

Organisasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara meliputi 29 Bidang Pemerintahan, terdiri dari 6 Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan 12 Bidang Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, 3 Bidang Urusan Pilihan dan 8 Bidang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang meliputi 45 Unit Organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebagai berikut:

6.4.1. Urusan dan Bidang

Tabel 6.2 Urusan dan Bidang

Kode	Urusan dan Bidang
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**
1 . 01	Pendidikan
1 . 02	Kesehatan
1 . 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 . 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1 . 05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
1 . 06	Sosial
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**
2 . 01	Tenaga Kerja
2 . 03	Pangan
2 . 05	Lingkungan Hidup
2 . 06	Administrasi Kependudukan dan Capil
2 . 07	Pemberdayaan Masyarakat Desa
2 . 08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 . 09	Perhubungan
2 . 10	Komunikasi dan Informatika
2 . 11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 . 12	Penanaman Modal
2 . 13	Kepemudaan dan Olah Raga
2 . 17	Perpustakaan
3	**Urusan Pilihan**
3 . 02	Pariwisata
3 . 03	Pertanian
3 . 07	Perindustrian

Kode	Urusan dan Bidang
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**
4 . 01	Administrasi Pemerintahan
4 . 02	Pengawasan
4 . 03	Perencanaan
4 . 04	Keuangan
4 . 05	Kepegawaian
4 . 06	Sekretariat DPRD
4 . 07	Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan
4 . 08	Kesatuan Bangsa dan Politik

6.4.2. Unit Organisasi (OPD)

Tabel 6.3. Unit Organisasi (OPD)

No.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan
3	Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	Satuan Polisi Pamong Praja
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Dinas Sosial
9	Dinas Ketenagakerjaan
10	Dinas Ketahanan Pangan
11	Dinas Lingkungan Hidup
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	Dinas Perhubungan
16	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga
21	Dinas Perpustakaan
22	Dinas Pariwisata
23	Dinas Pertanian
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
25	Sekretariat Daerah
26	Inspektorat
27	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
28	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
30	Badan Pendapatan Daerah
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
32	Sekretariat DPRD
33	Kantor Kecamatan Tarutung
34	Kantor Kecamatan Siatas Barita
35	Kantor Kecamatan Adiankoting
36	Kantor Kecamatan Sipoholon
37	Kantor Kecamatan Pahae Julu
38	Kantor Kecamatan Pahae Jae
39	Kantor Kecamatan Purbatua
40	Kantor Kecamatan Simangumban
41	Kantor Kecamatan Sipahutar
42	Kantor Kecamatan Pangaribuan
43	Kantor Kecamatan Garoga
44	Kantor Kecamatan Siborongborong
45	Kantor Kecamatan Pagaran
46	Kantor Kecamatan Parmonangan
47	Kantor Kecamatan Muara
48	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
49	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

6.4.3. Pejabat Pemerintah Daerah

a. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 35 Anggota, yang berasal dari berbagai unsur Partai Politik (Parpol) pemenang Pemilu. Nama-nama pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Ketua DPRD : Arifin Rudi Nababan, SH
2. Wakil Ketua : Fatimah Hutabarat, SE
3. Wakil Ketua : Ir. Reguel Simanjuntak
4. Ketua Komisi A : Maradona simanjuntak, A.Md
5. Ketua Komisi B : Ombun Simanjuntak
6. Ketua Komisi C : Antonius Tambunan, S.P

b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (KDh/WKDh)

Untuk periode 2019 sampai dengan 2024, Kabupaten Tapanuli Utara dipimpin oleh Bupati Drs. Nikson Nababan, M.Si dan Wakil Bupati Sarlandy Hutabarat, SH, MM yang dipilih secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara pada pemilihan kepala daerah tahun 2018.

6.5. Informasi Tambahan Penyajian Laporan Keuangan

1. Penyajian Nilai Jaminan Pemeliharaan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (Perubahan Keempat), pembayaran termin terakhir atas penyerahan pekerjaan yang sudah jadi dari Pihak Ketiga, dapat dilakukan melalui dua (2) cara yaitu:

a. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan.

b. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia barang/jasa harus menyerahkan jaminan bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai 8 program asuransi kerugian (*surety bond*) dan direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan.

2. Penyajian Nilai Aset

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam melakukan penilaian terhadap aset tetap dalam laporan keuangan tahun 2022 telah melaksanakan penyusutan sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, guna mengimplementasikan ketentuan tersebut Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah menerbitkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah menerbitkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Nilai aset tetap yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ini merupakan Saldo Awal TA. 2022 ditambah nilai perolehan aset tetap pada Tahun Anggaran 2022, penambahan aset tetap juga terjadi dikarenakan adanya reklasifikasi dan inventarisasi aset.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah melaksanakan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang melibatkan seluruh pengurus barang pengguna SKPD yang akan dilanjutkan pengentrian melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) pada masing-masing SKPD.

Beberapa hal yang menyebabkan pertambahan dan pengurangan nilai aset tetap adalah:

1. Penambahan nilai aset tetap disebabkan adanya:
   a. pengadaan belanja modal aset tetap Tahun Anggaran 2022;
   b. mutasi pencatatan antar SKPD;
   c. nilai pencatatan rincian aset yang belum tercatat pada buku inventaris aset Tahun Anggaran 2022;
   d. Hibah dari pihak ketiga.
2. Pengurangan nilai aset tetap disebabkan adanya:
   a. Koreksi nilai aset tetap atas keadaan fisik yang sebenarnya;
   b. Koreksi nilai aset tetap atas pencatatan berulang;
   c. Koreksi atas kesalahan pencatatan nilai aset tetap;
   d. Pengelompokan aset tetap yang rusak berat dicatat menjadi nilai aset lainnya;
   e. Pencatatan mutasi antar SKPD.

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM Pegawai Negeri Sipil per akhir Tahun Anggaran 2022 sebanyak 4.717 orang dengan rincian sebagai berikut:

-	Golongan IV	=	1.049 Orang
-	Golongan III	=	2.788 Orang
-	Golongan II	=	856 Orang
-	Golongan I	=	24 Orang
-	Jumlah		4.717 Orang

4. Kebijakan Yang Ditempuh Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Organisasi

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas secara sinergis, baik di lingkungan unit kerja maupun antar SKPD, maka dalam Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menempuh kebijakan sebagai berikut:

a. Mengangkat dan menetapkan beberapa Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan pelaksanaan, pengendalian sampai pertanggungjawaban anggaran, yang penetapannya, dilaksanakan dengan menetapkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran;

b. Mengangkat dan menetapkan Kuasa Bendahara Umum Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran sesuai kebutuhan, Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai kebutuhan, serta Bendahara Barang SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tapanuli Utara atas usul masing-masing Kepala SKPD;

c. Merumuskan dan melaksanakan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas-tugas operasional pada tiap-tiap SKPD yang ditetapkan dengan keputusan masing-masing Kepala SKPD;

d. Merumuskan dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelaksanaan tugas-tugas pelayanan, khusus untuk beberapa SKPD yang secara ketentuan diwajibkan menetapkan standar pelayanan minimal kepada masyarakat.

BAB VII
PENUTUP

Dari uraian diatas, maka Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2022, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi pendapatan sebesar Rp1.311.206.689.495,70 atau 98,27% dari target sebesar Rp1.334.353.095.216,00, kurang realisasi sebesar Rp23.146.405.720,30 atau 1,73%;
2. Realisasi belanja sebesar Rp1.429.139.214.177,15 atau 94,76% dari anggaran sebesar Rp1.508.231.909.779,00 kurang realisasi sebesar Rp79.092.695.601,85 atau 5,24%;
3. Realisasi pembiayaan neto sebesar Rp181.014.100.635,32 dari anggaran sebesar Rp173.878.814.563,00 atau 104,10%;
4. Jumlah Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2022 sebesar Rp63.081.575.953,87;
5. Jumlah Aset Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.672.886.738.436,92 dibandingkan dengan jumlah aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.661.938.022.490,57 mengalami kenaikan sebesar Rp410.948.715.946,35 atau 0,41% dari tahun sebelumnya;
6. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.420.465.954.514,77 dibandingkan dengan jumlah aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.295.541.664.511,42 mengalami kenaikan sebesar Rp124.924.290.003,35 atau 5,44% dari tahun sebelumnya;
7. Surplus/defisit LO Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar (Rp48.813.571.885,09) (surplus sebelum pos luar biasa sebesar Rp35.871.154.685,09 + surplus/defisit dari pos luar biasa sebesar Rp12.942.417.200,00);
8. Ekuitas Akhir sebesar Rp2.271.169.554.344.78 (Ekuitas Awal sebesar Rp2.273.982.489.647,21 + surplus LO sebesar (Rp48.813.571.885,09) + Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp46.000.636.582,66;
9. Saldo Akhir Kas adalah Saldo Akhir Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara FKTP, Kas di Bendahara Dana BOS dan Kas Lainnya Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp63.373.858.997,87;
10. Selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengalami penurunan kas sebesar Rp108.853.377.704.43 sedangkan pada tahun 2021 kenaikan kas sebesar Rp75.252.592.060,00.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini disusun sebagai media pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan ini mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan dan juga mengacu kepada Standar Akuntasi Pemerintahan yang diberlakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2022 ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkomitmen untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

Tarutung, 14 April 2023
BUPATI TAPANULI UTARA,

Drs. NIKSON NABABAN, M.Si